SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. program;
    b. kegiatan;
    c. sub kegiatan;
    d. lokasi;
    e. kelompok sasaran;
    f. indikator kinerja; dan
    g. pendanaan,

    sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.	BAB I	:	Pendahuluan;
b.	BAB II	:	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
c.	BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d.	BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e.	BAB V	:	Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 31

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA 2025

0274 774535
pendidikan@kulonprogokab.go.id
Wates, Kulon Progo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan ***Rencana Kerja (Renja)*** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan. Rankhir Renja dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Rankhir Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan skala prioritas dengan besaran anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Demikian dokumen ***Renja Tahun 2025*** ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025

Wates, 02 Agustus 2024
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NUR WAHYUDI, M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19690705 198903 1005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I. PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023..... 10

2.1 Hasil Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Renja Tahun 2023..... 10

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 53

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 54

3.3 Program dan Kegiatan 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60

4.1 Rencana Kerja 60

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan 61

BAB V PENUTUP..... 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 10

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja..... 14

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

Tabel 2.4. Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga..... 26

Tabel 2.5. Jumlah Cabang Olah Raga 26

Tabel 2.6 Perolehan Medali …….. 27

Tabel 2.7 Prestasi Pemuda Kulon Progo 27

Tabel 2.8. Penyandingan Permasalahan/Isu Strategis dan Intervensi Program.. 29

Tabel 2.9. Riviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 33

Tabel 2.10. Daftar Usulan Kapanewon 43

Tabel 2.11. Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... 44

Tabel 3.12 Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM) 54

Tabel 3.13 Indikator Kinerja Utama Program 56

Tabel 3.14 Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi 57

Tabel 3.15 Rancangan Akhir Rencana Kerja ……. 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, serta sejalan dengan tujuan RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya” yang diselaraskan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 yaitu “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin”.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023– 2026;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kulon Progo Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, adalah untuk:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kepada Kepala Daerah.
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

a. Latar Belakang

   Menguraikan tentang pengertian ringkas Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

b. Landasan Hukum

   Menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

   Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

d. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusuna Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab II berisi Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

Bab III berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana kerja, serta capaian kinerja yang telah direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yaitu indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal / Kesetaraan, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Capaian Penerapan PPK Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Cakupan Prestasi Generasi Muda dan Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Capaian IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	(Angka Partisipasi PAUD x 25%) + (Angka Partisipasi Paket A x 15%) + (Angka Partisipasi Paket B x 20%) + (Angka Partisipasi Paket C x 20%) + (Angka Partisipasi Keaksaraan Fungsional x 20%)	Nilai	17,30	17,32	100.12
2	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	(Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun di Jenjang SD/MI / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	%	93,80	93,82	100.02
3	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di Jenjang SMP/MTs / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	%	95,42	95,43	100.01
4	Angka Melek Huruf	Proposi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana	%	95,47	95,89	100.44

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
		dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas				
5	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	(Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2	Nilai	1,94	-	-
6	Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	(Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional + Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional)/ 2	Nilai	1,99	-	-
7	Capaian penerapan PPK jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	(Jumlah peserta didik TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs yang telah tamat/tuntas/khatam / Jumlah peserta didik kelas B TK/RA, kelas VI SD/MI, kelas IX SMP/MTs) x 100%	%	47,84	47,62	101,56
8	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	((Jumlah Pemuda berprestasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) + ((Jumlah Atlet berpretasi tingakat Provinsi atau Nasional / Jumlah Atlet peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%) /2))	%	74,34	94,77	127,48
9	Rata-rata persentase	(Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	%	100,00	100,00	100.00

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
	pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	Kinerja Perangkat Daerah + Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + CakupanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah + Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) /7				

Sumber Data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2024

Realisasi Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 18,13% atau selisih 0,83% dari target 17,30%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104.80%. Faktor pendorong kenaikan persentase tersebut karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia 0 – 6 tahun meningkat. Faktor pendukung lainnya adalah ketertarikan sebagian masyarakat kepada keberadaan lembaga-lembaga non formal yang semakin mudah untuk diakses.

Realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 89,09% atau selisih (4,71%) dari target 93,80%. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 92,64% atau selisih (2,78%) dari target 95,42%. Artinya, kinerja Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD maupun SMP tidak mencapai target. Kinerja Angka Partisipasi Murni SD sebesar 94,98%, sedangkan jenjang SMP sebesar 97,09%. Faktor penyebab kinerja tidak tercapai adalah masih ditemukan peserta didik dibawah usia yang ditentukan, artinya antusiasme orang tua menyekolahkan anak tinggi, dan tidak memperhatikan batasan usia yang ditentukan.

Untuk Capaian Penerapan PPK Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs 47,86% atau selisih 0,02% dari target 47,84%. Faktor pendorong kenaikan persentase ini menunjukkan bahwa peserta didik yang telah khatam/tuntas di jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs sangat tinggi. Cakupan Prestasi Generasi Muda 81,28 atau selisih 6,94% dari target 74,34% dan Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah 100%.

Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional dan Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional (Pendidikan dasar) tidak bisa dibandingkan dengan target karena adanya formulasi perhitungan dari basis 1-3 menjadi basis 100. Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD jika targetnya dikonversikan ke basis 100, maka targetnya 52,86, sehingga capaian kinerjanya menjadi: 138,06%, sedangkan indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional jika target dikonversikan ke basis 100, maka targetnya 76,83, sehingga capaian kinerjanya menjadi: 97,49%.

Capaian Kinerja Renja tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2023. Jumlah program, kegiatan, subkegiatan tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo:

Jumlah Program : 5
Jumlah Kegiatan : 16
Jumlah Sub Kegiatan : 63

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Subkegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***		**100**	100	100	100	100	100	300	300
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***		**94**	23	23	23	100	23	69	73.40
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	(Dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	(Laporan)	84	21	21	21	100	21	63	75
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu***	**laporan**	**56**	14	14	14	100	14	42	75
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	(Orang/bulan)	3414	3414	3414	3414	100	3414	10242	100
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	(Dokumen)	4	1	1	1	100	1	3	75

1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	(Laporan)	56	14	14	14	100	14	42	75
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***	**dokumen**	**8**	2	2	2	100	2	6	75
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	(Dokumen)	4	1	1	1	100	1	3	75
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	(Orang)	28	7	7	7	100	7	21	75
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***jumlah dokumen administrasi umum***	**dokumen**	**8**	2	2	2	100	2	6	75
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	(Paket)	16	4	4	4	100	4	12	75
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***jumlah penambahan aset***		**40**	10	10	10	100	10	30	75
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	(unit)	40	10	10	10	100	10	30	75
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**laporan**	**96**	24	24	24	100	24	72	75
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***	**laporan**	**12**	3	3	3	100	3	9	75

1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	(Unit)	41	39	39	39	100	39	117	285.37
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	(Unit)	3	3	3	3	100	3	9	300
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	(Unit)	237	240	240	240	100	240	720	303.80
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase SD/ MI Terakreditasi A***	**%**	**66.03**		65.22		0	65.49	65.49	99.18
		Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A	**%**	**73.75**		70		0	71.25	71.25	96.61
		Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	**%**	**35.63**		34.56		0	65.49	65.49	183.81
		Indeks Kapasitas Ketenagaan	**poin**	**87.31**		86.8		0	86.98	86.98	99.62
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Jumlah SD/MI Terakreditasi A***	**SP**	**243**		240		0	241	241	99.18
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	1		1	1	100	1	2	200.00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	140250		35250	35250	100	35200	70450	50.23
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta Didik	12000		3000	3000	100	3000	6000	50.00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	Orang	1485		3076	3076	100	526	3602	242.56
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	796		3076	3076	100	1199	4275	537.06
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	Satuan Pendidikan	377		337	337	100	335	672	178.25

1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	Orang	350		350	350	100	2449	2799	799.71
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	Orang	200		0	0	0	50	50	25.00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	1		0	0	0	1	1	100.00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Satuan Pendidikan	30		0	0	0	1	1	3.33
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	unit	48		10	10	100	13	23	47.92
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	450		0	0	#DIV/0!	450	450	100.00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Satuan Pendidikan	337		337	337	100	335	672	199.41
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***jumlah SMP/MTs terakreditasi A***		**59**		56		0	57	57	96.61
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	7		3	3	100	2	5	71.43
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Unit	4		3	3	100	1	4	100.00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	72992		18248	18248	100	18248	36496	50.00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta Didik	16000		4000	4000	100	3700	7700	48.13
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	Orang	96		1273	1273	100	780	2053	2138.54

1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	872		872	872	100	872	1744	200.00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	Satuan Pendidikan	65		65	65	100	67	132	203.08
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	Orang	520		130	130	100	160	290	55.77
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	dokumen	8		0	0	#DIV/0!	2	2	25.00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	Satuan Pendidikan	60964		15421	15421	100	81	15502	25.43
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	240		0	0	0	60	60	25.00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	Orang	320		0	0	0	80	80	25.00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	4		0	0	0	1	1	25.00
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	***Jumlah PAUD terakreditasi***		**303**		297		0		0	0.00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Unit	6		13	13	100	1	14	233.33
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	peserta didik	1458		390	390	100	376	766	52.54
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	Peserta Didik	68427		16056	16056	100	17457	33513	48.98

1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	Orang	2750		2750	2750	100	182	2932	106.62
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	3319		814	814	100	330	1144	34.47
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	Satuan Pendidikan	830		830	830	100	830	1660	200.00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	Orang	3305		829	829	100	829	1658	50.17
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	1		0	0	0	1	1	100.00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	orang	150		0	0	0	1	1	0.67
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	814		0	0	0	814	814	100.00
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Jumlah PNF terakreditasi***	**lembaga**	**26**		23		0	24	24	92.31
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	920		230	230	100	230	460	50.00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Orang	353		353	353	100	23	376	106.52
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	20		20	20	100	10	30	150.00

1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	Satuan Pendidikan	35		35	35	100	12	47	134.29
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	Orang	120		13	13	100	10	23	19.17
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Peserta Didik	240		90	90	100	50	140	58.33
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi***	**%**	**80.21**		68.75		0	68.75	68.75	85.71
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	***Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional***	**%**	**92**		75		0	83.33	83.33	90.90
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	20		5	5	100	5	10	50.00
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	320		80	80	100	80	160	50.00
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	20		5	5	100	35	40	200.00
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Organisasi Pemuda yang aktif***	**%**	**68.75**		62.5		0	62.5	62.5	90.91
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan*	Dokumen	28		7	7	100	7	14	50.00

2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif dan atlet berprestasi***	**%**	**88.16**					86.84	86.84	98.50
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olah raga***	**unit**	**3**		3	3	100	3	6	200.00
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	Unit	3		3	3	100	4	7	233.33
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	***Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan***	**orang**	**76.32**		74	74	100	744	818	1071.80
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan*	Orang	744		744	744	100	744	1488	200.00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter***	***%***	**100**		0	0	0	0	0	0.00
2.22.08.5.08	**Pendidikan Berbasis Budaya**	***Pendidikan Berbasis budaya yang berkualitas***	***%***	**100**		0	0	0	0	0	0.00
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	laporan	12		0	0	0	0	0	0.00

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel 2.2 TC-29, Indikator program yang mencapai/melebihi target adalah Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi dan Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan. Target Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi adalah 34,56%, terealisasi 55,84%. Artinya capaian kinerja indikator tersebut sebesar 161,67%. Kenaikan realisasi ini didukung oleh adanya peningkatan akreditasi PAUD sejumlah 498 satuan Pendidikan. Target Indikator indeks peningkatan kapasitas ketenagaan sebesar 86,60. Realisasi indikator tersebut sebesar 87,71 atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 101,28%. Peningkatan realisasi didukung oleh penambahan Jumlah Pendidik TK, SD, dan SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV.

Sebaliknya, indikator yang tidak mencapai target adalah persentase SD terakreditasi A dan persentase SMP terakreditasi A. Realisasi persentase SD terakreditasi A adalah 60,76%, sedangkan targetnya sebesar 65,22%. Artinya kinerja indikator tersebut hanya sebesar 93,17%. Faktor penghambat capaian kinerja persentase SD terakreditasi A adalah jumlah sekolah akreditasi A, yang ditargetkan sejumlah 246 hanya tercapai 223 satuan Pendidikan. Demikian juga untuk indikator persentase SMP terakreditasi A. Target yang ditetapkan sebesar 70%, terealisasi 67,47**.** Artinya capaian kinerja indikator tersebut hanya sebesar 96,39%. Faktor penghambat kinerja yang tidak tercapai adalah jumlah sekolah terakreditasi A tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena indikator-indikator yang ada dalam penilaian akreditasi belum terpenuhi.

Pada sub urusan Olah Raga, capaian kinerja program pengembangan kapasitas daya saing olah raga sebesar 81,28%. Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 86,84% atau dengan kata lain kinerja tahun 2023 sebesar 93,60%. Penyebab tidak tercapainya target program tersebut adalah perkembangan jumlah organisasi olah raga yang masih dibawah target yang ditetapkan, meskipun jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penambahan 1 (satu) organisasi olah raga yaitu Hopkido. Komponen lain yang mempengaruhi adalah perbandingan (rasio) antara jumlah atlet yang berprestasi dengan atlet yang bertanding. Rasio atlet yang memperoleh juara terhadap atlet yang bertanding hanya sebesar 62,56%, artinya dari 2 (dua) atlet yang dikirimkan hanya 1 (satu) atlet yang memperoleh kemenangan.

Sub urusan Pemuda menunjukkan peningkatan capaian kinerja program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, yaitu sebesar 100%. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 68,75% atau dengan kata lain kinerja tahun 2023 sebesar 145,45%. Tercapainya target program didorong oleh perkembangan jumlah organisasi kepemudaan yang ditargetkan sebanyak 10 organisasi terealisasi 19 organisasi. Komponen lain yang mempengaruhi adalah perbandingan (rasio) antara jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi/nasional terhadap jumlah pemuda yang ikut serta dalam lomba kepemudaan tingkat provinsi/nasional. Rasio pemuda berprestasi tingkat provinsi/nasional sebesar 100, artinya seluruh peserta yang dikirimkan mampu meraih prestasi.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

Standar pelayanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan, serta Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, berikut capaian kinerja tahun 2023 dan Proyeksi kinerja tahun 2024-2026 untuk masing-masing indikator.

Tabel 2.3
T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor kemampuan literasi jenjang SD	100						69,13	70,21	71.28	73.2*	Target Tahun 2024-2025 didasarkan pada Berita Acara Hasil Rakortek daerah Provinsi DIY tahun 2024
2	Skor kemampuan literasi jenjang SMP	100						77,33	80,40	84.79	88.5*	
3	Skor kemampuan numerasi jenjang SD	100						51,46	53,19	54.92	58*	
4	Skor kemampuan numerasi jenjang SMP	100						67,53	76,01	77.01	78.01*	
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	100	100					98,73	100	100	100	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	100	100					99,48	100	100	100	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	100	100					9,24	100	100	100	
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100						75,37	75,43	75,46	75,48*	
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100						81,08	82,18	83,08	84,08*	
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD	100						56,61	62,50	64,65	66,65*	
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP	100						58,76	61,59	63,66	65,66*	
12	Iklim Keamanan jenjang SD	100						75,18	81,01	82.95	83.95*	
13	Iklim Keamanan jenjang SMP	100						73,31	78,46	80.4	82.4*	
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD	100						75,90	77,59	84.47	86.47*	
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP	100						76,02	78,67	81.32	83.32*	
16	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri							1,49	1.56	1.75	1.76*	
17	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan							22.48	35.3	75.79	75.8*	
18	Peningkatan prestasi olah raga							0.24	1	1	1	

Sumber Data: BA Rakortek Daerah Provinsi DIY, 2024

2.2.1. Urusan Pendidikan

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi layanan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS jenjang pendidikan dasar pada Tahun 2023 sebesar 99.48 %. APS pendidikan dasar di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 (tujuh) Tahun (masih usia PAUD

dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Kemampuan literasi numerasi merupakan ukuran atau indikator yang mencerminkan kualitas hasil belajar. Capaian kemampuan literasi numerasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dengan capaian yang bervariasi yaitu tahun 2019 sebesar 86,98%, tahun 2020 naik sebesar 89,4%, tahun 2021 meningkat menjadi 89,45%, tahun 2022 meningkat menjadi 89,61% dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 89,8%.

Selain ukuran kuantitas dan kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar menjadi ukuran penting berikutnya. Iklim lingkungan belajar yang saat ini menjadi ukuran adalah iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Capaian kinerja iklim lingkungan belajar diukur melalui assesmen nasional. Pada tahun 2023, capaian kinerja iklim lingkungan belajar jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami perbaikan.

2.2.2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi mandiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional,

diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional. Adanya kegiatan keolahragaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendukung kinerja olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.4.

Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Organisasi pemuda	16	16	16	19	19
2	Organisasi Olahraga	42	42	45	45	46
3	Klub Olahraga	280	280	280	148	173
4	Kegiatan Pemuda	6	4	4	4	2
5	Kegiatan Olahraga	4	5	6	8	10

*Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 202*4

Tabel 2.5

Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	27	28	45	45	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	21	21	32	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	27	28	28	32	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	16	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup baik. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo

dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Prestasi Pemuda Kulon Progo

Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	16	16	17	9
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	12	8	8	15	9

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Walaupun ditahun 2023 mengalami penurunan dalam pengiriman pemuda yaitu 9 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kulon Progo antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, namun semua bidang sesuai minat, bakat dan karakteristiknya (non akademik), sehingga menjadi daya tarik khusus untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, mewujudkan sekolah yang menyenangkan, SDM yang sehat, berbudaya sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, standar pelayanan minimal, serta pendidikan yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh warga. Dimana hal ini terwujud seiring terpenuhinya standar nasional pendidikan dan akreditasi satuan pendidikan, tentu atas peran serta aktif dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha – Dunia Industri, Tokoh Masyarakat, Orang Tua/Wali, serta masyarakat secara umum.
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien, dari tingkat Dinas, kecamatan/gugus, satuan pendidikan, kelompok-kelompok, cabang olahraga maupun satuan terkecil lainnya, dalam upaya mensinkronisasi aktivitas manajemen yang terpadu (tidak terkotak-kotak). Hal ini termasuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, organisasi yang terbentuk,

program kemitraan yang saling mendukung, serta penerapan standar pengelolaan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

4. Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka intervensi yang direncanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Penyandingan Permasalahan/ Isu Strategis dengan Intervensi Program

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
1	Pengembangan pendidikan karakter	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang SD dan SMP. 2. Pembinaan Muatan Lokal.
2	Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik. 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan. 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 5. Pengadaan Mebel. 6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik. 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah. 8. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
3	Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, dan	1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan. 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
	keolahragaan yang lebih efektif dan efisien.	3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP. 4. Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota. 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula. 7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota. 8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota. 9. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota. 10. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota. 11. Seleksi Atlet Daerah.
4	Peningkatan kualitas hasil belajar.	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan.

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
		2. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan. 3. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan. 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan. 6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan. 7. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.
5	Penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.	1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah. 2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan. 3. Pengembangan konten digital untuk pendidikan. 4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap RKPD dan analisis kebutuhan menunjukkan adanya perubahan jumlah kegiatan dalam beberapa program namun juga terdapat beberapa sasaran baru hasil analisis yang tidak terdapat pada rancangan awal.

Pengurangan dan penambahan sub kegiatan baru tersebut didasarkan pada: pertama Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; kedua, penetapan target kinerja indikator prioritas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rakortek Daerah Provinsi DIY tanggal 28 Maret 2024; ketiga hasil kajian terhadap tingkat kepentingan setiap sub kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas sub kegiatan yang dapat menghasilkan kontribusi langsung terhadap capaian sasaran program di tahun 2025; keempat adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.9-TC 31

Riviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kabupaten Kulon Progo**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kabupaten Kulon Progo**				
01:01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**Kabupaten Kulon Progo**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**Kabupaten Kulon Progo**				
01:01:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**227,299.87**	
1.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (dokumen)*			*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	25	*334.79*	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen	4	50.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	25.89	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	21	615.80	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	308.91	
1.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (laporan)*	14		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	14	*246,459.30*	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	3,414	259,064.17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,414	244,936.62	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1	1,875.50	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,448.08	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan (laporan)	14	950.59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	14	74.60	
1.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (dokumen)*			*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	2	*33.99*	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1	80.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	19.60	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	60.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	14.39	
1.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen administrasi umum (dokumen)*			*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen administrasi umum*	2	*202.79*	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	105.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	58.26	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	110.30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	144.53	
1.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah penambahan aset (unit)*			*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah penambahan aset*	10	*1,500.00*	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	105.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1,500.00	
1.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)*			*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	24	*1,617.29*	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	355.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	343.20	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	1,810.45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,274.09	
1.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (laporan)*	3	*399.85*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	3	*412.67*	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	39	360.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	249.10	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	60.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	9,854.00	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	240	*153.72*	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
01:01:02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase SD/ MI Terakreditasi A**	**65.22**	***234,800.56***	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase SD/ MI Terakreditasi A**	**65.76**	***41,192.63***	
		Kabupaten Kulon Progo	**Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A**	**70.00**			**Kabupaten Kulon Progo**	**Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A**	**72.50**		
		Kabupaten Kulon Progo	**Persentase PNF Terakreditasi dan PAUD Terakreditasi**	**34.56**			**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase PNF Terakreditasi dan PAUD Terakreditasi**	**35.27**		
		Kabupaten Kulon Progo	**Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan**	**86.80**			**Kabupaten Kulon Progo**	**Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan**	**87.15**		
1.01.02.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*		*Jumlah SD/ MITerakreditasi A (Sekolah)*	241	*117,384.22*	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*		*Jumlah SD/ MITerakreditasi A*	242	*23,721.89*	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (unit)	1	18,700.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	5,882.01	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (paket)	10	103.50	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4	1,316.50	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (peserta didik)	3,000	820.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3,000	415.11	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (orang)	609	10,646.13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	488	6,607.76	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi (orang)	796	950.23	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi	1,199	157.14	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (satuan pendidikan)	337	468.82	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	335	125.03	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	337	111,013.73	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	-	DAK Non fisik
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (orang)	350	110.10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	694	151.67	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.02.2.01.0035				-	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (orang)	60	25.24	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.01.0038						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (dokumen)	1	20.00	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan (dokumen)	21	12.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan (dokumen)	1	17.25	
1.01.02.2.01.0041						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (komunitas)	2	60.00	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.01.0043						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (kegiatan)	1	49.17	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	12	500.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	3,030.30	
1.01.02.2.01.0049				-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (orang)	450	450.28	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (satuan pendidikan)	337	1,023.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	335	687,717.70	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik (peserta didik)	35,200	3,233.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	35,200	3,259.58	
1.01.02.2.01.0055						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (paket)	1	1,446.58	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*		*Jumlah SMP/MTs terakreditasi A (sekolah)*	56	*39,539.00*	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*		*Jumlah SMP/MTs terakreditasi A*	56	*12,223.92*	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (unit)	2	23,768.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	5,383.17	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	1	8,280.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1,526.02	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (paket)	303	427.20	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	210.80	
1.01.02.2.02.0028	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	303	427.20						
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)	18,248	7,756.16	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18,853	2,620.30	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (peserta didik)	3,700	726.44	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3,700	515.54	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (orang)	96	5,199.30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	780	1,002.82	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	872	797.79	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	872	106.72	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	65	627.53	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	67	62.53	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (satuan pendidikan)	65	56,201.05	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	-	DAK Non fisik
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (orang)	160	392.86	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	160	48.09	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80	12.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	diganti dengan subkegiatan pengembangan konten digital dan subkegiatan pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (konten)	3	29.55	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (orang)	67	29.93	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan (dokumen)	2	20.43	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	1	20.00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (komunitas)	-	-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (komunitas)	2	43.18	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (kegiatan)	-	-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	41.75	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (satuan pendidikan)	15,241	656.63	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	67	301.88	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (orang)	-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (orang)	677	281.64	
1.01.02.2.03	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini*		*Jumlah PAUD Terakreditasi*	299	*13,516.58*	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini*		*Jumlah PAUD Terakreditasi*	301	*4,784.27*	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)	356	81.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	372	50.35	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD (orang)	182	2,268.40	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	1,609	3,235.41	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	1,436	345.02	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi	330	72.90	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen (satuan pendidikan)	830	146.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	825	157.16	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	829	11,249.90	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	DAK Non fisik
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (orang)	829	100.07	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	825	186.05	
1.01.02.2.03.0023	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (dokumen)	1	55.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	50.35	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang dilaksanakan (dokumen)	50	8.38	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	1	9.61	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (komunitas)	0	-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	29.22	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (orang)	0	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	350	414.34	Mendasar SE Mendikbudristek No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	1	7,084.91	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	118.54	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17,457	371.01	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	825	460.35	
1.01.02.2.04	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*		*Jumlah PNF terkareditasi (lembaga)*	*23*	*9,826.78*	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*		*Jumlah PNF terakreditasi (lembaga)*	*11*	*462.55*	
1.01.02.2.04.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat (unit)	1	6,125.96	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)	230	226.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (peserta didik)	230	210.30	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidikdan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidinkan Non Formal (orang)	3	97.40	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidinkan Non Formal (orang)	23	75.13	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	20	34.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi (orang)	10	10.72	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (satuan pendidikan)	35	146.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (satuan pendidikan)	12	85.93	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35	576.70	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	DAK Non fisik
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan (Orang)	30	37.85	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	22	18.13	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (perserta didik)	50	186.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (perserta didik)	50	62.36	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kabupaten Kulon Progo**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kabupaten Kulon Progo**				
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**Kabupaten Kulon Progo**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**Kabupaten Kulon Progo**				
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi**	**72.92**	**1,278.66**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi**	**76.04**	**1,005.76**	
2.19.02.2.01	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*		*Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional (persen)*			*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*		*Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional (persen)*	83.33	*99.66*	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (orang)	80	68.30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (orang)	80	50.24	penyesuaian nomenklatur
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	5	12.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5	37.16	penyesuaian nomenklatur
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	5	29.30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5	12.25	penyesuaian nomenklatur
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	5	12.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5	37.16	
2.19.02.2.02	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase organiasasi pemuda yang aktif (persen)*			*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase organiasasi pemuda yang aktif (persen)*	*68.75*	*906.10*	penyesuaian nomenklatur
2.19.02.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (dokumen)	7	1,183.96	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	906.10	

Kode	Rancangan Awal 2025					Rancangan Akhir 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	3	4		5	6	7	8		9
1		4	4	K	Rp (dalam juta)		4	4	K	Rp (dalam juta)	4
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi**	**87.18**	**4,151.16**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi**	**87.97**	**6,780.72**	
2.19.03.2.01	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga*			*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga*	3	*2,174.65*	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	960.00	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3	2,174.65	
2.19.03.2.03	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*		*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (orang)*			*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*		*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	76	*4,606.07*	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (orang)	744	3,238.74	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	744	4,606.07	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Kabupaten Kulon Progo**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Kabupaten Kulon Progo**				
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter**	**100**	**200.00**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter**	**100**	**1,602.44**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		**Persentase Industri Kreatif yang Dikembangkan**			**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		**Persentase Industri Kreatif yang Dikembangkan**	**100**		
	Pengembangan Industri Kreatif		**Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan**			**Pengembangan Industri Kreatif**		**Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan**	**1**	**151.12**	
2.22.08.5.08	*Pendidikan Berbasis Budaya*		*Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas (laporan)*	1	*200.00*	*Pendidikan Berbasis Budaya*		*Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas (laporan)*	1	1,451.32	
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal		Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	1	517.56	Pembinaan Muatan Lokal		Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	1	1,451.32	

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan di Tingkat kapanewon dan pokok-pokok pikiran DPRD, dihasilkan beberapa usulan. Dari hasil kajian terhadap data usulan kegiatan terdapat dua kategori kelompok kegiatan sebagai usulan program dan kegiatan masyarakat, yaitu kelompok kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik terdiri dari kegiatan rehabilitasi prasarana, sedangkan kegiatan non fisik berupa bantuan operasional lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Dari sisi jenis kegiatan terdapat relevansi antara kegiatan yang diusulkan masyarakat dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu tuntutan pemenuhan layanan yang baik. Oleh karena itu, sebagian besar usulan masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam rumusan kebutuhan program kegiatan. Namun demikian, untuk lokus kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Rincian usulan program dan kegiatan masyarakat yang berasal dari hasil musrenbang kapanewon dan input Pokir DPRD pada aplikasi SIPD berserta catatan hasil penelaahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
Daftar Usulan Kapanewon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan (Perangkat Daerah)
1	2	3	4	5	6
1	Rehab Gedung PAUD	PAUD Bina Ceria, Padukuhan Maesan, Wahyu Harjo, Lendah, Kulon Progo	terehabilitasinya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah *clean* dan *clear* dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
2	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Terbangunnya sarana prasarana olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah *clean* dan *clear* dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
3	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Pronosutan, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana prasarana olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah *clean* dan *clear* dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
4	Pembangunan Gedung PAUD	Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah *clean* dan *clear* dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

Tabel 2.11

Daftar pokok Pokok Pikiran DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Boto Kulon, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
2	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Lapangan bola Pedukuhan Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Dusun Panggang, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
4	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Dusun Panggang, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir sepanjang memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya; tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Kapanewon Kokap, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Lapangan Tileng, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
7	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	RT 22 Kroco, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
8	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Kembang, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
9	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Desa Kembang, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Wareng-Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
11	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	RT 05 Pedukuhan Kemiri Desa Margosari Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
12	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Karang Taruna Kalipetir Lor Desa Margosari Desa Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	2 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
13	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Kembang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
14	Pembangunan Gedung SMP	Gebang, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Terbangunnya gedung SMP	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
15	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Gunung Gondang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
16	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Cumetuk, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Nglatiyan 1, Ngentakrejo, Lendah, kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Nomporejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
20	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Girpurwo, Girimulyo, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Krembangan, Panjatan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
22	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Panjatan, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
23	Pembangunan Gedung PAUD	RT 02 RW 01 Kemiri, Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
24	Pembangunan Gedung PAUD	Gondangan, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
25	Pembangunan Gedung PAUD	Toyan Turip Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
26	Pembangunan Gedung PAUD	Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
27	Pembangunan Gedung PAUD	Ngaseman, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
28	Pembangunan Gedung PAUD	Dusun Sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
29	Pembangunan Gedung PAUD	Anjir Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
30	Pembangunan Gedung PAUD	RT 19 Serut, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 titik	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
31	Rehab Gedung PAUD	Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
32	Rehab Gedung PAUD	Salam, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku; tahun 2018 dan 2021 pernah mendapat anggaran APBD.
33	Pembangunan Gedung PAUD	Sendang, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo	Terbangunnya gedung PAUD	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
34	Rehab Gedung SD	SD Negeri Kedundang, Temon, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Tahun 2019 pernah mendapatkan pembangunan 3 ruang kelas baru.
35	Rehab Gedung SD	SD Muh Kulur Temon, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Dipertimbangkan berdasarkan prioritas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan OPD, serta ketersediaan anggaran.
36	Rehab Gedung SD	SD Muh Kedundang Temon, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Tahun 2019 pernah mendapatkan pembangunan 3 ruang kelas baru.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Rekomendasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
37	Rehab Gedung SD	SD Muh Pleret Panjatan, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Teranggarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2024
38	Rehab Gedung SD	Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Dipertimbangkan berdasarkan prioritas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan OPD, serta ketersediaan anggaran.
39	Rehab Gedung SD	Munggang Wetan, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	3 ruang	Dipertimbangkan berdasarkan prioritas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan OPD, serta ketersediaan anggaran.
40	Rehab Gedung SD	Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Terehabilitasinya gedung SD	1 paket	Dalam proses usulan pergeseran pertama tahun anggarn 2024 - menunggu keputusan TAPD Kabupaten Kulon Progo.
41	Pembangunan Gedung SD	Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya gedung SD	1 paket	Tahun 2021 sudah dilakukan pembangunan Gedung baru SD Muh Mirisewu melalui pendanaan yayasan dan donatur, berupa bangunan dua lantai dengan atap cor dag, berupa 5 ruang kelas, 1 ruang guru dan 7 toilet.
42	Pembangunan Gedung SD	Nglatiyan II, Ngentakrejo,Lendah,Kulon Progo	Terbangunnya gedung SD	1 paket	Tahun 2019 telah mendapatkan rehabilitasi ruang kelas melalui alokasi DAK Fisik untuk 3 ruang kelas. Dipertimbangkan berdasarkan prioritas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan OPD, serta ketersediaan anggaran mengingat untuk pembangunan 2 lantai membutuhkan anggaran yang besar.
43	Bantuan Sosial siswa miskin tingkat SMP	Granti Wetan Rt 011 Rw 004 Ngestiharjo, Kulon Progo	Tersalurkannya BSM tingkat SMP	1 paket	dapat diakomodir sepanjang persyaratan penerima BSM terpenuhi
44	Pembangunan Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 unit	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	Terbangunnya sarana dan prasarana pemuda olah raga	1 paket	Dapat diakomodir dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan jika memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku diantaranya: tanah clean dan clear dari aspek legalitas, kepemilikan, status dan tata ruangnya, memenuhi persyaratan teknis dan struktur; dari aspek pembiayaan tersedia anggaran yang cukup; dan personil pengampu yang memadai sesuai bidang ketugasan dan kewenangannya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berpedoman pada kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sesuai arahan RPJMN 2020-2024, sasaran jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan anggaran tahun 2025 untuk melanjutkan program prioritas yang telah ditetapkan. Keberlanjutan program tersebut antara lain optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, layananan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik integratif, afirmasi pendidikan seperti inklusif dan di daerah 3T, pendidikan nonformal, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi akademik, AKM, serta pendanaan pendidikan. Adapun sasaran pembangunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY. Selaras dengan sasaran tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk **mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing**, khususnya pada sasaran pokok 2 "**Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin**", maka Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo adalah ***meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya prestasi generasi muda, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Jumlah indikator tujuan yang ditetapkan sebanyak 6 indikator.*** Sasaran dinas adalah ***meningkatnya derajat pendidikan masyarakat***, ***meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga***, serta ***meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah.*** Selain indikator tujuan dan sasaran dinas, ditetapkan pula indikator prioritas utama (Indikator mutu SPM) urusan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Mendikbudristek Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024. Secara rinci indikator utama daerah dan Indikator prioritas utama urusan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12

Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM) Tahun 2023-2026

No	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
A	**Tujuan**				
1	Rata-rata lama sekolah	9,18	9,25	9,35	9,44
2	Harapan Lama Sekolah	14,48	14,30	14,31	14,32
3	Persentase Pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	79,10	78,85	79,64	83,99
4	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	A	A	A	AA
5	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,63	84,50	84,75	85,00
B	**Sasaran**				
1.	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.	17,32	17,47	17,63	17,79

No	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
2.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	93,82	93,88	93,96	94,04
3.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	95,43	95,57	95,73	95,89
4.	Angka Melek Huruf	95,89	95,52	95,57	95,62
5.	Capaian penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	47,62	48,62	49,40	50,18
6.	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	-	2,04	2,14	2,24
7.	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional (Pendidikan dasar)	-	2,09	2,19	2,29
8.	Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi	79,10	78,85	79,64	83,99
9.	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100
C	**Indikator Prioritas Pendidikan (Indikator Mutu SPM)**				
1	Skor Kemampuan Literasi SD	-	-	71,28	73,2
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	-	-	84,79	88,5
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	-	-	54,92	58
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	-	-	77,01	78,01
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) tahun	-	-	100	100
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	-	-	100	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	-	-	100	100
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	-	-	75,46	75,48
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4	-	-	83,08	84,08
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD	-	-	64,65	66,65
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP	-	-	63,66	65,66
12	Iklim Keamanan jenjang SD	-	-	82,95	83,95
13	Iklim Keamanan jenjang SMP	-	-	80,4	82,4
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD	-	-	84,47	86,47
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP	-	-	81,32	83,32

Sumber: Perubahan Renstra Dikpora Kulon Progo 2023-2026; SE Mendikbudristek Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024

Agar tujuan dan sasaran dinas dapat tercapai, maka dilaksanakan beberapa program, dengan sasaran kinerja program sebagai berikut.

Tabel 3.13

Indikator Kinerja Utama Program

No	IKU Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	2024	2025	2026
				2023	2024	2025	2026
1	Program pengelolaan pendidikan	Presentase PAUD&PNF terakreditasi	%	34,56	34,92	35,27	35,63
		Persentase SD/ MI terakreditasi A	%	65,22	65,49	65,76	66,03
		Persentase SMP/MTs terakreditasi A	%	70,00	71,25	72,50	73,75
		Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan	Nilai	86,80	86,98	87,15	87,31
2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi	%	68,75	72,92	76,04	80,21
3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan alat berprestasi	%	86,84	87,18	87,97	88,16
4	Program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kot	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kot	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perubahan Renstra Dikpora Kulon Progo 2023-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada dokumen RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 mencakup 5 program, dengan total anggaran sebesar Rp. 301.142.385.972,00. Kelima program tersebut

dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Jumlah kegiatan, subkegiatan tersebut terinci pada Tabel 3.14, sedangkan rincian pagu indikatif per program, kegiatan, subkegiatan disajikan secara lengkap pada bab IV dokumen ini.

Tabel 3.14

Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Lokasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	4	51	Pendapatan Asli Daerah	I. Lokasi spesifik kegiatan: 1. Jenjang SD: Pembangunan Sekolah Di SDN Bugel, Relokasi SD Negeri Percobaan 4, SD Negeri 2 Wates,SD Negeri Terbahsari, , Pengadaan Mebel Untuk SD Muh Pleret, SD Kanisius Wates, SD N Bopkri Wates, SD Unggulan Muh Krembangan, SD Kanisius Promasan, SD Bopkri Gunungijo, Rehabilitasi Sekolah Untuk SDN Jatiroto, SDN Suroloyo, SDN Sungapan, SD Negeri Grindang, SD Negeri Kemaras, SD Negeri Pantaran, SD Negeri Blubuk, pengadaan TIK untuk SD Muh Pleret, SD Muh Krembangan, SD Kanisius Promasan, SD Kanisius Wates, SD Bopkri Wates, SD Bopkri Gunungijo, Relokasi SD Negeri Percobaan 4, SD Negeri 2 Wates, SD Negeri Terbahsari, SD Negeri Kemaras, SD Negeri Blubuk. 2. Jenjang SMP: pembangunan SMP N 1 Wates, Rehabilitasi SMP Negeri 2 Pengasih dan SMP Negeri 5 Wates, Pengadaan Mebel SMP Negeri 1 Wates. 3. Jenjang PAUD: pengadaan laptop untuk TK ABA

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Lokasi
					Diponegaran, KB Intan, TK YM Jetis, TK ABA Kasihan Barat, TK Attaqwa GUPPI Wojowalur. II. Seluruh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan satuan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	4	Pendapatan Asli Daerah	Tersebar Kabupaten Kulon Progo
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2	2	Pendapatan Asli Daerah	1. Pembangunan dan pemeliharaan: GOR Cangkring, GOR Wates, Stadion Cangkring, 2. Pembinaan atlet tersebar di Kabupaten Kulon Progo
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2	2	Dana Keistimewaan Yogyakarta	Tersebar Kabupaten Kulon Progo
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	15	Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

4.1. Rencana Kerja

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan urusan Pendidikan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya pembinaan generasi muda dan meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia, khususnya bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2025, kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pekayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, pencapaian sasaran kinerja dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, mendukung pelayanan publik, mengurangi masalah dan isu strategis yang berkembang, serta mengakomodasi usulan masyarakat. Rencana kerja yang disusun tersebut tetap mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo. Isi dan substansi dari Rencana kerja ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas, target kinerja, sumber dana, Lokasi dan prakiraan maju secara terperinci dirinci menurut fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan rencana kerja dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4.2. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Sumber pendanaan pada rencana kerja tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Dana Keistimewaan Yogyakarta (DAIS). Penetapan rincian program, kegiatan, subkegiatan pada rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagai berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**301.142.385.972,00**							**327.659.696.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**291.753.470.672,00**							**313.822.196.400,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**291.753.470.672,00**							**313.822.196.400,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**250.560.842.057,00**						**-**	**256.358.680.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	334.792.083,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.887.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	308.905.083,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	246.459.301.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	251.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3414 Orang/bulan	244.936.622.020,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		250.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.448.078.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	74.600.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian*	-			2 Dokumen	33.992.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	19.603.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	14.389.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adminnistrasi umum*	-			2 Dokumen	202.789.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.257.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	144.532.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			10 Aset	1.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	1.617.293.004,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	1.676.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	343.199.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		426.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.274.093.092,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang aset milik daerah*	-			3 Laporan	412.674.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	427.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	249.096.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		272.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.854.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	153.724.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase PNF Terakreditasi dan PAUD Terakreditasi Persentase SD/MI Terakreditasi A Persentase SMP/MTs Terakreditasi A Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan***	**-**			**35,27 persen 65,76 persen 72,5 persen 87,15 -**	**41.192.628.615,00**						**-**	**57.463.516.400,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah SD/MI Terakreditasi A*	-			242 Sekolah	23.721.887.815,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	38.757.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	5.882.014.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	1.316.501.910,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3000 Peserta Didik	415.111.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				488 Orang	6.607.762.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		6.647.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1199 Orang	157.141.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				335 Satuan Pendidikan	125.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				694 Orang	151.671.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	25.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	49.710.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	3.030.303.905,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				450 Orang	450.276.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	687.717.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35200 Peserta Didik	3.259.583.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		4.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.466.575.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah SMP/MTs Terakreditasi A*	-			58 Sekolah	12.223.916.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	12.335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	5.383.174.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	1.526.024.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	210.801.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18853 Peserta Didik	2.620.298.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3700 Peserta Didik	515.537.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				780 Orang	1.002.816.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				872 Orang	106.717.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				67 Satuan Pendidikan	62.525.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				160 Orang	48.085.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				3 Konten Digital	29.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				67 Orang	29.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	43.182.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	41.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	301.884.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				677 Orang	281.644.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah PAUD Terakreditasi*	-			301 Sekolah	4.784.270.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF	-	5.882.359.300,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				372 Peserta Didik	50.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1609 Orang	3.235.409.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		3.334.359.300,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	72.904.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				825 Satuan Pendidikan	157.155.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				825 Orang	186.052.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	9.605.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	29.224.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				350 Orang	414.338.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	118.535.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				825 Satuan Pendidikan	460.345.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*jumlah PNF Terakreditasi*	-			11 Lembaga	462.553.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF	-	488.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				230 Peserta Didik	210.271.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23 Orang	75.134.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10.724.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	85.933.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				22 Orang	18.132.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		18.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	62.357.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.388.915.300,00**							**13.837.500.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.786.475.400,00**							**12.137.500.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Presentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda Berprestasi***	**-**			**76.04 %**	**1.005.758.000,00**						**-**	**1.137.500.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional*	-			83.33 %	99.660.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 Orang	50.244.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	37.162.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	12.253.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi pemuda yang aktif*	-			68.75 %	906.097.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	906.097.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Presentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi***	**-**			**87.97 %**	**6.780.717.400,00**						**-**	**11.000.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga*	-			3 Unit	2.174.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet, Peserta Didik, dan Masyarakat Kulon Progo	-	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	2.174.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet, Peserta Didik, dan Masyarakat Kulon Progo		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional*	-			75.95 %	4.606.067.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				744 Orang	4.606.067.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.602.439.900,00**							**1.700.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter***	**-**			**100 persen**	**1.602.439.900,00**						**-**	**1.700.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Persentase Industri Kreatif yang Dikembangkan*	-			100 persen	151.116.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				1 Unit	151.116.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal*	-			1 Laporan	1.451.323.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	1.451.323.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H							**301.142.385.972,00**							**327.659.696.400,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025. *Rencana kerja* Tahun 2025 telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, serta kerangka pendanaan masing-masing program.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi rencana kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berintegritas yang diemban oleh dinas. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan dalam pelaksanaan isi rencana kerja ini.

Demikian Dokumen *Rencana Kerja* Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, dan bidang pemuda olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 serta sebagai acuan kegiatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wates, 02 Agustus 2024
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NUR WAHYUDI, M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19690705 198903 1005

RENCANA KERJA

RENJA 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

Email : dinkes@kulonprogokab.go.id
Website : http//www.dinkes.kulonprogokab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Dokumen **Rencana Kerja** Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

dr. Sri Budi Utami, MKes
NIP. 19660520 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 6
2.2 Analisis Kinerja 16
2.3 Isu –isu penting 34
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 47
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 51
4.2 Pendanaan 52

BAB V PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 : Target dan Capaian IKU RPJMD Urusan Kesehatan Tahun 2023-20226

Tabel 2.3 : Capaian Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Tabel 2.4 : Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023

Tabel 4.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja berdasarkan Permendagri NO. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari enam tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir serta penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kesehatan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Kesehatan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan DIY.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasarkan pada perubahan renstra Dinas Kesehatan 2023 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023 – 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta sejalan dengan sasaran daerah nomer tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya renja perangkat daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

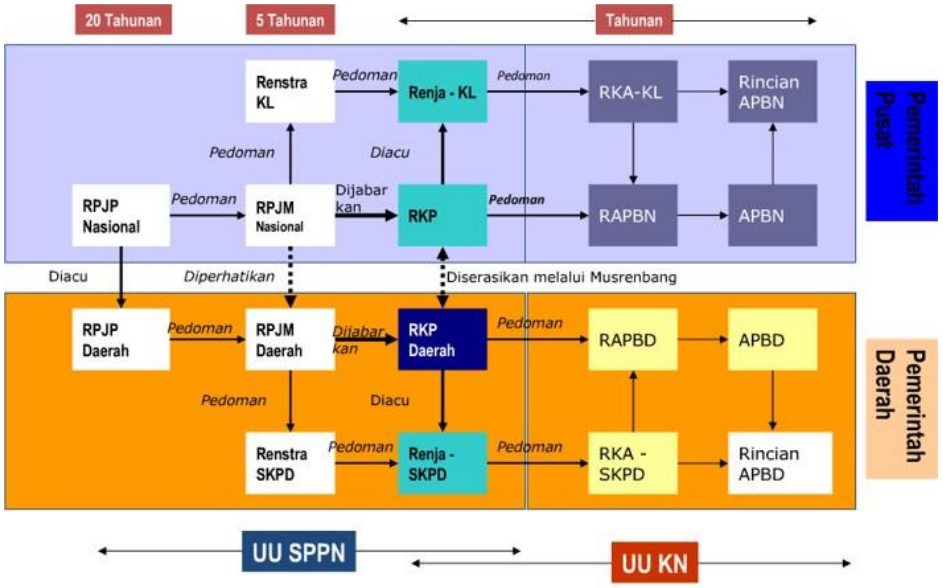

Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomer 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tencana Kerja tahun 2025.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan kesehatan daerah.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah untuk:

   a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
   c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
   d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistimatika penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta tata kerja pada Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan membantu bupati dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah nomor tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 4 kegiatan :
    a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota;
    b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
    d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dengan 3 kegiatan :
    a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota;
    b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota;
    c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; dengan 2 kegiatan :
    a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;dengan 2 kegiatan:
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
   b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dengan 5 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut :

TABEL 2.1.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2023	Realisasi renja PD 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu**	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	755 orang	755 orang	755 orang	755 orang	100%	755 orang	755 orang	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penambahan aset**	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	**100%**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Perkantoran dan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga (berupa juru masak 3 orang, pembantu TU 6 orang, pembantu administrasi 2 orang, tenaga kebersihan 4 orang, tenaga keamanan 1 orang), alat tulis kantor, barang cetakan	12 Bulan	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**% Pemenuhan UKP UKM**	**88.46%**		**75.64%**	**78.24%**	**103.44%**	79.96	79.96	100%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar**	100%		69.57%	100%	143.74%	74%	74%	100%
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Monev Pelaksanaan Kalibrasi di Puskesmas Pemeliharaan alat kesehatan (kalibrasi)	13 Puskesmas 1 Paket	13 Puskesmas 1 Paket	13 Puskesmas 1 Paket	13 Puskesmas 1 Paket	100%	13 Puskesmas 1 Paket	13 Puskesmas 1 Paket	100%
	Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaan Bahan Habis Pakai Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**	**83,03%**		**80.33%**	**83.56%**	**104.02%**	**81.22**	**81.22**	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.460 orang	4.488 orang	5.310 orang	3.882 orang	73,10%	5.360 orang	1.850 orang	34,51%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.460 orang	4.488 orang	5.310 orang	3.937 orang	74,14%	5.360 orang	1.880 orang	35,07%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56.955 orang	41.000 orang	44.525 orang	46.791 orang	105,09%	47.950 orang	25.437 orang	53,05%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.123 orang	4.803 orang	4.883 orang	10.447 orang	213,95%	4.963 orang	5.415 orang	109,10%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.500 orang	3.300 orang	3.350 orang	4.078 orang	121,73%	3.400 orang	1.498 orang	44,06%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.316 or	4.046 or	4.113 or	4.877 or	118,57%	4.181 or	2.304 or	55,10%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	30 dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase fasyankes yg menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**70,59%**		**61.76**	**61.76**	**100.00%**	**64.71%**	**64.71%**	100%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)	100%	NA	**90.91**	**67.65**	**74.41%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**69.96 %**	41,83%	**54.53%**	**90.32%**	**165.63%**	59.22%	59.22%	100%
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**% tenaga kesehatan di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP**	**100%**	**80,03%**	84.03%	97.81%	116.40%	**88.04%**	**88.04%**	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**% nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu**	81,82%	45,45%	**54.55%**	**100%**	**183.32%**	**63.64%**	**63.64%**	100%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 or	1 or	1 or	1 or	100%	1 or	1 or	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 or	1 or	1 or	1 or	100%	1 or	1 or	100%

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase tenaga kesehatan (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yg dilakukan kredensialing**	**28,05%**		**25%**	**73.16%**	**292.64%**	**26,00%**	**26,00%**	100%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 or	1 or	1 or	1 or	100%	1 or	1 or	100%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	91,72%	70,19%	**88.04%**	**93.43%**	**106.12%**	88.33%	88.33%	100%
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	% Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi	100%		100%	88%	88.00%	100%	100%	100%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, UsahaMikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Ind	**% PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT**	**100%**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi**	**70%**		**70%**	**100%**	**142.86%**	**70,00%**	**70,00%**	**100%**
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**% produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat**	**96,88%**		**82.14%**	**85.71%**	**104.35%**	**83.33%**	**83.33%**	**100%**
	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**% Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**50.41 %**		**47.12%**	**67.65%**	**143.57%**	**48.22%**	**48.22%**	**100%**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**% Desa Siaga kategori mandiri**	**46.59%**		**39.77%**	**75%**	**189%**	**42.05%**	**42.05%**	**100%**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**% RT yang ber PHBS**	**23%**		**21.50**	**27.95**	**130.00%**	**23%**	**23%**	**100%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**% posyandu strata purnama mandiri**	**81.65%**		**80.08**	**100**	**124.88%**	**80.60%**	**80.60%**	**100%**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja di atas dapat terlihat bahwa mayoritas indikator kinerja tahun 2023 telah memenuhi target, namun terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target 100% yaitu sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pengelolaan pelayanan kesehatan bersalin.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati.

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes.

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Analisis ini menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, indikator SPM Kesehatan tertuang dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

no	Indikator	SPM	IKK	Target renstra 2023-2026				realisasi	estimasi			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Catatan analisis
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		V					0,16%				
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	V	V	100%	100%	100%	100%	98,20%	100%	100%	100%	Belum tercapai
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	V	V	100%	100%	100%	100%	99,62%	100%	100%	100%	Belum tercapai
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	V	V	100%	100%	100%	100%	95,25%	100%	100%	100%	Belum tercapai
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	96,43%	100%	100%	100%	Belum tercapai
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	90,03%	100%	100%	100%	Belum tercapai
8	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	96,31%	100%	100%	100%	Belum tercapai
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	93,67%	100%	100%	100%	Belum tercapai
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	99,58%	100%	100%	100%	Belum tercapai
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	Belum tercapai

12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	90,27%	100%	100%	100%	Belum tercapai
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	85,33%	100%	100%	100%	Belum tercapai
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	V	V	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	100%	100%	Belum tercapai

Pada tabel 2.2.1 diatas, terlihat bahwa indikator penerapan SPM Bidang Kesehatan belum semuanya mencapai target (masih di bawah 100%). Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya :

1. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar antara data target dengan data riil jumlah sasaran yang ada.
2. Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM.
3. Pemenuhan kebutuhan logistik untuk pelayanan SPM belum bisa opimal meliputi alat kesehatan yang sesuai standar dan Bahan Medis Habis Pakai.
4. Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.

Target dan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sesuai RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Indikator Sasaran Daerah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Keluarga Sehat	%	27.00	29.00	31.00	33.00	35.77	30.67

Sumber Data:Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Tabel 2.2.2 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Angka ini merupakan kontribusi dari berbagai program baik program kesehatan maupun lintas sektor terkait. Program kesehatan berkolaborasi dengan program lain dalam pencapaian AHH Kabupaten Kulon Progo. Capaian Indeks Keluarga Sehata (IKS) sebesar 30,67%; angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar

29,00%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian IKS : telah disusun SK Tim Pengarah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang melibatkan lintas sektor dalam program PIS PK; tahapan kegiatan PISPK di Kabupaten Kulon Progo adalah tahap intervensi lanjut, dimana intervensi lanjut dilaksanakan lintas program sesuai indikatornya sehingga perlu sinkronisasi capaian indikator IKS dengan indicator program secara berkala; mendorong puskesmas untuk sosialisasi dan optimalisasi tenaga untuk input data PISPK ke dalam aplikasi agar perkembangan data IKS bisa dilihat setiap waktu; mendorong puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan kelurahan untuk pemantauan keluarga baru yang ada di wilayah kerja; Penguatan kerjasama lintas sektor terutama dalam pemantauan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.2.3
Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi (%)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	179.53	145.08	117.23	94.73	76.55	25.35
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	8.98	7.48	7.33	7.17	7.01	9.13
3	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	79.12	80.33	81.22	82.10	83.24	80.48
4	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

1. Capaian Indikator Program dan Kegiatan

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan ditetapkan empat program yaitu : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, Kefarmasian, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Capaian indikator kinerja program untuk Urusan Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan RKPD 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.4
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.53	75,64%	79.96	83.09	88.46	86,33%
2	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	70.19	88,04%	88.33	89.38	91.72	93,43%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.83	54,53%	59.22	63.92	69.96	90.32%
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	46.68	47,12%	48.22	49.31	50.41	67.65%

Sumber data: Dinas Kesehatan, RSUD Wates, RSUD NAS Kab. Kulon Progo, 2023

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja program secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah Prosentase Pemenuhan UKP dan UKM, dengan perhitungan sebagai berikut: ((% fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar) + (% capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar) + (%fasyankes yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi) + (% fasyankes yang melakukan pengukuran Indikator Mutu Nasional))/4. Adapun capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dapat dilihat pada tabel 2.2.5 berikut :

Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2023

No	Uraian	Target					Realisai
		2022	2023	2024	2025	2026	
I	**Persentase Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah fasyankes pemerintah yang ada**	65%	70%	74%	83%	100%	100%
	Jumlah fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	15	16	17	19	23	23
	Jumlah fasyankes pemerintah yg ada	23	23	23	23	23	23
II	**Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar untuk pelayanan 12 SPM / 12**		**80,33%**			**80,33%**	**83,56%**
	Persentase capaian pelayanan ibu hamil sesuai standar	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**98,20%**
	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.488	5.310	5.360	5.410	5.4600	3.882
	Jumlah sasaran ibu hamil yang ada	4.488	5.310	5.360	5.410	5.460	3.952
	Persentase capaian pelayanan ibu bersalin sesuai standar	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,62%**
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	3.937
	Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	3.952
	Persentase capaian pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**95,25%**
	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	3.891
	Jumlah sasaran bayi lahir yang ada	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	4.085
	Persentase capaian pelayanan balita sesuai standar	**86,83%**	**90,46%**	**90,46%**	**90,46%**	**90,46%**	**96,43%**
	Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	19.550	21.216	21.216	21.216	21.216	19.194
	Jumlah sasaran balita yang ada	22.515	23.454	23.454	23.454	23.454	19.904
	Persentase capaian pelayanan anak usia dasar sesuai standar	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**90,03%**
	Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	32.438	32.976	33.517	34.057	34.598	47.643
	Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada	54.060	54.060	54.060	54.060	54.060	52.918
	Persentase capaian pelayanan usia produktif sesuai standar	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**96,31%**
	Jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	51.650	59.725	61.218	64.204	68.720	66.964
	Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada	51.650	59.725	61.218	64.204	68.720	69.531
	Persentase capaian pelayanan usila lanjut sesuai standar	**60,29%**	**65,00%**	**69,49%**	**73,92%**	**81,36%**	**79,40%**
	Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	41.000	44.525	47.950	51.375	56.955	46.791
	Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000	58.931
	Persentase capaian pelayanan hipertensi sesuai standar	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**99,58%**
	Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.803	4.883	4.963	5.043	5.123	10.447

	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005	10.491
	Persentase capaian pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**99,49%**
	Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	2.520	2.562	2.604	2.646	2.688	3.934
	Jumlah estimasi penderita DM yg ada	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	3.954
	Persentase capaian pelayanan ODGJ sesuai standar	**91,01%**	**91,02%**	**91,97%**	**92,98%**	**93,99%**	**90,27%**
	Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	1.424	1.440	1.455	1.471	1.487	1.410
	Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.562
	Persentase capaian pelayanan TB sesuai standar	**72,30%**	**73,48%**	**74,66%**	**75,84%**	**77,02%**	**85,33%**
	Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500	4.078
	Jumlah orang terduga TB yg ada	4.564	4.559	4.554	4.549	4.544	4.779
	Persentase capaian pelayanan HIV sesuai standar	**60,00%**	**61,00%**	**62,01%**	**63,00%**	**64,10%**	**93,75%**
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.046	4.113	4.181	4.248	4.316	4.877
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743	5.202
III	**Persentase jumlah fasyankes primer (FKTP) yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi / jumlah fasyankes primer (FKTP) yang ada**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**	**61,76%**
	jumlah fasyankes primer (FKTP) yg menyelenggarakan SIK Secara Terintegrasi	21	21	22	23	24	21
	jumlah fasyankes primer (FKTP) yg ada	34	34	34	34	34	34
IV	**Persentase jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) / jumlah fasyankes yang ada**		**90,91%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	jumlah fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)		40	44	44	44	30
	jumlah fasyankes yang ada		44	44	44	44	30
	Capaian indikator kinerja Program UKP & UKM	**51,53%**	**75,64%**	**79,96%**	**83,09%**	**88,46%**	**86,33%**

Sumber data: Dinas Kesehatan, RSUD Wates, RSUD NAS Kab. Kulon Progo, 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa cakupan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebesar 86,33%; telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 75,64%. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilakukan melalui beberapa hal antara lain : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP meliputi upaya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas dan RS; rehabilitasi sarana prasarana kesehatan serta penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan di Puskesmas.

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan merupakan upaya pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar yakni penerapan 12 SPM. Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian SPM antara lain:

1. **Pelayanan kesehatan pada ibu hamil belum mencapai target 100%.**

   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati).

   Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sector terkait penanganan ibu hamil KTD.

2. **Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin belum mencapai target 100%.**

   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes.

   Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.

3. **Pelayanan kesehatan pada bayi belum mencapai target 100%.**

   Pelayanan kesehatan bayi Sebagian besar disebabkan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dilakukan penundaan pemberian imunisasi HB0, dan bayi bermasalah tidak dilakukan Inisiasi Menyusu Dini.

   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan bayi antara lain : adanya bayi yang lahir dengan masalah kesehatan.

   Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan bayi antara lain memperkuat pelayanan ANC yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan factor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.

4. **Pelayanan kesehatan pada balita belum mencapai target 100%.**

   Kendala yang dihadapi dalam pelayanan balita adalah pelaksanaan deteksi tumbuh kembang yang tidak dapat dilaksanakan sesuai umur karena beberapa hal diantaranya

balita tidak datang ke posyandu saat jadwal pemeriksaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya balita yang tidak datang di posyandu dengan beberapa alasan ,antara lain tidak ada yang mengantar, balita berada di tempat berbeda

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan balita antara lain pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan SDIDTK sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.

5. **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai target 100%.**

   Capaian SPM usia Pendidikan dasar 90,16%. Kendala yang dihadapi adalah Puskesmas dengan sasaran banyak tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sampai akhir tahun. Keterbatasan jumlah SDM di Puskesmas menjadi kendala yang paling besar. Selain itu, input data di aplikasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Data dilakukan input secara individu melalui aplikasi. Tantangan yang ada selain kondisi internet yang belum merata di wilayah Kulon Progo, juga aplikasi web Penjarkes DIY sering maintenance sehingga menghambat proses input data. Upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan input data juga harus dilakukan stretagi khusus agar puskesmas dengan jumlah sasaran yang banyak bisa diinput semua, misalnya dengan menunjuk penanggung jawab untuk input data. Melakukan usulan kepada Dinkes DIY untuk aplikasi yang digunakan cukup aplikasi penjarkes saja. Untuk siswa bisa mengisi kuesioner melalui mobscreen, sementara data hasil pemeriksaan kesehatan dientry petugas dengan aplikasi penjarkes.

6. **Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100%.**

   Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM Kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining, sasaran skrining usia produktif yang berstatus pelajar/ mahasiswa belum terskrining semua karena skrining dilakukan pada siang hari, Skrining dengan pemeriksaan IVA yang mendukung capaian pelayanan kesehatan usia produktif juga belum sesuai target karena kebanyakan Wanita Usia Subur masih merasa malu karena skrining dilakukan pada area sensitif wanita.

7. **Capaian SPM kelompok usia lanjut belum mencapai target 100%**

   Permasalahan dalam pelayanan kesehatan lansia adalah adanya lansia yang immobile karena sakit, keterbatasan gerak sehingga kalau tidak diantarkan ke posyandu tidak dapat hadir. Pasien yang datang ke posyandu hanya lansia yang itu-itu saja, yang aktif berkegiatan. Sementara itu masih ada lansia yang belum paham kalau mereka harus mendapatkan layanan skrining dalam satu tahun sekali. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan kader setempat untuk mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melalukan koordinasi dengan lintas sector untuk kegiatan lansia.

8. **Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target 100%.**

   Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita hipertensi berobat secara teratur setiap bulan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada keluhan sehingga tidak perlu kontrol. Sedangkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standart minimal dua bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu perlu optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.

9. **Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart, belum mencapai target 100%.**

   Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standart minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan DM ke FKTP dan FKRTL terlaporkan ke Puskesmas setempat.

10. **Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standart belum mencapai target 100%.**

    Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.

11. Pelayanan orang terduga HIV sesuai standart belum mencapai target 100%.

Hal ini disebabkan sulitnya mencari sasaran populasi kunci dan populasi beresiko yang sulit di jangkau. Pelayanan. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan SIHA di Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan ibu hamil dan populasi kunci terlaporkan ke Puskesmas setempat.

12. Pelayanan orang terduga TB sesuai standart belum mencapai target 100%.

Hal ini disebabkan penjaringan TB dari semua Fasyankes yang ada di Kabupaten Kulon Progo baik Fasyankes Pemerintah maupun Fasyankes Swasta, belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak terduga TB yang tidak terjaring sebagai suspek sehingga tidak dapat di diagnosis sebagai pasien atau bukan. Dari 21 Puskesmas ada 2 Puskesmas yang belum mencapai 75 %, yaitu Puskesmas Temon II dan Puskesmas Kalibawang. Setelah di lakukan Monitoring dan evaluasi Puskesmas Temon II belum ada koordinasi yang bagus di jejaring internal faskes tersebut. Sedangkan untuk Puskesmas Kalibawang tahun 2023 ini sangan rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pasien yang diobati pun lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin.

Masalah dan kendala secara umum dalam pencapaian pelayanan SPM :

1. **Aspek Penentuan data sasaran**

   Belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kemendagri pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun.

2. **Penghitungan perencanaan dan penganggaran**

   Potret penganggaran di nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena mapping sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM dirumahkan di RKA terpisah, yakni di Obat, Bahan Pakai Habis dan Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu memperhitungkan juga pada sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM.

3. **Ketersediaan tenaga kesehatan**

Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM. Sehingga pada saat kunjungan pasien di puskesmas terlalu banyak, maka nakes akan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien dulu, sebelum pelayanan skrining yang menjadi standar pelayanan SPM.

4. **Pemeriksaan sesuai standar pelayanan belum bisa optimal dilakukan**
   Pada situasi tertentu, contohnya pada usia lanjut, karena alasan kesehatan tidak bisa dilakukan skrining sesuai standar. Ibu hamil datang ke puskesmas, sudah memasuki usia kehamilan trimester dua, sehingga tidak bisa tercatat sebagai layanan SPM. Masih ada stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah.
5. **Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan**
   Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh guna meningkatkan capaian pelayanan SPM :

a. Meningkatkan sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan baik oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Pemerintah Daerah berkenaan dengan kebijakan SPM Bidang Kesehatan agar pelaksana program dapat memahami secara menyeluruh dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada indikator kinerja SPM Kesehatan secara maksimal sesuai dengan target yang hendak dicapai.
b. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Kesehatan serta membuat program inovasi untuk mendukung dalam mencapai target indikator kinerja SPM Kesehatan.
c. Meningkatkan sinergitas lintas program, lintas seksi dan lintas bidang agar agar dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi masalah pelayanan SPM kesehatan.
d. Meningkatkan peran aktif lintas sektor, swasta dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.

e. Meningkatkan advokasi kepada stakeholder terkait dalam pemenuhan Sumber Daya yang dibutuhkan agar mampu mendukung pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan.
f. Menggali berbagai potensi sumber pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga yang diterbitkan / Jumlah permohonan ijin produk pangan industri rumah tangga x 100)x 35% + (jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berijin / jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada x 100) x 40% + (jumlah tenaga fungsional teknis yang dinilai prestasi kerjanya melalui penilaian angka kredit / jumlah tenaga fungsional teknis x 100)x 25%

Tabel 2.2.6
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023

No	Uraian	Target					Realisasi
		2022	2023	2024	2025	2026	
I	**Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP / jumlah nakes di fasyankes pemerintah**	**80,03%**	**84,03%**	**88,04%**	**92,04%**	**100%**	**97,81%**
	jumlah nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP	2.000	2.100	2.200	2.300	2.499	1.561
	jumlah nakes di fasyankes pemerintah	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	1.596
II	**Persentase jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK**	**45,45%**	**54,55%**	**63,64%**	**72,73%**	**81,82%**	**100%**
	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	125	150	175	200	150	826
	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK	275	275	275	275	275	826
III	**Persentase jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing**		**25,00%**	**26,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**73,16%**
	jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg dilakukan kredensialing		401	417	433	450	823
	jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yg akan dilakukan kredensialing		1.604	1.604	1.604	1.604	1.125

	Capaian Indikator Kinerja	**41,83%**	**54,53%**	**59,22%**	**63,92%**	**69,96%**	**90.32%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Tahun 2023 telah mencapai 90,32%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 54,53%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan anatar lain : Pengiriman peserta program bantuan pendidikan dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis, Pengiriman peserta program bantuan pendidikan berkelanjutan bagi SDM Kesehatan melalui program tugas belajar dan ijin belajar SDM Kesehatan, Pengiriman peserta uji kompetensi bagi SDM Kesehatan, menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan serta melaksanakan Kredensialing bagi dokter, dokter gigi, bidan dan perawat di Puskesmas

Kendala yang ada dalam meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan : Dinas Kesehatan belum terakreditasi menyelenggarakan uji kompetensi, sehingga tenaga kesehatan yang akan uji kompetensi, harus mengikuti uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Kualifikasi pendidikan dengan formasi yang disusun masih belum singkron, Perhitungan Kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui aplikasi Renbut SDMK belum maksimal masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, belum ada identifikasi antara kebutuhan kompetensi dengan standart kompetensi jabatan dan pengembangan karier, Kredensial Tenaga Kesehatan baru dilakukan untuk 4 jenis tenaga kesehatan yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan untuk tenaga kesehatan, lainnya belum dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain : mengirim peserta uji kompetensi ke Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten lain yang sudah terakreditasi, Mempersiapkan untuk mengikuti akreditasi uji kompetensi, Memperbaiki Perencanaan Kebutuhan (Renbut) SDM Kesehatan berdasarkan Kebutuhan bukan keinginan, melakukan identifikasi peningkatan kompotensi berdasarkan kebutuhan, melakukan kredensial tenaga kesehatan secara bertahap.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Indikator kinerja dari Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman adalah Capaian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan perhitungan sebagai berikut : % Pemenuhan Sediaan farmalkes makmin sesuai

standar=((% Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi)+(% PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT)+(% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi)+(% produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat))/4. Adapun Capaian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.7
Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Tahun 2023

No	Uraian	Target					Realisasi
		2022	2023	100%	100%	100%	
I	**Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85,71%**
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi	28	30	30	30	30	22
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mengajukan	30	30	30	30	30	25
II	**Persentase jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT	275	300	300	300	300	572
	Jumlah PIRT yang mengajukan	275	300	300	300	300	572
III	**Persentase jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Sertifikast Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi**		**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**70,00%**	**100%**
	jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi		35	35	35	35	41
	jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam peemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi		50	50	50	50	41
IV	**Persentase jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / umlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market**		**82,14%**	**82,14%**	**83,33%**	**87,50%**	**96,88%**

	jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat		23	23	25	28	31
	jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market		28	28	30	32	32
	Capaian Indikator Kinerja		**88,04%**				**93,43%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Kebutuhan obat serta perbekalan juga telah terpenuhi di semua puskesmas. Pada tahun 2023, jumlah item obat yang memenuhi syarat lebih rendah dari target karena menyesuaikan dari daftar Formularium Nasional terbaru. Obat yang tersedia harus dapat dipastikan memenuhi syarat melalui kegiatan pengamatan mutu keamanan secara berkala selama dalam penyimpanan. Apabila ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat mutu keamanan segera dikeluarkan dari persediaan untuk diproses sesuai peraturan yang ada. Untuk obat rusak/kadaluwarsa diajukan penghapusan ke Bupati, untuk obat tidak memenuhi syarat karena kesalahan produsen maka obat dikembalikan ke penyalur untuk mendapat penggantian.

Peningkatan cakupan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang di atas target disebabkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait baik pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam pendanaan bagi Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) serta sudah dilaksanakannya penerbitan SPP – IRT melalui OSS sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan SPP-IRT.

Kegiatan inspeksi ke sarana IRTP sudah melibatkan petugas sanitarian puskesmas setempat yang sudah dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan District Food Inspector (DFI) selaku pengawas pangan sehingga pembinaan dan pemantauan industri rumah tangga pangan dapat dilakukan lebih intensif.

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Merupakan upaya Pengawasan terhadap Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan, Bimbingan Teknis Hasil Pengawasan dan Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan TPP (Tindakan Perbaikan dan Pencegahan)/CAPA (Corecive Action Preventif Action dan melukan Evalausi Pelaksanaan Pengawasan Apotek dan Toko OBat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan dengan lintas sektor dan lintas program. Kendala & masalah adalah Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama

untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : Mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga merupakan upaya melakukan penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik dan penjamah makanan pada tempat pengelolaan pangan, kunjungan sarana tempat pengelolaan pangan dalam rangka penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dan evaluasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi dengan lintas sektor dan lintas program**.** Kendala & masalah : Ketidaktahuan masyarakat pemohon izin terhadap pemenuhan persyaratan (sebelum izin terbit) dan kewajiban (setelah izin terbit) hal ini dikarenakan, dengan dipermudahnya penerbitan izin (terutama untuk usaha dengan resiko rendah – UMOT, SPP-IRT, Toko Kosmetik, toko Alkes), sehingga banyak izin yang terbit, tetapi usaha tidak berjalan atau tidak mau memenuhi kewajiban. Tindak lanjut : mengintensifkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan DPMPT dan lintas program

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga merupakan upaya Inventarisasi Sarana IRTP, Pengawasan Sarana IRTP, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana IRTP dan Bimtek CPPOB-IRT bagi Pelaku Usaha.

Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) merupakan kegiatan Perencanaan Sampling, Pelaksanaan Sampling, Evaluasi Penandaan/ Label, Pelaksanaan Pengujian, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian dan Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label

Kendala yang ada diantaranya : Kemudahan perizinan dengan OSS sehingga jumlah IRTP yang harus diperiksa semakin banyak, Kemudahan memperoleh SPPIRT tidak diimbangi dengan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar dan persyaratan, Jumlah petugas DFI Dinas Kesehatan tidak sebanding dengan jumlah IRTP, Banyak IRTP yang bersifat musiman sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan sarana maupun sampling produk dan Laboratorium rujukan penuh dan tidak menerima sampel uji ataupun reagen habis

Tindak lanjut : Melibatkan petugas sanitarian puskesmas dalam pemeriksaan post market sarana dan produk PIRT, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam kaitan pemenuhan CPPOB-IRT, Pengujian tidak dilakukan di satu laboratorium, namun ada

alternatif lab lain apabila lab utama penuh atau reagen habis serta Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait seperti BPOM, puskesmas, DPMPT, dinas perdagangan dan asosiasi pelaku usaha

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.2.8
Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Uraian	Target					Realisasi
		2022	2023	2024	2025	2026	
I	**Persentase jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada**	**38,64%**	**39,77%**	**42,05%**	**44,32%**	**46,59%**	**75%**
	Jumlah Desa Siaga kategori mandiri	34	35	37	39	41	66
	jumlah desa yang ada	88	88	88	88	88	88
II	**Persentase jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina**	**21,44%**	**21,50%**	**22,00%**	**22,50%**	**23,00%**	**27,95%**
	Jumlah RT ber-PHBS	18.800	18.854	19.292	19.731	20.169	20.466
	jumlah RT yang dibina	87.693	87.693	87.693	87.693	87.693	112.570
III	**Persentase jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada**	**79,98%**	**80,08%**	**80,60%**	**81,13%**	**81,65%**	**100%**
	jumlah posyandu strata purnama mandiri	767	768	773	778	783	957
	jumlah posyandu yang ada	959	959	959	959	959	957
	Capaian Indikator Kinerja	**46,68%**	**47,12%**	**48,22%**	**49,31%**	**50,41%**	**67.65%**

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Capaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 67,65%, angka ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 47,12%. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan : Melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Melakukan update knowledge kepada kader kesehatan yang menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat langsung di wilayahnya melalui kegiatan Jambore Kader; Melakukan sosialisasi kepada kader kesehatan terkait 25 Ketrampilan Dasar Kader yang harus dimiliki pada 21 posyandu Center of Excellent; Melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada kader kesehatan di 88

kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo; Melakukan pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) kepada tenaga kesehatan sebagai upaya memaksimalkan Teknik berkomunikasi yang paling efektif agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh sasaran serta Melakukan bimtek penguatan jejaring promosi kesehatan

Kendala yang ada dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan adalah Dukungan dana dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses lewat dana pusat (BOK/DAK NF) terbatas, karena menu yang tersedia tidak dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pemberdayaan masyarakat.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan : Melakukan advokasi pengembangan kebijakan public berwawasan kesehatan; Konsultasi langsung ke Kementerian Kesehatan terkait menu kegiatan yang ada saat ini agar menu-menu kegiatan pada tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan permasalahan real yang ada di lapangan/wilayah; Advokasi kepada pemerintah daerah terkait kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat didanai dan difasilitasi oleh pemerintah daerah; Menjaring kemitraan dengan kelompok potensial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; Penggeloraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mencakup 5 tema: peningkatan aktivitas fisik, peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, dan peningkatan kualitas lingkungan agar menjadi budaya Masyarakat; Promosi kesehatan secara berkesinambungan melalui 6 saluran media, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruangan, budaya lokal (pameran), penyuluhan langsung (kampanye), dan media social.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang muncul di bidang kesehatan menyangkut isu tentang :

1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDMK Kesehatan sesuai standar
2. Peningkatan Status gizi masyarakat guna menurunkan kasus stunting
3. Pengendalian penyakit menular
4. Peningkatan Penyakit tidak menular;
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan guna mendukung Integrasi Pelayanan Kesehatan.
6. Pengembangan UPT Labkes menjadi Labkesmas

Beberapa Tantangan yang ada antara lain :

1. Penyakit akibat pola gaya hidup yang tidak sehat;
2. Kondisi lingkungan yang kurang sehat;
3. Adanya mobilitas penduduk dan kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya vektor;
4. Sarana prasarana fasilitas kesehatan belum optimal;
5. Kurangnya SDM Kesehatan, khususnya tenaga dokter dan paramedis;

Beberapa Peluang yang ada antara lain :

1. Komitmen stakeholder cukup tinggi;
2. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam implementasi program kesehatan cukup baik;
3. Tersedia kebijakan penatalaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Adanya Sistem manajemen mutu, Fasilitas pelayanan kesehatan sudah terakreditasi,
5. Adanya regulasi standar mutu layanan kesehatan;
6. Tersedia Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

Upaya intervensi yang dilakukan sebagai berikut:

a. Melakukan diskusi terarah atau *foccussed group discussion* (FGD) untuk menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi serta faktor penghambat (ancaman dan kelemahan) dan pendorong (peluang dan kekuatan).
b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah ditentukan melalui *brain storming.*

c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan dan menghitung kekuatan pendorong maupun kekuatan penghambat;
d. Membuat diagram magnet pendorong dan penghambat dalam menghadapi isu permasalahan Dinas Kesehatan.

Isu prioritas tersebut di atas menjadi agenda penting dalam pembangunan kesehatan kabupaten Kulon Progo guna pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, dan indikator daerah serta mendukung SPM dan SDGs sebagai komponen penting dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat. SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SDGs merupakan indikator yang menyetarakan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat global, yaitu melalui peningkatan status gizi balita, penurunan angka kematian ibu dan bayi, memberantas penyakit menular dan tidak menular.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kesehatan, juga adanya surat dari Pemkab No. 000/1259 tanggal 26 Juni 2024 tentang Permintaan Pengurangan Anggaran Perangkat Daerah pada Rancangan Akhir RKPD tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	PAGU INDIKATIF (Rp 000)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	KEBUTUHAN DANA (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KESEHATAN				**123,844,688**					**123,747,255**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				**123,844,688**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**				**123,747,255**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**123,844,688**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**123,747,255**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**-**		**97,192,768**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**-**		**97,161,142**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		108,157	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		105,921	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	59,617	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	57,721	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	48,539	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	48,199	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	95,238,083	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	95,238,083	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1428 Orang/bulan	94,956,264	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1428 Orang/bulan	94,956,264	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	251,700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	251,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	30,119	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana*	12 Laporan	30,119	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	271,107	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	241,717	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	86,339	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	63,785	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	184,768	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	177,932	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	158,013	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	158,013	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	61 Unit	158,013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	61 Unit	158,013	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423,532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423,532	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	423,532	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1 Laporan	423,532	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				993,875	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				993,875	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	39 Unit	387,312	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	39 Unit	387,312	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	606,562	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*	3 Unit	606,562	
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		-	-	**26,459,522**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		-	-	**26,403,878**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,662,525	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,650,774	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*	1 Unit	167,836	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh*	1 Unit	163,809	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	30 Unit	755,873	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang*	30 Unit	755,873	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	2,642,419	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang*	1 Paket	2,638,195	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	1 Paket	96,396	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	1 Paket	92,896	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				22,753,975	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				22,710,082	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3881 Orang	51,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3881 Orang	50,890	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3937 Orang	25,035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3937 Orang	25,035	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3891 Orang	20,990	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	3891 Orang	20,478	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	19194 Orang	16,958	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	19194 Orang	16,418	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	47643 Orang	128,230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	47643 Orang	113,550	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	66964 Orang	23,294	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	66964 Orang	15,610	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	50049 Orang	173,228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	50049 Orang	173,228	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10447 Orang	16,180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10447 Orang	16,180	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3934 Orang	187,647	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	3934 Orang	187,647	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1410 Orang	9,445	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1410 Orang	9,445	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	4078 Orang	74,355	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	4078 Orang	74,355	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	4877 Orang	136,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	4877 Orang	136,800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	4,990	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana*	1 Dokumen	4,990	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	71,725	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi*	1 Dokumen	71,725	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	35,408	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	35,408	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	554,025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	554,025	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	88,563	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	88,563	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	50,959	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	50,959	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	150,265	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	149,735	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	19,458,600	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	19,458,600	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	63,680	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	56,100	

	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang*	21 Unit	11,065	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses*	21 Unit	11,065	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	138,872	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	138,372	
					0					0	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	396,788	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	1 Dokumen	385,931	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	21 Unit	26,901	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di*	21 Unit	26,401	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	22,005	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian*	1 Laporan	22,005	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	425,970	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu*	1 Unit	425,970	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	336 Orang	43,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	336 Orang	43,000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	141 Orang	12,220	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	141 Orang	12,220	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	335,370	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	335,370	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				9,270	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				9,270	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	9,270	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	9,270	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33,752	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33,752	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	40 Unit	28,502	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)*	40 Unit	28,502	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	5,250	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*	1 Dokumen	5,250	

3.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		-	-	**117,230**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		-	-	**107,867**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				22,651	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				22,651	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	22,651	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	22,651	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				89,944	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				80,580	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	49 Orang	32,135	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	49 Orang	28,847	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	57,808	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	51,733	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4,635	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4,635	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	21 Orang	4,635	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan*	21 Orang	4,635	
4.	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN**		-	-	**23,894**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN**		-	-	**23,894**	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah				21,094	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri				21,094	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh*	1 Dokumen	21,094	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat*	1 Dokumen	21,094	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				2,800	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah				2,800	

	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	32 produk Unit	2,800	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut*	32 produk Unit	2,800	
			-	-	0			-	-	0	
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		-	-	**51,272**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG**		-	-	**50,472**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				18,673	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				18,673	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	18,673	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan*	1 Dokumen	18,673	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32,599	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				31,799	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	32,599	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	31,799	
					123,844,688					**123,747,255**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah di kabupaten diakomodir yang sesuai dengan bidang ketugasan Dinas Kesehatan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Masyarakat juga mengajukan usulan proposal jamban sehat melalui desa, kemudian pihak desa mengajukan ke Dinas Kesehatan. Aspirasi masyarakat terkait masalah kesehatan dapat juga disalurkan melalui Pokok Pikiran Dewan, kemudian usulan akan diteruskan pada Dinas Kesehatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan. Terhadap beberapa masukan tersebut Dinas Kesehatan berusaha untuk menindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Tabel 2.2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program : **Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	Kegiatan : **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo	Pemberian PMT Balita KEK	Sejumlah balita KEK yang ada di beberapa desa	Sudah terakomodir, dengan mempertimbangkan prioritas warga kurang mampu
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo	Pemberian Bantuan Jamban Sehat	Sejumlah KK kurang mampu di tiap desa	Sudah terakomodir, melalui verifikasi data warga miskin dari Dinas sosial

Usulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita KEK ini juga sesuai dengan pemenuhan kebutuhan untuk penanganan stunting yang merupakan salah upaya pencapaian target prioritas nasional. Usulan pemberian bantuan jamban sehat ini juga selaras dengan upaya mendukung kebijakan pusat dalam mewujudkan pencapaian Kabupaten Sehat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan RPJPN 2025-2045, sasaran jangka menengah 2025-2045 adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama yaitu: 1) mencapai pendapatan perkapita setara negara maju, 2) kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, 3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, 4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan 5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dengan tema pembangunan "Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" adalah meliputi:

a. Mewujudkan transformasi sosial
b. Mewujudkan transformasi ekonomi
c. Mewujudkan transformasi tata kelola
d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Pembangunan kewilayahan
g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

Kementrian Kesehatan menetapkan kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

Tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 seperti yang dituangkan pada RPD 2023-2026 ialah:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;

5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD 2023-2026 maka fungsi dan tugas Dinas Kesehatan terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 2 : "Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya."

Tujuan ini jika diselaraskan dengan misi RPJPD Kulon Progo 2005-2025 maka sesuai dengan misi ke-4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat."

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sekaligus mendasar pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T.C 25)
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
pada jangka menengah

No	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja OPD				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				realisasi	realisasi	target	target	target	target	
	TUJUAN									
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Keluarga Sehat**	**%**	**25,00%**	**27,00%**	**29,00%**	**31,00%**	**33,00%**	**35,77%**	**35,77%**
			org	32.474	35.773	39.176	42.683	46.294	51.108	51.108

			org	129.897	132.494	135.091	137.688	140.285	142.882	142.882
	SASARAN									
	Meningkatknya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	**Rata-rata prosentase pencapaian progam masing-masing perangkat daerah**	**%**	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin	**Angka Kematian Ibu**	**per 100.000 KH**	**222,17**	**179,53**	**145,08**	**117,23**	**94,73**	**76,55**	**76,55**
				10	8	6	5	4	3	3
				4.501	4.456	4.411	4.367	4.324	4.280	4.280
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	**Angka Kematian Bayi**	**per 1.000 KH**	**10,00**	**8,98**	**7,48**	**7,33**	**7,17**	**7,01**	**7,01**
				45	40	33	32	31	30	30
				4.501	4456	4.411	4.367	4.324	4.280	4.280
	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	**Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**	**%**	**66,01%**	**79,12%**	**80,33%**	**81,22%**	**82,10%**	**83,24%**	**83,24%**
		% capaian pelayanan ibu hamil sesuai standar		**92,87%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
				4.400	4.488	5.310	5.360	5.410	5.460	5.460
				4.738	4.488	5.310	5.360	5.410	5.460	5.460
		% capaian pelayanan ibu bersalin sesuai standar		**94,45%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
				4.475	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	5.300
				4.738	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	5.300
		% capaian pelayanan ibu bersalin sesuai standar		**82,17%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
				3.875	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	5.300
				4.716	4.488	5.100	5.150	5.200	5.300	5.300
		% capaian pelayanan balita sesuai standar		**66,25%**	**86,83%**	**90,46%**	**90,46%**	**90,46%**	**90,46%**	**90,46%**
				18.369	19.550	21.216	21.216	21.216	21.216	21.216
				27.725	22.515	23.454	23.454	23.454	23.454	23.454
		% capaian pelayanan anak usia dasar sesuai standar		**51,70%**	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**64,00%**
				27.517	32.438	32.976	33.517	34.057	34.598	34.598
				53.229	54.060	54.060	54.060	54.060	54.060	54.060
		% capaian pelayanan usia produktif sesuai standar		**91,82%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
				40.126	51.650	59.725	61.218	64.204	68.720	68.720
				43.702	51.650	59.725	61.218	64.204	68.720	68.720
		% capaian pelayanan usila lanjut sesuai standar		**54,06%**	**60,29%**	**65,00%**	**69,49%**	**73,92%**	**81,36%**	**81,36%**
				36.682	41.000	44.525	47.950	51.375	56.955	56.955
				67.857	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000	70.000
		% capaian pelayanan hipertensi sesuai standar		**17,73%**	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**64,00%**
				4.771	4.803	4.883	4.963	5.043	5.123	5.123
				26.915	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005	8.005
		% capaian pelayanan		**38,13%**	**60,00%**	**61,00%**	**62,00%**	**63,00%**	**64,00%**	**64,00%**
				2.489	2.520	2.562	2.604	2.646	2688	2688
				6.528	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

		Diabetes Mellitus sesuai standar								
		% capaian pelayanan ODGJ sesuai standar		**76,30%**	**90,01%**	**91,02%**	**91,97%**	**92,98%**	**93,99%**	**93,99%**
				1.207	1.424	1.440	1.455	1.471	1.487	1.487
				1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
		% capaian pelayanan TB sesuai standar		**72,93%**	**72,30%**	**73,48%**	**74,66%**	**75,84%**	**77,02%**	**77,02%**
				3.251	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500	3.500
				4.458	4.564	4.559	4.554	4.549	4.544	4.544
		% capaian pelayanan HIV sesuai standar		**53,69%**	**60,00%**	**61,00%**	**62,01%**	**63,00%**	**64,01%**	**64,01%**
				3.620	4.046	4.113	4.181	4.248	4.316	4.316
				6.743	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan adalah "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" yang diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan" yang diukur dengan AKI, AKI dan Indeks Pencapaian Pelayanan Kesehaan yang memenuhi standar (SPM).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomer dua : "Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya" serta terkait dengan pencapaian sasaran pembanugnan daerah nomer empat : "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat", maka Dinas Kesehatan melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Total rencana usulan anggaran Rp 26.403.878.655,- dengan 4 kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
    1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
    2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
    4. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
    1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
    5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
    6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
    7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
23. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
24. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25. Operasional Pelayanan Puskesmas
26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
28. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
29. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
30. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
31. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
32. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
   sub kegiatan :
   1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota; sub kegiatan :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Total rencana usulan anggaran Rp 107.867.000,- dengan 3 kegiatan :

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
   1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
   1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
   2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
   1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman;

Total rencana usulan anggaran Rp 23.894.700,- dengan 2 kegiatan :

a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
   1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
   1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Total rencana usulan anggaran Rp 50.472.700,- dengan 2 kegiatan :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
    1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
    1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Program kegiatan tersebut di atas didukung sekretariat, yang mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total rencana usulan anggaran Rp 97.161.142.786,- dengan 5 kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat; sub kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; sub kegiatan :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jasa Administrasi Keuangan
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; sub kegiatan :
    1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; sub kegiatan
    1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

4.2. Pendanaan

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**97.161.142.786,00**						**-**	**62.990.100.690,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	105.921.500,00			-	-	-	-	115.122.304,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	57.721.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.782.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	48.199.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.339.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	95.238.083.296,00			-	-	-	-	60.860.289.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1428 Orang/bulan	94.956.264.196,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.517.534.145,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	251.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		321.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	30.119.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.500.732,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	241.717.650,00			-	-	-	-	305.148.206,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.785.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.622.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	177.932.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.525.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	158.013.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				61 Unit	158.013.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	423.532.024,00			-	-	-	-	472.863.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	423.532.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		472.863.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	993.875.316,00			-	-	-	-	1.076.676.678,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	387.312.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		428.974.524,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	606.562.916,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		647.702.154,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**26.403.878.655,00**						**-**	**31.562.396.008,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.650.774.525,00			-	-	-	-	3.978.134.887,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	163.809.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		329.618.399,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	755.873.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		610.349.289,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.638.195.125,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.858.829.953,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	92.896.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.337.246,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.710.082.130,00			-	-	-	-	27.530.908.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3881 Orang	50.890.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3937 Orang	25.035.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3891 Orang	20.478.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.492.558,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19194 Orang	16.418.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.261.638,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47643 Orang	113.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.501.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66964 Orang	15.610.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.447.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50049 Orang	173.228.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.911.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10447 Orang	16.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.101.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3934 Orang	187.647.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		233.585.539,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1410 Orang	9.445.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.047.914,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4078 Orang	74.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.856.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4877 Orang	136.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		158.152.324,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	4.990.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.642.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	71.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.686.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	35.408.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.592.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	554.025.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		686.338.923,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	88.563.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.668.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50.959.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.602.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	149.735.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.988.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	19.458.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.546.176.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	56.100.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.548.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				21 Unit	11.065.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.226.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	138.372.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		374.803.187,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	385.931.430,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.769.879,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	26.401.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.990.636,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	22.005.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.894.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	425.970.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		449.205.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				336 Orang	43.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.755.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				141 Orang	12.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.463.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	335.370.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		407.570.834,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	9.270.000,00			-	-	-	-	13.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	9.270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.752.000,00			-	-	-	-	39.921.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				40 Unit	28.502.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.918.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.002.492,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**107.867.000,00**						**-**	**143.226.248,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.651.200,00			-	-	-	-	42.363.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	22.651.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.363.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.580.800,00			-	-	-	-	94.056.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				49 Orang	28.847.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.713.204,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.733.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.343.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.635.000,00			-	-	-	-	6.806.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				21 Orang	4.635.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.806.250,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**23.894.700,00**						**-**	**26.257.000,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	21.094.700,00			-	-	-	-	23.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	21.094.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	2.800.000,00			-	-	-	-	2.601.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				32 produk Unit	2.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.601.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**50.472.700,00**						**-**	**36.484.283,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.673.000,00			-	-	-	-	15.176.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	18.673.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.176.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.799.700,00			-	-	-	-	21.308.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	31.799.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.308.100,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026 dalam menunjang pencapaian Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa belum semua sasaran target indikator dapat dicapai di tahun 2023, tetapi beberapa kegiatan telah kami upayakan untuk mencapainya di tahun 2024, untuk itu bantuan dari beberapa pihak terkait sangat kami harapkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksana program pada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan maupun pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo

dr. Sri Budi Utami, MKes
NIP. 19660520 199603 2 001

RENCANA KERJA

2025

DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KAB. KULON PROGO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar belakang 4

1.2 Landasan hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2023 ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPDdan Capaian Renstra OPD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 24

a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 25

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 25

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 29

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 29

2.5.Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **40**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.4 Program dan Kegiatan 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **42**

BAB V PENUTUP .....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja TA 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun anggaran 2023, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan DPUPKP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Kerja OPD, ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates 2 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PUP-KP

Ir.GUSDI HARTONO.,M.T.

NIP.19650806 199303 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan Rencana kerja, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan..

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja DPUP-KP Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra DPUP-KP Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda DIY.

Proses penyusunan Rencana kerja DPUPKP Tahun 2025 didasarkan pada RPD 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Perubahan RPD. Tahun 2025 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2023-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPKP serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerahYaitu :"Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kulon Progo.Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD, dokumen renja K/L dan Renja provinsi

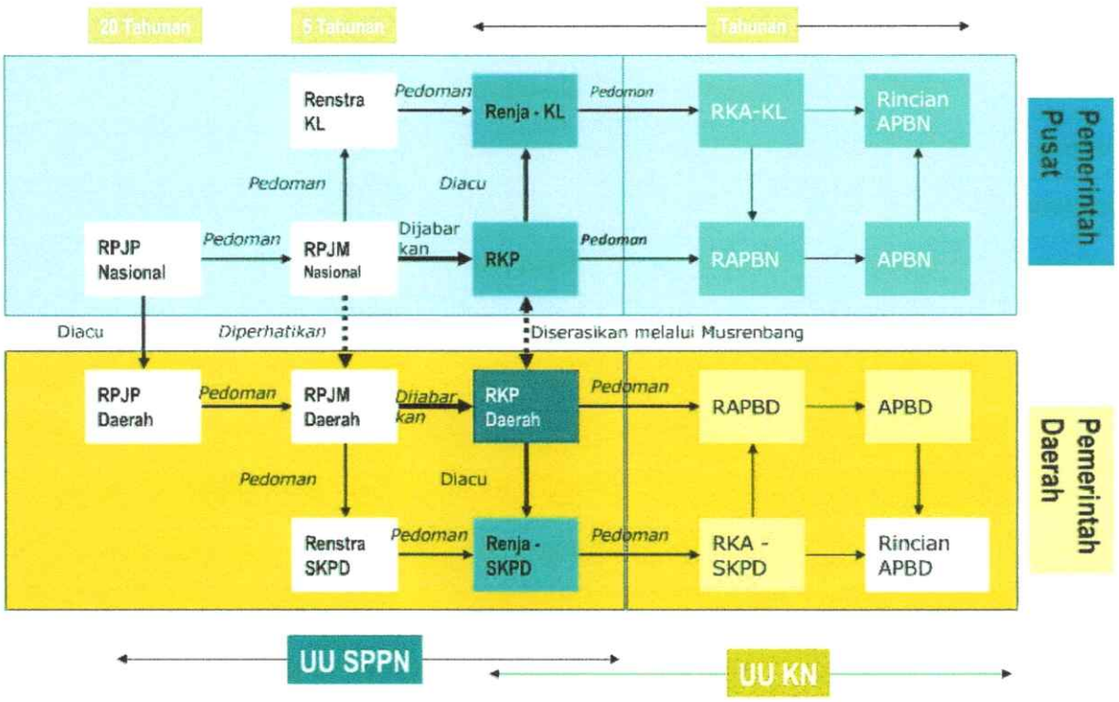

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah sebagai berikut:

1). Undang-undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan;
2). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4). Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8). Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9). Permendagri RI No 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasi fikasi, kod efikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

12). Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13). Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

14). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

15). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

16). Keputusan Bupati No 22 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

17). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025,

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2025 dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2.Tujuan

a. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang;

b. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2025 sesuai dengan rencana program jangka menengah daerah kabupaten Kulon Progo 2023-2026.

c. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang serta urusan lain yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahun anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil evaluasi rencana kerja tahun 2023
Bab III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah
Bab IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)

Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 dalam Bab III Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu pasal empat disebutkan : **"Dinas Mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman"**.Sesuai dengan Kemendagri No 050 tahun 2022 selain Program dan Kegiatan juga adanya sub kegiatan pada tiaptiap kegiatan. Program dan kegiatan DPUPKP tahun 2023 sebanyak 13 (tiga belas) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) dengan perincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
10. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

12. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

13. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan

II. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

G.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

15. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

H.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

16. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

III. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

I. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

18. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

IV. **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

J. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

19. Penyediaan Sarana Persampahan

V. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

K.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

20. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

21. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

VI. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

L. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

22. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

23. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

VII. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

M. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

24. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

VIII. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

N.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

25. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
26. Rekonstruksi Jalan
27. Pemeliharaan Berkala Jalan
28. Pemeliharaan Rutin Jalan
29. Pembangunan Jalan
30. Pemeliharaan Rutin Jembatan

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

O.Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

31. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

P.Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

32. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

X. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Q. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus

33. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
34. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota

XI. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

R.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha

35. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

XII. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

S. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

36. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
37. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

XIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

T. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

38. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh

Adapun capaian kinerja program sebagai berikut :

a. Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran

   Program administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah, sehingga capaiannya pada tahun 2023 mencapai 100% dari renstra PD

b. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana perkantoran. Capaian ketersediaan sarana perkantoran ini telah mencapai 100%

c. Capaian perencanaan , pengendalian, dan evaluasi kinerja

   Program perencanaan , pengendalian dan evaluasi berisikan kegiatan penyusunan rencana Kerja, pelaporan keuangan, dan pengendalian & evaluasi. Semua dokumen tersusun sesuai target,yaitu 17 dokumen, Sehingga capaian dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada tahun tercapai sebesar 100 %

d. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

   Tahun 2023 ini mencapai 72.01%.Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ini berisikan kegiatan : pemeliharaan berkala jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan rutin jembatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten telah mendukung sasaran daerah yaitu "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah".

e. Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik.

   tahun 2023 Indikator ini telah mencapai target sebesar 86.97% Didalam program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air yang berisikan kegiatan : pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, Pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong,Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai,Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,Pengelolaan Jaringan Irigasi,Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif,Pemberdayaan Petani Pemakai Air, dan Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi, dari semua kegiatan telah mendukung tercapainya ketersediaan air baku untuk irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

f. Capaian Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi

   tahun 2023 Indikator ini telah mencapai target sebesar 89.01 %. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana peralatan uji yang memadai serta didukung oleh peralatan berat dan juga tenaga ahli konstruksi yang profesional yang tentunya juga mendukung tercapainya sasaran daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan,

g. Capaian Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi . tahun 2023 Indikator ini telah mencapai target yaitu 73.58% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum ini berisikan kegiatan pembangunan gedung kantor dan bangunan umum lainnya, Pembinaan dan pengawasan IMB dan Pembinaan jasa konstruksi, Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dapat dipastikan bahwa konstruksi gedung pemerintah berkualitas dan telah memenuhi ketentuan tata letak dan ruang sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.

h. Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minumtahun 2023 Indikator pelayanan air bersih dan sanitasi telah tercapai sebesar 96.52% %. Program ini

berisikan kegiatan penyediaan sarana air bersi dan sanitasi, Dengan didukung oleh anggaran yang memadai baik dari APBD, DAK, dan APBN capaian ketersediaan air bersih di Kulon progo telah mendukung sasaran SKPD "Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan" adapun Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Tahun 2023 indikator ini telah mencapai target sebesar 88%.

i. CakupanPersentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani. Tahun 2023 Capaian indikator ini sebesar 44.28% Program ini berisikan kegiatan : Penyediaan PSU, Pemberdayaan infrastruktur oleh komunitas dan pembangunan fasilitas rusunawa, Anggaran DAK dan BKK sangat mendukung peningkatan pelayanan perumahan terutama pelayanan rumah layak huni.

j. Capaian Persentase penataan bangunan dan lingkungannyasebesar 73.47%. Program ini berisikan kegiatan : pemeliharaan kebersihan kota, pengelolaan persampahan dan pengelolaan taman, Adapun dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya estetika lingkungan Kabupaten Kulon progo terutama di Kota wates dan sekitarnya, Dengan demikian kegiatan ini mendukung sasaran SKPD yaitu Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan

k. Capaian Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani sebesar 10.57% dan telah mencapai target. Kegiatan ini mencakup penanganan Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten Kulon Progo. Pada tahun ini menangani RTLH sebesar 300 Unit.

l. Capaian Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat. Di tahun 2023 ini telah mencapai target sebesar 73.82%. Kegiatan ini mencakup penanganan Rusunawa di tiga lokasi (Triharjo, Giripeni dan Tuksono) dan juga penanganan terhadap Rusus di Temon.

Secara garis besar semua program telah tercapai sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Program	Penjelasan keberhasilan
1	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	Adanya dana DAK dan DID untuk penanganan jalan
2	Program Peningkatan Kualitas Konstruksi	Adanya informasi tentang uji lab tentang jenis-jenis pengujian yang disampaikan penyedia jasa konstruksi
3	Program Pengembangan. Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Adanya anggaran DID untuk pembangunan irigasi
4	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya	Pendorong : P3A ikut serta dalam proses Kontruksi. sebagai bentuk pemberdayaan sehingga menimbulkan rasa memiliki untuk bersama sama memelihara saluran Irigasi agar berfungsi dengan baik Pendorong : Ada bebrapa Daerah irigasi baru yang dapat dibangun untuk cetak sawah baru
5	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	Kesadaran masyarakat meningkat terhadap akses air limbah; dana CSR. dana desa. DAK
6	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Adanya sarpras persampahan yang didapat dari DAK
7	Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	kolaborasi berbagai sektor OPD. serta lembaga lain seperti BAZNAS. CSR. dsb

Dari sisi lain juga ada program dan kegiatan yang belum mencapai target yaitu Program Pengembangan Perumahan. Faktor penghambat Beberapa unit rusun mengalami rusak berat. Kebijakan yang dilakukan adalah Komponen prasarana dasar perlu perbaikan menyeluruh untuk menarik minat penyewa.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran capaian IKU sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	72.80	73.00
2	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	58.18	62.72
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh pencapaian program sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II Pengukuran Kinerja Program DPUPKP Kulon Progo Tahun 2023

No	Program	Indikator	2023	
			Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	86.76	86,97
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	94.12	96.52
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	22.57	26.09
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	88.66	88.73
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	73.44	73.58
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	69.23	73.47
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	73.39	73.39
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	88.70	89.01

9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	76.54	73.82
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	4.97	10.57
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	43.76	44.28

Adapun jumlah anggaran dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
Belanja Operasi	65.695.785.047	63.876.562.191		*Sumber LRA 2023*
Belanja Modal	105.022.193.370	86.521.485.634		
Jumlah	170.717.978.417	150.398.047.825	88,10	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAMDAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)	REALISASI RENJA 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300**	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	12	4	4	100	4	**20**	120
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakaN	48	12	12	12	100	12	**36**	1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92.00	12	12	12	100	12	**36**	9

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				-				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56.00	12	12	12	100	12	**36**	15
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56		14	14	100	14	**28**	1
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				-			**0**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	12	12	12	100	12	**36**	9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				-			**0**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	2	100	2	**6**	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	21	21	21	100	21	**63**	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				-			**0**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16,00	4	86	86	100	2	**92**	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				-			**0**	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	34	34	100	34	**80**	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	3	3	100	4	**19**	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	42	42	42	100	42	**126**	1
	Program Penyelenggaraan Jalan	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**75,69**	**72,63**	**73,39**	73	100	**74,16**	**220,18**	3
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-			**0**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, BimbinganTeknis, Pengelolaan Pengendalian	3	0	-	-	-	7	**7**	2
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12	881	28,475	28	100	14,98	**924,455**	77
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40,0	7793	9,91	10	100	7,90	**7810,81**	195
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	360	2	40	40	100	40,00	**82**	0
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,0	3,9	0,07	0	100	1,300	**5,27**	3
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara	200	25	100	100	100	40,00	**165**	1
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibanngun	60	0	-	-		2	**2**	0
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	30	0	-	-		40	**40**	1

	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	8	0	2	2	100	800,00	**802**	100
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik**	**87,28**	**85,96**	**86,76**	87	100	**86,77**	**259,49**	3
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Perlunya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga*				-			**0**	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	12	12	12	100	5	**29**	1
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	126	300	12	12	100	302	**614**	5
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik*				-	#DIV/0!		**0**	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (km)	3,1	2,3	2	2	100	1,2	**5,5**	2
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	5,2	8	1,80	2	100	1,2	**11**	2
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	19,00			-			**0**	0
	Program Penataan Bangunan Gedung	**Presentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan terbtib administrasi**	**75,00**	**68,14**	**73,44**	73	100	**73,96**	**215,54**	3

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-			**0**	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9	1	8	8	100	4	**13**	1,44
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SLMBG	800	300	180	180	100	180	**660**	0,83
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Presentase Uji Laboraturium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi**	**93,23**	**81,25**	**88,70**	89	100	**90,27**	**260,22**	2,79
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					-			**0**	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dukungan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	839	75	35	35	100		**110**	0,13
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					-			**0**	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	150	12	12	100	35	**197**	1,97

	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-			0	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi	370			-		28,00	28	0,08
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Presentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**	**88,92**	**89,42**	**88,66**	89	100	**88,71**	**266,79**	3,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-			0	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	704	4	447	447	100	173	624	0,89
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	12	1	1	100	1	14	3,50
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (DAK)	2.972		-	-			0	0,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**94,35**	**89,42**	**94,12**	94	100	**94,21**	**277,75**	2,94
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	#DIV/0!		0	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	842		1.280	1.280	100		1280	1,52
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	2.000		-	-			0	0,00

		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK)	5.461		-	-			0	0,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan SPAM (DAK)	24		-	-			0	0,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Keistimewaan	877		-	-			0	0,00
		Perluasan Jaringan Perpipaan di Kaliagung, Sentolo 1 Paket			-	-			0	
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	**Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**	**23,22**	**76,48**	**22,57**	23	100	**22,89**	**121,94**	5,25
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-			0	
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	4	12	30	30	100	3	**45**	11,25
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/?TPS-3R/TPS (DAK Fisik)	3.000		-	-			0	0,00
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	**Presentase penataan bangunan dan lingkungannya**	**73,08**		**69,23**	69	100	**69,23**	**138,46**	1,89
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-			0	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwasata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya/Pertamanan	8		52	52	100	52	**104**	13,00

	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					-				
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani**	**46,10**		**43,76**	44	100	**44,54**	**88,3**	1,92
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-				
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60		34	34	100	80	**114**	1,90
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4		-	-		4	**4**	1,00
	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin	280		-	-			**0**	0,00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	-		1	1	100		**1**	
	Program Kawasan Permukiman	**Presentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani**	**8,26**		**6,62**	7	100		**6,62**	0,80
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-				-				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.600		300	300	100		**300**	0,19
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400		-	-			**0**	0,00
	Program Pengembangan Perumahan	**Presentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat**	**84,22**	**40,56**	**76,54**	77	100	**78,50**	**195,6**	2,32
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-				

	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	12	12	5	5	100	2	**19**	1,58
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-				
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100	1	**2**	0,50
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati**	**100**	**50**	**25,00**	25	100		**75**	0,75
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-				
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-		10	10	100	5	**15**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

A. Pencapaian Kinerja program

Kinerja tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Kulon Progo melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) dengan perincian sebagai berikut:

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum:

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Target Pencapaian SPM

Target penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 untuk Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Tahun 2023
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Tahun 2023

Target penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023untuk Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Capaian
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Tahun 2023
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tahun 2023

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1610	1610	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	447	447	100%

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum belum maksimal karena saat ini masih menggunakan data sekunder dari Dinas Kesehatan, belum ada data khusus (databese) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo untuk capaian air minum dan sanitasi penduduk di Kulon Progo karena keterbatasan SDM dan anggaran untuk melakukan sensus penduduk untuk mendata sarana air minum dan sanitasi

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Dalam Tahun (%)	Realisasi (%)
1.	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	3	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	100

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat 0 (nol) karena tahun 2023 di Kabupaten Kulon Progo tidak ada bencana dengan skala kabupaten dan tidak ada relokasi program kabupaten sehingga tidak ada nilai yang dimasukkan sebagai capaian SPM.

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan penerintahan.IKK Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo meliputi urusan wajib pelayan dasar yang meliputi urusan pekerjaan umum dan peataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Realisasi pencapaian IKK Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel IKK outcome Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun2023

IKK Outcome (Hasil)

	Urusan		IKK Outcome (Hasil)	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	OPD	HASIL EVALUASI 2020	
							Elemen data	Capaian Kinerja
	Urusan Wajib Berdasar Pelayanan Dasar							
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	.....%	DPUPKP	0	0,00
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)		DPUPKP	0	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	..... %	DPUPKP	0	0,00
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)		DPUPKP	0	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)	.....%	DPUPKP	1.813	100
				Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten		DPUPKP	1.813	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	.....%	DPUPKP	158.552	93,12
				Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.		DPUPKP	170.270	
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	.....%	DPUPKP	117.283	97,17
				Jumlah rumah di Kabupaten		DPUPKP	120.676	
		6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya		DPUPKP	70.215	100
				Jumlah IMB yang berlaku		DPUPKP	70.215	
		7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap	.....%	DPUPKP	904,809	69,14
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten		DPUPKP	1.308,645	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	.....%	DPUPKP	639	52,16
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten		DPUPKP	1.225	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	.....%	DPUPKP	245	100
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		DPUPKP	245	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	.....%	DPUPKP	0	0
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		DPUPKP	0	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	.....%	DPUPKP	0	0
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		DPUPKP	0	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	.....%	DPUPKP	10,11	64,85
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		DPUPKP	15.59	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	.....%	DPUPKP	7.271	6,03
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		DPUPKP	120.676	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	.....%	DPUPKP	2.837	100
				Jumlah unit rumah Kabupaten		DPUPKP	2.837	

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD		Proyeksi		catatan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A												
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	%		100	100	100	100	97,68	100	100	100	
2	Penyediaan air limbah domistik	%		100	100	100	100	91,99	100	100	100	
3	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni korban bencana kabupaten/kota	%		100	100	100	100	96	100	100	100	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemda Kab/Kota	%		100	100	100	100	100	100	100	100	
B												
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	%		71.21	71.69	71.99	72.63	71.23	69,14	71.69	72.63	
2	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten (tidak ada kewenangan kabupaten)	%		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, danakresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten (tidak ada kewenangan kabupaten)	%		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	%		97,6	97,68	97,76	97,83	89,23	93,12	97,76	97,83	
6	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domistik	%		-	-	-	-	-	97,17			
7	Persentase tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		20	21	22	22,5	20.5	21	22	22,5	

8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi	%		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	rumah tangga bersanitasi	%		78.95	79.66	80.35	81.01	91,99	79.66	80.35	81.01	
10	Rumah tangga pengguna air bersih	%		97.6	97.68	97.76	97.83	89,23	97,68	97,76	97,83	
11	Kawasan kumuh	%		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
12	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayanai oleh jaringan irigasi	%		83,16	84,09	85,03	85,96	99,73	100	85,03	85,96	
13	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%		100	100	100	100	96	100	100	100	
14	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masayarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%		100	100	100	100	96	100	100	100	
15	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	%		61.64	61.64	61.64	61.64	61.64	61.64	61.64	61.64	
16	berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	%		6.8	6.5	6.25	6	6.89	6.6	6.4	6.2	
17	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%		0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Rumah layak Huni	%		93,2	93.5	93.75	94	93,11	93.5	93.75	94	
C												
1	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi Mantap	%		72,25	72,75	73,25	73,86	72,47	72,75	73.15	73.86	
2	indeks ketersediaan sumber daya air	Nilai		84,44	84,54	84,64	84,74	84,44	84,54	84.64	84.74	
3	cakupan sarana prasarana gedung pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%		62,08	64,08	66,15	68,14	62,35	64,08	66.15	68.14	
4	cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	%		60,55	63,70	65,38	71,97	62,76	63,70	65.38	71.97	
5	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%		100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam infrastruktur Pekerjaan Umum terdapat beberapa isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan OPD, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya merupakan salah satu Kabupaten dalam Propinsi DIY yang sedang berkembang, Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

1. Pelayanan OPD dalam bidang air minum sejauh ini masih kurang memenuhi dari yang seharusnya, seiring dengan perkembangan daerah dan pertambahan jumlah penduduk bidang pelayanan air minum perlu perhatian dan peningkatan debit, wilayah layanan,
2. Hambatan dalam pelayanan infrastruktur terkendala kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit juga terkendala adanya potensi bencana tanah longsor di wilayah pegunungan Kulon Progo bagian utara.
3. Pencapaian Program nasional yang berkaitan dengan SDG's (*Sustainabledevelopment goals*) terkendala dengan adanya perubahan kondisi alam/iklim yang tidak menentu, dalam hal ini kondisi ketersediaan air yang berpengaruh pada pencukupan kebutuhan air irigasi pertanian, air minum dan lain-lain, hal ini harus disikapi secara arif sejak dini,
4. Adanya beberapa perkembangan penting di wilayah kabupaten Kulon Progo, antara lain mega proyek, kawasan ekonomi khusus dan pengembangan Bandar Udara yang dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan infrastruktur.

Dari isu isu tesebut diatas diberikan sebuah arah kebijakan atau strategi untuk merumuskan permasalahan permasalahan tersebut. Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting dan mendasar yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Rekomendasi, saran, kebijakan, strategi yang perlu diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Perlunya mempertimbangkan usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas (penanganan kemiskinan, stunting dan ketahanan pangan)
2. Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih guna mejnaga kesehatan masyarakat terutama di kawasan rawan kekeringan
3. Penanganan infrastruktur yang akan menjamin konektifitas dan stabilitas yang mendorong lancarnya roda perekonomian.
4. Penanganan kemiskinan dengan menjaga ketahanan pangan serta menjamin kesehatan dengan penyediaan perumahan layak huni

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel VI. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.948.526.370**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
1	***Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Daerah***					***Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Daerah***					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	43.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	52.188.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dok	25.549.099	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dok	26.030.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang	6.828.648.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	6.330.095.812	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 DOK	129.150.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 DOK	121.550.000 0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 Laporan	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	14 Laporan	25.472.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	107.170.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	106.048.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	237.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.534.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	426.412.034	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	57.151.300	
9	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	LingkupDPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	65.138.810	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	409.324.248	
10	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	LingkupDPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	417.543.434	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lingkup DPUP-KP	pembayaran air dan listrik	12 bulan	417.508.516	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	889.000.000	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	395.157.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	571101300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	53.019.200	
	Penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan.pajak. dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	785.026.220	Penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan.pajak. dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	698.891.800	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					
1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
a	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit	18.031.440.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		338.053.000	
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	302 lembaga	610.175.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		359.738.000	
2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 km	19.415.504.600	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 km	3.856.351.000	
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.2 km	4.520.086.100	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.2 km	5.522.349.400	
C	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.2 liter/detik	2.709.806.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.2 liter/detik	0	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	1000 SR	2.184.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	1000 SR	471.571.600	
D	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 unit	3.660.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 unit	3.884.472.700	
E	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
a	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	267 Rumh Tangga	9.948.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		1.846.266.600	
b	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	**3 unit**	315.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	**3 unit**	281.403.800	
F	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					
1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**					**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**					
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan	180 Dok	450.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan		146.104.200	
b	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	1.630.000.000	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	4.697.598.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
G	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Pariwisata. Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Pariwisata. Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	52 dok	1.501.906.300	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Pariwisata. Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	52 dok	2.098.961.000	
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disu	5 dok	220.000.000	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disu	5 dok	740.323.300	
	Pembangunan Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dibangun	0.3 km	2.600.000.000	Panjang Jalan yang Dibangun	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dibangun	0.3 km	1.439.946.100	
	Rekonstruksi Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Direkonstruks	**6 km**	117.450.000.000	Rekonstruksi Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Direkonstruks	**6 km**	18.135.574.013	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkal	0.8 km	31.125.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkal	0.8 km	1.656.957.800	
	Pemeliharaan Rutin Jembata	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	40 jembatan	1.100.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembata	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	40 jembatan	1.099.589.000	
e	Pembangunan Jembata	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 jembatan	2.600.000.000	Pembangunan Jembata	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 jembatan	5.802.785.300	
f	Survey Kondisi Jalan/Jembata	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisiny	800 km	550.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembata	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisiny	800 km	530.949.700	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	v	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 km	2.600.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 km	7.846.211.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**					**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**					
a	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	35 orang	145.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	35 orang	148.765.204	
2	**Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**					**Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**					
a	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	**350 Paket**	380.000.000	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	**350 Paket**	426.772.900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA										
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan										
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen PemanfaatanRuangSatuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6 Dokumen		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen PemanfaatanRuangSatuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6 Dokumen	13.751.500.000	
j	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***					
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Lingkup Kulon Progo	umlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen	2.375.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Lingkup Kulon Progo	umlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen	1.191.599.800	
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Lingkup Kulon	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	unit	169.736.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1						*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							Progo	Kabupaten/Kota yang Terbangun			
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				64.912.000	
K	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	200 unit	8.425.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki.		3.737.810.000	
L	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
a	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 lokasi	39.736.100.000	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 lokasi	16.265.399.600	
b	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	7 laporan	82.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	7 laporan	99.836.000	
Jumlah						Jumlah					

Dari tabel diatas dilihat bahwa ada perbedaan anggaran. hal ini disebabkan karena pada usulan awal masih sebatas usulan dari proposal masyarakat dan belum memperhitungkan kondisi anggaran yang ada saat ini.

Catatan penting : anggaran usulan awal berbeda dengan hasil analisa kebutuhan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan efisiensi anggaran

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD Urusan Pekerjaan Umum. Perumahan. Lingkungan Hidup dan ESDM merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan SKPD merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) OPDuntuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPD 2023-2026 yang telah disusun. tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut. didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD. batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pekerjaan umum. perumahan lingkungan hidup ESDM ini memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang. dengan adanya kendala keterbatasan waktu. sumber daya. banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Rancangan rencana kerja DPUPKP didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ /volume/usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan berkala Jalan	Kulon Progo	Penanganan jalan	60	Pokir
2	Pembangunan Jalan	Kulon Progo	Penanganan jalan	189	Pokir
3	Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kulon Progo	Penanganan RTLH	476	Pokir.RPTK
4	Bantuan Pemasangan Jaringan Air Minum	Kulon Progo	Jaringan Air Minum	12	Pokir
5	Pembangunan Embung	Kulon Progo	Penanganan embung	16	Pokir.RPTK
6	Pembangunan Gedung Kantor	Kulon Progo	Penanganan gedung kantor	3	Pokir
7	Pembangunan Jalan	Kulon Progo	Penanganan jalan	189	Pokir
8	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kulon Progo	Penanganan irigasi	60	Pokir
9	Pembangunan talud	Kulon Progo	Penanganan tahlud	34	Pokir

10	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Permukiman (Jalan Lingkungan. Drainase Lingkungan. PJU Lingkungan)	Kulon Progo	PSU Lingkungan	996	Pokir
11	Rekonstruksi	Kulon Progo	Penanganan jalan	77	RPTK
12	Pembangunan Jembatan	Kulon Progo	Penanganan jembatan	9	RPTK
13	Drainase persawahan	Kulon Progo	Kulon Progo	3	RPTK
14	Pembangunan Saluran Pengatus Irigasi (Drainase)	Kulon Progo	Penanganan Irigasi	6	RPTK
15	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kulon Progo	penanganan Air Limbah	1	RPTK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usulan tahun 2025 baik dari pokir maupun RPTK merupakan usulan yang masuk pada OPD. Dan Ini tentunya menjadi prioritas pembangunan yang harus ditangani sebagai upaya tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Selanjutnya. berbagai usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang Kecamatan (RPTK). jaring aspirasi masyarakat. dan OPD dapat dalam lampiran Rencana Kerja OPD ini

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005- 2025. telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025. yaitu:

(1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

(2) Ekonomi.

(3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

(4) Politik.

(5) Pertahanan dan Keamanan.

(6) Hukum dan Aparatur.

(7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

(8) Penyediaan Sarana dan Prasarana. serta

(9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan dokumen perncanaan pembangunan nasional untuk periode ke-5 (kelima) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sasaran dalam RPJMN 2020-2025 adalah "mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri. Maju. adil. dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"

Visi dari RPJMN 2020-2025 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat. Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat. mandiri. dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong.maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 Untuk mencapai Visi tersebut. Pemerintah telah menetapkan Misi. yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif. mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hudup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih. efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020- 2025 dengan tema pembangunan "**Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera. Adil. dan Berkesinambungan**" adalah meliputi:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yangberkualitas dan berkeadilan;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangikesenjangan dan menjamin pemerataan ;
c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdayasaing;
d. Revolusi mental dan pembangunankebudayaan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana dan perubahaniklim;
g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai tugas dan fungsinya. DPUKP memiliki peran untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan di atas. baik sebagai instansi pendukung beberapa fokus prioritas dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Arah kebijakan merupakan pedoman umum untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan umum misi keempat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan
2. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
4. Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembanguan Daerah 2023-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kulon Progo 2005-2025. RPD periode 2023-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2025. adapun Visi Pembangunan Kulon Progo adalah "*Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju. Mandiri. Sejahtera Lahir dan Batin*". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005 - 2025 yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia. bermoral. beretika. berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman. damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Berlandaskan pelaksanaan. pencapaian. dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3. RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri. maju. sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas. berakhlak mulia dan berdaya saing.

Dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa tujuan daerah akan menjadi sasaran Perangkat Daerah. Sasaran tersebut yaitu "***Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah***". Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada tahun berjalan tentunya harus ada target yang hendak dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Ada 3 (tiga) IKU pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman di tahun 2025.

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai tahun 2025 adalah :

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan Kinerja	Target
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	73.71
2	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	63.15
3	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100

3.3 . Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas PUPKP mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kulon Progo dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026. Rencana Kerja Dinas PUPKP tahun 2025 mencakup 12 program yang terdiri 22 kegiatan dan 41 sub kegiatan sebagaimana tertulis pada bab selanjutnya (Bab IV).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas PUPKP yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 3 (tiga): *"Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan."*. Dinas PUPKP merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD 2023-2026 yang dituangkan dalam Rencana Stategis (Renstra) dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo.

Dari Rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas PUPKP tahun 2025 mencakup 12 program yang terdiri 22 kegiatan dan 41 sub kegiatan yaitu :

No	Uraian	Rancangan Anggaran tahun 2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.742.970.776**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	78.218.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.188.000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.030.000
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	6.477.118.512
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.330.095.812
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.550.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.472.700
3	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	106.048.000
3.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.048.000
4	***Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah***	50.534.200
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.534.200
5	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	883.984.064
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.508.516
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.151.300
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.324.248
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.147.068.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	698.891.800
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.157.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.019.200
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**10.076.491.400**
7	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai***	697.791.000

	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	359.738.000
7.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	338.053.000
8	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	9.378.700.400
8.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.856.351.000
8.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.522.349.400
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**471.571.600**
9	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	471.571.600
9.1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	471.571.600
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**3.884.472.700**
10	***Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota***	3.884.472.700
10.1	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.884.472.700
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.127.670.400**
11	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	2.127.670.400
11.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	281.403.800
11.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.846.266.600
VI	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**4.843.702.600**
12	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	4.843.702.600
12.1	Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.697.598.400
12.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	146.104.200
VII	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**2.098.961.000**
13	***Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota***	2.098.961.000
13.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.098.961.000
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**37.252.336.413**
14	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	37.252.336.413

14.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	740.323.300
14.2	Pembangunan Jalan	1.439.946.100
14.3	Rekonstruksi Jalan	18.135.574.013
14.4	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.656.957.800
14.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.099.589.000
14.6	Pembangunan Jembatan	5.802.785.300
14.7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	530.949.700
14.8	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.846.211.200
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**575.538.104**
15	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	148.765.204
15.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	148.765.204
16	***Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi***	426.772.900
16.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	426.772.900
IX	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**13.751.500.000**
17	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	13.751.500.000
17.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	13.751.500.000
	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**21.529.294.200**
X	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.426.248.600**
18	***Pendataan Penyediaandan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	64.912.000
18.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	64.912.000
19	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	169.736.800
19.1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	169.736.800
20	***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus***	1.191.599.800
20.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.191.599.800
XI	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.737.810.000**
21	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	3.737.810.000
21.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.737.810.000
XII	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**16.365.235.600**
22	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	**16.365.235.600**
22.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	16.265.399.600
22.1	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	99.836.000

Adapun target indikator kinerja program tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	Nilai	86.95
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	%	94.29
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	23.22
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	88.80
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%	74.48
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	71.15
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74.92
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	%	91.78
9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	%	80.74
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	7.63
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	45.32

Rencana kerja Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 disajikan dalam abel matriks/tabel Renja OPD berikut ini:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						105.354.509.193,00							314.997.288.417,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.354.509.193,00							314.997.288.417,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						83.825.214.993,00							264.070.488.417,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.742.970.776,00						-	10.552.300.291,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			24 Laporan 4 Dokumen	78.218.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	70.970.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	52.188.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		43.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	26.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		27.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			12 Dokumen 92 Orang	6.477.118.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan lenteram 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah	-	7.268.088.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	6.330.095.812,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		7.108.648.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	121.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		132.170.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	25.472.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		27.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	106.048.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	117.887.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106.048.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		117.887.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			35 unit	50.534.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	239.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	50.534.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		239.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			12 Laporan	883.984.064,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	1.000.003.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	417.508.516,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		459.297.777,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57.151.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		71.652.691,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.324.248,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		469.053.238,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			20 unit	1.147.068.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	1.856.349.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	698.891.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		863.528.842,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	395.157.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		930.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	53.019.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		62.821.143,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-			-	**10.076.491.400,00**						-	**42.577.205.700,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan*	-			5 Unit 304 Lembaga	697.791.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo	-	18.641.615.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				304 Lembaga	359.738.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		610.175.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	338.053.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		18.031.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun dan Direhabilitasi*	-			2,5 KM	9.378.700.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo	-	23.935.590.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	3.856.351.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		19.415.504.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,5 KM	5.522.349.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		4.520.086.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	-	-			-	471.571.600,00						-	2.184.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	-			130 SR	471.571.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga Masyarakat Kulon Progo	-	2.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				130 SR	471.571.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga Masyarakat Kulon Progo		2.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	-	-			-	**3.884.472.700,00**						-	**3.960.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*	-			3 unit	3.884.472.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo	-	3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				3 Unit	3.884.472.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo		3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	-	-			-	**2.127.670.400,00**						-	**10.356.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* *umlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara*	-			172 Rumah Tangga 1 Unit	2.127.670.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Umum	-	10.356.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	281.403.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Umum		345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				172 Rumah Tangga	1.846.266.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Umum		10.011.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	-	-			-	**4.843.702.600,00**						-	**2.472.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	-			1 Dokumen 180 Dokumen	4.843.702.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo	-	2.472.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.697.598.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	146.104.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	2.098.961.000,00						-	1.531.944.426,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata*	-			48 Kawasan	2.098.961.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kawasan Pertamanan	-	1.531.944.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				48 Kawasan	2.098.961.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kawasan Pertamanan		1.531.944.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	37.252.336.413,00						-	167.876.038.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jembatan yang Dibangun* *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* *Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi dan Dipelihara secara berkala* *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* *umlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* *umlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	-			1 Jembatan 807 Km 6,35 Km 40 Km 7 Dokumen 30 Jembatan	37.252.336.413,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jalan Kabupaten	-	167.876.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				7 Dokumen	740.323.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jalan Kabupaten		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.250 KM	1.439.946.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		2.602.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4.8 KM	18.135.574.013,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Jalan Kabupaten		120.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.575 KM	1.656.957.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		31.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				30 Jembatan	1.099.589.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		1.103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	5.802.785.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		2.603.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				807 KM	530.949.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		553.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	7.846.211.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Jalan Kabupaten		7.850.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	-	-			-	**575.538.104,00**						-	**561.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* *umlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*	-			75 Orang 220 Paket Pekerjaan	148.765.204,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				75 Orang	148.765.204,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	426.772.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				220 Paket Pekerjaan	426.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	-	-			-	**13.751.500.000,00**						-	**22.000.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*	-			6 Dokumen	13.751.500.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Satuan Ruas Strategis Keistimewaan	-	22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				6 Dokumen	13.751.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Satuan Ruas Strategis Keistimewaan		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**21.529.294.200,00**							**50.926.800.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	-	-			-	**1.426.248.600,00**						-	**1.412.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*	-			1 Dokumen	64.912.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Rawan Bencana	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	64.912.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Rawan Bencana		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*	-			3 unit rumah	169.736.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Rawan Bencana	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	169.736.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Rawan Bencana		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	-			3 Dokumen	1.191.599.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1.191.599.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rumah Susun dan Rumah Khusus		1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-			-	**3.737.810.000,00**						-	**8.432.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah/10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	-			175 Unit	3.737.810.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni	-	8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				172 Unit Rumah	3.737.810.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni		8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-	-			-	**16.365.235.600,00**						-	**41.082.800.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	-			70 Lokasi	16.365.235.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	41.082.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				70 Lokasi	16.265.399.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		41.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				3 Laporan	99.836.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		82.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			JUMLAH					**105.354.509.193,00**							**314.997.288.417,00**	

BAB V
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Rencana kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukman merupakan pelaksanaan Rencana Strategis 2023-2026 di tahun kedua. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas tersebut yang akan dilaksanakan ditahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Dinas PUPKP. Beberapa hal penting yang dilaksanakan adalah mecakup pembangunan infrastruktur, upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting serta meningkatkan akses pengembangan kehidupan ekonomi yang layak.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan Kabupaten Kulon Progo. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari DPUPKP, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi dari masyarakat/ *stakeholders*.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja PD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan.Renja PD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kulon Progo.

Dalam rangka menjamin implementasi rencana kerja 2025 maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi rencana kerja pada semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan
2. Rencana kerja menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2025;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target dengan melakukan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan.
4. Monitoring capaian kinerja yang dilakukan rutin setiap bulan
5. Reviu dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi OPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
khususnya dibidang urusan pekerjaan umum, perumahan & kawasan permukiman. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rencana kerja PD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan. Renja PD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kulon Progo.

Demikian rencana kerja PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

W a t e s Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas .

PEMERINTAH KAB. KULON PROGO
DINAS PUP-KP

Ir. GUSDI HARTONO..M.T.
NIP. 19650806 199303 1 004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja OPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022, tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kabupaten Kulon Progo. Rencana kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan Renstra OPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan awal;

c. penyusunan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan akhir; dan

f. penetapan.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Keja Anggaran (RKA) perangkat daerah unuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

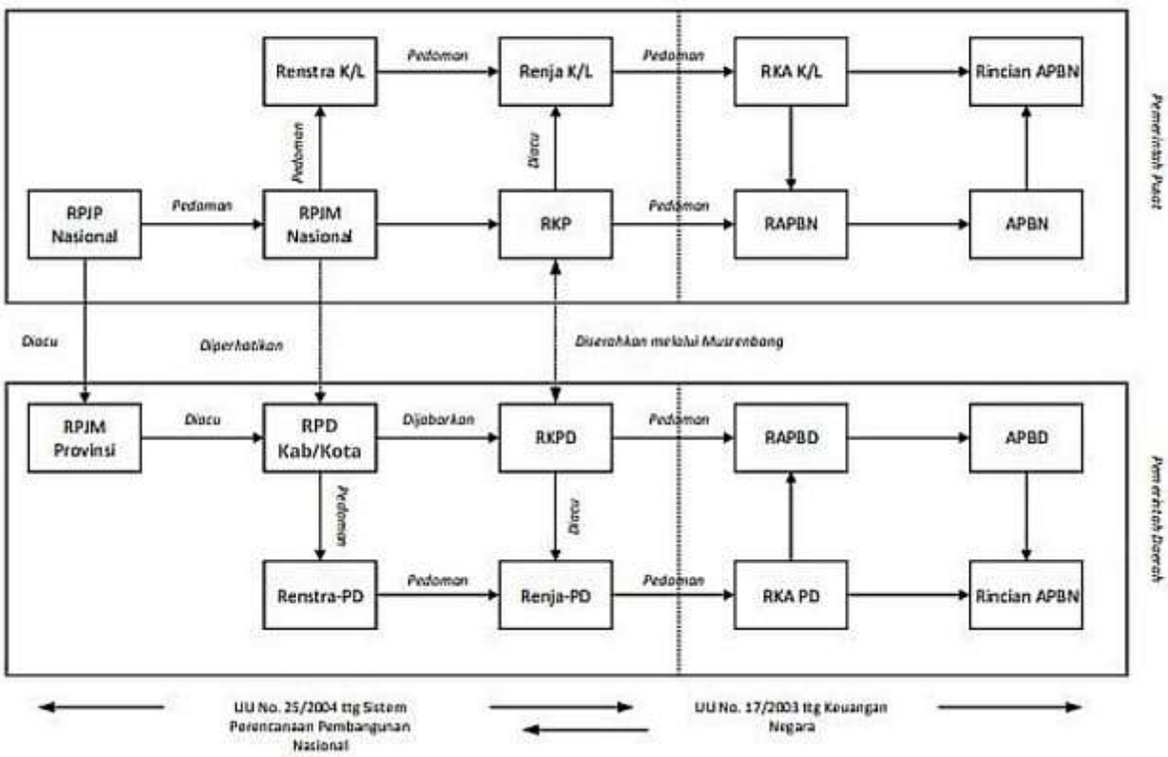

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja , sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana RKPD Kabupaten Kulon Progo 2025 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mnteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
22. Peraturan Bupati no 71 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana kerja SatPolPP Kabupaten Kulon Progo

Maksud dari Penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Merupakan penjabaran dari rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan
5. Sebagai alat kontrol dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo

Sistematika Penulisan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB ll HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi n-2		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar	Persentase peningkatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		--						
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		--						
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	--	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	93 dokumen	--	23 dokumen	23 dokumen	100%	23 dokumen	46 dokumen	49,46%

1.05.01.2.01 .0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	--	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	44,44%
1.05.01.2.01 .0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 laporan	--	21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	42 laporan	50%
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan	296	--	74	74	100%	74	148	50%
1.05.01.2.02 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 orang/bulan	--	48 orang/bulan	48 orang/bulan	100%	48 orang/bulan	96 orang/bulan	50%
1.05.01.2.02 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	--	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	50%
1.05.01.2.02 .0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	56 laporan	--	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	28 laporan	50%
1.05.01.2.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat	204	--	27	27	100%	27	54	50%
1.05.01.2.05 .0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	96 paket	--	---	--	--	--	--	--
1.05.01.2.05 .0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 dokumen	--	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	50%

1.05.01.2.05 .0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	--	25 orang	25 orang	100%	20 orang	45 orang	45%
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi	20 laporan	--	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	50%
1.05.01.2.06 .0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	--	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	50%
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	--	1 unit	1 unit	100%	--	1 unit	10%
1.05.01.2.07 .0001	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	--	1 unit	1 unit	100%	--	1 unit	33,33%
1.05.01.2.07 .0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	--	--	--	--	--	--	0%
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	112 laporan	--	28 laporan	28 laporan	100%	28 laporan	56 laporan	50%
1.05.01.2.08 .0002	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	48 laporan	--	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50%

	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
1.05.01.2.08 .0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	--	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	50%
1.05.01.2.08 .0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	--	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50%
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	192 unit	--	57 unit	57 unit	100%	95 unit	50 unit	26,045
1.05.01.2.09 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	--	16 unit	16 unit	100%	16 unit	32 unit	50%
1.05.01.2.09 .0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 unit	--	41 unit	41 unit	100%	79 unit	120 unit	93,75%
1.05.02	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	--	96,81	95,01		97,87		
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan	Jumlah laporan pelaksanaan	104 laporan	--	26 laporan	26 laporan	100%	26 laporan	52 laporan	50%

	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas								
1.05.02.2.01 .0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48 laporan	--	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50%
1.05.02.2.01 .0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56 laporan	--	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	28 laporan	50%
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	100 laporan	--	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan	50 laporan	50%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	240 orang	--	--	--	--	--	--	--
1.05.02.2.02 .0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	52 laporan	--	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	26 laporan	50%

	dan Peraturan Bupati/Walikota	Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1.05.02.2.02 .0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	48 laporan	--	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	50%
2.22.08	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	--	100%	100%	100%	--	--	
2.22.08.5.07	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya	Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	--	100%	100%	100%	--	--	
2.22.08.5.07 .0012	Sub kegiatan pembinaan jaga warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	630 kelompok	--	250 kelompok	250 kelompok	100%	--	250 kelompok	39,68%

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2023 di atas dapat kita lihat bahwa semua program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sesuai dengan target/rencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	
A.	**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**											
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			100	100	100	100	100	0	100	`100	
B.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas			214	209	204	199	214	0	204	199	
2	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP			25	25	25	25	25	0	25	25	
C.	**INDIKATOR KINERJA OPD**											
1	Persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum			56,11	56,95	58,95	60.02	56,11	0	58,95	60,02	
D.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM											
1	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum			96,81	97,87	98,94	100	95,01	-	98,94	100	
Sumber : Satpol PP Kulon Progo tahun 2024												

Berdasarkan permendagri no. 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM yang menjelaskan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan realisasinya mencapai 100%. Begitu pula di tahun 2024 sampai dengan 2026 ditargetkan 100%.

Indikator kinerja kunci pada tahun 2023 untuk jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas ditargetkan 214 dan realisasinya mencapai 214. Tahun 2024 ditargetkan 209, tahun 2025 ditargetkan 204 dan tahun 2026 ditargetkan 199. Sedangkan untuk Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP tahun 2023 ditargetkan 25 tercapai 25. Untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan target yang sama yaitu 25.

Indikator kinerja OPD yakni persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum pada tahun 2023 dengan target 56,11% tercapai 56,11%. Sedangkan tahun 2024 dengan target 56,95, tahun 2025 dengan target 58,95 dan tahun 2026 target sebesar 60,02.

Untuk Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum yang merupakan indikator kinerja program, pada tahun 2023 menargetkan 96,81 hanya tercapai 95,01. Hal ini karena anggota linmas sudah tua dan mengundurkan diri, sementara generasi selanjutnya belum ada yang menggantikan. Pada tahun 2024 menargetkan 97,87, tahun 2025 sebesar 98,94 dan tahun 2026 dengan target 100.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Satpol PP;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih terbatas;
2. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;

3. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Satgas Linmas yang ada di kapanewon belum terbentuk.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo :

Faktor Internal :

a. Kualitas dan kuantitas personil yang belum memenuhi persyaratan;
b. Anggaran operasional, sarana dan prasarana yang terbatas;

Faktor Eksternal :

a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik;
d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan
e. Regulasi lambat mengikuti perubahan
f. Masih banyaknya pelanggaran dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup
g. Masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar hukum

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantangan:

1. Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan ketentuan dalam regulasi peraturan yang ada;
2. Lemahnya sosialisasi, pengawasan dan pembinaan oleh OPD sektoral/teknis terhadap pelaksanaan peraturan;
3. Tuntutan masyarakat terhadap kenyamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang semakin tinggi.

Peluang:

1. Adanya Keterlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan, program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya serta upaya-upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Tibum Tranmas.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini
3. Dukungan Legislatif dan eksekutif bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Trantibum serta penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Kulon Progo.

2.4. Review terhadap RKPD

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD 2025			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Ket.
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	JUMLAH SEMUA				7.285.811.894	JUMLAH SEMUA				7.285.811.894	
	Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar				7.007.961.194	**Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar**				7.007.961.194	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				7.007.961.194	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				7.007.961.194	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	4.951.055.594	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	4.951.055.594	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	25 dokumen	15.213.100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	25 dokumen	15.213.100	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11.345.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11.345.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	3.868.100	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	3.868.100	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KP	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan	74 laporan	3.141.297.800	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KP	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan	74 laporan	3.141.297.800	
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	3.085.677.800	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	3.085.677.800	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	51.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	51.900.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	14 laporan	3.720.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	14 laporan	3.720.000	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.3.	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	KP	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat	25 orang	11.546.300	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	KP	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat	25 orang	11.546.300	
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	KP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	KP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	Paket pengadaan pakaian dinas lapangan
1.3.2.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
1.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	11.546.300	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	11.546.300	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KP	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	15.631.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KP	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	15.631.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	15.631.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	15.631.000	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	996.700.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	996.700.000	
1.5.1	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	846.804.000	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	846.804.000	Kebutuhan kendaraan roda 6 (Truk)
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (laptop 2, ac 1)	1 unit	149.896.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	149.896.000	Kebutuhan 1 unit gudang dan 2 unit laptop
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	29 laporan	574.694.794	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	29 laporan	574.694.794	
1.6.1	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.060.802	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.060.802	Tambah pemakaian AC

1.6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	14.105.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	14.105.200	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	493.528.792	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	493.528.792	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	95 unit	195.972.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	95 unit	195.972.600	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	175.976.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	175.976.700	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 unit	19.995.900	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 unit	19.995.900	
2.	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	KP	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	98,94%	2.056.905.600	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	KP	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	98,94%	2.056.905.600	
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas	26 laporan	1.467.154.800	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas	26 laporan	1.467.154.800	
2.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum		- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 dokumen	1.195.380.800	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 dokumen	1.195.380.800	
2.1.2	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	271.774.000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	271.774.000	

2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	25 laporan	589.750.800	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	25 laporan	589.750.800	
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0	0	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0	0	
2.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 laporan	355.021.600	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 laporan	355.021.600	
2.2.3	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	234.729.200	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	234.729.200	
3.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	277.850.700	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	277.850.700	
3.1	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya		Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	277.850.700	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya		Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	277.850.700	
3.1.1	Sub kegiatan pembinaan jaga warga		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	934 orang	277.850.700	Sub kegiatan pembinaan jaga warga		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	934 orang	277.850.700	

Sumber : SatPolPP Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kalurahan sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Tahun ini belum ada usulan yang terkait dengan program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
di Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Tidak ada	-	-	-	-

Sumber : SatPolPP Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Untuk prioritas nasional yang ada di sipd yang mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama 4 (empat) tahun

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan adalah terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode jangka menengah adalah Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum.

Memperhatikan evaluasi kinerja, tujuan dan sasaran Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA %
1.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	100
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum	Persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum	58,95

Sumber : SatPolPP Tahun 2024

Tujuan renja daerah pada tahun 2025 yakni meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan sasaran daerah adalah cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial dengan target 100%.

Sedangkan sasaran OPD yaitu meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah direncanakan sebesar 100%. Untuk sasaran yang kedua meningkatnya penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum dengan indikator persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum direncanakan mencapai 58,95%.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja ada 3 program, 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.285.811.894,00. Adapun Program kerja sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan administrasi kepegawaian

1.3.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.2. Sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan

2.1.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum

2.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

2.2.1.Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota

2.2.2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

3.1. Kegiatan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya

3.1.1. Sub Kegiatan Penbinaan Jaga Warga

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah				
1	2	3				4	5	6	7			8		9	10
	Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar	Persentase peningkatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					7.007.961.194							6.782.833.354	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						7.007.961.194							6.782.833.354	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100%	4.951.055.594							4.293.359.754	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 dokumen	15.213.100			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000	SatPolPP
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	11.345.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		7.000.000	
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 laporan	3.868.100	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		4.000.000	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan				74 laporan	3.141.297.800			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.439.214.308	

1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 orang/bulan	3.085.677.800	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		3.379.321.308	
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	51.900.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		55.893.000	
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 laporan	3.720.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		4.000.000	
1.05.01.2.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat				25 orang	11.546.300			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			78.018.000	
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				-	-	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		60.000.000	
1.05.01.2.05.0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	-	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		9.000.000	
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 orang	11.546.300	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		9.018.000	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi				4 dokumen	15.631.000			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			26.612.000	
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 laporan	15.631.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		26.612.000	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	996.700.000			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			84.000.000	

1.05.01.2.07.0001	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit	846.804.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		64.000.000	
1.05.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (laptop 2, ac 1)				1 unit	149.896.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		20.000.000	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				29 laporan	574.694.794			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			458.536.896	
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	67.060.802	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		52.404.864	
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 laporan	14.105.200	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		15.500.000	
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	493.528.792	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		390.632.032	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				95 unit	195.972.600			Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			195.978.550	
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 unit	175.976.700	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		175.978.550	
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				79 unit	19.995.900	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sat PolPP		20.000.000	

1.05.02	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum				98,94%	2.056.905.600							2.489.473.600	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas				26 laporan	1.467.154.800			Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan			1.998.456.000	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				14 dokumen	271.774.000	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Sat PolPP		325.058.000	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 laporan	1.195.380.800	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Sat PolPP		1.673.398.000	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP				25 laporan	589.750.800			Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan			491.017.600	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				0	0	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Sat PolPP		0	
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13 laporan	234.729.200	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Sat PolPP		197.970.000	
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran				12 laporan	355.021.600	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola	Sat PolPP		293.047.600	

	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP									Pem erintahan				
2.22.08	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan				100%	277.850.700							0	
2.22.08.5.07	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya	Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan				100%	277.850.700			Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan			0	
2.22.08.5.07.0012	Sub kegiatan pembinaan jaga warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				934 orang	277.850.700	Kulon Progo	PAD	Peningkatan kualitas SDM	Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Sat PolPP		0	
	JUMLAH SEMUA						7.285.811.894							6.782.833.354	

Sumber : SatPolPP Tahun 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Untuk tercapainya visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke beberapa program kegiatan dan sub kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan**.**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Meningkatnya pembinaan kualitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi pamong Praja
b. Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau badan hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
c. Memaksimalkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas/instansi dan aparat keamanan dalam menyelenggarakan penegakan perda dan perkada

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Sebanyak 3 Program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk perencanaan kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
					Hasil Program/Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan				Jenis Kegiatan	OPD
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif								7.007.961.194	6.782.833.354		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%		100%		100%	4.951.055.594	4.293.359.754		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan .bermasyarakat yang kondusif		jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu			24		24	15.213.100	11.000.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			KP			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencaan kinerja SKPD	3 dokumen	11.345.000	7.000.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			KP			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	3.868.100	4.000.000		
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan			72		72	3.141.297.800	3.439.214.308	Sedang berjalan	Sat Pol PP

1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			KP			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/ bulan	3.085.677.800	3.379.321.308	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			KP			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	51.900.000	55.893.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			KP		100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	3.720.000	4.000.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat			87		87	11.546.300	78.018.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas			KP			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	Terlaksananya paket pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	-	-	60.000.000		
1.05.01.2.05.0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			KP		100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	-	9.000.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			KP			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 orang	11.546.300	9.018.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	KP	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi			9		9	15.631.000	26.612.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			KP			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	15.631.000	26.612.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP

1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah Pengadaan kendaraan dan sarparas gedung kantor			4		4	996.700.000	84.000.000	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.07.0001	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan			KP		100%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	846.804.000	64.000.000		
1.05.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			KP			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (laptop 2, ac 1)	3 unit	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran berupa pembangunan pagar	1 unit	149.896.000	20.000.000		
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor			24		24	574.694.794	458.536.896		
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			KP		100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	67.060.802	52.404.864		
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor			KP		100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	14.105.200	15.500.000		
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			KP			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	493.528.792	390.632.032		
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			95		95	195.972.600	195.978.550	Sedang berjalan	Sat Pol PP
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas			KP			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	175.976.700	175.978.550		

	Operasional atau Lapangan													
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			KP			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79 unit	19.995.900	20.000.000		
1.05.02	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum		-	98,94%		98,94 %	2.056.905.600	2.489.473.600	Sedang berjalan	SatPol PP
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas		-	26	- Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	26	1.467.154.800	1.998.456.000	Sedang berjalan	SatPol PP
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan			KP	-	100%	- Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	- Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 dokumen	271.774.000	325.058.000		
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum			KP			Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas	14 dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	1.195.380.800	1.673.398.000	Sedang berjalan	SatPol PP
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	25 laporan		25		25	589.750.800	491.017.600	Sedang berjalan	SatPol PP
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan			--				0		0	0	0		

	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota			KP			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 laporan	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	13 laporan	234.729.200	197.970.000		
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota			KP			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	12 laporan	355.021.600	293.047.600		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										277.850.800	0		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										277.850.800	0		
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%					277.850.800	0		
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%					277.850.800	0		
2.22.08.5.07.0012	Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga	Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	KP			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	934 orang	Pengukuhan kelompok jaga warga		277.850.800	0		

Sumber : SatPolPP Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 - 2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 - 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/ pedoman bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentranan kemasyarakat dan ketertiban umum.

Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pengasih, 2 Agustus 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo

BUDI HARTONO, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19690118 199603 1 003

BPBD Kabupaten
Kulon Progo

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sampai saat ini kita masih diberi kemudahan menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra BPBD 2023-2026 dan hasil evaluasi Triwulan IV Rencana Kerja BPBD Tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAUFIQ PRIHADI, S.E.
NIP. 19730809 199703 1 008

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TW III TAHUN 2023	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD TW III Tahun 2023	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	24
	2.4 Reviu terhadap RKPD	25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	38
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	39
	3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V	PENUTUP	52
	Lampiran	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
i. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan maksud meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap OPD menyusun Rencana Kerja OPD.

Yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 adalah Perubahan Rencana Srategis BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra OPD) ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Rencana Kerja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;21.
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada BPBD Kabupaten Kulon Progo;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana, dan
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini yaitu untuk menempatkan program Penanggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan

2. Menyediakan dokumen acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon

   Progo dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan Eksternal:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya Penanggulangan Bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan Penanggulangan Bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman risiko bencana, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program Penanggulangan Bencana yang berkelanjutan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan IV Tahun 2023

Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Dari ke 3 program ini terdapat kegiatan yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada

Sampai Tahun 2023 BPBD dapat melaksanakan sub kegiatan, kegiatan dan program Penanggulangan bencana sesuai dengan target yang ditetapkan

b. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran**

Sampai Tahun 2023, secara umum Kinerja hasil/keluaran BPBD dapat mencapai 100 % sesuai dengan yang direncanakan dengan realisasi anggaran sebesar 99,43%. Kegiatan tersebut adalah

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** dengan kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) **Program Penanggulangan Bencana,** dengan kegiatan :

a) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

c) Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana

3) **Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran,** dengan kegiatan :

a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

c. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada

Semua kegiatan mencapai target yang diharapkan. Sebenarnya ada 2 kegiatan yang outputnya melebihi target tetapi tidak dituangkan dalam dokumen capaian laporan yaitu: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Hal ini karena banyak permintaan sosialisasi kebencanaan dan sosialisasi damkar dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh BPBD, tetapi karena tidak ada dalam agenda keuangan maupun target output, maka kegiatan ini tidak dicatat sebagai output capaian BPBD

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain:

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga kebijakan yang diambil yaitu meneruskan target sesuai agenda/jadwal.

Evaluasi hasil kinerja BPBD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW III Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkitan dengan pelayanan dasar									
1	05			Bidang Urusan Pmerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	05.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
1	05.01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	05.01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2022	9	2	2	2	100	9	2	22,22

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW III Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05.01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja bulanan, triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP	84	21	21	21	100	84	21	25,00
1	05.01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	05.01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48	12	12	12	100	48	12	25,00
1	05.01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium petugas Pengelola BMD, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48	12	12	12	100	48	12	25,00
1	05.01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja Keuangan bulanan dan Semesteran	56	14	14	14	100	56	14	25,00
1	05.01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	05.01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan biaya koordinasi dan konsultasi	4	1	1	1	100	4	1	25,00
1	05.01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW III Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05.01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	100	24	24	24	100	100	24	24,00
1	05.01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05.01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan Pustaka)	4	1	1	1	100	4	1	25,00
1	05.01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	1	100	4	1	25,00
1	05.01	2.09	04	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05.01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya 8 unit mobil roda empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit komputer, 4 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 4 unit EWS, 2 unit AC, 3 genset, listrik, air, telpon, 1 unit septic tank dan gedung kantor	42	42	42	42	100	42	42	100,00
1	05.03			Program Penanggulangan Bencana									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW III Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	05.03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota									
	05.03	2.01	02	Sub. Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1200	300	300	300	100	1200	300	25,00
1	05.03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
1	05.03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan	470	110	110	110	100	470	110	23.40
1	05.03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian Operasi dan	4	1	1	1	100	4	1	25,00
1	05.03	2.02	04	P1enyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	56	14	14	14	100	56	14	25,00
1	05.03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	10	3	2	2	100	10	3	33,33

1	05.03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	200	200	0	0	800	0	0
1	05.03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	1	1	1	100	1	1	100
1	05.03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1	05.03	2.03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.03	2.03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80	20	20	20	100	80	20	25
1	05.03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
1	05.03	2.04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.03	2.04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4	1	1	1	100	4	1	25

1	05.03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	05.04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1	05.04	2.01	02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	1	1	1	100	4	1	25

1	05.04	2.01	06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20	1	1	1	100	20	1	5
1	05.04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									
1	05.04	2.02	01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	1	1	1	100	4	1	25
1	05.04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
1	05.04	2.04	01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800	200	200	200	100	800	200	25

1	05.04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20	5	5	5	100	20	5	25

Secara umum, evaluasi kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, telah sesuai target yang diharapkan, sampai Tahun 2023 telah mencapai angka yang ditargetkan. Dengan demikian sampai akhir periode Renja BPBD Tahun 2023, semua target diharapkan dapat tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Review Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, Kulon Progo memiliki 12 ancaman bencana berupa : longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran, abrasi, wabah penyakit, dampak letusan gunung berapi, dan kegagalan teknologi.

Secara umum, pelayanan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari semua ancaman bencana. Pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui tiga tahapan yaitu:

1) Tahap pra bencana
2) Tahap saat bencana
3) Tahap pasca bencana

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya tahap pra bencana adalah:

a) Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan kebijakan pengurangan resiko bencana (perda; perbup; SK bupati; rencana kontigensi; rencana operasi; SOP; dll) serta pemenuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
b) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat (sosialisasi, simulasi/gladi, FGD), Kalurahan tangguh bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dll.

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan saat bencana adalah:

a) Penanganan darurat bencana meliputi evakuasi dan pencarian korban, penanganan pengungsi (logistik; kesehatan; fasum; fasos; dll) serta penanganan darurat fasum – fasos.

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan Pasca bencana adalah:

a) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang fisik dan non fisik

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa BPBD diamanatkan untuk melaksanakan SPM bidang Trantibunlinmas. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan BPBD terdiri atas:

a. pelayanan informasi rawan bencana;
b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan d.
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pada pelaksanaan SPM ini, BPBD mengacu pada turunan PP No. 2 Tahun 2018 yaitu Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Pelaksanaan SPM telah dilaksanakan BPBD mulai Tahun 2019. Laporan dilaksanakan secara berjenjang dari OPD sampai ke Kementrian Dalam Negeri.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM /standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
	Indikator Kinerja Kunci										
1	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	**100%**	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**100%**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**110**	**110**	**110**	**140**	**110**	**110**	**110**	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100%**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Prosentase)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Dalam Prosentase antara jumlah layanan penyelamatan evakuasi dibagi jumlah korban**
4	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100%**	((Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah)/Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)X100%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Respontime pemadaman kebakaran oleh BPBD dan Relawan kebakaran**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai kedudukan dan fungsinya, BPBD memiliki lingkup pelayanan yang luas. Kabupaten Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, namun sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakterstik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya juga berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2021 adalah jumlah Kalurahan Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dibentuk oleh BPBD maupun Pihak lain sesuai unsur penthahelix yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa maupun akademisi dalam program penanggulangan bencana. Dari 88 Kalurahan/Kelurahan rawan bencana, sampai tahun 2023, sudah ada 79 Kalurahan tangguh bencana yang terbentuk. Dengan berbagai strategi yang ada pada tahun 2026 semua Kalurahan/Kelurahan telah terbentuk menjadi Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana. Sehingga Kalurahan-kalurahan tersebut diharapkan mempunyai kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana yang lebih baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah OPD yang memiliki tugas dan fungsi yang besar tetapi minim kewenangan. Bencana berimplikasi terhadap semua sektor, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko bencana; penanganan tanggap darurat, penanganan pasca bencana harus dilakukan di semua sektor dan melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta/dunia usaha, media massa, akademisi dan masyarakat. Penanggulangan bencana tidak boleh dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah semata. Penanggulangan bencana harus dibebankan kepada segenap OPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kalangan swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi saat ini telah terbit PP nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengatur Pelayanan Minimal bagi masyarakat salah satunya urusan trantibunlinmas dan kebencanaan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang diikuti Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota membuat BPBD Kabupaten Kulon progo dituntut untuk bekerja keras dalam pencapaian pelayanan standar minimal kepada masyarakat. Di satu sisi timbulnya peraturan tersebut mendorong pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pencapaian SPM, di sisi lain keterbatasan

kewenangan dan personil BPBD mengharuskan adanya kerja keras semua pihak untuk melaksanakan amanat dari peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penilaian indeks ketahanan daerah, survei kesiapsiagaan masyarakat, dan dinamika karakteristik pembangunan daerah, dirumuskan permasalahan- permasalahan pokok yang berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional sebagai berikut:

1) Semua wilayah di Kabupaten Kulon Progo terpapar oleh bencana, 4 wilayah kapanewon di kawasan pesisir rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim-abrasi, 6 wilayah kapanewon di kawasan perbukitan rawan bencana tanah longsor, 9 wilayah kapanewon di daerah dataran rendah dan dilewati alur sungai utama rawan banjir, sehingga secara keseluruhan wilayah Kulon Progo rawan terhadap 12 potensi bencana yang 9 diantaranya memiliki risiko tinggi;
2) Masih tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana dengan risiko tinggi, terutama terhadap bencana gempa bumi (100%), bencana epidemi dan wabah penyakit (78,77%), cuaca ekstrim (68,34%), dan banjir bandang (50,68%);
3) Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi, potensi kerugian fisik mengalami peningkatan sebesar 61% dari hasil kajian tahun 2014, hal ini mengacu pada pesatnya pertumbuhan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Kulon Progo 7 tahun terakhir;
4) Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bertipe- B);
5) Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 12 potensi ancaman bencana yang ada, dengan nilai indeks kesiapasiagaan 0,11 sampai 0,32 pada kelima aspek penilaian yang meliputi: pengetahuan kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat setiap bencana, pengaruh kerentanan masyarakat ketika terjadi bencana, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah dan pastisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6) Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (*early warning system*-EWS) baik itu aspek rekayasa teknisnya (teknologi) maupun rekayasa sosial (kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme peringatan dini bencana);
7) Masih rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yang ditunjukkan oleh masih belum tersedianya perencanaan

penanggulangan kedaruratan bencanakon (RPKB), perencanaan kontingensi, perencanaan evakuasi dengan infrastruktur evakuasi yang memadai, dan tata kelola tanggap darurat yang inklusif;

8) Belum berjalannya kebijakan satu data bencana yang terpadu;
9) Masih rendahnya pengembangan sistem pemulihan bencana, khususnya berkaitan dengan pemulihan penghidupan masyarakat dan perbaikan rumah penduduk terdampak bencana;
10) Masih minimnya program-program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah;
11) Pengembangan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, perhubungan dan kawasan industri memunculkan risiko-risiko baru (*new emerging risk*), hal ini belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai;
12) Penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana di Kabupaten Kulon Progo masih minim dari sisi penegakan hukum. Terutamanya yang berkaitan dengan kawasan perlindungan setempat seperti kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai;
13) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berkaitan dengan sistem jaringan prasarana, khususnya untuk sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana masih sangan minim;
14) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan masih belum terpenuhi, khususnya berkaitan dengan sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, air minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
15) Dalam hal pembangunan kependudukan yang berkaitan dengan Bonus Demografi, kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan, dan pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) di Kulon Progo belum diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana, ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok tersebut dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis penanggulangan bencana yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran

penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1) Munculnya risiko-risiko baru (*new emerging risk*) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai;
2) Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bertipe-B);
3) Minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penerapan rencana tata ruang wilayah yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
4) Terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini (*early warning system*-EWS) bencana;
5) Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.

Berikut disampaikan beberapa isu strategis dalam penanggulangan bencana:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya program Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo terus didorong sebagai salah satu strategi untuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan yang akan dicapai, hal ini didasari oleh hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di Kulon Progo meningkat dan elemen-elemen berisiko (*element at risk*) semakin berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan. Salah

satu pembangunan strategis nasional yang memiliki implikasi luas terhadap kebijakan tata ruang di kawasan rawan bencana adalah pembangunan Bandar Udara International Yogyakarta (YIA). Setelah beroperasinya YIA secara penuh telah membawa implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi disekitar kawasan bandara yang disertai dengan perubahan pola pemukiman dan infrastruktur pendukungnya. Selain itu pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata berimplikasi pada pengembangan destinasi wisata alam khususnya yang merambah di kawasan perbukitan menoreh yang notabene merupakan kawasan risiko tinggi terhadap potensi bencana tanah longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrim. Banyaknya obyek vital strategis dan pengembangan kawasan strategis yang berhimpitan dengan kawasan rawan bencana, perlu mendapat perhatian pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi dan berdampak pada kawasan baru yang semakin padat populasinya.

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo 2023-2027 yaitu:

1) Penguatan produk hukum daerah tentang penanggulangan bencana
2) Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam PJPD dan RPD
3) Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis
4) Penguatan sinergitas penanggulangan bencana lintas sektor, lintas OPD, dan lintas wilayah
5) Peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
6) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah
7) Penguatan koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana
8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penanggulangan bencana yang profesional
9) Percepatan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi seluruh produk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana
10) Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada munculnya risiko bencana
11) Penerapan riset inovasi dan teknologi untuk mendukung sistem peringatan dini bencana yang handal

12) Percepatan layanan informasi peringatan dini bencana di seluruh wilayah risiko tinggi bencana sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas
13) Penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana terpadu dan handal
14) Memperkuat perlindungan penduduk dan kelompok rentan dari bencana
15) Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana, dan
16) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	*Pagu Indikatif (Rp. 000)*	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabutuhan Dana (Rp.000)	*Catatan Penting*
1	**2**	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.761.483	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo			1.804.825	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			10.599	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			13.210	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.571	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	2.638	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			1.180.598	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			1.388.480	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.136.113	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	1.353.687	
	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	40.868	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	32.397	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 laporan	3.617	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.397	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			21.764	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			19.357	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	21.764	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	19.357	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo			200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo			7.661	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	7.661	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			129.788	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			180.210	
	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.845	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.727	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	123.944	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.340	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	118.143	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			218.733	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			195.907	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 unit	218.733	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	176.046	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	19.862	
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penanggulangan Bencana		953.713	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Kulon Progo			945.818	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			37.910	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			36.936	

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	37.910		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	36.936	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kulon Progo			357.700	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kulon Progo			322.725	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	110 orang	65.000		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	110 orang	55.051	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000						
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	22 unit	15.000		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20 unit	14.068	
		Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	207.700		Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	203.992	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	40.000		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	49.615	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kulon Progo			486.200	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kulon Progo			521.488	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	486.200		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	485.132	

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	36.355	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kulon Progo			71.904	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kulon Progo			64.668	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	21.904	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	8.655	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	40.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	36.259	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	10.000	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	1 Kegiatan	19.754	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		729.230	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		688.789	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			659.230	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			623.025	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	654.230	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	591.352	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	5.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	6.720	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	24.953	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kab. Kulon Progo			25.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kab. Kulon Progo			23.997	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	25.000		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	23.997	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Kab. Kulon Progo			45.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					41.767	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	30.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	28.134	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa	15.000		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa	13.632	
JUMLAH						3.444.427						**3.439.432**	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) dengan OPD untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai jembatan mediasi antara seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2023-2026 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Dari rangkaian proses perencanaan 2025 yang telah dilalui terdapat beberapa usulan baik dari Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan Kebencanaan	Kalurahan Bugel, Kab. Kulon Progo	Terlaksananya Pelatihan kebencanaan di tingkat Kalurahan	-	Diterima, akan disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang ada di BPBD
2	Pelatihan Kebencanaan	Kalurahan Tayuban, Kab. Kulon Progo	Terlaksananya Pelatihan kebencanaan di tingkat Kalurahan	-	Diterima, akan disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang ada di BPBD
3	Pelatihan Kebencanaan	Kalurahan Krembangan, Kab. Kulon Progo	Terlaksananya Pelatihan kebencanaan di tingkat Kalurahan	-	Diterima, akan disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang ada di BPBD

Adapun usulan dari pokok pikiran dewan tertuang dalam table berikut :

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Bantuan Sosial Droping Air	Purwosari, Girimulyo	Terlaksananya droping air terhadap warga terdampak kekeringan	1 paket	Diterima, dilaksanakan saat ada laporan dan permintaan droping ke BPBD
2	Bantuan Sosial Droping Air	Banjaroyo Kalibawang	Terlaksananya droping air terhadap warga terdampak kekeringan	1 paket	Diterima, dilaksanakan saat ada laporan dan permintaan droping ke BPBD
3	Pengadaan peralatan evakuasi bencana	Banjarasri, Kalibawang	Terlaksananya Pengadaan alat evakuasi bencana	1 paket	Diterima untuk diusulkan ke TAPD, apabila mendesak dapat menggunakan Dana Desa seperti tertuang pada Peraturan Bupati No. 67 tahun 2018

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Saat ini RPJMN 2025-2029 yang berlandaskan kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan transformatif sedang disusun, ada 2 substansi utama yang ada pada RPJMN 2025-2029 yaitu : Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam fondasi lima tahun pertama dari pembangunan RPJMN 2025-2029, Substansi kedua ialah adanya penuangan visi-misi dan program Presiden terpilih pada tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029. Penyesuaian tersebut akan dilakukan tergantung kapan Presiden terpilih tersebut dilantik.

Salah satu arah / tujuan Indonesia emas 2045 adalah misi ketahanan sosial budaya dan ekologi yang didalamnya terdapat tujuan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim. Diamanatkan bahwa bencana merupakan salah satu dari agenda pembangunan dalam kerangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana pada saat ini telah menjadi isu nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena bencana dapat menghambat bahkan memundurkan program pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana akan menjadikan sia-sia saat bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Ketersediaan infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar USD per tahun (EM-DAT database, 2018). Upaya pengurangan kerugian melalui pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapat tantangan sejalan dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di zona rawan bencana. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota di pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas seperti Citarum, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Seram-Ambon telah menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi. Di samping itu,

upaya pengurangan resiko bencana masih belum didukung oleh ketersediaan masterplan peningkatan ketangguhan infrastruktur terhadap bencana. Untuk mendukung RPJMN tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Daerah selalu memperhatikan aspek kebencanaan dalam pembangunan serta memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana, mengajak dan menggali potensi serta peran serta masyarakat / dunia usaha dalam penanganan bencana serta mendukung infrastruktur tangguh bencana dalam program pasca bencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang rensponsif dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah. Semua kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan potensi dan ancaman yang mungkin timbul serta pengarustamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 sesuai dengan Renstra BPBD Kulon Progo 2023-2026 yaitu Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dari sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja BPBD yang dapat digunakan untuk menilai capaian sasaran dimaksud. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah capaian penanggulangan bencana yang mengemas beberapa komponen penanggulangan bencana didalamnya yang dapat diukur maupun dinilai guna mengetahui tingkat ketercapaian sasaran dalam periode bersangkutan. Tahun 2025 ini ditetapkan Capaian ketangguhan masyarakat menghadapi bencana sebesar 98,86 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan dan Target BPBD pada Renja BPBD Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	**TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025**
Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.	Persentase Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase penanggulangan bencana	98,86
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100
	2. Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah			
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan harus mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026.

Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan sebagai berikut :

	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan
			penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan
			Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan

2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman	300 Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	110 orang
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 dokumen
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20 unit
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	2 Dokumen

			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi	200 Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	1 Dokumen
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	1 Kegiatan
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan

			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Rancangan Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan harus mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026.

Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan berdasar Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 sebagai berikut :

Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 Tertuang Dalam Tabel Di Bawah Ini

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	*Anggaran 2025*	*Prakiraan Maju 2026*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.804.825.116	1.762.483.884
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.209.600	8.857.486
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.571.400	5.843.030
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	2.638.200	3.014.456
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.388.479.940	1.300.309.846
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	1.353.686.540	1.252.564.319
				penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	32.396.800	44.997.876
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.396.600	2.747.651
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				19.356.800	23.014.026
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	19.356.800	23.014.026
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.661.200	21.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	7.661.200	21.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.210.148	211.050.204
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.727.412	44.901.972
				Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.340.000	6.014.799

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	118.142.736	160.133.433
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.907.428	198.252.322
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	176.045.628	176.354.687
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	19.861.800	21.897.635
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Prosentase Penanggulangan Bencana					945.817.500	1.050.667.838
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				36.936.400	40.803.525
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	36.936.400	40.803.525
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				322.725.300	357.835.008
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	110 orang	55.050.600	61.747.718
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20 unit	14.068.000	15.545.250
				Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	203.991.800	224.967.110
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	49.614.900	55.574.930
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				521.487.700	578.791.884
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	485.132.300	546.633.061

				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	36.355.400	32.158.823
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				64.668.100	73.237.421
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	8.654.500	22.908.296
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	36.259.200	40.792.500
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	1 Kegiatan	19.754.400	9.536.625
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Prosentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					688.789.100	945.205.276
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				623.025.200	872.183.724
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	591.352.000	764.576.474
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	6.720.000	7.607.250
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan v	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	24.953.200	100.000.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				23.997.200	26.901.000
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	24.400.000	23.997.200	26.901.000

			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				41.766.700	46.120.552
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	28.134.400	31.061.835
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa	13.632.300	15.058.717
JUMLAH							**3.439.431.716**	**3.758.356.998**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta evaluasi hasil Renja Tahun 2023.

Proses mekanisme penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Seksi-seksi di lingkungan Kantor BPBD, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya Renja digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhimya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata- mata kepada Input (masukan), namun lebih ditekankan kepada Output (keluaran), Out come (hasil) , benefit (manfaat) dan Impact (pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna , bersih dan bertanggung jawab.

Lampiran :

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates, 2 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAUFIQ PRIHADI, S.E.
NIP. 19730809 199703 1 008

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAER

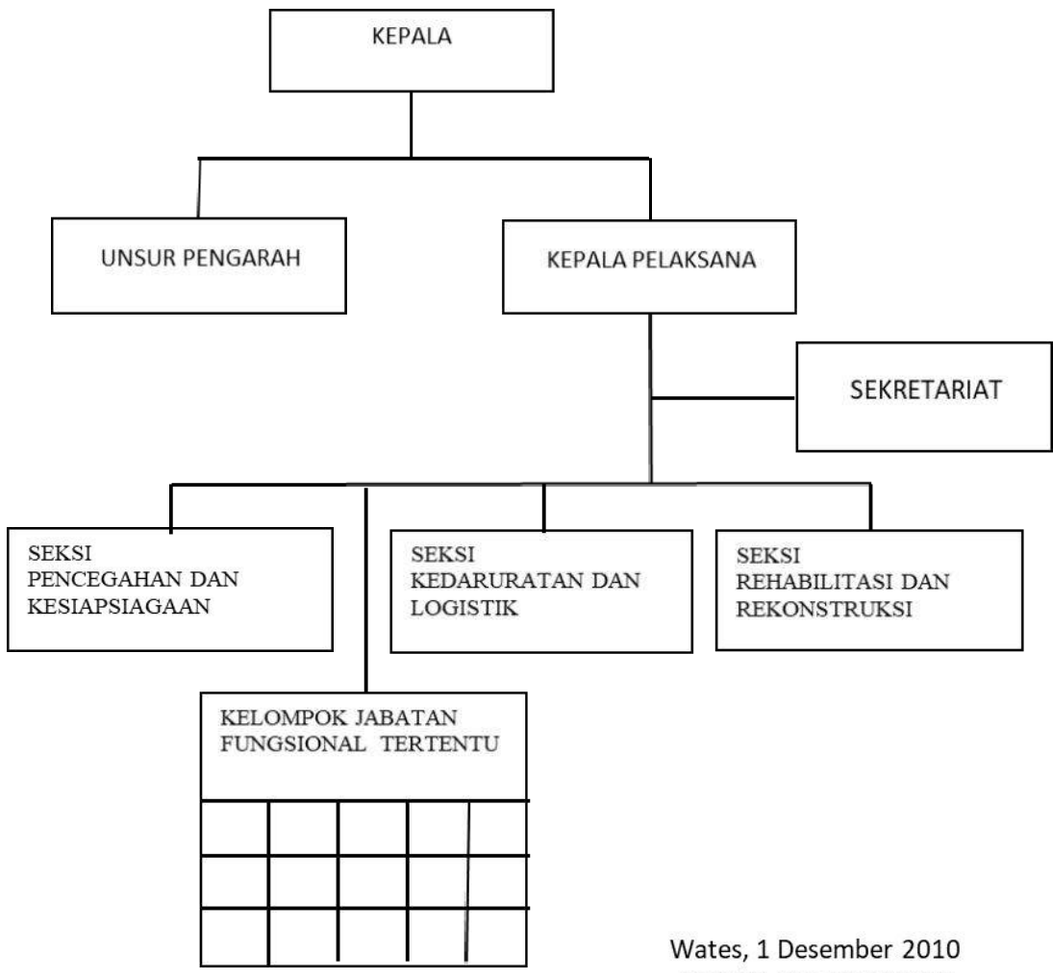

Wates, 1 Desember 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax. (0274)773026

Email : dinsos@kulonprogokab.go.id

Website : dinsos.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat kami susun. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2022-2026 ,Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat daerah tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wates,2 Agustus 2024

Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK v

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos PPPA Tahun 2023..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA..... 28

2.4. Review Terhadap RKPD..... 31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 36

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 37

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos PPPA..... 38

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 39

4.1 Program kegiataan..... 39

BAB. V PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 6

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 12

Tabel 2.2.2 Persentase peningkatan pemberdayaan sosial..... 14

Tabel 2.2.3 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023..... 15

Tabel 2.2.4 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023..... 17

Tabel 2.2.5 Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan2023..... 18

Tabel 2.2.6 Persentase Perlindungan Sosial 2023..... 18

Tabel 2.2.7 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Tahun 2023..... 19

Tabel 2.2.8 OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2023..... 21

Tabel 2.2.9 Persentase Perlindungan Perempuan Tahun 2023..... 25

Tabel 2.2.10 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layana Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2023..... 26

Tabel 2.2.11 Persentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023..... 28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2017 – 2022 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaa perangkat Daerab untuk periode satu tahun yang merupakan kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu :

1. tahap persiapan penyusunan,
2. penyusunan rancangan awal,
3. penyusunan rancangan,
4. forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5. perumusan rancangan akhir, dan
6. penetapan Rencana Kerja.

Dinas Sosail Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun rancangan Akhir Renja dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 bertujuan disusun sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam prencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.RKPD Kabupaten Kulon Progo, serta memperhatikan skala prioritas dalam RKPD Tahun 2024,dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun berjalan.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Perubahan

Renstra 1012-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan melalui beberapa proses yaitu :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Telaah terhadap rancangan awal Perangkat Daerah
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
11. Pembahasan forum Perangkat Daerah
12. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalahsebagai berikut :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapakali diuabh terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganggantı Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta karya menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2020 tentang RPJMNas Tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1 .15.5-1317 Tahun 2023 tnentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Fungsi, dan tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA di susun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk

mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

2. Tujuan : a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;

b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025,

c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosaial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4. Review terhadap RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PPPA TAHUN 2023

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2023.

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2023, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 tercantum dalam tabel T-C.29 (sebagaimana terlampir dalam dokumen ini).

Berdasarkan gambaran tabel evaluasi hasil Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2023, dapat dianalisa bahwa :

Program yang tercapai targetnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutautamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Pemenuhan Hak Anak. :

Program yang tidak tercapai :-

Program yang melampaui target -

Faktor penghambat ketidaktercapaian program - implikasinya terhadap ketercapaian renstra -

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target -

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINSOS PPPA KULON PROGO S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	Target dan Realisasi kinerja program tahun 2023			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PENUNJANG UMUM									
	Urusan Pemerintahan									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu								
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100.00	8	8	100
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	11	11	100.00	21	21	100
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN								
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								

7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	14	14	14	100.00	14	14	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	14	14	14	100.00	14	14	100
9	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*								
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100.00	12	12	100
11	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7	7	7	7	100.00	7	7	100
13	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*								
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100.00	12	12	100
15	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*								
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang diperlihara/direhabilitasi	*29*	*29*	*29*	*14*	48.28	*29*	*29*	100
17	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	69.44	69.44	51.95	54,79	105.47	57,78	57,79	100
18	*Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*								
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	1	1	1	100.00	1	1	100

20	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*								
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang	45	45	45	45	100.00	45	45	100
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	12	12	12	12	100.00	12	12	100
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	8	8	8	100	8	8	100
24	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100
25	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*								100
26	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	462	462	462	462	100	462	462	100
27	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	30	30	30	30	100	30	30	100
28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	250	250	250	250	100	250	250	100
29	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	250	250	250	100	250	250	100
30	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	24	24	24	24	100	24	24	100
31	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	24	24	100	24	24	100
32	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	120	120	120	100	120	120	100

33	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial*								
34	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	5	5	5	100	5	5	100
35	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	27.78	27.78	32.84	31.13	94.79	27.78	27.78	100
36	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Perlindungan Sosial*								100
37	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	18,400	18,400	18,400	18,400	100	18,400	18,400	100
38	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40,000	40,000	40,000	40,000	100	40,000	40,000	100
39	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-		-	-	100
40	Program Penanganan Bencana	Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100
41	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial*								100
42	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa	190	190	190	190	100	760	760	100
43	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*								100
44	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana	12	12	12	12	100	12	12	100
45	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100

47	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*									100
48	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	1	100
49	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									100
50	Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	73.14	73.14	58.26	58.37	100	63,90	43,49	100
51	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*									
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
53	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*								
54	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90.00	90.00	90.00	90.00	100	90.00	90.00	100
55	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4.00	4.00	4.00	4.00	100	4.00	4.00	100
56	Program Perlindungan Perempuan	Presentase perlindungan perempuan	99.99	99.99	99.99	99.99	100	99.99	99.99	100
57	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Perlindungan Perempuan*								100

58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100	3	3	100
59	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	-								100
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	8	8	100
61	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*									
62	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas								
63	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	56.90	56.90	15.52	15.52	100	31,03	31,03	100
64	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*									
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9	9	9	9	100	9	9	100
66	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak								100
67	*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*								

68	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	1	1	100	1	1	100
69	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	6	6	100	6	6	100
70	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan							100	100	100
71	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*									
72	Pengembangan Ekonomi Perempuan							105	105	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan mengacu pada indicator kinerja kinerja dapat kami sampaikan dalam tabel T-C.30 sebagaimana terlampir.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 2.2.2 berikut:

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Tahun 2023 Triwulan Keempat

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	51.95	54,79	105.47
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial	100	100	100
3	Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial	100	100	100
4	Program Pemeliharaan	Persentase Cakupan	100	100	100

	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			
5	Program Perlindungan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	32.84	31.13	94.79
6	Program Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaa n gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	58.26	58.37	100.19
7	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	99.99	99.99	100
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	15.52	15.52	100

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

1) Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Kinerja Permberdayaan sosial adalah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial dengan perhitungan Sebagai berikut :

(((Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan / Jumnlah PSKS Individu) x 100) x 40) + (((Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Kelembagaan) x 100) x 60)

Tabel 2.2.3

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan	150	149
2	Jumnlah PSKS Individu	316	316
3	Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan	100	199
4	Jumlah PSKS Kelembagaan	182	182
	Capaian	51.95	54.79

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

2. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 25%) + (Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar x 25%) + (Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 25%) + ((Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 25%).

Tabel 2.2.4

Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	(Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
2	Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	2.679	853
3	Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	2.679	853
4	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	5.376	5425
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	5.376	5425
7	(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
8	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	4.145	3297
9	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus	4.145	3297

	mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak		
10	(Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
11	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	26	28
12	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	26	28
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

3. Program Penanganan Bencana

Indikator Kinerja Penanganan Bencana adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

(((jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten) x 50%) + (jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk x 50%)

Tabel 2.2.5

Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	(jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ Jumlah Tanggap Darurat bencana)	100,00	100
2	Jenis kejadian tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar	2	2
3	Jenis kejadian bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	2	2
4	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	100,00	100
5	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani	190	326
6	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	190	326
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

4. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Kinerja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan / jumlah taman makam pahlawan) x 100.

Tabel 2.2.6

Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1	1
2	Jumlah Taman Pahlawan terpenuhi kebutuhan dasar	1	1
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

5. Program Perlindungan Sosial

Indikator Kinerja Perlindungan Sosial adalah Persentase Perlindungan Sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk) x 100) + ((Jumlah KK Yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk) x 100)

Tabel 2.2.7

Persentase Perlindungan Sosial 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	45.600	44057
2	Jumlah KK Kabupaten Kulon Progo	152.251	155219
3	Jumlah KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.400	4261
4	Jumlah KK	152.251	155219

	Capaian	32.84	31,13

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

1) Program Pemberdayaan Perempunan dan Pengarustamaan Gender

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender adalah Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dengan perhitungan sebagai berikut :

(((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 50%) + ((Jumlah desa yang melaksanakan PUG / Jumlah desa) x 30%) + ((jumlah desa prima kondisi baik / Jumlah desa prima) x 20%)) x 100.

Tabel 2.2.8
Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	38	38
2	Jumlah OPD	42	42
3	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan PUG	12	25
4	Jumlah Kalurahan	87	87
5	Jumlah desa prima kondisi baik	12	7
6	Jumlah desa prima	27	31
	Capaian	**58.26**	**58.37**

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi Pendidikan Politik Perempuan. Data Organisasi Perempuan yang aktif adalah :

1. Gabungan Organisasi Wanita;
2. PD Aisyah;
3. Muslimat NU;
4. Ikatan Bidan Indonesia;
5. persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia;
6. wanita Islam;
7. persatuan Wanita Olahraga Indonesia;
8. wanota Katholik Indonesia;
9. Persatuan Istri Tentara (PERSIT)
10. Kerukunan Wanita Werdatama Republik Indonesia (Kerta Werdhatama PWRI)
11. Dharma Wanita Persatuan Kemenag
12. dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan;
13. Puspita Nada;
14. Perempuan wira Usaha;
15. persatuan Istri Purnawirawan;
16. persatuan Wanita Kristen Indonesia;
17. dian Kemala;
18. PC Salimah;
19. bhayangkari;
20. ikatan Adhyaksa Darma Kartini;
21. perempuan Berkebaya Kulon Progo
22. Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
23. Persatuan Srikandi kreatif Indonesia
24. FPKK Kapanewon Temon
25. Forum Perlindungan korban kekerasan FPKK Kab Kulon Progo
26. FPKK Kapanewon Wates
27. FPKK Kapanewon Galur
28. FPKK Kapanewon Sentolo
29. FPKK Kapanewon Pengasih
30. FPKK Kapanewon Lendah
31. FPKK Kapanewon Girimulyo
32. FPKK Kapanewon Nanggulan

33. FPKK Kapanewon Kalibawanng

34.FPKK Kapanewon Samigaluh

35.FPKK Kapanewon Kokap

36.Forum Anak Kulon Progo

Peran serta perempuan dalam pembangunan didukung dengan kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dan kewenangan kabupaten atau kota, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Resonsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten atau kota. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.9
OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2023

NO	OPD	NO.	OPD
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	19.	Bappeda
2.	Dinas Kesehatan	20.	BKAD
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.	BKPP
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.	Inspektorat Daerah
5.	Dinas Sosial PP dan PA	23.	Kapanewon Girimulyo
6.	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	24.	Kapanewon Temon
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	25.	Kapanewon Sentolo
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	26.	Kapanewon Lendah
9.	Dinas Lingkungan Hidup	27.	Kapanewon Wates
10	RSUD Wates	28.	Kapanewon Panjatan
11.	RSUD Nyi Ageng Serang	29.	Kapanewon Galur
12.	Dinas Kesbangpol	30.	Kapanewon Pengasih
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	31.	Kapanewon Kokap
14.	Dinas Kebudayaan	33.	Kapanewon Samigaluh

15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.	Kapanewon Nanggulan
16.	Dinas Pariwisata	34.	Kapanewon Kalibawang
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.	Bappeda Kulon Progo
18.	Dinas Perhubungan	36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran responsif gender ini diukur dari proses perencanaan yang responsif gender berdasarkan pada analisis gender menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) yang kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender. Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsife Gender dan Anggaran Responsif Gender (PPRG dan ARG) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi SDM perencananan untuk semua OPD yang didukung dengan pelayanan Ruang Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 36 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisiyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kuatlitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2017 - 2022

Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2023

Partipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2017-2021, namun pada tahun 2022 terdapat penurunan karena adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang di berhentikan.

Pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) kalurahan dan 3 kapanewon pada tahun 2022 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) kalurahan dan 3 kapanewon tersebut yaitu :

a. *Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah dengan 20 pelaku Industri Rumahan*
b. *Desa Bumirejo Kecamatan Lendah dengan 20 pelaku Industri rumahan*
c. *Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo dengan 14 pelaku Industri Rumahan*
d. *Desa Tuksono Kecamatan Sentolo dengan 16 pelaku Industri Rumahan*
e. *Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo dengan 21 pelaku Industri Rumahan*

2) Program Perlindungan perempuan

Indikator kinerja dari Program Perlindungan Permpuan dan anak adalah Persentase Perlindungan Perempuan, dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + ((Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) x 30) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30) + ((1 - (Jumlah kasus KDRT / jumlah keluarga))x15).

Persentase Perlindungan Perempuan dan anak , target dan realisasinya sebagai berikut :

TabeL. 2.2.10
Persentase Perlindungan Perempuan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	48	85
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	48	85
3	Jumlah kasus KDRT	24	33
4	Jumlah Keluarga	152.251	155.219
	Capaian	99,99	99,99

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.2.11
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2023

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	10	15	25
2	RSUD Wates	4	4	8
3	Dinas Kesehatan	1	2	3
4	P2TP2A	22	19	41
5	Dinosppppa (Peksos)	0	0	0
6	RSUD Nyi Ageng Serang	1	1	2
7	RS PKU Muhammadiyah Nanggulan	1	0	1
8	RS Kharisma Paramadika Wates	0	0	0
9	RS Rizki Amalia Medika Lendah	0	0	0
10	UPT PPA BANTUL (Luar KP)	1	0	1
11	RSUD Sleman (Luar KP)	0	2	2
12	P2TPAKK RDU DIY(Luar KP)	2	0	2
	Jumlah Kasus Baru	**42**	**43**	**85**

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2023

Dalam rangka peningkatan Pemenuhan hak anak, telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan :

1. Evaluasi dan Monitoring PMTAS;
2. Pembinaan Desa Layak Anak sejumlah 6 Desa
3. Pembinaan Kecamatan Layak Anak ;
4. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah di Keluarga Miskin 370 anak
5. Memverifikasi Kabupaten Layak Anak
6. Memfasilitasi Forum Anak Kabupaten;
7. Memfasilitasi Forum Anak Kecamatan
8. Memfasilitasi Peringatan Hari Anak

9. Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak
10. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten Layak Anak
11. menyun kebijakan tentang pengembangan Kabupaten Layak.

Kebijakan tentang Kabupaten Layak anak telah diproses penyusunan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.

Selain kegiatan tersebut, Dinas Sosial juga dilaksanakan peenyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan yaitu dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Serta melakukan pendampingan anak yang memerlukan pendampingan khusus.

Sebagai langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan menyosialisasikan pencegahan terhadap anak dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3) Program Pemenuhan Hak Anak

Indikator kinerja dari Program Pemenuhan Hak anak adalah Persentase Pemenuhan Hak Anak , dengan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah Peraturan Desa/Kelurahan layak Anak/Jumlah Desa/Kelurahan)x50)+((Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun Gugus Tugas Layak anak/Jumlah gugus tugas Desa dan Kelurahan)x50).

Persentase Pemenuhan Hak anak , target dan realisasinya sebagai berikut :

TabeL. 2.2.12
Persentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Peraturan Layak AnakLayak Anak	3	3
2	Jumlah Desa/Kelurahan	87	87
3	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun gugus tugas layak anak	23	24
4	Jumlah gugus tugas desa/kelurahan	87	87
		15,52	15,52

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di masa datang.

Isu-isu strategis yang menjadi **tantangan** Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan Orang Tua terlantar ;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial,termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai ;
3) Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
4) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia,termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya;
5) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;

6) Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga;
7) Perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan merupakan prioritas utama dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo lebih banyak dijumpai di Bagian Utara yang merupakan daerah Perbukitan Menoreh. Gejala kemiskinan tersebut disebabkan antara lain oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata dan kelembagaan yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumberdaya manusia yang relatif masih rendah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS;
f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi PMKS;

Permasalahan kemiskinan tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan dalam Urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo. **Tantangan yang sekaligus menjadi peluang untuk dapat**

dikembangkan dalam bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

Permasalahan lain yang menjadi **tantangan** dalam urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Urusan Sosial :

Berbagai tantangan dan peluang yang mampu dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo, seperti :

a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
c. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.
d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada.
e. Kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
f. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti :

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

b. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembngunan.
c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
e. Penggunaan media sosial dan aplikasi on line oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi,pelecehan seksual dan penipuan.
f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
g. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
h. Semakin meningkatanya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekrasan dalam rumah tangga

2.4 Review terhadap RKPD

RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan renja tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas sosial PPPA. Dapat dilihat pada table T-C.31 sebagaimana terlampir dalam dokumen Rencana Kerja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon.

Pada forum Perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepad Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku OPD baik dari kelompok maupun dari masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perangkat Daerah Kabupaten, Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat dilihat dalam tabel T-C-32 sebagaimana terlampir dalam Dokumen Rencana Kerja ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PPPA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejateraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Daeri kompleknya peermasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat diidentifikasikan isu strategis yaitu Kemiskinan, Kecacatan, Ketelantaran, Ketunaan susila, Keterasingan, korban Bencana, Korban tindak kekerasan dan Exsploitasi dan Diskriminasi.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh (7) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Komunitas anak terpencil, Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma.

Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah :

1) Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2) TerwujudnyaaksesbilitasPMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komonitaas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi(iuran);
4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk medapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
5) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial;
6) Terjaminnya Eks penderita penyakit kronis dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

8) Tersedianya jangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA

Dalam rangka mendukung sasarn Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial mendukung sasaran "Meningkatnya Pendapatan masyarakat: Tujuan dan sasaran pada Rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	73.07
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Pemberdayaan Perempuan, Pengarustaman Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	94,11

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah: Setiap program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, memastikan arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pencapaian SDGs: Program dan kegiatan dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang meliputi

berbagai aspek pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

3. Pengentasan kemiskinan: Fokus pada program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
4. Pencapaian NSPK dan SPM: Memastikan program dan kegiatan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2025 tercantum dalam tabel T-C-33 sebagaimana terlampir dalam Dokumen Rencana Kerja ini.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah ”**Peningkatan** Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, industrialisasi, dan kesempatan Kerja
4. Ketahan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahan dan Keamanan

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam RKPD tetap dikendalikan sesui dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan ketersediaan anggaran.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA 2023-2026 serta Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1 1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku pembangunan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2025 .

Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo,

Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINSOS PPPA
KABUPATEN KULON PROGO

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023 (THN n-2)	Tahun 2024 (THN n-1)	Tahun 2025 (THN n)	Tahun 2026 (THN n+1)	Tahun 2023 (THN n-2)	Tahun 2024 (THN n-1)	Tahun 2025 (THN n)	Tahun 2026 (THN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial		Program Pemberdayaan Sosial	51,95	57,78	63,61	69,44	54,79	57,78	63,61	69,44	
2	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		Program Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		Program Penanganan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender		Program Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	58,26	63,90	68,35	73,14	58.37	63,90	68,35	73,14	
7	Persentase perlindungan perempuan		Program Perlindungan Perempuan	99,99	99,99	99,99	99,99	99.99	99,99	99,99	99,99	
8	Persentase Pemenuhan Hak Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15,52	31,03	46,55	56,90	15.52	31,03	46,55	56,90	
9	Persentase Perlindungan Sosial		Program Perlindungan Sosial	32,84	31,30	29,48	27,78	31.13	31,30	29,48	27,78	

10	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025
KABUPATEN KULON PROGO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINSOS PPPA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				18.809.006.339,00					18.809.006.339,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3.701.546.239,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	3.701.546.239,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	27.207.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	27.207.000,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.682.300,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.682.300,00	
4											
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	8.524.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	8.524.700,00	

6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dukungan sebesar 79 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2.841.725.887,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dukungan sebesar 79 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2.841.725.887,00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.781.997.487,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.781.997.487,00	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.225.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.225.000,00	
9											
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	14 Laporan	10.503.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	14 Laporan	10.503.400,00	
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dukungan sebesar 1,8 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan	100 %	44.782.000,00	Administrasi Umum Perangkat		Dukungan sebesar 1,8 % terhadap Persentase	100 %	44.782.000,00	

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.782.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.782.000,00	
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah			100 %	0,00	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dukungan sebesar 11,9 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	386.384.652,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dukungan sebesar 11,9 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	386.384.652,00	
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	386.384.652,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	386.384.652,00	

17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dukungan sebesar 6.2 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	401.446.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dukungan sebesar 6.2 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	401.446.700,00	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	401.446.700,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	401.446.700,00	
19											
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	63,61 %	91.617.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	63,61 %	91.617.500,00	
21	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 17% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 %	6.641.600,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 17% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 %	6.641.600,00	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	6.641.600,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	6.641.600,00	

23	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 83% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 %	84.975.900,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 83% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 %	84.975.900,00	
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.101.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12.101.000,00	
25											
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	9.704.100,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	9.704.100,00	
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	63.170.800,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	7 Lembaga	63.170.800,00	
28	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	611.781.400,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan dasar urusan wajib	100 %	611.781.400,00	
29	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia		Dukungan sebesar 99,9 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	601.544.700,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Dukungan sebesar 99,9 % terhadap Persentase	100 %	601.544.700,00	
30	Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	462 Orang	429.135.000,00	Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	462 Orang	429.135.000,00	

31	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	30 Orang	29.626.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat	30 Orang	29.626.000,00	
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	52.030.300,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	52.030.300,00	
33	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	26.101.400,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	26.101.400,00	
34	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	24 Orang	12.000.000,00	Pemberian Akses ke	Kab. Kulon	Jumlah Orang yang Mendapatkan	24 Orang	12.000.000,00	
35	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan	24 Orang	15.855.700,00	Pemberian	Semua	Jumlah Orang yang	24 Orang	15.855.700,00	

36	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	36.796.300,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	36.796.300,00
37	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	10.236.700,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	10.236.700,00
38	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	10.236.700,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	10.236.700,00
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	29,48 %	13.392.729.700,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	29,48 %	13.392.729.700,00
40	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Perlindungan Sosial	100 %		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Perlindungan Sosial	100 %	

41	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	103.177.400,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	103.177.400,00
42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40000 Keluarga	138.080.300,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40000 Keluarga	138.080.300,00
43	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5104 Keluarga	13.151.472.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5104 Keluarga	13.151.472.000,00
44	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	153.148.200,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	153.148.200,00
45	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 18% terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	32.120.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 18% terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	32.120.000,00

46	Penyediaan Makanan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	32.120.000,00	Penyediaan Makanan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	32.120.000,00
47	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 82% terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	121.028.200,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 82% terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100 %	121.028.200,00
48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Kampung	3.489.600,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Kampung	3.489.600,00
49										
50	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	117.538.600,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	117.538.600,00
51										

52	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	43.908.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	43.908.000,00
53	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	43.908.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	43.908.000,00
54	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	43.908.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	43.908.000,00
55	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				814.275.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				814.275.300,00
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				531.998.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				531.998.100,00

57	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	68,35 %	111.952.000,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	68,35 %	111.952.000,00
58	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	100 %	50.252.200,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	100 %	50.252.200,00
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	50.252.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	50.252.200,00
60	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	100 %	61.699.800,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	100 %	61.699.800,00

61	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang	21.362.900,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang	21.362.900,00
62										
63	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	40.336.900,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	40.336.900,00
64	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perlindungan perempuan	99,99 %	248.205.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase perlindungan perempuan	99,99 %	248.205.200,00
65	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase perlindungan perempuan	100 %	112.847.300,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase perlindungan perempuan	100 %	112.847.300,00

66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	112.847.300,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	112.847.300,00
67										
68	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase perlindungan perempuan	100 %	135.357.900,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase perlindungan perempuan	100 %	135.357.900,00
69	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	135.357.900,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	135.357.900,00
70										

71	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak	46,55 %	171.840.900,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak	46,55 %	171.840.900,00
72	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	171.840.900,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	171.840.900,00
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	171.840.900,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	171.840.900,00
74										
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	282.277.200,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	282.277.200,00

77	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	282.277.200,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	282.277.200,00
78	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	175 Orang	282.277.200,00	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	175 Orang	282.277.200,00

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
KABUPATEN KULON PROGO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINSOS PPPA KULON PROGO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KULON PROGO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING
								Lokasi	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	
1	2					3	4	7	8	9	10	11
						Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				18.809.006.339,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.994.731.039,00		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.994.731.039,00		
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	3.701.546.239,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	27.207.000,00		-
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	18.682.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	8.524.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-

	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 77 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	2.841.725.887,00		-
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Orang/bulan	2.781.997.487,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	49.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	10.503.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	44.782.000,00		-
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	44.782.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	0,00		-

	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	386.384.652,00		-
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	386.384.652,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100 %	401.446.700,00		-
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Unit	401.446.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial		63,61 %	91.617.500,00		
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 7.2% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial		100 %	6.641.600,00		-
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.641.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 92.8% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial		100 %	84.975.900,00		-
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	12.101.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	9.704.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	63.170.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	611.781.400,00		

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dukungan sebesar 99 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	601.544.700,00		-
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462 Orang	429.135.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	29.626.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
							0	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 0	52.030.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	26.101.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Orang	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang	15.855.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan						
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	36.796.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	10.236.700,00		-
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	10.236.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan Sosial		29,48 %	13.392.729.700,00		
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Perlindungan Sosial		100 %	13.392.729.700,00		-
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10000 Orang	103.177.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40000 Keluarga	138.080.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5104 Keluarga	13.151.472.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	153.148.200,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 21 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	32.120.000,00		-
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	32.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 79 %Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial		100 %	121.028.200,00		-
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						

							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Kampung	3.489.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	117.538.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100 %	43.908.000,00		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100 %	43.908.000,00		-
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Makam	43.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				814.275.300,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				531.998.100,00		
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender		68,35 %	111.952.000,00		

	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender		100 %	50.252.200,00		-
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	50.252.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas		100 %	61.699.800,00		-
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	21.362.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	40.336.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-

8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan		99,99 %	248.205.200,00		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan		100 %	112.847.300,00		-
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	112.847.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan		100 %	135.357.900,00		-
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Layanan	135.357.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
9	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak		46,55 %	171.840.900,00		
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak		100 %	171.840.900,00		-
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	171.840.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				282.277.200,00		
10	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 %	282.277.200,00		
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 %	282.277.200,00		-
	2	22	08	5.07	0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan						
							Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175 Orang	282.277.200,00	DANA KEISTIMEWAAN	-
									J U M L A H	**18.809.006.339,00**		

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Target	Pagu Indikatif (Rp)
12	13
	20.495.084.900,00
	20.017.464.900,00
	20.017.464.900,00
-	3.564.561.000,00
-	42.658.000,00
	18.546.000,00
	24.112.000,00

-	2.801.535.000,00
	2.728.000.000,00
	58.916.000,00
	14.619.000,00
-	94.710.000,00
	94.710.000,00
-	0,00

	0,00
-	413.600.000,00

	413.600.000,00
-	212.058.000,00

	212.058.000,00
-	94.732.000,00
-	10.560.000,00

	10.560.000,00
-	84.172.000,00

	12.056.000,00

	15.719.000,00

	56.397.000,00
-	491.623.000,00

-	464.288.000,00
	79.519.000,00
	55.209.000,00
	87.197.000,00
	62.458.000,00

	28.578.000,00

	29.238.000,00

	122.089.000,00
-	27.335.000,00

	27.335.000,00
-	15.708.924.000,00
-	15.708.924.000,00

	756.462.000,00
	599.403.000,00
	14.353.059.000,00
-	133.886.900,00
-	35.007.900,00
	35.007.900,00
-	98.879.000,00

	16.038.000,00

	82.841.000,00
-	23.738.000,00
-	23.738.000,00

	23.738.000,00
	477.620.000,00
	477.620.000,00
-	93.159.000,00

-	46.585.000,00

	46.585.000,00
-	46.574.000,00

	14.410.000,00

	32.164.000,00

-	153.461.000,00
-	51.150.000,00

	51.150.000,00
-	102.311.000,00

	102.311.000,00
-	231.000.000,00
-	231.000.000,00

	231.000.000,00
	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00
	20.495.084.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**18.809.006.339,00**							**20.495.084.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.994.731.039,00**							**20.017.464.900,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**17.994.731.039,00**							**20.017.464.900,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	-			**100 %**	**3.701.546.239,00**						-	**3.564.561.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	27.207.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	42.658.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.682.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		18.546.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.624.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		24.112.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 77 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	2.841.725.887,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	2.801.535.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	2.781.997.487,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		2.728.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	49.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		58.916.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	10.503.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		14.619.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	44.782.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	44.782.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	0,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	386.384.652,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	386.384.652,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	401.446.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	401.446.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial***	-			**63,61 %**	**91.617.500,00**						-	**94.732.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 7.2% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*	-			100 %	6.641.600,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lembaga	-	10.560.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	6.641.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lembaga		10.560.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 92.8% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*	-			100 %	84.975.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial	-	84.172.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	12.101.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		12.056.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	9.704.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		15.719.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	63.170.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		56.397.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial***	-			100 %	611.781.400,00						-	491.623.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Dukungan sebesar 99 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	601.544.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial	-	464.288.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				462 Orang	429.135.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		79.519.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	29.626.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		55.209.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				250 0	52.030.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		87.197.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	26.101.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		62.458.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		28.578.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	15.855.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		29.238.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	36.796.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		122.089.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	10.236.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga	-	27.335.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	10.236.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga		27.335.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Perlindungan Sosial***	-			**29,48 %**	**13.392.729.700,00**						-	**15.708.924.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Perlindungan Sosial*	-			100 %	13.392.729.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial	-	15.708.924.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	103.177.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		756.462.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40000 Keluarga	138.080.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		599.403.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtersan Keluarga														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5104 Keluarga	13.151.472.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		14.353.059.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial***	-			**100 %**	**153.148.200,00**						-	**133.886.900,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 21 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	32.120.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan bagi korban bencana	-	35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	32.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan bagi korban bencana		35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 79 %Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	121.028.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB	-	98.879.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Kampung	3.489.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB		16.038.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

Dipindai dengan CamScanner

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA PENA
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	117.538.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB		82.841.000,00	DINAS S PEMBE PEREM PERLIN
6.	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan***	-			**100 %**	**43.908.000,00**						-	**23.738.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	-			100 %	43.908.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1 makam	-	23.738.000,00	DINAS S PEMBER PEREME PERLIN
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	43.908.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1 makam		23.738.000,00	DINAS S PEMBE PEREM PERLIN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**814.275.300,00**							**477.620.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**531.998.100,00**							**477.620.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender***	-			**68,35 %**	**111.952.000,00**						-	**93.159.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender*	-			100 %	50.252.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penan	Desa dan GOW	-	46.585.000,00	DINAS S PEMBE PEREM PERLIN

Dipindai dengan CamScanner

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DA PENANGGUNG JA
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	50.252.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	Desa dan GOW		46.585.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas*	-			100 %	61.699.800,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo	-	46.574.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				90 Orang	21.362.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo		14.410.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	40.336.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo		32.164.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perlindungan perempuan***	-			**99,99 %**	**248.205.200,00**						-	**153.461.000,00**	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan*	-			100 %	112.847.300,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kapanewon	-	51.150.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TAHUN 2025						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	112.647.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kapanewon		51.150.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan*	-			100 %	135.357.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan	-	102.311.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	135.357.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		102.311.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Pemenuhan Hak Anak***	-			**46,55 %**	**171.840.900,00**						-	**231.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak*	-			100 %	171.840.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Gugus tugas kabupaten layak anak	-	231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	171.840.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Gugus tugas kabupaten layak anak		231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**282.277.200,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	-			**100 %**	**282.277.200,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*	-			100 %	282.277.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				175 Orang	282.277.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dipindai dengan CamScanner

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

2025

RENCANA KERJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 30
2.4. Review terhadap RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 42
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 43
3.3 Program dan Kegiatan 44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 46
BAB V PENUTUP 54
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 7

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2023 7

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2023 8

Tabel 2.4. Rekapiltulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023..... 10

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 21

Tabel 2.6. Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja 25

Tabel 2.7. Capaian Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023 26

Tabel 2.8 Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja..... 27

Tabel 2.9 Capaian Program Hubungan Industrial 28

Tabel 2.10 Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 30

Tabel 2.11. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2023 31

Tabel 2.12 Review terhadap RKPD tahun 2025 33

Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo..... 41

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 44

Tabel 4.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut, pembangunan yang dilakukan kabupaten harus mendukung pelaksanaan pembangunan tingkat diatasnya maupun nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Kabupaten Kulon Progo harus diselaraskan dengan skema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Khusus untuk DIY, juga mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawana. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri

kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan, pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Selain itu juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan, yakni Rencana Strategis (Renstr) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pada setiap tahun anggaran Perangkat Daerah (PD) merencanakan program kegiatan yang dilaksanakan tahun yang akan datang dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Renja PD merupakan dokumen

perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan Renstra dan RKPD merupakan penjabaran tahun RPD Tahun 2023 – 2026. Sehingga Renja merupakan dasar pelaksanaan PD untuk menunjang realisasi RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progotahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas PD tahun anggaran 2025 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2025.
b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
c. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan, LKjIP, serta informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi rencana kerja OPD, proses penyusunan renstra, aturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Juga penjelasan maksud dan tujuan penyusunan renja serta sistematika penyusunan renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan capaian pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2023 jika diselaraskan dengan rencana kerja, RKPD dan Renstra yang telah ditetapkan. Beserta analisis kinerja pelayanan dan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran rencana kerja beserta program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja beserta keluaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja PD merupakan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja PD, setelah selesai pelaksanaan dilakukan evaluasi/review agar pelaksanaan tahun mendatang dapat diidentifikasi realisasi program/kegiatan yang memenuhi atau melampaui target dan yang tidak memenuhi target serta kendala – kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 2 urusan, terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu :

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 7 kegiatan 10 sub kegiatan
2. Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 2 sub kegiatan
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
4. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
5. Program Penempatan Tenaga Kerja 1 kegiatan 2 sub kegiatan

II. Urusan Pilihan

B. Bidang Transmigrasi

1. Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan

Perjanjian Kinerja Utama tahun 2023, target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja PD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100 %	100 %
2	Pengurangan pengangguran	Penempatan tenaga kerja	3.438 orang	3.458 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator penempatan tenaga kerja sesuai target, salah satu penyebabnya tercapainya penempatan tenaga kerja adalah sudah dibukanya akses pekerja migran Indonesia.

Tabel 2.2

Target dan realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
Pengurangan pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	81,25 %	94.10 %
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	62,86 %	81,02 %
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	47,30 %	34,55 %
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	100 %	100 %

Pada tabel diatas, dari lima (5) program yang dilaksanakan hanya satu (1) indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu program hubungan industrial

Program perencanaan tenaga kerja melakukan pendataan ketenagakerjaan dilakukan bekerja sama dengan KPKD untuk mendata penganggur dan penyandang disabilitas

.

Indikator program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melampaui target, Hal ini didukung oleh keseriusan peserta pelatihan dan loyalitas instruktur. Selain itu jarak waktu antara ujian dengan pelatihan tidak jauh. Juga materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja misalnya operator mesin garment. Pelatihan operator mesin garment merupakan pelatihan yang bekerjasama dengan PT. Anggun

Sebagaimana Indikator program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Indikator program Penempatan Tenaga Kerja juga melampaui target. Keberhasilan program ini didukung dua kegiatan yaitu Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan pelayanan antar kerja selain memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang datang juga memfasilitasi perusahaan – perusahaan yang mencari tenaga kerja melalui lowongan yang diumumkan lewat dinas. Hasil dari seleksi didata dan dicatat melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Indikator kinerja Program Hubungan Industrial tidak tercapai, hal ini disebabkan perusahaan – perusahaan yang wajib memenuhi sarana hubungan industrial belum semua patuh. Sehingga perlu dilakukan upaya - upaya untuk meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/ buruh. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Aturan Ketenagakerjaan kepada perusahaan – perusahaan dan Advokasi atau pendampingan pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Indikator Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terrealisasi 100 persen, yaitu sebanyak 2 KK 7 jiwa ke UPT Salulisu, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Dari sisi pendanaan realisasinya adalah sebagai berkut :

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.347.817.062,00	4.018.677.072,00	92,43

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Kabupaten/Kota			
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	133.976.500,00	130.022.196,00	97,05
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.013.743.400,00	964.647.211,00	95,16
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	12.922.968.200,00	12.888.721.216,00	99,73
5	Program Hubungan Industrial	132.160.700,00	131.790.042,00	99,72
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	183.395.300,00	183.065.834,00	99,82
	Jumlah	18.734.061.162,00	18.316.923.570,00	97,77

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan semua program lebih dari 95 persen, kecuali program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini disebabkan sisa dari kegiatan Administrasi Keuangan sub kegiatan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran Program Penempatan Tenaga Kerja lebih dari 67 persen dari total anggaran PD, karena termasuk belanja hibah baik APBD maupun Bantuan keuangan Khusus DIY.

Adapun hasil capaian pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**URUSAN KETENAGAKERJAAN**									
	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
		1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	92	**3**	**2**	**2**	**100**	2	7	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	**3**	**2**	**2**	**100**	2	7	
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	**21**	**21**	**21**	**100**	21	63	
		2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	45				45	45	
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	100	12	36	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	14	14	14	100	14	42	
		3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4	1	1	1	100	1	3	
			1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1	1	1	100	1	3	
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	15							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
		4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18	6	6	6	100	6	18	
			1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100	6	6	100
			2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	**12**	**12**	**12**	100	12	12	**100**
		5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12					3	3	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12					3	3	
		6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	72	12	12	12	100	18	18	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	6	6	6	100	6	18	
		7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	185					46	46	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80					20	20	
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1		1	1	100	-	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104					26	26	
	2			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	**1**	**1**	**1**	**100**	1	1	**100**
		1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	**1**	**1**	**1**	**100**	1	1	**100**
			1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	1	1	100	1	1	100
			2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	18		**3**	**3**	**100**	3	3	
	3			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59					81,25	81,25	
		1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peserta pelatihan yang kompeten	6,60					5,89	5,89	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (orang)	192		128	128	100	96	96	
			2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja(unit)	12					3	3	
		2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8		2	2	100	2	2	
			1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8		2	2	100	2	2	
		3		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4		1	1	100	1	1	
			1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4		1	1	100	1	1	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86					62,86	62,86	
		1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.200					1.680	1.680	
			1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.200					1.680	1.680	
			2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520					600	600	
		2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880				-	3.600	3.600	
			1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880					3.600	3.600	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	5			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79					47,3	47,3	
		1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	6	6	6	100	6	6	
			1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	6	6	6	100	6	6	
		2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	2	2	2	100	5	5	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	2	2	2	100	5	5	
			2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19		18	18	100	0	0	
3	03			**URUSAN TRANSMIGRASI**									
	3			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
		3		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
			1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu)	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	2	2	2	100	2	6	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Daerah Kabupaten/Kota									
				Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	100		100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pulihnya perekonomian yang ditandai dengan menggeliatnya dunia usaha dan salah satu dampak bandara adalah banyak investor masuk dan beroperasinya perusahaan baru terutama hotel - hotel, menambah potensi penempatan tenaga kerja. Selain itu, mulai dibukanya pengiriman pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja meningkat

Hal tersebut berdampak pada capaian indikator kinerja, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	100	100	100	100				
2	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja			23	23	23	24	23				
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	3	2				
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21	21	21				
5	capaian administrasi keuangan			100	100	100	100	100				
6	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45	44	44	43	45				
7	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	12	12				
8	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			14	14	14	14	14				
9	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai			1	1	1	1	1				

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	1	1	1	1				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15	15						
	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah			18	18	18	18	18				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6	6	6	6	6				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	12	12	12	12				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	3	3						
	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang			18	18	18	18	18				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12	12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	6	6	6	6				
	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah			46	47	46	46	46				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20	20	20	20	20				
	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			-	1	-		1				

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			26	26	26	26	26				
	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun			1	1	1	1	1				
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1	1	1	1	1				
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro			3	5	5		3				
	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi			81,25	82,03	82,81						
	prosentase peserta pelatihan yang kompeten			5,89	6,14	6,43						
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			96	128	160		128				
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			3	3	3						
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			2	2	2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1	1	1		1				
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan			62,86	63,98	64,27						
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			1.680	1.680	1.920						
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			600	620	640						
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			3.600	3.600	3.840						
	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak			47,3	48,25	49,21						

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			6	6	6	6	6				
	Jumlah Perselisihan yang dicegah			5	5	5	1	5				
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			18	-	19		18				
	prosentase transmigran yang ditempatkan			100	100	100	100	100				
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			5	4	3	2	2				
	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan			100	100	100	100	100				

Analisis kinerja pelayanan tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan, yakni dari rencana jumlah bulan layanan 12 bulan terealisasi selama 12 bulan. Secara fisik rata-rata kegiatan juga terealisasi 100%. Walaupun dari sisi anggaran tidak mencapai 100 persen yaitu rata – rata 92,43 persen. Sisa anggaran merupakan sisa penyediaan gaji ASN, karena ada beberapa PNS memasuki masa purna tugas.

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator kinerja dari Program Perencanaan Tenaga Kerja adalah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Program Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Capaian indikator kinerja	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa dokumen rencana tenaga kerja berhasil disusun. Dokumen tersebut terdiri dari dua data yaitu Data Pilah dan Data Ketengaakerjaan.

Data pilah merupakan data peminatan lulusan SMA/K yang lulus tahun ini. Peminatan berupa pilihan ingin bekerja atau sekolah. Data ini merupakan hasil kerjasama dengan sekolah – sekolah, Balai Pendidikan Menengah DIY dan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo sebagai pengampu SMA/K dan MAN.

Data ketenagakerjaan meliputi Data Ketenagakerjaan dan Data Disabilitas yang diperoleh hasil kerjasama dengan Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) yang berada dibawah koordinasi Dinas Sosial PPPA. Pada tahun 2023 juga dilaksanakan penyusunan review Rencana Tenaga Kerja Daerah tahun 2023 – 2025, yang memuat antara lain Perkiraan Ketersediaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.

c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator kinerja dari Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase peserta pelatihan bersertifikasi, dengan perhitungan sebagai berikut: *(jumlah peserta pelatihan lulus ujian sertifikasi / jumlah peserta pelatihan yang mengikuti ujian sertifikasi) x100%*

Tabel 2.7

Capaian Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Realisasi
	(jumlah peserta pelatihan lulus ujian sertifikasi / jumlah peserta pelatihan yang mengikuti ujian sertifikasi) x100%	*91.78*	*81.25*	*94.10*
1	Jumlah peserta pelatihan lulus ujian sertifikasi	346	208	271
2	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti ujian sertifikasi	377	256	288
Capaian indikator kinerja		**91.78**	**81.25**	**94.10**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator program tersebut tercapai 115,82%. Hal ini didukung oleh keseriusan dan motivasi peserta pelatihan

yang tinggi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Namun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2022 menurun secara kuantitas tetapi meningkat secara kualitas. Penurunan jumlah peserta ujian sertifikasi disebabkan menurunnya paket pelatihan.

Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pelatihan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dilanjutkan dengan penyelenggaraan ujian kompetensi melalui kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dilakukan pelatihan dengan bekerja sama dengan dua (2) LPKS dengan pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik kerjasama dengan LPK Agropedia Nusantara dan Tata Rias Dasar (*Basic MUA*) kerjasama dengan LPK Mahkota masing – masing 15 peserta. Para peserta ini membuat kelompok untuk usaha bersama.

d. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja adalah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan, dengan perhitungan sebagai berikut: *(tenaga kerja yang ditempatkan / tenaga kerja yang terdaftar) x 100%*

Tabel 2.8

Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Realisasi
	(tenaga kerja yang ditempatkan / tenaga kerja yang terdaftar) x 100%	*84.86*	*62,86*	81,02
1	Tenaga kerja yang ditempatkan	3.592	2.200	3.458
2	Tenaga kerja yang terdaftar	4.233	3.500	4.268
	Capaian indikator kinerja	**84.86**	**62,86**	**81,02**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa target program penempatan tenaga kerja terealisasi melebihi target sebesar 121,44 persen. Keberhasilan program ini didukung dua kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan pelayanan antar kerja dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja dan penyediaan fasilitasi seleksi/rekrutmen dan pengumuman lowongan kerja bagi perusahaan – perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hasil fasilitasi seleksi/rekrutmen tenaga kerja didata dan dicatat melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Keberhasilan program juga didukung oleh pelayanan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 tenaga kerja yang ditempatkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan bahwa pekerja yang diberhentikan pada waktu pandemi covid 19 sudah dipekerjakan kembali pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 sudah kembali normal dalam arti penerimaan pekerja sesuai kebutuhan.

e. Program Hubungan Industrial

Indikator kinerja dari Program Hubungan Industrial adalah Persentase perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, dengan perhitungan sebagai berikut: *(perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan) x 100%*

Tabel 2.9

Capaian Program Hubungan Industrial Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Realisasi
	(perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan) x 100%	*40.16*	*47.30*	*38.00*
1	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51	149	57
2	Jumlah perusahaan	127	315	165
	Capaian indikator kinerja	**40.16**	**47.30**	**34,55**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023

Jumlah perusahaan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan signifikan karena perubahan pengertian tentang perusahaan yang menerapkan tata kelola layak. Pada tahun 2022 dan sebelumnya yang dimaksud dengan perusahaan yang menerapkan tata kelola layak adalah apabila perusahaan tersebut memenuhi paling tidak dua (2) jenis sarana hubungan industrial dari 5 jenis sarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Menyusun struktur dan skala upah, Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, LKS Bipartit). Mulai tahun 2023 yang dimaksud dengan perusahaan yang menerapkan tata kelola layak adalah apabila perusahaan tersebut memenuhi paling tidak dua (2) jenis sarana hubungan industrial yaitu Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja Program Hubungan Industrial tidak tercapai, hal ini disebabkan perusahaan – perusahaan yang wajib memenuhi sarana hubungan industrial belum semua patuh. Sehingga perlu dilakukan upaya - upaya untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Aturan Ketenagakerjaan kepada perusahaan – perusahaan dan Advokasi atau pendampingan pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator kinerja dari Program Pembangunan Kawasan Trasnmigrasi adalah Persentase transmigran yang ditempatkan, dengan perhitungan sebagai berikut: *(transmigrasi yang ditempatkan / Kuota penempatan transmigran) x 100%*

Tabel 2.10

Capaian Program Pembangunan Kawasan Trasnmigrasi Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	
			Target	Realisasi
	(transmigrasi yang ditempatkan (kk) / Kuota penempatan transmigran (kk)) x 100%		*100*	*100*
1	Transmigran yang ditempatkan	2	2	2
2	Kuota penempatan transmigran	2	2	2
	Capaian indikator kinerja	**100**	**100**	**100**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai target. Pada tahun 2023 telah diberangkatkan sebanyak 2 (dua) KK ke UPT Salulisu, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sebelum pemberangkatan calon transmigran tersebut telah dilakukan beberapa upaya persiapan, antara lain : Komunikasi Informasi dan Edukasi, Publikasi,

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sehingga perlu merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, kondusif serta mendukung penyiapan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing serta sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja. Melalui berbagai

program dan kebijakan tersebut diharapkan tenaga kerja yang terserap makin meningkat, sehingga tingkat pengangguran makin berkurang.

Tabel 2.11

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

DIY dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2023

No.	Tahun	Besaran (%)	
		DIY	Kulon Progo
1	2017	3.02	1,99
2	2018	3,35	1,49
3	2019	3,14	1,80
4	2020	4,57	3,71
5	2021	4,56	3,69
6	2022	4,06	2,80
7	2023	3,69	2,40

Sumber : Data Sakernas 2017-2023 BPS DIY

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS DIY menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon dalam kurun waktu 2017 hingga 2023 fluktuatif. Setelah tahun 2020 naik siginifikans karena adanya pandemi, mulai tahun 2021 sampai 2023 turun menjadi 2,80 persen.

Salah satu cara untuk menangani pengangguran adalah dengan bekerja sama dengan pihak – pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan menambah pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain. Dengan terpilihnya UPT BLK sebagai *pilot project* Revitalisasi BLK oleh Kementerian Perekonomian dan program SDC (*Skill Development Center*) oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Bappenas yang diharapkan dapat membantu dalam upaya menahan laju TPT dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan mulai beroperasinya bandara YIA, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya mempersiapkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Untuk menjadi tenaga kerja yang berdaya

saing harus mempunyai kompetensi dan karakter yang kuat agar tidak terlindas dengan tenaga kerja dari luar.

Selain hal tersebut, dalam mendukung ketercapaian SDG's, harus meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan semangat / motivasi agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah. Dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja dilakukan jejaring dengan dunia industri – pasar kerja agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan pencari kerja. Untuk mendukung hal tersebut telah dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) yang diketuai oleh Direktur PDAM, salah satu BUMD Kabupaten Kulon Progo.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2) Peluang kerja yang makin terbuka dengan meningkatnya investasi dan berbagai program pembangunan infrastruktur
3) Kurangnya perlindungan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal.
4) Makin terbatasnya lokasi daerah tujuan transmigrasi yang memenuhi kriteria kelayakan program 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

2.4. Review terhadap RKPD

Hasil telaahan terhadap RKPD Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12

Review terhadap RKPD Tahun 2025

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.689.079.555	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				9.359.919.366
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.543.138.155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.359.919.366
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				4.607.106.655	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				4.594.444.966
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	23 Dokumen	20.894.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	23 Dokumen	20.631.600
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.243.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.255.400
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Lporan	6.651.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Lporan	6.376.200
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		capaian administrasi keuangan	100%	3.056.532.229	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		capaian administrasi keuangan	100%	3.049.232.436
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	2.992.045.223	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	2.992.044.436

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.764.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51.646.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	5.723.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	5.541.500
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	4.159.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	2.641.400
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.159.800	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.641.400
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18 dokumen	126.421.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18 dokumen	120.597.700
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	29.989.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.960.700
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.432.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.637.000,

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.878.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.948.700
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.878.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.948.700
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	18 laporan	888.711.512	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	18 laporan	886.072.580
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	194.096.332	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.457.400
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	694.615.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	694.615.180
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah		jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	20 Unit	*449.508.200*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah		jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	20 Unit	499.320.550
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	129.193.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	168.518.950

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	300.277.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	300.765.000,
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	30.036.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	30.036.600
II	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			1 Dokumen	160.985.300	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			1 Dokumen	207.348.900
A	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	160.985.300	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	207.348.900
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	132.985.300	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	180.731.300,
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	28.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	26.617.600, -
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				686.352.500	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.247.710.000
A	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		prosentase peserta pelatihan yang kompeten		511.421.300	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		prosentase peserta pelatihan yang kompeten		874.916.700

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	455.563.300,	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	142 Orang	785.260.300,
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	23.837.500	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	40.325.900
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	32.020.500	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	49.330.500
B	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	*146.074.100*	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	142.740.500
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	146.074.100	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	142.740.500
C	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	28.857.100	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	27.549.700

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	28.857.100	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	27.549.700
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				961.515.800	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				3.393.219.500
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1920 orang	*870.684.500*	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1920 orang	3.303.028.200
	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1590 Orang	*225.213.600*	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1590 Orang	109.078.800
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	785 Orang	*645.470.900*	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	785 Orang	3.193.949.400
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3840 orang	*90.851.300*	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3840 orang	90.191.300
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4390 orang	*90.851.300*	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4390 orang	90.191.300
I V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				121.157.900	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				119.699.100

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
A	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	*76.723.500*	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	73.185.700
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	76.723.500	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	73.185.700
B	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	*50.434.400*	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	2 Perkara	46.513.400
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	*40.485.800*	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	46.513.400

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)
2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19 Asosiasi dan SP	*9.948.600*	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.744.200
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				*145.941.400*	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				135.460.400
V	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				*145.941.400*	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				135.460.400
A	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		prosentase transmigran yang ditempatkan		145.941.400	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		prosentase transmigran yang ditempatkan		135.460.400
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	*145.941.400*	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	135.460.400

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan dari pemangku kepentingan dan musrenbang Kapanewon lebih banyak berupa padat karya infrastruktur. Ada beberapa pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.

Tabel 2.13

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kulon Progo	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan	9 lokasi	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kulon Progo	Padat karya	375 lokasi	
3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Penyuluhan transmigrasi	2 kali	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya dalam aspek *Human Capital* dalam pembangunan Indonesia. Keberpihakan pemerintah dalam kebijakaan bidang ekonomi, sosial, dan politik sangat berprngaruh terhadap akselerasi pembangunan ketenagakerjaan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja telah dilakukan melalui pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di BLK. Untuk meningkatkan kualitas pelatihan dilaksanakan melalui pengembangan standarisasi kompetensi kerja, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, serta revitalisasi sarana prasarana pelatihan.

Agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan dirumuskan dalam 9 agenda prioritas yang disebut sebagai “NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN”, yaitu :

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional;
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
3. Percepatan sertifikasi profesi;
4. Perluasan kesempatan kerja formal;
5. Penguatan wirausaha produktif;
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif;
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan;
8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja migrant;
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

Pembangunan transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Sedangkan kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; (3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah: “Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif”.

Isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal
2. Sumber daya manusia belum kompetitif
3. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelayanan infrastruktur wilayah
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah
5. Masih tingginya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum

Untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 5 prioritas pembangunan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan

5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas fungsinya mendukung prioritas pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan dan bekerja sama dengan investor agar keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar industri yang pada akhirnya dapat menangkap peluang yang ada.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengurangan pengangguran	Penempatan tenaga kerja	3.472

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2025 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian rencana jangka panjang daerah, diharapkan kegiatan yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk mendukung tujuan daerah mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan salah satu indikatornya angka kemiskinan, serta sasaran daerah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator pendapatan perkapita penduduk dan tingkat pengangguran terbuka, maka Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai sasaran mengurangi pengangguran dengan indikator penempatan tenaga kerja.

Untuk merealisasikan hal tersebut diatas, dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 2 urusan, 6 program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Adapun lebih terperinci dapat disajikan sebagai berikut :

A. Bidang Tenaga Kerja
    1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 7 kegiatan 14 sub kegiatan
    2. Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 2 sub kegiatan
    3. Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
    4. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 3 kegiatan 5 sub kegiatan
    5. Program Penempatan Tenaga Kerja 2 kegiatan 3 sub kegiatan

B. Bidang Transmigrasi
    1. Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan disini merupakan usulan program/kegiatan/sub kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Adapun usulan program/kegiatan melalui sumber dana APBN dan APBD DIY sedang dalam proses pengusulan sampai dengan rencana kerja ini disusun. Usulan dengan sumber dana APBN seperti usulan pelatihan yang dilakukan oleh UPT Balai Latihan Kerja, dilakukan melalui usulan Bupati ke BLKPP Solo.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 3 urusan, 2 bidang terdiri atas 6 program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.495.379.766,00

Adapun rincian program kegiatan sebagaimana tabel dibawah.

-

Tabel 4.1

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan

Sumber Dana : APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						9.495.379.766,00				23.404.061.643,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.359.919.366,00				23.157.235.843,00
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						9.359.919.366,00				23.157.235.843,00
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	4.594.444.966,00			-	4.439.009.195,00
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	92 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	20.631.600,00			-	16.710.500,00
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 Dokumen	14.255.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.912.300,00
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	6.376.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.798.200,00
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.049.232.436,00			-	3.760.103.195,00
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	44 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	2.992.044.436,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.689.138.995,00
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.646.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		62.051.900,00
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Dokumen	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	5.541.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.912.300,00
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.641.400,00			-	7.798.200,00
	2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.641.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.798.200,00
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	120.597.700,00			-	118.076.900,00
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	5 Paket	5 Paket	31.960.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.965.000,00
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.637.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		89.111.900,00

	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	8 unit	-	1 unit	15.948.700,00			-	0,00
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	8 unit	-	1 Unit	15.948.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	72 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	886.072.580,00			-	355.411.700,00
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	191.457.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		183.972.300,00
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	694.615.180,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		171.439.400,00
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	185 laporan	laporan	2 laporan	12 laporan	499.320.550,00			-	180.908.700,00
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	168.518.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		146.540.600,00
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	300.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104	26 Unit	26 Unit	26 Unit	30.036.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34.368.100,00
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	207.348.900,00			-	55.820.000,00
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	207.348.900,00			-	55.820.000,00
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	180.731.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.820.000,00
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro										
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	18 perusahaan	5 perusahaan	5 orang	5 Orang	26.617.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59%	94,10%	82,03%	-	1.045.206.900,00			-	10.310.863.200,00
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peserta pelatihan yang kompeten	6,60%		6,14%	6,43 persen	874.916.700,00			-	10.143.787.200,00
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 orang	128 Orang	128 Orang	142 Orang	785.260.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL		10.096.575.000,00
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										

							Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	40.325.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 unit	2 unit	3 unit	5 Unit	49.330.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47.212.200,00
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	142.740.500,00			-	167.076.000,00
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	142.740.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		167.076.000,00
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	27.549.700,00			-	0,00
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	27.549.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86%	81,65%	63,98%	-	3.393.219.500,00			-	8.209.467.048,00
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.200 orang	1.680 orang	1.200 orang	1920 orang	3.303.028.200,00			-	8.067.387.048,00
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja										
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.200 orang	631 orang	1.200 orang	1590 Orang	109.078.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169.003.770,00

	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520 orang	2.231 orang	3.600 orang	785 Orang	3.193.949.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.898.383.278,00
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880 orang	4.075 orang	3.600 orang	3840 orang	90.191.300,00			-	142.080.000,00
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880 orang	4.075 orang	3.600 orang	4390 Orang	90.191.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		142.080.000,00
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79%	38,00%	48,25%	-	119.699.100,00			-	142.076.400,00
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	73.185.700,00			-	86.106.400,00
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan										
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 Laporan	73.185.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86.106.400,00
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	5 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	46.513.400,00			-	55.970.000,00

	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 perkara	2 perkara	2 perkara	2 Perkara	36.769.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.970.000,00
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19 Asosiasi dan Serikat Pekerja	19 Asosiasi dan Serikat Pekerja	18 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.744.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						135.460.400,00				246.825.800,00
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						135.460.400,00				246.825.800,00
6	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	100%	100%	100%	-	135.460.400,00			-	246.825.800,00
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan	100%	100%	100%	100 persen	135.460.400,00			-	246.825.800,00
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	135.460.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		246.825.800,00
											J U M L A H	9.495.379.766,00				23.404.061.643,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan tujuan Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo,

Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196907081996031004

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU ……... 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …….. 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….. 20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……. 52
2.4. Review terhadap RKPD 53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 105
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 137
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..……. 137
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……. 139
3.3. Program dan Kegiatan ……. 141
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 144
BAB V PENUTUP ……. 190

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo ……..	10
Tabel II.2	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 ……..	16
Tabel II.3	Capaian Kinerja dari Masing – masing Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	19
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 …….	22
Tabel II.5	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan Tahun 2023	26
Tabel II.6	Reviu terhadap Rancangan Awal Renja 2025	54
Tabel II.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	105
Tabel III.1	Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025	140
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 ……	145

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025 disusun untuk melaksanakan amanat UU Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang mana di tataran Perangkat Daerah. Dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daeraha adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

d. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Kerja 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 - 2026, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Berjalan.

Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan serta mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renja Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026 yang pada tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam implementasinya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 – 3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Pangan;
20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Tahun 2023-2026
21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi dinas dalam menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya dan keuangan kabupaten.
2. Mengintegrasikan program-program pembangunan pertanian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 adalah:

1. Optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya pada urusan pertanian.
2. Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di tahun 2025.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 11 program, 25 kegiatan dan 42 sub kegiatan sesuai permendagri 90 tahun 2019.

Tabel II.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh****)	4.113.241.400	3.886.601.419	94,50
2	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	139.970.000	138.739.165	99,12
3		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	663.384.500	622.730.303	93,87

		Kecukupan Gizi				
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	50.080.000	45.279.815	90,41
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	44.699.231	89,40
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	1.943.815.700	1.931.573.952	99,37
7		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****)	Pengembangan Lumbung Mataraman****)	811.128.200	786.850.237	97,01
8		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya****)	792.677.500	768.421.158	96,94
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.539.573	97,12
10			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.343.500	85.513.970	84,40
11		Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.432.522.078	10.702.609.107	93,61

		Daerah				
12			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.100.000	85.425.000	99,21
13			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	13.658.400	13.506.151	98,88
14		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.675.000	3.495.990	95,12
15			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	100
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.996.800	84.082.523	98,92
17			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.372.900	36.290.394	94,57
18		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.666.500	38.724.000	95,22
19		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.383.928	174.348.319	92,06
20			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.779.960	572.442.345	99,94
21		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	307.212.800	277.003.793	90,16

		Pemerintahan Daerah	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
22			Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.633.300	248.410.083	99,51
23			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	57.493.500	76,65
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	130.000.000	129.705.790	99,78
25			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	848.712.500	781.956.078	92,13
26		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.249.520.000	1.153.441.751	92,31
27			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	670.590.000	665.705.449	99,27
28		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.395.859.900	1.332.984.932	95,50

29	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	741.130.000	739.392.936	99.76
30		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.150.010.000	1.138.677.755	99,01
31			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.261.455.600	2.248.379.952	99,42
32			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.253.299.900	1.030.999.644	82,26
33	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	546.578.000	489.532.883	89,56
34			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	100.000.000	74.207.980	74,21
35		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan	132.695.900	130.417.277	98,28

		Kabupaten/Kota	Produk Hewan			
36			Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	97.000.000	66.519.417	68,58
37		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.819.914.000	1.696.779.500	93,23
38		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	200.000.000	150.019.996	75,00
39			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60.000.000	57.916.963	96,52
40	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengendalian	250.000.000	248.119.285	99,25
41	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	302.400.000	297.142.363	98,26
42			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	404.559.600	367.121.223	90,74

			Kecamatan dan Desa			
				35.394.377.966	33.421.801.202	94,42

Berdasarkan tabel II.1 diatas, pagu Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 35.394.377.966,00. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja, kinerja fisik tercapai 100%, dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 adalah Rp.33.421.801.202,00 (94,42%). Realisasi anggaran tidak tercapai 100% karena adanya sisa kontrak pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian harga menurut harga pasar.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pangan dan Pertanian berupa produksi padi, produksi jagung, produksi kedelai, produksi cabe merah, produksi bawang merah, produksi kelengkeng, produksi durian, produksi alpukat, produksi jahe, produksi cengkeh, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan indikator tersebut, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel II.2 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel II.2. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	2023		
				Target	Realisasi	%-ase
Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan 0,5% pertahun			
		ton	Padi Sawah	123.577	130.745	105,80
		ton	Jagung	24.601	19.331	78,58
		ton	Kedelai	2.924	3.008	102,86
	Produksi Tanaman Sayuran		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Sayuran 5% pertahun			
		kuintal	Bawang Merah	122.231	116.315,80	

						95,16
		kuintal	Cabe merah	340.067	361.068,29	106,18
	Produksi Tanaman Buah		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Buah 5% pertahun			
		kuintal	Alpukat	18.784	23.762	126,50
		kuintal	Durian	53.698	56.783	105,75
		kuintal	Klengkeng	5.180	7.754	149,70
	Produksi Tanaman Biofarmaka		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Biofarmaka 2% pertahun			
		kg	Jahe	4.563.130	4.632.000	101,51
	Produksi Tanaman Perkebunan		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Perkebunan 1,5% pertahun			
		ton	Kelapa	25.802	26.575	103,00
		ton	Kopi	3.268	3.320	101,58
		ton	Kakao	1.388	1.423	102,55
Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging	kg	Peningkatan Produksi Daging 5% pertahun	14.580.034	16.041.420	110,02
	Produksi telur	kg	Peningkatan Produksi Telur 5% pertahun	13.224.722	15.255.870	115,36
Meningkatnya pola pangan harapan	skor pola pangan harapan	%	total penjumlahan proporsi kecukupan konsumsi energi dari 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain)	93,50	93,53	100,03

Dari tabel II.2 dapat dilihat adanya 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Empat sasaran strategis

urusan pertanian dan pangan yaitu: 1) meningkatnya produksi pertanian dituangkan dalam 12 (dua belas) indikator Kinerja Utama, 2). Meningkatnya produksi peternakan dituangkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama, sasaran stragegis yang ke 3) meningkatnya pola pangan harapan dituangkan ke dalam 1 (satu) indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ke 4) meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, 13 (tiga belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi padi, kedelai, cabai merah, alpukat, durian, kelengkeng, jahe, kelapa, kopi, kakao, daging, telur sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi jagung, produksi dan bawang merah.
2. Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi kelengkeng yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 149,70%) dan terendah adalah produksi jagung yaitu 19.331 ton (tingkat capaian 78,58%). Pencapaian untuk kelengkeng sangat tinggi karena panen raya kelengkeng, terutama di Kapanewon Pengasih. Sedangkan produksi jagung tidak mencapai target 2023 meskipun produksinya naik dibanding tahun 2022. Kondisi ini karena banyak terjadi peralihan pertanaman komoditas jagung menjadi komoditas bawang merah terutama di Kapanewon Sentolo, dan Pengasih.
3. Produksi Daging target 14.580.034 kg tercapai 16.041.420 kg atau 110,02%. Produksi telur target 13.224.722 kg tercapai 15.255.870 kg atau 115,36%. Produksi daging dapat tercapai target karena wabah PMk sudah dapat ditanggulangi 100% dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan ternak dan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit penyakit menular, sehingga pemotongan hewan ternak kembali stabil. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat.

Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 tertuang dalam tabel II.3 berikut ini :

Tabel II.3 Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	%	99,32	99,32	99,32
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	%	94,45	94,45	94,45
	persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	%	31,88	31,88	31,88
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	%	87,50	87,50	87,50
Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	%	44,51	44,51	44,51
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	%	0,42	0,42	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%	13,44	13,44	13,85
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak		182.645	182.645	182,645
	produktivitas tanaman pangan		50,55	50,55	50,55
	produktivitas tanaman perkebunan		54,08	54,08	198,74
	produktivitas tanaman hortikultura		130,57	130,57	130,84

	persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan ternak dan kesmavet	%	6,01	6,01	2,95
	Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	%	70,67	70,67	92,33
	Transaksi ternak besar dan ternak kecil	ekor	5.040	5.040	5.496
	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	%	83,84	83,84	83,85
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	%	50	50	50
	Presentase pelestarian lahan surjan	%	3,77	3,77	3,77
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh	%	4,76	4,76	4,76

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota capaian kinerjanya 100%. Capaian program memenuhi target karena asset-asset Dinas Pertanian dan Pangan dalam kondisinya baik dan terawat. Capaian kinerja program – program dapat tercapai semua.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel II.4 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)*)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)*)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Produksi Padi (Ton)			122.962	123.577	124.195	124.816	122.962	130.745			
2	Produksi Jagung (Ton)			23.357	24.601	24.724	24.848	24.479	19.331			
3	Produksi Kedelai (Ton)			2.895	2.924	2.939	2.954	2.910	3.008			
4	produksi Cabe Merah (Ku)			110.867	122.231	128.342	134.760	116.410	116.316			
5	Produksi bawang merah (Ku)			308.451	340.067	357.071	374.924	328.874	361.068			
6	Produksi Alpukat (Ku)			17.038	18.784	19.724	20.710	17.890	23.762			
7	Produksi Durian (Ku)			48.705	53.698	56.783	59.382	51.140	56.783			
8	Produksi Kelengkeng (Ku)			4.698	5.180	7.754	5.439	4.933	7.754			
9	Produksi Jahe (Kg)			4.385.938	4.563.130	4.632.000	4.654.392	4.473.657	4.632.000			
10	Produksi Kelapa (Ton)			25.421	25.802.	26.189	26.582	26.175	26.575			
11	Produksi kopi (Ton)			3.220	3.268	3.317	3.367	454	3.320			
12	Produksi Kakao (Ton)			1.367	1.388	1.408	1.430	1.404	1.423			
13	Produksi daging (kg)			13.885.747	14.580.034	15.309.036	16.074.488	11.529.416	16.041.420			
14	Produksi Telur (kg)			12.594.974	13.224.722	13.885.958	14.580.256	11.468.959	15.255.870			
15	Skor Pola Pangan Harapan (PH)			93,00	93,50	93,57	94,00	92,10	93,53			

Hasil Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 16 (enam belas) indikator kinerja, 14 (empat belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi padi, produksi kedelai, produksi cabai merah, produksi alpukat, produksi kelengkeg, produksi durian, produksi jahe, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, skor pola pangan harapan, dan persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah, sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi jagung, dan produksi bawang merah.
2. Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi kelengkeng yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 149,70%) sedangkan capaian terendah adalah Produksi jagung yaitu 19.331 ton (tingkat capaian 78,58%).
3. Produksi Kelengkeng di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 sebesar 7.754 kuintal dari target produksi 5.180 kuintal. Produktivitas kelengkeng di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 sebesar 0,69 kuintal/pohon.
4. Produksi jagung tidak memenuhi target indikator kinerja tahun 2023 yaitu tercapai 19.331 ton dari target 24.601 ton (atau tercapai 78,58%) masuk dalam kategori tinggi. Kondisi ini karena banyak terjadi peralihan pertanaman komoditas jagung menjadi komoditas bawang merah terutama di Kapanewon Sentolo, dan Pengasih. Namun jika dibandingkan produksi tahun 2022, produksi jagung naik secara signifikan, yaitu dari 16.540 ton menjadi 19.331 ton atau mengalami kenaikan sebanyak 16,87%. Petani bisa menanam jagung pada musim tanam ketiga karena kecukupan ketersediaan air, sehingga pertanaman jagung bisa sampai panen, dan tidak dipanen untuk hijauan pakan ternak.
5. Produksi padi dapat melebihi target yaitu mencapai 130.577 tonn dari target 123.577 ton (105,80%). Kecukupann air dan pemupukan yang tepat meningkatkan produktivitas pertanaman padi terutama di lahan sawah, sehingga hal ini mendongkrak produksi padi. Produksi kedelai mengalami peningkatan juga di tahun 2023 ini. Dari target produksi 2.924 ton dapat

tercapai 3.008 ton (102,86%). Produksi tahun ini meningkat tajam karena adanya penambahan luas panen yang signifikan, dan kondisi pertanaman yang baik, kecukupan air dan pupuk sehingga menghasilkan produksi kedelai yang bagus.

6. Produksi bawang merah tidak memenuhi target indikator kinerja tahun 2023 yaitu 116.315,80 kuintal dari target 122.231 kuintal, atau tercapai 95,15%. Namun capaian ini masih termasuk dalam kategori "sangat tinggi". Target produksi bawang merah tidak tercapai karena adanya penyakit yang menyerang umbi bawang merah, serta kondisi hujan yang menyebabkan pertanaman bawang merah sebagian menjadi rusak.Produksi cabai merah tahun 2023 sebesar 361.068 kuintal, dibanding target 340.067 kuintal (106,18%). Tercapainya produksi cabai merah karena adanya peningkatan luas panen dan juga meningkatnya produktivitas cabai merah. Intensifikasi pertanaman cabai merah terutama di lahan pesisir menyebabkan produktivitas dan produksi meningkat.
7. Produksi alpukat dan durian juga melebihi target produksi di tahun 2023 ini. Animo petani menanam buah alpukat karena relative mudah dalam proses budidaya,sehingga luas panen alpukat meningkat. Target produksi sebesar 18.784 kuintal dapat tercapai 23.762 kuintal (126,50%). Sedangkan untuk buah durian, capaian produksi adalah 56.783 kuintal dari target produksi 53.698 kuital (105,75%). Kondisi panas yang panjang dan juga juga didukung tidak adanya hujan sehingga bakal buah tidak mengalami kerontokan, sehingga bakal buah durian dapat tumbuh dengan bagus dan sampai matang.
8. Pertanaman biofarmaka banyak diminati oleh petani di perbukitan menoreh. Produksi jahe tahun ini sebesar 4.632.000 kilogram dari target produksi sebesar 4.563.130 kilogram (101,51%). Meskipun luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas jahe mengalami peningkatan, karena pertanaman jahe diperhatikan selama proses budidaya. Pemupukan dan ketersediaan air serta kondisi panas yang cukup, meningkatkan produktivitas dan produksi jahe.
9. Produksi Kopi dan kakao dapat melampaui target di tahun 2023. Produksi kopi sebesar 3.320 ton, tercapai 101,58%, sedangkan produksi kakao sebesar

1.427 ton atau tercapai 102,55%. Animo petani dalam pasca panen dan pengolahan komoditas kopi dan kakao, memotivasi para petani untuk lebih membudidayakan tanaman tersebut dan merawat serta memupuk dengan baik.

10. Produksi Daging target 14.580.034 kg tercapai 16.041.420 kg atau 110,02%. Produksi telur target 13.224.722 kg tercapai 15.255.870 kg atau 115,36%. Produksi daging dapat tercapai target karena penyakit mulut dan kuku (PMK) serta LSD (Lumpy Skin Disease) sudah terkendali. Aakhir tahun 2023 sudah tidak ada serangan penyakit mulit dan kuku pada hewan ruminansia. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat.
11. Skor pola pangan harapan dapat mencapai target sbesar 100,03% dari target 93,50 tercapai 93,53. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Kulon Progo.
12. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator persentase peningkatan program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah dapat tercapai 100%, mengindikasikan bahwa pelayanan di secretariat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan tahun 2023 tertuang dalam Tabel II.5 berikut ini :

	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN I		II		III		IV		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023 (%)	
		3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	p juta	K	Rp juta	K	p juta	K	p juta	K	Rp juta		p juta		p	K	p	K	Rp
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					-		-												
	Meningkatnya Pendapatan Masyar	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	45,87	4.629,22	44,51	706,97	29,52	101,47	41,35	244,62	41,35	209,14	44,51	109,03	44,51	664,26	44,51	664,26	7,04	4,35

	akat																			
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-												-					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	48	.139,20	12	302,40	-	74,64	-	6,66	-	87,09	12	38,75	12,00	297,14	12,00	297,14		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1.542	.490,00	94	404,57	-	26,83	-	47,96	47	122,05	94	70,28	141,00	367,12	141,00	367,12		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan	0,24	.590,50	,42	250,00	-	23,92	-	50,55	,00	95,53	,00	78,12	-	248,12	-	248,12	,00	5,60

			hortikultura																	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-												-					
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan seluas 355 Ha	939	.590,50	355	250,00	-	23,92	60,00	0,55	145	95,53	150	78,12	355,00	248,12	355,00	248,12		
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					-		-						-						

		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	99,70	.687,67	9,32	646,15	-	13,17	89,08	321,51	85,09	134,05	99,32	292,73	99,32	761,47	99,32	761,47	9,62	8,33
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													-						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan	6,00	68,00	,00	139,97	-	8,37	-	,64	,00	115,53	,00	8,20	4,00	138,74	4,00	138,74		

			Lainnya																		
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	16	.119,67	4	506,18		4,80	-	14,87	-	18,53	4	284,54	4,00	622,73	4,00	622,73		

		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	32,00	9.002,64	50,00	3.424,56	-	51,85	-	277,06		2.060,05	50,00	1.097,89	50,00	3.486,85	50,00	3.486,85	56,25	8,73
			Presentase pelestarian lahan surjan	9,43		3,77		-						3,77	-	3,77	-	3,77		9,98	
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-							-											
		Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	4	.200,00	1	539,97	-	9,74	-	4,86	-	141,11	1	581,14	1,00	786,85	1,00	786,85		
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	-	-	1	908,12	-	9,09	-	7,97	-	290,41	1	410,96	1,00	768,42	1,00	768,42		

		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			1	1.976,47	-	33,02	-	64,23	-	1.628,53	1	105,79	1,00	1.931,57	1,00	1.931,57		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	96,59	390,00	95,45	50,08	100,00	5,44	100,00	4,79	100,00	4,37	100,00		100,00	45,28	100,00	45,28	03,53	1,61
			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	47,43		31,88		30,19		30,19		33,83		33,83		33,83	-	33,83		1,33	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-																		

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	16	90,00	4	50,08	-	5,44	-	,79	-	4,37	4	30,68	4,00	45,28	4,00	45,28		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	95,00	225,60	87,50	50,00	100,00	2,50	92,36	22,98	93,44	3,48	93,44	15,75	93,44	44,70	93,44	44,70	8,36	9,81
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-														-				
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	4	25,60	1	50,00	-	2,50	-	2,98	-	3,48	1	15,75	1,00	44,70	1,00	44,70		

		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					-		-								-			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	61.176,73	100,00	12.921,31	34,52	2.588,75	61,90	4.927,49	91,67	1.877,01	100,00	3.005,64	100,00	12.398,88	100,00	12.398,88	00,00	0,27
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-														-				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	12	179,00	3	44,01	3	1,73	3	42,84	3	45,77	12,00	174,35	12,00	174,35		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	551,63	3	131,74	3	75,03	3	132,86	3	132,81	12,00	572,44	12,00	572,44		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-												-				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	-	12	11.438,44	3	2.275,70	3	.546,94	3	1.537,92	3	2.342,06	12,00	10.702,61	12,00	10.702,61		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adimistrasi	4	-	12	86,10	3	21,08	3	1,53	3	21,53	3	21,30	12,00	85,43	12,00	85,43		

			Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 13 laporan	56	-	13	13,66	3	1,70	3	,90	3	-	4	5,90	13,00	13,51	13,00	13,51		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-														-				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	4	-	1	38,37	1	13,88	-	,17	-	7,77	-	7,47	1,00	35,29	1,00	35,29		

			disediakan																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	-	12	85,00	3	15,58	3	1,01	3	24,20	3	33,30	12,00	84,08	12,00	84,08		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-														-				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	-	2	16,00	-	4,95	-	,32	2	7,27	-	-	2,00	15,54	2,00	15,54		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan valuasi Kinerja Perangkat Daerah	92	-	22	94,37	9	24,21	3	0,59	6	16,15	4	14,56	22,00	85,51	22,00	85,51		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-														-				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	-	5	11,86	5	8,55	-	,80	-	-	-	28,37	5,00	38,72	5,00	38,72		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-														-				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	572	-	141	307,21	24	36,86	39	2,07	39	70,88	39	117,19	141,00	277,00	141,00	277,00		

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	-	4	16,00	-	-	4	5,88	-	-	-	232,54	4,00	248,41	4,00	248,41		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	-	2	75,00	-	10,08	2	4,65	-	15,59	-	17,18	2,00	57,49	2,00	57,49		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	-	12	3,68	3	0,42	2	,87	4	-	3	2,21	12,00	3,50	12,00	3,50		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	-	10	5,00	-	-	-	,00	-	-	10	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	14,00	10.221,72	13,44	4.434,97	13,65	142,53	13,85	2.137,60	13,85	987,98	13,85	1.888,34	13,85	5.156,45	13,85	5.156,45	8,93	0,45
		Pengembangan Prasarana Pertanian	-														-				

		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	8	.505,00	2	685,98	-	30,27	-	70,82	-	38,91	2	98,39	2,00	738,39	2,00	738,39		
		Pembangunan Prasarana Pertanian	-														-				
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	16	-	4	912,24	-	36,08	2	55,34	2	210,24	-	237,01	4,00	1.138,68	4,00	1.138,68		

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	-	7	1.583,45	-	20,48	1	07,25	6	646,25	-	674,39	7,00	2.248,38	7,00	2.248,38		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	-	2	1.253,30	-	55,70	-	,18	-	92,58	2	878,55	2,00	1.031,00	2,00	1.031,00		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	2	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun,Direhabilitasidan Dipelihara	3	-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak	214.105	0.222,00	182.634	3.397,55	11.480,00	176,15	11.284,00	991,55	117,05	1.324,36	182.645,00	1.371,73	182.645	3.863,79	182.645,00	3.863,79	5,31	7,80
			produktivitas tanaman pangan	53,51		50,55		49,75		47,70		47,81		50,55		50,55	-	50,55		4,47	
			produktivitas tanaman perkebunan	54,91		54,08		196,18		196,18		198,74		198,74		198,74	-	198,74		61,94	
			produktivitas tanaman hortikultura	131,17		130,57		90,16		118,55		130,84		130,84		130,84	-	130,84		9,75	

			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		00,00	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-														-				
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi	-	-	1	130,00	-	0,52	-	8,00	-	60,56	1	10,63	1,00	129,71	1,00	129,71		
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	8	-	2	563,00	-	6,95	-	71,85	-	5,41	2	297,75	2,00	781,96	2,00	781,96		

		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-														-				
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	1.750	-	216	1.239,24	-	30,97	-	25,13	201	542,84	15	234,05	216,00	1.132,98	216,00	1.132,98		
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota															-				
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG	-	-	1	797,32	-	44,87	-	5,14	-	297,65	1	735,77	1,00	1.153,44	1,00	1.153,44		

			Hewan / Tanaman																		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	-	-	4	667,99	-	92,84	-	1,43	-	417,90	4	93,53	4,00	665,71	4,00	665,71		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase kesehatan ternak dan kesmavet	5,22	1.645,89	6,01	2.951,41	2,14	114,18	2,93	1.589,15	2,95	523,37	2,95	438,70	2,95	2.665,39	2,95	2.665,39	6,51	61,94
			Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	73,11		70,67		91,23		91,88		92,33		92,33		92,33	-	92,33		26,29	
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	5.040,00		4.320,00		1.292,00		2.679,00		4.234,00		5.496,00		5.496,00	-	5.496,00		09,05	

			Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	100,00		83,84		80,35		82,97		82,97		83,85		83,85	-	83,85		3,85	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-														-				
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16	-	3	200,00	-	4,66	-	2,20	-	129,85	3	3,31	3,00	150,02	3,00	150,02		
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan	12	-	3	60,00	-	6,83	1	2,48	1	17,19	1	1,42	3,00	57,92	3,00	57,92		

		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-													-	-				
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	16	-	4	544,18	1	4,58	1	02,94	1	16,55	1	65,47	4,00	489,53	4,00	489,53		
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menula	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	4	-	1	100,00	-	3,73	-	2,23	-	4,56	1	3,69	1,00	74,21	1,00	74,21		

		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-													-	-				
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DAK Non Fisik)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	-	12	1.819,91	1	67,00	3	96,39	4	318,25	4	315,14	12,00	1.696,78	12,00	1.696,78		
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-													-	-				
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Penerapan Persyaratan Teknis untuk pemasukan dan/atau	16	-	4	130,32	-	23,05	1	0,83	1	32,02	2	44,52	4,00	130,42	4,00	130,42		

		Produk Hewan	Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan																		
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	-	1	97,00	-	4,33		2,09	-	4,95	1	5,15	1,00	66,52	1,00	66,52		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh	0,19	.115,76	5,00	.227,13	-	16,40	-	56,33	-	.826,31	25	1.687,55	25,00	3.886,60	25,00	3.886,60	45,34	4,62
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan	-														-				

		Kadipaten																				
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	,00	7.115,76	1	4.227,13	-	116,40	-	56,33	-	1.826,31	1,00	1.687,55	1,00	3.886,60	1,00	3.886,60		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran sektor pertanian dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani yaitu :

1. Keterbatan infrastruktur pertanian
2. Rata rata petani berusia tua
3. Keanekaragaman sumberdaya unggul lokal tetapi belum dimanfaatkan secara optimal : misal : durian menoreh kuning, ketela pohon, padi menor, bawang merah srikayang, bawang merah siyem
4. Adanya Kasus penyakit hewan menular yang perlu diwaspadai
5. Produksi komoditas pertanian masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko OPT, bencana alam dan perubahan iklim

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Alih fungsi lahan;
2. Keterbatan infrastruktur pertanian
3. Rata rata petani berusia tua dan kurangnya regenerasi petani
4. Keanekaragaman sumberdaya unggul lokal tetapi belum dimanfaatkan secara optimal : misal : durian menoreh kuning, ketela pohon, padi menor, bawang merah srikayang, bawang merah siyem

5. Adanya Kasus penyakit hewan menular yang perlu diwaspadai
6. Produksi komoditas pertanian masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko OPT, bencana alam dan perubahan iklim

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

1. Adanya bandara internasional Yogyakarta - YIA (*Yogyakarta International Airport*).
2. Pembangunan konektivitas infrastruktur pendukung Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
3. Akses infrastruktur pertanian yang sudah berkembang

Isu isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Meningkatkan penggunaan mesin/ mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
3. Memperkuat kelembagaan petani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani;
4. Keanekaragaman sumberdaya unggul lokal tetapi belum dimanfaatkan secara optimal : misal : durian menoreh kuning, ketela pohon, padi menor, bawang merah srikayang, bawang merah siyem
5. Adanya Kasus penyakit hewan menular yang perlu diwaspadai
6. Produksi komoditas pertanian masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko OPT, bencana alam dan perubahan iklim

2.4. Review Terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan harus selaras dengan

dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran. Perbandingan dapat dilihat pada tabel II.6. Reviu terhadap Rancangan Awal Renja 2025

NO	RANCANGAN AWAL RENJA 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANHIR RENJA) 2025						CATATAN PENTING
	URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PERMENDAGRI	INDIKATOR RIIL	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PERMENDAGRI	INDIKATOR RIIL	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						26.295.340.000						33.161.214.493	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.200.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.081.464.400	

1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	*Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh (%)*		8,33		2.200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	*Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh (%)*		8,33		4.081.464.400	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***		**1 dokumen**		**2.200.000.000**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***		**1 dokumen**		**4.081.464.400**	**DPP**
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	1. Pengembangan Kawasan Durian Tonogoro :	**2.200.000.000**		***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	1. Pengembangan Kawasan Durian Tonogoro :	**4.081.464.400**	**DPP**
					a. Sewa Tanah Tonogoro						**a. Sewa Tanah Tonogoro**		

					b. Pemeliharaan kawasan kebun durian						**b. Pemeliharaan kawasan kebun durian**		
					c. Pengembangan kawasan durian penyangga Tonogoro						**c. Pengembangan kawasan durian penyangga Tonogoro**		
					d. Pengembangan penangkar benih durian di kawasan menoreh						**d. Pengembangan penangkar benih durian di kawasan menoreh**		
					e. Pemeliharaan ternak kambing bligon di Tonogoro **- Pembangunan rumah pakan dan rumah kompos**						**e. Pemeliharaan ternak kambing bligon di Tonogoro** **- Pembangunan rumah pakan dan rumah kompos**		

					f. Pengembangan ternak kambing bligon di kawasan penyangga Tonogoro (2 kelompok @22 kambing) **- Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing Bligon di Kawasan Penyangga Tonogoro (1 kelompok tani** **- Bimtek Pengembangan Kambing Bligon (25 orang)**						**f. Pengembangan ternak kambing bligon di kawasan penyangga Tonogoro (2 kelompok @22 kambing)** **- Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing Bligon di Kawasan Penyangga Tonogoro (1 kelompok tani** **- Bimtek Pengembangan Kambing Bligon (25 orang)**		
					g. Uji Kebenaran Keunggulan, Identifikasi, dan Pendaftaran						**g. Uji Kebenaran Keunggulan, Identifikasi, dan Pendaftaran**		

					Varietas Baru Durian Kalibawang						**Varietas Baru Durian Kalibawang**		
					h. Upaya peningkatan produksi dan kualitas durian						**h. Upaya peningkatan produksi dan kualitas durian**		
					2. Pengembangan Kawasan Durian Embung Kleco :						2. Pengembangan Kawasan Durian Embung Kleco :		
					a. Pemeliharaan kebun durian di kawasan Embung Kleco						**a. Pemeliharaan kebun durian di kawasan Embung Kleco**		
					b. Pembangunan sarana dan prasarana di Embung Kleco - Perbaikan Membran						**b. Pembangunan sarana dan prasarana di Embung Kleco - Perbaikan Membran**		
					3. Pengembangan Agroeduwisata Hargowilis :						3. Pengembangan Agroeduwisata Hargowilis :		
					- Pemeliharaan kelapa genjah						**- Pemeliharaan kelapa genjah**		

					(Pupuk organik)						**(Pupuk organik)**		
					-Pemeliharaan komoditas tanaman hortikultura						**-Pemeliharaan komoditas tanaman hortikultura**		
					- Peremajaan kelapa genjah (Bibit kelapa genjah dan pupuk organik)						**- Peremajaan kelapa genjah (Bibit kelapa genjah dan pupuk organik)**		
					5. Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh (1 paket)						5. Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh (1 paket)		
					a. Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh						**a. Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh**		
					b. Bimtek Pengolahan Hijauan Pakan Ternak pada						**b. Bimtek Pengolahan Hijauan Pakan Ternak pada**		

					Pengembangan kambing PE						**Pengembangan kambing PE**		
					c. Kontes Kambing PE Ras Kaligesing Lokal Kulon Progo						**c. Kontes Kambing PE Ras Kaligesing Lokal Kulon Progo**		
					6. Pengembangan Kopi Menoreh:						6. Pengembangan Kopi Menoreh:		
					a. Sarana Pemasaran Kopi/ Outlet Mobile (5 unit)						**a. Sarana Pemasaran Kopi/ Outlet Mobile (5 unit)**		
					e. Festival Kopi (1 event)						**e. Festival Kopi (1 event)**		
					7. Heboh Buah (1 event)						7. Heboh Buah (1 event)		

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.641.760.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.845.888.500	
1,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energ (%)*		99,57		680.110.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energ (%)*		99,57		328.915.200	

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	***Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga (%)***		**100%**		**145.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	***Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga (%)***		**100%**		**159.176.300**	**DPP**
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Pengadaan Cadangan Pangan**	**145.000.000**		***Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Pengadaan Cadangan Pangan**	**159.176.300**	**DPP**
					Pendampingan Lumbung Pangan/LDPM/ PUAP						**Pendampingan Lumbung Pangan/LDPM/ PUAP**		

					Koordinasi bantuan Pangan						**Koordinasi bantuan Pangan**		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsums Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	***Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsums Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***		**100%**		**535.110.000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsums Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	***Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsums Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***		**100%**		**169.738.900**	**DPP**
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsums Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**3 Laporan**	**Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari**	**535.110.000**		***Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsums Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**3 Laporan**	**Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari**	**169.738.900**	**DPP**
					Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan						**Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan**		

					Sosialisasi Pangan B2SA (60 orang, @3(orang)						**Sosialisasi Pangan B2SA (60 orang, @3(orang)**		
2,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan (%)*		96,59		101.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan (%)*		96,59		29.392.700	
		Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan		41,79				*Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan*		41,79			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	***Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota***		**100%**		**101.000.000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota***		**100%**		**29.392.700**	**DPP**

		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan giz kabupaten/kota	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Penyusunan Neraca Bahan Pangan**	**101.000.000**		***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan giz kabupaten/kota***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Penyusunan Neraca Bahan Pangan**	**29.392.700**	**DPP**
					Penyusunan SKPG (Sistem Peringatan Din Kewaspadaan Pangan dan Gizi)						**Penyusunan SKPG (Sistem Peringatan Din Kewaspadaan Pangan dan Gizi)**		
					Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						**Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**		
3,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan (%)*		92,5		60.650.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan (%)*		92,5		24.120.900	

	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	***Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota***		**100%**		**60.650.000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota***		**100%**		**24.120.900**	**DPP**
		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	**Pelatihan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)**	**60.650.000**		***Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Dokumen**	**Pelatihan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)**	**24.120.900**	**DPP**
					Pelatihan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)						**Pelatihan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)**		
					Uji sampe pangan segar						**Uji sampe pangan segar**		

1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	*Persentase pemberdayaan kelompok tan (%)*		35		800.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	*Persentase pemberdayaan kelompok tan (%)*		35		9.463.459.700	
		Persentase pelestarian lahan surjan (%)		7,55				*Persentase pelestarian lahan surjan (%)*		7,55			
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***		**1 Laporan**		**500.000.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	***Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya***		**1 Laporan**		**3.281.666.600**	**DPP**
		Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Objek**	**1. Bantuan Saprodi dan Alat Pengendali OPT Pengembangan Bawang Merah**	**500.000.000**		***Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Objek**	**1. Bantuan Saprodi dan Alat Pengendali OPT Pengembangan Bawang Merah**	**3.281.666.600**	**DPP**

					2. Pembangunan saluran irigasi sistem sprinkler						**2. Pembangunan saluran irigasi sistem sprinkler**		
					3. Sekolah Lapang GAP GHP Bawang Merah						**3. Sekolah Lapang GAP GHP Bawang Merah**		
					4. Wiwitan bawang merah						**4. Wiwitan bawang merah**		
					5. Bantuan Sarana Produksi Padi						**5. Bantuan Sarana Produksi Padi**		
					6. Lomba Intensifikasi di Lahan Surjan						**6. Lomba Intensifikasi di Lahan Surjan**		
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***		**2 Laporan**		**300.000.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	***Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya***		**2 Laporan**		**6.181.793.100**	**DPP**

		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Mataraman**	**300.000.000**		***Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Mataraman**	**1.127.611.900**	**DPP**
			Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1 Laporan**	**A.** Pendampingan Kegiatan Saemaul Undong di Kapanewon Nanggulan	**-**			**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**A.** Pendampingan Kegiatan Saemaul Undong di Kapanewon Nanggulan	**5.054.181.200**	**DPP**
					1. Pembangunan Retaining Wall Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram)						**1. Pembangunan Retaining Wall Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram)**		
					2. Pengembangan Jamur Tiram						**2. Pengembangan Jamur Tiram**		

					3. Pengembangan Padi Loka Menor						**3. Pengembangan Padi Loka Menor**		
					4. Pengembangan Kambing Bligon						**4. Pengembangan Kambing Bligon**		
					B. Pengembangan Komoditas Hortikultura						B. Pengembangan Komoditas Hortikultura		
					1. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Bawang Merah di Girimulyo						**1. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Bawang Merah di Girimulyo**		
					2. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabai Merah						**2. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabai Merah**		
					C. Pengembangan Komoditas Perkebunan						C. Pengembangan Komoditas Perkebunan		
					1. Bantuan Sarana						**1. Bantuan Sarana**		

					Pendukung Pembibitan Kelapa Bojong Bulat						**Pendukung Pembibitan Kelapa Bojong Bulat**		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					22.452.930.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					19.233.861.593	
1,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Populasi ternak (animal unit)*		202824		2.586.160.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Populasi ternak (animal unit)*		202824		2.136.915.800	
		Produktivitas tanaman pangan (ku/ha)		52,5				*Produktivitas tanaman pangan (ku/ha)*		52,5			
		Produktivitas tanaman perkebunan (ku/ha)		54,63				*Produktivitas tanaman perkebunan (ku/ha)*		54,63			

		Produktivitas tanaman hortikultura (ku/ha)		130,97				*Produktivitas tanaman hortikultura (ku/ha)*		130,97			
		Persentase ala mesin pertania yang berfungs dengan baik (%)		100				*Persentase ala mesin pertania yang berfungs dengan baik (%)*		100			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	***Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***		**100%**			**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	***Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***		**100%**		**332.827.000**	**DPP**
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Laporan**	**Pengadaan Traktor Rotary**			***Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Laporan**	**Pengadaan Traktor Rotary**	**332.827.000**	**DPP**
					Pengadaan Traktor Capung						**Pengadaan Traktor Capung**		
					Pengadaan						**Pengadaan**		

					Cultivator (2 unit)						**Cultivator (2 unit)**		
					Otomatisasi Traktor						**Otomatisasi Traktor**		
					Pengawalan pupuk bersubsidi (12 kapanewon)						**Pengawalan pupuk bersubsidi (12 kapanewon)**		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	***Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/ kota***		**100%**			**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/ kota***		**100%**		**1.437.646.200**	**DPP**
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**1 dokumen**	**Pengembangan padi biofortifikasi**			***Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**1 dokumen**	**Pengembangan padi biofortifikasi**	**1.287.265.000**	**DPP**

			Kel/Desa						Kel/Desa				
					Pemgembangan kelapa genjah						Pemgembangan kelapa genjah		
					Pengembangan jahe						Pengembangan jahe		
					Pengembangan bawang merah pesisir						Pengembangan bawang merah pesisir		
					Pembangunan smart green house						Pembangunan smart green house		
					Stok benih bibit tanaman buah						Stok benih bibit tanaman buah		
					Pengumpulan data pertanian						Pengumpulan data pertanian		

		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	Fasilitasi asuransi usaha tani padi	150.381.200		*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	Fasilitasi asuransi usaha tani padi	150.381.200	DPP
					Penyusunan informasi harga pasar komoditas pertanian						Penyusunan informasi harga pasar komoditas pertanian		
					Pelestarian koro benguk						Pelestarian koro benguk		
					Pelestarian ketela pohon gir menoreh						Pelestarian ketela pohon gir menoreh		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*		100%			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*		100%		366.442.600	DPP

		Lain						*Lain*					
		Jumlah bibi ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**37 Ekor**	**Hibah kambing bligon (11 ekor)**			***Jumlah bibi ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**37 Ekor**	**Hibah kambing bligon (11 ekor)**	**366.442.600**	**DPP**
					Hibah domba (11 ekor)						**Hibah domba (11 ekor)**		
					Hibah Kambing PE (11 ekor)						**Hibah Kambing PE (11 ekor)**		
					Hibah Sapi PO (4 ekor)						**Hibah Sapi PO (4 ekor)**		
					Hibah Ala						**Hibah Ala**		

					Pengolah Hijauan Pakan						**Pengolah Hijauan Pakan**		
					Semen Beku Sapi						**Semen Beku Sapi**		
					Kandang Koloni						**Kandang Koloni**		
2,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)*		13,81		2.585.920.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)*		13,81		1.429.099.800	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	***Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian***		**100%**			**Pengembangan Prasarana Pertanian**	***Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian***		**100%**		**336.679.700**	**DPP**

		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Cetak sawah baru			*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Cetak sawah baru	336.679.700	DPP
	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian*		100%			Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian*		100%		1.092.420.100	DPP
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	Pembangunan Jalan Usaha Tani			*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	Pembangunan Jalan Usaha Tani	656.887.500	DPP

			Kel/Desa						**Kel/Desa**				
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**		***Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**	**DPP**
		Jumlah Bala Penyuluh d Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**		***Jumlah Bala Penyuluh d Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**	**DPP**

		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**		***Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Unit**		**-**	**DPP**
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 unit**	**Pembangunan Jaringan Irigasi Sprinkle**			***Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 unit**	**Pembangunan Jaringan Irigasi Sprinkle**	**333.572.600**	**DPP**
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**1 Unit**	**Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH)**			***Jumlah rumah potong hewan yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**1 Unit**	**Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH)**	**101.960.000**	**DPP**

			Kel/Desa						**Kel/Desa**				
3,	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase kesehatan hewan dan kesmave (%)*		5,49		416.390.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase kesehatan hewan dan kesmave (%)*		5,49		828.187.300	
		Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik(%)		72				*Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik(%)*		72			
		Transaksi ternak besar dan ternak kecil (ekor)		4752				*Transaksi ternak besar dan ternak kecil (ekor)*		4752			

		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan (%)		94,32				*Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan (%)*		94,32			
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	***Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***		**100%**			**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***		**100%**		**324.248.140**	**DPP**
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Operasional UPT Yankeswan Wilayah Utara**			***Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Operasional UPT Yankeswan Wilayah Utara**	**101.012.140**	**DPP**

					Pengadaan Oba dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)						**Pengadaan Oba dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)**		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyaki hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Sosialisasi PHMS (6 kali) @20 orang**			***Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyaki hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Laporan**	**Sosialisasi PHMS (6 kali) @20 orang**	**223.236.000**	**DPP**
					Pengendalian penyakit antraks						**Pengendalian penyakit antraks**		
					Pengawasan lalulintas ternak						**Pengawasan lalulintas ternak**		
					Pembelian oba dan peralatan pendukung pengobatan (1 paket)						**Pembelian oba dan peralatan pendukung pengobatan (1 paket)**		

					Pengawasan obat hewan						**Pengawasan obat hewan**		
					Pemantauan penyakit hewan menular						**Pemantauan penyakit hewan menular**		
					Pengambilan sampel darah						**Pengambilan sampel darah**		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	***Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota***		**100%**			**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota***		**100%**		**228.718.260**	**DPP**
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 laporan**	**Operasional Pasar Hewan Terpadu**			***Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 laporan**	**Operasional Pasar Hewan Terpadu**	**128.177.500**	**DPP**
					Operasional						**Operasional**		

					Pasar Hewan Klangon						**Pasar Hewan Klangon**		
					Operasional RPH						**Operasional RPH**		
		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Operasional UPT Yankeswan Wilayah Selatan**			***Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Laporan**	**Operasional UPT Yankeswan Wilayah Selatan**	**100.540.760**	**DPP**
					Pengadaan Obat dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)						**Pengadaan Obat dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)**		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**		**-**		**-**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**		**-**		**-**	**DPP**

		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 laporan**		**-**		***Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 laporan**		**-**	**DPP**
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	***Cakupan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***		**100%**			**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	***Cakupan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***		**100%**		**275.220.900**	**DPP**
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**3 Laporan**	**Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan**			***Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**3 Laporan**	**Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan**	**76.407.900**	**DPP**

					Sosialisasi ASUH (1 kali)						**Sosialisasi ASUH (1 kali)**		
					Sosialisasi Zoonosis (1 kali)						**Sosialisasi Zoonosis (1 kali)**		
					Sosialisasi Hewan Kurban (1 kali)						**Sosialisasi Hewan Kurban (1 kali)**		
		Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Produk**	**Kontes Ternak**			***Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**1 Produk**	**Kontes Ternak**	**198.813.000**	**DPP**
					Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Hasil Ternak dan Olahan (2 kali @25 orang						**Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Hasil Ternak dan Olahan (2 kali @25 orang**		

4,	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Penurunan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura (%)*		0,3		402.410.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Penurunan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura (%)*		0,3		112.423.800	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	***Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota***		**100%**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	***Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota***		**100%**		**112.423.800**	**DPP**
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**926 Ha**	**Gerakan Pengendalian OPT**	**402.410.000**		***Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**926 Ha**	**Gerakan Pengendalian OPT**	**112.423.800**	**DPP**
					Pengadaan Stok Pestisida						**Pengadaan Stok Pestisida**		

					Fasilitasi Regu Pengendali Tanaman (RPT)						**Fasilitasi Regu Pengendali Tanaman (RPT)**		
5,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyuluhan pertanian (%)*		45,4		1.162.260.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyuluhan pertanian (%)*		45,4		850.476.900	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	***Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***		**100%**		**1.162.260.000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	***Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***		**100%**		**850.476.900**	**DPP**
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Unit**	**Pembinaan Kelompok Tani**	**612.260.000**		***Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Unit**	**Pembinaan Kelompok Tani**	**381.033.000**	**DPP**
					Pendampingan penyusunan RDK-RDKK						**Pendampingan penyusunan RDK-RDKK**		

					Evaluasi Kelas Kelompok						**Evaluasi Kelas Kelompok**		
					Monitoring Evaluasi P4S						**Monitoring Evaluasi P4S**		
					Penyusunan Programa tingkat desa						**Penyusunan Programa tingkat desa**		
					Penyusunan Programa kecamatan						**Penyusunan Programa kecamatan**		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**96 unit**	**Pelatihan Penyuluh Pertanian ASN (75 orang) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (100 orang)**	**550.000.000**		***Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**96 unit**	**Pelatihan Penyuluh Pertanian ASN (75 orang) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (100 orang)**	**469.443.900**	**DPP**
					Lomba pertanian (2 kali) : lomba gempar dan penilaian penghargaan pertanian						**Lomba pertanian (2 kali) : lomba gempar dan penilaian penghargaan pertanian**		

					Pameran Pembangunan						**Pameran Pembangunan**		
					Evaluasi kinerja penyuluh						**Evaluasi kinerja penyuluh**		
					Pelatihan Petan Milenial						**Pelatihan Petan Milenial**		
					Peda (Pekan Daerah) KTNA						**Peda (Pekan Daerah) KTNA**		
6,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Rata - rata persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah (%)*		100		15.299.790.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Rata - rata persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah (%)*		100		13.876.757.993	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***		**14 Laporan**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***		**14 Laporan**		**12.189.545.333**	**DPP**

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2.520 orang bulan**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**			***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2.520 orang bulan**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**12.099.342.033**	**DPP**
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Dokumen**	**Honorarium petugas penatausahaan keuangan**			***Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Dokumen**	**Honorarium petugas penatausahaan keuangan**	**78.600.000**	**DPP**

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**14 Laporan**	**Laporan Keuangan Bulanan**			***Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**14 Laporan**	**Laporan Keuangan Bulanan**	**11.603.300**	**DPP**
					Laporan keuangan Semesteran						**Laporan keuangan Semesteran**		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***		**-**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***		**-**		**10.793.500**	**DPP**

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Dokumen**	**Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**12 Dokumen**	**Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**3.793.500**	**DPP**
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Orang**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**			***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Orang**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**7.000.000**	**DPP**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi umum***		**-**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi umum***		**-**		**98.405.500**	**DPP**

		Jumlah Pake Peralatan dar Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa**	**1 Paket**	**Penyediaan Peralatan Kantor (ATK)**			***Jumlah Pake Peralatan dar Perlengkapan Kantor yang Disediakan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa**	**1 Paket**	**Penyediaan Peralatan Kantor (ATK)**	**37.022.500**	**DPP**
					Penyediaan Ala ListrikPenyedia an Surat Kabar						**Penyediaan Ala ListrikPenyedia an Surat Kabar**		
					Penyediaan Surat Kabar						**Penyediaan Surat Kabar**		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapa Koordinasi dar Konsultasi SKPD	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa**	**12 Laporan**	**Penyelenggaraa n rapa koordinasi dar konsultasi perangkat daerah**			***Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapa Koordinasi dar Konsultasi SKPD***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa**	**12 Laporan**	**Penyelenggaraa n rapa koordinasi dar konsultasi perangkat daerah**	**61.383.000**	**DPP**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**		**-**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**		**-**		**33.571.000**	**DPP**
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Unit**	**Pengadaan Laptop/ Notebook**			***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Unit**	**Pengadaan Laptop/ Notebook**	**33.571.000**	**DPP**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang***		**-**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang***		**-**		**814.775.860**	**DPP**

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi	195.337.956	DPP
					Penyediaan Sumber Daya Air						Penyediaan Sumber Daya Air		
					Penyediaan Listrik						Penyediaan Listrik		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Pembayaran honor penjaga malam, petugas kebersihan dan pembayaran JKN, JKM,JKK			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Pembayaran honor penjaga malam, petugas kebersihan dan pembayaran JKN, JKM,JKK	619.437.904	DPP

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***		**-**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***		**-**		**655.335.500**	**DPP**
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**138 Unit**	**Pemeliharaan kendaraan dinas dan Pembayaran pajak serta perizinannya (Kendaraan roda 2 : 125 unit; Kendaraan roda 4 : 9 unit Kendaraan roda 3 : 4 unit**			***Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**138 Unit**	**Pemeliharaan kendaraan dinas dan Pembayaran pajak serta perizinannya (Kendaraan roda 2 : 125 unit; Kendaraan roda 4 : 9 unit Kendaraan roda 3 : 4 unit**	**311.813.400**	**DPP**

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Unit**	**Pemeliharaan atap**			***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Unit**	**Pemeliharaan atap**	**269.220.900**	**DPP**
					Pemeliharaan kamar mandi						**Pemeliharaan kamar mandi**		
					Pemeliharaan dinding						**Pemeliharaan dinding**		
					Rehab Aula Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan						**Rehab Aula Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan**		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**203 Unit**	**Penyediaan peralatan kebersihan**			***Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua**	**203 Unit**	**Penyediaan peralatan kebersihan**	**74.301.200**	**DPP**

			Kel/Desa						**Kel/Desa**				
					Perawatan Sarana Perkantoran (AC : 40 Komputer/laptop : 13, Printer 10, LCD :1 Tota AC : 42 Tota Komputer: 31 Total Laptop 39 Tota Printer : 27)						**Perawatan Sarana Perkantoran (AC : 40 Komputer/laptop : 13, Printer 10, LCD :1 Tota AC : 42 Tota Komputer: 31 Total Laptop 39 Tota Printer : 27)**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		-			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		-		74.331.300	DPP

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**22 Laporan**	**Laporan Tahunan**			***Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**22 Laporan**	**Laporan Tahunan**	**53.671.500**	**DPP**
					LKJIP						**LKJIP**		
					Profil Perangkat Daerah						**Profil Perangkat Daerah**		
					Laporan SPIP Semesteran						**Laporan SPIP Semesteran**		
					Laporan pengendalian bulanan						**Laporan pengendalian bulanan**		
					Laporan evaluasi Renja						**Laporan evaluasi Renja**		
					Laporan Data Pertanian						**Laporan Data Pertanian**		

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Dokumen**	**Renja 2026**			***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Dokumen**	**Renja 2026**	**20.659.800**	**DPP**
					Perubahan Renja 2025						**Perubahan Renja 2025**		
					Renstra						**Renstra**		
					Perubahan Renja 2025						**Perubahan Renja 2025**		
						26.295.340.000						33.161.214.493	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pertanian dan Pangan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pertanian dan Pangan berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat / pemangku kepentingan ini ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.7 di bawah ini.

Tabel II.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

PROGRAM	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOL.	SATUAN
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Balong V, Banjarsari, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Jeringan, Kebonharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Marsudi Tani (Gedong, Purwosari, Girimulyo) , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Ngudi Rejeki Dalangan, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Cultivator	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Rejo No.Reg. 34.01.01.01/KBI.KT. 01.2016 , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Silayur No.Reg.34.01.01.KL GT.KT.04.2016 Kaligintung Kidul, Kaligintung, Temon , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok Tani Ngudi Laras No.Reg.2.GT/2023, Dusun 1, Gotakan, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Tani Sido Makmur No. Reg. 34.01.02.THJ.03.201 6 Seworan Triharjo , Kab. Kulon Progo	Hibah Hand Tracktor	1	unit

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Tani Ngudi Rejeki No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.04. 2016 Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Hand Tracktor	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	KT Sido Makmur Seworan, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Hand Tracktor	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	KT Amrih Makmur Kularan, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Traktor Rotari	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Margo Dadi" No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.14. 2016 Ngerandu, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Traktor Rotari	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Tani Ngudi Lestari No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.06. 2016 Conegaran, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Hibah Cultivator	1	unit

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Tani Sedyo Mukti No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.21, 2016 Dalangan, Triharjo. Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Cultivator	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki No. Reg. 34.01.03.CRM.KT.10 .2020 Pedukuhan X Rt 40 Rw 20 Cerme, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Hibah Pompa Air	2	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Surya Mina Abadi No. Reg. 15/THJ/VII/0 Seworan, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Pompa Air	2	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kelompok tani Sedyo Mukti No.Register 34.01.02 THJ Kt.21.2016 Dalangan, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Hibah Kambing	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	SEWORAN RT 019, Triharjo, Wates (Bulak) , Kab. Kulon Progo	JUT (Jalan Usaha Tani)	400	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Klewonan RT 023, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	JUT (Jalan Usaha Tani)	400	meter

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Dalangan - Kadipaten, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	JUT (Jalan Usaha Tani)	400	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	KADIPATEN - KLEWONAN, Triharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	JUT (Jalan Usaha Tani	700	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dalangan, Triharjo, Wates NO.Register 34.01.02.THJ.KT.2016 , Kab. Kulon Progo	Bantuan Rumah Burung Hantu	4	unit
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Jalan Bulak Toyan Turip , Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	JUT Jalan Bulak Toyan Turip Ngestiharjo (PRIORITAS 6)	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kulwaru, Ngestiharjo, Wates,, Kab. Kulon Progo	JUT Bulak Widodo Kulwaru Wates (lanjutan)	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bulak Wojowalur, Kalurahan Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Cor Blok Jalan Usaha Tani (kelancaran mobilitas Warga Tani)	400	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pembangunan Corblok Jalan Usaha Tani (kelancaran mobilitas warga tani), Kab. Kulon Progo	Pembangunan Corblok Jalan Usaha Tani (kelancaran mobilitas warga tani)	400	meter

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	JUT BULAK BENDUNGAN KIDUL KT BERIMAN, Kab. Kulon Progo	JUT BULAK BENDUNGAN KIDUL KT BERIMAN	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	MANGUNAN, BENDUNGAN, WATES, , Kab. Kulon Progo	JUT BULAK MANGUNAN KT NGUDI RAHAYU	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	DONDONG, BENDUNGAN, WATES,, Kab. Kulon Progo	JUT BULAK DONDONG KT NGUDI MULYO	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kulwaru, Wates, , Kab. Kulon Progo	JUT Bok Sumpel Kulwaru	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Klewonan Triharjo-Wates,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan JUT lor klewonan	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Ngestiharjo, Wates, , Kab. Kulon Progo	Bantuan bibit bawang merah KT. Ngesti Utomo II	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Ngestiharjo, Wates,, Kab. Kulon Progo	Bantuan bibit bawang merah KT. Maju Makmur	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Ngestiharjo, Wates, , Kab. Kulon Progo	Cor Blok Jalan Usaha Tani Bulak Toyan Turip	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan	Pengadaan bibit tanaman	Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon	Bantuan Bibit KT Ngesti	1	paket

Sarana Pertanian	perkebunan	Progo	utama II		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Sumur Bor Pertanian KT REJO TANI, Banyuroto, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Pembuatan Sumur Bor Pertanian (PRIORITAS 6)	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Ngangin-angin, Banyuroto, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Traktor ROTARY untuk Kelompok Tani Tekad Makmur (PRIORITAS 7)	10	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	RT 72/22 Krinjing, Wijimulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Alat Pengrontok Padi erek/serit pakai tenaga disel	20	unit
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Sebelah barat dusun Setan, Wijimulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Penyelesaian Jalan Usaha Tani di Barat Dusun Setan	100	m
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Setan, Wijimulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Hand traktor kelompok tani Handayani	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan	Pembangunan jalan usaha	Setan, Wijimulyo, Nanggulan, Kab.	Penyelesaian JUT Bulak	250	m

Prasarana Pertanian	tani	Kulon Progo	Tekor		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Jatingarang lor, Jatisarono, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Hand Traktor	3	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Jatingarang lor, Jatisarono, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Treser Roda Tiga	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Ngentak, Ngestiharjo, , Kab. Kulon Progo	Permohonan Pengolahan Hasil Pertanian KWT Lestari Mulyo	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Sadang RT 35 RW 13 Tanjungharjo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Sadang	150	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 02 RW 01 sampai RT 03 RW 02 Pedukuhan Keso , Banyuroto, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Pedukuhan Keso	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing,	KT Makmur Mboto Kulon Kembang, Nanggulan, Kab.	Bantuan ternak sapi KT Makmur Mboto	10	Paket

Pertanian	domba)	Kulon Progo	Kulon		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dlingo, Banyuroto, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Sapi Induk, Kel Tani Rejo Tani KT REJOTANI	5	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kel.Ngudi Makmur, Tanjungharjo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan ternak Kambing Gembel, Kel.Ngudi Makmur	20	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	KT Ngrojo Mulyo Kembang, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Bantuan bibit ayam jawa super dan pakan KT Ngrojo Mulyo	500	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Gayam, Banyuroto, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bantuan Bibit Ayam Petelur	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Gayam, Banyuroto, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Ternak Kelinci	15	Ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Sanggrahan kidul, Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Bibit KT Prinsip mandiri (Prima)	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan sapi KT Ngesti Utomo II	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing,	Turip Ngestiharjo Wates,, Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Kambing KPPM	1	paket

Pertanian	domba)				
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Ngentak, Ngestiharjo, , Kab. Kulon Progo	Permohonan Pengolahan Hasil Pertanian KWT Lestari Mulyo	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT Ngesti Utomo II	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Granti, Kulwaru, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing Ngestu Bawono I	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Ngentak, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Springkel Lahan Surjan KT Tani Mulyo	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Ngentak Rt 016 RW 006, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT SUBUR MAKMUR NO REGISTER 34.01.02 NGS KT 12. 2016	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Ngentak RT 013 RW 005, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Bawang Merah KT USAHA MANDIRI NO REGISTER	1	paket

			34.01.02 NGS KT 11.2016		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Ngentak RT 014 RW 006, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan kambing KT TANI MULYO REGISTER 34.01.02 NGS KT 03.2016	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dukuh, RT 022 RW 009, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT MAJU MAKMUR 1 NO REGISTER 34.01.02 NGS KT 08.2016	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dukuh Rt 019 RW 008, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT MAJU MAKMUR II NO REGISTER 34.01.02 NGS KT 10.2016	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dukuh RT 018 RW 008, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT NGESTI UTOMO II NO REGISTER 34.01.02 NGS KT 02.2016	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dusun Granti, Ngestiharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing KT NGESTU BAWONO I	2	paket
Penyediaan dan Pengembangan	Hibah Bibit Ternak (Sapi,	Kularan, Triharjo, Wates, Kab. Kulon	Bantuan Sapi KT ANDINI	1	paket

Sarana Pertanian	kambing, domba)	Progo			
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bulak Sempulur, Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Talud JUT bulak sempulur (belum ada talud)	900	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	bulak talud, Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Talud dan Corblok JUT (belum ditalud dan jalan rusak parah)	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bulak Trimulyo, Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo	JUT Bulak Trimulyo Sogan	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Bendungan Lor, Kalurahan Bendungan, wates, Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Hand Traktor Rotari Kelompok Tani "NGUDI MAKMUR MANUNGGAL 1"	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Bantuan Perpompaan menengah pendukung peternakan Kelompok Ternak Sapi "NGUDI MAKMUR" , Kab. Kulon Progo	Bantuan Perpompaan menengah pendukung peternakan Kelompok Ternak Sapi "NGUDI MAKMUR"	1	unit

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Klopo Sepuluh, Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Bantuan Hand Traktor Rotari Kelompok Tani "NGUDI MAKMUR MANUNGGAL VI"	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Degolan, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Bantuan ternak sapi KT Ngudi Rejeki	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Sempu, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Bantuan ternak sapi KT Bangun Rezeki	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kauman - Makam Pendem Jatisarono, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani	700	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	KT. Wijidadi Temanggal, Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik	80	juta
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Banaran, Demangrejo, Sentolo, Kab. Kulon Progo	cor blok jalan usaha tani banaran	1	ruas
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	srikayangan, sentolo, Kab. Kulon Progo	alsintan traktor	5	paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	srikayangan, sentolo, Kab. Kulon Progo	alsintan kwh meter kapasitas 3300 watt	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Demangrejo, Sentolo, Kab. Kulon Progo	alsintan traktor	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	sukoreno, sentolo, Kab. Kulon Progo	alsintan traktor	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	banguncipto, sentolo, Kab. Kulon Progo	alsintan traktor	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Jati, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan Sapi KT "Jati Makmur" Jati, Banaran No. Reg: 34.01.04.BNR. KT.02.2016	2	Ekor

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	P3A Sekar Tanjung Klampis, Tanjungharjo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	(PRIORITAS) Permohonan Rehab JITUT	350	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Pedukuhan V, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan Sapi Putih Indukan KT "Rukun Manunggal" No.Reg: 34.01.04.BNR. KT.10.2016	5	Ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Sawahan, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan Sapi Putih Indukan KT "Ngulir Budi" No. Reg : 34.01.04.BNR. KT.09.2016	5	Ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Ped. VII Kenteng, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan sapi untuk KT Amrih Mulyo No.Reg: 34.01.04.BNR. KT.04.2016	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Bleberan, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan Ternak kambing untuk KT Mekar Jaya No.Reg: 34.01.04.BNR. KT.06.2016	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kujon Lor,Kranggan, Galur , Kab. Kulon Progo	Pembangunan JUT Bulak kepyar KT Cipta boga V No.Reg: 34.01.04.KRG.	300	meter

			KT.05.2016		
Penyediaan dan Pengembangan Praarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Sidakan VI, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Pembangunan JUT Bulak Gunungan KT Ngudi Makmur No.Reg: 34.01.04.BNR. KT.11.2016	300	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Jonggrangan X, Banaran, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan ternak Kambing Bligon untuk KT Sinar Waluyo No. Reg: 34.01.04.BNR. KT.14.2016	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Bedoyo, Karangsewu, Galur , Kab. Kulon Progo	Bantuan Kambing Domba Betina untuk KT Wahana Andini Bhakti No. Reg: 34.01.04.KSW. KT.28.2023	40	e
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Sempu, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Pengajuan Hand Traktor untuk KT Bangun Rejeki No. Reg: 34.01.05.BMR. KT.12.2016	1	Unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	KT Sedyo Mulyo, Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Bantuan ternak kambing untuk Kelompok Tani Sedyo Mulyo (PRIORITAS 3)	1	paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	KT Ngudi Makmur, Kalirejo Selatan, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Permohonan Traktor untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur No register: 34.01.11.pgh.kt. 15.2016 (PRIORITAS 8)	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Sogan Wates Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Cor Jalan Usaha Tani KT Tri Tunggal Sogan	418	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Kulwaru, Wates, Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Sogan, Wates, Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Granti Kulon, Ngestiharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Permohonan bantuan sapi KT Sinar Mataram 1	10	Ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Granti Wetan, Ngestiharjo, Wates , Kab. Kulon Progo	Permohonan bantuan sapi KT sinar Mataram 2	10	Ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Bantuan prasarana pertanian tanaman	Dusun Panggang, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Alat trese pencacah rumput	1	Paket

Pertanian	pangan untuk kelompok tani				
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kelompok Tani Kelompok Mulyo No.Reg 34.01.06.SLR.KT.06. 2026 (Kidulan, Salamrejo, Sentolo , Kab. Kulon Progo	(PRIORITAS) Permohonan Bantuan Traktor G-1000	2	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dusun Bonosoro, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Bantuan Traktor ROTARY	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dusun Tempel, bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Bantuan Traktor ROTARY	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Gegunung, Bumirejo,Lendah, Kab. Kulon Progo	Kelompok tani Manunggal Gegunung Bumirejo (SARANA PRASARANA)	1	Paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Panggang, Lendah, Bumirejo, Kab. Kulon Progo	Kelompok Tani Eko Pambudi Panggang, Bumirejo, Lendah (SARANA PRASARANA)	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Perempatan Kalangan, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Jalan Perempatan Kalangan	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Rt 39 Bonosoro, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Jalan RT 39 Bonosoro	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dusun Sempu, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Pengadaan Traktor Mini	1	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dusun Sempu, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Pengadaan Diesel Sedot Air	10	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Degolan, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh degolan	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing,	Panggang, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh	10	ekor

Pertanian	domba)		panggang		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Cabean, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Indukan Sapi Kelompok Ternak Handayani Cabean, Bumirejo	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Gegunung, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh gegunung	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Cabeyan, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh Cabeyan	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Carikan, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh Carikan	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Sempu, Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh Sempu	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Kalangan, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Indukan sapi kelompok ternak dukuh Kalangan	10	ekor
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pengadaan alat pertanian	1	kelompok

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Suren, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pemberdayaan kelompok Tani Sidorejo	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh,,, Kab. Kulon Progo	Pengadaan traktor Kelompok KWT Madu Lestari No Reg 34.01.11.PGH. KT.33.2016	1	kelompok
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Pringtali, Kebonharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Kambing Kelompok Suka Karya No Register: 07/KBH/VI/2003	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Beteng, Pagerharjo, Samigaluh,,, Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Kambing Kelompok Sumber Rejeki No Register: 34.01.11.PGH. KT.18.2016_	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok	Kalurahan Sidoharjo, Samigaluh,, Kab. Kulon Progo	Pendampingan untuk terwujudnya Ketahanan pangan secara mandiri atau	1	paket

	tani		kelompok		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Kalinongko, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	DED Pompanisasi KT ASTABRATA NO REG. 34.01.11.PGH. KT.38.2021	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 29/13, Josutan,Karangsari, Pengasih,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) (PRIORITAS 5)	200	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Kalurahan Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Kawasan Kebun Buah	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bugel, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Bugel	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan 1 Bugel, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Pedukuhan 1 Bugel	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	SD Inpres - Dolog, Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani SD Inpres - Dolog	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan 2, Kalurahan Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Pedukuhan 2 Bugel	1	Ruas

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	JALAN USAHA TANI DI BULAK DOLOG (KETHOK TENGAH) Panjatan , Kab. Kulon Progo	JALAN USAHA TANI DI BULAK DOLOG (KETHOK TENGAH) PENGUSUL KT WAHANA KUSUMA	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kalurahan Pleret, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Bulak Kandek"JALAN USAHA TANI PENGUSUL KELOMPOK TANI GISIK PRANAJI"	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan II Bugel, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Cor Blok Jalan Usaha Tani Tegal Dowo (akses ekonomi masyarakat)	870	m
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Pedukuhan Bugel, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk untuk pekarangan	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kalurahan Bugel, Panjatan , Kab. Kulon Progo	JITUT Bulak Dolog	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kalurahan Bugel, Panjatan. , Kab. Kulon Progo	JUT Bulak Dolog	1	Ruas
Penyediaan dan Pengembangan	Pembangunan jalan usaha	Pedukuhan III Bugel, Panjatan, Kab. Kulon	JUT Pedukuhan III Bugel	1	Ruas

Prasarana Pertanian	tani	Progo			
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jaringan irigasi kawasan perkebunan	Penggung, Hargorejo, Kokap , Kab. Kulon Progo	Saluran mudal ke wilayah RW 22 untuk pertanian dan perikanan	1	titik
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Tejogan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Insfrastruktur kegiatan KT Ngudi Makmur	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 116 - 117 RW 035 Pedukuhan Kriyan Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Pedukuhan Kriyan	350	m
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Kelompok Tani Ngulakan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Permohonan bibit palawija KT Ngula	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Ngulakan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Permohonan bibit sayuran dan empon-empon	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Kliripan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Bantuan bibit alpukat KWT Manunggal Karsa Kliripan	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Gapoktan Desa Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Usulan bibit vanili, singkong, sarana prasarana, dan	1	paket

			pembinaan		
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Sindon, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Bantuan kambing untuk KT Pamor (kambing)	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Dusun Anjir, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Bantuan ayam petelur dan kandang KWT ASRI (ayam)	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Penggung, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Bantuan Ternak Kambing KT Sumber Rejeki kambing	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Plampang 1, Kalirejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Bantuan kambing Kelompok Tani " KARYA ABADI"	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Pelatihan pengolahan macam-macam produk singkong secara frozen dan bantuan alat pres dan spiner (UKM UPPKA YUNIKA)	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kedundang Temon Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	COR Jalan Usaha Tani KT Mekar Sari Kedundang	423	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan jalan usaha	Temon Wetan, Temon	COR Jalan Usaha Tani Gab KT Rukun Tani	500	meter

Pertanian	tani	, Kab. Kulon Progo	Temon Wetan		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Plumbon Temon , Kab. Kulon Progo	Cor Jalan Usaha Tani Gapoktan Lancar	400	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Karangwuluh, Temon , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Demen, Temon , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Kaligintung, Temon, Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Temon Wetan, Temon , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Sindutan, Temon , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Jangkaran, Temon , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Temon wetan, Temon , Kab. Kulon Progo	Cor jalan usaha tani gabungan KT "Rukun Tani" temon	500	meter

			wetan		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Dukuh, Janten, Temon , Kab. Kulon Progo	Permohonan traktor rotari KT Maju lancar	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Girigondo, Kaligintung, Temon , Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Alat Penggilingan Kompos KTH "Wono Lestari" No.Reg: 34.01.01.KLG. KH.02.2016	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Nagung RT 12/05, Kedundang, Temon , Kab. Kulon Progo	Pemohonan alat produksi Bawang Merah Goreng dan Rempeyek untuk KWT Gemah Ripah	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan ternak unggas	Padukuhan Tegalrejo, Janten Temon , Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Ternak Menthok KWT Mandiri Rejo	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bulak Karjo, Bojong, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Pembangunan Cor Jalan Usaha Tani Bulak Karjo	4000	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan jalan usaha tani	KT Ngudi Makmur Wojowalur, Bojong Panjatan	Pemb Cor Jalan Usaha Tani Bulak	400	meter

Pertanian		, Kab. Kulon Progo	Wojowalur		
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Bugel Panjatan , Kab. Kulon Progo	Cor Jalan Usaha Tani KT Bumi Kerto	400	meter
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Barat bpk Supar kebarat Garongan , Kab. Kulon Progo	Rabat beton JUT KT Pelem sewu - Trukan Garongan	650	meter
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Depok, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Bojong, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Garongan, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Pleret, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Tayuban, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Panjatan, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Pupuk Organik untuk GAPOKTAN	1	Paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	KWT "Kembang Asem" RT 31 RW 15, Bojong 8, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Bantuan Mesin Spiner, Alat Rajang, dan Mesin Press untuk Usaha Pembuatan Bawang Goreng KWT "Kembang Asem"	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Hibah Bibit Ternak (Sapi, kambing, domba)	Pedukuhan V, Garongan, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Permohonan Bantuan Sapi untuk Kelompok MENDO MERTANI (Reg: 13/GR/V/2008)	1	Paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan pengelolaan pekarangan untuk KWT (kecuali ikan)	Blubuk Sendangsari, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Bantuan KWT Padukuhan Blubuk, Sendangsari	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan pengelolaan pekarangan untuk KWT (kecuali ikan)	Hargowilis, Kokap,,, , Kab. Kulon Progo	Bantuan KWT Padukuhan Clapar 1	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Pupuk dan Peralatan Perkebunan	Josutan, Karangsari, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pelatihan pembuatan pupuk organik dengan mesin penggiling	1	paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Sendang, Karangsari, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Permohonan rumah produksi ayam DOC, kandang pembesaran ayam DOC, dan alat peoduksi pengolahan makanan KWT Sendang	1	paket
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan Pengasih, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani Pedukuhan Pengasih	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Selatan Lapangan Pengasih -- Kedunggalih , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani	800	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan Kedunggalih, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Bangket Jalan Usaha Tani	800	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 26 Terbah, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Jalan usaha Tani	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 19 Serut, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Jalan usaha Tani	200	m
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit tanaman perkebunan	Pedukuhan Klampis, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Bibit Tanaman Restoking	5	Paket

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Pedukuhan Klampis, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Hand Traktor	2	unit
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan prasarana pertanian tanaman pangan untuk kelompok tani	Pedukuhan Derwolo, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Hand Traktor	2	unit
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan, Pengasih, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani, KT Makmur Jaya	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	selatan Lap. Kedunggalih pengasih, Kab. Kulon Progo	Jalan Usaha Tani (Bangket Jalan) KT Makmur Jaya	800	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Pedukuhan kedunggalih, pengasih, Kab. Kulon Progo	Bangket Jalan Usaha Tani KT Ngudi Mulyo	1000	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 26, terbah, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Jalan Usaha Tani KT. Ngudi Mulyo	500	m
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Rt 59, klampis, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Pembangunan baru) KT Ngudi Waras	500	m

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	RT 19 serut, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Jalan Usaha Tani KT. Serda (Serut- Dayaan)	100	m

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, serta Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sesuai ketugasan pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan menitikberatkan pada tema 2 (dua), 5 (lima) dan 6 (enam). Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2025, Rancangan Akhir Renja Dinas Pertaniann dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, yaitu "Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif". Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan. Kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru/ berbeda. Ekonomi inklusif dimaksudkan bahwa peningkatan kesejahteraan dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

"Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif"

Kawasan pertumbuhan adalah kawasan yang memiliki fasilitas serta kemudahan, sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Kawasan

pertumbuhan yang menjadi sasaran dalam tema pembangunan di Kulon Progo adalah Kawasan Aerotropolis, Kawasan Perbukitan Menoreh, Kawasan Pansela, dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

1.Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

2.Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

3.Perluasan akses dan kesempatan

Tema Pembangunan tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah *"Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"* yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni: 1). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; 2). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari; 7). Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri; dan 8). Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

1) Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan adalah

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan sasaran:
   i. Meningkatnya produksi pertanian
   ii. Meningkatnya produksi peternakan
   iii. Meningkatnya pola pangan harapan (PPH)
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

- Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah.

2) Sasaran

Sasaran kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertera dalam tabel III.1 berikut

Tabel III.1 Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	Satuan
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija	Produksi Padi Sawah	124.816	ton
			Produksi Jagung	24.848	ton
			Produksi Kedelai	2.954	ton
		Produksi Tanaman Sayuran	Produksi Bawang Merah	134.760	kuintal
			Produksi Cabe besar	374.924	kuintal
		Produksi Tanaman Buah	Produksi Alpukat	20.710	kuintal
			Produksi Durian	59.202	kuintal
			Produksi Klengkeng	5.711	kuintal
		Produksi Tanaman Biofarmaka	Produksi Jahe	4.747.480	kg
		Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	26.582	ton
			Produksi Kopi	3.367	ton
			Produksi Kakao	1.430	ton
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Produksi Daging	16.074.488	ton
		Produksi Telur	Produksi Telur	14.580.256	Ton
3	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor pola pangan harapan	Skor Pola Pangan Harapan	94,00	%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengampu 3 urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian, Urusan Pangan dan Urusan Keistimewaan dengan 11 Program, 25 Kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian : 6 program 18 kegiatan, 36 sub kegiatan
2. Urusan Pangan : 3 Program 4 kegiatan 4 sub kegiatan
3. Urusan Keistimewaan : 2 Program 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan

Program di Urusan Pertanian yang dilaksanakan terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan (1) kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota dan (3) Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan (1) kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dan (2) Pembangunan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 4 kegiatan yaitu (1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota; (3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
6. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 kegiatan yaitu : (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program di Urusan Pangan yang dilaksanakan terdiri dari 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota.

Program di Urusan Keistimewaan yang dilaksanakan terdiri dari 2 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Kegiatan yaitu (1) Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dan (2) Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan, serta peningkatan kelembagaan tani dan diversifikasi pangan. Sedangkan untuk mewujudkan misi ketiga, pemerintah daerah termasuk Dinas Pertanian dan Pangan di dalamnya, melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga tercapai tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Kerangka pendanaan dan target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 sebagaimana tabel IV.1.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	INDIKATOR SUBKEGIATAN/ KELUARAN RIIL	TARGET KELUARAN RIIL	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
													NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pagu pasca desk												
		DPP								33.161.214.493							27.843.780.040	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.081.464.400							1.778.940.000	

1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	*Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh (%)*	10,19	4,76	6,48	8,33			4.081.464.400						-	1.778.940.000	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			4.081.464.400			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.778.940.000	DPP
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1. Pengembangan Kawasan Durian Tonogoro :		4.081.464.400	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.778.940.000	DPP
								a. Sewa Tanah Tonogoro	210.000 m2									

								b. Pemeliharaan kawasan kebun durian	1 paket									
								c. Pengembangan kawasan durian penyangga Tonogoro	6 kelompok tani									
								d. Pengembangan penangkar benih durian di kawasan menoreh	1.000 benih									
								e. Pemeliharaan ternak kambing bligon di Tonogoro - Pembangunan rumah pakan dan rumah kompos	1 paket									
								f. Pengembangan ternak kambing bligon di kawasan penyangga Tonogoro (2 kelompok @22 kambing)	2 kelompok tani									

								- Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing Bligon di Kawasan Penyangga Tonogoro (1 kelompoktani) - Bimtek Pengembangan Kambing Bligon (25 orang)										
								g. Uji Kebenaran, Keunggulan, Identifikasi, dan Pendaftaran Varietas Baru Durian Kalibawang	6 varietas									
								h. Upaya peningkatan produksi dan kualitas durian	100 pohon									

								2. Pengembangan Kawasan Durian Embung Kleco :										
								a. Pemeliharaan kebun durian di kawasan Embung Kleco	3 kelompok tani									
								b. Pembangunan sarana dan prasarana di Embung Kleco : - Perbaikan Membran	1 paket									
								3. Pengembangan Agroeduwisata Hargowilis :										
								- Pemeliharaan kelapa genjah (Pupuk organik)	1.200 pohon									
								- Pemeliharaan komoditas tanaman hortikultura	1 paket									

								- Peremajaan kelapa genjah (Bibit kelapa genjah dan pupuk organik)	1 paket									
								5. Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh (1 paket)										
								a. Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh	1 kelompok tani									
								b. Bimtek Pengolahan Hijauan Pakan Ternak pada Pengembangan kambing PE	25 orang									
								c. Kontes Kambing PE Ras Kaligesing Lokal Kulon Progo	1 event									

								6. Pengembangan Kopi Menoreh:										
								a. Sarana Pemasaran Kopi/ Outlet Mobile (5 unit)	5 unit									
								e. Festival Kopi (1 event)	1 event									
								7. Heboh Buah (1 event)	1 event									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.845.888.500							3.127.590.000	
1,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi (%)*	99,7	102,28	99,44	99,57			328.915.200						-	703.780.000	

	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga (%)*	100%	100%	100%	100 %			159.176.300			-	-	-	-	145.000.000	DPP
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Pengadaan Cadangan Pangan	10 ton	159.176.300	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	-	-		145.000.000	DPP
								Pendampingan Lumbung Pangan/LDPM/PUAP	4 kali									
								Koordinasi bantuan	2 kali									

								Pangan										
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	100%	100%	100%	100 %			169.738.900			-	-	-	-	558.780.000	DPP
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari	5 kelompok	169.738.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	-	-		558.780.000	DPP
								Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan	1 dokumen									
								Sosialisasi Pangan B2SA (60 orang, @30 orang)	60 orang									

2,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan (%)*	96,59	100	95,45	96,59			29.392.700						-	62.150.000	
			Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	45,3	36,91	33,42	43,94											
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota*	100%	100%	100%	100 %			29.392.700			-	-	-	-	62.150.000	DPP
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Penyusunan Neraca Bahan Pangan	1 dokumen	29.392.700	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	-	-		62.150.000	DPP

								Penyusunan SKPG (Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	1 dokumen									
								Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen									
3,	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan (%)*	95	94,33	90	92,5			24.120.900							-	111.000.000	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota*	100%	100%	100%	100 %			24.120.900			-	-	-	-		111.000.000	DPP
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	

			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pelatihan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)	30 orang	24.120.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	-	-		111.000.000	DPP
								Pelatihan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	30 orang									
								Uji sampel pangan segar	100 sampel									
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	*Persentase pemberdayaan kelompok tani (%)*	32	25	40	35			9.463.459.700						-	2.250.660.000	
			Persentase pelestarian lahan surjan (%)	9,43	3,77	5,66	7,55											

	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			3.281.666.600			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.950.660.000	DPP
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	1 Objek	1 Objek	1 Objek	1 Objek	1. Bantuan Saprodi dan Alat Pengendali OPT Pengembangan Bawang Merah	10 kelompok tani	3.281.666.600	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.950.660.000	DPP
								2. Pembangunan saluran irigasi sistem sprinkler	10 kelompok tani									
								3. Sekolah Lapang GAP - GHP Bawang Merah	40 orang									
								4. Wiwitan bawang merah	4 kali									
								5. Bantuan Sarana	10 kelom									

								Produksi Padi	pok tani									
								6. Lomba Intensifikasi di Lahan Surjan	1 kali									
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			6.181.793.100			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	300.000.000	DPP
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Mataraman	15 Kelompok Wanita Tani (KWT)	1.127.611.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		300.000.000	DPP
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional																
				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	A. Pendampingan Kegiatan Saemaul Undong di Kapanewon Nanggulan		5.054.181.200	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		300.000.000	DPP

											Kel/Desa							
								1. Pembangunan Retaining Wall/ Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram)	1 paket									
								2. Pengembangan Jamur Tiram	1 gapoktan									
								3. Pengembangan Padi Lokal Menor	17 kelompok									
								4. Pengembangan Kambing Bligon	1 kelompok									
								B. Pengembangan Komoditas Hortikultura										

								1. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Bawang Merah di Girimulyo	2 kelompok tani									
								2. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabai Merah	5 kelompok tani									
								C. Pengembangan Komoditas Perkebunan										
								1. Bantuan Sarana Pendukung Pembibitan Kelapa Bojong Bulat	3 kelompok tani									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								19.233.861.593							22.937.250.040	

1,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Populasi ternak (animal unit)*	214105	170191	192833	202824			2.136.915.800						-	2.617.130.000	
			Produktivitas tanaman pangan (ku/ha)	53,51	50,71	51,52	52,5											
			Produktivitas tanaman perkebunan (ku/ha)	54,91	56,22	54,36	54,63											
			Produktivitas tanaman hortikultura (ku/ha)	131,17	139,12	130,77	130,97											
			Persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100											

	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	100%	100%	100%	100 %			332.827.000			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	200.000.000	DPP
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Pengadaan Traktor Rotary	3 unit	332.827.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		200.000.000	DPP
								Pengadaan Traktor Capung	2 unit									
								Pengadaan Cultivator (2 unit)	2 unit									
								Otomatisasi Traktor	2 unit									
								Pengawalan pupuk bersubsidi (12 kapanewon)	12 kapanewon									

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan kabupaten/kota*	100%	100%	100%	100 %			1.437.646.200			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.500.000.000	DPP
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pengembangan padi biofortifikasi	5 hektar	1.287.265.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		900.000.000	DPP
								Pemgembangan kelapa genjah	1 hektar									
								Pengembangan jahe	2 hektar									
								Pengembangan bawang merah pesisir	2 Ha									

								Pembangunan smart green house	2 unit									
								Stok benih bibit tanaman buah	200 batang									
								Pengumpulan data pertanian	12 bulan									
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Fasilitasi asuransi usaha tani padi	12 bulan	150.381.200	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		600.000.000	DPP
								Penyusunan informasi harga pasar komoditas pertanian	12 bulan									
								Pelestarian koro benguk	1 kelompok									
								Pelestarian ketela pohon giri menoreh	1 kelompok									

	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain*	100%	100%	100%	100 %			366.442.600			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	917.130.000	DPP
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain				37 Ekor	Hibah kambing bligon (11 ekor)	1 kelompok	366.442.600	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		917.130.000	DPP
								Hibah domba (11 ekor)	1 kelompok									
								Hibah Kambing PE (11 ekor)	1 kelompok									
								Hibah Sapi PO (4 ekor)	1 kelompok									
								Hibah Alat Pengolah	3 paket									

								Hijauan Pakan										
								Semen Beku Sapi	3.000 dosis									
								Kandang Koloni	3 unit									
2,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)*	14	13,85	13,63	13,81			1.429.099.800						-	2.276.590.040	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian*	100%	100%	100%	100 %			336.679.700			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	640.000.000	DPP
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																

			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Cetak sawah baru	10 hektar	336.679.700	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		640.000.000	DPP
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian*	100%	100%	100%	100 %			1.092.420.100			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.636.590.040	DPP
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	Pembangunan Jalan Usaha Tani	2 unit	656.887.500	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		736.590.000	DPP

	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit		0 Unit	-	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		40	DPP
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		0 Unit	-	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		200.000.000	DPP
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																

			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit		0 Unit	-	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000	DPP
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 unit	Pembangunan Jaringan Irigasi Sprinkle	1 unit	333.572.600	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		450.000.000	DPP
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH)	1 Unit	101.960.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.000.000	DPP

											esa							
3,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase kesehatan hewan dan kesmavet (%)*	5,22	0,19	5,72	5,49			828.187.300						-	430.880.000	
			Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik(%)	73,11	92,19	71,11	72											
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil (ekor)	5040	9730	4536	4752											

			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan (%)	100	84,72	88,65	94,32											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	100%	100%	100%	100 %			324.248.140			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	170.880.000	DPP
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Operasional UPT Yankeswan Wilayah Utara	12 bulan	101.012.140	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.000.000	DPP

								Pengadaan Obat dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)	12 bulan									
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Sosialisasi PHMS (6 kali) - @20 orang	120 orang	223.236.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.880.000	DPP
								Pengendalian penyakit antraks	2 kali									
								Pengawasan lalulintas ternak	24 kali									
								Pembelian obat dan peralatan pendukung pengobatan (1 paket)	1 paket									
								Pengawasan obat hewan	4 kali									
								Pemantauan penyakit	20 kali									

								hewan menular										
								Pengambilan sampel darah	200 sampel									
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota*	100%	100%	100%	100 %			228.718.260			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	130.000.000	DPP
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Operasional Pasar Hewan Terpadu	12 bulan	128.177.500	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		60.000.000	DPP
								Operasional Pasar Hewan Klangon	12 bulan									
								Operasional RPH	12 bulan									
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																

			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Operasional UPT Yankeswan Wilayah Selatan	12 bulan	100.540.760	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.000.000	DPP
								Pengadaan Obat dan Peralatan pendukung pengobatan (2 paket)	12 bulan									
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-			-			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	50.000.000	DPP
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																

			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 laporan		0 laporan	-	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000	DPP
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	100%	100%	100%	100 %			275.220.900			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	80.000.000	DPP
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	36 kali	76.407.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		30.000.000	DPP
								Sosialisasi ASUH (1 kali)	20 orang									

								Sosialisasi Zoonosis (1 kali)	20 orang									
								Sosialisasi Hewan Kurban (1 kali)	20 orang									
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan																
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	Kontes Ternak	1 kali	198.813.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000	DPP
								Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Hasil Ternak dan Olahan (2 kali) @25 orang	50 orang									
4,	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Penurunan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura (%)*	0,24	0	0,36	0,3			112.423.800						-	416.480.000	

	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota*	100%	100%	100%	100 %			112.423.800			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	416.480.000	DPP
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	942	66,70	911	926 Ha	Gerakan Pengendalian OPT	12 kali	112.423.800	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		416.480.000	DPP
								Pengadaan Stok Pestisida	1 paket								
								Fasilitasi Regu Pengendali Tanaman (RPT)	1 kelompok								

5,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase peningkatan penyuluhan pertanian (%)*	45,87	45,33	44,96	45,4			850.476.900						-	1.176.840.000	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	100%	100%	100%	100 %			850.476.900			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.176.840.000	DPP
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Pembinaan Kelompok Tani	1.616 kelompok	381.033.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		536.840.000	DPP
								Pendampingan penyusunan RDK-RDKK	1.616 dokumen									
								Evaluasi Kelas Kelompok	1.616 kelompok									

								Monitoring Evaluasi P4S	19 P4S									
								Penyusunan Programa tingkat desa	88 dokumen									
								Penyusunan Programa kecamatan	12 dokumen									
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	98 unit	95 unit	98 unit	96 unit	Pelatihan Penyuluh Pertanian ASN (75 orang) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (100 orang)	175 orang	469.443.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		640.000.000	DPP
								Lomba pertanian (2 kali) : lomba gempar dan penilaian penghargaan pertanian	2 kali									
								Pameran Pembangunan	1 kali									
								Evaluasi kinerja penyuluh	1 kali									
								Pelatihan Petani Milenial	50 orang									

								Peda (Pekan Daerah) KTNA	1 kali									
6,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Rata - rata persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah (%)*	100	100	100	100			13.876.757.993						-	16.019.330.000	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan			12.189.545.333			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	14.201.765.600	DPP
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.520 orang / bulan	2.520 orang / bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.520 orang / bulan	12.099.342.033	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.084.765.600	DPP
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Honorarium petugas penatausahaan keuangan	12 bulan	78.600.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		102.000.000	DPP
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	11.603.300	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		15.000.000	DPP
								Laporan keuangan Semesteran	2 dokumen									

	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			-			10.793.500			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	16.000.000	DPP
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3.793.500	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		6.000.000	DPP
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	7.000.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.000.000	DPP

	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			-			98.405.500			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	126.000.000	DPP
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Penyediaan Peralatan Kantor (ATK)	12 bulan	37.022.500	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		37.000.000	DPP
								Penyediaan Alat ListrikPenyediaan Surat Kabar	12 bulan									
								Penyediaan Surat Kabar	12 bulan									
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 bulan	61.383.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		89.000.000	DPP
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-			33.571.000			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	270.000.000	DPP
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	Pengadaan Laptop/ Notebook	2 unit	33.571.000	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		270.000.000	DPP
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			-			814.775.860			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan	-	-	829.564.400	DPP

														Kemiskinan				
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi	12 bulan	195.337.956	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		179.000.000	DPP
								Penyediaan Sumber Daya Air	12 bulan									
								Penyediaan Listrik	12 bulan									
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Pembayaran honor penjaga malam, petugas kebersihan dan pembayaran JKN, JKM,JKK	12 bulan	619.437.904	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		650.564.400	DPP

	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			-			655.335.500			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	510.000.000	DPP
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas dan Pembayaran pajak serta perizinannya (Kendaraan roda 2 : 125 unit; Kendaraan roda 4 : 9 unit; Kendaraan roda 3 : 4 unit	138 unit	311.813.400	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		350.000.000	DPP
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	Pemeliharaan atap	1 paket	269.220.900	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		75.000.000	DPP

								Pemeliharaan kamar mandi	1 paket									
								Pemeliharaan dinding	1 paket									
								Rehab Aula Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan	1 paket									
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				203 Unit	Penyediaan peralatan kebersihan	12 bulan	74.301.200	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		85.000.000	DPP
								Perawatan Sarana Perkantoran (AC : 40, Komputer/laptop : 13, Printer : 10, LCD :1 Total AC : 42 Total Komputer: 31 Total Laptop : 39 Total Printer : 27)	203 unit									

	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			-			74.331.300			-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	66.000.000	DPP
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	Laporan Tahunan	1 dokumen	53.671.500	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000	DPP
								LKJIP	1 dokumen									
								Profil Perangkat Daerah	1 dokumen									
								Laporan SPIP Semesteran	2 dokumen									
								Laporan pengendalian bulanan	12 dokumen									
								Laporan evaluasi Renja	4 dokumen									
								Laporan Data Pertanian	1 dokumen									

	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Renja 2026	1 dokumen	20.659.800	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		16.000.000	DPP
								Perubahan Renja 2025	1 dokumen									
								Renstra	1 dokumen									
								Perubahan I Renja 2025	1 dokumen									
	J U M L A H									33.161.214.493							27.843.780.040	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2025 ini disusun dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan dipergunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, oleh karena itu komitmen yang kuat semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar implementasi dari isi dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama

Demikian, dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya urusan pertanian serta pembangunan perekonomian pada umumnya di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Akhir kata, masukan dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya dokumen ini dan besar harapan kami agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengasih, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas,

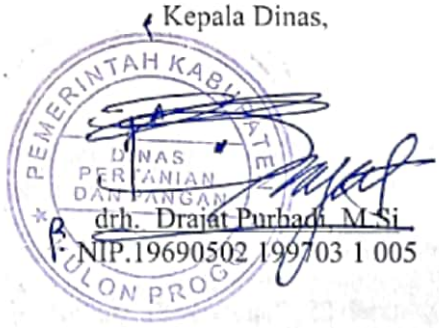

drh. Drajat Purbadi, M.Si
NIP.19690502 199703 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN KULON PROGO
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2025 dapat terwujud. Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023-2026.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2025.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan menjadi pedoman bagi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala

Drs. RIYADI SUNARTO

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 19671018199303 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan……..... 3

1.4. Sistematika Penulisan……..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……...……. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…… 14

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD……. 15

2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2025..…….. 15

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat…… 15

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……..….. 17

3.3. Program dan Kegiatan…… 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (*guidelines)* dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 - 2026 dan RPD 2023-2026.

Nomenklatur kegiatan dalam rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matrik RPD 2023-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri 59 Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan usulan kegiatan untuk tahun 2025 pada urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemvbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;

14). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

15). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8;

16). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2015;

17). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

18). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);
19). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
20). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 – 2026;
21). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
22). Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23). Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan dari Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 2025, terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TW.IV TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis kasultanan dan kadipaten

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   1. Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam daerah kabupaten/Kota

e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
   1. Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Penatagunaan Tanah

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan.

Dari 8 (Delapan) program dengan 15 kegiatan, 26 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 84,29% merupakan capaian realisasi keuangan yang belum cukup optimal (s.d Desember).

Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2023 sebesar 57,01 % dari target 57,01 % (atau 100 %).

Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada tahun 2023 sebesar 78,39 % dari target 78,39 % (atau 100 %).

Capaian Indikator Kinerja Program Penatagunaan Tanah pada tahun 2023 sebesar 35,54 % dari target 15,14 % (atau 234,74 %).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV						
1	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15
			K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Persentase perencanaan penataan ruang**	**90,74**	**3.757,46**	**57,01**	**1.469,95**	**13,89**	**75,85**	**13,89**	**271,27**	**47,22**	**288,53**	**57,01**	**735,25**	**57,01**	**1.370,90**	**57,01**	**1.370,90**	**Dispertaru**
		Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	**97,18**	-	**78,39**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**53,39**		**78,39**		**78,39**		**78,39**		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang*																	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	72	214,40	1	351,72	-	29,08	1	90,23	1	114,60	-	114,93	2	348,85	2,00	348,85	Dispertaru
		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	-	-	1	-	-	-						-	-	-	-	-	
		Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	-	1	-	-	-						-	-	-	-	-	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	1.174,87		137,66	-	6,64		12,18	-	30,45	1	86,76	1	135,93	1,00	135,93	Dispertaru
		Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen)	-	0,00	1	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Perentase ketersediaan dokumen RTBL	100	230,40		54,16	-	-		7,66	-	17,58		27,88	-	53,12	-	53,12	Dispertaru
		Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket)	-		1	-	-	-	-	-			1	-	1	-	1,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang*												-		-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	1.352	789,20	322	319,27	72	11,81	58	96,32	58	40,67	139	120,09	327	268,89	327,00	268,89	Dispertaru
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	97,18	1.705,20	3	332,10	-	16,40	-	41,28	-	47,50	3	211,93	3	317,10	3,00	317,10	Dispertaru
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemanfaatan indikasi penilaian pemanfaatan ruang*												-		-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.490	515,70	365	122,47	75	10,25	26	20,25	26	20,07	330	53,35	457	103,91	457,00	103,91	Dispertaru
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	425,50	1	100,00	-	-	-	0,00	-	-	1	98,43	1	98,43	1,00	98,43	Dispertaru
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	100	223,80	-	62,57	-	1,77		3,35	-	17,67		21,89	-	44,68	-	44,68	Dispertaru
		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			5	-	-	-	-	-			5		5	-	5,00	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**17.450,48**	**100**	**3.453,36**	**34,52**	**545,19**	**61,90**	**595,12**	**91,67**	**837,67**	**100,00**	**1.182,22**	**100,00**	**3.261,19**	**100,00**	**3.261,19**	**Dispertaru**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	165,10	1	38,77	-	11,57	-	14,13	1	6,77	-	5,77	1	38,24	1,00	38,24	Dispertaru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	408,40	12	121,55	3	16,30	3	29,84	3	21,04	3	49,85	12	119,02	12,00	119,02	Dispertaru

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disusunsalam tepat waktu*																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	13.155,28	12	2.106,12	3	405,42	3	557,25	-	555,06	6	424,12	12	1.941,85	12,00	1.941,86	Dispertaru
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	245,50	12	91,84	3	25,39	3	20,40	3	23,94	3	21,90	12	91,63	12,00	91,63	Dispertaru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	56	27,70	14	20,00	3	6,65	3	-	4	9,00	4	3,74	14	19,96	14,00	19,98	Dispertaru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adsinistrasi umum*																	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	297,80	1	89,93	-	10,86	-	0,47	-	31,29	1	38,90	1	88,54	1,00	88,54	Dispertaru
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-											-		-			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	24,80	2	13,79	-	4,84	-	5,90	2	2,62	-	-	2	13,39	2,00	13,39	Dispertaru
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	26,20	21	10,42	6	4,19	4	1,87	5	2,16	6	2,14	21	10,37	21,00	10,37	Dispertaru
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan asset*												-		-			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	1.648,20	2	429,86	-	-	2	-	-	18,10	-	409,52	2	427,62	2,00	427,62	Dispertaru
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	449,70	5	123,04	-	-	4	-	-	45,86	-	72,75	4	118,61	4,00	118,61	Dispertaru
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	4	411,00	1	105,00	-	-	1	-	-	7,93	-	96,80	1	104,73	1,00	104,73	Dispertaru
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	112	425,50	28	241,66	8	57,96	8	61,23	-	53,29	-	56,73	11	229,21	11,00	229,21	Dispertaru
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adsinistrasi kepegawaian*												-		-			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24	255,30	6	60,00	-	-	6	-	-	60,00	-	-	6	60,00	6,00	60,00	Dispertaru
	Program Penatagunaan Tanah	**Presentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN**	**16,97**	**924,92**	**15,14**	**1.060,82**	**14,21**	**36,89**	**14,21**	**12,92**	**22,66**	**71,43**	**35,54**	**366,23**	**35,54**	**487,37**	**35,54**	**487,37**	**Dispertaru**
	Penggunaan Tanah yang Hampersarnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN*																	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	16,97	2.564,20	-	775,09	-	0,14	-	3,88	-	11,76		316,56	-	334,31	-	334,31	Dispertaru
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/Kota	4	1.221,50	1	287,13	-	36,66	-	9,06	-	59,67	-	47,67	-	153,06	-	153,06	Dispertaru
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda**	**100,00**	**745,80**	**100,00**	**518,93**	-	**12,47**	-	**19,11**	**100,00**	**18,37**	**100,00**	**333,55**	**100,00**	**383,50**	**100,00**	**383,50**	**Dispertaru**
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda*																	
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	745,80	-	518,93	-	12,47	-	19,11	-	18,37		333,55	-	383,50	-	383,50	Dispertaru
		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7		7	-	7,00	-	

	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	**Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan**	**100**	**40.917,03**	**100,00**	**1.780,39**	**-**	**12,97**	**40,95**	**517,03**	**96,98**	**558,64**	**100,00**	**572,01**	**100,00**	**1.660,65**	**100,00**	**1.660,65**	**Dispertaru**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan*																	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100	40.917,03	100	1.780,39	-	12,97	-	517,03	-	558,64	100	572,01	100	1.660,65	100,00	1.660,65	Dispertaru
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan**	**100**	**230,20**	**100,00**	**84,00**	**-**	**6,59**	**-**	**13,78**	**0,00**	**14,63**	**100,00**	**30,67**	**100,00**	**65,67**	**100,00**	**65,67**	**Dispertaru**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan*																	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	230,20	-	84,00	-	6,59	-	13,78	-	14,63		30,67	-	65,67	-	65,67	Dispertaru
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10	-	-	-	-	-			10		10	-	10,00	-	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	**Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya**	**74,43**	**9.800,00**	**57,33**	**2.089,84**	**17,33**	**59,61**	**57,95**	**226,20**	**42,19**	**465,65**	**66,48**	**883,90**	**66,48**	**1.635,35**	**66,48**	**1.635,35**	**Dispertaru**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN*																	
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	46,86	8.662,40	-	1.670,59	-	54,21		141,62	-	422,32		812,58	-	1.230,73	-	1.230,73	Dispertaru
		Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di BPN	-		100		-		-		-		100		100	-	100,00	-	
		Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa	-		950		-		-		-		100		100	-	100,00	-	
		Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN	-		122		-		-		-		122		122	-	122,00	-	
		Pendaftaran ukur tanah desa	-		50		-		-		-		50		50	-	50,00	-	
		Identifikasi dan verifikasi tanah kasultanan/ kadipaten/ tanah desa	-		3		-				-		3		3	-	3,00	-	
		Pendaftaran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN	-		1.000		-				-		1.000		1.000	-	1.000,00	-	
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	461,20	1	91,83	-	-	-	11,39	-	7,56	1	72,30	1	91,25	1,00	91,25	Dispertaru
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa*												-		-			
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	100	400,00	-	100,00	-	-			-			86,85	-	86,85	-	86,85	Dispertaru
		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis (jin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	-	1	-	-	-	-	19,54	-	10,50	-	(30,04)	-	-	-	-	
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	12	757,60	3	227,83	-	5,40	-	53,65	-	35,27	3	142,20	3	226,52	3,00	226,52	Dispertaru
		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis (jin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	-	1	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)*																	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	12	121,00	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	Dispertaru

	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati**	**100,00**	**2.000,00**	**25,00**	**726,53**	-	**3,19**	-	**138,92**	-	**392,10**	**25,00**	**191,92**	**25,00**	**726,72**	**25,00**	**726,72**	**Dispertaru**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati*													1				
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.553,00	-	569,06	-	1,32	-	109,04	-	272,81		168,42	-	568,39	-	568,39	Dispertaru
		Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara	-	-	1	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-	1,00	-	
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	741,00	-	157,47	-	1,87		29,87	-	119,50		6,09	-	157,33	-	157,33	Dispertaru
		Peraturan Bupati RTBL Hargorejo	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1		1	-	1,00	-	
	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	27	5.795,46	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	Dispertaru
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**100,00**	**84,29**			
						Predikat kinerja									**BT**	**T**			

I. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

II. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Capaian kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum optimal karena adanya kendala internal maupun eksternal serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya
2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga gap antara kinerja fisik dan keuangan masih tinggi
4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat
5. Terdapat 11 dari 63 IKU PD dan 31 dari 176 program RPD 2023-2026 yang belum optimal capaian kinerjanya

III. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. OPD agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan ROPK yang telah disusun;
2. Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk apabil ada kendala dalam pelaksanaan pengadaan / tender ;
3. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY dan Kementerian/Lembaga;
4. Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi pengendalian Monev4u.

IV. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
1. Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung keterocapaian target RPD 2023-2026;
2. Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. OPD agar melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan yang telah selesai dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.
4. OPD agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal serta memperhitungkan dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Disusun,
Wates, Februari 2024

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Drs. RIYADI SUNARTO
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19671018 199303 1 004

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu sertifikasi tanah membutuhkan waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang pada kondisi tahun 2023 dalam proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang Pada tahun 2023 sebesar 88,56% Dengan target 88,55%, maka prosentase capaian sebesar 100,01 %.

Permasalahan :

1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.

2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan infrastruktur terkait pembangunan Rencana Jalan TOL, Rencana Jalan JOR, Jalan Bedah Menoreh, Rencana Wates Baru, Pembangkit Listrik, Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi, Pembangunan Asrama Haji dan Bandara Kulon Progo.

Solusi

1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.

2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.

b. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN

Untuk tahun 2023 jumlah tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 dari target 15,14 % dapat tercapai 35,54 %, dimana dari target 743.657 m2 luas aset pemda yang didaftarkan di BPN dapat tercapai 1.745.348, dari luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN sejumlah 4.911.447 m2. Target pencapaian pada tahun 2023 dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap) dari pemerintah pusat.

1. Permasalahan

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.

b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah

2. Solusi

a) Sosialisasi kepada masyarakat

b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah

c. Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah

Untuk tahun 2023 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 87,50 %.

Permasalahan

a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia .

1. Solusi

a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (s/d TW IV)		Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2026 (thn n+2	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-11	-12	-13	-14
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang			88,55	88,6	88,65	88,7	88,56		88,6	88,65	88,7	
2.	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN			39,91	42,58	45,26	47,93	41,83		42,58	45,26	47,93	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah DIY yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara

untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4). Tantangan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib pemanfaatan ruang, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung , penataan bangunan dan lingkungan di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam penyusunan rencana tata ruang sudah mengakomodir adanya SK Bupati KP tentang KP2B.

5). Peluang ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan dan Tata Ruang sehingga dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa mempunyai payung hukum dalam arah Kebijakan, penegakan hukum, pengawasan serta status kepemilikan dan yang terkait Tata Ruang mulai dari Perencanaan SRS hingga Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya efisiensi anggaran kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Ranwal RKPD tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo*

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Ranwal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	54.300	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	311.661	
2	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	112.000	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 dokumen	58.300	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	150.730	

4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kulon Progo	Jumlah Rekomendasi KKPR	345 dokumen	199.700	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaiaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kulon Progo	Jumlah layanan persetujuan KKPR	345 layanan	337.803	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah KRK	375 dokumen	130.500	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Kulon Progo	Dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	375 dokumen	107.900	
6	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	107.600	Penilaian Perwujudan RTR	Kulon Progo	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 dokumen	150.000	
7	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Persentase Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100 %	56.600	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 kasus	46.295	
8	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kulon Progo	Persentase Pengelolaan Database Pertanahan dan Tata Ruang	50%	231.800	Sistem Informasi dan komunikasi Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Dokumen	250.000	
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.180	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	121.554	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.374	
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	62.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	88.277	

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Terlaksananya Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	1 laporan	75.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	55.330	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	18.000	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	7.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	35.061	
15	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	6.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	11.282	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	104.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	119.650	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	107.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	24.811	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	176.682	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	15,75 %	653.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Dokumen	440.360	

19	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kulon Progo	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100 %	188.700	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kulon Progo	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.159	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	309.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan	272.030	
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100%	10.352.270	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	398 Dokumen	1.584.204	
22	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kulon Progo	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100%	58.200	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kulon Progo	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	66.165	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	113.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	391.700	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
25	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	64.600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0	
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 OB	3.330.879	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 OB	2.380.094	
27	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis kasutanan dan Kadipaten	Kulon Progo	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	50%	187.500	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis kasutanan dan Kadipaten	Kulon Progo	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	50%	0	

28	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kulon Progo	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	50%	645.900	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2 Dokumen	1.174.314	
						Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Dokumen	0	
29	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kulon Progo	Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	39,39 %	2.015.600	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	8 Dokumen	1.971.750	
30	Pengawasan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kulon Progo	Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1 Dokumen	115.300	Pengawasan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kulon Progo	Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan,Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	30 Dokumen	120.000	
31	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kulon Progo	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	100%	100.000	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20 Dokumen	100.000	
32	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kulon Progo	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	3 Berita Acara	189.400	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kulon Progo	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	3 Berita Acara	214.000	
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	3 Unit	30.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	3 Unit	0	
TOTAL					20.211.549					10.800.777	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPD 2023-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan Ruang ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Nihil	-	-	-	-
2	Nihil	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang agraria dan tata ruang umum skala nasional serta sasaran strategis nasional

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2. Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019, dirumuskan sebagai berikut :
   1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
   2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
   3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Kulon Progo 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026.

Dokumen RPD 2023-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD DIY 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk ***mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.***

Adapun detil dan tahapan sasaran pokok dan penekanannya sebagaimana berikut ini:

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahap Keempat (2020-2024) Sasaran Pokok Penekanan Tahap Keempat Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing masyarakat serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan

dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2023-2026 adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2023-2026 yang ke-3 yaitu: Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan. Mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan dengan Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase Tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN	45,26
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	88,65

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Secara umum Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dijabarkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 dengan 6 Program dari APBD dan 2 Program dari DAIS (Dana Keistimewaan Yogyakarta) sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Adapun secara lengkap Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025 kami tampilkan pada link sebagai berikut: https://drive.google.com/file/d/1pjjQnK1GNH1bwdbRjR1zCzOsuFE1p97W/view?usp=sharing

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KAB. KULON PROGO TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)						**9.651.539.574,00**							**14.581.921.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.859.488.829,00**							**8.601.500.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.859.488.829,00**							**8.601.500.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**3.011.236.329,00**						-	**4.171.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.662.600,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	48.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.293.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.496.098.647,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	2.810.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.380.094.547,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		2.685.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	80.927.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a nSemesteran SKPD				14 Laporan	35.076.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkata n kualitas SDM 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas SDM 3. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.316.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	52.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	124.010.832,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	425.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		275.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	124.010.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	321.148.250,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	401.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	176.686.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		205.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	119.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		158.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	24.811.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		38.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	-	-			-	**1.415.398.200,00**						-	**2.019.500.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	572.676.100,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	679.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang															
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149.288.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		235.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota															
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	224.317.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		368.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang															
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	199.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		76.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	581.876.500,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	-	858.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang															
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				345 Layanan	333.184.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang		458.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang															
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	248.692.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	260.845.600,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		482.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang															
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	43.780.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		78.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan															
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				375 Dokumen	87.818.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		159.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	129.246.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		245.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**-**	**-**			**-**	**432.854.300,00**						**-**	**2.411.000.000,00**	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	432.854.300,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	-	-	911.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	432.854.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	-		703.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	-		208.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	0,00			-	Penurunan kelimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan kelimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.792.050.745,00**							**5.980.421.900,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**4.792.050.745,00**							**5.980.421.900,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**168.377.345,00**						-	**336.578.900,00**	
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.402.900,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.402.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.600.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-	-	195.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		195.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.374.445,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas SDM 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-	-	80.678.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.374.445,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas SDM 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		80.678.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**-**			**-**	**63.368.700,00**							**82.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	63.368.700,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	63.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**1.614.405.900,00**						-	**2.069.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.614.405.900,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 5. Peningkta tan Infrastr uktur Daerah yang Berkel anjutan	-	-	2.069.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				398 Dokumen	1.614.405.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 5. Peningkta tan Infrastr uktur Daerah yang Berkel anjutan	-		2.069.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**	**-**			**-**	**68.609.100,00**						-	**97.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.609.100,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	97.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah															
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	68.609.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		97.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**637.445.700,00**						-	**864.945.000,00**	

	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	637.445.700,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	864.945.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	271.781.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		375.945.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				720 Dokumen	365.664.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		489.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
6.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	-	-			-	**2.239.844.000,00**						-	**2.530.898.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	1.850.439.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	2.169.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				5 Dokumen	1.735.091.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		2.015.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				30 Dokumen	115.348.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 1. Pengem bangan Kawasan A erotropolis	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		154.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	389.405.000,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		361.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		125.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	289.405.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		236.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		J U M L A H						**9.651.539.574,00**							**14.581.921.900,00**	

BAB V
PENUTUP

Dengan melihat latar belakang keterbatasan semua sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, pendanaan maupun dengan melihat berbagai tantangan meliputi tantangan kondisi fisik geografis Kulon Progo yang berbukit-bukit dan relatif labil serta rawan bencana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, menyebabkan target Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tugas yang harus diemban Bupati, belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang, diperlukan rangkaian sosialisasi dan monitoring kegiatan pembangunan yang lebih intensif di seluruh wilayah dan memberikan papan-papan petunjuk mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sempadan Bangunan di seluruh pelosok wilayah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 196710181993031004

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO
2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Daftar tabel iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ….. 19

2.4 Review terhadap RKPD…… 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……... 31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……..... 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37

3.3 Program dan Kegiatan…… 37

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …….. 40

BAB V. PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo ……..	9
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo …..……	18
Tabel 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025……..	23
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo…….	31
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	37
Tabel 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Tata Lingkungan,
d. Bidang Penaatan dan Pengendalian Lingkungan,
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Jabatan Fungsional.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan hidup;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penaatan dan pengendalian lingkungan hidup;
e. pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;

f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

g. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;

h. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;

i. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;

j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat menjadi Rankhir Renja DLH Tahun 2025 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya rancangan Akhir Renja DLH tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

n. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 35 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026.

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kulon progo nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja DLH tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja DLH tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja DLH Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian renja perangkat daerah, penjelasan mengenai proses penyusunannya dan menggambarkan keterkaitan renja perangkat daerah dengan RKPD dan perubahan renstra

1.2. Landasan Hukum

Berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan ketentuan peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan umum tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tentang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs. serta formulasi isu-isu penting.

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan review terhadap RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2023 melaksanakan 10 program, 15 kegiatan dan 26 subkegiatan dengan dana bersumber dari APBD, DAK dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut realisasinya ada yang sudah sesuai dengan target yang direncanakan namun ada pula yang belum memenuhi target.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar Rp8.776.067.430,00 dan dapat terserap (realisasi) sebesar Rp 8.324.413.844,00 (94,85 %). Anggaran tidak dapat terserap maksimal karena belanja menyesuaikan dengan harga riil di toko/penyedia barang dan adanya sisa anggaran pengadaan barang dan/atau jasa.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel1 berikut ini..

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Uruan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**									
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
2.11.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*								**-**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	48		12	12,00	**100,00**	12,00	**24,00**	**50,00**
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	48		1	1,00	**100,00**	12,00	**13,00**	**27,08**
2.11.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*							**-**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96		12	12,00	**100,00**	27,00	**39,00**	**40,63**
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adinistrasi pelaksanaan tugas ASN	4		12	12,00	**100,00**	1,00	**13,00**	**325,00**

2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56		19	19,00	**100,00**	14,00	**33,00**	**58,93**
2.11.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen administrasi umum*								
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (4 paket)	4		4	4,00	**100,00**	1,00	**5,00**	**125,00**
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 laporan)	48		12	12,00	**100,00**	12,00	**24,00**	**50,00**
2.11.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*								
2.11.01.2.02.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10		2	2,00	**100,00**	2,00	**4,00**	**40,00**
2.11.01.2.02.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP	84		21	21,00	**100,00**	21,00	**42,00**	**50,00**
2.11.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (7 unit)	12		7	7,00	**100,00**	-	**7,00**	**58,33**
2.11.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah*								
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit)	52		12	12,00	**100,00**	13,00	**25,00**	**48,08**
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit	4		2	2,00	**100,00**	1,00	**3,00**	**75,00**

2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (50 unit)	275		50	50,00	**100,00**	67,00	**117,00**	**42,55**
2.11.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen administrasi kepegawaian*								
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	6		-	-	**#DIV/0!**	30,00	**30,00**	**500,00**
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90			-	**#DIV/0!**	-	**-**	**0,00**
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup**	**99,30**		**93,75**	**93,96**	**100,22**	**95,67**	**189,63**	**190,97**
2.11.08.2.01	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*								
2.11.08.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10		10	10,00	**100,00**	10,00	**20,00**	**200,00**
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	1.500		375	375,00	**100,00**	100,00	**475,00**	**31,67**
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup**	**100,00**		**42,86**	**50,00**	**116,66**	**64,29**	**114,29**	**114,29**
2.11.02.2.01	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	*Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun*								
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun	10		4	4,00	**100,00**	2,00	**6,00**	**60,00**
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
		presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	**66,67**		**56,02**	**35,29**	**63,00**	**59,57**	**94,86**	**142,28**

		Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	**44,68**		**38,30**	**27,66**	**72,22**	**40,43**	**68,09**	**152,39**
		presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	**100,00**		**60,00**	**60,00**	**100,00**	**80,00**	**140,00**	**140,00**
2.11.03.2.01	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut*								
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	421		8	8,00	**100,00**	2,00	**10,00**	**2,38**
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	18		-			-	**-**	**0,00**
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian paremeter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	56,00		2	2,00	**100,00**	18,00	**20,00**	**35,71**
2.11.03.2.02	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan*							**-**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran da/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	6,00			-		4,00	**4,00**	**66,67**
2.11.03.2.03	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan*							**-**	
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1,00					1,00	**1,00**	**100,00**

2.11.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan**	**52,13**		**48,93**	**52,54**	**107,38**	**50,11**	**102,65**	**196,91**
2.11.06.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi, izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*							**-**	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	30		60	60,00	**100,00**	71,00	**131,00**	**436,67**
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
2.11.10.2.01	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	*Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani*							**-**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24		15	15,00	**100,00**	18,00	**33,00**	**137,50**
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan**	**31,05**		**27,00**	**31,04**	**114,96**	**28,00**	**59,04**	**190,14**
2.11.11.2.01	*Pengelolaan sampah*	*Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*							**-**	
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	5,00		2	2,00	**100,00**	1,00	**3,00**	**60,00**
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota 9 ton	76,00		9	9,00	**100,00**	20,00	**29,00**	**38,16**

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-		15	15,00	**100,00**	**-**	**15,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyaraat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	96,00					-	**-**	**0,00**
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup**	**1,40**		**1,40**	**2,80**	**200,00**	**1,40**	**4,20**	**300,00**
2.11.04.2.01	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola*							**-**	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	700		1.475	1.475,00	**100,00**	700,00	**2.175,00**	**310,71**
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
2.22.08.5.07	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Grebeg sampah*							**-**	
2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat	12		5	5,00	**100,00**	1,00	**6,00**	**50,00**
1.03.13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**100,00**			**100,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
1.03.13.5.01	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*Kegiatan penyusunan KLHS*							**-**	
1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	-		1	1,00	**100,00**	2,00	**3,00**	
1.03.13.5.02	*Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo*	*Kegiatan konservasi*							**-**	
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo	1		-			1,00	**1,00**	**100,00**
								99,01	**99,01**	

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja program sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Komponen untuk perhitungan capaian indikator kinerja program meliputi jumlah bulan layanan administrasi perkantoran, Persentase jumlah dokumen perencanaan, dokumen pelaporan keuangan dan kinerja, dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu, dan persentase aset kondisi baik.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup indikator kinerjanya adalah Persentase Peningkatan Kajian Lingkungan Hidup. Capaian indikator kinerja program sebesar 50% melebihi target yang ditetapkan yaitu 42,86 %. Hal ini disebabkan jumlah kajian lingkungan hidup yang disusun sampai dengan tahun 2023 sebanyak 8 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 6 dokumen. Dokumen yang disusun sesuai rencana meliputi DIKPLHD (2 dokumen), IKLH (2 dokumen), Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (1 dokumen) dan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (1 dokumen). Sedangkan dokumen KLHS RPJPD (1 dokumen) dan KLHS RDTR Kulon Progo Utara (1 dokumen) belum direncanakan di awal penyusunan Renstra namun disusun pada tahun 2023 sehingga realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan.

Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

a. Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup. Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah dokumen persetujuan lingkungan yang diterbitkan sebanyak 5 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan), jumlah dokumen yang disetujui atau direkomendasi sebanyak 9 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan, jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi dan limbah B3 yang diajukan sebanyak 6 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan).
b. Indikator Persentase Peningkatan Baku Mutu Lingkungan. Capaian indikator ini sebesar 35,29% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 56,02%. Hal ini disebabkan target jumlah titik pengujian kualitas lingkungan yang dipantau sebanyak 120 titik hanya terealisasi sebanyak 142 titik . Dari 142 titik yang dipantau tersebut hanya 38 titik yang memenuhi baku mutu.
c. Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target yang ditetapkan sebesar 38,30% namun hanya tercapai 27,66%. Hal ini disebabkan dari target jumlah parameter yang diuji sebanyak 18 parameter hanya terealisasi sebanyak 13 parameter. Parameter yang diuji yaitu Suhu, TSS (Zat padat

tersuspensi), TDS (Total Disolved Solid), DHL (Konduktifitas), pH (derajat keasaman), DO (Oksigen terlarut), Kekeruhan, Total Coliform, Coliform tinja, kelembaban, CO, Kebisingan, dan Debu total. Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja yaitu keterbataasan jumlah dan kompetensi personil lab, ketersediaan bahan kimia dan alat uji parameter (cawan kaca masir, COD Reaktor, neraca analitik (ada tapi kondisi kurang baik, tabung kultur).

d. Indikator Persentase Penghapusan Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan PESK. Capaian indikator kinerja penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK sebesar 100% (target 60% dan realisasi 60%). Lokasi PESK meliputi Plampang II Kalirejo, Plampang III Kalirejo, Sangon I Kalirejo, Sangon II Kalirejo, Gunung Kukusan Hargorejo. Sedangkan lokasi bebas merkuri yaitu Sangon II, Plampang III dan Gunung Kukusan. Faktor pendorong tercapainya target yaitu adanya kegiatan sosialisasi dan kampanye penghapusan penggunaan merkuri serta pendampingan dari perguruan tinggi.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Indikator kinerjanya adalah Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup. Realisasi indikator kinerja program ini sebesar 2,8 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 1,4%. Faktor pendorong capaian realisasi ini adalah target luas kawasan yang dikonservasi seluas 3,25 hektar dan dapat terealisasi seluas 6,5 hektar. Kegiatan untuk penambahan luas kawasan yang dikonservasi pada tahun 2023 berupa penanaman pohon di sekitar mata air seluas 5,5 hektar (1.450 pohon) yang tersebar di Kalibawang, Samigaluh dan Pengasih serta penanaman pohon di sempadan pantai Trisik, Galur seluas 1 hektar (200 batang).

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase peningkatan usaha/ kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan dengan capaian indikator kinerja program sebesar 52,54% dari target 48,93%. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah pelaku usaha/kegiatan bersifat kooperatif dalam menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan. Jumlah usaha/ kegiatan yang menindaklanjuti arahan /teguran hasil pengawasan pada tahun 2023 sebanyak 92 usaha/ kegiatan terdiri dari 60 usaha/kegiatan hasil pengawasan langsung dan 32 usaha/kegiatan hasil pengawasan tidak langsung.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup dengan target sebesar 93,75% dan dapat terealisasi sebesar 93,96%. Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang terbentuk

sampai tahun 2023 sebanyak 298 lembaga dari target 272 lembaga. Dan jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang aktif sebanyak 280 kelompok. Yang dimaksud dengan lembaga peduli lingkungan hidup adalah Bank Sampah, Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, KSM pengelola sampah, Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Tani Hutan. Penambahan lembaga peduli lingkungan hidup yang aktif berasal dari pembentukan kelompok baru, terutama bank sampah yang merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo di 12 kapanewon.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup. Capaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah aduan yang masuk ke Dinas lingkungan Hidup tahun 2023 sebanyak 10 aduan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Program Pengelolaan Persampahan. Indikator kinerja dari Program Pengelolaan Persampahan adalah Persentase peningkatan pengelolaan persampahan. Target capaian indikator kinerja program pengelolaan persampahan sebesar 27% dan realisasinya melebihi target yaitu 31,04%. Capaian ini diperoleh dari jumlah pengurangan sampah sebesar 24.843,80 ton dibagi dengan jumlah timbulan sampah yaitu sebesar 80.003,09 ton.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah bagi Program/ kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah dapat tercapainya target program/ kegiatan yang sudah ditetapkan di Renstra. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah konsistensi penganggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah bagi Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah tidak terpenuhinya capaian program/ kegiatan yang sudah ditetapkan di Renstra. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah perencanaan yang lebih cermat dan penambahan penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024*)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
			Out come (hasil)									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			62,53	62,84	69,75	69.84	67,5	65	69,75	69.84	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten			27%	28%	30%	32%	34,47%	34,47%	30%	32%	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Out put (hasil)									
1	Hasil perhitungan kabupaten terhadap:											
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)			35	35,5	71,9	72,1	50,51	43,94	72,1	50,51	
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)			87	87,3	75,7	75,71	90,74	90,76	75,71	90,74	
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)			64,56	64,56	55,04	55,11	53,51	53,51	55,11	53,51	
2	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten			0	0,77%	0,34%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	
4	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten			0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada MHA
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada MHA
6	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat											
7	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			IKU OPD									
1	Rata-rata persentase pencapaian program disetiap perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)			35	35,5	71,9	72,1	50,51	43,94	72,1	50,51	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)			87	87,3	75,7	75,71	90,74	90,76	75,71	90,74	

*) Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana berikut ini

1. Pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik.
    a. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah;

b. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten;

c. Keterbatasan TPA Banyuroto;

d. Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah;

e. Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah; dan

f. Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.

2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air

a. Penurunan kuantitas dan kualitas air akibat meningkatnya pencemaran di badan air/ sungai oleh limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain ;

b. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air local;

c. Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui rekayasa teknis;

3. Menurunnya kualitas udara

Penurunan kualitas udara karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah harus dihadapi dan dijadikan sebagai tantangan dan peluang. Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat menghambat capaian program nasional/ internasional seperti NSPK dan SDGs (Suistanable Development Goals). Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Tantangan :

a. Penurunan kuantitas dan kualitas air
b. Penurunan kualitas udara dan tanah

c. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian
d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah
e. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai)
f. Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain.
g. Menurunnya Kapasitas TPA Banyuroto
h. Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan.
i. Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan kalurahan dan APBKal

Peluang :

a. Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa
b. Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
c. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga, Balai Pendidikan Menengah, dan Kantor Kementerian Agama
d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna.
e. Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup maka dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu **"Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup"**.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.4. Review terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Renja DLH harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Hasil analisis kebutuhan DLH tahun 2025 perlu dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran.

Usulan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada rancangan awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp26.174.780.000,00. Sedangkan anggaran yang disetujui sampai pada tahap Rancangan Akhir Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp6.809.976.000,00. Demikian juga terkait jumlah program, kegiatan dan subkegiatan,serta keluaran subkegiatan antara rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir renja terdapat perbedaan karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada rancangan awal RKPD terdapat 10 program, 19 kegiatan dan 33 subkegiatan, sedangkan pada rancangan akhir Renja terdapat 9 program, 16 kegiatan dan 25 subkegiatan.

Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Ruang pada awalnya diusulkan, namun sampaii pada tahap pembahasan di Paniradya program tersebut tidak diakomodir. Demikian juga d/engan program/ kegiatan/ subkegiatan yang pendanaanya bersumber dari APBD, ada beberapa subkegiatan yang tidak diakomodir yaitu subkegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
f. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun data hasil analisis kebutuhan DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 disandingkan dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**										
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten										
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo	1 dokumen	1.147.156						**Tidak diakomodir**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					

2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 dokumen	47.655	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 dokumen	44.608	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 laporan	9.931	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 laporan	10.116	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 orang/ bulan	2.041.503	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 orang/ bulan	1.904.706	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 dokumen	56.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 dokumen	46.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 laporan	6.627	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 laporan	4.907	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Dokumen administrasi kepegawaian***			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***Dokumen administrasi kepegawaian***			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	12 orang	33.530	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	30 orang	55.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Dokumen administrasi umum***			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Dokumen administrasi umum***			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 paket	38.836						Tidak diakomodir
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 paket	22.899	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 paket	20.058	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 bulan	75.890	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 laporan	83.136	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	8 unit	1.461.000						Tidak diakomodir
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 unit	5.376.000						Tidak diakomodir
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	99 unit	454.238	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	6 unit	52.976	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Layanan jasa penunjang***			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Layanan jasa penunjang***			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	77.217	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	129.605	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 laporan	147.018	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 laporan	142.612	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	13 unit	153.537	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	14 unit	131.014	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	470.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	191.875	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	67 unit	27.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	34 unit	19.492	
3	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		***Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun***			**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		***Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun***			
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	2 dokumen	47.166	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	2 dokumen	50.763	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan*** ***Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan*** ***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup*** ***Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK***			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan*** ***Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan*** ***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup*** ***Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK***			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut***			**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut***			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	4 dokumen	458.518	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	2 dokumen	258.985	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Kulon Progo		1 dokumen	611.471						Tidak diakomodir
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	8 dokumen	3.005.304	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	5 dokumen	532.773	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan***			**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan***			
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	4 laporan	2.461.627	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	4 laporan	1.528.576	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan***			**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan***			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	1 dokumen	107.745						Tidak diakomodir

5	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		***Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola***			**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		***Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola***			
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun*	1 dokumen	98.000						Tidak diakomodir
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	2.030 unit	639.162	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	2240 unigt	424.987	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan***			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan***			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		***Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota***			**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota***			
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	81 badan usaha	48.892	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	81 badan usaha	27.096	
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***			

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		***Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH***			**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH***			
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	375 orang	32.120	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	250 orang	53.174	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	10 lembaga	119.843	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	5 lembaga	127.323	
8	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		***Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani***			**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		***Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani***			
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	21 pengaduan	28.362	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	15 aduan	22.874	
9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***			
	Pengelolaan Sampah		***Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali***			**Pengelolaan Sampah**		***Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali***			

	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	20 ton	2.771.128				-		Tidak diakomodir
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	1 laporan	98.445	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	1 laporan	156.950	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Grebeg sampah***			**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		***Grebeg sampah***			
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo				Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo				
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	4.000.000			*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	1 laporan	789.720	
					26.174.780					**6.809.976**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja DLH didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Program dan kegiatan yang diusulkan ini sesuai dengan isu strategis yaitu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Usulan-usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan.

Usulan permasalahan yang ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. Fasilitasi sarana prasarana persampahan untuk bank sampah
2. Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH)
4. Pembangunan IPAL Industri maupun rumah tangga
5. Pembangunan Sumur Resapan

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Margosari, Pengasih. Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAL rumah tangga	50 titik	

		RT 18 & RT 1 (Keboan dan Karangrejo) Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAL permukiman	2 unit	
		Pedukuhan Bugel 8, Bugel 9, dan Bugel 10, Panjatan, Kab. Kulon Progo	SPAL Pedukuhan Bugel	1 paket	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	RT 22 RW 08 Pundak Tegal, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	250 meter	
		Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	1 titik	
		Dusun Sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	10 unit	
		Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	5000 Ltr	
		Rt 35 /17 Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	1 paket	
		Margosari,Pengasih,, Kab. Kulon Progo	Sumur Resapan	50 titik	
		Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembuatan DAM Pengendali Sungai Ngobaran	60 m3	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi tentang lingkungan hidup	100 peserta	

		Kalurahan Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pelatihan pengolahan bank sampah	1 paket	
		Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 titik	
		Kal Pendoworejo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Pengembangan dan pelatihan bank sampah di kalurahan pendoworejo	1 paket	
		RW 02 Beji, Wates, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	5 paket	
		Sidorejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Karangasem, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Pendem, SIdomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Desa Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 peserta	
		Karang Taruna Kalipetir Lor Desa Margosari Desa Margosari, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	1 paket	
		Kalipetir Kidul,Margosari,Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	1 paket	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				
	Pengelolaan Sampah				
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104?BT/Triharjo, Kab. Kulon Progo	Motor Roda 3	2 unit	
		Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Motor Roda 3	2 unit	

		Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104/BT/Triharjo , Kab. Kulon Progo	Timbangan	2 unit	
		Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Timbangan	2 unit	
		Kularan,Triharjo, Wates (Bank Sampah Dadi Resik), Kab. Kulon Progo	Komposter dan TPS 3 R	20 paket	
		RT 12 RW 06 Tambak, Kab. Kulon Progo	TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)	20 paket	
		Kranggan, Galur, Kab. Kulon Progo	Alat pembakar sampah 1 unit bagi KSM kranggan sehat	1 unit	
		Ngestiharjo Wates Kulon Progo	Alat Pengolah Sampah KSM	1 paket	
		Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 pengangkut sampah	15 unit	
		Temon Wetan, Temon Kulon Progo	Alat Pengolah Sampah KSM Temon Wetan	1 paket	
		Temon Wetan, Temon, Kab. Kulon Progo	Bantuan pengolahan sampah "TPS 3R" temon wetan temon	1 paket	
		Tobanan Pengasih, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) TPS Sampoerna Asih	1 paket	
		Terbah RT 25 RW 10 Pengasih, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) Kelompok "SELAWE MAJU"	1 unit	
		Karangrejo, Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembangunan TPS 3R	1 unit	
		Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo	sarana prasarana persampahan untuk tertib pengelolaan sampah	1 titik	
		Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembersihan Kali untuk penanggulangan banjir dan pengairan	1 titik	
		Bank Sampah Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Permohonan Gedung untuk usaha Bank Sampah "Bank Sampah Sedulur Sinorowedi"	1 paket	
		Pedukuhan Timpang, Pengasih. , Kab. Kulon Progo	Peralayan komposter	1 paket	
		Pedukuhan Timpang, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Peralatan komposter	1 paket	
		Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Hanggar TPS3R Bendungan, Wates	1 paket	

		Garongan , Panjatan,, Kab. Kulon Progo	Bantuan alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya	1 paket	
		Kedungpring , Giripeni, Wates , Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Kensi	1 paket	
		Garongan, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya	1 paket	
		Kedungpring, Giripeni, Wates, Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Kensi	1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Kulon Progo tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, serta Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045.. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "**Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan prioritas ke-8 yakni: "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur"

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

"Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif"

Tema Pembangunan tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah *"**Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"*** yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan misi ke-6 yaitu : Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja DLH tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo seperti pada tabel 5 berikut :

Tabel 5.
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025 (Indeks)
1.	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	36,00
			Indeks Kualitas Udara	87,60

3.3. Program dan Kegiatan

Penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu Peningkatan daya saing daerah untuk mengembangkan Kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan 9 program, 16 kegiatan dan 25 subkegiatan yang meliputi program/ kegiatan rutin, prioritas dan lain-lainnya. Prioritas tahun 2025 yaitu penanaman pohon di sekitar mata air (Aerotropolis), alat laboratorium lingkungan, fasilitasi hibah alat pengolah emas tanpa merkuri untuk 3 koperasi, fasilitasi hibah bangunan pelindung pengolah emas tanpa merkuti untuk 1 koperasi, dan sosialisasi bahaya merkuri kepada 6 kelompok masyarakat.

Rincian nama program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
   a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

a. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

b. Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Program Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

V. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

VI. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a.Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

b. Subkegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

VII. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

a. Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

IX. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

1.Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

a. Subkegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai Nilai Luhur dalam Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2025 berdasarkan pertimbangan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya di bidang lingkungan hidup. Disamping itu, adanya rencana perubahan tipologi Dinas Lingkungan Hidup dari tipe C menjadi tipe B, penambahan bidang dari 2 bidang menjadi 3 bidang dan pemindahan UPT Persampahan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp.6.809.976.803 (enam milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran ini untuk mebiayai 9 program, 16 kegiatan dan 25 subkegiatan yang meliputi program/ kegiatan rutin, prioritas dan lain-lainnya.

Rincian nama Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**6.809.976.803,00**							**27.530.389.218,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.809.976.803,00**							**27.530.389.218,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.020.256.603,00**							**23.130.389.218,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**-**			**100 %**	**2.836.755.475,00**						**-**	**11.549.826.466,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	54.723.700,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	63.344.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	44.608.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		52.420.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.115.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		10.923.688,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	1.956.263.412,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	2.314.653.301,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.904.705.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		2.245.653.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				1 Dokumen	46.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		61.710.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

			ASN													
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				14 Laporan	4.907.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		7.290.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			1 Dokumen	55.000.000,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	36.883.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		36.883.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	103.194.300,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	151.387.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		42.720.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.058.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		25.188.812,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.136.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		83.478.637,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			6 Unit	52.976.400,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	8.020.361.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		1.607.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

										)						
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		5.913.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	52.976.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		499.661.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan jasa penunjang*	-			24 Laporan	272.216.463,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	246.659.121,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	129.604.783,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		84.939.011,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.611.680,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		161.720.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	342.381.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	716.537.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	131.014.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan	Dinas Lingkungan Hidup		168.891.319,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

												Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan					
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	191.875.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		517.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	19.492.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		30.646.138,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***	**-**			**64,29 %**	**50.763.000,00**						**-**	**51.882.985,00**	

	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	*Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun*	-			2 Dokumen	50.763.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	51.882.985,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	50.763.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		51.882.985,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan Persentase penghapusan penggunaan***	**-**			**100 % 40,43 % 59,57 % 80 %**	**2.320.334.128,00**						**-**	**7.309.131.841,00**	

			merkuri pada kegiatan PESK													
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut*	-			7 Dokumen	791.758.528,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	-	4.482.822.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	258.985.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		504.369.558,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		672.618.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				5 Dokumen	532.773.028,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		3.305.834.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan*	-			4 Laporan	1.528.575.600,00			-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	2.707.790.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	1.528.575.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		2.707.790.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-	-	118.519.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		118.519.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***	**-**			**1,40 Persen**	**424.987.000,00**						**-**	**810.878.409,00**	

	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola*	-			2244 Unit	424.987.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	810.878.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		107.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2244 Unit	424.987.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		703.078.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN**	***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran***	**-**			**50,11 Persen**	**27.095.600,00**						**-**	**53.781.046,00**	

		PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	***hasi pengawasan***													
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi, izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*	-			81 Laporan	27.095.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	53.781.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				81 Badan Usaha	27.095.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		53.781.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKA**	***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***	**-**			**95,67 Persen**	**180.497.100,00**						**-**	**167.159.685,00**	

		T														
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	-			5 Lembaga	180.497.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	167.159.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				250 Orang	53.174.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		35.332.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	127.322.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		131.827.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***	**-**			**100 Persen**	**22.874.500,00**						**-**	**31.198.640,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	-			15 Dokumen	22.874.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	31.198.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	22.874.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		31.198.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***	**-**			**28 Persen**	**156.949.800,00**						**-**	**3.156.530.146,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*	-			1 Laporan	156.949.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	3.156.530.146,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		3.048.240.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	156.949.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		108.289.676,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**789.720.200,00**							**4.400.000.000,00**	

1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***	**-**			**100 Persen**	**789.720.200,00**						**-**	**4.400.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	-			1 Laporan	789.720.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	789.720.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							**6.809.976.803,00**							**27.530.389.218,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Renja DLH Tahun 2025 ini didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo periode 2023-2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2025. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup secara intensif.

Pengasih, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KULON PROGO

Ir. GUSDI HARTONO, MT
NIP.19650806 199303 1 004

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773404, Kode Pos 55652

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

Rencana Kerja adalah dokumen landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini mencakup Tujuan, Sasaran, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Daerah sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Rencana Kerja ini sangat diharapkan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wates, 2 Agustus 2024
KEPALA DINAS,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. ASPIYAH , M.Si.
(Pembina Utama Muda; IV/c)
NIP. 19680121 199603 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul……..

Kata Pengantar……..……... i

Daftar Isi ……..……..……..... ii

Daftar Tabel ……... iii

Daftar Gambar..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang…….…… 1
1.2 Landasan Hukum …..……. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……..…… 3
1.4 Sistematika Penulisan ..…… 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu..... 5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD……. 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……. 13
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 2025 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....…….. 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD…….…….. 27
3.3. Program dan Kegiatan……. 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…….. 34

BAB V PENUTUP…….. 45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	12
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo	15
Tabel 2.4	Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo	24
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta / Kabupaten Kulon Progo	29
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya	2
Gambar 2.1	Isu – isu Strategis	13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan fokus pada bidang Administrasi Kependudukan. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verivikasi ,Validasi dan Iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

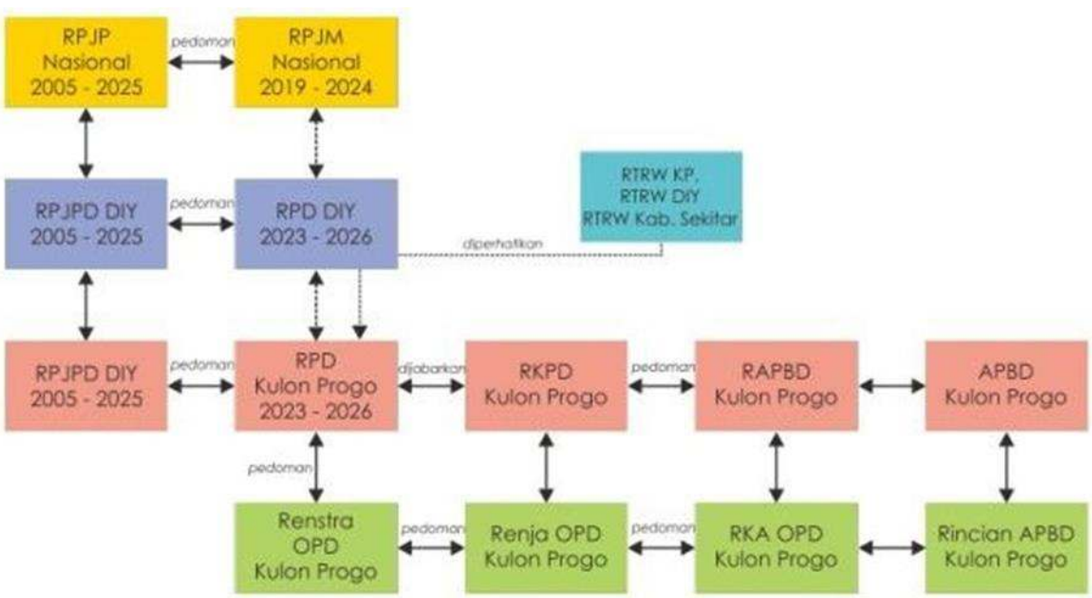

Gambar 1.1

Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang nomor 18 Tahun 1951, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4421)
3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verivikasi , Validasi dan Iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9)
18. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Adminduk dan KIA
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang RMJMD Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023- 2026;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan kegiatan, sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran derah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan rencana kerja OPD ini bertujuan untuk :

i. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
ii. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
iii. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025;
iv. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) OPD ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : Kepala Dinas yang membawahi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan ditunjang oleh Sekretariat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dievaluasi melalui analisa pencapaian kerja dan aspek penyerapan anggaran secara lebih rinci. Capaian kerja didasarkan pada indikator kerja dan capaian indikator atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD. Indikator yang dimaksudkan meliputi kelompok masukan *(inputs)*, keluaran *(outputs)*, hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefit)*, dan dampak *(impacts)*.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2023 berjalan baik dan lancar.Target kerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 89,88 %. Tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya penyesuaian perbedaan antara harga barang/ jasa di DPA/ DPPA dengan harga riil pasar, sehingga pertanggungjawaban disesuaikan harga pasar. Sisa anggaran merupakan selisih harga barang /jasa di DPA dengan di pasar serta sisa lelang dikembalikan ke kas Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun anggaran 2023 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kantor tetap tinggi dan berjalan efektif.

Tabel.2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegitan	Indikator kinerjs Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output) Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja OPD	Realisasi Renja OPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 TW II	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
								nihil						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.06					**Urusan wajib Bukan pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
02.06	1				**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**									
02.06	02.06	1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100		100	100	100%	100		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		2	2	100%	2	4	50%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84		21	21	100%	21	42	50%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48		12	12	100%		12	25%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48		12	12	100%	12	24	50%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jmlah Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56		14	14	100%	14	28	50%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196		5	5	100%	5	10	5%

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									0				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		48		12	12	100%	50	62	129%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				8	8	100%	4	12	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48		36	36	100%	12	48	100%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		48		13	13	100%	13	26	54%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan							3	3	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12		9	9	100%	7	16	133%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		17		17	17	100%	17	34	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi		340		5	5	100%	36	41	12%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit)		17						0	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		32						0	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja		16						0	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)		1						0	
					Program Pendaftaran Penduduk	Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		100		100	99,66	99,66	100	200	

					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								0			
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pedataan penduduk non permanen				1	1	100%	7	8			
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		4860		48000	72534		48000	120534			
					Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		4		2303	8206		2303	10509			
					Program Pencatatan Sipil	Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil		97,21		97,17	99,58	102,4	97,2	197			
					Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil								0			
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		20000		5000	6276	126%	5000	11276	56%		
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		24000		6000	5688	95%	6000	11688	49%		
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								0			
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		600		145	161	111%	135	296	49%		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100		100	100	100%	100	200			
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								0			
					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cetak Data Agregat Kependudukan		12		182	182	100%	2	184			
						Jilid Dokumen Kependudukan		350						0			
						Entri Data Kependudukan		22200						0			
						Scan register akta kelahiran		24000						0			
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								0			
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan				3	281		3	284			

					Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administasi Kependudukan				4	4	100%	3	7	
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik		12		0	0			0	
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan		20						0	
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran		4		0	0			0	
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		3						0	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain		1						0	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								0	
					Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		12		2	2	100%	1	3	25%
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan		100		100	100	100%	100		
					Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan								0	
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				0	0		1	1	
						Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan		12		0	0			0	
						Laporan Profil Perkembangan Penduduk		4		1	1	100%		1	25%

Capaian Indikator Program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat tergantung dari capaian program dari masing-masing bidang yang melaksanakan kegiatan tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/ tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon progo melaksanakan pelayanan, dengan indikator kerja sebagai berikut :

A. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Persentase Jumlah Penduduk yang ber KTP

   Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dari seluruh wajib KTP-el yang ada.

   Pada tahun 2023 penduduk yang wajib KTP-el di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 342.125 orang, dengan jumlah penduduk yang ber-KTP el sebanyak 344.474 maka persentase penduduk ber-KTP el sebesar 99,32 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kerja indikator ini sebesar 99,32 % (Belum memenuhi dari target yang ditetapkan). Hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk yang database kependudukannya tercatat di Kabupaten Kulon Progo akan tetapi berdomisili berada di luar kabupaten Kulon Progo dan belum melakukan perekaman KTP-el.

2. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

   Indikator ini menggambarkan persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi dengan jumlah Kepala keluarga (KK). Pada tahun 2023 jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 156.775 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 156.775 maka persentase jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebesar 100% .

   Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaian kerja indikator ini sebesar 100%. (sesuai dengan target yang ditetapkan). Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sesuai dengan target yang ditetapkan Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan Kartu Keluarga juga meningkat.

B. Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Persentase Jumlah sarana SIAK yang terpelihara

   Indikator ini menggambarkan persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara pengukurannya di dasarkan pada jumlah:

   sarana SIAK yang yang terpelihara dibagi dengan jumlah sarana SIAK yang ada. Pada tahun 2023 jumlah sarana SIAK yang terpelihara sejumlah 17 dengan jumlah sarana SIAK yang ada sejumlah 17, maka persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara sebesar 100%.

2. Persentase Jumlah buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun

   Indikator ini menggambarkan persentase jumlah Buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun yang pengukurannya di dasarkan dengan jumlah buku Agregat kependudukan Semesteran yang seharusnya disusun. Pada tahun 2023 jumlah buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun sejumlah 2 dengan jumlah buku Agregat

Kependudukan Semesteran yang seharusnya disusun sejumlah 2, maka persentase jumlah buku yang tersusun sebesar 100%.

C. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Persentase Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dibagi dengan Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang memiliki Akta kelahiran usia 0-18 tahun sebanyak 104.435 orang dengan jumalah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 105.311 orang, maka persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,17 %. Apabila dibandingkan dengan dengan target 2023 sebesar 96,24 % maka capain kerja indikator ini sebesar 99,17% (melebihi dari target yang diharapkan)

2. Persentase Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan

Indikator ini menggambarkan persentase Jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan yang pengukurannya didasarkan pada jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2023 jumlah Akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sejumlah 4.476 .dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan sejumlah 4.476 maka persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sebesar 100 %.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 98,11% maka capaian kerja indikator ini sebesar 100 % (melampaui target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan keberhasilan program dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ tatap muka, pelayanan *off-line/ on-line* dan berbagai kegiatan pelayanan jemput bola dokumen kependudukan.

Dari analisa kerja pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mencapai target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada indikator cakupan penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18.

Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
2. Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman;
3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi;
4. Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara rinci pencapaian kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator Kinerja Program	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi capaian		Catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I	**Indikator Kinerja PD**											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83,112	83,113	83,114	83,115	89,254				
2	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatn Sipil			97,29	97,31	97,42	97,49	95,53				
II	**Indikator Program PD**											
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100,00	100,00	100,00	100,00	99,66				
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil			97,17	97,20	97,20	97,21	99,58				
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang ke-4 diantaranya adalah Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah, belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik serta belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik sehingga dirumuskan tujuan dan sasarannnya adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian Tujuan tahun 2023- 2026 Pembangunan Daerah misi ke - 4 yakni Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi,yakni :

a. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
b. Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan;
c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah, nyaman dan akuntabel;
d. Pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan akan berimplikasi pada pelayanan administrasi kependudukan;
e. Tuntutan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang representative;
f. Adanya beberapa kewenangan pengelolaan SIAK yang masih menjadi domain pusat;
g. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena Kelahiran, Perkawinan, Kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan.

Gambar 2.1
Isu – isu Strategis

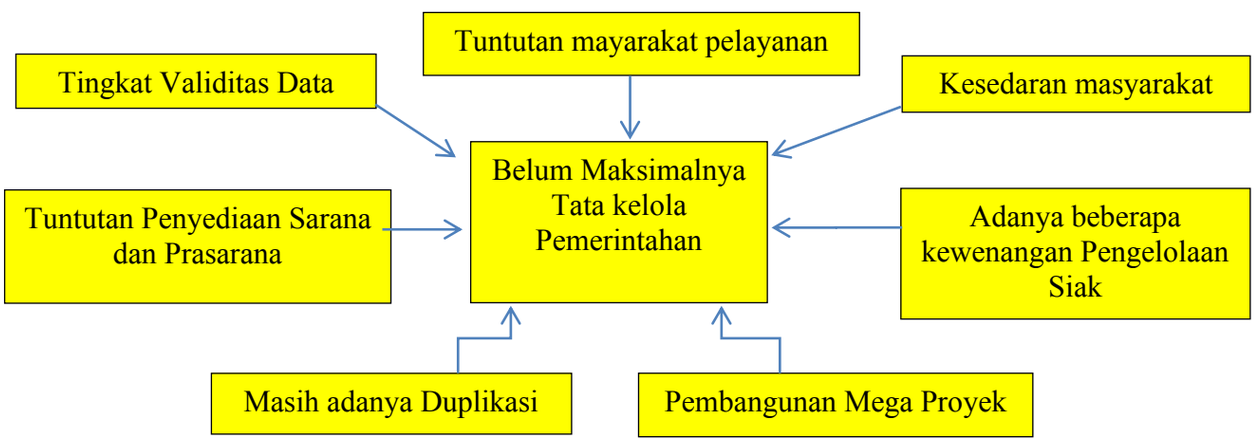

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki wacana dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 4 (Empat) tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Three In One*;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan SIAK Terpusat;
3. Pembangunan Gedung untuk penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih representatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat;
5. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
6. Pemutakhiran Data Penduduk pada 12 Kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Implementasi azas domisili, stelsel aktif dan sistem *on-line* dalam pencatatan sipil;

8. Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Melakukan pelayanan keliling/ jemput bola dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dengan melibatkan instansi terkait;
11. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi ke Desa /Kelurahan,media luar ruang, media elektronik, media cetak maupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2025 dan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026.

Rincian kegiatan yang ada pada Perubahan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Peningkatan pelayanan pendaftaran dan Pencatatan sipil merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi *Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Melalui Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum.*

Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.3. berikut ini

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KABUPATEN KULON PROGO

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JUMLAH PAGU : **Rp. 6.172.625.161**

No	Rancangan awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9			10	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.172.625.161**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.462.239.965**	
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6.172.625.161**							**6.462.239.965**	
2.12.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	Lingkup Kabupaten	**Capaian Program**	:	***Cakupan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***100%***	**4.460.600.561**	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	Lingkup Kabupaten	**Capaian Program**	:	***Cakupan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***100%***	**4.643.897.965**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Output (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**33.000.000**	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Rencana kerja OPD 2024 , Perubahan Renja OPD 2023	2 dokumen	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten			Rencana kerja OPD 2024 , Perubahan Renja OPD 2023	2 dokumen	22.000.000	

2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LKjIP, Laporan Tahunan dan Laporan SPIP	21 dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan,triwulanan,semesteran, LKjIP, Laporan Tahunan dan Laporan SPIP	21 dokumen	11.000.000	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**3.382.100.561**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**3.385.100.561**	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Output (sub kegiatan)	:	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.298.400.561	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Output (sub kegiatan)	:	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.298.400.561	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Output (sub kegiatan)	:	Tersedianya Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	74.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Output (sub kegiatan)	:	Tersedianya Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	74.700.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Output (sub kegiatan)	:	Laporan keuangan SKPD	14 dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Output (sub kegiatan)	:	Laporan keuangan SKPD	14 dokumen	12.000.000	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**4.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**45.000.000**	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Pendidikan dan pelatihan non formal	50 orang	4.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Pendidikan dan pelatihan non formal	50 orang	45.000.000	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**28.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lingkup Kabupaten**	**Outcome (kegiatan)**	:	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**52.996.959**	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	28.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Kabupaten	Output (sub kegiatan)	:	Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	52.996.959	

2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17 unit**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17 unit**	**388.080.000**	
2.12.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	*Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan (Komputer dan Peralatan SIAK)*	*8 unit*		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	*Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan (Komputer dan Peralatan SIAK)*	*8 unit*	180.000.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Laptop	2 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Laptop	2 unit	146.080.000	
					Printer	2 unit						Printer	2 unit		
					Kendaraan Roda 2	3 unit						Kendaraan Roda 2	3 unit		
					AC	1 unit						AC	1 unit		
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)*	1 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)*	1 unit	62.000.000	
2.12.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**905.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**376.178.698**	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik		Output (sub kegiatan)		Tersedianya jasa Komunikasi,sumber jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang di	36 Laporan	105.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	**Kabupaten Kulon Progo**	Output (sub kegiatan)		Tersedianya jasa Komunikasi,sumber jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang di sediakan daya air dan listrik			

					sediakan daya air dan listrik										
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	300.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Output (sub kegiatan)	:	Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan	376.178.698	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Uum Kantor		Output (sub kegiatan)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	500.000.000	dari RKPD 2024							
2.12.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**111.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**363.541.747**	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Komputer dan Peralatan SIAK)	17 unit	42.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Komputer dan Peralatan SIAK)	17 unit	42.000.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Personal Comupter	8 unit 10 unit	54.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Personal Comupter	8 unit 10 unit	269.541.747	
					Penyedotan Septitanc Reparasi dan Penggantian Suku cadang komputer	1 kali 10 unit						Penyedotan Septi tanc Reparasi dan Penggantian Suku cadang komputer	1 kali 10 unit		

					Reparasi dan Penggantian Suku cadang Kendaraan Bermotor Roda Dua Reparasi dan Penggantian Suku cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat	5 unit 4 unit							Reparasi dan Penggantian Suku cadang Kendaraan Bermotor Roda Dua Reparasi dan Penggantian Suku cadang Kendaraan Bermotor Roda Empat	5 unit 4 unit		
					Terbayarnya biaya listrik, telepon, air,fax, langganan surat kabar,pajak kendaraan dinas, BBM dan Pelumas	12 bulan							Terbayarnya biaya listrik, telepon, air,fax, langganan surat kabar,pajak kendaraan dinas, BBM dan Pelumas	12 bulan		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (Tower dan jaringan SIAK)	17 unit	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Tower dan jaringan SIAK)	17 unit	52.000.000	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Capaian Program Pendaftaran Penduduk**	:	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**1.027.025.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Capaian Program**	:	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**1.032.342.000**	
2.12.02.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Outcome (kegiatan)	:	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**12 bulan**	**1.027.025.000**	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Output (sub kegiatan)	:	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**12 bulan**	**1.032.342.000**	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Updating elemen data kependudukan	3 Kapanewon	26.400.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Updating elemen data kependudukan	3 Kapanewon	31.717.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Terbitnya Kartu Identitas Anak	10.000 dokumen	937.125.000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Terbitnya Kartu Identitas Anak	10.000 dokumen	937.125.000	
					Terbitnya Kartu Keluarga	30.000 dokumen						Terbitnya Kartu Keluarga	30.000 dokumen		

					Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik	8.000 dokumen						Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik	8.000 dokumen		
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Surat Keterangan Pindah	1.215 dokumen	63.500.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Surat Keterangan Pindah	1.215 dokumen	63.500.000	
					Surat Keterangan Datang	1.088 dokumen						Surat Keterangan Datang	1.088 dokumen		
2.12.03.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Capaian Program Pencatatan Sipil**	**:**	**Cakupan pelayanan pencatatan sipil**	**97,55%**	**438.000.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**Cakupan pelayanan pencatatan sipil**	**97,21%**	**438.000.000**	
2.12.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**12 bulan**	**230.000.000**	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**12 bulan**	**230.000.000**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Akta Kelahiran	5.000 dokumen	120.000.000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Akta Kelahiran	5.000 dokumen	120.000.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Output (sub kegiatan)	:	Akta Kematian	6.000 dokumen	110.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Output (sub kegiatan)	:	Akta Kematian	6.000 dokumen	110.000.000	
					Perubahan Status Anak	2 dokumen						Perubahan Status Anak	2 dokumen		

2.12.03.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**12 bulan**	**208.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**12 bulan**	**208.000.000**	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Akta Perkawinan	140 dokumen	208.000.000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Akta Perkawinan	140 dokumen	208.000.000	
					Akta Perceraian	5 dokumen						Akta Perceraian	5 dokumen		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Capaian Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**	**:**	**Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**217.999.600**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**268.000.000**	
2.12.04.2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**12 bulan**	**39.999.600**	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				**Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**12 bulan**	**90.000.000**	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Output (sub kegiatan)		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	39.999.600	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Output (sub kegiatan)		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	90.000.000	
					Ter entry nya data kependudukan dan catatan sipil	21.000 lembar						Ter entry nya data kependudukan dan catatan sipil	21.000 lembar		
					Terpeliharanya dokumen kependudukan dan catatan sipil	300 buku						Terpeliharanya dokumen kependudukan dan catatan sipil	300 buku		
2.12.04.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi**	**12 bulan**	**128.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**12 bulan**	**128.000.000**	

					Kependudukan										
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1 dokumen	33.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1 dokumen	33.000.000	
					Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen						Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/ elektronik	3 laporan	95.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang /elektronik	3 laporan	95.000.000	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	1 laporan						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	1 laporan		
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	5 laporan						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	5 laporan		
2.12.04.2.04	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Outcome (kegiatan)**		**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**12 bulan**	**50.000.000**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**12 bulan**	**50.000.000**	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (sub kegiatan)	:	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	3 laporan	50.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Output (kegiatan)	:	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	3 laporan	50.000.000	
2.12.05	**Program Penyusunan Profil Kependuukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**	**12 bulan**	**29.000.000**	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**	**12 bulan**	**80.000.000**	

2.12.05.2.01	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**12 bulan**	**29.000.000**	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**		**Outcome (kegiatan)**	**:**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**12 bulan**	80.000.000	
2.12.05.2.01. 01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Output (sub kegiatan)	:	Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	3 dokumen	29.000.000			Output (sub kegiatan)	:	Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	3 dokumen	80.000.000	
					Laporan Profil Perkembangan Penduduk	1 dokumen						Laporan Profil Perkembangan Penduduk	1 dokumen		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan program/ kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama ini belum mengakomodir rencana kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dikarenakan pada proses Musrenbang atau proposal kepada Bupati dan pokok pikiran di tingkat Kapanewon memang belum ada usulan yang masuk terkait kegiatan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil dari kalangan masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo
Nama SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	==========	NIHIL====	======	==========	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan MakmurIsikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengacu pada program nasional tahun 2023-2026 yakni Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas tahun 2023-2026 yakni Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik.

Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mandasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan public, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta

perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/ lokal sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsu-kan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan criminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "*Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".* Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

3.1.1. Telaahan terhadap kebijakan Kementrian Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwasetiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kementerian/ lembaga yang mengurusi kewajiban tersebut di tingkat Pemerintah Pusat adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan

3.1.2 Telaahan terhadap kebijakan Provinsi

Telaah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. Indikator dari sasaran pertama ini yaitu meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan /Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya.
2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator dari sasaran kedua ini adalah persentase kepemilikan dokumen penting

kependudukan. Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten /kota

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran ketiga merupakan sasaran yang bersifat mandatory dan harus dicantumkan dalam renstra setiap instansi pemerintah. Indikator dari sasaran ketiga adalahkategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target empat tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut- turut.

Dengan demikian, sudah terbangun sinergitas antara program di pemerintah pusat (Kemendagri) dengan pemerintah daerah (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) dalam upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahandan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 seperti yang dituangkan pada RPD 2023-2026 yaitu:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumberdaya manusai yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkaynya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Menigkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 Kabupaten Kulon Progo maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Prioritas Daerah yang ke-4 yakni “Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan tata kelola pelayanan publik dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ketertiban juga dihimbau kepada masyarakat pada pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib.Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih kurang optimal, sehingga berakibat pada kepemilikan dokumen kependudukan yang belum memenuhi target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Kinerja tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	**A**
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	**WTP**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**83.114**
2		Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**97,42**

3.3. Program dan Kegiatan

Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam Kerja tahun 2025 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 yakni pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga Negara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2025 meliputi 5 (lima) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.891.167.031,00. Berikut ini tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025:

Tabel .3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta /Kabupaten Kulon Progo
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ bidang urusan Pemerintahan daerah dan program Kegiatan / Sub Kegiatan (sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.891.167.031**	**APBD**			**5.958.716.698**
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.891.167.031**	**APBD**			**5.958.716.698**
2.12.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Lingkup Kabupaten**	***100%***	**4.074.701.781**	**APBD**		***100%***	**4.713.769.698**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**	**Lingkup Kabupaten**	**12 bulan**	**19.280.800**	**APBD**		**12 bulan**	**33.000.000**
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten	2 dokumen	13.896.400	**APBD**		2 dokumen	22.000.000
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Kabupaten	21 laporan	5.384.400	**APBD**		21 laporan	11.000.000
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**Lingkup Kabupaten**	**12 bulan**	**3.010.046.833**	**APBD**		**12 bulan**	**3.385.100.561**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		616 orang/bulan	2.959.116.433	**APBD**		616 orang/bulan	3.298.400.561
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn		12 dokumen	44.220.000	**APBD**		12 dokumen	74.700.000

2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		14 laporan	6.710.400	**APBD**		12 dokumen	12.000.000
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Lingkup Kabupaten**	**12 bulan**	**9.000.000**	**APBD**		**12 bulan**	**45.000.000**
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lingkup Kabupaten	50 Orang	9.000.000	**APBD**		50 Orang	45.000.000
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**Lingkup Kabupaten**	**12 bulan**	**20.731.000**	**APBD**		**12 bulan**	**58.296.654**
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Kabupaten	4 laporan	20.731.000	**APBD**		4 laporan	58.296.654
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**17 unit**	**70.408.800**	**APBD**		**17 unit**	**388.080.000**
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan*	Kabupaten Kulon Progo	*4 unit*	25.414.000	**APBD**		*8 unit*	180.000.000
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Kulon Progo	2 unit	44.994.800	**APBD**		2 unit	146.080.000
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	Kabupaten Kulon Progo	1 unit	0	**APBD**		1 unit	62.000.000
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**Kabupaten Kulon Progo**	**12 bulan**	**517.933.548**	**APBD**		**12 bulan**	**413.796.567**

2.12.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Kulon Progo	12 laporan	109.987.944	**APBD**			0
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		13 laporan	14.603.500	**APBD**		13 laporan	413.796.567
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		3 laporan	393.342.104	**APBD**			
2.12.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**12 bulan**	**427.300.800**	**APBD**		**12 bulan**	**390.495.916**
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya		**7 unit**	67.495.800				
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		17 unit	164.806.000	**APBD**		17 unit	42.000.000
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 unit	175.000.000	**APBD**			296.495.916
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		17 unit	19.999.000	**APBD**		17 unit	52.000.000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**100%**	**533.671.100**	**APBD**		**100%**	**591.817.000**

2.12.02.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**12 bulan**	**533.671.100**	**APBD**		**12 bulan**	**591.817.000**
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	1 dokumen	23.430.800	**APBD**		1 dokumen	31.717.000
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Kulon Progo	48.000 dokumen	491.690.300	**APBD**		48.000 dokumen	495.600.000
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	2.303 dokumen	18.550.000	**APBD**		2.303 dokumen	64.500.000
2.12.03.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil**		**97,21%**	**147.316.700**	**APBD**		**97,21%**	**318.130.000**
2.12.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**		**12 bulan**	**104.439.900**	**APBD**		**12 bulan**	**110.130.000**
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Kulon Progo	5.000 dokumen	44.199.000	**APBD**		5.000 dokumen	130.000
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		6.000 Layanan	60.240.900	**APBD**		6.000 Layanan	110.000.000
2.12.03.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**12 bulan**	**42.876.800**	**APBD**		**12 bulan**	**208.000.000**
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	135 laporan	42.876.800	**APBD**		145 laporan	208.000.000

2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**		**100%**	**110.789.100**	**APBD**		**100%**	**250.000.000**
2.12.04.2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**12 bulan**	**48.715.500**	**APBD**		**12 bulan**	**100.000.000**
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan		2 dokumen	48.715.500	**APBD**		2 dokumen	100.000.000
2.12.04.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**12 bulan**	**40.628.400**	**APBD**		**12 bulan**	**100.000.000**
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	3 dokumen	13.628.400	**APBD**		3 dokumen	0
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK	Kabupaten Kulon Progo	3 laporan	27.000.000	**APBD**		3 laporan	100.000.000
2.12.04.2.04	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**12 bulan**	**21.445.200**	**APBD**		**12 bulan**	**50.000.000**
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	2 laporan	21.445.200	**APBD**		3 laporan	50.000.000
2.12.05	**Program Penyusunan Profil Kependuukan**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**12 bulan**	**24.688.350**	**APBD**		**12 bulan**	**85.000.000**
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		**12 bulan**	24.688.350	**APBD**		**12 bulan**	**85.000.000**
2.12.05.2.01. 0001	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		1 dokumen	24.688.350	**APBD**		1 dokumen	85.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Organisasi (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KULON PROGO TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.891.167.031**							**5.958.716.698**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.891.167.031**							**5.958.716.698**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.891.167.031**							**5.958.716.698**	
1	**36.934**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Pesentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 Persen**	**4.074.701.781**						**-**	**4.713.769.698**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	19.280.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	33.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.896.400	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	5.384.400	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			616 orang	3.010.046.833			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	3.385.100.561	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				616 Orang/bulan	2.959.116.433	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		3.298.400.561	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	44.220.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		74.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.710.400	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo		12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000			-	-	-	-	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	9.000.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.731.000			-	-	-	-	58.296.654	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	20.731.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.296.654	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			4 unit	70.408.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	388.080.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.414.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		180.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	44.994.800	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		146.080.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		62.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	517.933.548			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	413.796.567	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	109.987.944	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	14.603.500	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		413.796.567	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	393.342.104	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			17 unit	427.300.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	390.495.916	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	67.495.800	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	164.806.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		42.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	175.000.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		296.495.916	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	19.999.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		52.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	**37.299**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	**-**			**100 persen**	**533.671.100**						**-**	**591.817.000**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	-			12 bulan	533.671.100			-	-	-	-	591.817.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	23.430.800	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.717.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	491.690.300	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		495.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2303 Laporan	18.550.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	**37.664**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Presentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil***	**-**			**97,2 persen**	**147.316.700**						**-**	**318.130.000**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			12 bulan	104.439.900			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo	-	110.130.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	44.199.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo		130.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6000 Layanan	60.240.900	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo		110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananannya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			12 Bulan	42.876.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	208.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				135 Laporan	42.876.800	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		208.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	**38.029**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Prosentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan undefined***	**-**			**100 persen undefined undefined**	**110.789.100**						**-**	**250.000.000**	

	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan*	-			12 bulan	48.715.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo	-	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	48.715.500	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan*	-			3 Dokumen	40.628.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo	-	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	13.628.400	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	27.000.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*	-			2 laporan	21.445.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				2 Laporan	21.445.200	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	**38.395**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***	**-**			**100 persen**	**24.688.350**						**-**	**85.000.000**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	-			12 Bulan	24.688.350			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	24.688.350	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**4.891.167.031**							**5.958.716.698**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2025. Capaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belum mencapai hasil yang optimal sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan pelayanan kepada masyarakat pemohon, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan administrasi kependudukan perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai administrasi kependudukan. Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Rankhir Renja) ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholders* berkewajiban melaksanakan program - program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja (Rankhir Renja) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Kulon Progo,2Agustus 2024
Kepala Dinas,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. ASPIYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP 19680121 199603 2 001

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Bidang Anarembang, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: Pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 2024: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 25 Juli 2023

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : M. Hasan Asfari, SE. M.Si. NIP : 19730316 200212 1 005 Jabatan : Perencana Ahli Muda. Tanda Tangan :.....	1. Nama : Dewangga Agadhi NIP : 1987 1015 2011011 005 Jabatan : Analis perencanaan Tanda Tangan .....

Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Restu Dewandaru, S.E., M.M.
NIP.197630317 201001 1 006

DAFTAR HADIR

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten Kulon Progo

NO	Nama	Perangkat Daerah	Jabatan	TandaTangan
1.	Eka Novandi	Dinas Dukcapil	Pengolah Data dan Informasi	
2.	Dyah Nur P.	Dinas Dukcapil	Pengadministrasi Perkantoran	
3.	M. Hasan A	Bappeda	Perancana Ahli Muda	
4.	Muhammad Fakhri	Bappeda	Perancang ahli Pertama	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

SARAN dan REKOMENDASI

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda
PD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Secara garis besar Sistematika Penulisan Rancangan akhir renja Dinas Kependudukan dan Catatan sudah sesuai dengan Permendagri 86 2017
2. Hilangkan lampiran Peraturan Bupati no 25 tahun 2024
3. Bab 1 Pendahuluan
   - Perbaiki Narasi pada Latar Belakang
   - Landasan hukum sudah sesuai dan lengkap
4. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
   - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, tabel sudah sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 akan tetapi mohon kesusuaian Tahun agar di perhatikan
   - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah mohon tabel agar di perbaiki dan mohon dilengkapi dengan catatan analisis dan mohon kesesuaian Tahun di perhatikan
   - 2.3 Isu isu penting Penyelebgaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

     Tambahkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tantangan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, tantangandan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu isu penting
5. BAB III Tujuan dan Sasran Perangkat Daerah
   - 3.2 Tujuan dan sasaran OPD

     Agar disesuaikan dengan Renstra OPD
6. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   Sudah Sesuai
7. Bab V Penutup
   Tambahkan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Kulonprogo
the jewel of java

RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunnan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Renja Kementerian dalam Negeri, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan BKKBN.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Pembangunuan (RKPD) Tahun 2025 dan berdasar Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023-2026.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasaan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023- 2026;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah serta efisiensi dan distribusi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Renja 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berkut :

1. Menjabarkan rencana strategis 2023- 2025 ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran Perangkat Daerah.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat daerah melalui capaian kinerja program dan kegiatajakerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan informasi pembangunan.

4.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mendukung pencapaian sasaran nomor 4 "**Meningkatya derajat kesehatan masyarakat"** dan sasaran nomor 10 **"Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel."**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 melaksanakan 8 program dan 16 kegiatan terdiri dari 1 program dengan 6 kegiatan pendukung, 2 program dengan 2 kegiatan keistimewaan, serta 5 program dengan 8 kegiatan utama.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaiamana pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Capaian Ketahanan Keluarga	46,34%	61,23%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90,82%	93,23%
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100%	100%

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	69,82%	74,67%
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	82,80%	87,26%
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	68,97%	100 %
3.	Progam Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,85	0,7
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1,80	1,27
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	3,96	2,97
4.	Program Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	49,71%	55,96%
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	47,08%	55,90
5.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	27,80%	23,73%
6.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelmbagaan asli	76,44%	66,67%
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	54,53%	25,29%

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2023 : Rp 12.846.080.554
Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2023 : Rp 12.471.619.866 (97,09%)

Sasaran program yang tidak tercapai pada tahun 2023 yakni :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) angka idelanya adalah 2,1 untuk menuju angka ideal teresbut target dalam Renja 2023 adalah 1,80, namun capaian baru 1,27. Angka ini menunjukan umlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun) di Kulon Progo masih jauh dari ideal, sehingga pertumbuhan penduduk masih belum seimbang.
   Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi ini adalah meningkatkan KIE terhadap remaja untuk persiapan pernikahan dan KIE terhadap PUS untuk merencanakan kelahirannya.
2. Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) target 27,80 % tercapai 23,73%. Faktor penyebabnya adalah jumlah keluarga yang menghadiri Advokasi dan KIE di acara yang diselenggarakan kurang dari target. Animo masyarakat untuk menghadiri acara tersebut masih kurang sehingga yang hadir bias jadi orang yang sama untuk berbagai kesempatan. Langkah yang akan diambil ke depan adalah membuat acara KIE lebih inovatif dan menarik bagi peserta

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2023

SKPD:DINAS PMD DALDUK DAN KB

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							-										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**13,395.89**			**100.00**	**3,324.12**	**100.00**	**3,082.62**	**100.00**	**92.73**	**100.00**	**3,185.97**	**100**	**6,268.59**	100	46.79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa persuratan, ATK,Cetak Penggadaan, Bahan bacaan,Jasa pegawai	48	952.75			12	18.89	12	17.49	100.00	92.59	12	20.61	24	38.10	50	4.00

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		tidak tetap																
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-			12	103.32	12	100.35	100.00	97.13	12	116.27	24	216.62		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-			12	175.59	12	175.57	100.00	99.99	12	175.59	24	351.16		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	149	13.180.24			12	2,721.19	12	2,501.35	100.00	91.92	12	2,606.58	24	5,107.93	16.1073825	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	320.79			12	59.37	12	59.28	100.00	99.85	2	55.45	14	114.73	29.1666666	35.76

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	8	23.42			2	8.55	2	8.36	100.00	97.78	12	9.88	14	18.24	175	77.88
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	129.41			12	38.46	12	27.74	100.00	72.13	12	27.98	24	55.72	50	43.06
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	26.97			2	5.11	2	4.99	100.00	97.65	2	3.31	4	8.30	50	30.77
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	47.47			12	10.90	12	10.81	100.00	99.17	12	6.70	24	17.51	50	36.89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-			1	27.80	1	25.80	100.00	92.81	-	-	1	25.80		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	282	664.98			72	143.45	72	139.58	100.00	97.30	69	134.54	141	274.12	50	41.22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					-	-	-	-	-	-	1	14.00	1	14.00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	148	-			57	11.50	57	11.31	100.00	98.35	12	15.06	69	26.37	46.62 16216 2	

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Presentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**74.71**	**4.528.59**			**68.97**	**2,944.94**	**1.00**	**2,940.97**	1.45	99.87	**70.88**	**1,156.62**		4,097.59		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	396.37			3	1,250.69	3	1,247.19	100.00	99.72	3	298.59	6	1,545.78	50	389.98
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dan HasilFasilitasi BulanBhakti GotongRoyong Masyarakat	64	3.210.82			16	1,694.24	16	1,693.78	100.00	99.97	16	858.03	32	2,551.81	50	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Presentase penguatan kelembagaan desa**	**76.43**	**9.144.95**			**69.82**	**2,109.94**	**74.67**	**2,024.89**	106.95	95.97	**72.02**	**2,199.08**		4,223.97		
		Presentase peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	**89.62**				**82.80**		**87.26**		105.39		**84.74**					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	348	285.20			87	52.58	87	51.89	100.00	98.69	87	34.12	144	86.01	41.3793103 4	30.16
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219.60			87	19.79	87	19.71	100.00	99.60	87	19.55	144	39.26	41.3793103 4	17.88
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732.40			87	1,667.66	87	1,590.74	100.00	95.39	87	1,806.09	144	3,396.83	41.3793103 4	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	348	411.80			87	68.79	87	68.05	100.00	98.92	87	55.05	144	123.10	41.3793103 4	29.89
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324.60			40	54.56	40	51.90	100.00	95.12	4	51.82	44	103.72	27.5	31.95
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571.90			2	124.29	2	121.47	100.00	97.73	1	108.66	3	230.13	37.5	40.24

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179.80			87	41.62	87	40.99	100.00	98.49	87	35.11	144	76.10	41.3793103 4	42.32
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (13 Dokumen)	52	367.90			13	80.65	13	80.13	100.00	99.36	13	88.68	26	168.81	50	45.88
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	**Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**65.52**	**1.875.00**			**31.03**	**300.00**	**25.29**	**296.54**	81.50	98.85	**42.53**	**390.36**		686.90		
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																	
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-			1	300.00	1	296.54	100.00	98.85	1	390.36	2	686.90		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli**	**91.67**	**4.984.41**			**42.53**	**1,138.00**	**66.67**	**1,117.58**	156.76	98.21	**59.48**	**1,362.14**		2,479.72		
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kulon Progo)	Lurah dan Pamong Kalurahan yang memahami tentang Kelembagaan Asli	54	-			18	1,138.00	18	1,117.58	100.00	98.21	2	1,362.14	20	2,479.72	37.03703704	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		-					**-**						-				
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana**	**51.18**	**20.713.72**			**49.71**	**3,556.05**	**55.96**	**3,427.04**	112.57	96.37	**50.20**	**3,510.98**		6,938.02		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Advokasi dan IKE Program KKBPK	**51.40**				**47.08**		**55.90**		118.73		**48.48**					
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana	-	-			6	163.94	6	161.89	100.00	98.75	1	449.44	7	611.33		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-			1	150.00	1	149.43	100.00	99.62	1	150.00	2	299.43		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-			1	156.00	1	155.88	100.00	99.92	1	177.60	2	333.48		
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-			1	577.80	1	576.49	100.00	99.77	1	509.80	2	1,086.29		
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-			1	80.00	1	79.72	100.00	99.65	1	140.00	2	219.72		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Avokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	24	4.669.42			-	-	-	-			-	-	-	-		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-			1	6.00	1	6.00	100.00	100.00	-	-	1	6.00		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-			88	176.00	88	176.00	100.00	100.00	176.00	264.00	264	440.00		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	-	-			1	37.80	1	37.80	100.00	100.00	1	42.33	2	80.13		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-			4,618	1,645.45	3,379	1,528.22	73.17	92.88	3,394	1,206.74	6,773	2,734.96		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218.08			12	44.62	12	44.55	100.00	99.84	1	39.86	13	84.41	27.0833333	38.71

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	15.780.05			1	87.96	1	81.91	100.00	93.12	1	112.87	2	194.78	50	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta orgnanisasi kemasyyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanadan pembinan kesertaan Ber-KB	8	46.08			2	18.485	2	18.39	100.00	99.49	1	6.40	3	24.79	37.5	53.80
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	-	-			1	9.00	1	8.95	100.00	99.44	1	3.77	2	12.72		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Terlaksanakannya Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di 12 Balai Penyuluh KB 9 Kali	-	-			26	403.00	26	401.82	100.00	99.71	88	408.170	114	809.99		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Presentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**28.73**	**439.10**			**27.80**	**1,901.90**	**23.73**	**1,792.53**	85.36	94.25	**28.23**	**1,872.17**		3,664.70		834.59
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-			20	360.00	20	251.69	100.00	69.91	25	300.00	45	551.69		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejateraan Keluarga (BKB. BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang	-	-			10	1,442.70	10	1,442.70	100.00	100.00	-	-	10	1,442.70		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4	703.49			1	56.52	1	56.30	100.00	99.61	4	48.92	5	105.22	125	14.96
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	703.49			1	42.68	1	41.84	100.00	98.03	1	80.55		122.39		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pengendalian Penduduk	**Indeks laju pertumbuhan penduduk**	**1.00**	**212.32**			**0.85**	**292.32**	**0.61**	**290.81**	71.76	99.48	**0.90**	**286.78**		577.59		
		Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	**2.10**				**1.80**		**1.48**		82.22		**1.90**					
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR)	**3.29**				**3.93**		**4.53**		115.27		**3.65**					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lapoan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-			1	64.20	-	63.95		99.61	-	-				
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah LaporanPencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	73.50			2	119.82	2	118.63	100.00	99.01	1	134.85		253.48		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-			1	72.00	1	71.99	100.00	99.99	1	115.20		187.19		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	48	138.82			12	36.30	12	36.24	100.00	99.83	12	36.73		72.97		

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor pendorong yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, peran kader pembangunan masyarakat di desa, serta penyuluh KB di lini lapangan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah adalah terbatasnya anggaran daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan daerah berupa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD):

a. Cakupan Ketahanan keluarga diukur melalui penghitungan sebagai berikut :
*((Peserta KB Aktif / PUS) * 40%) + ((Jumlah PA yang menjadi anggota kelompok UPPKA / Jumlah Peserta KB Aktif) * 30%) + ((Jumlah PKK Aktif, LPMKal Aktif, Posyandu Kalurahan Aktif / Jumlah PKK Aktif, LPMKal Aktif, Posyandu Kalurahan)* 30%)*

b. Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemrintahan Desa diukur melalui penghitungan sebagai berikut :
((Jumlah Produk Hukum Kalurahan (3 Produk Hukum) dilaporkan tepat waktu 7 hari setelah ditetapkan / Jumlah Produk hukum wajib kalurahan) + (Jumlah realisasi penyerapan ADD,DD. Pajak, dan Restribusi / Jumlah ADD,DD. Pajak, Restribusi) + (jumlah Kalurahan tertib Pelaporan asset / Jumlah Kalurahan)) / 3

c. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah

Tabel. 2.4

Kinerja Pelayanan Daerah 2023-2026

No	Indikator (IKU PD)	SN	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan Ketahanan keluarga	-	-	46,34 %	47,25 %	48,16 %	49,07 %	61,23 %	61,45 %	61,55 %	Dapat tercapai dengan dukungan anggaran DAK yang cukup besar
2	Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemrintahan Desa	-	-	90,82 %	92,96 %	95,27 %	98,34 %	93,23 %	94 %	94%	Dapat tercapai bila reformasi birokrasi kalurahan berhasil
3	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diusahakan untuk dapat memenuhi layanan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1. Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan.
   Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan :
   - Capaian Total Fertility Rate (TFR) masih jauh dari target, menandakan pertumbuhan penduduk belum seimbang
   - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan belum optimal.
2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
   - partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan sudah bagus tinggal mengeksplorasi inovasi dari anggotanya.
   - Lembaga ekonomi desa perannya belum optimal dalam perekonomian desa (data tahun 2023 menunjukkan bahwa Bumdes dalam kondisi baik ada sebanyak 56 Bumdes dari 87 Bumdes).
3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
   - Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan kesiapan perangkat desa kurang.
   - Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mencakup lingkup yang luas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan sebagai berikut:

- Meningkatnya perkembangan teknologi informasi, berdampak pada perubahan perilaku dan budaya di masyarakat yang ditandai menurunnya peran dan fungsi keluarga.
- Pelaksanaan program KB semakin berat tantangannya karena kesadaran masyarakat untuk ber-KB masih rendah (8 fungsi keluarga, terlebih reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan kurang dipahami).
- Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum dioptimalkan perannya dalam pembangunan desa sementara itu dana pembangunan di desa semakin besar.

Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun mendatang :

- Banyak terdapat lembaga di masyarakat yang bisa disasar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa usulan program pemberdayaan.
- Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan Dana Desa.

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana keluarga sejahtera selanjutnya dipadukan dengan tugas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, maka isu isu strategis yang dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- Ketahanan keluarga perlu ditingkatkan dengan peningkatan pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja) dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS dan KAKB.
- Program-program pemberdayaan masyarakat bertujuan agar dapat menurunkan angka kemiskinan.
- Peran lembaga ekonomi dan masyarakat desa masih perlu ditingkatkan.
- Perubahan regulasi pemerintahan desa yang dinamis dan SDM perangkat desa sebagian besar masih rendah perlu pembinaan dan pendampingan.

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD berdasarkan analisis kebutuhan perangkat daerah disajikan pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**10.922.846,895**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				8.841.967.707,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.422.447.707,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				171.265.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				171.256.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten		171.265.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten		171.256.000,00	
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		171.265.000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		171.256.000,00	
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		171.265.000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		171.256.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN				7.691.573.588	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN				6.885.085.607,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DESA					DESA					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata prosentase pencapaian program pada massing masing perangkat daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata prosentase pencapaian program pada massing masing perangkat daerah		3.617.039.330,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat		14.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat		17.205.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.287.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	6.918.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan		3.072.944.315	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan		3.092.466.482,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.001.447.715	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.030.835.482,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57.633.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	55.447.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.863.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.184.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi umum		57.0000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi umum		28.756.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.756.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor		625.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor		6.012.300,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.012.300,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran		372.740.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran		327.194.798,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.093.762,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.660.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.012.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.080.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.088.236,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milih daerah yang dipelihra		361.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milih daerah yang dipelihra		145.404.550,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	125.227.850,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	21.150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	20.176.700,00	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase penguatan kelembagaan desa Persentase Peningkatan Administrasi PemerintahanDesa		2.229.071.740	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase penguatan kelembagaan desa Persentase Peningkatan Administrasi PemerintahanDesa		2.138.247.077,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		2.229.071.740	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		2.138.247.077,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	87 Dokumen	37.529.580	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	87 Dokumen	29.760.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87 Dokumen	59.900.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87 Dokumen	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 Dokumen	1.690.340.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 Dokumen	1.827.089.177,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	87 Dokumen	65.114.800	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	87 Dokumen	34.480.500,00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 Laporan	57.066.570	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 Laporan	24.890.100,00	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	108.662.300	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	65.511.100,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	87 Dokumen	39.504.190	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	87 Dokumen	30.182.700,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta	13 Dokumen	170.954.300	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta	13 Dokumen	106.333.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lomba Desa dan Kelurahan			serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lomba Desa dan Kelurahan			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanLembaga Adat, Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat		1.721.421.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanLembaga Adat, Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat		1.129.799.200,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.721.421.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.129.799.200,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Dolumen	674.792.900	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	278.673.600,00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	1.046.628.500	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	851.125.600,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				366.106.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Spesific FertilityRate(ASFR)			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Spesific FertilityRate(ASFR)		57.764.400,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk		57.764.400,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	42.696.440	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	23.764.400,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	38.676.100	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	34.000.000,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK		208.341.900,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Laporan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK		128.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Laporan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK		97.212.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	128.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	97.212.700,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB		350.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB		102.370.200,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	34.370.200,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	250.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	68.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB		8.759.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB		8.759.000,00	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	2 Organisasi	8.759.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	2 Organisasi	8.759.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kesertaan Ber-KB			Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kesertaan Ber-KB			
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Peningkatan Pemberdayaaandan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Peningkatan Pemberdayaaandan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		99.999.800,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Laporan Pembinan Ketahanan Keluarga		208.622.100	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Laporan Pembinan Ketahanan Keluarga		99.999.800,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	133.536.500	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	44.774.800,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	75.085.600	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	55.225.000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.419.520.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH				1.419.520.000,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Jumlah Laporan Hasil Penataan kelembagaan dan katatalaksanaan keistimewaan			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Jumlah Laporan Hasil Penataan kelembagaan dan katatalaksanaan keistimewaan		1.419.520.000,00	
	Penataan Kelembagaan		Jumlah dokumen hasil Penerapan			Penataan		Jumlah dokumen hasil Penerapan		1.419.520.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi			Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi			
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		1.521.300.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		1.419.520.000,00	
				JUMLAH	**10.922.846,895**				**JUMLAH**	**8.841.967.707,00**	

Dikarenakan terbatasnya anggaran maka beberapa program kegiatan yang sedianya akan dikembangkan menjadi minimalis dan hanya bisa melakukan kegiatan yang bersifat program nasional dan wajib dilaksanakan seperti Lomba Desa, Lomba Poyandu, BBGRM, TMMD dan berbagai lomba kader bina keluarga.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah beberapa usulan program kegiatan yang ditujukan kepada dinas dari masyarakat maupun lembaga masyarakat diakomodir yang sesuai dengan bidang ketugasan dan ditindaklanjuti. Beberapa usulan sudah masuk ke dinas antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa				
1.	Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1. Banyuroto 2. Banjarsari 3. Tuksono 4. Gotakan	Rabat beton, Rehab Pos Ronda	4 paket	Sudah verifikasi lapangan dan sudah tertuang dalam berita acara
2.	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan TP PKK Kabupaten	Fasilitasi kegiatan TP PKK Kabupaten	Rp. 200.000.000,-	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045 yakni menjadi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dengan ageda pembangunan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Trasnformasi Sosial
b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
c. Mewujudkan transformasi Tata Kelola
d. Memantapkan Supremasi Hukum**,** Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
f. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
g. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
h. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Sasaran Utama RPJMN Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara dengan Negara Maju
2. Kemiskinan di Angka 0 Persen dan Ketimpangan Berkurang
3. Meningkatnya Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Meningkat
5. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju *Net Zero Emission*

Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakt Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah turut serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan dan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMD Dalduk dan KB 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Capaian Ketahanan Keluarga	48,16%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	95,27%
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100 %

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Progam Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	74,22%
		Persentasse Penguatan Kelembagaan Desa	%	86,87%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	72,80%
3	Program Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	%	50,68%
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	%	49,92%
4	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduuk	Angka	1,00
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,00
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Rate /ASFR)	Angka	3.36
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	28,31%
6	Program Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata prosentase pencapaian program pada masing masing perangkat daerah	%	100
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	78,44%
8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	%	54,02%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 program dan 8 kegiatan dan didukung dengan program kegiatan di setiap OPD sebanyak 1 program dan 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Penduduk
   a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
   a. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						8.841.967.707,00							8.688.970.558,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.422.447.707,00							8.688.970.558,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						171.256.000,00							200.000.000,00	
1	2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-	-			-	171.256.000,00						-	200.000.000,00	
	2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	171.256.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	
	2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
							0				0 0	171.256.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		200.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.885.085.607,00							8.050.580.558,00	
2	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-			-	3.617.039.330,00						-	4.665.047.550,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.205.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	-	21.349.710,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.287.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		7.735.050,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.918.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan dan. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		13.614.660,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.092.466.482,00			-	-	-	-	3.874.264.040,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.030.835.482,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.779.980.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	55.447.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.636.040,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6.184.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.648.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	28.756.000,00			-	-	-	-	45.623.480,00	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.756.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.623.480,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.012.300,00			-	-	-	-	0,00	
	2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.012.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	327.194.798,00			-	-	-	-	519.810.320,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.093.762,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.405.160,00	
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.012.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	187.088.236,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.405.160,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.404.550,00			-	-	-	-	204.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	125.227.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		157.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	20.176.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	DPMDPPKB
3	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	2.138.247.077,00						-	2.310.533.008,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	2.138.247.077,00			-	-	-	-	2.310.533.008,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				87 Dokumen	29.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.930.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	1.827.089.177,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.685.313.008,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				87 Dokumen	34.480.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				40 Laporan	24.890.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	65.511.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	30.182.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DPMDPPKB
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				13 Dokumen	106.333.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.290.000,00	DPMDPPKB
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.129.799.200,00						-	1.075.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.129.799.200,00			-	-	-	-	1.075.000.000,00	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	278.673.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DPMDPPKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	851.125.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DPMDPPKB
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						366.106.100,00								438.390.000,00	
5	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	57.764.400,00						-	120.000.000,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.764.400,00			-	-	-	-	120.000.000,00	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	23.764.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DPMDPPKB
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	34.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DPMDPPKB
6	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	208.341.900,00						-	207.290.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	97.212.700,00			-	-	-	-	65.000.000,00	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada				6 Organisasi	97.212.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DPMDPPKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Stakeholders dan Mitra Kerja													
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.370.200,00			-	-	-	-	111.000.000,00	
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	34.370.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DPMDPPKB
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	68.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DPMDPPKB
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	8.759.000,00			-	-	-	-	31.290.000,00	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	8.759.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.290.000,00	DPMDPPKB
7	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	99.999.800,00						-	111.100.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	99.999.800,00			-	-	-	-	111.100.000,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	44.774.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.100.000,00	DPMDPPKB
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi				1 Laporan	55.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DPMDPPKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Keluarga/UPPKS)													
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.419.520.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.419.520.000,00							0,00	
8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	1.419.520.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	1.419.520.000,00			-	-	-	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	1.419.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DPMDPPKB
							J U M L A H	**8.841.967.707,00**							**8.688.970.558,00**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 serta RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan dikelola dengan sangat efisien karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga hanya kegiatan yang inti dan minimalis saja yang dapat dilakukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Pengasih, 2 Agustus 2024
Plt. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB

Drs.JAZIL AMBAR WAS'AN
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196612131992031006

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jalan Sugiman Margosari Pengasih Kulon Progo
Telp : (0274) 773917, Fax : (0274) 773917
Website : https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id, Email : pemberdayaan@kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 42 /2024

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban capaian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang tim penyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan tim penyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

- Merumuskan program, kegiatan sub kegiatan sesuai dengan indikator kinerja tugas dan fungsi bidang;
- Merumuskan indikator kinerja OPD, program dan kegiatan;
- Merumuskan tujuan, strategi dan kebijakan OPD dalam mencapai tujuan OPD dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengasih
Pada tanggal : 08 Januari 2024
KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Drs. ARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19700701 199603 1 006

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor : 42/2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Koordinator
3	Sub Koordinator Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota

KEPALA,

Drs. ARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19700701 199603 1 006

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Litbangdal, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 24 Juli 2024

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : FIDIASTUTI, SKM., MM NIP : 197006251994032003 Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanda Tangan :.....	1. Nama : DARMAWATI KUSUMADEWI, S.E. NIP : 197111071996032005 Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanda Tangan .....

Mengetahui

Koordinator

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.

NIP. 197603172010011006

SARAN dan REKOMENDASI
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Litbangdal, Bappeda Kabupaten Kulon Progo
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pada Bab I Pendahuluan, Untuk Landasan Hukum ditambahkan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.
2. Pada Bab II,
    a. Untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ditambahkan narasi untuk Realisasi program, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
    b. Untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ditambah : Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan, Untuk Tabel disesuaikan dengan tabel T-C.30.
    c. Ditambahkan Review terhadap RKPD dan tabel T-C.31.
    d. Untuk Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ditambahkan penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, ditambahkan Tabel T-C.32.
3. Pada Bab III, untuk ditambahkan telaahan terhadap kebijakan nasional, dan untuk Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah agar ditambahkan narasi Pemerintah daerah.
4. Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 setelah diverifikasi dan direvisi agar disampaikan ke Inspektorat Daerah untuk direviu.

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan umum, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dijalankan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai.

Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 02 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KULON PROGO

DRS. ARIADI, M.M.

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP.19700701 199003 1006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI ……..... ii

BAB I PENDAHULUAN ……..... 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Landasan Hukum …… 2

1.3. Maksud dan Tujuan ……. 4

1.4. Sistematika Penulisan ……... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 …….. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..….. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……. 20

2.4. Review terhadap RKPD ……... 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……. 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.. 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……. 37

3.3 Program dan Kegiatan …….. 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …… 41

BAB V PENUTUP ……..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja, dimana Rencana Kerja dimaksud merupakan bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja Perangkat Daerah dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan, sehingga diharapkan perencanaan program kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Perhubungan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian dan Renja Dinas Perhubungan DIY.

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kulon Progo mengintruksikan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra & Evaluasi Kinerja PD serta Isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi;
3. Organisasi Perangkat Daerah atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah membahas Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum OPD/Gabungan OPD selanjutnya disusun menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
g. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
j. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026;
r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten kulon Progo;
s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan
   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025;
   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, visi pembangunan urusan Perhubungan adalah: Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Selamat, Tertib dan Lancar yang Menjunjung Etika dan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo.

Misi yang akan dicapai pada urusan Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2023 melaksanakan 2 urusan, 3 program, 15 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   - 1.1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
     - 1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
     - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
   - 2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

2.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

2.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

3.3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

3.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

3.6. Persetujuan Hasil Analisi Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

3.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 17.630.849.235,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 16.572.344.840, (93,99%).

Secara khusus, hambatan dan kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan dalam pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten realisasi 99,94%, tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi 98,97%, tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA:
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi 95,52% tidak ada kendala, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa Belanja Insentif Wakil Kepala Daerah dan pembayaran gaji sesuai keadaan pegawai pada saat pelaporan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi 99,62 %.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi 98,64%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi 96,32%, Realisasi Keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa belanja pengadaan peralatan kantor (alat pembersih, perkakas kayu, rak penyimpanan, perangkat komputer, alat pendingin);
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 94,57%, Realisasi Keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN (hal ini di karenakan adanya pegawai non ASN yang diangkat menjadi ASN di bulan Juli 2023).
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 93,19 %,Realisasi Keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya selisih anggaran adalah selisih harga di DPA dengan belanja tagihan listrik kantor dan PJU, tagihan air, tagihan telpon kantor dan adanya sisa belanja pemeliharaan bangunan kantor dan bangunan tempat parkir kantor ;
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 95,03%, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa Belanja Pengadaan serta adanya Sisa Belanja Bahan/Material Pemeliharaan LPJU dan perlengkapan jalan.
10. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C realisasi 99,79%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, realisasi 99,62%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
12. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, realisasi 91,86 %, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa belanja Jasa tenaga perhubungan bagi non ASN (hal ini di karenakan adanya pegawai non ASN yang diangkat menjadi ASN di bulan Juli 2023), sisa belanja pemeliharaan alat pengujian kendaraan;
13. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 97,67%, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;

14. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 98,60%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
15. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 92,54%, Realisasi Keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa belanja BBM operasional bus sekolah dan belanja pemeliharaan bus sekolah .

Pengukuran Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2023 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	16,82	18,65

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Pesentase Pelayanan Sarana Prasarana perhubungan	73,42	80,42
	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	49,13	50,47

Capaian sasaran strategis "Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan" :

- Diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 16,82%; sampai dengan akhir bulan Desember terealisir 18,65% atau 110,87% dari target.

- Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di ukur dengan 2 indikator kinerja program yaitu : Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan dengan realisasi sebesar 80,42% dari target yang diharapkan sebesar 73,42 % dan Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan dengan realisasi sebesar 50,47 % dari target yang diharapkan sebesar 49,13 %.

Hal-hal yang menyebabkan terpenuhinya capaian target dan tidak terpenuhinya capaian target :

- Adanya tambahan anggaran perubahan APBD tahun 2023 untuk pembangunan dan penyediaan perlengkapan jalan, anggaran dapat meningkatkan pencapaian target tersedianya perlengkapan jalan yang ada.

- Masih terdapat fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelayanan pada terminal tipe C yang belum dapat dilengkapi sehingga mengakibatkan capaian penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia belum memenuhi target.

- Pada tahun 2023 pelaksanaan pengawasan jalan kabupaten dilaksanakan secara intensif dan terpadu dengan dilaksanakannya operasi yustisi dan PPNS sehingga capaian kegiatan dapat melebihi target operasi pengawasan yang sudah ditentukan.

- Adanya anggaran APBD 2023 untuk penyediaan fasilitas parkir tepi jalan umum, dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dalam menata dan menertibkan parkir khususnya di tepi jalan sehingga dapat mencapai target bahkan melebihi target dalam capaian jumlah titik parkir dan fasilitas yang ada.

Capaian target kinerja program Renstra Dinas Perhubungan ini tentunya berimplikasi terhadap capaian target Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat Kulon Progo. Capaian kinerja program urusan perhubungan memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain adalah mengusulkan program/ kegiatan prioritas serta penambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah diupayakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang paling penting adalah perlu disusunnya kajian-kajian terkait dengan transportasi darat untuk mendukung dan mengantisipasi perkembangan pembangunan yang sedemikian pesat di Kabupaten Kulon Progo seperti keberadaan bandara YIA, dilaksanakannya pembangunan tol YIA – Yogyakarta – Bawen dan Yogyakarta – Solo diharapkan akan menimbulkan multiplier effect dan seharusnya menjadi acuan pembangunan bidang Perhubungan ke depan. Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus dioptimalkan dan diupayakan peningkatannya pada tahun yang akan datang.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah urusan Perhubungan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja Capaian program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1	**3**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	**3**	**13**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**									
1	3	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten									
1	3	13	5.02	4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Cermin Lalu Lintas	114		26	26	100	-		
						Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	43		9	9	100	-		
						Rambu Lalu Lintas	250		55	55	100	-		
						Pagar Pengaman Jalan/Guardrail	2,076		416	416	100	-		
2	**15**				**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**									
2	**15**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**		**100.00**			**100.00**		

2	15	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-								
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		2	2	100	2		
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72		18	18	100	18		
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-								
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2968		742	704	95	742		
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48		12	12	100	12		
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	56		14	14	100	14		
2	**15**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2	15	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20		5	5	100	5		
2	**15**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	15	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		1	1	100	1		
2	**15**	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*48*		*12*	12	100	*12*		
2	15	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

2	**15**	1	2.07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91		4	20	500	-		
2	15	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	**15**	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48		12	12	100	4		
2	15	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8		2	2	100	2		
2	**15**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-								
2	15	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48		12	12	100	12		
2	**15**	1	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	*228*		*76*	77	101	*30*		
2	**15**	**2**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan**	**81.67**		**73.42**			**76,17**		
						Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan	**69.77**		**49.13**			**54,48**		
2	**15**	**2**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada**								
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun	800		190	116	61	201		
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	-		45	56	124	45		

2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan			3487	3487	100	3548		
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		312	313	100	212		
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia**	**16**		**4**	4	100	**4**		
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	16		4	4	100	4		
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata**	***180***		***45***	**77**	**171**	***50***		
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan	16		4	4	100	4		
2	**15**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan yang Diuji**	8290		8290			8290		
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	*17,060*		4,265			4,265		
2	**15**	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	81		21	21	100	21		
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi**	9,600		2,400			2,400		
2	**15**	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16		4	4	100	4		

2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*12*		*3*	3	100	*3*		
2	**15**	**2**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**	**Monitoring dan Evaluasi Andalalin, Rekomendasi Andalalin**	8		2	2	100	2		
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	*8*		*2*	1	100	*2*		
2	**15**	**2**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Load Factor,**	8		2	2	100	2		
						Terlaksananya Operasional Bis Sekolah	8		2	2	100	2		
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12		3	3	100	3		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
2. Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan.
3. Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase tertib lalu lintas jalan perhubungan.

Berikut ini capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
A	**Indikator Kinerja RPD**											
	IKU berdasarkan Renstra 2023 – 2026 : **Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan**			16,82	17,43	18,04	18,85	18,65	18,37	18,04	18,85	
1	Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan											
	Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan			73,42	76,17	78,92	81,67	80,42	88,08	78,92	81,67	
2	Cakupan tertib lalu lintas jalan											
	Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase tertib lalu lintas jalan			49,13	54,48	61,53	69,77	50,47	34,75	61,53	69,77	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesinambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesinambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar kawasan Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada empat. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

Pembangunan dimasa yang akan datang menghadapi banyak hambatan dan tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan .

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

a. Keterbatasan anggaran yang ada pada urusan Perhubungan;
b. Fasilitas pengaturan, pengawasan dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;

e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah adalah dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kulon Progo. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan harus sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
b. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
c. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah adalah:

a. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai dalam pelaksanaan tugas.
b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.

d. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan institusi terkait.
e. Rencana dan pelaksanaan pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo, berupa pembangunan Jalan tol Yogyakarta-YIA, sebagai sarana prasarana pendukung Bandara Kulon Progo.

Berdasarkan isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kebijakan teknis berikut :

a. Meningkatkan perencanaan teknis bidang perhubungan dalam rangka optimalisasi kebijakan teknis bidang perhubungan.
b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi sesuai tugas dan fungsinya.
c. Peningkatan peran Forum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d. Meningkatkan pelayanan umum dibidang perhubungan
e. Melaksanakan kajian-kajian teknis dibidang perhubungan dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah aerotropolis.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD yang memuat :

a) rancangan kerangka ekonomi daerah;
b) program prioritas pembangunan daerah dan;
c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunanRencana KerjaPerangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Proses pembandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap tahapan perencanaan dan kesesuaian kemampuan anggaran. Rencana awal prioritas pembangunan di

Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan hasil kajian evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Hasil telaahan terhadap RKPD Tahun 2025 bahwa belum semua usulan program kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat terakomodir, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada tahun 2025. Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 setelah melewati beberapa tahapan perencanaan maka hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Review Terhadap RKPD/Renstra OPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**5,468,463,300**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG**				**-**	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**				**5,468,463,300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG**				**-**	Sesuai Hasil Desk, program/ Kegiatan DAIS Dinas Perhubungan tidak muncul/dihapus
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan danKadipaten				**5,468,463,300**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan danKadipaten**				**-**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis PerbukitanMenoreh	Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan Menoreh	Pembangunan LPJU sebanyak 160 unit di Perbukitan Menoreh	160 Unit	3.358.150.550	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang StrategisPerbukitan Menoreh	Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan menoreh	-	-	-	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	Pembangunan LPJU sebanyak 100 unit di Astana Girigondo	100 Unit	2.110.312.750	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	-	-	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**20,248,429,794**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**15,742,934,443**	

II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**13,987,855,894**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**				**9,798,412,943**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**39,155,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**30,512,700**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,520,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,937,500	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	24,635,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	14,575,200	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,634,691,620**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,242,758,730**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bul an	3,530,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bul an	3,173,131,530	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	12 dokumen	84,518,500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	54,973,800	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	14 Laporan	20,173,120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPDdan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	14 Laporan	14,653,400	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,200,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,045,500**	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai	5 dokumen	2,200,000	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	2,045,500	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**88,584,374**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**78,583,900**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31,869,568.50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	27,747,900	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	56,714,805	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	12 laporan	50,836,000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**3,700,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**68,242,700**	

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	3.700,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	68,242,700	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6,021,663,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**5,961,452,513**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5,855,888,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5,816,484,725	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	165,775,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	144,967,788	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**501,561,300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**414,816,900**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	399,722,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	36 Unit	346,872,400	
2	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	69 Unit	101,838,600	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunanlainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	69 Unit	67,944,500	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**6,260,573,900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**				**5,944,521,500**	

						(LLAJ)					
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**4,186,752,900**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**5,723,752,900**	
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PrasaranaJalan di Jalan Kabupaten/K otayang Terbangun	179 unit	3,107,289,900	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Prasarana Jalandi Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun	179 unit	4,607,289,900	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	45 unit 144 m	506,000,000	Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yangTersedia	45 unit 144 m	506,000,000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PrasaranaJalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3548 Unit	353,463,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3548 Unit	383,463,000	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	212 Unit	220,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah PerlengkapanJalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	212 Unit	227,000,000	
2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**315,000,000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**435,000,000**	
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	315,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama danPendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	435,000,000	
3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**315,000,000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**345,000,000**	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny aFasilitas Parkir Kewenangan	4 laporan	315,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan danTerbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan	4 laporan	344,455,000	
4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**400,500,000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**300,915,200**	
1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotoryang Terdaftar	4.265 unit	315,000,000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotoryang Terdaftar	4.265 unit	188,049,600	
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21 Unit	85,500,000	Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21 Unit	112,865,600	
5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**676,246,000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**637,052,500**	
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota	4 laporan	400,300,000	Penataan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penataan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk JaringanJalan Kabupaten/K ota	4 laporan	353,396,400	

2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	3 laporan	275,946,000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas PelaksanaanKebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	3 laporan	283,656,100	
6	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**21,400,000**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**21,043,000**	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalinyang Ditetapkan	2 dokumen	21,400,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 dokumen	21,043,000	
7	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**345,675,000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**334,846,100**	
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K	3 laporan	345,675,000	Pengendalian dan Pengawasan KetersediaanAngkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K	3 laporan	334,846,100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara *bottom up* sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari dusun, kalurahan dan kapanewon telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Forum OPD tahun 2025 tingkat Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang OPD Kabupaten di Kecamatan serta usulan masyarakat melalui perwakilan di DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di semua tingkatan telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Masalah pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2025.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Kulon Progo urusan perhubungan sebagaimana Tabel 2. 6

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kapanewon Temon	Pembangunan LPJU	6 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
		Kapanewon Wates	Pembangunan LPJU	111 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	2 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Panjatan	Pembangunan LPJU	19 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	11 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Galur	Pembangunan LPJU	30 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Lendah	Pembangunan LPJU	324 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
		Kapanewon Sentolo	Pembangunan LPJU	242 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Pengasih	Pembangunan LPJU	238 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	2 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Kokap	Pembangunan LPJU	59 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	4 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon

		Kapanewon Nanggulan	Pembangunan LPJU	72 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	2 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Girimulyo	Pembangunan LPJU	60 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Samigaluh	Pembangunan LPJU	100 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
		Kapanewon Kalibawang	Pembangunan LPJU	26 titik	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pembangunan LPJU	7 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kapanewon Wates	Pengadaan Perlengkapan Jalan	5 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
		Kapanewon Galur	Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
		Kapanewon Lendah	Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Pengasih	Pengadaan Perlengkapan Jalan	8 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Kokap	Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Nanggulan	Pengadaan Perlengkapan Jalan	12 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD

			Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Girimulyo	Pengadaan Perlengkapan Jalan	3 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD
			Pengadaan Perlengkapan Jalan	1 usulan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kapanewon
		Kapanewon Samigaluh	Pengadaan Perlengkapan Jalan	5 unit	Usulan Masyarakat melalui Pokir DPRD

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional pada setiap tahun tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sesuai Peraturan Menteri perhubungan Nomor 80 tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) agenda baru Kementrian Perhubungan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional, yaitu :

a. Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata;
b. Penguatan Rantai logistic;
c. Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
d. Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Kebijakan Umum Kementrian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2020-2024) meliputi strategi sebagai berikut :

a. Terwujudnya konektivitas Nasional;
b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
c. Meningkatnya keselamatan transportasi;
d. Meningkatnya kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
e. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
f. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan ;
g. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
h. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan. Hal ini mempertegas peran Dinas Perhubungan yang merupakan Perangkat Daerah namun mempunyai peran penting dalam menjalankan dan mensukseskan program-program nasional di daerah terutama dalam bidang perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah : Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan;

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan	Indeks layanan Infrastruktur Perhubungan	18,04 %

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Sarana Prasarana Perhubungan	78,92 %
		Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	61,53 %

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah setiap perangkat daerah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan di masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak lepas dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan

daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka di tahun 2025 Dinas Perhubungan mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 Program yang terdiri atas 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 .

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

   1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

3.6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

3.7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian , kajian usulan program / kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran , maka di tahun 2025 Dinas Perhubungan mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023-2026,Rencana KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 Program yang terdiri atas 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp. 15.742.934.443,00. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan ini mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 .

Rencana program Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dibidang perhubungan. Rumusan rencana kerja program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten dan APBN , secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut;

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**15,742,934,443.00**							**20,885,973,800.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15,742,934,443.00**							**20,885,973,800.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15,742,934,443.00**							**20,885,973,800.00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**9,798,412,943.00**						**-**	**14,439,205,900.00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			21 dokumen	30,512,700.00			-	-	-	-	41,555,600.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,937,500.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16,920,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	14,575,200.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24,635,600.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	3,242,758,730.00			-	-	Laporan keuangan	-	3,662,691,500.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3,173,131,530.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		3,570,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54,973,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		72,518,500.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14,653,400.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		20,173,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			5 dokumen	2,045,500.00			-	-	JFT Penguji Kendaraan Bermotor	-	2,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	2,045,500.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	JFT Penguji Kendaraan Bermotor		2,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum PerangkatDaerah*	-			12 laporan	78,583,900.00			-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi	-	92,034,300.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,747,900.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi		31,869,500.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50,836,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi		60,164,800.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			8 unit	68,242,700.00			-	-	-	-	4,111,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	68,242,700.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,111,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah*	-			6 Laporan	5,961,452,513.00			-	-	-	-	6,027,663,200.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	5,816,484,725.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,855,888,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	144,967,788.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171,775,200.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset dalam kondisi baik*	-			64 unit	414,816,900.00			-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor	-	501,561,300.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	346,872,400.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor		399,722,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	67,944,500.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor		101,838,600.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan Persentase Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan***	**-**			**61,53 % 78,92 %**	**5,944,521,500.00**						**-**	**6,446,767,900.00**	

	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada*	-			10154 Unit	3,901,615,500.00			-	Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 5. Peningka tan Infrastr	Perlengkapan Jalan	-	4,223,752,900.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				179 Unit	2,813,589,100.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 5. Peningka tan Infrastr	Perlengkapan Jalan		3,107,289,900.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	494,550,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		506,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3548 Unit	376,184,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		383,463,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				212 Unit	217,290,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		227,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)*	-			4 unit	404,594,200.00			-	-	Sarana Prasana Terminal Tipe C	-	435,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	404,594,200.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasana Terminal Tipe C		435,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata*	-			55 titik	344,455,000.00			-	-	Penyelenggar aan Parkir Tepi Jalan Umum	-	345,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	344,455,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyelenggar aan Parkir Tepi Jalan Umum		345,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	-			8530 KBWU	300,915,200.00			-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian	-	400,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4265 Unit	188,049,600.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian		315,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				21 Unit	112,865,600.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian		85,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio*	-			2800 Unit 130 ruas	637,052,500.00			-	-	-	-	671,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	283,656,100.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	353,396,400.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		376,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	-			2 laporan	21,043,000.00			-	-	-	-	25,540,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	21,043,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25,540,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Load Factor Terlaksananya Operasional Bis Sekolah*	-			2 dokumen 2 unit	334,846,100.00			-	-	Masyarakat	-	345,675,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	334,846,100.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		345,675,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**15,742,934,443.00**							**20,885,973,800.00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun berlandaskan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2025 telah kami susun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya perlu disajikan catatan penting sebagai berikut :

1. Untuk usulan program/kegiatan APBD Kabupaten Kulon Progo, jika pagu indikatif yang ditetapkan ternyata lebih kecil dari usulan kami, maka kami akan melakukan efisiensi dengan mengurangi volume / komponen-komponen biaya tanpa mengurangi capaian kinerja program/kegiatan yang sudah direncanakan.
2. Rencana Kerja (Renja) 2025 kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2025. (ditambah , rencana tindak lanjut, kaidah pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang, UPT , ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025.

Dinas Perhubungan telah berupaya maksimal dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai rencana tindak lanjut Dinas Perhubungan berkomitmen akan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Dokumen Renja ini diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Wates, 02 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

DRS. ARIADI, M.M.

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19700701 199003 1006

Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KULON PROGO
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas perkenan-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini.

Dokumen Rencana kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan……..... 4

1.4. Sistematika Penulisan……..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 20

2.4 Review terhadap RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……. 33

3.3. Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP..... 51

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra s.d Triwulan IV Tahun 2023.....9

2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 17

2.3. Tabel Reviuw Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo.....24

2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo 32

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2025 36

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, Perangkat Daerah berpedoman pada tema pembangunan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran seusai dengan hasil kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencananaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Proses penyusunan Renja Kominfo didasarkan pada Renstra Kominfo 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Renja OPD disusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2024;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;.
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2025
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Dalam urusan Pengelolaan e-Gov, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
2. Tujuan :
   a. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
   b. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi danInformatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mencapai visi misi Bupati dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi mewujudkan misi ke 3 yaitu "***Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu".*** Serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 3 Urusan dengan 5 Program,12 Kegiatan dan 20 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
   b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
   c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
   a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
   b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Pelayanan Informasi Publik
   b. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
   b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
   c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d Triwulan IV Tahun 2023

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah Tahun Terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
									Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaiana Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%		100%	100%		**100%**	**87,00%**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang***								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	92 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	56 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	6 Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi, Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56 Laporan		14 Laporan	14 Laporan		14 Laporan	7 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi umum***								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu***								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	85 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen		21 Dokumen	11 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang***						-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	16 unit		4 unit	4 unit				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Penambahan Aset***								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Laporan		36 unit	36 unit		32 unit	16 unit	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***								
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Dokumen		8 orang	8 orang		7 orang	7 orang	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	**Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi**	90,84		**83,33%**	**98,81%**		**85,71%**	**98,81%**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase penyebarluasan informasi daerah***								
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	24 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	96 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Presentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik**	90,18		**72,14**	**70%**		**74,82%**	**70,33%**	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase layanan Infrastruktur TIK***								
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		4 Dokumen	-	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	16 Unit		5 unit	5 unit		2 Unit	-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen	-	

	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Presentase data sektoral yang dipublikasikan**	100%		**94,53**	**100%**		**96,30%**	**52,89%**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data sektoral yang dipublikasi*								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		3 Dokumen	-	
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Presentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan**	64,36%		**41,56%**	**49,17%**		**48,58%**	**51,09%**	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan*								
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	168 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		42 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SIM Pemerintah yang diamankan*								
	Pelaksanaan Kesamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	-	

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin, Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 99% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu: Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 79,07% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Manfaat program ini meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 99,28% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu:, 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD s.d TW 4 Kegiatan ini sebesar 99,75% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat Program ini adalah

meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 subkegiatan yaitu: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,34% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan. Manfaat program ini adalah meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu: 1) Monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai. 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 99,51 % dan fisik mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban SKPD. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu :1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Manfaat program ini meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini tercapai 98,66% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik. Manfaat program ini meningkatnya layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan yaitu: 1) Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah. 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,78% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan

pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan. Manfaat program meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 subkegiatan yaitu 1) pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik. 2) Kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 99,56% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu : 1) Pelayanan Informasi Publik. 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 96,87% sedang realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,30% sedang realisasi fisik mencapai 100%.

Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2023 belum tercapai 100%, total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 8,572,549,016,- dan terealisasi Rp. 8,368,511,608,- atau 97,62%. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang paling besar yaitu pada belanja pengadaan modal peralatan jaringan pada su kegiatan penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah sebesar Rp. 29.334.000,- karena sisa lelang dan negosiasi harga. Selain itu juga pada belanja perjalanan dinas biasa ke luar daerah sebesar Rp. 25.303.335,- karena sisa penginapan hotel at cost sesuai dengan pengeluaran riil dan sisa harga tiket perjalanan dinas karena SHBJ terlalu tinggi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Indikator sasaran dilakukan melalui Program Persandian, Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/Informasi/Statistik, Program Pengembangan Aplikasi Informatika.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				1	2	3	4	1	3	4	5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	
Indikator Kinerja Program												
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai sesuai target
2	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik			72,14	74,82	82,5	90,18	70,00	76,316	84,15	91,983	Belum tercapai sesuai target
3	Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi			83,33	85,71	88,1	90,48	98,81	87,424	89,862	92,289	sudah melebihi target

4	Persentase data sektoral yang dipublikasi			94,53	96,30	98,06	100	100	98,226	100	100	Sudah tercapai sesuai target
5	Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan			41,56	48,58	55,61	64,36	49,17	49,551	56,722	65,647	Sudah melebihi target
Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD												
1	Indeks SPBE			3,42	3,52	3,62	3,72	4,08	3,5904	3,692	3,794	sudah melebihi target
2	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah			87,07	89,24	91,42	93,65	95,71	91,0248	93,248	95,523	sudah melebihi target

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d TW IV Tahun 2023 yang merupakan IKU Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari target capaian 3,42% terealisasi sebesar 4,08% (sangat Baik) dan Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah dari target capaian 87,07% terealisasi sebesar 95,71%.

Indikator kinerja program informasi dan komunikasi publik (Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi) s.d TW 4 sudah melebihi target yaitu dari target 83,33% terealisasi 98,81 karena Koordinasi antar OPD pengambu kegiatan terjalin baik dan hubungan kemitraan yang harmonis dengan media.

Indikator kinerja program Aplikasi Informatika (Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik) s.d TW 4 belum memenuhi target yaitu dari target 72,14% terealisasi 70% Hal ini karena Sebagian aplikasi belum terintegrasi dan belum mengacu pada standar, protokol, teknologi dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam dengan intervensi manusia yang minimal (ninteroperabilitas data). Upanya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pengembangan dan pembangunan integrasi aplikasi secara bertahap dan Perbaikan kelengkapan regulasi penyelenggaraan SPBE dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk SPBE.

Indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral (Persentase data sektoral yang dipublikasi) s.d TW 4 sudah memenuhi target yaitu dari target 94,53% terealisasi 100% karena Hal ini di dukung dengan semakin baiknya koordinasi antar Perangkat Daerah, Forum Data dan Instansi yang menangani data BPS Kabupaten Kulon Progo.

Indikator kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan) s.d TW 4 sudah melebihi target yaitu dari target 41,56% terealisasi 49,17%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan Kominfo DIY perihal bantuan fasilitas peralatan dan pendampingan Counter Surveillance (pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang kerja dan pimpinan) dan Counter Surveillance pelaksanaan nya berjalan lancar sesuai jadwal yaitu di bulan maret dan oktober Selain itu

untuk ruang yang diamankan merupakan ruangan baru atau kata lain ruang yg belum pernah diamankan dari tahun sebelumnya.

Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika s.d TW IV Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke LPSE untuk kegiatan/subkegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan;.
2. Perlunya melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optomal;
3. Perlunya melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat;
4. Perlunya melakukan inovasi kolaborasi untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan peningkatan daya saing bagi masyarakat;
5. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program RPD 2023-2026 untuk mendukung pencapaian target RPD di Tahun 2024.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

a. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

b. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
b. Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
c. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
d. Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
e. Blum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
f. Diseminasi informasi yang belum optimal.
g. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik.

Adapun dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian jika tidak memenuhi target yaitu :

1. Kurang optimalnya diseminasi informasi edukatif
2. Pelaksanaan literasi digital belum optimal
3. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat
4. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan akses TIK; akan memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja pelayanan pada berbagai organisasi perangkat daerah.
5. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi; Pengamanan

informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat hampir seluruh lini pemerintahan menggunakan sistem informasi dan menyimpan data pada server data. Apabila terjadi permasalahan maka pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintah dapat terganggu.

6. Implementasi e-Goverment yang belum maksimal seperti Ketika indeks SPBE tidak memenuhi target, artinya terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan. Pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE, instansi belum mendefinisikan dan memiliki dokumentasi atas proses tata kelola ataupun belum memiliki kebijakan internal yang mengatur standar proses tata kelola secara terpadu bagi semua unit. Pelaksanaan Tata Kelola pun tidak menentu dan belum didukung oleh struktur organisasi yang memadai.

Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tantangan

1. Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Goverment
2. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Yogyakarta secara menyeluruh dan dinamis
3. Legalisasi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
4. Jaminan keamanan sistem informasi
5. Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat

Peluang

1. Lembaga atau institusi Pendidikan di Kota Yogyakarta yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika
2. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
5. Penyelenggaraan statistik sektoral
6. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
7. Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kominfo.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6
	Dinas Komunikasi dan Informatika				9.521.336.575,00	Dinas Komunikasi dan Informatika				11.498.421.297,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.521.336.575,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.472.910.997,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.365.936.575,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.900.739.897,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100 %	4.097.106.575,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100 %	3.222.799.723,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)	25 Dokumen	20.924.765,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)	25 Dokumen	54.486.900,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.129.682,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.334.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	6.795.083,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	38.152.900,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)		3.657.852.294,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)	26 Laporan	2.785.627.393,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	3.594.391.901,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.724.450.493,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		56.374.196,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.516.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	7.086.197,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.660.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2 Dokumen	27.184.406	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	26.609.200,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.412,817,00			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.209.200,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	24.771.589,00			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	24.400.000,00
	Administrasi Umum PerangkatDaerah		Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen)	2 Dokumen	110.113.660,00	Administrasi Umum PerangkatDaerah		Jumlah dokumen administrasiumum (Dokumen)	1 Dokumen	84.286.300,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.543.970,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.684.300,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	83.569.690,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.602.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan)	35 Laporan	150.669.024,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan)	13 Laporan	118.379.330,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.214.151,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.715.890,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan	125.454.873,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97.663.440,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)		130.362.426,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)	3 Laporan	153.410.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	102.836.400,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	100,820,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1.536.120,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	27.106.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	32 Unit	25.989.906,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	25,480,300.00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)	88,10 %	631.800.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)	85.71 %	815.683.800,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)	88,10 %	631.800.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)	100 %	815.683.800,00
	Pelayanan Informasi Publik					Pelayanan Informasi Publik				

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	231.818.178,00			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	241.922.600,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas					Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	24 Dokumen	399.981.821,00			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	573.761.200,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)	82,50	3.637.030.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)	74.82 %	4.862.256.374,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)	82,50	3.637.030.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)	80 %	4.862.256.374,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 unit	390.194.837,00			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	112.324.700,00
						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				
								Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	553.931.000,00
						Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				
								Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana	2 Aplikasi	120.394.200,00
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				
								Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 Unit	145.803.500,00

	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.125.514.876,00			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	3.831.429.574,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	121.320.286,00			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	98.373.400,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				209.520.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	96.06 %	322.350.00,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	96.30 %	209.520.400,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	98,06 %	322.350.00,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	96.30 %	209.520.400,00
						Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				
								Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	189.669.900,00
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6 Dokumen	322.350.000,00			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	19.850.500,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				23.050.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				362.650.700,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	55,61 %	23.050.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK		Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	48.58 %	362.650.700,00

						PENGAMANAN INFORMASI				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SIM yang diamankan (%)	84,48%	13.300.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SIM yang diamankan (%)	72.41 %	340.324.800,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	13.300.000,00			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	340.324.800,00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	26,73%	9.750.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	24.75 %	22.325.900,00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah	9.750.000,00			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah	22.325.900,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				800.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.000.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan (%)	100 %	800.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan (%)	100 %	2.000.000.000,00
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Jumlah sarana dan prasarana budaya (Unit)	6 objek	800.000.000,00	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Jumlah sarana dan prasarana budaya (Unit)	10 Unit	2.000.000.000,00

	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital					Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital				
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6 Objek	800.000.000,00			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	90 Objek	2.000.000.000,00

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini akan diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2023-2026 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pengelolaan persandian, pengembangan e-Gove, pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/Statistik, memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 bahwa sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka berdasarkan kebijakan tersebut serta arah kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Provinsi DIY, menjadi acuan bagi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menyusun program dan kegiatan di tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah **"Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"**. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan pancasila, ditandai oleh hal-hal berikut :
   a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakt Kulon Progo yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoler,

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi Iptek.

b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Kulon Progo,serta menguatnya dalam jati diri dan kepribadiannya.

2. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo berdaya saing, ditunjukan oleh hal-hal berikut:
   a. Terbangunya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah.
   b. Tersusunya jaringan insfrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain.
   c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang diupanyakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum, ditujukan oleh hal-hal berikut :
   a. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi di Kulon Progo.
   b. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
   c. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu, ditandai oleh hal-hal berikut :
   a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksanya pelaksanaan pembangunan daerah.
   b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen pemerintahan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, ditandai oleh hal-hal berikut :
   a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wialyah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
   b. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

c. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari, ditandai hal-hal sebagai berikut :
   a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah sehat dan nyaman.
   b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat serta modal pembangunan.
   c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyaman dan kualitas kehidupan.
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri, ditandai hal-hal sebagai berikut :
   a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam rangka membangun ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan Nasional.
   b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
   c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional, ditandai hal-hal sebagai berikut :
   a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional maupun nasional.
   b. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional maupun global
   c. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun Luar Negeri di Kabupaten Kulon progo.

Tahapan pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kulon Progo yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	AA	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indeks SPBE	3,62
			Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah	91,42
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Meningkatnya laya*n*an pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (terutama misi ke-4) dan pengetasan kemiskinan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 mencakup 6 Program terdiri 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD

3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
   b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau bangunan lainnya
   d. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pelayanan Informasi Publik
   b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
   b. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
   c. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan Arsitekturdan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
   d. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota cerdas

e. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
f. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
   b. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerahkabupaten/Kota
   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
   b. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan mutu yang cepat, tepat dan terpadu, serta berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Selain itu juga harus mempersiapkan kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Kulon Progo. Serta mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu keharusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan seperti dalam tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Dinas Komunikasi dan Informatika			11.498.421.297,00					10.471.147.308,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.472.910.997,00					10.451.147.308,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.900.739.897,00					9.831.328.438,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.222.799.723,00				-	3.814.768.167,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)	25 Dokumen	54.486.900,00			-	-	22.542.911,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.334.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	38.152.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.032.911,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)	26 Laporan	2.785.627.393,00			-	-	3.374.446.020,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.724.450.493,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.309.253.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.516.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		57.492.490,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.660.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7.699.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2 Dokumen	26.609.200,00			-	-	29.205.000,00	
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.209.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.475.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	24.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		26.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen)	1 Dokumen	84.286.300,00			-	-	90.555.850,00	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.684.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.625.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.602.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		61.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	4 Unit	25.510.300,00			-	-	20.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.510.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan)	24 Laporan	118.379.330,00			-	-	134.012.594,00	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.715.890,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.191.732,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97.663.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		106.820.862,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)	3 Laporan	153.410.600,00			-	-	164.005.792,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	100.823.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		106.820.862,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.106.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		29.156.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	25.481.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28.028.330,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)	88.10 %	815.683.800,00				-	763.837.910,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi Daerah	88.10 %	815.683.800,00			-	-	763.837.910,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									

							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	241.922.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		277.846.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	573.761.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		485.991.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)	82.50 %	4.862.256.374,00				-	5.252.722.361,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infrasruktur TIK	82.5 %	4.862.256.374,00			-	-	5.252.722.361,00	
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	112.324.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	553.931.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

										Semua Kel/Desa					
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	120.394.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 unit	145.803.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	3.831.429.574,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.159.722.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	1 Layanan	98.373.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

							Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional								
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			209.520.400,00					244.373.700,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	98.06 %	209.520.400,00				-	244.373.700,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)	98.06 %	209.520.400,00			-	-	244.373.700,00	
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	189.669.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		199.373.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	19.850.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			362.650.700,00					375.445.170,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	55.61 %	362.650.700,00				-	375.445.170,00	

						PENGAMANAN INFORMASI									
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIM yang diamankan (%)	84.48 %	340.324.800,00			-	-	350.739.500,00	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	340.324.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.739.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)	26.73 %	22.325.900,00			-	-	24.705.670,00	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah	22.325.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24.705.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00					0,00	
6	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan	100 %	2.000.000.000,00				-	0,00	

						URUSAN KEBUDAYAAN	Yogyakarta Urusan kebudayaan (%)								
	2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya (Unit)	1 PAKET	2.000.000.000,00			-	-	0,00	
	2	22	08	5.04	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital									
							Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1 PAKET	2.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**11.498.421.297,00**					**10.471.147.308,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AGUNG KURNIAWAN, S.IP,. M.Si

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 196808051996031005

Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2025

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO
Jl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270
Website : koperasi.kulonprogokab.go.id
Email: koperasi@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat Nya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 dapat kami susun.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dalam perencanaan pembangunan daerah Kulon Progo sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah No. 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Besar harapan kami semoga dengan disajikannya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Wates, 2 Agustus 2024.

Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19700117 199603 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN iii

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum…… 2

1.3 Maksud dan Tujuan…… 4

1.4 Sistematika Penulisan…… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…… 20

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…….. 23

2.4 Review terhadap RKPD…… 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….. 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……..... 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…… 41

3.3 Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan…… 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di bidangnya. Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu **Peningkatan Daya Saing Daerah menuju perwujudan Kawasan Pertumbuhan** maka diperlukan pelayanan yang berkualitas agar dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati No. 87 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Langkah- langkah penyusunan yang ditempuh yaitu: *Pertama*, menyusun usulan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya

masing-masing urusan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, usulan tersebut dipaduserasikan dengan daftar program/kegiatan masyarakat bersama Pemerintah Kecamatan. Langkah terakhir yaitu menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan prioritas usulan program/kegiatan. Rencana kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Renja PD) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
15. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal;
18. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;

22. Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja :

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah :

- Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
- Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.
- Memudahkan seluruh jajaraan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja perangkat daerah .

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokuman.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian tujuan sasaran, tantangan dan peluang serta formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renstra dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah, pencapaian target kinerja dengan indikator kunci kinerja, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, penguatan kesiapan koperasi dan UKM, dan peningkatan pendapatan koperasi dan UKM.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rincian program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor tersebut harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal di atas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

Dalam mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja Dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaiaman pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rupiah	65.949.407	1.181.102.681
	Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi	Rupiah	76.843.230.000	100.552.671.111

Tabel II.2
Pengukuran Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,18	60,35
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	95,24	93,15
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	%	3,67	30,84
Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	%	1,49	1,67

Dari uraian diatas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM untuk nilai rata-rata volume usaha koperasi terealisasi sebesar Rp. 1.181.102.681 yang telah melebihi target di tahun 2023. Dan untuk pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi tercapai sebesar Rp. 100.552.671.111.

b. Indikator kinerja program Dinas Koperasi dan UKM untuk persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi tercapai 60,35%, persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi tercapai 93,15%, persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) tercapai 30,84% dan persentase pengembangan UMKM tercapai sebesar 1,67%.

2.1.1 Realisasi Pelaksanaan Urusan Koperasi dan UMKM

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

A. Koperasi

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan target 2024-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Data Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan target 2024-2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Jumlah	*Unit*	284	284	287	290
2	Anggota	*Org*	83.126	75.771	83.126	83.957
3	Simpanan	*Rp (000)*	192.237.866	185.320.806	192.237.866	194.160.244
4	Modal Sendiri	*Rp (000)*	157.234.115	161.022.926	157.234.115	158.806.456
5	Modal Luar	*Rp (000)*	258.387.249	248.402.799	258.387.249	260.971.121
6	Volume Usaha	*Rp (000)*	291.034.528	335.433.161	291.034.528	293.944.873
7	SHU	*Rp (000)*	6.034.223	6.114.797	6.034.223	6.094.565
8	Asset	*Rp (000)*	422.134.275	408.610.440	422.134.275	426.355.617

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2023

Dari data tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2023 jumlah koperasi mencapai 284 koperasi dari target sebanyak 284 koperasi. Ditargetkan pada tahun 2024 jumlah koperasi bertambah sebanyak 3 koperasi atau ditargetkan terdapat 287 koperasi dan pada Tahun 2025 ditargetkan terdapat 290 koperasi. Jumlah anggota koperasi, simpanan anggota, modal luar, dan asset tidak mencapai jumlah yang telah ditargetkan, hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang berpindah Badan Hukum ke Provinsi dan Nasional pada Tahun 2022. Jumlah koperasi yang berpindah Badan Hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap capaian jumlah anggota, simpanan anggota, modal luar, dan asset . Selain itu penambahan jumlah koperasi pada Tahun 2023 hanya sebanyak 2 koperasi. Meskipun begitu, penambahan 2 koperasi baru ini dapat meningkatkan modal sendiri pada koperasi, sehingga jumlah modal sendiri koperasi dapat tercapai melebihi target dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.4

Data Koperasi Aktif Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Kecamatan/ Kapanewon	Target 2023			Realisasi 2023			Target 2024			Target 2025		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1.	Temon	25	29	86,20	20	28	71,43	26	30	86,66	27	31	87,09
2.	Wates	63	70	90,00	50	67	74,63	64	71	90,14	64	71	90,14
3.	Panjatan	8	11	72,72	7	12	58,33	8	11	72,72	8	11	72,72
4.	Galur	11	16	68,75	13	18	72,22	11	16	68,75	11	16	68,75
5.	Lendah	15	16	93,75	11	15	73,33	15	16	93,75	15	16	93,75
6.	Sentolo	20	23	86,95	15	22	68,18	20	23	86,95	21	24	87,50
7.	Pengasih	37	39	94,87	32	41	78,05	37	39	94,87	37	39	94,87
8.	Kokap	23	23	100,00	24	26	92,31	23	23	100,00	23	23	100,00
9.	Girimulyo	7	9	77,77	6	9	66,67	7	9	77,77	7	9	77,77
10.	Nanggulan	14	16	87,50	12	15	80,00	14	16	87,50	14	16	87,50
11.	Kalibawang	14	15	93,33	9	14	64,29	15	16	93,75	16	17	94,11
12.	Samigaluh	15	17	88,23	13	17	76,47	15	17	88,23	15	17	88,23
Jumlah		**252**	**284**	**88,73**	**212**	**284**	**74,65**	**255**	**287**	**88,85**	**258**	**290**	**88,96**

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 jumlah keseluruhan koperasi adalah 284 Koperasi. Koperasi aktif sebanyak 212 Koperasi dan Koperasi tidak aktif sebanyak 72 Koperasi. Koperasi dinyatakan sebagai koperasi tidak aktif apabila selama 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan RAT. Pada Tahun 2024 diharapkan koperasi aktif di Kabupaten Kulon Progo dari 212 koperasi menjadi 255 Koperasi dan pada Tahun 2025 menjadi 258 koperasi.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain:

1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar
3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi
4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen
5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.

Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Berikut data UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari Kompilasi dari berbagai sumber :

Tabel II.5
Data UMKM Tahun 2023 dan Target 2024-2025

No	*Sektor Ekonomi*	*Target 2023*	*Realisasi 2023*	*Target 2024*	*Target 2025*
1	Pertanian, Peternakan				
	Kehutanan dan Perikanan	3.782	5.564	6.120	6.732
2	Pertambangan dan Penggalian				
3	Industri Pengolahan	20.498	18.765	20.642	22.706
4	Bangunan	238	129	142	156
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran :				
	a. Hotel dan Restoran	756	648	713	784
	b. Pedagang Pasar	10.632	9.455	10.401	11.441
	c. Pedagang di luar pasar	12.156	13.369	14.706	16.176
	d. Pedaki	2.282	2.995	3.295	3.624
6	Pengangkutan dan Komunikasi	834	545	600	659
7	Jasa-jasa	476	535	589	647
	Jumlah	*51.654*	*52.005*	*57.206*	*62.926*

Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2023

Dari data di atas dapat diketahui jumlah UMKM yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2023 sebanyak 52.005 UMKM yang tersebar dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Tahun 2023 dapat tercapai semua. Beberapa sub kegiatan realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan harga pasar dan realisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk program subsidi bunga pinjaman terdapat banyak sisa dikarenakan minat pelaku usaha mikro yang masih rendah dan terdapat persaingan suku bunga rendah antar lembaga keuangan (Bank). Pada Tahun 2023 dilakukan penambahan kegiatan berupa pembuatan DED *(Detail Engineering Design)* PLUT untuk pembangunan gedung PLUT yang pembangunanannya akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Selain itu dilakukan rehabilitasi ruang rapat guna kenyamanan kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2023-2026 sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPD 2023-2026 yang terkait dalam urusan Koperasi dan UMKM maka telah ditetapkan indikator tujuan berupa pendapatan per kapita penduduk (ADHB) dalam satuan rupiah dan tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPD 2023-2026 yakni meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja urusan Koperasi dan UMKM yaitu; Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah, Pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi dan Nilai rata-rata volume usaha koperasi serta indikator program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), serta program pengembangan UMKM dengan indikator persentase pengembangan UMKM.

Tabel II.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
					(Thn n-2) 2023	(Thn n-1) 2024	(Thn n) 2025	(Thn n+1) 2026	(Thn n-2) 2023	(Thn n-1) 2024	(Thn n) 2025	
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKU											
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	-		100	100	100	100	50	100*)	100	
2	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rp	-		685.949.406	687.217.980	688.616.929	690.149.936	1.181.102.681	1.299.212.949*)	1.429.134.243	
3	Pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi	Rp	-		76.843.230.000	84.155.805.000	92.344.485.500	101.472.659.000	100.552.671.111	82.589.786.000*)	84.737.120.436	
	IKP											
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%			100	100	100	100	100	100*)	100	
2	persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%			62,18	63,93	65,69	67,52	60,35	63,93*)	65,69	
3	persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi	%			95,24	96,19	97,31	98,46	93,15	96,19*)	97,31	

4	persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	%			3,67	4,09	4,73	5,67	30,84	25,79*)	28,37	
5	persentase pengembangan UMKM	%			1,49	1,79	2,09	2,39	1,67	1,79*)	2,09	

Dalam tabel di atas target indikator kinerja merupakan target indikator kinerja terbaru sesuai dengan Renstra 2023-2026 Dinas Koperasi dan UKM. Realisasi indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bukti keberhasilan dari hasil usaha Dinas Koperasi dan UKM berupa pendampingan maupun pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada koperasi dan UMKM. Selain itu kemauan dan kemampuan baik koperasi dan UMKM yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa omset baik koperasi maupun umkm terealisasi melebihi target yang telah ditentukan. Untuk indikator kinerja program tidak semua tercapai melebihi target. Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh manajemen beberapa koperasi yang masih harus diperbaiki dan SDM koperasi yang kurang memadahi dari segi usia.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka optimalisasi Pembina dan penggiat koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok. Selain itu terdapat beberapa tantangan dan sekaligus peluang untuk mencapai hal tersebut

Peluang :

a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
b. Tersedianya potensi usaha dan investasi
c. Berkembangnya produk unggulan daerah
d. Akses permodalan luas
e. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM
f. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar
g. Perkembangan Teknologi Informasi
h. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar
i. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;
j. Adanya Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
k. Dibukanya jalur bedah menoreh di Kabupaten Kulon Progo
l. Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM
m. Dibangunnya gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kulon Progo sebagai tempat/ wadah segala aktivitas UMKM Kulon Progo di dekat Bandara YIA.

Tantangan :

a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja Koperasi
b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan bagi UMKM
c) Semakin meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM;
b. Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan koperasi dan UMKM;
c. Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM;
d. Kurangnya Aksesabilitas Permodalan Koperasi dan UMKM;
e. Kurangnya jiwa entrepreneurship pelaku UMKM

2.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Rendahnya Kualitas KUMKM.

2.3.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah:

a. Permasalahan

1) Akses dan kemampuan pemasaran UMKM baik offline maupun online yang masih terbatas
2) Pengembangan permodalan KUMKM yang belum optimal
3) Lemahnya manajemen kelembagaan Koperasi dan manajemen usaha UMKM

b. Solusi

1) Fasilitasi akses pemasaran produk UMKM melalui pameran dan pemasaran online
2) Fasilitasi jaringan kerjasama dengan sumber-sumber permodalan dan pemantauan/ pendampingan pengelolaan permodalan
3) Pendampingan dan diklat terhadap pengelolaan koperasi
4) Pendampingan/ diklat manajerial dan entrepreneurship kepada UMKM

2.4 Review Terhadap RKPD

Hasil review terhadap RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

PD : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**2.302.090.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**2.302.090.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**23 Dokumen**	**51.540.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**20.000.900**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	38.460.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	13.030.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	13.080.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	6.970.900	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**1.948.870.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.091.918.764**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*324 Orang/Bulan*	1.896.210.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*324 Orang/Bulan*	2.045.289.364	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*12 Dokumen*	38.290.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*12 Dokumen*	38.250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	19 Laporan	13.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	19 Laporan	8.379.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2 Dokumen**	**56.480.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**46.945.500**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*5 Paket*	16.970.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*5 Paket*	15.066.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*12 Laporan*	39.510.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*12 Laporan*	31.879.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Penambahan Aset**	**3 Unit**	**13.820.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**340.000.000**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000.000						
-		-	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000	
-		-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
							atau bangunan lainnya yang disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	***24 laporan***	**125.980.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**267.446.988**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	*12 Laporan*	39.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	*12 Laporan*	177.644.964	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*12 Laporan*	86.130.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*12 Laporan*	89.802.024	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	***3 Laporan***	**105.240.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**87.789.500**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak atau	*16 Unit*	59.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak atau	*16 Unit*	73.565.500	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
atau Kendaraan Dinas Jabatan		perizinannya			atau Kendaraan Dinas Jabatan		perizinannya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	*1 Unit*	25.760.000	-		-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	*31 Unit*	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	*17 Unit*	14.224.000	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***65,69%***	**382.710.000**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***65,69%***	**17.843.000**	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***65,69%***	**382.710.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***65,69%***	**17.843.000**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	*119 Unit Usaha*	228.670.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	*108 Unit Usaha*	11.459.500	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	*13 Unit Usaha*	154.040.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	*5 Unit Usaha*	6.383.500	
Program Penddikan dan Latihan Perkoperasian		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**613.200.000**	**Program Penddikan dan Latihan Perkoperasian**		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**100.798.800**	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**417.690.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan**		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**100.798.800**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
dalam Daerah Kabupaten/Kota					**dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	*565 Orang*	417.690.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	*93 Orang*	100.798.800	
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**195.510.000**	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		Jumlah SDM yang Memahami UKM	*135 Orang*	195.510.000	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***4,73%***	**115.690.000**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***4,73%***	**2.069.533.400**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***4,73%***	**115.690.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***4,73%***	**2.069.533.400**	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	*39.000 Unit Usaha*	22.780.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah unit usaha mikro terdata	*57.335 Unit Usaha*	7.190.500	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	*120 Unt Usaha*	27.780.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	*946Unt Usaha*	1.766.257.400	
Pemberdayaan kelembagaan		Jumlah unit usaha yang telah	*168 Unit Usaha*	65.130.000	Pemberdayaan kelembagaan		Jumlah unit usaha yang telah	*55 Unit Usaha*	296.085.500	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
potensi dan pengembangan usaha mikro		menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro			potensi dan pengembangan usaha mikro		menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro			
Program Pengembangan UMKM		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,09%***	**209.000.000**	**Program Pengembangan UMKM**		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,09%***	**401.033.040**	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,09%***	**209.000.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,09%***	**401.033.040**	
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	*250 Unit Usaha*	209.000.000	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	*100 Unit Usaha*	401.033.040	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN										
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan**	***1 Kali***	**221.590.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan**		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan**	***1 Kali***	**2.500.000.000**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Kebudayaan		**Kebudayaan**			**Kebudayaan**		**Kebudayaan**			
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***1 Kali***	**221.590.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***1 Kali***	**2.500.000.000**	
Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	*115 Unit*	221.590.000	Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan		2.500.000.000	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 sub kegiatan baru yaitu Penyusunan Basis Data Usaha Mikro, Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pengembangan Usaha Mikro. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamata maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan Kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dalam rangka pembangunan dan pemulihan Koperasi dan UMKM sehingga ada kesesuaian antara materi proses usulan dan proses dalam pembahasan perencanaan di tingkat Kabupaten melalui Forum PD dan Musrenbang Kabupaten. Adapun usulan ditahun 2025 yang terangkum dalam Rancangan Akhir Renja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Panjatan	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	2 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Galur	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	2 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Nanggulan	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Kalibawang	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Girimulyo	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Pengembangan Usaha Mikro	Nanggulan	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Galur	Meningkatnya kualitas produk UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Panjatan	Meningkatnya kualitas produk UMKM	3 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat
		Samigaluh	Meningkatnya kewirausahaan SDM pelaku UMKM	1 Kelompok	Jaring Aspirasi Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia *(pro poor).* Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional *(pro growth).* Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran *(pro job).*

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistic dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah bertugas menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi,memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dan memberikan perlindungan kepada koperasi. Pembinaan koperasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha kecil secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
   a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
   b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui :
   a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM berdasarkan hasil kajian.
   b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UKM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui :
   a. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui :
   a. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UKM melalui :
   a. Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UKM baru melalui :
   a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
   b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UKM melalui :
   a. Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
   b. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UKM.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 mengacu pada RPD dan Renstra 2023-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD Tahun 2025 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rp (juta)	688,61
			Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi	Rp (juta)	93.344,48
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah PD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Guna mendukung tercapainya tujuan melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan UKM memprogramkan 6 Program, 11 Kegiatam dan 21 Sub Kegiatan. Rincian nama program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
      a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
      b. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

IV. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
      a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
      b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
      c. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

V. Program Pengembangan UMKM
   1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
      a. Pengembangan Usaha Mikro

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   1. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
      a. Pengembangan Industri Kreatif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah PD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu :

a. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dengan proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM yaitu: Peningkatan kualitas, kontinuitas dan peluang pasar produk lokal, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur.
b. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan Koperasi dan UMKM dengan capaian target yang telah ditentukan.
c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
d. Penguatan kesiapan koperasi dan UMKM dalam rangka menangkap peluang beroperasinya bandara YIA dan kawasan ekonomi khusus serta bedah menoreh.
e. Peningkatan pendapatan Koperasi dan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo memuat 6 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan (termasuk eks BAU) yang memiliki sasaran Koperasi dan UMKM yang tersebar di 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Usulan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	**Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**2.854.101.652**			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	13.030.000	Dokumen Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025, Renstra	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	6.970.900	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulanan, Laporan Tahunan, LKJIP, Profil Kinerja PD dan SPIP PD	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*324 Orang/Bulan*	2.045.289.364	27 Orang/ 12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*12 Dokumen*	38.250.000	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	19 Laporan	8.379.400	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*5 Paket*	15.066.500	Belanja ATK, Cetak, Benda Pos, Surat Kabar, Kertas coer 12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*12 Laporan*	31.879.000	Jamuan Rapat dan Tamu, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pemasangan konblok halaman gedung PLUT	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
			Daerah							
				Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	*1 Unit*	250.000.000	Pemasangan internet gedung PLUT	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	*12 Laporan*	177.644.964	Pembayaran telpon, air, listrik 12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*12 Laporan*	89.802.024	Jasa kebersihan (1 orang), penjaga malam (1 orang), sopir (1 orang) selama 12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak atau perizinannya	*16 Unit*	73.565.500	Terpeliharanya sarana dan prasarana mobil operasional (3 unit), motor (13 unit), BBM (12 bulan), pajak kendaraan (16 unit)	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	*17 Unit*	14.224.000	AC (5 unit) Printer (4 unit) APAR (1 unit)	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, Kulonprogo

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			PC (3 unit) Gedung kantor (1 unit) Mobil (3 unit)		
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***65,69%***	**17.843.000**			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*108 Unit Usaha*	11.459.500	1. Pembinaan/ Pengawasan Koperasi (8 koperasi) 2. Penilaian Kesehatan KSP/USP (100 KSP/USP) 3. Laporan pemantauan pengelolaan koperasi KSP/USP (1 Dokumen)	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Kenggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	*5 Unit Usaha*	6.383.500	1.Perijinan Akta Pendirian (1 Dokumen) 2. Perubahan AD (2 Dokumen) 3. Penyelesaian Koperasi Bermasalah (2 Koperasi)	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, KP
			Program Penddikan dan Latihan Perkoperasian		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***97,31%***	**100.798.800**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	*93 Orang*	100.798.800	1. Sarasehan hari koperasi (100 Orang) 2. Penilaian koperasi berprestasi (5 koperasi) 3. Pemberdayaan koperasi sektor riil (8 koperasi)	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***4,73%***	**2.069.533.400**			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	*946 Unit Usaha*	1.766.257.400	1. AP Subsidi Bunga dan monev 2. Subsidi bunga pinjaman bagi usaha mikro	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, Kulonprogo
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	*55 Unit Usaha*	296.085.500	1. Pameran manunggal fair 2. Pengembangan kapasitas	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
								pelaku usaha sektor kuliner, fashion dan kriya di kawasan aerotropolis		
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata	*57.335 Unt Usaha*	7.190.500	Database dan profil KUMKM	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
			Program Pengembangan UMKM		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,09%***	**401.033.040**			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	*100 Unit Usaha*	401.033.040	1. Kurasi produk UKM dan sosialisasi untuk belabeliku (100 UMKM) 2. Operasional PLUT	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***1 Kali***	**2.500.000.000**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Usulan Tahun 2024			Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						target	Rp	Rincian Target		
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			***1 Kali***	**2.500.000.000**		**Dinas Koperasi dan UKM**	**Lingkup Kab, K.P.**
			Pengembangan Industri Kreatif			*150 Unit*	2.500.000.000	1. GEREGET KUMKM	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab, K.P.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembinaan dan pengembangan KUMKM sangat kompleks karena jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh wilayah dengan tingkat kemajuan yang beraneka ragam dan dihadapkan pada masalah dalam berbagai aspek. Untuk mensukseskan pembinaan dan pengembangan perlu difokuskan pada jejaring kerjasama yang saling mendukung antar instansi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

KUMKM harus aktif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan usaha yang ada. Reorientasi pembinaan dengan pendekatan sosial ke arah prinsip bisnis dan kemandirian, lembaga-lembaga pembina baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan profesionalisme dan kemandirian.

Dalam kenyataannya sektor KUMKM memiliki banyak peluang untuk berkembang karena memiliki banyak potensi yang mendukung, baik dari sisi SDM, sumber daya alam maupun produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan juga keunggulan komparatif. Namun potensi tersebut belum dapat digali dan dipromosikan secara optimal serta belum difasilitasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan juga dana, serta belum didukung jiwa *entrepreneurship* masyarakat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan serta bantuan usaha.

Program pembinaan dan pengembangan KUMKM ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra

Transisi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026, yang berfungsi untuk memberikan gambaran ke depan tentang arah pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dalam periode satu tahun.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2025, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Renja dinas ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wates, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo

IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 1900117 199603 2 004

DPMPTSP
KULON PROGO

MPP
MAL PELAYANAN PUBLIK
KULON PROGO

CoWorking
space

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kulon Progo
Jl. Kh. Ahmad Dahlan, No. Km. 1, Dipan, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo.
Telp: (0274) 774 402, (0274) 775 208

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perangkat Daerah 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok 26
2.4. Review Terhadap RKPD 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 40
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 41
3.3. Program dan Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 45
BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pengukuran sasaran renja tahun 2022 14
Tabel 2.3 Pengukuran kinerja program tahun 2022 14
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023 17
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 25
Tabel 2.6 Penyandingan Renja Awal tahun 2024 terhadap Renstra 29
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Asosiasi 39
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 36
Tabel 3.2 Program dan kegiatan Tahun 2024 37
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 mengacu kepada Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Selain itu, dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) dan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Renja

DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Dalam penyusunan Renja diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan DIY.

Renja disusun sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renja Perangkat Dearah menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) melalui penetapan APBD Kabupaten. Alur yang dilakukan adalah sebagai berikut.

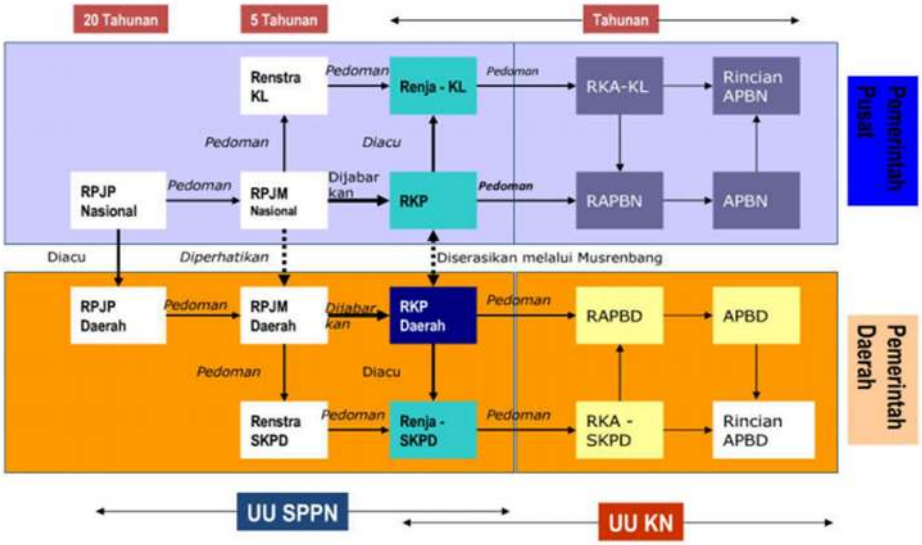

Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2023
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
j. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;
m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Disamping itu maksud dan tujuan disusunya Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan RKPD tahun 2025 dan RPD tahun 2023-2026.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mengupayakan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPTSP.
5. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai Pengertian Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja dan Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Mencantumkan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja secara jelas dan singkat

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra-OPD.

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah sampai tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2013-2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Menjelaskan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang

sudah ditentukan, baik capaian sasaran strategis maupun pengukuran kinerja program sampai tahun 2023

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap RKPD

Menjelaskan penyandingan Renja terhadap dokumen RKPD dan Renstra

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menjelaskan tahapan perencanaan yang berasal dari usulan kegiatan daro amsyarakat di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tupoksi DPMPTSP dan menjadi dasar penyusunan target Renja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menguraikan tujuan dan sasaran penyusunan Renja OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan penajaman target serta tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perangkat Daerah

Realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2023 mencapai 95,3 %. Secara umum, semua kegiatan telah berjalan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan baik secara keluaran, fisik maupun anggaran. Realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada table 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2023

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI 2023	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**2.988.075.639**		**2.792.646.926**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu*			*42.122.100*		*41.976.770*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	36.474.800	2	36.364.670
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	21	5.647.300	21	5.612.100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*			*1.978.165.295*		*1.826.412.039*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	1.925.910.895	12	1.774.211.478
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	48.362.100	12	48.343.757
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	14	3.892.300	10	3.856.804
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan koordinasi dan perjalanan dinas kota*			*96.255.800*		*92.117.687*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	24.934.000	12	24.053.742
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	71.321.800	12	68.063.945
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*			*357.485.800*		*351.465.018*
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	357.485.800	1	351.465.018

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI 2023	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan administrasi perkantoran*			*366.058.044*		*333.854.507*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	127.642.644	12	105.573.461
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	238.415.400	12	228.281.046
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset kondisi baik*			*147.988.600*		*146.820.905*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	16	99.621.000	16	99.620.999
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	7.000.000	1	7.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	91	41.367.600	91	40.199.906
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**		**162.694.300**		**159.858.594**
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Capaian pengembangan iklim penanaman modal*			*162.694.300*		*159.858.594*
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	1	162.694.300	1	159.858.594
3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Capaian Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**25,00%**		**309.767.800**		**304.305.727**
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian peningkatan promosi penanaman modal*			*309.767.800*		*304.305.727*
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	5	309.767.800	5	304.305.727
4.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pelayanan Penanaman Modal**	**86,67%**		**626.823.000**		**616.505.366**
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Capaian Pelayanan Penanaman Modal*			*626.823.000*		*616.505.366*
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	pelau usaha	2740	563.525.400	8831	554.357.801
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	aduan	10	10.621.000	11	9.774.190

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI 2023	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	600	52.676.600	600	52.373.375
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANANAMAN MODAL**	**Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**		**72.242.300**		**70.945.678**
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*			*72.242.300*		*70.945.678*
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	1	72.242.300	1	70.945.678
6.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**82%**		**452.850.784**		**447.157.383**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*			*452.850.784*		*447.157.383*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	30	14.418.800	30	14.416.532
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	pelaku usaha	120	373.568.584	120	367.977.147
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	50	64.863.400	50	64.763.704
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**100.000.000**		**99.467.261**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*	*dokumen*	*1*	*100.000.000*	*1*	*99.467.261*
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	dokumen	1	100.000.000		99.467.261
	jumlah				**4.712.453.823**		**4.490.886.935**

Realisasi kinerja keuangan di tahun 2023 mencapai 95,3 %, sedangkan untuk capaian fisik mencapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 28 orang dari kebutuhan 55 orang atau sekitar 49%. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan informal maupun diklat.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain.

Pengukuran kinerja DPMPTSP didasarkan pada pencapaian sasaran sebagaimana pada table 2.2 dan table 2.3 berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran sasaran renja tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Investasi	juta Rp	300.000	309.779	103
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,5	89,45	107
3	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100

Tabel 2.2 Pengukuran kinerja program tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program	
			Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	100

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program	
			Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
3	Program Promosi Penanaman Modal	Capaian Peningkatan Promosi Penanaman Modal	25	24
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian Pelayanan Penanaman Modal	86,67	100
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanamanan Modal	100	100
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	82	92

Dari table 2.2 dan table 2.3 di atas terlihat bahwa di tahun 2023, 5 sasaran renja dan kinerja program telah mencapai lebih dari 100%, hanya 1 program yang belum dapat mencapai target, dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini telah dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Capaian program ini dapat mencapai 100%, hal ini di dukung oleh kerjasama antar pegawai dan dukungan masyarakat yang mulai membuka diri terhadap investasi.
3. Program Promosi Penanaman Modal

   Target program ini belum tercapai secara persentase. Akan tetapi secara target jumlah perusahaan realisasi investasi sudah melebihi target. Jumlah target perusahaan realisasi investasi sebanyak 5 perusahaan, dapat tercapai 6 perusahaan. Sedangkan target Jumlah perusahaan target hasil promosi sebanyak 20 dapat tercapai 25 perusahaan. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kinerja OPD cukup tinggi meskipun secara persentase nya tidak tercapai. Beberapa keterbatasan sumber daya dan sumber dana tidak menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berbagai usaha telah yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendatangkan investor baru untuk berinvestasi di Kulon Progo. Diantaranya adalah penyusunan kajian potensi investasi IPRO, penyebarluasan informasi baik melalui media cetak maupun digital melalui berbagai platform media social serta pelaksanaan Forum Investasi serta Inventarisasi dan Indentifikasi permasalahan penanaman modal.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Capaian program ini melebihi 100%. Hal ini di dukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha dan dukungan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa bimbingan teknis pelayanan perizinan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi Siperi manis kapanewon.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Program ini mencapai target 100%. Hal ini di dukung oleh penggunaan layanan OSS, Si Cantik, Sim BG dan LKPM Online yang memudahkan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Capaian program ini mampu melebihi target. Hal ini di dukung oleh adanya kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa bimbingan teknis pengawasan perizinan, berupa sosialisasi dan pendampingan LKPM.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pencapaian Renstra OPD tahun 2023 disajikan dalam table 2.4 berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**URUSAN PENANAMAN MODAL**									
1	1			**BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**									
1	1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**					**100%**		
1	1	1	1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	*94 dokumen*							
1	1	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen					2	2	20
1	1	1	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dokumen					21	21	25
1	1	1	4	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*								
1	1	1	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 OB					29	29	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen					12	12	25
1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56 laporan					14	14	25
1	1	1	8	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*								
1	1	1	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang					0	0	0
1	1	1	9	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*								
1	1	1	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan					12	12	25
1	1	1	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 paket					5	5	10

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	12	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
1	1	1	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 unit					13	13	45
1	1	1	14	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*								
1	1	1	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan					12	12	25
1	1	1	16	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan					12	12	25
1	1	1	17	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*								
1	1	1	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit					16	16	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit					1	1	25
1	1	1	20	Gedung Kantor atauPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	364 unit					91	91	25
1	1	2		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**					**100%**		
1	1	2	*1*	*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal*								
1	1	2	*2*	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai)	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 dokumen					1	1	25
1	1	3		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**40%**					**24%**		
1	1	3	*1*	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*								
1	1	3	*2*	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12 dokumen					5	5	42

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	4		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**87,88%**					**100,00%**		
1	1	4	*1*	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*								
1	1	4	*2*	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10300 pelaku usaha					16.829	16.829	163
1	1	4	*3*	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2700 kegiatan usaha					897	897	33
1	1	4	*4*	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	40 aduan					12	12	30

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	5		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**88,33%**					**92%**		
1	1	5	*1*	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*								
1	1	5	*2*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	150 kegiatan usaha					30	30	20
1	1	5	*3*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480 pelaku usaha					120	120	25
1	1	5	*4*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200 kegiatan usaha					50	50	25
1	1	5		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**					**100%**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	5	*1*	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*								
1	1	5	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen					2	2	25

Wates, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R. HERIYANTO, SH., MM.
NIP 196806061995011001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026, maka Kinerja DPMPTSP periode Renstra Tahun 2023-2026 telah melampau dari target kinerja yang ditetapkan,

- Indikator Nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 309.779 Juta Rupaih,- atau tercapai 103,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000 Juta Rupiah.
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,45% atau tercapai 107,13% dari target yang ditetapkan 83,5%
- Capaian Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah adalah 100%. Hal ini didukung oleh semua kegiatan di sekretariat dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP di tahun 2023 tersebut diatas telah melebihi target. Hal ini di dukung oleh berbagai hal, diantaranya adalah kinerja DPMPTSP dalam memberikan layanan dan fasilitasi kepada investor, penyebarluasan informasi peluang dan potensi investasi baik melalui media cetak maupun digital serta dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Keistimewaan dalam mendukung pelayanan public di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Untuk penentuan tolol ukur serta indikator kinerja adalah berdasarkan perundang-undangan serta Renstra BKPM maupun Renstra DPMPTSP DIY. Serta menyesuaikan tujuan dan sasaran daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama Periode Renstra 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	IKU OPD											
1	Nilai investasi (Juta Rp.)				300.000	350.000	400.000		309.779	350.000	400.000	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,5	84	84,5		89,455	84	84,5	
3	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah				100	100	100		100	100	100	
	IKP											
1	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal				25	30	35		24	30	35	
2	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100	100	100		100	100	100	
3	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				82	84,76	86,79		92	84,76	86,79	
4	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100	100	100		100	100	100	
5	Persentase Pelayanan Penanaman Modal				86,67	87,1	87,5		100	87,1	87,5	

Untuk pencapaian kinerja tahun n-2 atau tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.2 dan 2.3 di atas. Kinerja tahun 2023 secara umum, baik indikator kinerja OPD maupun indikator kinerja program dapat mencapai 100 persen, bahkan lebih. Pencapaian ini di dukung oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat berupa penanaman modal dan perizinan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, DPMPTSP mempunyai beberapa hambatan baik berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di DPMPTSP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 27 orang dari kebutuhan 55 orang atau sekitar 55%. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan maupun diklat.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan OPD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan OPD teknis lain.

Beberapa hambatan yang ada tersebut sejauh ini tidak mengurangi kinerja DPMPTSP dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta membawa Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai hambatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya promosi investasi baik melalui pameran, media sosial, elektronik, dan papan informasi lainnya;
2. Masih terbatasnya kajian investasi di masing-masing kawasan strategis;
3. Sulitnya mencari lahan untuk investasi besar yang membutuhkan lahan luas;

4. Lokasi yang diminati investor sudah di tetapkan sebagai kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindung) sehingga tidak bisa alih fungsi lahan;
5. Topografi wilayah yang berupa perbukitan sehingga biaya *Land Clearing* yang cukup tinggi;
6. Belum adanya bangunan falisitas umum di beberapa kawasan yang representatif sebagai pematik investasi;
7. Belum memadainya sarana prasarana di *Co Working Space* sebagai ruang yang representatif untuk menyajikan data dan potensi investasi;
8. Banyaknya peraturan perundangan terkait perizinan yang belum tersosialisasikan pada masyarakat;
9. Pengembangan aplikasi perizinan teritegrasi secara elektronik yang belum disertai peningkatan kapasitas SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran yang memadahi;
10. Keterbatasan sumber daya (SDM, Sarpras, Anggaran) untuk melaksanakan pelayanan perizinan mandiri, berbantuan dan bergerak;
11. Terbatasnya sarana prasarana berupa perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelayanan;
12. Belum adanya realisasi atas kebijakan kemudahan investasi terkait insentif;
13. Belum tersedianya metadata permasalahan dan potensi pelaku usaha;
14. Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha sehingga belum dapat berkontribusi secara optimal dalam membantu percepatan investasi;
15. Belum terealisasinya penambangan pasir besi beserta pendirian pabrik baja sehingga wilayah kontrak karya di sepanjang pantai selatan karangwuni antara Sungai Progo – Sungai Serang tidak dapat digunakan investasi lain.
16. Terbatasnya ruang MPP untuk pelayanan public.
17. Telah ditetapkannya MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) dan Kawasan aerotropolis di kawasan YIA.

Beberapa hambatan tersebut diatas secara umum dapat menghambat investasi di Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi DPMPTSP berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hambatan tersebut dengan memanfaatkan

beberapa peluang yang ada dalam mendukung investasi dan pengembangan pelayanan adalah:

1. Keberadaan Bandara YIA di Kulon Progo;
2. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan pelaku usaha secara elektronik;
3. Potensi alam dan keindahan panorama Kulon Progo;
4. Tersedianya RDTR kawasan sektor bandara;
5. Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri Sentolo;
6. Rencana pembangunan infrastruktur Trase Temon - Borobudur;
7. Meningkatnya minat terhadap produk kerajinan Kulon Progo baik dari dalam maupun luar negeri;
8. Perkembangan teknologi informasi;
9. Rencana pembangunan Embarkasi Haji;

Adanya hambatan yang di hadapi serta peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan PD. Baik dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan maupun perumusan indikator serta target kinerja PD.

Perumusan indikator dan target kinerja PD tersebut juga harus memeprhatikan tujuan dan sasaran daerah serta program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.4. Review Terhadap RKPD

Penyusunan Rencana Kerja-OPD disamping mengacu pada Renstra-OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu, Revew Renstra OPD terhadap Program dan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dengan melihat perkembangan perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Berikut table 2.6 Penyandingan Ranwal Renja terhadap analisis kebutuhan anggaran dan kegiatan tahun 2025

Tabel 2.5 Penyandingan Renja Awal Tahun 2025 terhadap Analisis Kebutuhan Tahun 2025

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.676.571.006**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.523.824.621**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		43.350.006	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		13.975.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	37.390.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	10,128,200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	5.960.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.847.100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*		2.036.920.000	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*		1.925.384.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	1.981.270.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	1.885.154.000	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	51.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	37,050,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	4.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14	3.180.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*		*15.960.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	15.960.000						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	Jumlah dokumen administrasi umum		69.579.000	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	Jumlah dokumen administrasi umum		71.999.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	66.930.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	49,055,000	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2.649.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	22,944,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah penambahan aset*		4.522.000	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah penambahan aset*		9,203,400	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	4.522.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	9,203,400	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang		332.070.000	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang		388.214.587	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12	91.930.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12	162,588,295.	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	240.140.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	225,626,292	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah		174.170.000	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang*	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah		138.084.500	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Daerah					*Urusan Pemerintahan Daerah*					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	84.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	81,809,300.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	52.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	91	37.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	91	56.275.300	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**	**419.900.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**	**120.341.500**	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		419.900.000	*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*		Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		120.341.500	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai)		Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	419.900.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	120.341.500	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**30,00%**	**157.010.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**30,00%**	**144,205,200**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*		157.010.000	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*		144,205,200	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	157.010.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	144,205,200	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**87%**	**332.280.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**87%**	**262.686.400**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Kab.Kulon Progo	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*		332.280.000	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*		262.686.400	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Daerah Kabupaten/ Kota					*Kabupaten/ Kota*					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2500	264.270.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Sistem Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	2500	235,313,500	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	600	57.210.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	600	18,559,900	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Kab.Kulon Progo	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	10	10.800.000	Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Kulon Progo	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	8.813.000	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Perizinan dan Non Perizinan		dan Non Perizinan								
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**82%**	**17.680.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**85%**	**9.517.500**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*		17.680.000	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*		9.517.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	35	17.680.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	50	9.517.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	35							

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	50							
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**	**38.220.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**	**31,735,800**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*		38.220.000	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*		31,735,800	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	2	38.220.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		TersedianyaDatadan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	31,735,800	

No	RANWAL 2025					HASIL ANALISI KEBUTUHAN (RANCANGAN 2025)					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			secara Elektronik					
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				**478,520,000**	
						Peningkatan Budaya Pemerintahan				478,520,000	
					3.641.661.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	1	478,520,000 **3,593,867,287**	

Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi terhadap beberapa anggaran, yaitu pengurangan pada cetak booklet, belanja lembur dan belanja perjalanan dinas pada beberapa sub kegiatan.
2. Pagu anggaran gaji menyesuaikan riil berdasarkan gaji bulan Mei Tahun 2024.
3. Peniadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan Pemeliharaan Gedung / Bangunan.
4. Perubahan nomenklatur sub kegiatan menyesuaikan Kepmendagri 900, yaitu pada program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Penanaman Modal.
5. Penambahan kegiatan yang bersumber pada Dana Keistimewaan
6. Tidak ada perubahan target kinerja maupun keluaran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat beberapa usulan dari peserta yang berasal dari praktisi akademis, masyarakat serta asosiasi. Usulan dari masyarakat dan asosiasi adalah sebagai berikut pada table 2.7

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Asosiasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Mobil untuk pelayanan bergerak	1	Belum teranggarkan
2	Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Perluasan Mal Pelayanan Publik	1	Belum teranggarkan
3	Program Promosi Penanaman Modal/ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Pembangunan Terminal Ekspor	1	Belum teranggarkan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaranan penamanam modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahaan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, merumuskan visi sebagai berikut, "**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.".** Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode Renstra 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah.
2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan
3. Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Meningkatnya realisasi nilai investasi
2. Meningkatnya Pelayanan Terpadu
3. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam periode Renstra 2023-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi (Juta Rp)	300.000	350.000	400.000	450.000
		Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	83,5	84	84,5	85

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPD tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2025, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2025 serta mempertimbangkan kebutuhan. Berikut program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025:

Tabel 3.2 Program dan kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Selain itu adalah dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pelayanan public yang mengacu kepada pencapaian Standart Pelayanan Minimal serta target Realisasi Investasi yang telah di tetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka terdapat 6 program dan 10 kegiatan serta 18 sub kegiatan. Adanya rumusan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD dikarekan adanya efisiensi anggaran serta perubahan nomenklatur.

Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.546.861.187**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kab.Kulon Progo*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		*13.975.300*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.128.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	3.847.100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Kab.Kulon Progo*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*		*1.925.384.000*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 OB	1.885.154.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	37.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	3.180.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kab.Kulon Progo*	*Jumlah dokumen administrasi umum*		*71.999.400*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	49.055.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	22.944.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah penambahan aset*	*1 unit*	*9.203.400*

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	9.203.400
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab.Kulon Progo*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*		*388.214.587*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162.588.295
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	225.626.292
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab.Kulon Progo*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*		*138.084.500*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	81.809.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 unit	56.275.300
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100**	**120.341.500**
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		*Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal*		*120.341.500*
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai)	*Kab.Kulon Progo*	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	120.341.500
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**30%**	**166.171.921**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*		*166.171.921*

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Kab.Kulon Progo*	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	166.171.921
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**87%**	**262.686.400**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Kab.Kulon Progo*	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*		*262.686.400*
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Kulon Progo	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Sistem Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	2500 pelaku usaha	235.313.500
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi,danpelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	600 kegiatan usaha	18.559.900
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kulon Progo	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 pelaku usaha	8.813.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**85%**	**9.517.500**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*		*9.517.500*
Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan PelaksanaanPerizinanBerusaha Para Pelaku Usaha	35 kegiatan usaha	9.517.500

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	100%	35.081.900
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*		*35.081.900*
Pengolahan, Penyajian dan PemanfaatanDatadanInformasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Kulon Progo	TersedianyaDatadan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	35.081.900
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**478,520,000**
Peningkatan Budaya Pemerintahan				478,520,000
Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	1 dokumen	478,520,000
	JUMLAH			**3,593,867,287**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) adalah merupakan dokumen Perencanaan, sebagai acuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian, bahan Koordinasi dan Evaluasi yang berisi Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta rencana Anggaran dalam satu Tahun Anggaran sebagai implementasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok PD serta dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan.

Fungsi dan tugas DPMPTSP secara umum adalah menyelenggarakan pelayanan publik dan penanaman modal dengan lima program yaitu: Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Penyusunan Rencana Kerja OPD didasarkan pada program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Wates, 2 Agustus 2024

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

R. HERIYANTO, SH., MM.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP 19680606 199501 1 001

PEMERINTAHAN
KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)

RENJA TA 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo 20-23
Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo 29-32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 5 tahunan. Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra

SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencana tehnis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5. Telaah terhadap RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen Renja SKPD
10. Penyempurnaan Renja SKPD
11. Penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

Proses penyusunan penyempurnaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan tujuan RPD Kulon Progo Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik" R 2 yang sudah diselaraskan dengan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional dan nasional". Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

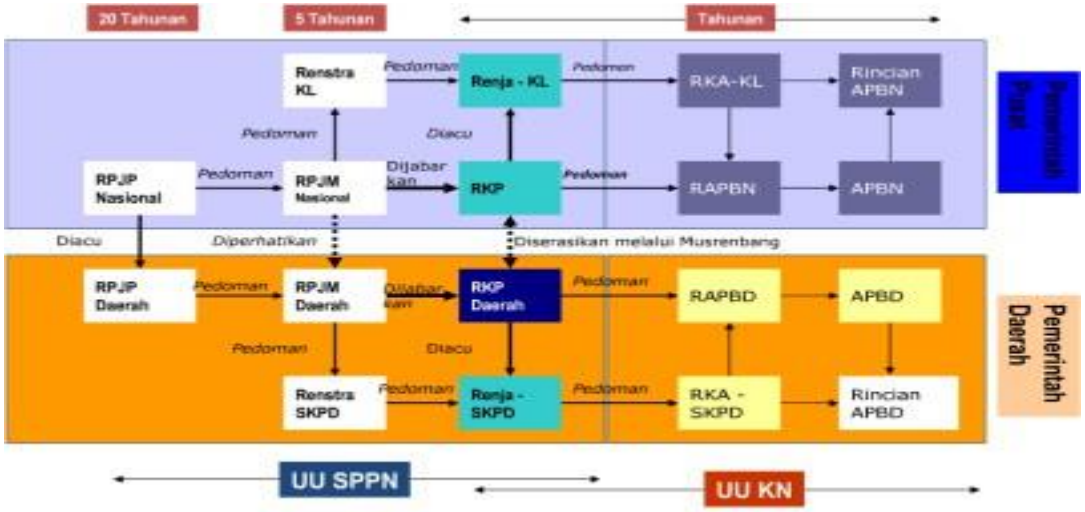

Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai tolok ukur yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.;
2. Sebagai acuan bagi seluruh karyawan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2025; dan
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional Tahun 2025.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu PentingPenyelenggaraan Tugas danFungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Triwulan IV Tahun 2023

Kekayaan kultural mengandung nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat.Pelaksanaan urusan kebudayaan dimaksudkan guna melestarikan nilai budaya, mengelola dan mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya, termasuk peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat dijadikan identitas dan kebanggaan daerah dan wahana retrospeksi serta benteng ketahanan budaya maupun sebagai daya tarik wisata budaya.

Urusan kebudayaan didanai dengan Dana Keistimewaan yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 17(tujuh belas) sub kegiatan, yakni :

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri dari Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, dengan sub kegiatan :
   a. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
   b. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
   c. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan sub kegiatan :
   a. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
3. Kegiatan PengelolaanTaman Budaya, dengan sub kegiatan :
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota
4. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya

1. Kegiatan Adat ,Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan sub kegiatan :
   a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
   b. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
   c. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya
   d. Penghargaan Seniman dan Budayawan
   e. Festival Kebudayaan Yogyakarta
   f. Gelar Budaya Jogja
   g. Publikasi Seni dan Budaya Daerah
   h. Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
   i. Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam masyarakat
   j. Penyelenggaraan even penggiat seni
   k. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan
Urusan Keistimewaan

Program : Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
Urusan Kebudayaan											
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**										
	1	**Kegiatan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman**				**2.435.015.100**		**2.407.013.531**			
		a. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	• **Dinas Kebudayaan** Lawatan Sejarah	orang	150	772.000.000	150	769.326.876	Tidak ada permasalahan		
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah	event	1		1				
			Penulisan Sejarah Lokal	dokumen	2		2				
			Peringatan Hari Besar Sejarah	event	4		4				
			Testimoni Pejuang Bangsa	evenr	1		1				
		b. Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Bahasa Sastra Kulon Progo	kali	1	1.229.982.100	1	1.216.670.794	Tidak ada permasalahan		
			Macapat	kali	12		12				
			Pentas Apresiasi Sastra	kali	3		3				
			Pawiyatan (Pawiyatan Sinden, Pawiyatan Pranata Adicara dan Pamedarsabda(	orang	48		48				

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
				KAMASUTRA (Kenangan Manis Bersama Teater dan Sastra)	kali	1		1				
				Penyusunan Buku Antologi Macapat	Dokumen	1		1				
		c	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	kali	1	433.033.000	1	421.015.861	Tidak ada permasalahan		
				Wajib Kunjung Museum	orang	300		300				
				Pameran Koleksi Museum	event	1		1				
	2	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**					**584.485.562**		**575.587.186**			
		a	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**. Dinas Kebudayaan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)**	Rekomendasi	25	584.485.562	25	575.587.186	Tidak ada permasalahan		
				Reinventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo	dokumen	1		1				
				Edukasi Cagar Budaya	orang	100		100				
				Pemeliharaan Cagar Budaya	Cagar Budaya	3		3				
				Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Cagar Budaya Jembatan Duwet	Paket	1		1				
	3	**Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya**					**4.199.483.234**		**4.012.154.831**			
		a.	Pengelolaan dan Pengembang	• **Dinas Kebudayaan** Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Budaya	bulan	12	4.199.483.234	12	4.012.154.831	Tidak ada permasalahan		

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
			an Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pembuatan Studio Musik	paket	1		1				
				Pentas Band	kali	5		5				
				Pentas Seni Tradisi	kali	32		32				
				Pentas Kethoprak	kali	3		3				
				Pentas Sendratari	kali	2		2				
				Pentas Wayang Wong	kali	1		1				
				Art For Children	kegiatan	5		5				
				Art For Milenials	kegiatan	5		5				
				Kulon Progo Manekawarna	hari	3		3				
				Pentas Musik Kolaborasi	kali	1		1				
				Belanja Pengadaan Alat Musik Band	unit	44		44				
				Belanja Pengadaan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	set	4		4				
	4	**Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**					**844.957.200**		**838.588.026**			
		a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	• **Dinas Kebudayaan** Pengadaan Kostum Karawitan	set	50	844.957.200	50	838.588.026			
				Pengadaan Gamelan	set	3		3				
				Alat Musik Religi	paket	5		5				
				Alat Musik Jathilan	paket	1		1				

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
				Kostum Jathilan	paket	3		3				
	5	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					**25.659.469.900**		**25.461.735.024**			
		a	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	• **Dinas Kebudayaan** Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh	Kalurahan	37	1.562.282.200	37	1.561.302.104	Tidak ada permasalahan		
				Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	Kalurahan	35		35				
				• **Dinas Pertanian dan Pangan** DED Agroeduwisata	dokumen	1		1				
		b.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	• **Dinas Kebudayaan** Sekolah Film	kali	1	667.094.400	1	665.711.919	Tidak ada permasalahan		
				Pameran Seni Rupa Kulon Progo Annual Art	kali	1		1				
				Pameran Seni Rupa Kulon Progo Annual Art	kali	1		1				
				Pembinaan Seni Rupa	kali	0		0				
		c	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	• **Dinas Kebudayaan** Terkirimnya tim kesenian Kab Kota Keluar DIY untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing			1.369.273.500		1.284.764.060	Tidak ada permasalahan		
				GSBY Jakarta	event	1		1				
				Misi Kebudayaan ke Makasar	event	1		1				

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
				Misi Kebudayaan ke Jawa Timur	event	1		1				
				Citra Budaya	event	1		1				
		d.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	• **Dinas Kebudayaan** Penerimaan Penghargaan Budaya	orang	8	313.000.000	8	308.248.288	Tidak ada permasalahan		
		e.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	• **Dinas Kebudayaan** Pentas FKY	event	2	500.000.000	1	495.952.673	Tidak ada permasalahan		
				Pentas Seni FKY	event	1		1				
				Pasar Seni FKY	event	2		2				
		f.	Gelar Budaya Jogja	• **Dinas Kebudayaan** Festival Kethoprak	event	1	4.487.876.200	1	4.463.252.008	Tidak ada permasalahan		
				Festival Langen Carita	event	1		1				
				Festival Sendratari	event	1		1				
				Festival Teater	event	1		1				
				Festival Karawitan Tingkat DIY	event	1		1				
				Menoreh Art Festival	event	1		1				
				Festival Langen Sekar Tingkat DIY	event	1		1				
				Lomba Lukis DIY-Kyoto	orang	300		300				
		g.	Publikasi Seni dan Budaya	• **Dinas Kebudayaan** Siaran Media Elektronik	kali	2	299.575.000	2	290.108.100	Tidak ada permasalahan		

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
			Daerah	Siaran Pers	kali	3		1				
				Kaleidoskop	paket	3						
				Penyusunan Data Kebudayaan	dokumen	1						
		h	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	• **Dinas Kebudayaan** Nyadran Agung	kegiatan	1	887.053.400	1	885.514.402	Tidak ada permasalahan		
				Fasilitasi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) Kulon Progo	kali	4		4				
				Festival Musik Religi	Event	1		1				
				Tradisi Gadon	kali	2		2				
		i.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam masyarakat	• **Dinas Kebudayaan** Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja Wayang Kulit dan Wayang Golek	event	1	1.662.842.200	1	1.643.395.102	Tidak ada permasalahan		
				Pergelaran Wayang Kulit dan Wayang Golek	kegiatan	3		3				
				Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	dokumen	4		4				
				Gelar Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	event	1		1				
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Kulon Progo (DKKP)	bulan	12		12				
				Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda	event	1		1				

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)			
				Permainan Tradisional	event	1		1				
		j.	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	• **Dinas Kebudayaan** Pentas Fasilitasi Seni Budaya	kelompok	90	2.993.227.200	1	2.955.585.181	Tidak ada permasalahan		
				Parade Budaya Perbatasan	kali	3		1				
				Sanja Budaya	kali	2		2				
		k.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	• **Dinas Kebudayaan** Festival Upacara Adat Tingkat Kabupaten	kontingen	12	10.917.245.800	12	10.907.901.187	Tidak ada permasalahan		
				Pengiriman Kontingen Festival Upacara Adat ke DIY	kali	1		1				
				Pentas Gadon	kali	6		6				
				Bimtek Ubo Rampe Upacara Adat	orang	75		75				
				Merti Padukuhan	Padukuhan	913		913				
				Fasilitasi Upacara Adat	kali	15		15				

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kabupaten meliputi 1 (satu) Program dan 6 (enam) Kegiatan, meliputi :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerahdengan sub kegiatan :
    a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan agar kegiatan SKPD mempunyai panduan/arah berjalannya kegiatan. Selain itu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian pelaksanaan Kegiatan fisik 100%.

Kegiatan pada Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pendukung kelancaran jalannya kegiatan penyusunan laporan keuangan . Capaian pelaksanaan fisik ini sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan kegiatan pendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran untuk meningkatkan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan pendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Capaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100 %. Keberhasilan pencapaian program ini sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kegiatan pendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Capaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100 %. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan

kegiatan di Dinas Kebudayaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pada program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan kegiatan pendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran untuk Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Capaian pelaksanaan Kegiatan ini sebesar 100 %. Keberhasilan pencapaian program ini sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Kebudayaan Kabupaten (Kundha Kabudayan) Kab. Kulon Progo sampai dengan T r i w u l a n IV Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																				
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**14.244,14**	**100,00**	**3.761,86**	**34,52**	**639,04**	**61,90**	**964,02**	**91,67**	**898,53**	**100,00**	**807,41**	**100,00**	**3.309,00**	**100,00**	**3.309,00**	**100,00**	**23,23**	**Dinas Kebudayaan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	260,42	12	62,51	3	11,51	3	18,11	3	13,93	3	16,52	12	60,08	12,00	60,08			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	473,04	12	134,66	3	25,47	3	34,46	3	25,84	3	47,93	12	133,70	12,00	133,70			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	10.382,48		2.560,60	3	526,57	3	732,70	-	729,33	6	518,60	12	2.507,20	12,00	2.507,20			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	299,67	12	67,70	3	17,23	3	16,80	3	16,80	3	16,13	12	66,95	12,00	66,95			Dinas Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	27,51	14	6,10	3	-	4	-	3	2,84	4	3,07	14	5,91	14,00	5,91			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	132,51	12	30,04	3	2,31	3	3,96	3	6,56	3	17,14	12	29,97	12,00	29,97			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 paket)	20	63,96	12	14,46	3	1,45	3	3,36	3	5,60	3	3,79	12	14,20	12,00	14,20			Dinas Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,95	2	9,90	-	1,99	-	3,08	2	2,58	-	1,78	2	9,43	2,00	9,43			Dinas Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	27,30	21	6,00	8	1,70	4	0,84	5	1,78	4	1,55	21	5,87	21,00	5,87			Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	190	840,01	6	95,44	-	-	-	-	-	-	6	94,55	6	94,55	6,00	94,55			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53	320,27	17	72,51	4	5,45	4	22,62	5	17,42	4	24,42	17	69,91	17,00	69,91			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	7,45	-	3,58	-	-	-	1,50	1	2,37	1	7,44	1,00	7,44			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	32,85	15	6,91	4	-	4	1,60	6	1,00	1	4,31	15	6,91	15,00	6,91			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	75	1.383,89	1	687,60	-	41,79	-	126,48	-	73,34	1	55,27	1	296,87	1,00	296,87			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61	22,26	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kebudayaan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	156	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman**	**100,00**	**80.673,76**	**100,00**	**33.723,41**	**79,49**	**2.243,03**	**79,49**	**6.770,11**	**88,89**	**14.331,02**	**100,00**	**9.950,93**	**100,00**	**33.295,08**	**100,00**	**33.295,08**	**100,00**	**41,27**	**Dinas Kebudayaan**
			Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya	**69,17**		**63,04**		**66,51**		**53,34**		**61,40**		**63,18**		**63,18**		**63,18**		**91,34**		
			Cakupan pengelolaan taman Budaya	**100,00**		**96,93**		**46,05**		**105,58**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		
			Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	**39,27**		**30,41**		**30,44**		**30,49**		**30,46**		**31,09**		**31,09**		**31,09**		**79,17**		
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	32	1.621,00	9	772,00	1	75,56	1	60,52	6	359,57	1	273,67	9	769,33	9,00	769,33			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (20) Laporan	156	4,00	20	1.229,98	2	110,53	9	100,71	6	588,39	3	417,04	20	1.216,67	20,00	1.216,67			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman Yang Dibina dan Dikelola	20	1.172,00	1	433,03	-	105,42	-	121,22	1	175,27	-	19,11	1	421,02	1,00	421,02			Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	18.279,00	1	4.199,48	-	276,34	-	1.138,55	-	1.333,58	1	1.263,68	1	4.012,15	1,00	4.012,15			Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	8	7.165,00	2	1.562,28	-	-	1	795,75	1	765,55	-	0,00	2	1.561,30	2,00	1.561,30			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina	4	2.258,00	1	667,09	-	20,28	-	0,00	-	309,90	1	335,53	1	665,71	1,00	665,71			Dinas Kebudayaan
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	12	3.400,00	4	1.369,27	1	282,17	2	553,38	1	432,54	-		4	1.268,09	4,00	1.268,09			Dinas Kebudayaan
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan Yang Mendapatkan Penghargaan	20	800,00	8	313,00	-	-	-	-	-	-	8	308,25	8	308,25	8,00	308,25			Dinas Kebudayaan
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	20	2.152,00	3	500,00	-	-		-	-	-	3	495,95	3	495,95	3,00	495,95			Dinas Kebudayaan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	8.138,00	8	4.487,88	-	63,71	3	1.125,75	4	2.621,92	1	655,62	8	4.467,00	8,00	4.467,00			Dinas Kebudayaan
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	12	7,20	9	299,58	2	68,72	-	12,46	3	152,03	4	60,38	9	293,59	9,00	293,59			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	300	1,850	75	887,05	-	369,02	-	-	-	89,12	75	427,38	75	885,51	75,00	885,51			Dinas Kebudayaan
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan Dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	20	6,08	8	1.662,84	-	656,58		45,50	6	498,35	2	442,96	8	1.643,40	8,00	1.643,40			Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan Event Penggiat Seni	24	7,76	3	2.993,23	-	145,64	-	498,16	2	1.305,84	1	1.015,39	3	2.965,03	3,00	2.965,03			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	324	1.939,00	5	10.917,25	-	15,53	2	2.130,43	2	5.542,91	1	3.219,03	5	10.907,90	5,00	10.907,90			Dinas Kebudayaan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*																			
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	120	11.884,00	30	584,49	-	53,54	-	187,67	-	156,04	30	178,33	30	575,59	30,00	575,59			Dinas Kebudayaan
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasaran Budaya	24	2.102,00	60	844,96	-	-	-	-	-	-	60	838,59	60	838,59	60,00	838,59			Dinas Kebudayaan

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:

a. Proses verifikasi pada administrasi keuangan yang berpengaruh pada capaian indikator program
b. Adanya beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya, terutama kegiatan perencanaan dan kegiatan pengendalian, saling berhubungan satu sama lain sehingga capaian fisik dan keuangan kegiatan tersebut terserap menyesuaikan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
c. Terdapat indikator kegiatan dan target serta satuan keluaran kegiatan yang masih belum sinkron di antara MonevKu dan SIPD sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 17 Tahun 2021
d. Adanya kebijakan dari pusat dan penambahan anggaran yang menambah keluaran kegiatan sehingga keluaran kegiatan tidak sesuai dengan target awal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkanya Pelestarian/Pengembangan Budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	52,23 %	54,97 %	57,67 %	60,33 %	52,80 %	-	57,67 %	60,33 %
Meningkatnya Layanan Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%

Pencapaian Capaian kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan :

1. Indikator Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dengan formula :((Jumlah Group kesenian yang mandiri / Jumlah Group kesenian yang teregister x 100%) + (Jumlah sumber sejarah yang dikaji sampai dengan tahun ke-n / Jumlah sumber sejarah yang direncanakan dikaji sampai dengan tahun ke n x 100%) + (Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ber SK / Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang terdaftar x 100%) + (Jumlah desa budaya dan rintisan desa budaya / Jumlah desa dan kelurahan x 100 %)) /4
2. Indikator Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah dengan formula : (Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)/3

Berdasarkan pada tabel 2.2. dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dengan indikator Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dengan dengan target Renstra Perangkat Daerah dari Tahun 2023-2026 secara signifikan meningkat seperti pada tahun 2023 dengan target 52,23 % telah tercapai melebihi target dengan capaian 52,80% sementara untuk sasaran Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah dengan target 100 telah tercapai sesuai target dengan capaian 100 %.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi

Keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progocukup beragam, jumlah kelompok seni budaya sudah lebih dari 1.320 kelompok mencakup kelompok seni tari, musik, kriya, rupa, pertunjukan, MLK. Upacara adat masih kental dalam kehidupan masyarakat, antara lain upacara suran, bersih dusun, saparan, sadranan, dll. Peninggalan sejarah dan purbakala juga cukup bervariasi, mulai dari peninggalan prasejarah, peninggalan periode klasik (Hindu, Budha), peninggalan periode Islam, periode kolonial maupun perjuangan. Namun,kekayaan dan keragaman budaya ini belum didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai, antara lain, masih minimnya balai budaya, belum adanya museum termpat menyimpan asset peninggalan sejarah dan purbakala, taman budaya, sertaketerbatasan pengiriman kontingen seni budaya dalam rangka menunjukkan eksistensi seni budaya Kulon Progo.

Permasalahan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, antara lain :

a. Dukungan SDM / Pegawai

   Jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo saat ini sebanyak 36 orang. Saat ini Dinas masih kekurangan pegawai baik JFU (Jabatan Fungsional Umum) maupun belum terisinya formasi Jabatan Fungsional tertentu Pamong Budaya dan personil yang menguasai pengadaan barang dan jasa.

b. Peralatan / Sarana dan Prasarana

   Terbatasnya peralatan / sarana dan prasarana pendukung dinas Dengan kondisi demikian perlu adanya penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agar Dinas dapat menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, Adanya beberapa capaian indikator kinerja perangkat daerah yang dipengaruhi oleh realisasi sasaran OPD berakibat pada kurang optimalnya pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dalam jangka waktu 5 tahun

mendatang adalah:

a. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;
b. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
c. SDM yang terus dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensinya di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Isu-isu penting dalam ruang lingkup kebudayaan antara lain sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemasyarakatan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jawa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya.
c. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah sebagai asset pengembangan daerah.
d. Belum optimalnya apresiasi dan kristalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial.
e. Masih perlunya peningkatan sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya.
f. Masih perlunya meningkatkan dan melestarikan apresiasi nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat.
g. Belum optimalnya pengembangan kesenian dan kebudayaan masyarakat.
h. Masih sangat terbatasnya tenaga teknis bidang seni dan budaya.
i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana mengekpresikan seni budaya.

2.4 Review Terhadap RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daeah : Dinas Kebudayan (Kundha Kabudayan)

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	Rp 6,00	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**Rp 3.565.156.342,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**Rp 3.565.156.342,00**	
	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu**	**23 Dokumen**	**Rp 33.689.200,00**	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu**	**23 Dokumen**	**Rp 33.689.200,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 23.689.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 23.689.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Rp 10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Rp 10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangakat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**Rp 2.687.283.879,00**	**Administrasi Keuangan Perangakat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**Rp 2.687.283.879,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	Rp 2.605.877.279,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	Rp 2.605.877.279,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Rp 73.271.300,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Rp 73.271.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	Rp 8.135.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	Rp 8.135.300,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**Rp 72.701.945,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**Rp 72.701.945,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 26.207.945,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 26.207.945,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 46.494.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 46.494.000,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	Rp 6,00	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**1 Unit**	**Rp 19.280.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**1 Unit**	**Rp 19.280.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 19.280.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 19.280.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**Rp 229.460.684,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**Rp 229.460.684,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 101.064.700,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 101.064.700,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 128.395.984,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 128.395.984,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**4 Laporan**	**Rp 522.740.634,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**4 Laporan**	**Rp 522.740.634,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kab. Kulon progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp 87.495.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kab. Kulon progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp 87.495.200,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 166.994.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 166.994.800,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Rp 8.422.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Rp 8.422.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 259.828.634,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 259.828.634,00	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**Rp 48.700.999.486,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**Rp 48.700.999.486,00**	
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		**Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman**	**3 Dokumen**	**Rp 6.507.910.400,00**	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**		**Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman**	**3 Dokumen**	**Rp 6.507.910.400,00**	
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan kesejarahan	14 Dokumen	Rp 2.116.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab. Kulon progo	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan kesejarahan	14 Dokumen	Rp 2.116.000.000,00	
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	8 Laporan	Rp 3.891.910.400,00	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	8 Laporan	Rp 3.891.910.400,00	
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Kulon progo	Jumlah permuseuman yang dibina dan dikelola	1 Unit	Rp 500.000.000,00	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Kulon progo	Jumlah permuseuman yang dibina dan dikelola	1 Unit	Rp 500.000.000,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	Rp 6,00	7	8	9	10	11	12
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan**	**1 Objek**	**Rp 1.677.403.706,00**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**		**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan**	**1 Objek**	**Rp 1.677.403.706,00**	
	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	30 Objek	Rp 1.677.403.706,00	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	30 Objek	Rp 1.677.403.706,00	
	Pengelolaan Taman Budaya		**Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan**	**1 Unit**	**Rp 6.363.446.280,00**	**Pengelolaan Taman Budaya**		**Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan**	**1 Unit**	**Rp 6.363.446.280,00**	
	Pengelolaan dan Pengembangan taman budaya kabupaten/kota	Kab. Kulon progo	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	1 Objek	Rp 6.363.446.280,00	Pengelolaan dan Pengembangan taman budaya kabupaten/kota	Kab. Kulon progo	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	1 Objek	Rp 6.363.446.280,00	
	Sarana Prasarana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya**	**3 Unit**	**Rp 1.357.800.000,00**	**Sarana Prasarana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya**	**3 Unit**	**Rp 1.357.800.000,00**	
	Pengadaan sarana dan prasarana lembga budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	20 Unit	Rp 1.357.800.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana lembga budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	20 Unit	Rp 1.357.800.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**11 Dokumen**	**Rp 32.794.439.100,00**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**11 Dokumen**	**Rp 32.794.439.100,00**	
	Pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	2 Laporan	Rp 2.877.658.600,00	Pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya	Kab. Kulon progo	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	2 Laporan	Rp 2.877.658.600,00	
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	DIY dan sekitarnya	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina	2 Lembaga	Rp 1.076.769.000,00	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	DIY dan sekitarnya	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina	2 Lembaga	Rp 1.076.769.000,00	
	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan pelaksanaan misi kebudayaan ke Dalam Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	5 Laporan	Rp 2.606.954.900,00	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan pelaksanaan misi kebudayaan ke Dalam Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	5 Laporan	Rp 2.606.954.900,00	
	Penghargaan seniman dan budayawan	DIY dan sekitarnya	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	10 Orang	Rp 376.352.500,00	Penghargaan seniman dan budayawan	DIY dan sekitarnya	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	10 Orang	Rp 376.352.500,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	Rp 6,00	7	8	9	10	11	12
	Festival Kebudayan Yogyakarta	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3 Laporan	Rp 600.000.000,00	Festival Kebudayan Yogyakarta	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3 Laporan	Rp 600.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	7 Laporan	Rp 5.000.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	7 Laporan	Rp 5.000.000.000,00	
	Publikasi seni dan budaya daeah	DIY dan sekitarnya	Jumlah Dokumen Publikasi seni dan budaya daerah	2 Dokumen	Rp 637.103.600,00	Publikasi seni dan budaya daeah	DIY dan sekitarnya	Jumlah Dokumen Publikasi seni dan budaya daerah	2 Dokumen	Rp 637.103.600,00	
	Pembinaan penghayat kepercayaan	DIY dan sekitarnya	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	75 Orang	Rp 1.617.377.300,00	Pembinaan penghayat kepercayaan	DIY dan sekitarnya	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	75 Orang	Rp 1.617.377.300,00	
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai luhur dalam masyarakat	9 Laporan	Rp 6.000.000.000,00	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai luhur dalam masyarakat	9 Laporan	Rp 6.000.000.000,00	
	Penyelenggaraan event penggiat	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	3 Laporan	Rp 5.812.335.000,00	Penyelenggaraan event penggiat	DIY dan sekitarnya	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	3 Laporan	Rp 5.812.335.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan adat dan tradisi	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	Rp 6.189.888.200,00	Pembinaan Kelembagaan adat dan tradisi	DIY dan sekitarnya	Jumlah laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	Rp 6.189.888.200,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan/Kapanewon dan Pokok Pokiran Kebudayaan Sebagai berikut :

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
B. DWI NUGROHO, SE	Hibah Alat Kesenian	Seperangkat Gamelan untuk Paguyuban Kesenian " MANUNGGAL BUDOYO"	Dukuh, Wijimulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Seperangkat Gamelan	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	Paket	-	-	-
B. DWI NUGROHO, SE	Hibah Alat Kesenian	Seragam untuk kesenian Jatilan	Boto, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Seragam untuk kesenian Jatilan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		15	unit	-	-	-
MUJIHARSA, SH	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Seperangkat Gamelan Karawitan untuk Kelompok Wahyu Manunggal	Kelompok Karawitan dan Ketoprak Wahyu Manunggal, Degolan,Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Gamelan)	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	Paket	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	bantuan Kostum Jatilan Sumber Rukun Budaya (PRIORITAS 1)	bantuan Kostum Jatilan Sumber Rukun Budaya (PRIORITAS 1), Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Prioritas 1 Istana,SH,MIP bantuan Kostum Jatilan Sumber Rukun Budaya	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Pengadaan sragam dan peralatan Hadroh dan trengganon (PRIORITAS 2)	Pendoworejo, Girimulyo, , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pengadaan sragam dan peralatan Hadroh dan trengganon (PRIORITAS 2) Istana,SH,MIP	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Permohonan Kostum Kelompok Kobra Siswa Pantog Kulon (PRIORITAS 3)	Pantog Kulon, Banjaroya kalibawang, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Permohonan Kostum Kelompok Kobra Siswa Pantog Kulon (PRIORITAS 3), Istana,SH,MIP	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Permohonan Kostum Kelompok Kobra Siswa Pranan (PRIORITAS 4)	Pranan , Banjaroya, kalibawang, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Permohonan Kostum Kelompok Kobra Siswa Pranan (PRIORITAS 4), Istana,SH,MIP	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Seragam Jatilan	Ngroto,Pendoworejo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Seragam Jatilan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		30	pasang	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Pelestarian budaya pamestriji/tosan aji	Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pelestarian budaya pamestriji/tosan aji	Mohon cek fasilitasi upacara adat/ seni tradisi, adakah fasilitasi di tahun berapa. mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	KEGIATAN	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Permohonan akta badan hukum lembaga kesenian	Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo.., Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Permohonan akta badan hukum lembaga kesenian	Mohon info tahapan dan syarat akta lembaga kesenian		1	paket	-	-	-
ISTANA,SH,MIP	Hibah Alat Kesenian	Seperangkat Gamelan	Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Seperangkat Gamelan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
SUHARTO	Hibah Alat Kesenian	Bantuan peralatan dan pakaian kesenian Jatilan Krido Mudho Yuwono Kanthi Pengos B, Gerbosari, Samigaluh	Pengos B, Gerbosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Perlu hibah alat kesenian	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	PAKET	-	-	-
Kalis Gatot Raharjo	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Kostum Jatilan	Kelompok Turonggo Budoyo No.Reg 340/652/AKTE-MP/VIII/2017 , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Kostum Jatilan	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		2	paket	-	-	-
Kalis Gatot Raharjo	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Kostum Jatilan	Kriyanan, Wates , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Kostum Jatilan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		2	paket	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Gedung Budaya dari paguyuban ngudi langgeng budaya	Anjir, Hargorejo, Kokap, ., Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (gedung budaya)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	unit	-	-	-

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Gamelan dan seragam karawitan	Dusun Anjir, Hargorejo, Kokap,,,, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Gamelan dan seragam kerawitan)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Bantuan seragam dan alat musik seni jatilan klasik	sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Seragam dan alat musik jathilan)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Insfrastruktur kegiatan seni karawitan pangestu budaya	Tejogan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Alat kerawitan)	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Pembangunan cagar budaya pertambangan geoheritage eks tambang mangan kliripan	kliripan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Pembangunan cagar budaya pertambangan geoheritage eks tambang mangan)	Mohon info aktifitas yang dilaksanakan untuk Kliripan minimal 3-5 tahun terakhir. Mohon info rencana usulan Dais 2025, 2026 untuk kliripan		1	KEGIATAN	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Pembangunan cagar budaya pertambangan geoheritage eks tambang mangan kliripan	Dusun Kliripan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pembangunan cagar budaya pertambangan geoheritage eks tambang mangan	Mohon info aktifitas yang dilaksanakan untuk Kliripan minimal 3-5 tahun terakhir. Mohon info rencana usulan Dais 2025, 2026 untuk kliripan		1	KEGIATAN	-	-	-
IDA RISTANTI, SH	Hibah Alat Kesenian	Bantuan pengadaan gamelan "LANGEN KRIDHO TURONGGO"	Dusun Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Gamelan)	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-
AKHID NURYATI, SE	Hibah Alat Kesenian	Belanja Pakaian searagam Pengurus Desa Budaya	Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pengembangan Desa Budaya	Mohon info apakah mengajukan Desa Mandiri Budaya. Mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-
TITIK WIJAYANTI, SE	Hibah Alat Kesenian	"Pemohonan jaran kepang 8 unit untuk kelompok seni jathilan Sekar Kusuma NO. 430/37/AKTE-MP/IX/2020 Ped. VIII Rt 31 Rw 16, Cerme, Panjatan	Ped. VIII Rt 31 Rw 16, Cerme, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat jaran kepang 8 unit untuk kelompok seni jathilan Sekar Kusuma NO. 430/37/AKTE-MP/IX/2020 Ped. VIII Rt 31 Rw 16, Cerme, Panjatan	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		8	unit	-	-	-

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
UPIYA AL HASAN	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Alat Orgen	Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Alat orgen)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		2	Paket	-	-	-
UPIYA AL HASAN	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Gamelan	Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Gamelan)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	Paket	-	-	-
UPIYA AL HASAN	Hibah Alat Kesenian	Kostum Jatilan	Wijilan,Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Kostum jathilan)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	Paket	-	-	-
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Peralatan Gamelan dan kostum kesenian tradisional Jathilan; Hadroh dan Tari Anak	Pedukuhan Kalipetir Kidul Desa Margosari Pengasih , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Peralatan Gamelan dan kostum kesenian tradisional Jathilan; Hadroh dan Tari Anak	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	Paket	-	-	-
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Usul pengadaan gamelan untuk pelestarian budaya di tingkat pedukuhan	Dusun Kalipetir Lor , Pengasih , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Usul pengadaan gamelan untuk pelestarian budaya di tingkat pedukuhan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	Paket	-	-	-
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Seragam Kelompok Karawitan Lestari Budoyo	Cumetuk,Kedungsari Pegasih , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Seragam Kelompok Karawitan Lestari Budoyo	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		30	unit	-	-	-
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Sound System Paguyuban Sholawat	Gletak,Kedungsari,Pengasih , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Sound System Paguyuban Sholawat	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	set	-	-	-

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Seragam Kelompok Karawitan Laras Budoyo	Kedungsoga Pengasih. , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Seragam Kelompok Karawitan Laras Budoyo Peta Lokasi	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		30	unit	-	-	-
SEPTI NUR ANGGRAENI, S. Pd	Hibah Alat Kesenian	Pelatihan dan bantuan pegadaan alat membatik	Kembang,Margosari,Pengasih, , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pelatihan dan bantuan pegadaan alat membatik	-		1	Paket	-	-	-
BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Hibah Alat Kesenian	Pakaian Seragam Jathilan	Grup Seni Kedokan, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pakaian Seragam Jathilan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		12	Paket	-	-	-
MUJIHARSA, SH	Hibah Alat Kesenian	Pentas Seni Ketoprak, Jatilan, Reog, Oglek, Campusari	5 pedukuhan di Wahyuharjo dan 15 pedukuhan di Bumirejo, Lendah , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (Pentas seni kethoprak)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	Paket	-	-	-
Jeni Widiyatmoko	Hibah Alat Kesenian	Permohonan bantuan peralatan hadroh kelompok watubelah	Watubelah, Sidomulyo, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hibah Alat Kesenian (bantuan peralatan hadroh)	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
Suryanto	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Hibah Gamelan Dan Kostum Reog KARSO BUDOYO // No Reg 430/1105/AKTE-MP/VIII/2017	Nglatiyan 1,RT 04,RW01,Ngentakrejo,Lendah,Kulon Progo, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Hibah Gamelan Dan Kostum Reog KARSO BUDOYO // No Reg 430/1105/AKTE-MP/VIII/2017	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		50000000	Rupiah	-	-	-
Suryanto	Hibah Alat Kesenian	Bantuan Hibah Gamelan Dan Kostum Seni Tari LINTANG SENJA// No Reg 430/1100/AKTE-MP/VIII/2017	Mirisewu,RT 33,RW 10,Ngentakrejo,Lendah,Kulon Progo, Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bantuan Hibah Gamelan Dan Kostum Seni Tari LINTANG SENJA// No Reg 430/1100/AKTE-MP/VIII/2017	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		50000000	Rupiah	-	-	-
Drs. Suharto	Hibah Alat Kesenian	Pengadaan gamelan Balai Kalurahan Krembangan	Panjatan, ..., Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pengadaan gamelan Balai Kalurahan Krembangan	Tidak ada nama grup. Mohon cek kalurahan sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa. Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais (dusun/ kalurahan bisakah)		1	paket	-	-	-
SENDY YULISTYA PRIHANDINY, SE	Hibah Alat Kesenian	(PRIORITAS 8) Bantuan Kesenian	Group Kesenian Krida Turangga Wulung, Seworan, Blok VIII, Triharjo, Wates 143/09/Akte-JT/IX/2001 , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Prioritas 8 Sendy Yulistya P,SE	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais	-	1	paket	-	-	-
SENDY YULISTYA PRIHANDINY, SE	Hibah Alat Kesenian	(PRIORITAS 9) Bantuan Kesenian	Group Kesenian Panca Warga Budaya Dusun Temonan, Bendungan, Wates 430/658/AKTE-MP/VIII/201 , Kab. Kulon Progo	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Prioritas 9 Sendy Yulistya P,SE	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais	-	1	paket	-	-	-
LAJIYO YOK MULYONO	Hibah Alat Kesenian	(PRIORITAS) Bantuan Sragam Jatilan	Paguyuban Kesenian Jathilan Laras Cipto Budoyo""Jangkang Kidul, Sentolo, Sentolo , Kab. Kulon Progo	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(PRIORITAS Lajiyo Yok Mulyono; Bantuan Sragam Jatilan	Mohon cek status grup kesenian. Mohon cek sudah prnh mendapat hibah apa belum, jika sudah mendapat di tahun berapa Jika belum mendapat, mohon info kemungkinan diusulkan Dais		1	paket	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.Kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tersebut terdiri dari 5 (lima) urusan, yang salah satu diantaranya adalah urusan kebudayaan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa YogyakartaNomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013,maka dengan ini Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo menyusun rencana kerja dengan memaksimalkan potensi keunggulan komparatif dan kompetitif dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, sasaran jangka panjang tahun 2025-2045 ialah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama yaitu:

1. mencapai pendapatan per kapita setara negara maju,
2. kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan,
3. meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional,
4. meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan
5. menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

dengan tema pembangunan “Indonesia Emas 2045:

a. Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” adalah meliputi: Mewujudkan transformasi sosial
b. Mewujudkan transformasi ekonomi
c. Mewujudkan transformasi tata kelola
d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Pembangunan kewilayahan
g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 seperti yang dituangkan pada RPD 2023-2026 ialah:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “terwujudnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah “meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pengembangan nilai budaya”.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100
2	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	57,67

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Kebudayaan melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26(dua puluh enam) sub kegiatan, yang didukung dengan program kegiatan di setiap SKPD sebanyak 2 program dan 13 kegiatan serta 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah & Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah & Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan:Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan, dengan

1. Kegiatan : Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

   Sub Kegiatan :

   - Pembinaan dan pengembangan kesejarahan
   - Pembinaan,Pengembangan Bahasa dan Sastra
   - Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman

2. Kegiatan : Pengelolaan Taman Budaya

   Sub Kegiatan :

   - Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota

3. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Sub kegiatan :

   - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budayadan Kantong Budaya
   - Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
   - Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalamrangka diplomasi Budaya
   - Penghargaan Seniman dan Budayawan
   - Festival Kebudayaan Yogyakarta
   - Gelar Budaya Jogja
   - Publikasi Seni dan Budaya Daerah

- Pembinaan Penghayat Kepercayaan,Adat dan Tradisi
- Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhurdalam Masyarakat
- Penyelenggaraan even penggiat seni
- Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

4. Kegiatan : Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

   Sub Kegiatan :

   - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

5. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo secara detail dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			0				0 0	478.520.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**3.565.156.342,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	-			23 Dokumen	33.689.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	23.689.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	2.687.283.879,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.605.877.279,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	73.271.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	8.135.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	72.701.945,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.207.945,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	46.494.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			1 Unit	19.280.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lingkup Dinas	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19.280.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lingkup Dinas		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	229.460.684,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	101.064.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.395.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			4 Laporan	522.740.634,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	87.495.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	166.994.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	8.422.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	259.828.634,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**48.700.999.486,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman*	-			3 Dokumen	6.507.910.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				14 Dokumen	2.116.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				8 Laporan	3.891.910.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan*	-			1 Dokumen	1.677.403.706,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	1.677.403.706,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang dikelola dan dikembangkan*	-			1 Unit	6.363.446.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	6.363.446.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*	-			3 Unit	1.357.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				20 Unit	1.357.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			11 Dokumen	32.794.439.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				2 Laporan	2.877.658.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1.076.769.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				5 Laporan	2.606.954.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				10 Orang	376.352.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				12 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				9 Dokumen	637.103.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				75 Orang	1.617.377.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				9 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				3 Laporan	5.812.335.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				5 Laporan	6.189.888.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.269.773.832,00**							**4.173.110.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.269.773.832,00**							**4.173.110.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.904.377.732,00**							**3.782.860.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	-			**100 %**	**3.637.074.132,00**						-	**3.615.120.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Disampaikan Tepat Waktu*	-			25 Dokumen	15.010.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai program dan sasaran pembangunan.

Mengingat cakupan yang luas program dan kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang optimal pada urusan kebudayaan, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dengan demikian dalam mengatasi keterbatasan anggaran diperlukan upaya-upaya melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kemajuan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo.

Keberhasilan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan karyawati Dinas Kebudayan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Kulon Progo, 02 Agustus 2024

Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan)
Kabupaten Kulon Progo

Drs. Eka Pranyata
NIP. 19650723 198602 1 004

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2025

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Nglinggo Bappeda, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan : Pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) selaku penyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 2025 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 24 Juli 2024

Tim Verifikasi	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : KURNIATI DWI ASTUTI, SP., MPA. NIP : 19810321 200604 2 008 Jabatan: Perencana Ahli Muda Tanda tangan :	1. Nama : R. RARA ERVINA PRASTIWININGRUM, SE NIP : 19750209 199803 2 007 Jabatan: Kasub Bag Perencanaan Tanda tangan : .....

Mengetahui
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M
NIP. 19760317 201001 1 006

DAFTAR HADIR

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten Kulon Progo

NO	Nama	Perangkat Daerah	Jabatan	TandaTangan
1.	Kurniati Dwi A	Bappeda	Perencana Ahli Muda	
2.	Erving Prastiwi Nugrum	Disbud	Kasubbag Perencanaan	
3.	Tiara Rirana R	Disbud		
4.	Nur Edi P.	Bappeda	Ahli I perenana	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

SARAN dan REKOMENDASI
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Nglinggo, Bappeda Kabupaten Kulon Progo
OPD : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Setelah dilakukan verifikasi, berikut beberapa catatan terhadap Rencana Akhir Renja tahun 2025 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan):

1. Bab I Latar Belakang disesuaikan tahun anggarannya menjadi tahun 2025
2. Landasan Hukum yang uraiannya belum lengkap agar dilengkapi, serta agar ditambahkan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2024 tentang RKPD tahun 2025 dan Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 20 tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026.
3. Sub Bab 1.3 dan Sub Bab 1.4 untuk disesuaikan tahun anggarannya.
4. Kesesuaian Isi Bab II Hasil Evaluasi Renja Pd Tahun Lalu, sub Bab 2.1 agar judul dan format tabel disesuaikan, serta ditambahkan uraian penjelasan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu.
5. Bab II sub Bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ditambah uraian penjelasannya.
6. Sub Bab 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat perlu ditambahkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang pernah diusulkan.
7. Bab III sub Bab 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional perlu ditambah kebijakan pokok-pokok Kebudayaan Daerah.
8. Bab III sub Bab 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah perlu ditambahkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikatornya sesuai dengan RKPD tahun 2025.
9. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan agar sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.
10. Rancangan Akhir Renja tahun 2025 setelah diverifikasi dan direvisi agar disampaikan ke Inspektorat Daerah untuk direviu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dengan baik.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program/kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja ini juga dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD 37

2.4 Review Terhadap RKPD 40

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 38

3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional RI 38

3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 41

BAB V PENUTUP 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan Tahun Ketiga Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, RPD Tahun 2023-2026, RKPD 2025 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026. Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

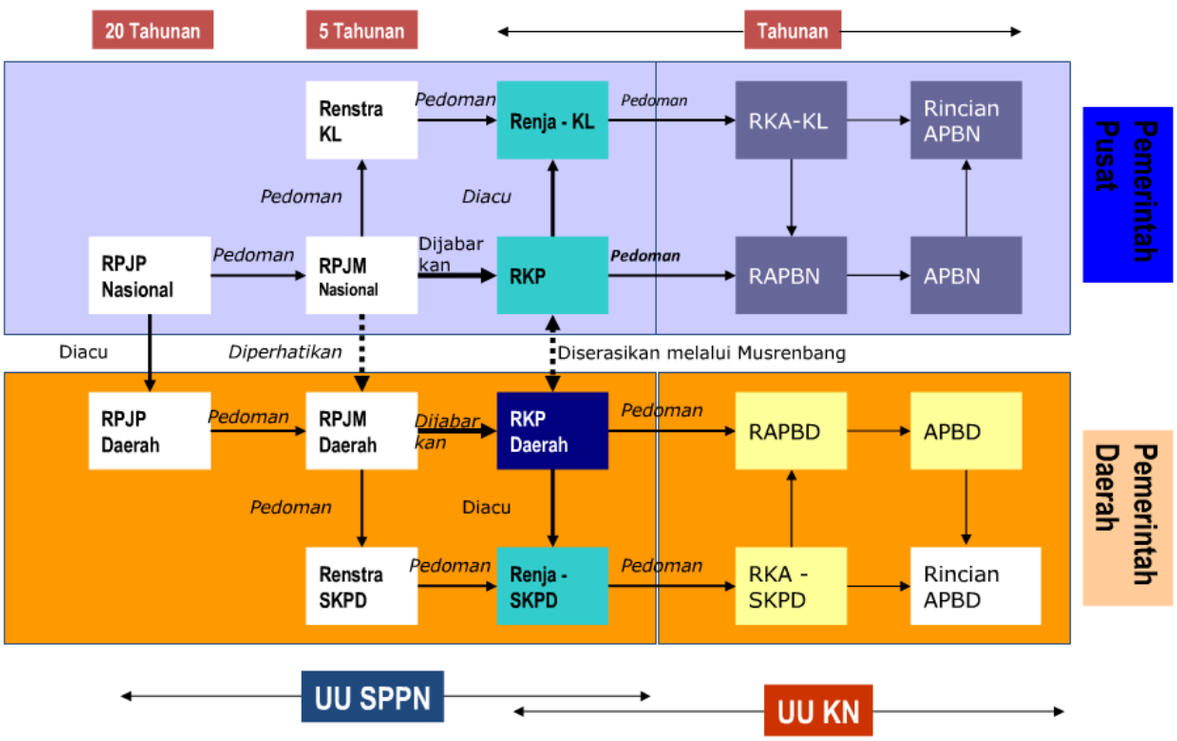

Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara teratur dan terarah serta menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah
- 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kabijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas pelaksaanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 :

- Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan tahun 2023 diukur melalui indikator persentanse pelayanan perpustakaan. Tahun 2023 realisasi sebesar 57,13% dari target yang ditetapkan sebesar 49,18%. Layanan perpustakaan secara umum diarahkan sesuai dengan sasaran pokok pembangunan dalam RPD Tahun 2023-2026 yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Faktor pendukung tercapainya kinerja bidang perpustakaan yaitu dengan membudayakan gemar membaca kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain layanan perpustakaan, menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi dan judul bahan pustaka, perawatan terhadap koleksi bahan pustaka yang rusak, pengelolaan otomasi bahan pustaka, melakukan pembinaan perpustakaan kalurahan, lomba bercerita bagi anak SD/MI tingkat Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan bedah buku tematik, penerbitan buletin dan pameran perpustakaan, menyelenggarakan perpustakaan keliling serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial serta menyediakan pojok baca di Sekretariat Daerah, RS Nyi Ageng Serang, Mal Pelayanan Publik, Bank Kulon Progo dan Pocadi (Pojok Baca Digital) di Polres Kulon Progo.
- Capaian Kinerja Bidang Kearsipan 2023 diukur melalui indikator cakupan pengelolaan kearsipan dengan realisasi sebesar 69,17% dari target 61,53%. Cakupan pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis dan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Faktor pendukung keberhasilan kinerja bidang kearsipan yaitu dengan melakukan penataan arsip pada 11 Perangkat Daerah, melaksanakan penilaian kinerja kearsipan; melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 28 perangkat daerah melalui ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal); Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh DPAD DIY Bersama ANRI terhadap Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dengan nilai 90,53 meningkat dari tahun sebelumnya 70,32; Melaksanakan aplikasi Srikandi; Menyusun 5 Raperbup tentang kearsipan yaitu Raperbup Klasisfikasi Arsip, Raperbup SKKAAD (Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis), Raperbup JRA (Jadwal Retensi Arsip), Raperbup Alih Media dan

Raperbup Arsip Terjaga. Arsip Statis didapatkan dari arsip yang diserahkan oleh perangkat daerah, preservasi dilakukan melalui alih media arsip dan melakukan perawatan arsip.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1a
METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN 2023

No	Nama PERANGKAT DAERAH / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja				Keterangan untuk tahun 2023
					Realiasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	
19	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**								
	Program Pengembangan Budaya Baca	**Cakupan Peningkatan Layanan Perpustakaan**	**%**	**((Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah populasi yang harus dilayani) x 50%) + ((Jumlah buku tahun ke n/ Jumlah target buku sampai dengan tahun ke n) x 30%)) + ((Jumlah perpustakaan terstandar / Jumlah perpustakaan seluruhnya)x 20%))**	**42,99**	**66,19**	**49,18**	**57,13**	
				Jumlah kunjungan perpustakaan	102.822	299.127	145.000	180.902	
				Jumlah populasi yang harus dilayani	442.838	443.361	420.292	446.192	
				Jumlah buku tahun ke-n	56.649	59.244	52.352	60.344	
				Jumlah target buku sampai dengan tahun ke-n	56.649	59.404	52.352	60.344	
				Jumlah perpustakaan terstandar	43	78	60	217	Program dari Perpusnas Relaksasi Akreditasi Perpustakaan

No	Nama PERANGKAT DAERAH / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja				Keterangan untuk tahun 2023
					Realiasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	
				Jumlah perpustakaan seluruhnya	621	621	621	633	
	Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	**Cakupan Pengelolaan Kearsipan**	**%**	**((Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan / Jumlah unit kerja) x 100%) + ((Jumlah desa yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan / Jumlah desa) x 100%)) + ((Jumlah arsip statis yang didapatkan / Jumlah rencana arsip statis yang akan didapatkan x 100%)) /3))**	**79,23**	**100**			
				Jumlah Unit Kerja yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	70,00	94			
				Jumlah Unit Kerja	94,00	94			
				Jumlah desa yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	55,00	87			
				Jumlah desa	87,00	87			
				Jumlah arsip statis yang didapatkan	1.033,00	1.329			
				Jumlah rencana arsip statis yang akan didapatkan	1.033,00	1.300			
				((Jumlah arsip inaktif yang sudah dibuatkan daftar arsipnya / jumlah arsip inaktif) + (Jumlah OPD yang			**61,53**	**69,17**	

No	Nama PERANGKAT DAERAH / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja				Keterangan untuk tahun 2023
					Realiasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	
				memindahkan arsip dari UP ke UK / Jumlah OPD) + (Jumlah OPD yang menyerahkan arsip ke LKD / Jumlah OPD) + (Jumlah Arsip statis yang dialihmediakan / Jumlah arsip statis yang didapatkan)) / 4 X 100 %					
				Volume arsip in aktif yang sudah dibuatkan daftar arsipnya			1.100	2.197	
				Jumlah arsip in aktif			9.000	6.621	
				Jumlah perangkat daerah yang memindahkan arsip dari UP ke UK			25	40	
				Jumlah perangkat daerah yang mmenyerahkan arsipnya ke LKD			30	38	
				Jumlah perangkat daerah			42	40	
				Jumlah arsip statis yang dialihmediakan			1.300	2.743	
				Jumlah arsip statis yang didapatkan			1.350	5.654	

Tabel 2.1b

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Perpustakaan									
2	23				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
2	23	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	23	1	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah dokumen perencanaan	10	-	2	2	100	2	4	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perangkat Daerah								
2	23	1	02.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	-	21	21	100	21	42	50
2	23	1	02.02		Keuangan Perangkat Daerah									
2	23	1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	-	37	37	100	38	75	50,68
2	23	1	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4	-	1	1	100	1	2	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pelaksanaan Tugas ASN								
2	23	1	02.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	-	14	14	100	14	28	50
2	23	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	02.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	-	1	1	100	1	2	50
2	23	1	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	-	2	2	200	1	3	42,86
2	23	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	23	1	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	-	5	5	100	5	10	50
2	23	1	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	-	12	12	100	12	24	50
2	23	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	23	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	-	47	47	361,54	5	52	133,33
2	23	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	1	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
2	23	1	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	12	12	100	12	24	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100	12	24	50
2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	1	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	44	-	12	12	100	9		47,73

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2	23	1	02.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	-	1	1	100	1	2	28,57
2	23	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	-	212	212	100	38	145	247,52

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	2			Program Pembinaan Perpustakaan									
2	23	2	02.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	2	02.01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat daerah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	-	1	1	100	1	2	50
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dengan Standar Nasional Perpustakaan									
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	-	4	4	100	4	8	50
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka									
						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1.200	-	1.036	1.036	100	800	1.836	153
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4.800	-	1.500	1.500	100	1.200	2.700	56,25
2	23	02	2.02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
2	23	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4	-	1	1	100	1	2	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip									
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									
2	24	02	2.01	02	Pemelihraan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	74.000	-	18.000	33.751	100	18.500	52.251	70,61
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	-	5	5	100	5	10	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*) / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	4	2	02.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									
2	4	2	02.02	2	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	56.400	-	13.400	5.654	100	14.000	19.054	33,78

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	(Tahun n)	(tahun n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Indikator Kinerja Kunci**											
	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	Ada	-	-	-	-	60,71	-	-	-	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	Ada	-	-	-	-	68,15	-	-	-	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	-	Ada	-	-	-	-	49,60		-	-	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	Ada	-	-	-	-	81,67		-	-	
II	**Indikator Kinerja Utama**											
	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan		-	34,50	34,49	34,48	34,47	40,50	-	34,48	34,47	
	Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan		-	49,95	59,31	69,05	80,37	68,20	-	69,05	80,37	
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada		-	100	100	100	100	100	-	100	100	

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	(Tahun n)	(tahun n+1)	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	masing-masing Perangkat Daerah											

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan yakni :

1. Indikator Kinerja Kunci :

- Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat

  Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 60,71 dengan kategori tinggi.

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya, dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembanguna Literasi Masyarakat tahun 2023 sebesar 68,15 dalam kategori sedang (memenuhi standar)

- Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional). Indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat ketersediaan arasip yaitu jumlah arsip aktif dan arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Nilai Tingkat ketersediaan arsip tahun 2023 sebesar 49,60.

- Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator dalam menghitung Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, dan tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Adapun nilai tingkat keberadaan dan keutuhan arsip pada tahun 2023 sebesar 81,67.

2. Indikator Kinerja Utama

- Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung ke perpustakaan dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2023 capaian pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebesar 40,54%

- Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan

  Indikator Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan berbeda dengan indikator tahun lalu yaitu menghitung jumlah Perangkat Daerah dengan desa yang telah menerapkan kaidah kearsipan. Sedangkan untuk tahun 2023-2026 Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan dengan indikator volume arsip yang sudah dibuatkan daftar arsip dibanding volume arsip, jumlah Perangkat Daerah yang memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan dibanding jumlah Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip ke LKD dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah. Capaian penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan tahun 2023 sebesar 76,06% melebihi target yang telah diharapkan.

- Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah

  Indikator Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah dihitung jumlah indikator program Perangkat Daerah yang mencapai target dibandingkan dengan jumlah indikator program Perangkat Daerah. Capaian indikator tahun 2023 sebesar 100% sesuai target.

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur
2. Gedung dan sarana prasarana belum memadai untuk layanan perpustakaan dengan belum adanya beberapa fasilitas ruangan yang memenuhi standar pelayanan (gudang, arena bermain anak, ruang laktasi, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang pengolahan, kantin).
3. Berkurangnya sarana layanan keliling (dihapusnya motor pintar).
4. Belum semua pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan kalurahan;
5. Sebagian besar penyelenggaraan perpustakaan kalurahan belum optimal;
6. Masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan perpustakaan karena terbatasnya akses internet;
7. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam layanan perpustakaan/kurangnya tenaga yang menguasai IT dan

kurangnya personil perpustakaan yang dapat ditugaskan untuk melakukan pembinaan perpustakaan sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Kulon Progo;

8. Penambahan koleksi bahan pustaka yang belum sesuai ketentuan Standar Nasional Perpustakaan;
9. Pemanfaatan I-kulonprogo kurang maksimal;
10. Depo arsip yang sudah pernuh dengan arsip yang dikelola, sarana prasarana roll o pack maupun rak arsip juga sudah penuh, sehingga arsip statis yang diserahkan belum bisa diterima;
11. Mayoritas perangkat daerah kekurangan personil yang mengelola arsip, terutama arsip inaktif;
12. Koleksi arsip statis (arsip yang bernilai historis) yang dimiliki LKD sangat minim;
13. Minimnya peran pimpinan perangkat daerah untuk memotivasi petugas arsip yang enggan melakukan penataan arsipnya;
14. Petugas arsip yang ada sering berganti personil;
15. Pegawai bidang kearsipan belum mengikuti diklat teknis karena terkendala biaya;
16. Perangkat Daerah tidak mempunyai sarpras untuk penataan arsip dinamis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan;
4. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan;
5. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
9. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya

Kendala yang dihadapi dapat menghambat secara tidak langsung terhadap pencapaian tujuan daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

karena meningkatkan ilmu pengetahuan dengan layanan pemustaka tidak optimal, serta tidak optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel karena penataan arsip yang kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimasa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan sarana prasarana selama ini sudah diatasi dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Meskipun belum optimal namun harus dilakanakan mengingat hampir semua perangkat daerah juga menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana.
2. Keterbatasan pelayanan keliling karena armada dan *driver* berkurang juga keterbatasan penambahan koleksi sangat terasa karena untuk pelayanan keliling tingkat peminjaman tinggi. Karena frekuensi tinggi dan peminjamnya anak-anak sehingga tingkat kerusakan tinggi.
3. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi dicukupi dengan diklat/bimtek dan kerja sama dengan dinas teknis.
4. Keterbatasan pustakawan dalam teknis pelayanan dicukupi dengan mengoptimalkan jabatan struktural/staf maupun tenaga tidak tetap dalam pelayanan perpustakaan dengan pengawasan dari pustakawan.
5. Keterbatasan jumlah arsiparis khususnya di perangkat daerah menjadikan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum bisa optimal. Untuk itu pendampingan arsip di perangkat daerah dengan melibatkan THL Kearsipan menjadi pilihan. Meskipun cara ini belum efektif untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan arsip di perangkat daerah paling tidak bisa mengurangi tumpukan arsip di perangkat daerah yang belum diolah. Arsip yang belum diolah menyebabkan tidak mungkin adanya penyerahan arsip statis ke lembaga kerasipan daerah. Padahal aspek ini juga merupakan salah satu aspek penilaian ekstrernal kearsipan. Jika sudah semakin tertata maka pengawasan internal kearsipan sangat terbuka untuk dilakukan.
6. Kesadaran pengelolaan arsip dan prioritas pengelolaan arsip yang dianggap kegiatan tidak prioritas ditempuh dengan menjadikan pengelolaan arsip menjadi salah satu aspek penilaian kinerja perangkat daerah dalam perolehan TPP. Dengan ini perangkat daerah seperti dipaksa untuk melakukan pengelolaan arsipnya.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

a. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.

b. Penambahan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dinas.
c. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana bagi pemustaka seperti ruang audio visual, ruang baca anak yang lebih luas untuk ajang ekspresi, ruang laktasi, kantin dan sarana prasarana perpustakaan antara lain gudang, ruang pelestarian bahan pustaka serta ruang pengolahan.
d. Penyediaan ebook agar pemustaka memiliki bacaan yang bermutu melalui pemanfaatan *gadget*.
e. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.
f. Implementasi SRIKANDI secara konsisten pada semua Perangkat Daerah.
g. Prioritas keberadaan THL kearsipan untuk menata arsip dengan volume arsip kacau dan belum tertata masih sangat besar.
h. Tetap menjadikan penataan arsip menjadi salah satu indikator nilai kinerja perangkat daerah, sehingga perangkat daerah yang melakukan penataan arsipnya dengan adanya daftar arsip tersebut, maka nilai kinerja kearsipan juga baik.
i. Pemantauan dan pendampingan secara intensif terhadap pengelolaan arsip desa, baik melalui pembuatan daftar arsip di *google spreadsheet* maupun memantau penataan langsung.

2.4 Review Terhadap RKPD

RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2025

PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. KP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	10.060,9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	10.060,9	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. KP	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	4.949,3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	4.949,3	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	2.786.966,783	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	2.786.966,783	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	34.747,4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	34.747,4	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	14 laporan	5.931,600		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	14 laporan	5.931,600	

	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. KP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2.957,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2.957,800	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	5.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	5.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KP	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	21.751,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	21.751,1	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	41.658	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	41.658	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	178.495,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	178.495,1	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi,	Kab. KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	107.429,029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	107.429,029	

	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sumber Daya Air dan Listrik		dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. KP	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	253.058,460		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	253.058,460	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	132.720,660		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	132.720,660	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	41.348		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	41.348	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					

	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Kab. KP	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	131.416,1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	131.416,1	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Kab. KP	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 perpustakaan	17.431,6		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 perpustakaan	17.431,6	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. KP	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	800 eks	92.966,7		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	800 eks	92.966,7	

	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab KP	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 perpustakaan	25.489,2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 perpustakaan	25.489,2	
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. KP	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	18.700 berkas	233.969,600	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	18.700 berkas	233.969,600	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. KP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 laporan	48.098,5		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 laporan	48.098,5	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. KP	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	14.000 arsip	83.328	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	14.000 arsip	83.328	
				Jumlah		4.269.773,832					4.269.773,832	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kapanewon dan usulan reses (pokir dewan). Dari usulan yang disampiakn beberapa kegiatan dapat diakomodir namun beberapa kegiatan lain belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan atau bukan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perlunya evaluasi dari musrenbang kapanewon agar usulan disampaikan secara lengkap, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat yang dapat terakomodir.

Adapun usulan di tahun 2025 yang terangkum dalam rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo

No	ID Usulan	Usulan	Lokasi	Masalah	Volume	Keterangan
1.	567894	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	Prembulan, Pandowan Galur, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi gemar membaca per kalurahan KWT Semi Makmur Prembulan Pandowan	50 orang	Usulan dewan- dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk sosialisasi yang diusulkan oleh pokir dewan karena kegiatan rutin tidak mengakomodir sosialisasi gemar membaca)
2.	567895	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	Tubin RT 38 Sidorejo Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi gemar membaca per kalurahan Kelompok senam Tubin RT 38 Sidorejo Lendah	50 orang	Usulan dewan- dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk sosialisasi yang diusulkan oleh pokir dewan karena kegiatan rutin tidak mengakomodir sosialisasi gemar membaca)
3.	567896	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	Dusun X Jeronan brosot Galur , Kab. Kulon Progo	Sosisalisasi gemar membaca per kalurahan Kelompok senam Dusun X Jeronan brosot Galur	50 orang	Usulan dewan- dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk sosialisasi yang diusulkan oleh pokir dewan karena kegiatan rutin tidak mengakomodir sosialisasi gemar membaca)
4.	567897	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	Temben Ngentakrejo , Kab. Kulon Progo	Sosisalisasi gemar membaca per kalurahan Kelompok senam temben Ngentakrejo	50 orang	Usulan dewan- dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk sosialisasi yang diusulkan oleh pokir

No	ID Usulan	Usulan	Lokasi	Masalah	Volume	Keterangan
						dewan karena kegiatan rutin tidak mengakomodir sosialisasi gemar membaca)
5.	567898	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	Bangeran RT 35 Bumirejo Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosisalisasi gemar membaca per kalurahan Kelompok senam Bangeran RT 35 Bumirejo Lendah	50 orang	Usulan dewan- dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk sosialisasi yang diusulkan oleh pokir dewan karena kegiatan rutin tidak mengakomodir sosialisasi gemar membaca)
6.	1558179	penambahan buku koleksi bahan umum	Perpustakaan Jatimulyo, Kab. Kulon Progo	Pengadaan buku dan rak		Usulan Musrenbang Kap- Rekomendasi kapanewon: Belum menjadi prioritas. Pagu tidak mencukupi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional RI

Arah kebijakan dan strategi Perpustakaan Nasional RI dalam renstra perpusnas 2020-2024 diantaranya adalah peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan melalui pengembangan koleksi perpustakaan nasional, kemitraan dengan penerbit, pengarang, lembaga/instansi pemerintah dan swasta juga sejalan dengan yang dilakukan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan mewujudkan tersedianya koleksi bahan pustaka dalam jumlah yang memadai dan berkualitas, serta pelaksana akuisisi hasil terbitan di Kabupaten Kulon Progo & Kulonprogosiana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo juga mengacu kebijakan ditingkat nasional.

Demikian pula peningkatan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional juga akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan pengembangan minat baca secara terintegrasi di tingkat kabupaten.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia akan melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan yang meliputi pustakawan, tenaga teknis dan tenaga ahli, berkaitan dengan hal tersebut juga melakukan hal sama dan sinergis ditingkat kabupaten oleh Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo.

Dalam melaksanakan revitalisasi perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan perpustakaan yakni dengan Program unggulan yang akan dilaksanakan perpustakaan elektronik (e-Library) yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pemustaka dengan layanan otomasi perpustakaan yaitu komputerisasi dalam layanan peminjaman/pengembalian bahan pustaka.

Arah kebijakan dan strategi Arsip Nasional RI diantaranya adalah mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan sejalan dengan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan memberikan pembinaan ke perangkat daerah dan juga dengan melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan kearsipan ke perangkat daerah serta menyusun

pedoman dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Arsip Nasional RI juga melaksanakan kegiatan yang mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip, hal ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dengan upaya-upaya melakukan akuisisi arsip statis tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dan juga pemeliharaan perawatan serta memberikan layanan bagi para pemanfaat arsip tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berlandaskan pada Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka dijabarkan dan ditetapkanlah tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,348
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,31
	Meningkatnya minat baca Masyarakat	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	%	34,48
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	A
		Akuntanbilitas pengelolaan keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75
	Meningkatnya pengelolaan	Penerapan arsip sesuai kaidah		69,05

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
	kearsipan	kearsipan		
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap Perangkat Daerah		100

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 3 program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan jumlah rencana anggaran sebesar Rp. 4.269.773.832,00. Kegiatan yang dilakukan di bidang perpustakaan antara lain melaksanakan pelayanan di kantor, perpustakaan keliling, bedah buku, lomba bercerita, lomba perpustakaan kalurahan, pendampingan akreditasi sekolah, pameran, wisata buku, penambahan dan pemeliharaan koleksi bahan pustaka serta melaksanakan bimtek dalam rangka perpustakaan berbasis inklusi sosial. Layanan perpustakaan keliling dilaksanakan pada TK, SD, SMP di 12 Kapanewon dengan dasar Mou.

Bidang Kearsipan akan melaksanakan kegiatan pendampingan monitoring penataan arsip maupun pelaksanaan SRIKANDI di perangkat daerah dan kalurahan di Kab. Kulon Progo, dan pengelolaan arsip statis di LKD. Tabel rencana program ditampilkan pada BAB selanjutnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pembinaan Perpustakaan

2.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan

2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2.2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

2.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

3. Program Pengelolaan Arsip

3.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

3.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Statis Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dam Akses Arsip Statis

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						4.269.773.832,00							4.173.110.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.269.773.832,00							4.173.110.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.904.377.732,00							3.782.860.000,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	3.637.074.132,00						-	3.615.120.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Disampaikan Tepat Waktu	-			25 Dokumen	15.010.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.060.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.949.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	-			14 Dokumen	2.827.645.783,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	2.976.620.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.786.966.783,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		2.931.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	34.747.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.931.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	-			2 Dokumen	7.957.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	15.000.000,00	
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.957.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	-			2 Dokumen	63.409.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	70.000.000,00	
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	21.751.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41.658.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset	-			3 unit	178.495.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	60.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	178.495.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	-			24 Laporan	360.487.489,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	240.000.000,00	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107.429.029,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	253.058.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			3 Laporan	184.068.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	240.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	132.720.660,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	41.348.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	-			49,49 %	267.303.600,00						-	167.740.000,00	
	2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan	-			7 Perpustakaan	241.814.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo	-	140.720.000,00	
	2	23	02	2.01	0004		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
								Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpustakaan	17.431.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		13.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
								Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	131.416.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		112.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				800 Eksemplar	92.966.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		14.890.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	-			1 perpustakaan	25.489.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo	-	27.020.000,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustakaan	25.489.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						365.396.100,00							390.250.000,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	-			74,20 %	365.396.100,00						-	390.250.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	-			18700 Berkas	282.068.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo	-	294.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				18.700 Berkas	233.969.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		218.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	48.098.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-			14000 Arsip	83.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo	-	96.250.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				14000 Arsip	83.328.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
											J U M L A H	**4.269.773.832,00**							**4.173.110.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun berdasarkan rencana program kegiatan Perangkat Daerah.

Sangat disadari apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindaklanjuti pada tahun-tahun selanjutnya.

Dengan disusunnya dokumen perencanaan teknis operasional kerja ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2025 yang nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran dan diharapkan rencana kerja yang telah disusun dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat Kulon Progo serta pengelolaan arsip yang semakin baik.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DRS. DUANA HERU SUPRIYANTA, M.M

NIP. 19740122 199311 1 001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kulon Progo

2025

www. dkp.kulonprogokab.go.id
0274-773-126
dislautkankp@gmail.com
Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo, 55652

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Renja ini disusun dengan berdasarkan usulan dari berbagai pihak dengan menyesuaikan dengan tupoksi, kewenangan dan prioritas kegiatan. Rencana kerja juga disusun dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun yang lalu.

Semoga upaya pembangunan kelautan dan perikanan ini menjadi manfaat bagi pembangunan masyarakat di Kulon Progo.

Kulon Progo, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Ir. Prenggono Trimulyo, MT
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 196607111995031001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 14
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 15
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 17
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 25
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 27
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 28

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB VI PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023 KABUPATEN KULON PROGO 6
TABEL II.2 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2026 14
TABEL II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 15
TABEL II.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO 18
TABEL II.5 USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO 24
TABEL IV.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, hasil forum PD 2025, RKPD 2025, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting yang ada, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas.

Renja PD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Rancangan Renja secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renja PD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Tempat Pelellangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 25 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di Tahun 2025.
2. Sebagai bahan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dam Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kelautan dan perikanan terdiri atas 6 program dan 18 kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2023 - 2026, realisasi program dan kegiatan telah mencapai target yang dicanangkan seperti terlihat pada rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kab Kulon Progo.

Salah satu poin penting pada evaluasi pelaksanan adalah dalam produksi perikanan. Kinerja produksi ini terealisasi sebagai akibat kinerja pelaku usaha perikanan yang baik pada TA 2023 dengan dukungan penyelesaian program dan kegiatan. Tercatat nilai produksi ikan tahun 2023 tercapai Rp.515.353.848.473,66 atau 109,30% dari target kinerja daerah yang ditetapkan yaitu Rp.471.484.645.703,78.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikaann Kabupaten Kulon Progo

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,000**	**100,00**		**-**
3.25.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**23**		**23**	**23**	**100,000**	**23**	**23,00**	**1**
3.25.01.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2	2	100	2	2	0,2
3.25.01.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	94		22	22	100	21	22	0,234042553
3.25.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**14**		**14**	**14**	**100,000**	**14**	**14**	**1**
3.25.01.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	480		480	480	100,000	480	480	1

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01. 02.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1	1	100,000	1	1	1
3.25.01. 02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD E19	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14		14	14	100,000	14	14	1
3.25.01. 02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**layanan koordinasi dan perjalanan dinas (bulan)**	**12**		**12**	**12**	**100,000**	**12**	**12**	**1**
3.25.01. 02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25		4	4	100,000	15	4	0,16
3.25.01. 02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		12	12	100,000	12	12	0,25
3.25.01. 02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan aset (unit)**					**#DIV/0!**		0	#DIV/0!

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01. 02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		28	28	100,000	1	28	28
3.25.01. 02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**layanan administrasi perkantoran (bulan)**	**12**		**12**	**12**	**100,000**	**12**	**12**	**1**
3.25.01. 02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	12	100,000	1	12	1
3.25.01. 02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12	100,000	1	12	1
3.25.01. 02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah aset kondisi baik (unit)**	12		3	3	**100,000**	3	3	0,25
3.25.01. 02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		54	54	100,000	49	54	1,102040816
3.25.01. 02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1		1	1	100,000	1	1	1

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01. 02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67		60	60	100,000	67	60	0,895522388
03.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**16.910**		**16.763**	**16.763**	**100,00**	**16.805**	**16.763**	**1**
3.25.04. 02.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)**	**5**		**3**	**3**	**100,000**	**4**	**3**	**1**
3.25.04. 02.02 .1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5		35	35	100,000	3	35	7
3.25.04. 02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)**	**84,60**		**84,20**	**84,20**	**100,000**	**84,40**	**84**	**1**
3.25.04. 02.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	59		59	59	100,000	59	59	1
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						#DIV/0!		-	#DIV/0!
3.25.04. 02.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4		1,000	1,000	100,000	1	1	0

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap (ton)**	**2.125,00**		**2.050,00**	**2.050,00**	**100,000**	**2.075,00**	**2.050,00**	**0,96**
03.25.03 .02.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%)**	**92**		**89**	**89**	**100,000**	**90**	**89**	**1**
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						**#DIV/0!**		**-**	**#DIV/0!**
03.25.03 .02.01.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80		41	41	100,000	20	41	1
3.25.03. 02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)**	**77**		**68**	**68**	**100,000**	**71**	**68**	**1**
3.25.03. 02.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	200		50	50	100,000	50	50	0
3.25.03. 02.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**4**		**4**	**4**	**100,000**	**4**	**4**	**1**
3.25.03. 02.03.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan	1		1	1	100,000	1	1	1

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)								
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)**	**92,59**		**91,67**	**91,67**	**100,000**	**92,00**	**91,67**	**0,99**
3.25.05.02.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)**	**100**		**100**	**100**	**100,000**	**100**	**100**	**1**
3.25.05.02.01.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4,000		1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	0,250
03.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar (%)**	**70,42**		**42,25**	**42,25**	**100,000**	**52,82**	**42,25**	**0,60**
		Produksi pengolahan ikan (kg)	**155000**		**140000**	**140000**	**100,000**	**145000**	**140000**	**1**
3.25.06.02.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi**	**Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan**	**70**		**42**	**42**	**100,000**	**53**	**42**	**1**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar (%)**								
3.25.06. 02.02.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	100,000		70,000	70,000	100,000	75,000	70,000	0,700
3.25.06. 02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)**	**155.000**		**140.000**	**140.000**	**100,000**	**145.000**	**140.000**	**1**
3.25.06. 02.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	80,000		24,000	24,000	100,000	20,000	24,000	0,300
3.25.01	**Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,000**	**100,00**	**100,00**	**1,00**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.25.01. 02.09	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	100		100	100	**100,000**	100	100	1
	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	108		44,000	44,000	100	72,000	44,000	0,407

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum meliputi 2 indikator, terdiri dari 1 indikator kinerja kunci dan 2 indikator kinerja dinas urusan kelautan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Kinerja Kunci											
	Outcome:											
	Produksi Perikanan (Ton)		v	18.813	8.880	18.955	19.035	18.853,44	9.566,76	18.955	19035	
II	Indikator Kinerja Dinas											
	Nilai Produksi Perikanan (Rp)			471.484.645.703,78	472.678.263.851,90	474.150.259.525,28	486.843.198.094,14	515.353.848.473,66	249.400.944.888	474.150.259.525,3	486.843.198.094,1	
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%)			100	100	100	100	102,61		100	100	

Indikator Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Kelautan dan Perikanan berupa produksi perikanan dan Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah. Berdasarkan indikator tersebut, untuk Tahun 2023 capaian kinerja produksi perikanan mencapai 109,30% seperti terlihat pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kineja sasaran Daerah / IKU Perangkat Daerah	Satuan	Taerget 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target 2024
Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rp	471.484.645.703,78	**515.353.848.473,66**	209,30	472.678.263.851,90
Meningkatnya kualitas penyelenggaaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 5 (lima) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program , Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Sektor ini mempunyai peluang antara lain :

- Peluang pasar terbuka lebar dimulai dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pemasaran ikan serta wisata edukasi perikanan
- Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarta
- Universitas yang menyediakan IPTEK
- CSR dari lembaga-lembaga swasta

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP)
2. Upgrading kapasitas SDM nelayan

3. Pengembangan kelembagaan nelayan Perairan Umum Daratan (PUD)
4. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hulu hilir produk perikanan dan kelautan
5. Pengembangan kawasan Minapolitan
6. Kekancingan penggunaan tanah PAG untuk optimalisasi TPI

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Tambahan dana keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan
2. Inovasi Gerbang Segoro (Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong) menambah antusiasme masyarakat dalam membangun kelautan dan perikanan
3. Adanya sarana dan prasarana pendukung produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang masih dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya ikan.
5. Produksi bibit ikan air tawar yang masih perlu ditingkatkan baik kulaitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan ikan air tawar.

Di sisi lain pembangunan sektor kelautan dan perikanan menghadapi beberapa tantangan yang harus ditanggulangi dengan beberapa strategi. Tantangan tersebut antara lain :

1. Persaingan produk perikanan daerah lain yang lebih kompetitif
2. Bencana alam (global warming, abrasi, ketersediaan air/ kekeringan)
3. Kompetisi dengan aktifitas perkonomian dan daerah lainnya
4. Kapasitas SDM pelaku usaha masih rendah

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah seperti berikut :

1. Sebagian besar usaha perikanan merupakan usaha sampingan.

2. Pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan belum optimal.
3. Kemampuan manajemen usaha masih kurang.
4. Harga sarana produksi dan pakan yang tinggi.
5. Kurangnya sinkronisasi dalam pemanfaatan lahan oleh pemangku kepentingan.

2.4. Review terhadap RKPD

Jumlah program/ kegiatan dalam renstra SKPD 6 program, 16 kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana Rp. 9.129.623.750,-. Rincian review terhadap RKPD terdapat dalam tabel II.4. Hasil review dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan terutama pada 3 sub kegiatan. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecl dan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota berubah karena ada penambahan dari POKIR yaitu penambahan anggaran untuk 1 lokasi penebaran benih restocking dan penambahan anggaran untuk hibah sarana produksi budidaya ikan kepada 5 kelompok Pokdakan sedangkan Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari bertambah anggarannya dengan adanya Berita Acara Awal Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keisitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Kulon Progo Urusan/Kewenangan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 No. 100.1.5.1/3068 tanggal 27 Februari 2024.

Tabel II.4 Review terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					6.468.170.000					**9.129.623.750**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	**3.006.579.553**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	**2.980.612.850**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**25**	**11.200.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**25**	**17.536.900**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	11.391.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	21	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	21	6.145.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**14**	**2.587.279.553**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (dokumen)**	**14**	2.580.178.853	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	33	2.520.479.553	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	33	2.520.479.553	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	63.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	55.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD E19	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD E19	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	3.749.300	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2**	**13.100.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2**	4.412.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**1**	3.100.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**1**	2.412.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**1**	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**1**	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	**55.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	54.745.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	13.310.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	43.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	41.435.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah penambahan aset (unit)**	1	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah penambahan aset (unit)**	1	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**12**	**225.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**12**	200.285.797	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.722.681	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	154.563.116	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	3	115.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	3	123.454.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49	110.449.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.016.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67	7.988.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**16.855**	**275.703.009**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**16.855**	**506.850.900**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)**	**4**	**125.000.000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)**	**4**	333.594.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	125.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	333.594.000	Penambahan dari Pokir
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)**	**84,6**	**150.703.009**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)**	**84,6**	173.256.900	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	59	70.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	59	93.276.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji	1	80.703.009	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	1	79.980.900	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Produksi perikanan tangkap (ton)**	**2.100,00**	**169.535.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi perikanan tangkap (ton)**	**2.100,00**	**169.160.300**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen**	**91**	**20.000.000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen**	**91**	19.933.100	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20	20.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20	19.933.100,	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)**	**74**	**41.000.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)**	**74**	40.691.400	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	50	41.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)	50	40.691.400	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		**Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**4**	**108.535.800**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		**Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**4**	108.535.800	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kulon Progo	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	108.535.800	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Kulon Progo	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	108.535.800	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		**Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)**	**92,31**	**10.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)**	**92,31**	46.335.300	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		**Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)**	**100**	**10.000.000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)**	**100**	46.335.300	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	10.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	46.335.300	Penambahan dari Pokir
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar (%)**	**63,38**	**125.000.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar (%)**	**63,38**	**122.060.800**	
			Produksi pengolahan ikan (kg)	**150000**	**-**			**Produksi pengolahan ikan (kg)**	**150000**	**-**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar (%)**	**63**	**75.000.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar (%)**	**63**	72.402.300	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	90	75.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	90	72.402.300	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)**	**150.000**	**50.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)**	**150.000**	49.658.500	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	20	50.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	49.658.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)			1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)			
	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan		**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100**	**0**	**Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan**		**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100**	**5.304.603.600**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	100	0	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	100	**5.304.603.600**	
	Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Kulon Progo	Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	90	0	Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Kulon Progo	Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	90	**5.304.603.600**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program kegiatan dilaksanakan dengan memadukan usulan dari bawah/ masyarakat (*bottom up*) dan usulan yang bersifat kebijakan dari pemerintah (*top down*). Keterpaduan usulan program kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir isu-isu yang berkembang sehingga dapat mendukung kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rincian data usulan program kegiatan Tahun 2025 seperti terlihat pada Tabel II.5 di bawah ini.

Tabel II.5 Usulan Program Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**16.855**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)**	**4**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	Usulan dari proposal 3 kelompok dan dari Pokir 6 kelompok
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar (%)**	**63,38**	
			Produksi pengolahan ikan (kg)	**150000**	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)**	**150.000**	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3	Usulan dari proplsa 3 pelaku usaha (kelompok)
	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan		**Persentase pengembangan budaya bahari**	**0**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan	0	
	Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Kulon Progo	Jumlah Objek Budaya Bahari yang dikembangkan	13	Usulan dari proposal 39 kelompok

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Renja PD tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RP PD Tahun 2005-2025, serta Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Renja PD Tahun 2025 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau,dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yangAdil dan Makmur

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2025, Renja PD Tahun 2025 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam RKPD DIY Tahun 2025, yaitu “Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Sektor unggulan dimaksudkan bahwa RKPD Kabupaten Kulon Progo 2025 pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan. Kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru/ berbeda. Ekonomi inklusif dimaksudkan bahwa peningkatan kesejahteraan dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

"**Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif**". Kawasa pertumbuhan adalah kawasan yang memiliki fasilitas serta kemudahan, sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Kawasan pertumbuhan yang menjadi sasaran dalam tema pembangunan di Kulon Progo adalah Kawasan Aerotropolis, Kawasan Perbukitan Menoreh, Kawasan Pansela, dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusifyang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3. Perluasan akses dan kesempatan

Tema Pembangunan tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah **"Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"** yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni: 1). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; 2). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari; 7). Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri; dan 8). Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 sebagai berikut :

"Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya"

2) Sasaran

Sasaran kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Target Tahun 2025
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rp	Produksi perikanan (kg) x harga	474.150.259.525,28
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntable	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing secretariat perangkat daerah	%	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing secretariat perangkat daerah	100

3.3. Program dan Kegiatan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan 4 (empat) program utama, dengan rincian :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
  - Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
    - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya,
  - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

        - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
    - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
        - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
    - Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan
    - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
        - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
    - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
        - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.
    - Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
        - Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketugasan urusan pilihan di Kabupaten Kulon Progo berdiri sejak Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun susunan organisasi OPD diatur lebih detail pada Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 tentang

kedudukan fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Peraturan bupati ini membagi OPD DKP KP menjadi satu sekretariat dengan tiga bidang utama : Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai ketugasan penting dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya. Tujuan penting ini dilaksanakan bahu membahu oleh Seksi Produksi budidaya dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Keskanling). Seksi pertama berupaya dalam teknis budidaya tiap pelaku usaha pembudidayaan ikan. Peningkatan teknis budidaya ini dilakukan baik dari segi SDM pelaku usaha dan bantuan fasilitasi kepada pelaku usaha pembudidayaan. Adapun seksi keskanling ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dengan jalan mengupayakan kesehatan ikan dan sekaligus lingkungan budidaya (air, kolam budidaya). Keberadaan Pos Kesehatan Ikan dan Lingkungan terpadu menjadi salah satu upaya rutin dari seksi ini. Selain dua seksi tersebut, upaya pada bidang ini didukung dengan keberadaan UPT Perbenihan Perikanan yang menyediakan bibit berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi perikanan di Kulon Progo.

Bidang Perikanan Tangkap ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kulon Progo. Didalamnya adalah produksi penangkapan ikan di laut dan perairan umum daratan (PUD). Peningkatan ini diupayakan melalui kegiatan pada dua seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Seksi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan. Seksi pertama bertugas dalam sisi kelembagaan pelaku usaha penangkapan ikan. Berupaya meningkatkan SDM dan kelembagaan kelompok adapun seksi kedua melakukan peningkatan sarana dan prasarana melalui berbagai upaya seperti fasilitasi sarana usaha dan peningkatan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan. Selain dua seksi tersebut, upaya dari bidang didukung oleh UPT Tempat Pelelangan Ikan yang melakukan pembinaan langsung terhadap pelaku pelelangan ikan di empat lokasi di seluruh Kabupaten Kulon Progo.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berfungsi meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam hal usaha meningkatkan daya saing ini,

bidang berupaya terus meningkatkan pengembangan usaha di tiap pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui fasilitasi perijinan usaha. Keberadaan usaha yang terjamin akan meningkatkan daya saing pelaku usaha dengan meningkatkan pengembangan usaha perikanan. Usaha lainnya yaitu melakukan pembinaan, peningkatan kualitas kelembagaan dan peluang kerjasama antar pemangku kepentingan di Kulon Progo.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan produksi ikan dan pendapatan pelaku usaha perikanan. Program dan kegiatan adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 terdiri dari 6 program 16 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 9.129.623.750,- dengan rincian sebagai berikut:

a. 3 program utama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 844.407.300,-
b. 1 Program yang berasal dari Dana Keistimewaan Rp. 5.304.603.600,-
c. 1 program penunjang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.980.612.850,- di dalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan PNS.

Rincian rencana program dan kegiatan Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**9.129.623.750,00**							**4.774.384.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.322.140.500,00**							**42.300.000,00**	
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.322.140.500,00**							**42.300.000,00**	
1,	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)***	**100**		100	**100**	**17.536.900,00**						**100**	**42.300.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (dokumen)*	94	23	23	25	17.536.900,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	-	23	42.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	4 Dokumen	11.391.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	-	2	4.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21 Laporan	6.145.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-	21	38.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100**	100	100	**-**	**5.304.603.600,00**						**100**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan*	100	100	100	-	5.304.603.600,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	-	100	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari														
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				48 kegiatan Objek	5.304.603.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberd ayaan Ekonomi dan Penan ggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.807.483.250,00**							**4.732.084.000,00**	
	3,25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3.807.483.250,00**							**4.732.084.000,00**	
1,	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)***	**-**			**-**	**2.963.075.950,00**						**-**	**3.245.914.000,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (dokumen)*	56	14	14	14	2.580.178.853,00			-	-	-	14	2.472.814.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	33	33	37 Orang/bulan	2.520.479.553,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	33	2.405.214.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	1	1	1 Dokumen	55.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-	-	1	63.000.000,00	DINAS KELAUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)						DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	56	14	14	14 Laporan	3.749.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14	4.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	8	2	2	2	4.412.000,00			-	-	-	2	2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1	1	1 Dokumen	2.412.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	1	1	1 Orang	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	4	1	1	1 Dokumen	54.745.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	1	89.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	15	15	15 Paket	13.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	15	13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12 Laporan	41.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12	76.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset (unit)*	4	1	1	1 Unit	0,00			-	-	-	1	149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	1	1	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	48	12	12	12 Laporan	200.285.797,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	12	181.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12 Laporan	45.722.681,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	12	44.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12 Laporan	154.563.116,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	12	137.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	12	3	3	3 laporan	123.454.300,00			-	-	-	3	351.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	196	48	48	47 Unit	110.449.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI	-	-	-	48	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)						DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1 Unit	5.016.900,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	1	21.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67	67	67	11 Unit	7.988.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	67	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi perikanan tangkap (ton)***	**2125**		**2.075**	**2100**	**169.160.300,00**						**2125**	**203.930.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%)*	92		90	92	19.933.100,00			-	-	-	92	42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80		20	8 Unit	19.933.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20	42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)*	77		71	74	40.691.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	77	71.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200		50	75 Orang	40.691.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan	-	50	71.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa			Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan				
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	4		4	4	108.535.800,00			-	-	-	4	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1		1	1 Layanan	108.535.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**16.910**		**16.805**	**16.855**	**506.850.900,00**						**16.910**	**915.220.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)**	**3**	3	**4**	**4**	333.594.000,00			-	-	-	**5**	730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20		5	3 Kelompok	333.594.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5	730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)*	84,6		**84,4**	84,6	173.256.900,00			-	-	-	84,6	185.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4		1	1 Dokumen	79.980.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59	59	59	59 Unit	93.276.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	59	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)**	**92,59**		**92**	**92,31**	**46.335.300,00**						**92,59**	**120.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	**100**		**100**	**100**	46.335.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	**100**	120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	4		1	30 Pelaku Usaha	46.335.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	1	120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar (%)**	**70,42**		**52,82**	**63,38**	**122.060.800,00**						**70,42**	**247.020.000,00**	
			Produksi pengolahan ikan (kg)	**155.000,00**		**145.000,00**	**150.000,00**							**155.000,00**		
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar (%)*	70		53	63	72.402.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	70	100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	100		75	70 Unit Usaha	72.402.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	100	100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)*	**155.000**		**145.000**	**150.000**	49.658.500,00			-	-	-	155000	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	80		20	20 Pelaku Usaha	49.658.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							**9.129.623.750,00**							**4.774.384.000,00**	

BAB VI PENUTUP

Implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 lebih konkrit akan dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, berikut jumlah dana/ biaya yang diperlukan serta sumber pendanaan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya rencana program/ kegiatan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unsur pelaksana program dan kegiatan pada dinas yaitu bidang-bidang teknis agar melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksnaaan program dan kegiatan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksnaaan program, maka setiap unsur pelaksana/ bidang wajib melakukan tindakan koreksi serta melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas.
4. Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap bahwa rencana program/ kegiatan yang kami susun sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan penganggaran khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Kulon Progo, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Ir. Trenggono Trimulyo, MT
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 196607111995031001

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kulon Progo

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KULON PROGO

JL. SUGIMAN MARGOSARI PENGASIH KULON PROGO
KODE POS 55611 TELP/FAX (0274) 773095

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 22

2.4 Review terhadap RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39

3.3 Program dan Kegiatan 39

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB V. PENUTUP 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata;
e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pariwisata;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2025 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
16. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Pariwisata sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud danTujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 melaksanakan melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

III. Program Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

IV. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   b. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

V. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
2. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   a. Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
   b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasi dirinci seperti pada tabel berikut:

Tabel II.1.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2023	
			Target	Realisasi
1.	Peningkatan Jumlah kunjungan wisata	Orang	2.407.136	1.923.606
2.	Persentase Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	1,87	1,72

Berdasarkan tabel II.1. pencapaian indikator kinerja sasaran (IKU) pada tahun 2023, meliputi:

- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dengan target sebesar 2.407.136 orang tercapai 1.923.606 orang atau 79,91% dengan kriteria tinggi.
- Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata, dengan target 1,87 tercapai 1,72 atau 91,97% dengan kriteria tinggi.

Capaian kinerja pada tahun 2023 dapat masuk dalam kategori kinerja tinggi yang disebabkan oleh:

- Semakin membaiknya kondisi perekonomian dan antusiasme berwisata masyarakat yang terus meningkat pasca pandemi covid-19.
- Banyaknya ragam atraksi wisata, khususnya yang didanai oleh anggaran Dana Keistimewaan.

Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 tertuang dalam berikut:

Tabel II.2.
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD	Target Renja	Realisasi
1	Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata Dalam Kondisi Baik dan Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	%	75	75	87,50

2	Peningkatan Pemasaran Wisata	Cakupan Peningkatan Promosi Berbasis IT dan Efektifitas Atraksi Wisata	%	100	100	79,91
3	Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata	Cakupan Peningkatan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	%	18,95	18,95	18,69

Dari tabel diatas diketahui bahwa indicator kinerja program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata tahun 2023 memiliki capaian lebih dari target yaitu tercapai 87,5 % dari target 75%. Beberapa Upaya untuk peningkatan daya tarik pariwisata dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pada destinasi pariwisata, antara lain:

1. Rehab Amphiteater Kiskenda (lanjutan revitalisasi tahun 2022) pada destinasi Gua Kiskenda;
2. Rehab Kios di kawasan Gua Kiskenda;
3. Pembangunan Kios Souvenir 31 unit di kawasan Pantai Glagah;
4. Rehab Monumen Bahari di Kawasan Pantai Glagah;
5. Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi Wisata (TPR) di Puncak Suroloyo;
6. Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi Wisata (TPR) di Waduk Sermo;
7. Pembangunan Karya Seni Instalasi di Pantai Congot, Pantai Glagah, Pantai Trisik, Mangrove Jangkaran, Waduk Sermo.

Dengan dibangunnya beberapa sarana prasarana tersebut diharapkan kondisi obyek wisata semakin baik dan meningkatkan daya Tarik wisatawan untuk berkunjung.

Capaian program pemasaran pariwisata tahun 2023 sebesar 79,91%, masih dibawah target 100%. Namun demikian untuk jumlah kunjungan wisata tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan data tahun 2022 yaitu sejumlah 1.561.438 atau meningkat sebesar 23,19%. Sedangkan untuk jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2022 sejumlah 2.014 dan tahun 2023 sejumlah 11.459 atau meningkat 468,96%.

Untuk meningkatkan pemasaran pariwisata, dilakukan beberapa upaya antara lain dengan:

a. Promosi melalui beberapa media (elektronik, media sosial, cetak/online, luar ruang);
b. Penyelenggaraan event seni budaya pada destinasi maupun desa wisata;
c. Melaksanakan misi pariwisata budaya ke beberapa daerah seperti : Wonogiri Jawa Tengah, Trenggalek Jawa Timur dan Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
d. serta terus berinovasi untuk mengembangan pariwisata di Kulon Progo dengan *smart branding* “Sambanggo” dan program “Laku Wirasa” (Layanan Kulon Progo Wisata Ramah Disabilitas).

Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 18,69%. Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 18,69% atau masih dibawah target 18,95%, meskipun semua indicator mengalami peningkatan. Untuk indikator jumlah desa wisata meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata daerah semakin baik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**100,00**		**100,00**	**100,00**	100	**100,00**	**61,56**	61,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan jasa penunjang*								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	12		12	12	100	12	6	50

					sumber daya air dan listrik yang disediakan								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12		12	12	100	12	6	50
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36		12	12	100		6	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12	12	100	1	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	56		18	18	100	14	6	42,85

					SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dokumen administrasi umum*								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	16		12	12	100	1	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48		12	12	100	12	9	75
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*								

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		2	2	100	2	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84		21	21	100	21	21	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	28		7	7	100	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15		15	15	100	14	6	42,85

				Lapangan	dan dibayarkan pajak dan perizinannya								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4		4	4	100	4	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69		57	57	100	69	33	47,82
				Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata**	**100,00**		**100,00**	**79,91**	79,91	**100,00**	**19,09**	19,09
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata*								
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak,	Jumlah Dokumen Hasil	3		3	3	100	2	-	-

				Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
					Pameran (Manunggal Fair dan TTI/Trade TourismInvesment)							
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3		3	3	100	2	-	-
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi**	**100,00**		**75,00**	**87,50**	116.67	**87,50**	**87,50**	100

					pariwisata								
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata*								
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8		8	8	100	8	5	62,5
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan daya tarik wisata*								
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang,Pemantapan Revitalisasi)	10		10	10	100	10	-	-

				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**23,47**		**18,95**	**18,69**	98,63	**20,43**	**19,62**	96,04
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	***Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar***								
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200		50	30	60	30	30	100
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembanga	140		35	35	100	60	28	46,67

					n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah**	**100,00**		**100,00**	**120,00**	120	**100,00**	**80,00**	80
					cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	**100,00**		**100,00**	**142,86**	142,86	**100,00**	**28,57**	28,57
				Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan									
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya							3	-	-
				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*jumlah even pariwisata*								
				Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya	30		30	30	100	11	7	63,64
				Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan even penggiat seni	12		-	-	-	-	-	-

				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah media promosi pariwisata*						
				Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	10		10	10	100	11	3	27,27
				Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	6		6	6	100	4	2	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melaksanakan pelayanan Dinas Pariwisata telah melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Cakupan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
2. Cakupan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
3. Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
5. Cakupan Pemasaran Pariwisata.
6. Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Melalui indikator-indikator di atas kinerja pelayanan Dinas Pariwisata yang akan di capai adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata.

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024*)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	-	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	2.407.136	2.621.067	2.835.041	3.068.004	1.923.606	500.416	2.835.041	3.068.004	
2	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata		Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	1,87	1,92	1,95	1,96	1,72	2,25	1,95	1,96	

*) Tahun 2024 realisasi sd. TW. II 2024

Pada tahun 2023, capaian Indikator Kinerja mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut menjadi momentum bagi Dinas Pariwisata untuk bangkit dan lebih meningkatkan kinerja di tahun berikutnya dengan tantangan terbesar mulai beroperasinya secara penuh Bandara YIA, sedangkan target tahun 2024 dan 2025 menyesuaikan Renstra 2023-2026, dengan penambahan Indikator Kinerja Utama, Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain:

Tantangan:

a. Pengembangan destinasi pariwisata terkendala dengan status *clear and clean* kepemilikan tanah;
b. Pemenuhan sarana prasarana dasar kebutuhan wisatawan;
c. Tata ruang peruntukan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata;
d. Destinasi wisata di perbukitan menoreh rawan bencana alam;
e. Sektor pariwisata belum menarik pihak swasta (investor) untuk mengembangkan usaha jasa pariwisata;
f. Penyelenggaraan event rutin sebagai daya tarik wisata lintas sektor belum terjalin;
g. Jangkauan jaringan komunikasi belum merata;
h. Implementasi pelaku pariwisata terhadap pelayanan wisatawan dilapangan perlu ditingkatkan;
i. Hasil ekonomi kreatif belum menjadi brand suatu destinasi wisata.

Peluang:

a. Keberadaan Bandar Udara YIA;
b. Kulon Progo sebagai penyangga Kawasan Super Prioritas Nasional Borobudur;
c. Potensi daya tarik wisata yang lengkap.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo, yaitu:

1. Sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung kurang memadai;
2. Sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif belum kompeten;
3. Promosi pariwisata melalui media elektronik, cetak dan media lainnya belum optimal.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung yang kurang memadai.

2.4. Review terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata periode 2023-2026 yang telah disusun dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Pariwisata guna mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata tahun 2025 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, dan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, serta besaran anggaran yang berbeda antara rancangan awal dengan rancangan akhir.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Progra/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**40.515.961.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**55.392.357.700**	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				1.015.490.000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	12 Unit	1.015.490.000						
1.1	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**				**26.227.317.900**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**				**26.227.317.900**	
1.1.1	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan*	30 Objek	26.227.317.900	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan*	30 Objek	26.227.317.900	

1.2	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**13.273.153.900**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**29.165.039.800**	
1.2.1	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	10 Dokumen	8.273.541.200	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	10 Dokumen	8.273.541.200	
1.2.2	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	6 Laporan	4.999.612.700	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	6 Laporan	4.999.612.700	
1.2.3						Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Even Penggiat Seni*	12 Laporan	15.891.885.900	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.117.424.242**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.897.952.035**	
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**479.380.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**14.916.100**	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	239.690.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	10.579.700	
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	239.690.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	4.336.400	
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.853.483.782**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2.422.343.079	
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/bulan	2.533.903.782	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	31 Orang/bulan	2.361.266.379	
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	159.790.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	57.042.400	
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	159.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	4.034.300	

2.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**479.380.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**80.655.100**	
2.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	239.690.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	30.735.100	
2.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	239.690.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	49.920.000	
2.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**479.370.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**25.456.000**	
2.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	479.370.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	25.456.000	
2.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**346.440.460**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**235.100.056**	
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	239.690.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	126.549.596	
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	106.750.460	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	108.550.460	
2.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**479.370.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**119.481.700**	
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	159.790.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	86.002.700	
2.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	159.790.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	5.408.200	
2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Sarana dan*	69 Unit	159.790.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Sarana dan*	69 Unit	28.070.800	

	Bangunan Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			
3	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**4.090.669.669**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**3.822.510.904**	
3.1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**				**2.903.189.669**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**				**3.750.040.004**	
3.1.1	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	10 Dokumen	2.903.189.669	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*		3.750.040.004	
3.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**1.187.480.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**72.470.900**	
3.2.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	8 Unit	1.187.480.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	8 Unit	72.470.900	
4	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**403.384.700**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**230.042.000**	
4.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**403.384.700**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**230.042.000**	
4.1.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Dokumen	157.084.700	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	1 Dokumen	156.963.100	
4.1.2	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	3 Promosi	246.300.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	1 Promosi	73.078.900	

5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**483.860.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**244.881.100**	
5.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**483.860.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**244.881.100**	
5.1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	60 Orang	483.860.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	60 Orang	144.451.300	
5.1.2	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	30 Orang	0	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	40 Orang	100.429.800	

Usulan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 50.611.300.411,00 sedangkan anggaran yang disetujui sampai dengan tahap rancangan akhir RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 62.587.743.739,00. Usulan anggaran awal Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar Rp 40.515.961.800,00 sedangkan sampai dengan tahap rancangan akhir RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 55.392.357.700,00. Perbedaan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya beberapa usulan baru yang disetujui oleh Paniradya Kaistiewaan. Pada usulan awal, terdapat kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya dengan anggaran Rp 1.015.490.000,00 yang kemudin berubah menjadi Penyelenggaraan Event Penggiat Seni sebesar Rp 15.891.885.900,00 pada tahap rancangan akhir RKPD Tahun Anggaran 2025. Perubahan usulan kegiatan dikarenakan penyesuaian nomenklatur berita acara awal DAIS tahun 2025. Sedangkan untuk anggaran APBD yang semula Rp 10.095.338.611,00 turun menjadi Rp 7.195.386.039,00 dikarenakan adanya refocusing anggaran dalam belanja atk.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pariwisata didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran

DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pariwisata berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Usulan-usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang ditolak karena tidak sesuai kewenangan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Setan, Wijimulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Pembentukan Dusun Wisata	1 Paket	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pokdarwis Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Outbond	1 Paket	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan**	Pagerharjo, Banjaroya, Purwosari, Sidoharjo,, Kab. Kulon Progo	Penguatan Kelembagaan Desa Wisata	4 kelompok	

	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				
4.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Segitik Nglinggo Timur, Pagerharjo, Samigaluh,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan kios souvenir	5 unit	
5.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Plandakan Plono Timur, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Gazebo kuliner	5 unit	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Plono timur, Pagerharjo, Samigaluh,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan toilet TIC	1 unit	
7.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kalirejo utara, Pagerharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembangunan toilet Camping Ground Plono	10 unit	
8.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh,,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan area parkir di komplek Camping Ground	750 m	
9.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	Kalurahan Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pelatihan ekonomi produktif kuliner bagi usaha wisata	1 paket	

	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				
10.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Belik di Dusun Anjir RT 87 RW 26 Hargorejo Kokap,, Kab. Kulon Progo	Potensi wisata terowong Anjir jalur lori mangan	1 paket	
11.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Pembangunan sarpras eks tambang mangan Kliripan Hargorejo " Geoheritage Mangan Kliripan"/pembangunan wisata edukasi	1 paket	
12.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Tejogan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Insfrastruktur kegiatan wisata kedung luweng	1 paket	
13.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan**	Dusun Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Dukungan terbentuknya "kampung life in" di dusun gunung kukusan tempat untuk belajar	1 paket	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		kehidupan, wisata budaya, pendidikan		
14.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kliripan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Pembangunan sarana jemparingan gagrak mataraman di Kliripan	1 paket	
15.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Taman pendoworejo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	pembangunan POS Informasi Wisata / Cakruk informasi (PRIORITAS 1)	1 unit	
16.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pendoworejo, Girimulyo,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan ikon pariwisata di Kulon Progo (Tengah/Kawasan Kuliner Pendoworejo) (PRIORITAS 2)	1 unit	
17.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kawasan Kuliner Pendoworejo, Jl. Jogja- Kaligesing Pendoworejo,, Kab. Kulon Progo	Pelatihan dan pendampingan Pelaku Wisata Kawasan Kuliner Pendoworejo yang berkembang pesat perlu pengelolaan limbah/sampah (PRIORITAS 6)	1 paket	
18.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	Tempel, Pendoworejo, Kab. Kulon Progo, Girimulyo,	Program Pemberdayaan Masyarakat, peningkatan	1 paket	

	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pendoworejo, Kab. Kulon Progo	SDM, Pusat kegiatan sosial masyarakat, dengan lokasi khusus, Taman Masyarakat, Taman Kuliner		
19.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Purwosari, Girimulyo., Kab. Kulon Progo	Pelatihan enetrpreneur dan pariwisata bagi Pemuda	100 orang	
20.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pendoworejo, Girimulyo,, Kab. Kulon Progo	Pengembangan dan pendampingan wisata desa pendoworejo (gunung Perahu, Out Bond Bendung Kayangan, Panorama Gunung Moyeng, susur sungai Kalibawang)	1 paket	
21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM	Sanggar SEKAR GIRI, Banyunganti, Jatimulyo, Kab. Kulon Progo	Pengembangan pariwisata kolaboratif berbasis budaya yang unggul, spesifik berkelas dunia di Kulon Progo daya dukung dari sektor kesenian berupa pentas rutin.	1 paket	

	Pariwisata Berbasis SKKNI				
22.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pendoworejo, Girimulyo, KP, Kab. Kulon Progo	Bimtek pengelolaan pariwisata	1 kegiatan	
23.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prangkokan, Purwosari, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	rehabilitasi wisata curug glimpang	1 paket	
24.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Purwosari, Giripurwo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Pengembangan Kawasan Wisata Purwosari	1 paket	
25.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN/ Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**/ Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	purwosari, girimulyo,, Kab. Kulon Progo	Penyelenggaraan kegiatan adat budaya, seni	1 kelompok	
26.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Kokap, Kab. Kulon Progo, Kab. Kulon Progo	Pemugaran situs Sunan Geseng	1 kegiatan	

	Pariwisata Kabupaten/Kota				
27.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kalurahan Kembang, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Pengembangan Wisata Kalurahan	3 paket	
28.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Tegalsari, Purwosari, Girimulyo , Kab. Kulon Progo	Pengembangan Agrowisata dan Optimalisasi SDA berbasis Pangan Lokal	1 paket	
29.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Desa Wisata Sidoharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	"Pelatihan Wirausaha *Managemen *Promosi *Outbond *Fotografi"	1 paket	
30.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wisata Sidoharjo : Gunung Kendil	1 paket	

	Pariwisata Kabupaten/Kota				
31.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wisata Sidoharjo : Watu Tekek	1 paket	
32.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wisata Sidoharjo : Curug Sidoharjo	1 paket	
33.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Keweron, Sidoharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wisata Sidoharjo : Curug Siluwok	1 paket	
34.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dsn. Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh , Kab. Kulon Progo	Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wisata Sidoharjo : Embung Canggal	1 paket	
35.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Madigondo,Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pengembangan Kampung Kopi dan Showroom Kopi Menoreh	1 paket	
36.	**PROGRAM PENINGKATAN**	Girinyono, Sendangsari,	Pembangunan Joglo	1 paket	

	DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Wisata religius Embung Bogor, Girinyono, Sendanngsari , Pengasih		
37.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kalurahan kembang, Kab. Kulon Progo	Pengembangan wisata kalurahan		
38.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kalurahan Bojong (pokdarwis bojong), Kab. Kulon Progo	Masih perlu pemberdayaan SDM yang masih rendah sehingga diperlukan pelatihan tersebut		
39.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pokdarwis Pesona Mul;yo, Kab. Kulon Progo	Penigkatan Kwalitas kelembaggan pariwsata		
40.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	Kalurahan Pendoworejo, Kab. Kulon Progo	Desa Wisata Pendoworejo masih baru sehingga		

	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pariwisata Kulon Progo		
41.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Banjararum, Kab. Kulon Progo	Membutuhkan bantuan Sarana Prasarana pendukung Penerima: Desa Wisata Dekso Banjararum		
42.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA/ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota/** Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	BUMDes Jatimulyo, Kab. Kulon Progo	Pembangunan rumah homestay		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pariwisata melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Renja yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "**Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"** yang dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu ”Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Pariwisata adalah sebagai beikut:

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025 (Indeks)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100
2.	Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	2.835.041
3.	Terwujudnya peningkatan jumlah pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	1,95

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 akan melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Rincian nama program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

III. Program Pemasaran Pariwisata
1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

IV. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

V. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
2. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   a. Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
   b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
   c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan pertimbangan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pariwisata sehingga kegiatannya hanya dilaksanakan di lingkungan kantor saja. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan di seluruh Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang ada daya tarik pariwisata, dan program ini bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Sedangkan program-program lainnya seperti Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lokasi kegiatannya tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Rincian nama rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel IV.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						**62.587.743.739,00**							**35.319.815.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**55.392.357.700,00**							**30.118.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**55.392.357.700,00**							**30.118.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**55.392.357.700,00**						**-**	**30.118.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	26.227.317.900,00			-	-	-	-	1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														

			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	26.227.317.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	29.165.039.800,00			-	-	-	-	28.961.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				10 Dokumen	8.273.541.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.480.680.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				6 Laporan	4.999.612.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.480.680.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														

			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				12 Laporan	15.891.885.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.195.386.039,00**							**5.201.815.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**7.195.386.039,00**							**5.201.815.000,00**	
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.897.952.035,00**						**-**	**2.976.840.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.916.100,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.579.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.336.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.422.343.079,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31Orang/bulan	2.361.266.379,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	57.042.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.034.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.655.100,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.735.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA

	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.456.000,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.456.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.100.056,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	126.549.596,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.550.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.481.700,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	86.002.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.408.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA

	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	28.070.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**3.822.510.904,00**						**-**	**1.229.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	3.750.040.004,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3.750.040.004,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	72.470.900,00			-	-	-	-	1.229.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	72.470.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.229.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**230.042.000,00**						**-**	**509.820.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	230.042.000,00			-	-	-	-	509.820.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	156.963.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.910.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	73.078.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.910.000,00	DINAS PARIWISATA
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**244.881.100,00**						**-**	**486.155.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	244.881.100,00			-	-	-	-	486.155.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	144.451.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		486.155.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														

			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	100.429.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 ini didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo periode 2023-2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2025. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Pariwisata.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Pariwisata secara intensif.

Kulon Progo, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kulon Progo

JOKO MURSITO, S.Sn., M.A.
NIP. 19720704 199703 1 006

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

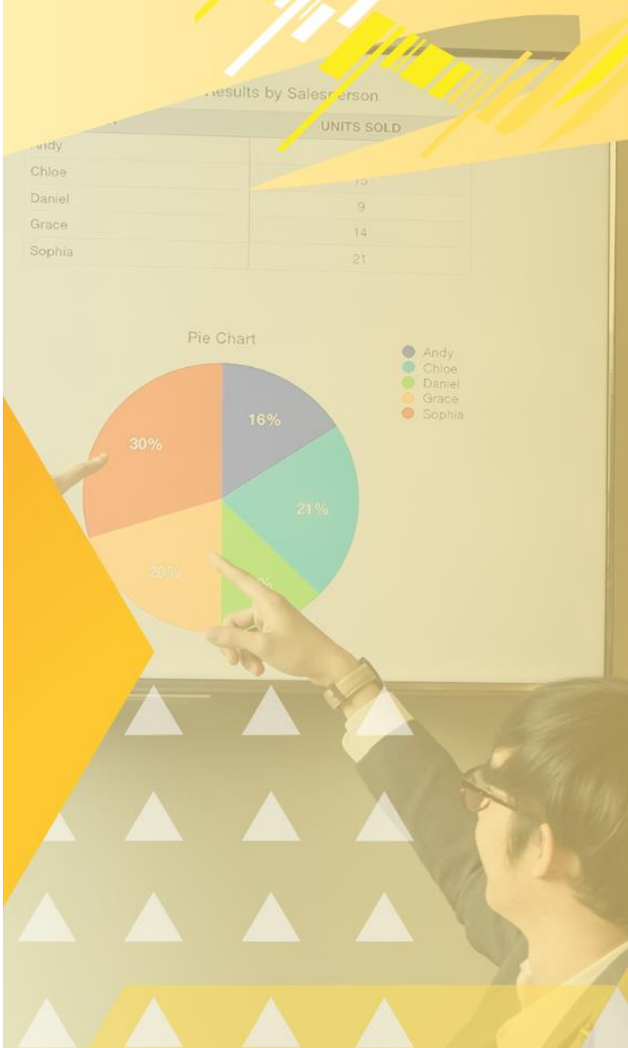

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pagu indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan Rencana Kerja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kulon Progo, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian

Ir. SUDARNA, M.M.A.
Pembina Utama Muda;IV/c
NIP. 19640928 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1Latar Belakang 1

1.2Landasan Hukum 1

1.3Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2023) 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

2.4.Review terhadap RKPD 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

3.3 Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023.....	5
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023.....	5
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo	8
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.....	18
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo.....	22
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo.....	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.....	32
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana APBD Kabupaten.....	36
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo (Dana Keistimewaan DIY).....	44
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo (Dana Alokasi Khusus).....	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, serta berpedoman pada Rancangan Renja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Rancangan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY.

1.2Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara urusan pilihan yang diampu perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Sebagai kerangka acuan awal dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya dan keuangan kabupaten;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memuat :

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU (2023)

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.4. Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini diuraikan tentang

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing. Guna mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 7 program, 15 kegiatan, dan 27 sub kegiatan.

Pengukuran kinerja dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah :

Tabel 2.1. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d. Tw IV
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100
Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Ribu rupiah	1.849.243.150	2.637.962.355
Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Ribu rupiah	2.626.500.000	2.646.490.007

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW IV
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	nilai	25,93%	26,92%
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	8,8	7,79

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW IV
Program pengembangan ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	Rupiah	190.124.830.760	236.113.493.009
Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	%	45,51	56,51
Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah industri baru tahun ke n	Unit	115	115
	Persentase sentra industri aktif	%	35,29	47,06
Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	%	71,43	71,43

Dari tabel di atas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian melampaui target yang telah ditetapkan.
b. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kondisi sarpras baik melampuai target sebesar 25,93% yakni tercapai 26,92%.
c. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa komoditas beras IR1 cukup stabil, di mana nilai koefisien variasi harga antar waktu berada di bawah target yg ditetapkan yakni tercapai 7,79%. Sebagai tambahan penjelasan, nilai persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang semakin kecil menandakan harga barang semakin stabil, sehingga besaran capaian yang di bawah nilai target menandakan kinerja program semakin baik.
d. Kinerja perdagangan luar daerah juga melampuai target hingga 24,19% atau senilai Rp 236.113.493.009.

e. Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen dengan indikator jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang melampuai target sebesar 45,51%, terealisasi hingga 56,51%
f. Jumlah industri baru tercapai sesuai target, sementara jumlah sentra aktif persentase capaiannya melebihi target.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung anggaran untuk operasional. Pada tahun 2023 pagu anggaran belanja murni senilai Rp 14.724.976.604,00. Kemudian ada beberapa penyesuaian seperti penambahan kekurangan gaji, anggaran belanja tambahan pada perubahan APBD, serta insentif fiskal sehingga sampai dengan triwulan IV tahun 2023 jumlah anggaran belanja mencapai Rp 18.982.854.756,00 atau mengalami penambahan sebesar 28,92%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (tahun n-2/ tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2024) disajikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
2	22	08			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100,00	0,00	71,43	71,43	100,00	71,43	142,86	142,86
2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya									
2	22	08	5.06	03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	70,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	142,86
3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	94,00	0,00	23,00	23,00	100,00	23,00	46,00	48,94
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	40,00
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84,00	0,00	21,00	21,00	100,00	21,00	42,00	50,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	56,00	0,00	14,00	14,00	100,00	14,00	28,00	50,00
3	30	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00	100,00
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00	0,00	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	600,00
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	56,00	0,00	19,00	19,00	100,00	14,00	33,00	58,93

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Triwulanan/ Semesteran SKPD								
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	50,00
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40,00	0,00	10,00	10,00	100,00	4,00	14,00	35,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	8,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	50,00
3	30	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00	10,00	62,50
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	8,33
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset	100,00	0,00	12,00	15,00	125,00	0,00	15,00	15,00
3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	99,00	0,00	11,00	14,00	127,27	0,00	14,00	14,14
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	96,00	0,00	6,00	6,00	100,00	6,00	12,00	12,50
3	30	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	0,00	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	16,67
3	30	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	8,33
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	12,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	50,00
3	30	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00	25,00	50,00	200,00
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3,00	0,00	2,00	2,00	100,00	1,00	3,00	100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16,00	0,00	24,00	24,00	100,00	18,00	42,00	262,50
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	41,67	0,00	25,93	26,92	103,82	32,00	32,00	76,79
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12,00	0,00	4,00	5,00	125,00	4,00	9,00	75,00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12,00	0,00	4,00	5,00	125,00	4,00	9,00	75,00
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	26,00	26,00	260,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	26.706,00	0,00	6.414,00	7.196,00	112,19	6.614,00	13.810,00	51,71
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.802,00	0,00	2.588,00	2.588,00	100,00	2.688,00	5.276,00	48,84

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	15.904,00	0,00	3.826,00	4.608,00	120,44	3.926,00	8.534,00	53,66
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15,20	0,00	8,80	5,13	141,70	10,55	10,55	130,59
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	50,00
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	50,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	144,00	0,00	25,00	26,00	104,00	12,00	38,00	26,39

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	144,00	0,00	25,00	26,00	104,00	12,00	38,00	26,39
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (milyar rupiah)	352,83	0,00	190,12	236,11	124,19	220,81	456,92	129,50
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	120,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	190,00	158,33
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	120,00	0,00	90,00	90,00	100,00		90,00	75,00
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		0,00				100,00	100,00	83,33
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	95,11	0,00	62,41	56,51	90,55	74,86	74,86	78,71
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	10.700,00	0,00	4.915,00	6.103,00	124,17	8.160,00	8.160,00	76,26

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Ulang								
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.700,00	0,00	4.915,00	6.103,00	124,17	8.160,00	8.160,00	76,26
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri baru tahun ke n	175,00	0,00	115,00	89,00	77,39	130,00	130,00	74,29
						Persentase sentra industri aktif	52,94	0,00	35,29	47,06	133,35	41,18	47,06	88,89
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Industri Kabupaten	196,00	0,00	49,00	49,00	100,00	14,00	63,00	32,14
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24,00	0,00	6,00	6,00	100,00	5,00	11,00	45,83
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	76,00	0,00	19,00	19,00	100,00	4,00	23,00	30,26

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Prasarana Industri								
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	96,00	0,00	24,00	24,00	100,00	5,00	29,00	30,21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2026, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yang terkait dengan urusan perdagangan dan perindustrian, telah ditetapkan indikator tujuan berupa pendapatan perkapita penduduk (ADHB) dalam satuan juta rupiah, serta tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPD Tahun 2023-2026 yakni meningkatnya nilai usaha industri dan meningkatnya nilai usaha perdagangan telah ditetapkan indikator kinerja berupa nilai usaha industri, nilai usaha perdagangan, serta didukung indikator-indikator progam di antaranya persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan, persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, nilai perdagangan luar daerah tahun ke n, persentase standardisasi dan perlindungan konsumen, jumlah industri baru, serta persentase sentra aktif.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Kinerja Utama												
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Nilai usaha industri	Juta rupiah			1.849.243,15	2.065.250,25	2.274.243,15	2.410.350,24	2.637.962,36	2.700.000,00	2.754.000,00	2.809.080,00	
3	Nilai usaha perdagangan	Juta rupiah			2.626.500,00	2.705.295,00	2.840.559,75	3.010.993,34	2.646.490,01	2.705.295,00	2.759.400,90	2.814.588,92	
	Indikator Kinerja Program												
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%			25,93	32,00	37,50	41,67	26,92	32,00	37,50	41,67	

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%			8,80	10,55	12,67	15,20	7,79	7,75	7,70	7,65	
4	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	Juta rupiah			190.124,83	220.811,19	235.216,78	352.825,17	236.113,49	236.113,49	252.641,44	270.326,34	
5	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	%			62,41	74,86	86,70	95,11	56,51	74,86	86,70	95,11	
6	Jumlah industri baru tahun ke n	Unit			115,00	130,00	160,00	175,00	115,00	130,00	160,00	175,00	
7	Persentase sentra industri aktif	%			35,29	41,18	47,06	52,94	47,06	47,06	47,06	50,00	

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencakup lingkup yang luas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang industri dan perdagangan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan industri dan perdagangan di Kulon Progo antara lain

1. Penataan PKL
2. Cakupan pelayanan kemetrologian
3. Lesunya perdagangan di pasar tradisional/ pasar rakyat
4. Daya saing usaha perdagangan
5. Kualitas produk IKM

B. Permasalahan

1. Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih menempati lokasi fasilitas yang bukan peruntukkannya maka perlu dilakukan penataan PKL perkotaan Wates untuk membuat lokasi yang diperuntukkan bagi PKL.
2. Beberapa di antara pelaku usaha produk potensi ekspor Kulon Progo saat ini masih berstatus sebagai supplier eksportir yang berada di luar daerah. Hal ini terjadi karena mereka menjalin kerjasama sudah sekian lama sehingga menghilangkan semangat untuk berkembang lebih maju lagi. Dinas terus mendorong pelaku usaha produk ekspor untuk mampu melakukan ekspor mandiri dengan membangkitkan semangat dan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, temu usaha, dan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran.
3. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera terhadap alat timbangannya masih cukup rendah. Walaupun terdapat peningkatan terhadap alat UTTP yang bertanda tera sah namun masih banyak potensi UTTP yang belum dilakukan tera ulang. Maka perlu dilakukan penyuluhan kepada pelaku usaha khususnya pedagang di luar pasar tentang kemetrologian.

4. Pengembangan pasar rakyat masih terkendala status tanah di mana sebagian merupakan tanah PA dan SG. Status tanah yang bukan milik pemerintah kabupaten menyebabkan sulitnya meraih anggaran dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi maupun pembangunan sarana prasarana pasar.
5. Masih kurangnya daya saing produk IKM.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada capaian program nasional seperti SDGs.

Sementara peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan pasar dengan adanya rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui regulasi.
3. Adanya Kawasan Peruntukan Industri.
4. Beroperasinya bandara YIA (*Yogyakarta International Airport*).
5. Pembangunan konektivitas infrastruktur pendukung Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

2.4.Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 itu sendiri disusun atas dasar RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, RPD DIY dan Renstra Dinas secara terpadu. Review terhadap rancangan akhir RKPD menghasilkan beberapa hal selengkapnya tersaji pada tabel2.5 berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100**	**4.721,27**	**Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**	**100**	**4.598,09**	
3.30.01.2.01	**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**25**	**17,67**	**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**25**	**24,86**	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	7,99	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	16,00	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21	9,68	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21	8,86	
3.30.01.2.02	**Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	**14**	**4.738,96**	**Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	**14**	**3.934,03**	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Lingkup kabupaten	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	720	4.623,16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Lingkup kabupaten	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	720	3.855,56	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	102,49	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	62,10	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lingkup Kabupaten	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14	13,31	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lingkup Kabupaten	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14	16,37	
3.30.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	**112,53**	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	**68,37**	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lingkup Kabupaten	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	27,83	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lingkup Kabupaten	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	20,16	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lingkup Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	84,70	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lingkup Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	48,21	
3.30.01.2.07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah penambahan aset**	**25**	**653,40**	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah penambahan aset**	**3**	**22,52**	
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	653,40	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	22,52	
3.30.01.2.08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**24**	**411,40**	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**24**	**361,55**	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	193,60	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	196,85	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	217,80	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	164,71	
3.30.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**3**	**296,45**	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**2**	**186,75**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lingkup Kabupaten	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25	169,40	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lingkup Kabupaten	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25	160,74	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Lingkup kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	16	30,25	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Lingkup kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	11	26,00	
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	**37,50**	**2.874,05**	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	**37,50**	**2.240,35**	
3.30.03.2.01	**Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		Jumlah sarana distribusi perdagangan	**3**	**2.629,05**	**Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		Jumlah sarana distribusi perdagangan	**2**	**1.830,62**	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3	1.489,05	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah sarana distribusi perdagangan	2	575,73	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	10	1.140,00	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	25	1.254,89	
3.30.03.2.02	**Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	**6.764**	**245,00**	**Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**			**6.764**	**409,73**	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	2.738	105,00	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	2.738	180,65	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4.026	140,00	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4.026	229,08	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.04	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**12,67**	**520,30**	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**12,67**	**790,53**	
			Beras IR 1	**12,67**				**Beras IR 1**	**12,67**		
			Gula Pasir	**26,83**				**Gula Pasir**	**26,83**		
			Minyak Goreng	**6,31**				**Minyak Goreng**	**6,31**		
3.30.04.2.01	**Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat**	**3**	**399,30**	**Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat**	**4**	**323,50**	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat	3	399,30	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat	4	323,50	
3.30.04.2.02	**Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota**	**36**	**121,00**	**Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota**	**13**	**467,03**	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	36	121,00	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Lingkup kabupaten	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	13	467,03	
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**		**Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n**	**235,22**	**519,37**	**Program Pengembangan Ekspor**		**Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n**	**235,22**	**211,45**	
3.30.05.2.01	**Keg. Penyelenggaraan**		**Jumlah pelaku usaha produk**	**110**	**519,37**	**Keg. Penyelenggaraan**		**Jumlah pelaku usaha produk**	**110**	**211,45**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**ekspor unggulan yang dibina**			**Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**ekspor unggulan yang dibina**			
3.30.05.2.01.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	110	519,37	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	110	211,45	
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**86,70**	**98,61**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**86,7**	**206,69**	
3.30.06.2.01	**Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**		**Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang**	**9.580**	**98,61**	**Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**		**Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang**	**6.000**	**206,69**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Lingkup kabupaten	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ualgn	9.580	98,61	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Lingkup kabupaten	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ualgn	6.000	206,69	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**		**Jumlah industri baru tahun ke n**	**150**	**3.464,65**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**		**Jumlah industri baru tahun ke n**	**150**	**904,10**	
			Persentase sentra industri aktif	**47,06**				**Persentase sentra industri aktif**	**47,06**		
3.31.02.2.01	**Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**		**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten**	**49**	**3.464,65**	**Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**		**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten**	**14**	**904,10**	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	6	242,00	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1	98,34	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi,	Lingkup	Jumlah dokumen hasil	19	248,05	Koordinasi,	Lingkup	Jumlah dokumen hasil	8	208,71	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	kabupaten	koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembanguna sarana dan prasarana industri			sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	kabupaten	koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembanguna sarana dan prasarana industri			
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	24	2.974,60	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Lingkup kabupaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	5	597,05	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kecamatan/kalurahan, serta aspirasi maupuan pokok pikiran dewan. Beberapa usulan dapat diakomodir namun beberapa usulan lain belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan, permintaan bantuan yang bukan merupakan prioritas OPD, keterbatasan anggaran daerah, dan beberapa sasaran bukan merupakan kewenangan OPD. Perlunya evaluasi pada musrenbang kecamatan agar usulan yang disampaikan bisa utuh dan jelas, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat dapat terakomodir.

Adapun usulan yang terangkum dalam rancangan akhir rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
A	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
1	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Bendungan, Wates	Bantuan sarana prasarana usaha perdagangan PKL depan Pasar Bendungan		Usulan pokok pikiran dewan-dapat diakomodir
II	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
A	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota				
1	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Selo Timur, Hargorejo, Kokap	Bantuan peralatan produksi genteng		Usulan pokok pikiran dewan-dapat diakomodir
		Panggang, Bumirejo, Lendah	Bantuan alat-alat pembuatan roti		Usulan pokok pikiran dewan-dapat diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kementerian Perdagangan :

Program pembangunan bidangperdagangan dan industri antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Regulasi nasional yang berimplikasi langsung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan kemetrologian menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk mengampunya.

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/ penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja Perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

3.1.2. Kementerian Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh

bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkanWilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industry menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian meliputi :

1) meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional,
2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri,
3) meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri,

4) meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional,
5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaanteknologi,
6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan
7) menguatnya struktur industri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menentukan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung IKM yang berbasis kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, meningkatkan peran koperasi serta UMKM, mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri, mengembangkan industri yang merupakan kompetensi inti yang menjadi keunggulan daerah, serta meningkatkan daya saing industri daerah.

Berdasarkan telaah dari 2 kementerian dan Dinas Perindag DIY tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai RPJPD tahap keempat di mana pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;

9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Guna mendukung hal tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	ribu rupiah	2.274.243.150
		Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	ribu rupiah	2.840.559.750
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 mencakup 7 program, 14 kegiatan, dan 26 sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
    c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    b. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
    c. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
    b. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
    a. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
    b. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan

C. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
        a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
    2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
        a. Pemantuan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota
D. Program Pengembangan Ekspor
    1. Kegiatan Penyeleggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
        a. Peningkatan citra produk ekspor
E. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
    1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
        a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
F. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
        a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
        b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
        c. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
    1. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
        a. Pengembangan industri kreatif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2025 mencakup 7 program, 14 kegiatan, dan 26 sub kegiatan.

Rumusan rancangan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, Dana Keistimewaan, serta Dana Alokasi Khusus secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

OPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			**9.928.100.646,00**				**731.755.810.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**976.896.000,00**				**70.000.000,00**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**976.896.000,00**				**70.000.000,00**
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**976.896.000,00**			**-**	**70.000.000,00**
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-	976.896.000,00			-	70.000.000,00
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif							
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	270 Unit	976.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY		70.000.000,00
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**8.951.204.646,00**				**731.685.810.000,00**
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**8.047.103.046,00**				**728.711.260.000,00**
1,	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**4.598.089.796,00**			**-**	**724.524.790.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	25 dokumen	24.860.700,00			-	19.430.000,00
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.004.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.780.000,00
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	8.856.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.650.000,00
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	14 laporan	3.934.036.321,00			-	4.807.540.000,00
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan	3.855.565.021,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.680.160.000,00
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	62.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112.740.000,00
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	16.371.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.640.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	55.000.000,00
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	2 dokumen	68.367.100,00			-	123.780.000,00
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.157.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.610.000,00
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93.170.000,00
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset	3 unit	22.522.200,00			-	718.740.400.000,00
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22.522.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		718.740.400.000,00
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	24 laporan	361.554.775,00			-	452.540.000,00
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.847.895,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		212.960.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.706.880,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		239.580.000,00
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	2 laporan	186.748.700,00			-	326.100.000,00
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	160.739.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		186.340.000,00
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		106.480.000,00
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	26.009.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33.280.000,00
2,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan**	**37,5 %**	**2.240.349.450,00**			**-**	**2.974.550.000,00**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	2 unit	1.830.619.100,00			-	2.714.550.000,00
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	575.726.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.544.550.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	25 Unit	1.254.893.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.170.000.000,00
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	6764 dokumen	409.730.350,00			-	260.000.000,00
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2738 Dokumen	180.650.350,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000,00
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4026 Dokumen	229.080.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
3,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**12,67 %**	**790.525.000,00**			**-**	**572.330.000,00**
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	4 laporan	323.500.000,00			-	439.230.000,00
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	323.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		439.230.000,00
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	13 dokumen	467.025.000,00			-	133.100.000,00
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13 Laporan	467.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		133.100.000,00
4,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n**	**235,22 milyar rupiah**	**211.446.400,00**			**-**	**537.530.000,00**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	110 orang	211.446.400,00			-	537.530.000,00
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor							
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	110 Produk	211.446.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		537.530.000,00
5,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN**	**Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**undefined undefined**	**206.692.400,00**			**-**	**102.060.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KONSUMEN							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	6000 unit	206.692.400,00			-	102.060.000,00
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6000 Unit	206.692.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		102.060.000,00
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**904.101.600,00**				**2.974.550.000,00**
1,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah industri baru tahun ke n** **Persentase sentra industri aktif**	**150 unit** **47,06 %**	**904.101.600,00**			**-**	**2.974.550.000,00**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten	14 dokumen	904.101.600,00			-	2.974.550.000,00
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	98.342.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		266.200.000,00
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8 Dokumen	208.706.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		272.860.000,00
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	597.052.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.435.490.000,00
	J U M L A H				**9.928.100.646,00**				**731.755.810.000,00**

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo (Dana Keistimewaan)

Kode					Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDanProgram/Kegiatan	IndikatorKinerja			RencanaTahun2025						Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2026		
										TargetCapaianKinerja						TargetCapaianKinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp.)
						CapaianProgram	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi OutputKegiatan	Program	KeluaranSub Kegiatan	HasilKegiatan	PaguIndikatif (Rp.)	Sumber Dana		TolokUkur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**65.000.000**					**70.000.000**
2	**22**	**08**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**65.000.000**					**70.000.000**
2	22	08	5.06	03	Pengembangan industri kreatif	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan		Kab.KulonProgo	100%	70 unit	100%	65.000.000			Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100%	70.000.000

Tabel. 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo (Dana Alokasi Khusus)

Kode					Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDanProgram/Kegiatan	IndikatorKinerja			RencanaTahun2025						Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2026		
						CapaianProgram	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi Output Kegiatan	TargetCapaianKinerja			PaguIndikatif (Rp.)	Sumber Dana		TargetCapaianKinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				TolokUkur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**3.256.450.000**					**3.582.090.000**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**								**3.256.450.000**					**3.582.090.000**
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		Kab.Kulon Progo		1 dok	100%	3.256.450.000					3.582.090.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ketiga periode renstra 2023-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang dapat kami susun. Demi kesempurnaan dokumen ini, kami sangat mengharap masukan dan saran sehingga akan terwujud perencanaan yang berkualitas.

Kulon Progo, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Ir. SUDARNA, M.M.A.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19640928 199003 1 004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mencapai visi misi daerah.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di masa yang akan datang pada khususnya.

Wates, 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

TRIYONO, S.IP, M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151966031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…….. i
Daftar isi……. ii
Daftar Tabel…….. iii
Daftar Gambar…..…….. iv
BAB I PENDAHULUAN……... 1
1.1 Latar Belakang…… 1
1.2 Landasan Hukum…… 2
1.3 Maksud dan Tujuan……..... 4
1.4 Sistematika Penulisan……..... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU……. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…… 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……. 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…….. 16
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…… 29
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi…… 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…… 30
3.3 Program dan Kegiatan……. 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……... 43
BAB V PENUTUP……. 58

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023….....	7
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo…….....	14
Tabel II.3	Reviu Teerhadap Rancangan Awal RKPD 2025 ……...	19
Tabel II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025……	28
Tabel III.1	Sasaran dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026……...	31
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…….	33
Tabel III.3	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025…….	32
Tabel IV.1	Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2025……..	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya……. 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Gambar 1.1

Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya

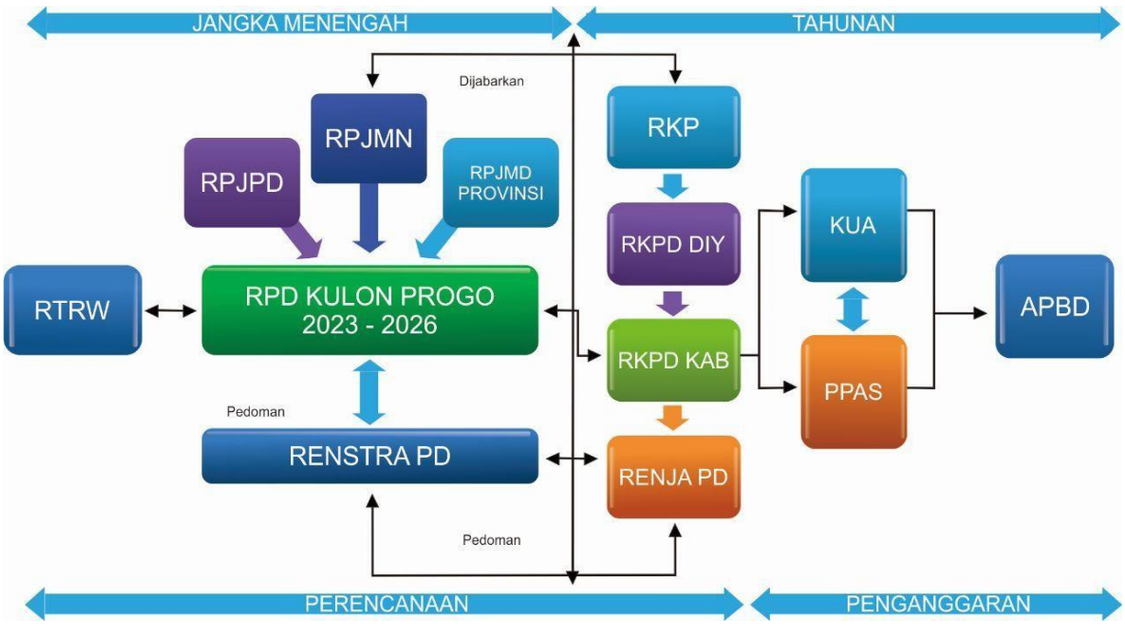

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan..

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah :

   a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
   c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
   d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu adanya kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan tahun 2024 (tahun berjalan/ tahun-1) . Hasil Evaluasi evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Kulon Progo

Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**									
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**115,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**48,28**	**48,28**
4.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-								
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	2	2,00	100,00	2	-	20,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21,00	100,00	21	12,00	39,29
4.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-								
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		48	12	12	12,00	100,00	13	6,00	37,50
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12,00	100,00	12	6,00	37,50
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	14	14	14,00	100,00	14	7,00	37,50
4.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*								
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8		2	2,00	100,00	2	-	25,00
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	2	2	2,00	100,00	2	-	25,00
4.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*								
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36		9	9,00	100,00	9	-	25,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	48	12	12	12,00	100,00	12	6,00	37,50
4.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Penambahan Aset*								
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atu Bangunan Lainnya yang Disediakan	198	216	78	78,00	100,00	3	3,00	40,91
4.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12,00	100,00	12	6,00	37,50
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12,00	100,00	12	6,00	37,50
4.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-								
4.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.761	411	411	411,00	100,00	84	42,00	25,72
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	65	65	65,00	100,00	65	30,00	36,54
4.01.01.2.09.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlha Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	84	84	84,00	100,00	425	210,00	87,50
4.01.01.2.11	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-								
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		48	12	12	12,00	100,00	13	6,00	37,50
4.01.01.2.11.02	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	4	4	4,00	100,00	9	9,00	54,17
4.01.01.2.11.03	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	7	8	8,00	100,00	4	2,00	28,57
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		48	12	12	12,00	100,00		-	25,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-								
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	3	3	3,00	100,00	3	1,00	33,33
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6		-				-	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	2	2	2,00	100,00	2	2,00	50,00
4.01.01.2.13	*Penataan Organisasi*	-								
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	2	2	2,00	100,00	2	-	25,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	13	5	5,00	100,00	7	2,00	35,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	7	7	7,00	100,00	5	-	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.2.14	*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	-								
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48,00	12,00	12	12,000	100,00	12	6,00	37,50
4.01.02	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100,00**		**92,43**	**105,82**	**114,49**	**94,91**	**44,79**	**44,79**
4.01.02.2.01	*Administrasi Tata Pemerintahan*	*Jumlha Dokumen Tata Pemerintahan*								
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	3	3	3,00	100,00	3	-	25,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16	5	5	5,00	100,00	3	-	31,25
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	21	5	5	5,00	100,00	5	5,00	47,62
4.01.02.2.02	*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra*								
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44	11	11	11,00	100,00	12	2,00	29,55
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	40	10	10	10,00	100,00	10	2,00	30,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20	5	5	5,00	100,00	5	1,00	30,00
4.01.02.2.03	*Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum*								
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.890	610	465	642,00	138,06	470	354,00	52,70

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	10	8	11,00	137,50	12	1,00	60,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.910	615	470	681,00	144,89	470	231,00	47,75
4.01.02.2.04	*Fasilitasi Kerja Sama Daerah*	*Fasilitasi Kerja Sama*								
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16		4	4,00	100,00	4	3,00	43,75
4.01.03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**	**100,00**		**100,00**	**108,33**	**108,33**	**100,00**	**13,39**	**13,39**
4.01.03.2.01	*Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijkan Perekonomian*								
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	11	5	5,0	100,00	5	-	25,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48	13	12	12,00	100,00	12	2,00	29,17
4.01.03.2.02	*Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*								
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	3	3	3,00	100,00	3	-	25,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	3	6	6,00	100,00	6	1,00	29,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	5	4	4,00	100,00	4	-	25,00
4.01.03.2.03	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa*								
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	590	153	145	133,00	91,72	150	52,00	31,36
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16	3	5	5,00	100,00	4	-	31,25
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	960	120	240	240,00	100,00	240	130,00	38,54
4.01.03.2.04	*Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	*Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.*								
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	20	4	6	6,00	100,00	6	-	30,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8		2	2,00	100,00	2	-	25,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8		2	2,00	100,00	3	-	25,00
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**92,00**		**91,75**	**92,68**	**101,01**	**91,83**	**33,33**	**36,23**
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*								
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	14	14	14,00	100,00	8	-	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.04.5.01.04	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8		2	2	100,00	1	-	25,00
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4		1	1,00	100,00			25,00
4.01.04.5.02	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	*Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan*								
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20,00	5,00	5	1,00		2	1,00	10,00

Dari tabel II. 1 diatas, capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 mendapat predikat Sangat Tinggi (ST), sedangkan untuk capaian s/d tahun 2024 (tahun berjalan) baik capaian sub kegiatan maupun capaian program rata-rata masih dibawah 50%, hal ini disebabkan mayoritas target realisasi berada pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Ada beberapa indikator kinerja yang menjadi dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Secara umum capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dapat tercapai dengan baik.

Berikut ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 (n-3), dan tahun 2023 (n-2) serta proyeksi tahun 2024 (tahun n-1); tahun 2025 (tahun n); dan tahun 2026 (n+1).

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun- 2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	15	16
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun -n		IKK	0	0	0	0	0	0	0	0	Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 s.d. triwulan II tahun 2024 tidak ada proyek konstruksi yang dibawa Ke tahun terikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama hahun -n
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		IKK	61,25	61,50	61,75	61,75	61,25	34,63	61,75	61,75	Capaian realisasi tahun 2023 melebihi target, sedangkan untuk tahun 2024 diprediksi juga akan mencapai target
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif tahun -n		IKK	1,62	1,64	1,66	1,66	1,62	0,44	1,66	1,66	Capaian realisasi tahun 2023 melebihi target, sedangkan untuk tahun 2024 diprediksi juga akan mencapai target
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
1	Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah			100	100	100	100	111,46	61,64	100	100	Capaian realisasi tahun 2023 melebihi target, sedangkan untuk tahun 2024 diprediksi juga akan mencapai target
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,00	85,10	85,20	85,30	85,34	-	85,20	85,30	Capaian realisasi tahun 2023 melebihi target, realisasi tahun 2024 belum ada karena survei baru akan dilaksanakan pada Tw III tahun 2024
3	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Capaian realisasi tahun 2023 dapat target, tahun 2024 diprediksi juga akan mencapai target

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun- 2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	15	16
	Indikator Kinerja Program											
1	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			92,43	94,91	97,45	100	102,56	44,79	94,91	97,45	Capaian realisasi tahun 2023 dapat melebihi target, untuk tahun 2024 s.d tw II capaian realisasi belum ada di kisaran 50% disebabkan sebagian besar dokumen perumusan dana monev kebijakan baru selesai pada triwulan IV
2	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan			100,00	100,00	100,00	100	131,32	13,39	100,00	100,00	Capaian realisasi tahun 2023 dapat melebihi target, untuk tahun 2024 s.d tw II capaian realisasi belum ada di kisaran 50% disebabkan sebagian besar dokumen perumusan dana monev kebijakan baru selesai pada triwulan IV
3	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan			91,75	92,77	91,92	92,00	92,68	33,33	91,83	91,92	Capaian realisasi tahun 2023 dapat melebihi target, untuk tahun 2024 s.d tw II capaian realisasi belum ada di kisaran 50% disebabkan sebagian besar dokumen perumusan dana monev kebijakan baru selesai pada triwulan IV
4	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100,00	100,00	100,00	100	116,64	48,28	100,00	100,00	Capaian realisasi tahun 2023 dapat melebihi target, untuk tahun 2024 s.d tw II capaian realisasi belum ada di kisaran 50% disebabkan sebagian besar dokumen perumusan dana monev kebijakan baru selesai pada triwulan IV

Dari tabel diatas yang terdiri dari indikator Kinerja Kunci (IKK); Indikator Kinerja Perangkat Daerah; dan Indikator Kinerja Program tahun 2023 telah mencapai target bahkan beberapa ada yang melebihi target, ini menggabarkan bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pelaksaana kegiatan berjalan dengan sangat baik, ditunjang dengan adanya koordinasi internal dan eksternal juga berjalan dengan baik. sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan II rata-rata capaian realisasi masih dibawah 50 % hal ini disebabkan mayoritas dokumen perumusan/ kajian/ monev kebijakan baru dapat diselesaikan pada triwulan IV, sehingga belum bisa menggabarkan kinerja pelayanan perangkat daerah sepenuhnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksaaan tupoksi tentunya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana berikut :

a. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencaaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. Keterbatasan SDM ASN dan penempatan aparatur belum sesuai dengan keahlianya;
d. Masih terdapatnya tumpeng tindih tusi antar perangkat daerah;
e. Penggunaan 2 (dua) buah aplikasi dalam pelasanaan perencanaan dan pengganggaran.

Permasalahan dan hambatan diatas apabila tidak segera diatasi tentunya akan sangat berdampak pada capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari IKK, IK Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program yang selanjutnya juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah atau pada saat transisi (dipimpin pejabat bupati) berupa tujuan dan sasaran daerah. Adapun tujuan daerah yang didukung Sekretariat Daerah adalah “ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” dengan indikator ndeks Reformasi Birokrasi, sedangkan untuk sasaranya adalah “ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Resposif dan Akuntabel “ denga indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP); dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Selain permasalahan dan hambatan diatas Sekretariat daerah juga memiliki tantangan, tantangan merupakan situasi yang mengancam bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penataan Kelembagaan yang sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;

b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik;
c. Optimalisasi tata kelola pemerintahan;
d. Peningkatan Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah dalam rangka memenuhi tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima *(service excelent) ;*
e. Responsibilitas Sekretariat Daerah dalam menyikapi perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat;.
f. Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal;
g. Optimalisasi kualitas dan kuantitas produk kebijakan bidang pemerintahan/ kesra dan bidang perekonomian dan pembangunan;
h. Peningkatan kapasitas pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

a. Adanya dukungan dan arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah;
b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
d. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi;
e. Adanya berbagai mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
i. Adanya konsitensi dan kreatifitas seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
j. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
k. Adanya kerjasama antar pemerintah daerah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Optimalisasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah, perumusan dan pengendalian kebijakan serta penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi : identifikasi prioritas program/ kegiatan/ sub kegiatan; indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan; tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan/ sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialoksikan untuk setiap program/ kegiatan/ sub kegiatan.

Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program,/ kegiatan/ sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan Rancangan RKPD. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada table II.3 berikut :

TABEL II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KULON PROGO

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				**38.441.866.780,00**	**Sekretariat Daerah**				**25.829.537.215,00**	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**38.441.866.780,00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**25.829.537.215,00**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**38.441.866.780,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**25.829.537.215,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**30.083.965.480,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**19.726.952.500,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**32.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**24.896.400,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.356.400,00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	12.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	8.540.000,00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**18.243.097.480,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**9.380.636.317,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	18.009.297.480,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	9.191.494.317,00	TPP beban kerja dipindahkan ke BKPP
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	220.800.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	177.300.000,00	Efisiensi pada honorrium PPTK, KPA yang semula dianggarkan 12 bulan atas kebijakan TAPD diminta hanya dianggarkan 6 bulan saja
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	13.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	11.842.000,00	Efisiensi belanja lembur
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2 Dokumen**	**15.320.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2 Dokumen**	**6.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	5.320.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0,00	Nilai angka kredit jabfung saat ini mengacu pada nilai SKP sehingga tidak perlu adanya penilaian angka kredit sehingga sub kegiatan ini dihilangkan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	6.000.000,00	Penghitungan berdasarkan kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**1.320.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**1.578.694.000,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	420.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	393.768.000,00	Efisiensi pada ATK
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	900.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.184.926.000,00	Efisiensi pada belanja perjalanan biasa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Penambahan Aset	**50 Unit**	**1.500.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		Jumlah Penambahan Aset	**50 Unit**	**1.425.964.900,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 Unit	1.500.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	1.425.964.900,00	Pengadaan Sarpras menyesuaikan RKBMD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**2.350.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**2.471.465.413,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	744.357.037,00	Mendasar pada penghitungan kebutuhan dan realisasi tahun sebelumnya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.727.108.376,00	Bertambahnya personil outsourcing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**3.650.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**2.044.440.650,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	1.200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	1.061.108.050,00	Adanya efisiensi pada BBM

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	2.100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	688.999.200,00	Rehab pagar Pemda yang sebelumnya direncanakan keseluruhan (keliling), menjadi yang disebelah barat (yang rusak berat)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	350.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	294.333.400,00	Efisiensi/ mendasar pada penghitungan kebutuhan pemeliharaan
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional**	**3 Laporan**	**930.540.000,00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional**	**3 Laporan**	**944.121.020,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	178.540.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	181.155.720,00	Penambahan PPH 21, JKK, JKM
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	140.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	146.922.100,00	Penyesuaian harga pada SHBJ
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	12.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	16.043.200,00	Menyesuaikan kebutuhan (harga sesai tarif di RSUD Wates)
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang/Bulan	600.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang/Bulan	600.000.000,00	Sesuai
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan**	**3 Laporan**	**420.000.000,00**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan**	**3 Laporan**	**385.883.600,00**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	212.789.400,00	Efiensi pada pengisian tabung gas; makanan dan minuman rapat
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	153.581.600,00	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	19.512.600,00	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Organisasi		**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**9 Dokumen**	**323.008.000,00**	**Penataan Organisasi**		**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**9 Dokumen**	**260.422.200,00**	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	82.992.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	69.400.000,00	Efisiensi pada pengembangan Software (batal)
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	140.000.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	96.265.200,00	Efisiensi pada belanja lembur dan ATK
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	100.016.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	94.757.000,00	Efisiensi pada belanja lembur, ATK dan perjalanan dinas biasa
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**12 Laporan**	**1.300.000.000,00**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**12 Laporan**	**1.204.428.000,00**	
	Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.300.000.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.204.428.000,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) petugas keprotokolan dihilangkan ; efisiensi pada makanan dan minuman tamu
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**97,45%**	**5.695.000.000,00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**97,45%**	**4.856.896.788,00**	
	Administrasi Tata Pemerintahan		**Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan**	**12 Dokumen**	**810.000.000,00**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan**	**12 Dokumen**	**797.722.800,00**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	350.000.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	289.884.500,00	Efisiensi pada belanja ATK dan belanja lembur
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	230.000.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	170.737.200,00	Efisiensi/ sesuai kebutuhan minimal
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	230.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	337.101.100,00	Panambahan anggaran prioritas untuk penyusunan LKPJ Bupati

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra**	**26 Dokumen**	**3.440.000.000,00**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra**	**26 Dokumen**	**2.722.518.888,00**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	1.700.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	1.356.685.400,00	Efisiesi pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	1.600.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	1.236.962.900,00	Hibah untuk NU dan Muhammadiyah tahun 2025 ditiadakan; Efisiensi pada belanja ATK dan belanja lembur
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	140.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	128.870.588,00	Efisiensi/ sesuai kebutuhan
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum**	**480 Dokumen**	**1.395.000.000,00**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum**	**480 Dokumen**	**1.292.471.600,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	480 Dokumen	145.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	480 Dokumen	130.830.700,00	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	1.075.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	1.040.996.900,00	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	480 Dokumen	175.000.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	480 Dokumen	120.644.000,00	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Fasilitasi Kerjasama**	**4 Dokumen**	**50.000.000,00**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Fasilitasi Kerjasama**	**4 Dokumen**	**44.183.500,00**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	50.000.000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	44.183.500,00	Efiesni pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**	**100 %**	**1.464.618.800,00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**	**100 %**	**978.375.927,00**	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**17 Dokumen**	**337.000.200,00**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**17 Dokumen**	**267.441.027,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	157.000.200,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	129.626.927,00	Efiesni pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	180.000.000,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	137.814.100,00	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat, belanja ATK dan perjalanan dinas biasa; penyusunan kajian peta distribusi barang bukan prioritas
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**10 Laporan**	**200.000.000,00**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**10 Laporan**	**120.091.800,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	55.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	42.295.500,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	80.000.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	50.017.900,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	65.000.000,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	27.778.400,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**149 Dokumen**	**527.477.800,00**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**149 Dokumen**	**352.003.300,00**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	350.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	236.460.800,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	80.677.800,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	57.378.600,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	240 Orang	96.800.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	240 Orang	58.163.900,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		**Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**9 Dokumen**	**400.140.800,00**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**9 Dokumen**	**238.839.800,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	107.570.400,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	92.198.000,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	107.570.400,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	7.617.700,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen	185.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen	139.024.100,00	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**91,92%**	**1.198.282.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**91,92%**	**267.312.000,00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota**	**8 Lembaga**	**898.282.500,00**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota**	**8 Lembaga**	**182.312.000,00**	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	8 Lembaga	598.282.500,00	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	8 Lembaga	150.000.000,00	Menyesuaikan BA
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	300.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	32.312.000,00	Menyesuaikan BA
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo**	**5 dokumen**	**300.000.000,00**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo**	**5 dokumen**	**85.000.000,00**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	85.000.000,00	Menyesuaikan BA

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo salah satunya mempunyai tugas dan wewenang menyalurkan batuan /hibah berupa uang . Hibah yang disalurkan terdapat beberapa mekanisme berupa : usulan dari masyarakat melalui proposal yang ditujukan lengsung kepada bupati; dari pokok-pokok pikiran dewan; dan dari hasil musyawarah rencana pembangunan kapanewon. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh mitra bappeda dan perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Usulan yang lolos verifikasi/ memenuhi syarat selanjutnya diinput dalam RKA/ DPA Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk hibah masjid tidak dapat diberikan secara berturut-turut untuk setiap tahunnya, mengingat cukup besarnya jumlah masjid yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga perlu adanya pemerataan. Adapun hibah yang akan disalurkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

-

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 5 (lima) gereja untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 5 (lima) gereja ini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Gereja yang mendapat bantuan 1 (satu) berasal dari pokok pikiran dewan dan 4 (empat) dari usulan masyarakat, jumlah bantuan kepada gereja masing-masing Rp15.000.000,00 per tahun
				40 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 40 (empat puluh) masjid untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 40 (empat puluh) masjidini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Masjid yang mendapat bantuan 24 (Lokasi) berasal dari pokok pikiran dewan dan 16 (enam belas) dari usulan masyarakat, jumlah bantuan kepada masjid masing-masing Rp15.000.000,00 per tahun
				10 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 10 (sepuluh) lokasi pondok pesantren untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 10 (sepuluh) pondok pesantren ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Pondok pesantren mendapat bantuan masing-masing Rp10.000.000,00 per tahun
				1 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 1 (satu) lokasi vihara untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 1 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Vihara ini mendapat bantuan senilai Rp15.000.000,00 per tahun
				15 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 15 (lima belas) lokasi madarasah tsanawiyah untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 15 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Madrasah tsanawiyah ini mendapat bantuan senilai masing-masing Rp5.000.000,00 per tahun
				1 lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan hibah kepada PMI Kulon Progo berupa uang senilai Rp75.000.000,00 per tahun
				200 anak	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan bantuan sosial berupa uang kepada 200 (dua ratus) anak yatim piyatu yang merupakan usulan dari masyarakat dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu (Setda), masing-masing anak mendapat bantuan uang senilai Rp1.000.000,00 per tahun

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
   Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
f. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
g. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dari prioritas nasional diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di daerah harus mampu mengikuti perkembangan-perkembangan nasional, seluruh kebijakan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo harus selaras dan mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau menghambat harus segera dihapus/direvisi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis juga perlu adanya koordinasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Segala hambatan, perkembangan, permasalahan yang dihadapi perangkat daerah teknis harus dilaporkan secara berkala kepada sekretaris daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
SASARAN DAN TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah
			2. Harapan Lama Sekolah
		2. Meningkatnya prestasi generasi muda	Cakupan prestasi generasi muda
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup
			2. Indeks Keluarga Sehat
	2. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Gini Rasio	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)
	2.Pertumbuhan Ekonomi		2. Angka pengangguran terbuka
	3. Angka Kemiskinan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)
			2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial
Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Ruang
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Cakupan penanganan bencana

Sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo berkait erat dengan :

Tujuan :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Indikator Tujuan :

“ Indeks Reformasi Birokrasi”

Sasaran :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”

Indikator :

- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sekaligus mendasar pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2025

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)			Nilai	A
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			Nilai	84,50
1			Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100,00
2			Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,20
3			Meningkatnya layanan tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY yang terdiri dari 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu total senilai Rp.25.829.537.215,00.

Penentuan Program/kegiatan/sub kegiatan beserta besaran pagu anggaran sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tahapan-tahapan sesuai ketentuan dengan mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sekretariat Daerah				**25.829.537.215,00**				**40.639.677.354,00**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**25.829.537.215,00**				**40.639.677.354,00**
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**25.829.537.215,00**				**40.639.677.354,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**100 %**	**19.726.952.500,00**			**100 %**	**32.474.802.354,00**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**		**25 Dokumen**	**24.896.400,00**			**23 Dokumen**	**32.600.000,00**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	4 Dokumen	16.356.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat dan belanja lembur	2 Dokumen	20.000.000,00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	8.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat dan belanja lembur	21 Laporan	12.600.000,00
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**14 Laporan**	**9.380.636.317,00**			**14 Laporan**	**19.164.102.354,00**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131 Orang/bulan	9.191.494.317,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TPP beban kerja dipindahkan ke BKPP	131 Orang/bulan	18.909.762.354,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	177.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada honorrium PPTK, KPA yang semula dianggarkan 12 bulan atas kebijakan TAPD diminta hanya dianggarkan 6 bulan saja	12 Dokumen	231.840.000,00
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	11.842.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi belanja lembur	14 Laporan	22.500.000,00
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**		**2 Dokumen**	**6.000.000,00**			**2 Dokumen**	**10.500.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penghitungan berdasarkan kebutuhan	2 Orang	10.500.000,00
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**		**2 Dokumen**	**1.578.694.000,00**			**2 Dokumen**	**1.641.000.000,00**
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	393.768.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada ATK	9 Paket	441.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.184.926.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan biasa	12 Laporan	1.200.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Jumlah Penambahan Aset		**50 Unit**	**1.425.964.900,00**			**50 Unit**	**2.000.000.000,00**
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	1.425.964.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Sarpras menyesuaikan RKBMD	27 Unit	2.000.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**		**24 Laporan**	**2.471.465.413,00**			**24 Laporan**	**2.467.500.000,00**
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	744.357.037,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mendasar pada penghitungan kebutuhan dan realisasi tahun sebelumnya	12 Laporan	787.500.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.727.108.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bertambahnya personil outsourcing	12 Laporan	1.680.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**3 Laporan**	**2.044.440.650,00**			**3 Laporan**	**3.910.000.000,00**
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Unit	1.061.108.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Adanya efisiensi pada BBM	84 Unit	1.260.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit	688.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rehab pagar Pemda yang sebelumnya direncanakan keseluruhan (keliling), menjadi yang disebelah barat (yang rusak berat)	65 Unit	2.200.000.000,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425 Unit	294.333.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi/ mendasar pada penghitungan kebutuhan pemeliharaan	425 Unit	450.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional**		**3 Laporan**	**944.121.020,00**			**3 Laporan**	**944.600.000,00**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	181.155.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan PPH 21, JKK, JKM	2 Orang/Bulan	185.000.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	146.922.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyesuaian harga pada SHBJ	10 Paket	147.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	16.043.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan kebutuhan (harga sesai tarif di RSUD Wates)	4 Orang	12.600.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/Bulan	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai	40 Orang/Bulan	600.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan**		**3 Laporan**	**385.883.600,00**			**3 Laporan**	**503.500.000,00**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	212.789.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efiensi pada pengisian tabung gas; makanan dan minuman rapat	3 Paket	262.500.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	153.581.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan	3 Paket	220.000.000,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.512.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan	2 Paket	21.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**		**9 Dokumen**	**260.422.200,00**			**9 Dokumen**	**436.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	69.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada pengembangan Software (batal)	2 Dokumen	86.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	96.265.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja lembur dan ATK	4 Laporan	190.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	94.757.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja lembur, ATK dan perjalanan dinas biasa	7 Dokumen	160.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**		**12 Laporan**	**1.204.428.000,00**			**12 Laporan**	**1.365.000.000,00**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.204.428.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) petugas keprotokolan dihilangkan ; efisiensi pada makanan dan minuman tamu	12 Laporan	1.365.000.000,00
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**97,45%**	**4.856.896.788,00**			**100%**	**6.008.800.000,00**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan**		**12 Dokumen**	**797.722.800,00**			**12 Dokumen**	**879.550.000,00**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	289.884.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja ATK dan belanja lembur	3 Dokumen	400.000.000,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	170.737.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi/ sesuai kebutuhan minimal	3 Dokumen	238.050.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	337.101.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Panambahan anggaran prioritas untuk penyusunan LKPJ Bupati	5 Dokumen	241.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit	688.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rehab pagar Pemda yang sebelumnya direncanakan keseluruhan (keliling), menjadi yang disebelah barat (yang rusak berat)	65 Unit	2.200.000.000,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425 Unit	294.333.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi/ mendasar pada penghitungan kebutuhan pemeliharaan	425 Unit	450.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional**		**3 Laporan**	**944.121.020,00**			**3 Laporan**	**944.600.000,00**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	181.155.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan PPH 21, JKK, JKM	2 Orang/Bulan	185.000.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	146.922.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyesuaian harga pada SHBJ	10 Paket	147.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	16.043.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan kebutuhan (harga sesai tarif di RSUD Wates)	4 Orang	12.600.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/Bulan	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sesuai	40 Orang/Bulan	600.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan**		**3 Laporan**	**385.883.600,00**			**3 Laporan**	**503.500.000,00**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	212.789.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efiensi pada pengisian tabung gas; makanan dan minuman rapat	3 Paket	262.500.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	153.581.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan	3 Paket	220.000.000,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.512.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyesuaikan hasil penghitungan kebutuhan	2 Paket	21.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**		**9 Dokumen**	**260.422.200,00**			**9 Dokumen**	**436.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra**		**26 Dokumen**	**2.722.518.888,00**			**26 Dokumen**	**3.612.000.000,00**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	1.356.685.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiesi pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK	11 Dokumen	1.785.000.000,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	1.236.962.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hibah untuk NU dan Muhammadiyah tahun 2025 ditiadakan; Efisiensi pada belanja ATK dan belanja lembur	11 Dokumen	1.680.000.000,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	128.870.588,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi/ sesuai kebutuhan	5 Dokumen	147.000.000,00
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum**		**480 Dokumen**	**1.292.471.600,00**			**485 Dokumen**	**1.464.750.000,00**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480 Dokumen	130.830.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK	485 Dokumen	152.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kasus	1.040.996.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK	12 Kasus	1.128.750.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480 Dokumen	120.644.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi / pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan ATK	485 Dokumen	183.750.000,00
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Fasilitasi Kerjasama**		**4 Dokumen**	**44.183.500,00**			**475 Dokumen**	**52.500.000,00**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	44.183.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efiesni pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK	4 Dokumen	52.500.000,00
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**		**100 %**	**978.375.927,00**			**100 %**	**1.556.075.000,00**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**17 Dokumen**	**267.441.027,00**			**17 Dokumen**	**351.467.000,00**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	129.626.927,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efiesni pada belanja perjalanan dinas biasa dan ATK	5 Dokumen	162.467.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	137.814.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada makanan dan minuman rapat, belanja ATK dan perjalanan dinas biasa; penyusunan kajian peta distribusi barang bukan prioritas	12 Dokumen	189.000.000,00
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**10 Laporan**	**120.091.800,00**			**10 Laporan**	**210.000.000,00**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	42.295.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	3 Dokumen	57.750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	50.017.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	6 Laporan	84.000.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	27.778.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	4 Laporan	68.250.000,00
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**149 Dokumen**	**352.003.300,00**			**149 Dokumen**	**577.688.000,00**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	236.460.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	150 Dokumen	367.500.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	57.378.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	4 Dokumen	110.000.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Orang	58.163.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	240 Orang	100.188.000,00
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**9 Dokumen**	**238.839.800,00**			**9 Dokumen**	**416.920.000,00**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	92.198.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	6 Dokumen	111.335.000,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.617.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	2 Dokumen	111.335.000,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	139.024.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas,belanja makan dan minum rapat dan ATK	3 Dokumen	194.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhab Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**91,92%**	**267.312.000,00**			**91,92%**	**600.000.000,00**
4	**01**	**04**	**5.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota**		**8 Lembaga**	**182.312.000,00**			**8 Lembaga**	**425.000.000,00**
4	01	04	5.01	0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota								
						Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Lembaga	150.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Menyesuaikan BA	8 Lembaga	300.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	32.312.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Menyesuaikan BA	1 Dokumen	125.000.000,00
4	**01**	**04**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo**		**5 dokumen**	**85.000.000,00**			**5 dokumen**	**175.000.000,00**
4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	85.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Menyesuaikan BA	3 Dokumen	175.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL IV.1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)SEKRETARIAT DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**-**			**100 %**	**19.726.952.500,00**						**-**	**32.474.802.354,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*	-			23 Dokumen	24.896.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	32.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.356.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	9.380.636.317,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda	-	19.164.102.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	9.191.494.317,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		18.909.762.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	177.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		231.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	11.842.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			2 Dokumen	6.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	-	10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	1.578.694.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah	-	1.641.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	393.768.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.184.926.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			27 Unit	1.425.964.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				27 Unit	1.425.964.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	2.471.465.413,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	2.467.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	744.357.037,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		787.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.727.108.376,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	2.044.440.650,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	3.910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				88 Unit	1.061.108.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	688.999.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				425 Unit	294.333.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional*	-			3 Laporan	944.121.020,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati	-	944.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	181.155.720,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	146.922.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	16.043.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				40 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan*	-			3 Laporan	385.883.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	-	503.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	212.789.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	153.581.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	19.512.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	-			9 Dokumen	260.422.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD, Pemkab	-	436.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	69.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD, Pemkab		86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	96.265.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD, Pemkab		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7 Dokumen	94.757.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD, Pemkab		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	-			12 Laporan	1.204.428.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1.204.428.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**-**			**97,45 %**	**4.856.896.788,00**						**-**	**6.008.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan*	-			12 Dokumen	797.722.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon	-	879.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	289.884.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	170.737.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		238.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	337.101.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		241.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra*	-			26 Dokumen	2.722.518.888,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan	-	3.612.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				11 Dokumen	1.356.685.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.785.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				10 Dokumen	1.236.962.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	128.870.588,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum*	-			480 Dokumen	1.292.471.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan	-	1.464.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				480 Dokumen	130.830.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		152.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	1.040.996.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		1.128.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				480 Dokumen	120.644.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Fasilitasi Kerjasama*	-			4 Dokumen	44.183.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo	-	52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	44.183.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo		52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan***	**-**			**100 %**	**978.375.927,00**						**-**	**1.556.075.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	-			17 Dokumen	267.441.027,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD	-	351.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	129.626.927,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		162.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	137.814.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	-			10 Laporan	120.091.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	42.295.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		57.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	50.017.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	27.778.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		68.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	-			150 Dokumen	352.003.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	577.688.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	236.460.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		367.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	57.378.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				240 Orang	58.163.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		100.188.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	-			9 Dokumen	238.839.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan	-	416.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				6 Dokumen	92.198.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		111.335.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	7.617.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		111.335.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	139.024.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		194.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan***	**-**			**91,92 %**	**267.312.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*	-			8 Lembaga	182.312.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				8 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	32.312.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo*	-			3 Dokumen	85.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural	-	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara terarah, bertahap dan berkesinambungan serta mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dapat berdampak pada tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah yang akhirnya berdampak juga pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Selain itu Renja ini juga digunakan sebagai dasar Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Evaluasi dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh komponen Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dibuat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya karena mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dibebankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Wates, 2 Agustus 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulon Progo

TRIYONO, S.IP, M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151966031002

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KULON PROGO

2025

RENCANA KERJA

0274 - 773271

@humassetwan.kulonprogo setwan.kulonprogokab.go.id Setwan Kulon Progo @humassetwan_kp

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta,
Telp. (0274) 773271, Fax. (0274) 773271
E-mail : setwan@kulonprogokab.go.id, Website : setwan.kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rankir Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas enam tahapan yaitu :

- ✓ persiapan penyusunan
- ✓ penyusunan rancangan awal
- ✓ penyusunan rancangan
- ✓ penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- ✓ penyusunan
- ✓ penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dan mendasar pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam RKPD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

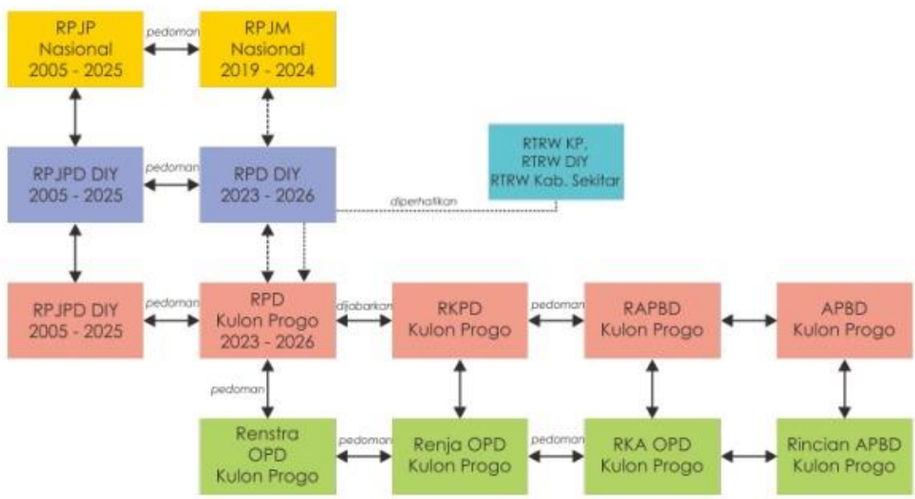

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 mendasarkan pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta sub kegiatan di Sekretariat DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, untuk mengukur tercapainya kinerja yang digunakan sebagai evaluasi, sehingga bisa digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2023 mencapai 94,27% dan realisasi fisik mencapai 97,76%. Secara umum, semua kegiatan telah berjalan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan baik secara keluaran, fisik maupun anggaran. Realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.1.1

Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2023

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
01.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	9.000.000,00	2	8.911.916,00
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	21	7.000.000,00	21	6.939.916,00
02.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	30	1.973.762.440,00	30	1.898.810.445,00
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	51.064.700,00	4	50.899.879,00
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	14	8.000.000,00	14	7.954.156,00
03.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	3.252.200,00	1	2.936.005,00
	b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	12	5.040.000,00	12	2.100.000,00
04.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	a.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	79.974.000,00	12	77.999.992,00
05.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	764	453.700.999,00	764	445.786.000,00
06.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	183.111.000,00	12	167.848.583,00
	b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	59.143.200,00	12	57.711.329,00
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	342.710.376,00	12	333.291.081,00
07.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	898.797.800,00	25	882.144.655,00
	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	830.115.600,00	1	809.377.600,00
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	75	122.316.500,00	75	114.343.408,00
08.00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
	a.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	40	19.207.249.948,00	40	19.187.669.673,00
	b.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	80	191.279.800,00	80	142.729.956,00
	c.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	40	37.000.000,00	4	3.285.000,00
08.00	Layanan Administrasi DPRD							
	a.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	6	283.723.300,00	6	251.671.601,00

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
09.00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
	a.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	3	393.182.100,00	3	360.186.723,00
	b.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	6	1.712.376.900,00	6	1.490.488.162,00
	c.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	11	3.975.315.100,00	11	3.907.420.768,00
	d.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	1.008.409.300,00	5	982.124.610,00
10.00	Pembahasan Kebijakan Anggaran							
	a.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	6	2.082.466.000,00	6	1.891.773.116,00
11.00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
	a.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	274.522.200,00	1	202.362.547,00
	b.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	12	2.554.080.360,00	12	2.269.430.411,00
	b.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	1	267.215.600,00	1	198.287.101,00
12.00	Peningkatan Kapasitas DPRD							
	a.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	6	2.343.360.350,00	6	2.135.635.407,00
	b.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	398	1.471.360.100,00	398	1.447.433.092,00
13.00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
	a.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	5	868.893.300,00	5	814.825.883,00
14.00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
	a.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	dokumen	5	121.459.700,00	5	104.881.092,00
15.00	Pembahasan Kerja Sama Daerah							
	a.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	dokumen	8	1.185.633.800,00	8	1.026.923.069,00
16.00	Fasilitasi Tugas DPRD							
	a.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	28	2.365.735.000,00	28	1.743.766.000,00
	b.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	dokumen	104	1.680.299.316,00	104	1.504.234.362,00
	c.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	14	454.562.300,00	14	420.739.278,00
	c.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	8	1.438.254.984,00	8	1.186.732.664,00
						48.943.368.273		46.139.655.480

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, target kinerja tidak tercapai, karena dari 40 kuota MCU, Anggota DPRD yang melakukan MCU sebanyak 4 orang. 36 orang tidak melakukan MCU karena kurangnya animo dan khawatir akan temuan kesehatan, serta sebagian lagi merasa belum mendesak untuk melakukan MCU.

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 **%**							
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**								
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		2	2	100	2	4	40,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 Laporan		21	21	100	21	42	50,00
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**								
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan		30	30	100	30	60	50,00
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		4	4	100	4	8	20,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Laporan		14	14	100	14	28	50,00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**								
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		1	1	100	1	2	50,00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang		12	12	100	12	24	109,09
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**								
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		0	0	#DIV/0!	12	12	33,33
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		12	12	100	12	24	50,00
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan aset**								
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		0	0	#DIV/0!	0	-	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2030 Unit		764	764	100	501	1.265	62,32
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**								
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12	12	100	12	24	50,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12	12	100	12	24	200,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		12	12	100	12	24	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**								
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		25	25	100	25	50	50,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1	1	100	1	2	100,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	292 Unit		75	75	100	77	152	52,05
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	160 Orang/ Bulan		40	40	100	40	80	50,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	560 Paket		80	80	100	80	160	28,57
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160 Orang		40	4	10	40	44	27,50
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**								
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan		6	6	100	12	18	60,00
4.02.02	**ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	100 **%**							
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen		3	3	100	2	5	62,50
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36 Dokumen		6	6	100	4	10	27,78
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen		11	11	100	8	19	237,50
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	9 Dokumen		5	5	100	2	7	77,78
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**								
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24 Dokumen		6	6	100	6	12	50,00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen		1	1	100	1	2	50,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48 Dokumen		12	12	100	8	20	41,67
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen		1	1	100	1	2	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**								
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen		0	0	#DIV/0!	0	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	23 Dokumen		6	6	100	4	10	43,48
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	675 Dokumen		398	398	100	312	710	105,19
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	19 Dokumen		5	5	100	3	8	42,11
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**								
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16 Laporan		5	5	100	4	9	56,25
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**								
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	16 Dokumen		8	8	100	4	12	75,00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**								
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	85 Dokumen		28	28	100	27	55	64,71
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	300 Dokumen		104	104	100	103	207	69,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52 Dokumen		14	14	100	13	27	51,92
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20 Dokumen		8	8	100	5	13	65,00

Pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mendukung dan sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya saling komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD dan juga dengan Eksekutif dan DPRD maupun pihak ketiga; Komitmen dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tapi di sisi lain juga masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana prasarana dan pegawai, adanya dinamika perubahan yang cepat atas regulasi yang ada dan materi yang akan dibahas, mempengaruhi ketepatan waktu penjadwalan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD yang tugas pokoknya adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dimana kondisi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan, usia, partai politik yang berbeda-beda serta mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat karena sebagai wakil rakyat maka harus betul-betul didukung oleh keberadaan Sekretariat DPRD dengan sumber daya yang mempunyai kompetensi yang memadai dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai pula.

Pelayanan diupayakan dapat dilaksanakan secara optimal dengan memberdayakan sumber daya yang ada tersebut, sehingga tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program untuk urusan pemerintahan Tahun 2023 berdasarkan RKPD 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100

Indikator kinerja dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan perhitungan sebagai berikut:

(((Jumlah raperda yang ditetapkan / Jumlah raperda dalam Propemperda) x 100%) + ((Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan / Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan) x 100%)) + ((Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang seharusnya disepakati) x 100%) + ((Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati / Jumlah rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan) x 100%))/4

Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Raperda yang ditetapkan	9	9
2.	Jumlah Raperda dalam Propemperda	9	9
3.	Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan	8	8
4.	Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan	8	8
5.	Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu	5	5
6.	Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati	5	5
7.	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati	12	12
8.	Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan	12	12
Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		**100**	**100**

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ini terdiri dari 8 kegiatan dengan 17 sub kegiatan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD terkait fungsi pembentukan peraturan daerah melalui Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus) yang membahas produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Non Raperda/Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama. Outputnya adalah Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD. Selain itu, program ini juga memfasilitasi Alat Kelengkapan DPRD (Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Badan Musyawarah) untuk menjalankan tugas dan fungsinya, fasilitasi Sekretariat Fraksi (Tenaga Ahli dan Staf Fraksi DPRD), penyelenggaraan rapat paripurna non perda, serta publikasi kinerja lembaga DPRD.

Adapun fasilitasi kegiatan DPRD terkait fungsi anggaran dan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan DPRD (Badan Anggaran dan Komisi) dengan output berupa jumlah kebijakan perencanaan anggaran yang disepakati tepat waktu sebanyak 5 dokumen. Selain itu, jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim ke Bupati terkait hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan sebanyak 12 dokumen juga menjadi indikator kinerja program ini.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 9 Raperda dan 8 Non Raperda/Keputusan DPRD/ Persetujuan Bersama yang terdiri dari :

1) Raperda :

1. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023
4. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
5. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
6. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024
7. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan
8. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perumahan
9. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

2) Non Raperda Keputusan DPRD/ Persetujuan Bersama :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024
2. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Pembangunan Embarkasi Haji
3. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Optimalisasi Potensi Pajak Penerangan Jalan Umum
4. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Penyusunan Prioritas Program Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah
5. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Inventarisasi dan Percepatan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
6. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Pemulihan Ekonomi Daerah
7. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
8. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap Pengelolaan BUMD

3) Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu :

1. Persetujuan Bersama terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022; tanggal 29 Mei 2023

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang KUA APBD & PPAS Tahun Anggaran 2024; tanggal 11 Agustus 2023
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan KUA APBD & Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023; tanggal 11 Agustus 2023
4. Persetujuan Bersama terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023; tanggal 31 Agustus 2023
5. Persetujuan Bersama terhadap Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang APBD Tahun Anggaran 2024; tanggal 27 November 2023

Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati sebanyak 12 dokumen. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan sebagai implementasi Fungsi Pengawasan DPRD, dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 (s.d TW II)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	---	100	100	100	100	100	61,56	100	100	
2	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	---	---	100	100	100	100	100	48,75	100	100	
	- Jumlah Raperda yang ditetapkan			12	12	12	12	9	3	6	7	
	- Jumlah Raperda dalam Propemperda			10	12	12	12	9	9	6	7	
	- Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan			6	5	5	5	8	2	5	5	
	- Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan			6	5	5	5	8	3	5	5	
	- Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu			5	5	5	5	5	1	5	5	
	- Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati			5	5	5	5	5	5	5	5	
	- Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati			8	12	12	12	12	6	8	8	
	- Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan			8	12	12	12	12	8	8	8	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi. anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh tenaga-tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis. padat dan berdimensi politis.

Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai.

Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan. penyelenggaraan rapat dan risalah. pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan.

Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana. Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik. perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD. untuk fasilitas alat kengkapan Dewan dan juga untuk kegiatanDewan. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD. oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD yang telah diuraikan maka isu isu strategis sebagai berikut :

1. Komitmen anggota DPRD terhadap kepatuhan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas fungsi DPRD (Legislasi. Penganggaran dan Pengawasan)
2. Tuntutan anggota DPRD terhadap peningkatan pelayanan dimana adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD baik kualitas maupun kuantitas

3. Kesiapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD yang mana perlu dukungan Naskah Akademik yang memadai.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan
5. Peran ganda Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD di bawah Bupati atau Pemerintahan Daerah dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai legislatif dan sebagai eksekutif oleh karena itu Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD. Dimana Perubahan Renstra Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan (RPD).

Rencana Kerja mengakomodir Program dan kegiatan yang diusulkan baik oleh DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan produk hukum daerah, fungsi Penganggaran dan fungsi pengawasan. Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam tabel berikut:

Tabel

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KULON PROGO

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DPRD				**43.753.840.420**	SEKRETARIAT DPRD				**56.156.161.638**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**27.113.168.310**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**28.301.723.622**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**		**18.789.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**		**17.249.400**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.390.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.612.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	8.398.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.636.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**2.529.870.015**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**2.232.225.164**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.464.646.215	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.168.389.664	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.054.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	55.448.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	9.169.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8.387.300	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**		**58.793.300**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**		**172.038.700**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.007.300	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.201.300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	54.786.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	19.976.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**		**223.881.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum**		**148.861.400**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	124.031.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.885.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.850.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	79.976.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah penambahan aset**		**2.372.774.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah penambahan aset**		**2.150.850.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1.800.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1.700.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	512 Unit	572.774.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	625 Unit	450.850.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**		**569.226.356**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**		**547.701.626**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	201.168.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.991.250	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368.057.856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	342.710.376	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**1.731.530.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**1.924.731.300**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	795.821.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	978.821.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	824.836.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	818.952.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 Unit	110.872.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 Unit	126.957.900	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**18.907.579.932**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**20.588.577.032**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/bulan	18.551.424.632	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/bulan	19.971.205.832	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 Paket	319.155.300	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 Paket	580.371.200	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	37.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	37.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD		**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**		**700.722.907**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**		**599.465.000**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14 Laporan	700.722.907	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	599.465.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**		**16.640.672.110**	**ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**		**27.854.438.016**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**3.146.110.300**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**9.679.352.700**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	232.820.700	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	295.117.300	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	2.014.829.400	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2.354.182.900	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	418.730.100	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	2.301.135.200	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	479.730.100	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	4.728.917.300	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**		**3.323.065.800**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**		**2.152.639.600**	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	3.323.065.800	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	2.152.639.600	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**2.183.647.800**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**3.541.420.800**	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	315.885.900	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	268.210.900	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	1.311.692.300	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	2.995.330.300	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	556.069.600	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	277.879.600	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**		**1.704.087.100**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**		**3.622.294.500**	
	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD								
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	974.130.100	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.286.146.400	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	172 Dokumen	729.957.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	371 Dokumen	1.336.148.100	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**579.456.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**1.651.010.000**	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	579.456.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	1.651.010.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**		**132.767.500**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**		**147.273.500**	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	132.767.500	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Dokumen	147.273.500	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**1.034.047.600**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**1.343.990.100**	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	1.034.047.600	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	8 Dokumen	1.343.990.100	
	Fasilitasi Tugas DPRD		**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**		**4.537.490.010**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**		**5.716.456.816**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	30 Dokumen	1.598.327.754	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	43 Dokumen	2.551.469.500	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	58 Laporan	1.731.841.256	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	91 Laporan	1.892.819.816	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 Dokumen	260.222.700	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 Dokumen	318.275.100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	947.098.300	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	953.892.400	

Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah karena Penyesuaian dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan usulan Perangkat Daerah dan bukan usulan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat secara eksplisit. Tetapi secara implisit karena Anggota DPRD merupakan wakil masyarakat yang notabene menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari daerah pemilihannya, memfasilitasi anggota DPRD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan program kegiatan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

Tabel

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Usulan dari masyarakat tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan senantiasa selalu ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Nasional. Di samping itu dalam menentukan Kebijakan Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas maka tentu produk hukum terutama peraturan daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sekretariat DPRD menetapkan sasaran.

Tabel 3.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	NILAI	A	A	A	AA
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (OPINI BPK)	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	NILAI	84,25	84,50	84,75	85,00
		Meningkatnya kualitas terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	PERSEN	100	100	100	100
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	PERSEN	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

"Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sehingga, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang disusun ini tidak terlepas dan mendasar pula pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan Rancangan awal RKPD, namun mengingat dinamika pembahasan anggaran yang ada dan menyesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat perbedaan pada keluaran dan jumlah dana.

Kebutuhan dana dihitung sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa tahun 2025, dan indikator kinerja masing-masing sub kegiatan. Prakiraan maju program dan kegiatan Tahun 2026 tentunya akan disesuaikan kembali ketika Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah ditetapkan diwaktu mendatang serta dinamika yang ada.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**43.753.840.420**				**45.808.046.784**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Lingkup Kab Kulon Progo**	**100%**	**27.113.168.310**	**PAD**		**100%**	**25.000.486.784**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**			**18.789.600**				**20.000.000**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	10.390.800			2 Dokumen	11.000.000,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	8.398.800			21 Laporan	9.000.000,00
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**			**2.529.870.015**				**2.101.486.784**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 Orang/bulan	2.464.646.215			28 Orang/bulan	2.033.986.784,00
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	56.054.000			12 Dokumen	57.500.000,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan	9.169.800			14 Laporan	10.000.000,00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**			**58.793.300,00**				**7.000.000,00**
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	4.007.300				
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orang	54.786.000			6 Orang	7.000.000,00
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**			**223.881.100**				**170.000.000**
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	124.031.100,00			12 Paket	80.000.000,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	99.850.000			12 Laporan	90.000.000,00
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan aset**			**2.372.774.800**				**650.000.000**
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 Unit	1.800.000.000				
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		512 Unit	572.774.800			512 Unit	650.000.000,00
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**			**569.226.356**				**515.000.000**
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	201.168.500			12 Laporan	185.000.000,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	368.057.856			12 Laporan	330.000.000,00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**			**1.731.530.300**				**1.875.000.000**
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 Unit	795.821.200			25 Unit	875.000.000,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	824.836.200			2 Unit	825.000.000,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		91 Unit	110.872.900			91 Unit	175.000.000,00
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**18.907.579.932**				**19.312.000.000**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		40 Orang/bulan	18.551.424.632			40 Orang/bulan	18.900.000.000,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		120 Paket	319.155.300			120 Paket	375.000.000,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		40 Orang	37.000.000			40 Orang	37.000.000,00
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**			**700.722.907**				**350.000.000**
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		14 Laporan	700.722.907			14 Laporan	350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02	**ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Lingkup Kab Kulon Progo**	**100%**	**16.640.672.110**	**PAD**		**100%**	**20.807.560.000**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**3.146.110.300**				**4.982.000.000**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2 Dokumen	232.820.700			2 Dokumen	350.000.000,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		6 Dokumen	2.014.829.400			6 Dokumen	3.276.000.000,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1 Dokumen	418.730.100			1 Dokumen	810.000.000,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		2 Dokumen	479.730.100			2 Dokumen	546.000.000,00
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**			**3.323.065.800**				**2.236.000.000**
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		6 Dokumen	3.323.065.800			6 Dokumen	2.236.000.000,00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**2.183.647.800**				**3.690.000.000**
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 Dokumen	315.885.900			1 Dokumen	275.000.000,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		4 Dokumen	1.311.692.300			4 Dokumen	3.140.000.000,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Dokumen	556.069.600			1 Dokumen	275.000.000,00
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**			**1.704.087.100**				**3.044.000.000**
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		2 Dokumen	974.130.100			2 Dokumen	2.184.000.000,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		172 Dokumen	729.957.000			172 Dokumen	860.000.000,00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**579.456.000**				**988.000.000**
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		3 Dokumen	579.456.000			3 Dokumen	988.000.000,00
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**			**132.767.500**				**89.000.000**
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		4 Laporan	132.767.500			4 Laporan	89.000.000,00
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**			**1.034.047.600**				**680.000.000**
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		4 Dokumen	1.034.047.600			4 Dokumen	680.000.000,00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**			**4.537.490.010**				**5.098.560.000**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		30 Dokumen	1.598.327.754			30 Dokumen	2.340.000.000,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		58 Laporan	1.731.841.256			58 Laporan	1.200.000.000,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		13 Dokumen	260.222.700			13 Dokumen	395.000.000,00
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		3 Dokumen	947.098.300			3 Dokumen	1.163.560.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025 yang akan datang merencanakan melaksanakan 2 program, 17 kegiatan, 39 sub kegiatan. Hal itu dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel yang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 secara umum dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa rapat-rapat dan pengawasan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk mendukung wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi berkaitan dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan konsultasi, koordinasi, study banding, study referensi dan kerjasama antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Pusat/Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan diluar wilayah Kulon Progo antara lain di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan luar Jawa.

Optimalisasi fungsi pengawasan dilakukan evaluasi/sosialisasi Peraturan Daerah dengan meningkatkan akses masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan-peraturan daerah dan mendekatkan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan lembaga DPRD yang aspiratif dan akuntabel dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan sistem informasi ASPIRASIKU untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat sehingga pada saatnya diproses pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo yang cermat dan tepat waktu.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**25.741.337.847,00**						**-**	**25.000.486.784,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*	-			25 Dokumen	16.108.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.508.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.600.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		9.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	2.061.023.088,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	2.101.486.784,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.001.525.288,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		2.033.986.784,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.163.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		57.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.331.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			1 Dokumen	21.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	21.876.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			24 Dokumen	181.937.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	82.123.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		80.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.814.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		90.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Asel*	-			413 Unit	2.149.824.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1.793.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				410 Unit	356.674.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	1.483.767.248,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	515.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.829.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		185.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.282.937.748,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		330.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			2 Laporan	735.705.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	1.875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	458.679.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	161.712.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		825.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	115.312.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		175.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			14 Dokumen	18.832.315.011,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	19.312.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	18.649.375.611,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		18.900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				40 Paket	102.723.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		375.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	80.216.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		37.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD*	-			9 Dokumen	258.781.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD, Sekretariat DPRD	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				9 Laporan	258.781.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD, Sekretariat DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	-			**100 %**	**9.446.110.256,00**						-	**20.807.560.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			8 dokumen	2.011.149.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	4.982.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	276.058.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	1.316.153.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.276.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	346.927.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		810.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	72.010.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		516.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas*	-			3 Dokumen	1.659.789.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	1.659.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			6 Dokumen	2.260.363.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	3.690.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	336.320.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	1.358.421.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.140.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	566.621.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD*	-			47 Dokumen	482.247.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	3.044.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	360.878.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.184.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				46 Dokumen	121.369.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		860.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			2 Dokumen	246.392.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	988.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	246.392.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		988.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	-			4 Laporan	163.657.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	89.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	163.657.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		89.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah*	-			4 Dokumen	1.171.837.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	1.171.837.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		680.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD*	-			80 Dokumen	1.450.672.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	5.098.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				8 Dokumen	193.190.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.340.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				58 Laporan	624.170.456,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				13 Dokumen	299.865.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		395.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	333.446.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		1.163.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	J U M L A H							**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 mendasar pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan RKPD Tahun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terhadap dukungan pelayanan dan fasilitasi DPRD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di Sekretariat DPRD yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan DPRD dan OPD yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal, serta disesuaikan dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 khususunya pada Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran PPAS Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Pada prinsipnya diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pelaksanaannya betul-betul mendasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan, tepat waktu, tepat sasaran.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Sekretariat DPRD secara intensif.

Pengasih, 2 Agustus 2024
Sekretaris DPRD

SARJI, S.I.P., M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700716 199101 1 001

Renja

Tahun 2025

BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Bappeda Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda DIY.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rankhir RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan tujuan RPD Kulon Progo Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik” yang sudah diselaraskan

dengan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional dan nasional".

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

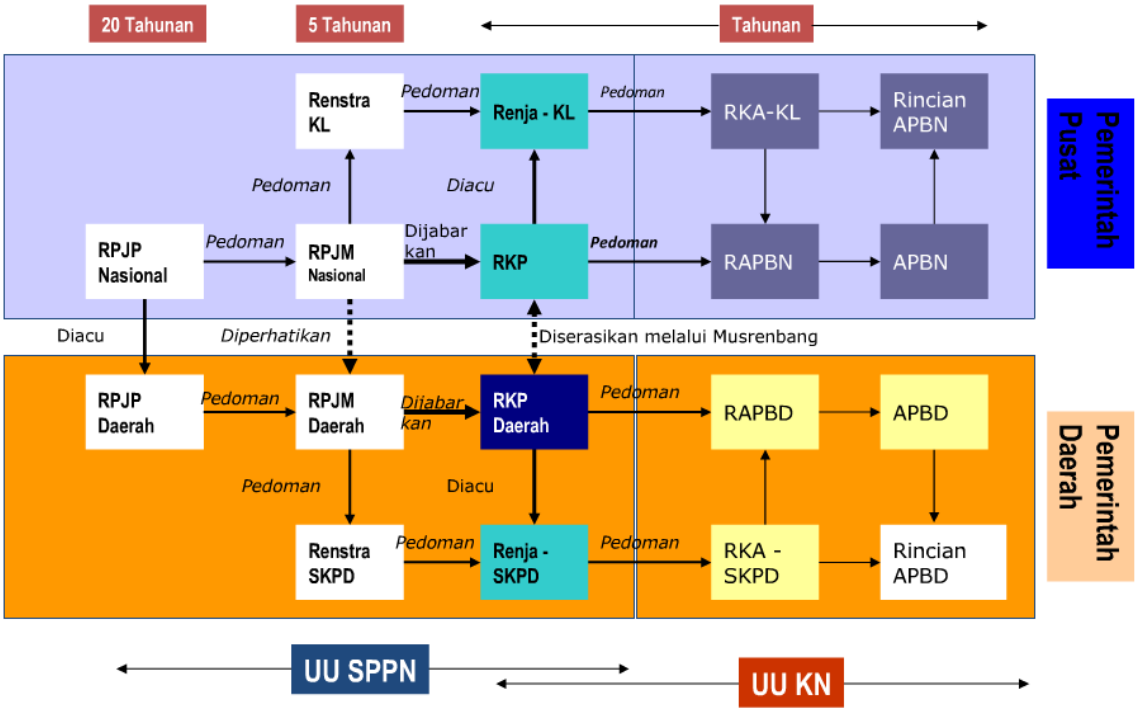

Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6516);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
k. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

q. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;

r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah untuk:

a. Menjabarkan rencana strategis Tahun 2023-2026 ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu terhadap RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

4.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda dipimpin kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN
	SEKRETARIAT DAERAH
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan**
1	**Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan**
1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
	FUNGSI PENUNJANG
	PERENCANAAN
II	**Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota**
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.2	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran
3.3	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4.1	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5	**Administrasi Umum dan Perangkat Daerah**
5.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**
7.1	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
7.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.2	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
8.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
III	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
9	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
9.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
9.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
10	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
10.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
11	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**
11.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
11.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
IV	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
12	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
12.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
12.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
12.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
13	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
13.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
13.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
14	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
14.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
14.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
V	**Program Penelitian dan Pengembangan**
15	**Pengembangan Inovasi dan teknologi**
15.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
15.2	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Pengukuran kinerja program Bappeda Kulon Progo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	
						Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	%	100	100	100	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100

3		Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	99,72	99,76	99,73	99,91
4	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	%	100	100	100	100
5		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100	100	100	100
6		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100	100	100	100
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	satinov	102	187	124	190
8		Capaian penelitian dan pengembangan	dok	5	6	6	6
9	Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	%	100	100	100	100
10		Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	%	100	100	100	100

Dengan adanya kebijakan baru dari pusat serta tambahan pagu anggaran program dan kegiatan Bappeda, maka terdapat indikator program yang memiliki perubahan keluaran seperti pada indikator Capaian perencanaan pembangunan daerah, Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu, dan Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu. Pada indikator Capaian perencanaan pembangunan daerah, terdapat tambahan keluaran berupa Rancangan Awal RPJPD 2026-2045 sehubungan dengan akan disusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2026-2045 pada tahun 2024. Pada indikator Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu memiliki tambahan keluaran berupa dokumen RAT dan LP2KD yang mendasar pada Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 ttg percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada indikator Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu, terdapat tambahan keluaran berupa: 1) laporan hasil verifikasi program hibah air minum perkotaan dan perdesaan di mana Bappeda berperan selaku PIU sebagai instansi di Pemerintah Daerah yang melaksanaan verifikasi pemasangan sambungan rumah pada Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan, dan 2) laporan pengelolaan geoheritage di Kabupaten Kulon Progo.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator program yang capaiannya masih <75% yaitu indikator Capaian perencanaan pembangunan daerah (40%) dan Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu (71,43%). Salah satu faktor penyebab capaian ini ialah adanya tambahan keluaran dari penambahan pagu anggaran serta adanya kebijakan baru dari pusat. Meskipun begitu, hal ini dapat segera diatasi melalui koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat. Pada Triwulan IV tahun 2023, seluruh target program dan kegiatan Bappeda dapat tercapai 100% dengan 2 (dua) indikator program yang memiliki capaian >100%.

Meskipun kebijakan baru dari pusat menambah jumlah anggaran serta keluaran program, hal ini tidak mengubah target program pada Perubahan Renstra 2023-2026 dikarenakan hasil perhitungan formulasi dengan jumlah keluaran baru tetap menghasilkan persentase target yang sama. Sementara itu, permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda selama tahun 2023 beserta solusi (kebijakan) yang diambil dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3. Permasalahan dan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bappeda Tahun 2023

No	Permasalahan	Kebijakan
1	Komunikasi yang kurang optimal sehingga mempengaruhi percepatan proses dari penyelesaian pelaksanaan kegiatan hingga administrasi keuangan pada kegiatan yang bersangkutan	Meningkatkan koordinasi melalui rapat koordinasi internal
2	Terdapat penambahan pagu anggaran serta kebijakan baru dari pusat yang menambah keluaran kegiatan sehingga realisasi kegiatan mundur dari rencana	Melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan untuk percepatan proses pelaksanaan kegiatan dan penyusunan dokumen
3	Terdapat indikator kegiatan dan target serta satuan keluaran kegiatan yang masih belum sinkron di antara MonevKu dan SIPD sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 17 Tahun 2021	Berkoordinasi dengan PPTK yang bersangkutan serta Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian yang mengelola SIM MonevKu

Alokasi anggaran Belanja Daerah Bappeda Kabupaten Kulon Progo pada APBD Anggaran Perubahan 2023 sebesar Rp. 6.904.843.548,- dengan rincian anggaran belanja operasi sebesar Rp. 6.771.536.548,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 133.307.000,-. Realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.629.083.946,- atau 96,01% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo sampai dengan akhir tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel III. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
Bappeda Kulon Progo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
					UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN				-						
					SEKRETARIAT DAERAH										
4	1	4			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan	Persentase Perencanaan Keistimewaan	persen	100	-	100	100	100,00	100	200,00	100,00
						Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	persen	100	-	100	100	100,00	100	200	100,00
4	1	4	5.06		**Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**dokumen**	**32**	**-**	**8**	**8**	**100,00**	**8**	16	50,00
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	16	-	4	4	100,00	4	8	50,00
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	laporan	16	-	4	4	100,00	4	8	50,00
					FUNGSI PENUNJANG										
					PERENCANAAN										
5	1	1			Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	-	100	100	100,00	100	200	100,00
5	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu**	**dokumen**	**94**	**-**	**23**	**23**	**100,00**	**23**	46	48,94
5	1	1	2.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	-	2	2	100,00	2	4	40,00
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	84	-	21	21	100,00	21	42	50,00
5	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**laporan**	**56**	**-**	**14**	**14**	**100,00**	**14**	28	50,00
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	188	-	47	47	100,00	47	94	50,00
5	1	1	2.02	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	56	-	14	14	100,00	14	28	50,00
5	1	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**dokumen**	**8**	**-**	**2**	**2**	**100,00**	**2**	4	50,00
5	1	1	2.05	5	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	dokumen	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	140	-	35	35	100,00	35	70	50,00
5	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**dokumen**	**8**	**-**	**2**	**2**	**100,00**	**2**	4	50,00
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	16	-	4	4	100,00	4	8	50,00
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**jumlah penambahan aset**	**unit**	**27**	**-**	**14**	**14**	**100,00**	**9**	23	85,19
5	**1**	**1**	**2.07**	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan	unit	27	-	14	14	100,00	9	23	85,19
5	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa**	**laporan**	**96**	**-**	**24**	**24**	**100,00**	**24**	48	50,00
5	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00
5	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00
5	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**laporan**	**12**	**-**	**3**	**3**	**100,00**	**3**	6	50,00
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	108	-	27	27	100,00	27	54	50,00
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	200	-	81	81	100,00	50	131	65,50
5	1	2			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**persen**	**100**	-	**100**	**100**	**100,00**	**100**	200	100,00
						persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	**persen**	**99,75**	-	**99,73**	**99,91**	**100,18**	**99,73**	199,64	99,98
5	1	2	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**dokumen**	**14**	**-**	**6**	**3**	**50,00**	**7**	10	71,43

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	12	-	3	3	100,00	4	7	58,33
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	14	-	3	3	100,00	4	7	50,00
5	1	2	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**dokumen**	**17**	**-**	**3**	**3**	**100,00**	**5**	8	47,06
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	17	-	3	3	100,00	5	8	47,06
5	1	2	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah**	**dokumen**	**89**	**-**	**23**	**23**	**100,00**	**22**	45	50,56
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	41	-	11	11	100,00	10	21	51,22
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00
5	1	3			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**persen**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	200	100,00
						Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	**persen**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	200	100,00
						Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	**persen**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	200	100,00
5	1	3	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**dokumen**	**88**	**-**	**20**	**20**	**100,00**	**20**	40	45,45
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	6	6	100,00	6	12	46,15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	32	-	8	8	100,00	8	16	50,00
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	6	6	100,00	6	12	46,15
5	1	3	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**dokumen**	**52**	**-**	**12**	**12**	**100,00**	**12**	24	46,15
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	6	6	100,00	6	12	46,15
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	6	6	100,00	6	12	46,15
5	1	3	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**dokumen**	**52**	**-**	**14**	**14**	**100,00**	**12**	26	50,00
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	7	7	100,00	6	13	50,00
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	26	-	7	7	100,00	6	13	50,00
5	5	2			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Capaian Inovasi Daerah**	**satinov**	**138**	**-**	**124**	**195**	**157,26**	**129**	324	234,78
						Capaian penelitian dan pengembangan	**dokumen**	**7**	**-**	**6**	**6**	**100,00**	**7**	13	185,71
5	5	2	2.04		**Pengembangan Inovasi dan teknologi**	**Jumlah inovasi daerah yang masih eksis**	**satinov**	**138**	**-**	**124**	**195**	**157,26**	**129**	324	234,78
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	19	-	4	4	100,00	5	9	47,37

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	laporan	72	-	18	18	100,00	18	36	50,00

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:

a. Proses verifikasi pada administrasi keuangan yang berpengaruh pada capaian indikator program
b. Adanya beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya, terutama kegiatan perencanaan dan kegiatan pengendalian, saling berhubungan satu sama lain sehingga capaian fisik dan keuangan kegiatan tersebut terserap menyesuaikan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
c. Terdapat indikator kegiatan dan target serta satuan keluaran kegiatan yang masih belum sinkron di antara MonevKu dan SIPD sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 17 Tahun 2021
d. Adanya kebijakan dari pusat dan penambahan anggaran yang menambah keluaran kegiatan sehingga keluaran kegiatan tidak sesuai dengan target awal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, Bappeda memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja sesuai Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 dengan target dan realisasi sebagai berikut ini:

Tabel 2.2.1.

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentasi Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	%	66,67	85,71	128,56
3	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	%	92,86	100	107,69

4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	satinov	71	70	98,59

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja perangkat daerah yang tercapai sesuai target yakni *Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah*, *Persentasi Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target*, dan *Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)*. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya perbaikan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Sementara itu, terdapat satu indikator kinerja perangkat daerah yang belum dapat tercapai sesuai target yakni *Satuan inovasi daerah yang matang*. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan mekanisme penilaian pada nilai kematangan satuan inovasi dengan dikeluarkannya surat dari Kemendagri RI Tanggal 6 Juli 2022 Nomor 002.6/3857/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022. Meskipun begitu, perhitungan capaian indikator Satuan inovasi daerah yang matang disesuaikan dengan kategori dan nilai rentang pada skala IID yang baru yakni satuan inovasi daerah yang matang merupakan satuan inovasi yang nilai indeksnya berada pada nilai rentang 35,00 – 60,00 (inovatif) dan 60,01 – 100,00 (sangat inovatif).

Dengan dikeluarkannya surat dari Kemendagri RI Tanggal 6 Juli 2022 Nomor 002.6/3857/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022, maka cara perhitungan IKU Satuan inovasi daerah yang matang tidak bisa menggunakan seperti yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yaitu Satuan inovasi derah yang nilai kematangannya lebih dari 100. Hal ini dikarenakan, skala IID yang baru ialah 0 s.d. 100. Sebagai penyesuaian, kami menghitung capaian satuan inovasi daerah yang matang menggunakan skor dan kategori indeks inovasi daerah yang baru sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2.
Skor dan kategori indeks inovasi daerah

Kategori	Rentang Skor
Sangat inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang inovatif	0,01 – 34,99
Tidak dapat dinilai	0

Dengan mengacu pada kategori IID seperti pada tabel di atas, maka satuan inovasi daerah yang matang memiliki rentang nilai 35,00 – 60,00 (inovatif) dan 60,01 – 100,00 (sangat inovatif). Dengan kategori ini, maka satuan inovasi daerah yang matang pada tahun 2023 menggunakan mekanisme penilaian yang baru terdapat sebanyak 70 satuan inovasi daerah.

Sementara itu, pada tahun 2023 Bappeda telah melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Target indikator program di tahun 2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

- *Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah dengan target 100%.
- *Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi capaian dari pelaksanaan perencanaan berupa dokumen perencanaan yang dikeluarkan seperti RKPD, Perubahan RKPD, DAK Fisik, DAIS serta dokumen perencanaan lainnya (RPJPD dan RPJMD) dengan target 100%.
- *Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*

Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi realisasi fisik sub kegiatan terhadap ROPD yang disusun dengan target sebesar 99,73%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 100%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan target 100%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebiajakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan target 100%.

- *Capaian Inovasi Daerah*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian dari jumlah inovasi daerah yang masih eksis/berjalan pada tahun 2023 dan ditetapkan oleh SK Bupati dengan target 124 satinov.

- *Capaian Penelitian dan Pengembangan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian terhadap jumlah kajian/penelitian yang didiseminasi pada tahun 2023 yang dapat berupa penelitian/kajian kelitbangan/TTG/fasilitasi penerapan hasil litbang terpilih yang diterpakan/diseminasi kajian/penelitian/PPM/inovasi/TTG yang dapat diterapkan dengan target 6 dokumen.

- *Persentase Perencanaan Keistimewaan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap perencanaan keistimewaan berupa dokumen perencanaan keistimewaan seperti BA I, BA II, Redesign 1, Redesign 2, Usulan n+2 dengan target 100%.

- *Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap pengendalian keistimewaan berupa dokumen pengendalian urusan keistimewaan seperti dokumen verifikasi tahap 3 n-1, tahap 1 tahun n, tahap 2 tahun n, dan tahap akhir tahun n dengan target 100%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel VII berikut ini.

Tabel 2.2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(13)*		***(14)***
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah										
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentasi indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target			66,67	68,25	69,84	71,43	85,71	68,25	69,84	
3	Persentase kinerja OPD dengan predikat sangat tinggi (91%-100%)			92,86	95,24	97,62	100	97,62	95,24	97,62	
4	Satuan inovasi daerah yang matang			71	74	77	80	53	74	77	
	Indikator Kinerja Program										
1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100	100	
2	Capaian perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			99,73	99,73	99,74	99,75	99,91	99,73	99,74	
4	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
7	Capaian inovasi daerah			124	129	134	138	195	129	134	
8	Capaian penelitian dan pengembangan			6	7	7	7	6	7	7	
9	Persentase perencanaan keistimewaan			100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pengendalian keistimewaan			100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Adanya kebijakan baru dari pusat yang berdampak pada adanya perubahan keluaran program yang tidak sesuai dengan target awal;
- Proses penatausahaan keuangan yang berpengaruh terhadap capaian keuangan per triwulan;
- Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Adanya beberapa capaian indikator kinerja perangkat daerah yang dipengaruhi oleh realisasi sasaran OPD berakibat pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah Bappeda. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- SDM yang terus dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensinya di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- ☆ Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
- ☆ Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
- ☆ Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Reviu terhadap RKPD 2025
Kabupaten Kulon Progo

No.	RKPD 2025						Hasil Analisa Kebutuhan					
	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**367,89**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**367,89**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			Persentase situs warisan geologi yang terkelola	**100%**	**367,89**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			Persentase situs warisan geologi yang terkelola	**100%**	**367,89**
		Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya			5 objek	**367,89**		Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya			5 objek	**367,89**
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah obyek warisan budaya nasional dan dunia yang	5 objek	**367,89**			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah obyek warisan budaya nasional dan dunia yang	5 objek	**367,89**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	SEKRETARIAT DAERAH					**252,54**	**SEKRETARIAT DAERAH**					**252,54**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**)**			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	**100%**	**252,54**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	**100%**	**252,54**
				Persentase Perencanaan Keistimewaan	**100%**					Persentase Perencanaan Keistimewaan	**100%**	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*)		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	8 dokumen	**252,54**		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*)		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	8 dokumen	**252,54**
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*)	Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY	4 dokumen	**161**			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*)	Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY	4 dokumen	**161**
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 laporan	**91,54**			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 laporan	**91,54**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	PERENCANAAN						**PERENCANAAN**					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**6.573,46**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**6.573,46**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**4.692,43**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**4.692,43**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	25 dokumen	**61,14**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	25 dokumen	**61,14**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50,64			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50,64
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	10,50			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	10,50
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	14 dokumen	3.853,60		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	14 dokumen	3.853,60
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	3.766,19			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	3.766,19
			penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	45,47			penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	45,47
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	41,95			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	41,95

No.	RKPD 2025						Hasil Analisa Kebutuhan					
	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian	2 dokumen	29,21		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian	2 dokumen	29,21
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2,00			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	57 orang	27,21			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	57 orang	27,21
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum	2 dokumen	201,43		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum	2 dokumen	201,43
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	26,31			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	26,31
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	175,12			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	175,12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penambahan Aset	3 unit	19,80		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penambahan Aset	3 unit	19,80
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan	3 unit	19,80			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan	3 unit	19,80
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	24 Laporan	297,94		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	24 Laporan	297,94
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	95,04			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	95,04
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	202,89			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	202,89
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	3 laporan	229,32		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	3 laporan	229,32
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	186,85			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	186,85
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 unit	35,46			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 unit	35,46
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	PERENCANAAN						**PERENCANAAN**					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100 persen**	**1.172,30**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100 persen**	**1.172,30**
				persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	**99,74 persen**					**persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**	**99,74 persen**	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 dokumen	**881,46**		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 dokumen	**881,46**
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	49,06			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	49,06
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 dokumen	832,40			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 dokumen	832,40

No.	RKPD 2025						Hasil Analisa Kebutuhan					
	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	49,94		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	49,94
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 dokumen	49,94			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 dokumen	49,94
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah	22 dokumen	240,91		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah	22 dokumen	240,91
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 laporan	177,50			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 laporan	177,50
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 laporan	63,41			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 laporan	63,41
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**100 persen**	**787,41**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**100 persen**	**708,73**
				Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	**100 persen**					**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu**	**100 persen**	
				Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	**100 persen**					**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu**	**100 persen**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25 dokumen	327,95		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25 dokumen	327,95
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	70,91			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	70,91
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9 laporan	165,35			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9 laporan	165,35
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	91,69			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	91,69
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	17 dokumen	237,48		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	17 dokumen	237,48
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	51,60			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	51,60
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	9 dokumen	185,88			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	9 dokumen	185,88

No.	RKPD 2025						Hasil Analisa Kebutuhan					
	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)	URUSAN/OPD/PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	Target	Pagu Indikatif (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 dokumen	221,99		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 dokumen	221,99
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	116,99			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	116,99
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	105,00			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	105,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**Capaian Inovasi Daerah**	**134 satinov**	**267,76**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**Capaian Inovasi Daerah**	**134 satinov**	**267,76**
				Capaian penelitian dan pengembangan	**7 dokumen**					**Capaian penelitian dan pengembangan**	**7 dokumen**	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Inovasi Daerah yang masih eksis	134 satinov	267,76		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Inovasi Daerah yang masih eksis	134 satinov	267,76
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	207,88			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	207,88
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	18 laporan	59,88			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	18 laporan	59,88

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, sasaran jangka panjang tahun 2025-2045 ialah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama yaitu: 1) mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, 2) kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, 3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, 4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan 5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dengan tema pembangunan "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" adalah meliputi:

a. Mewujudkan transformasi sosial
b. Mewujudkan transformasi ekonomi
c. Mewujudkan transformasi tata kelola
d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Pembangunan kewilayahan
g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 seperti yang dituangkan pada RPD 2023-2026 ialah:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD 2023-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 4: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik." Tujuan ini jika diselaraskan dengan misi RPJPD Kulon Progo 2005-2025 maka sesuai dengan misi ke-8: Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional dan nasional.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda sekaligus mendasar pada Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	A
		-	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
		-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
1		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100%
2		Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentase Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	69,84%
3		Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	97,62%
4		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	77 satuan inovasi

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan di Bappeda Kulon Progo didasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 mencakup 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dengan total pagu sebesar 7.540.330.365, yaitu:

No	Uraian	Rancangan Anggaran pada Tahun 2025
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 4.692.430.165**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 61.137.700**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 50.638.300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.499.400
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 3.853.604.995**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.766.187.695
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 45.467.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 41.949.600
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 29.206.000**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 2.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 27.206.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 201.429.500**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 26.305.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 175.124.500
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 19.798.900**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 19.798.900
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 297.938.020**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 95.043.240
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 202.894.780
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 229.315.050**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 186.853.050
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 7.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 35.462.000
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp 1.172.302.600**
8	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Rp 881.462.400**
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 49.060.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 832.402.400
9	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 49.935.000**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 49.935.000
10	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp 240.905.200**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 177.498.600
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 63.406.600
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp 787.411.200**
11	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rp 327.945.800**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 70.911.200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 165.345.200

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 91.689.400
12	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Rp 237.477.200**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 51.599.600
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 185.877.600
13	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Rp 221.988.200**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 116.990.600
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 104.997.600
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp 267.760.500**
14	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Rp 267.760.500**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 207.878.600
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp 59.881.900
V	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Rp 367.885.900**
15	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Rp 367.885.900**
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Rp 367.885.900
VI	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Rp 252.540.000**
16	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Rp 252.540.000**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 161.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Rp 91.540.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Bappeda yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 4 (empat): "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik", Bappeda merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD 2023-2026 serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Dari rumusan program dan kegiatan, Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 mencakup 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.540.330.365,00**							**6.589.089.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**367.885.900,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**367.885.900,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase situs warisan geologi yang terkelola***	**-**			**100 persen**	**367.885.900,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	-			5 obyek	367.885.900,00			-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				5 Objek	367.885.900,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**252.540.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**252.540.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Pengendalian Keistimewaan***	**-**			**100 persen**	**252.540.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*	-			8 dokumen	252.540.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	161.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				4 Laporan	91.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.919.904.465,00**							**6.589.089.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.652.143.965,00**							**6.266.639.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 persen**	**4.692.430.165,00**						**-**	**4.367.790.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	61.137.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	58.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.638.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		45.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.499.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		12.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 dokumen	3.853.604.995,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	3.659.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	3.766.187.695,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		3.547.970.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	45.467.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		67.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	41.949.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		44.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			2 dokumen	29.206.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	35.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		2.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				57 Orang	27.206.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		32.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 dokumen	201.429.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	110.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	26.305.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		32.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.124.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		77.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Daerah Jumlah penambahan aset*	-			6 Unit	19.798.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19.798.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	297.938.020,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	233.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.043.240,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		65.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	202.894.780,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		167.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	229.315.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	225.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	186.853.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		155.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		10.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				76 Unit	35.462.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		59.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Capaian perencanaan pembangunan daerah persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah***	**-**			**100 persen 99,74 persen**	**1.172.302.600,00**						**-**	**1.157.679.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			8 dokumen	881.462.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	682.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	49.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		46.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	832.402.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		635.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			6 dokumen	49.935.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Dokumen	49.935.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah*	-			22 dokumen	240.905.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	326.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	177.498.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		251.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	63.406.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		75.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu***	**-**			**100 persen**	**787.411.200,00**						**-**	**741.170.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			25 dokumen	327.945.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	386.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	70.911.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		120.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				9 Laporan	165.345.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		157.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	91.689.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		107.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA*	-			17 dokumen	237.477.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	163.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	51.599.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		84.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	185.877.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		79.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			16 dokumen	221.988.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	191.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	116.990.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		98.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	104.997.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		93.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**267.760.500,00**							**322.450.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Capaian Inovasi Daerah Capaian penelitian dan pengembangan***	**-**			**134 satinov 7 dokumen**	**267.760.500,00**						**-**	**322.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi daerah yang masih eksis*	-			satinov 134	267.760.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	322.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	207.878.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		251.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	59.881.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		70.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H							**7.540.330.365,00**							**6.589.089.000,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Rencana Strategis tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026.

Pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023 menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2025 dengan beberapa catatan penting seperti berikut ini:

a. Adanya kebijakan-kebijakan baru dari pusat di tahun berjalan menyebabkan adanya penambahan pagu dan keluaran kegiatan.
b. Adanya beberapa program yang memiliki capaian tahunan menyebabkan capaian pada triwulan-triwulan awal menjadi rendah dikarenakan keluaran berupa dokumen tahunan.
c. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.

Rencana tindak lanjut terhadap catatan penting pelaksanaan Renja yakni berupa poin-poin seperti berikut ini:

a. Diperlukan koordinasi yang sinergis dan terus menerus untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai pada akhir tahun anggaran.
b. Dapat dipertimbangkan adanya mekanisme perhitungan capaian triwulan bagi keluaran yang bersifat tahunan
c. Diperlukan sebuah sistem yang dapat mengakomodir hasil penelitian dan kelitbangan yang dapat mendukung kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam penetapan program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Akhir Renja yang

telah disusun sebelumnya. Pada tahapan ini, dokumen Renja 2025 didasarkan pada dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Penyusunan Renja 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
NIP. 196904161993031006

BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi komitmen segenap pegawai untuk melaksanakan program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna mencapai visi misi daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Umpan balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta untuk peningkatan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai kinerja yang ditetapkan di tahun 2025 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala BKAD

Kabupaten Kulon Progo

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM

NIP. 197004061999031003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN…..1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 ……. 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 51

2.4 Review terhadap RKPD..... 53

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..69

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 71

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 71

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 72

3.3 Program dan Kegiatan 74

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....78

BAB V PENUTUP..... 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka proses penyusunan Renja PD ada beberapa tahapan diantaranya adalah penyusunan Renja PD, berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan Rencana Strategis

(Renstra) yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 4 (empat) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Pencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu RKPD.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah adalah melakukan penataan, pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kewenangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun sisi alokasi belanja. Penataan dan pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat menjadikan pendapatan daerah yang optimal, tertata dengan baik, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan, demikian pula penataan pada sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 5 tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang selanjutnya dijabarkan kembali

dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun dengan proses berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Telaah terhadap rangcangan akhir RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan rangcangan akhir Renja Perangkat Daerah
11. Penyesuaian dokumen Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005-2025);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
19. Perbup Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD.

Tujuan penyusunan Renja BKAD adalah:

1. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis PD ke dalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, BKAD Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan:

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan gaji dan Tunjangan
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- Koordinasi pelaksanaan piutang dan Utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sub Kegiatan:

- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, tiwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah:

Sub Kegiatan:

- Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik daerah

Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Standarisasi Harga
- Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik daerah

- Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- Perencanaan pengelolaan Pajak daerah
- Analisis dan Pengembangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak darah
- Pendataan dan Pendaftaran obyek Pajak daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
- Penagihan Pajak daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKAD sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Pengukuran Kinerja Program utama BKAD Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Cakupan peningkatan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
	aset daerah				
		Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan	%	94,97	97,72
		Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	%	100	100
		Cakupan Peningkatan penerimaan pajak daerah	%	73,01	84,28
		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	104,20
		Cakupan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100

Capaian Kinerja Program Badan Keuangan dan aset Daerah :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel I.13

Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Pendapatan Daerah		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih (Kurang)	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pendapatan Asli Daerah	308.446.763.197,00	324.053.666.353,01	15.606.903.156,01	308.159.760.929,32
2.	Pendapatan Transfer	1.383.149.165.280,00	1.363.920.277.775,00	(19.228.887.505,00)	1.215.582.521.346,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	6.494.000.000,00
Jumlah		**1.699.595.928.477,00**	**1.695.973.944.128,01**	**(3.621.984.348,99)**	**1.530.236.282.275,32**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.695.973.944.128,01 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp1.699.595.928.477,00. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,83% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.14

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

S

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2022 Rp
a. Pajak Daerah	114.656.284.700,00	96.627.182.570,00	(18.029.102.130,00)	106.215.334.889,95
b. Retribusi Daerah	10.652.559.347,00	12.060.319.478,00	1.407.760.131,00	11.115.781.343,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.348.608.669,00	18.348.267.703,08	(340.965,92)	15.652.122.473,42
d. Lain-lain PAD yang Sah	164.789.310.481,00	197.017.896.601,93	32.228.586.120,93	175.176.522.222,95
Jumlah PAD	**308.446.763.197,00**	**324.053.666.353,01**	**15.606.903.156,01**	**308.159.760.929,32**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp324.053.666.353,01 atau 105,06% dari anggarannya sebesar Rp308.446.763.197,00. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,16% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

a.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo dikelola oleh BKAD dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.15

Pajak Daerah Tahun 2023

Pajak Daerah :		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Hotel	3.261.494.000,00	3.967.617.181,00	706.123.181,00	1.125.234.832,00
2)	Restoran	13.473.440.700,00	14.352.743.465,00	879.302.765,00	8.466.745.400,00
3)	Hiburan	15.500.000,00	19.683.000,00	4.183.000,00	8.574.000,00
4)	Reklame	560.000.000,00	604.942.984,00	44.942.984,00	507.094.072,25
5)	Penerangan Jalan	17.350.000.000,00	17.266.777.211,00	(83.222.789,00)	15.513.352.835,00
6)	Pajak Parkir	3.870.000.000,00	3.930.126.180,00	60.126.180,00	2.587.744.898,00
7)	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	168.911.528,00	18.911.528,00	140.363.256,20
8)	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3.300.000.000,00	2.547.106.580,00	(752.893.420,00)	3.229.233.070,00
9)	PBB P-2	48.175.850.000,00	28.738.573.445,00	(19.437.276.555,00)	50.433.256.133,00
10)	BPHTB	24.500.000.000,00	25.030.700.996,00	530.700.996,00	24.203.736.393,50
Jumlah		**114.656.284.700,00**	**96.627.182.570,00**	**(18.029.102.130,00)**	**106.215.334.889,95**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.627.182.570,00 atau 84,28% dari anggaran sebesar Rp114.656.284.700,00. Atas penerimaan obyek pajak daerah yang kurang dari target yang telah ditetapkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Pajak Penerangan Jalan mendasar pada realisasi tagihan listrik oleh PT PLN. PT PLN selaku Wajib Pajak PJU memungut Pajak PJU sebesar 8% dari realisasi penerimaan pembayaran atas tagihan dan pembelian tenaga listrik, dimana pada tahun 2023 realisasi tidak sesuai target yang ditentukan.
- Pajak MBLB kurang dari target disebabkan karena terdapat penurunan produksi tambang MBLB yang disebabkan oleh moratorium izin pertambangan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan pada Daerah Aliran Sungai Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih rendahnya kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Pajak MBLB.

- Berdasarkan hasil putusan pengadilan nomor PUT-008873.26/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 atas banding PT Angkasa Pura I terhadap PBB P2 Bandara YIA masa pajak tahun 2021 telah menimbulkan lebih bayar sebesar Rp20.223.126.004. Atas permohonan kompensasi yang dilakukan PT Angkasa Pura I, lebih bayar pajak PBB P2 masa pajak tahun 2021 dikompensasikan pada pajak PBB P2 masa pajak tahun 2023. Sehingga dari kewajiban PT Angkasa Pura I Bandara YIA sebesar Rp23.792.782.906, PT Angkasa Pura I tinggal membayar kekurangan sebesar Rp3.569.656.902.

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 9,03% jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2022.

a.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil dengan realisasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.16

Retribusi Daerah Tahun 2023

	Retribusi Daerah:	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	240.668.000,00	274.704.401,00	34.036.401,00	309.284.400,00
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	994.708.500,00	1.093.130.178,00	98.421.678,00	970.659.970,00
3)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	391.943.000,00
4)	Retribusi Pelayanan Pasar	1.326.106.300,00	1.308.950.004,00	(17.156.296,00)	1.319.820.750,00
5)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	485.135.000,00	843.582.790,00	358.447.790,00	1.028.861.870,00
6)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	154.125.000,00	155.630.000,00	1.505.000,00	155.620.521,00

7)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	19.500.000,00	21.300.000,00	1.800.000,00	19.390.000,00
8)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	394.049.382,00	457.903.124,00	63.853.742,00	454.229.524,00
9)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	514.076.000,00	863.050.000,00	348.974.000,00	612.300.023,00
10)	Retribusi Tempat Pelelangan	33.750.000,00	33.752.000,00	2.000,00	30.550.000,00
11)	Retribusi Terminal	55.864.000,00	58.589.200,00	2.725.200,00	57.981.300,00
12)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	218.261.170,00	175.578.000,00	(42.683.170,00)	177.836.400,00
13)	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.170.000,00	860.000,00	(310.000,00)	1.040.000,00
14)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.136.756.490,00	5.564.167.000,00	427.410.510,00	5.099.683.000,00
15)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.500.000,00	17.530.000,00	30.000,00	16.500.000,00
16)	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	666.389.505,00	800.026.781,00	133.637.276,00	468.196.585,00
17)	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.500.000,00	1.566.000,00	(2.934.000,00)	1.884.000,00
Jumlah		**10.652.559.347,00**	**12.060.319.478,00**	**1.407.760.131,00**	**11.115.781.343,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, (LRA Unaudited 2023)

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2023 sebesar Rp12.060.319.478,00 atau 113,22% dari anggaran sebesar Rp10.652.559.347,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,50% jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022.

Atas penerimaan retribusi daerah yang lebih dari target yang telah ditetapkan, penjelasan kami antara lain adalah sebagai berikut.

1) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih dari target, hal tersebut karena termasuk penerimaan denda melalui pembayaran pada satu rekening.
2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih dari target disebabkan karena pembayaran di muka atas peminjaman Gedung Kesenian untuk penyimpanan logistik Pemilu oleh KPU pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2024.
3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga lebih dari target disebabkan karena tingginya animo masyarakat menghadiri berbagai acara yang diselenggarakan di obyek wisata sehingga retribusi tempat rekreasi meningkat.

a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.17

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
1) Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**18.348.608.669,00**	**18.348.267.703,08**	**(340.965,92)**	**15.652.122.473,42**
Jumlah	**18.348.608.669,00**	**18.348.267.703,08**	**(340.965,92)**	**15.652.122.473,42**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023))

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.348.267.703,08 atau terealisasi 100,00% dari anggaran sebesar Rp18.348.608.669,00. Realisasi masing-masing jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel I.18

Realisasi masing-masing jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah :		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
a)	Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	2.200.759.322,00
b)	Perumda Aneka Usaha	8.569.254,00	8.569.254,00	0,00	198.588.612,00
c)	PT Selo Adi Karto (SAK)	151.811.387,00	151.811.387,15	0,15	268.170.001,03
d)	Perumda Air Minum Tirta Binangun	1.264.209.811,00	1.264.209.811,00	0,00	686.853.143,00
e)	BPD DIY	14.391.537.075,00	14.391.537.075,00	0,00	12.211.489.624,23
f)	BUKP	132.481.142,00	132.140.175,93	(340.966,07)	86.261.771,16
Jumlah :		**18.348.608.669,00**	**18.348.267.703,08**	**(340.965,92)**	**15.652.122.473,42**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

a.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel I.19

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023

Lain-lain PAD yang sah		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	590.000.000,00	1.062.237.926,00	472.237.926,00	705.836.529,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	325.208.565,00	466.430.335,00	141.221.770,00	410.623.955,00
3	Jasa Giro	1.174.575.000,00	1.176.098.028,00	1.523.028,00	1.474.574.527,00
4	Pendapatan Bunga	3.057.176.169,00	2.359.247.835,00	(697.928.334,00)	3.765.507.994,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	186.518.900,00	101.268.512,00	(85.250.388,00)	272.671.404,03
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	499.122.461,10	499.122.461,10	102.580.163,97
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	363.019.565,00	599.383.903,00	236.364.338,00	467.506.510,30
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	400.104.300,00	887.831.151,98	487.726.851,98	126.884.332,00
10	Pendapatan dari BLUD RSUD Wates	97.500.000.000,00	126.926.351.158,96	29.426.351.158,96	107.353.305.154,98
11	Pendapatan dari BLUD Puskesmas	31.451.207.982,00	31.470.847.839,88	19.639.857,88	26.722.203.170,79
12	Pendapatan dari BLUD RSUD Nyi Ageng Serang	29.741.500.000,00	31.469.077.451,01	1.727.577.451,01	33.774.828.481,88
	Jumlah :	**164.789.310.481,00**	**197.017.896.601,93**	**32.228.586.120,93**	**175.176.522.222,95**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp197.017.896.601,93 atau 119,56% dari anggaran sebesar Rp164.789.310.481,00.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,47% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022.

Atas realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan lebih dari target, hal tersebut karena adanya pembayaran piutang yang melebihi target yang ditetapkan dan peningkatan okupansi di rumah susun Triharjo.

Atas realisasi pendapatan bunga yang kurang dari target, hal tersebut terkait dengan manajemen kas sepanjang tahun 2023.

Atas realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp499.122.461,10 merupakan denda atas pelaksanaan pekerjaan pada bidang pekerjaan umum.

Atas realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp887.831.151,98 adalah merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp702.218.168,00 dan dari pengembalian temuan pemeriksaan sebesar Rp185.612.983,98.

Atas realisasi pendapatan denda pajak yang lebih dari target, hal tersebut karena hasil intensifikasi penagihan pajak dan karena pelunasan denda PBB-P2 terkait transaksi BPHTB (dampak dari implementasi e-BPHTB).

Atas realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Wates yang lebih dari target, hal tersebut karena jumlah kunjungan pasien meningkat dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, juga karena adanya pembayaran klaim Inhealth, klaim BPJS Ketenagakerjaan dan klaim Jasa Raharja serta pembayaran klaim Covid-19 tahun 2023.

Atas realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Nyi Ageng Serang yang lebih dari target, hal tersebut karena peningkatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain digunakan untuk menampung realisasi pendapatan dari pendapatan lainnya yang merupakan hak daerah, dengan realisasi sebesar Rp101.084.322,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan dengan realisasi untuk TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.20

Pendapatan Transfer Tahun 2023

Pendapatan Transfer:	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.160.144.623.728,00	1.148.566.329.071,00	(11.578.294.657,00)	1.045.394.295.432,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.004.541.552,00	215.353.948.704,00	(7.650.592.848,00)	170.188.225.914,00
Jumlah	**1.383.149.165.280,00**	**1.363.920.277.775,00**	**(19.228.887.505,00)**	**1.215.582.521.346,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

b.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel I.21

Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023

Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dana Perimbangan				
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.794.530.127,00	19.794.531.801,00	1.674,00	25.259.989.203,00
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	681.936.980.000,00	676.856.229.904,00	(5.080.750.096,00)	643.983.398.668,00

	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.992.887.000,00	83.812.884.604,00	(4.180.002.396,00)	62.356.388.547,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.466.193.601,00	209.148.649.762,00	(2.317.543.839,00)	182.934.432.014,00
2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	54.259.365.000,00	54.259.365.000,00	0,00	42.707.212.000,00
3	**Dana Desa**	104.694.668.000,00	104.694.668.000,00	0,00	88.152.875.000,00
Jumlah		**1.160.144.623.728,00**	**1.148.566.329.071,00**	**(11.578.294.657,00)**	**1.045.394.295.432,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.148.566.329.071,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp1.160.144.623.728,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,87% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mendasar pada kebijakan dari pusat terkait transfer ke daerah.

b.2 Transfer Antar Daerah

Tabel I.22

Transfer Antar Daerah Tahun 2023

Transfer Antar Daerah :	**Anggaran 2023**	**Realisasi 2023**	**Lebih/(Kurang)**	**Realisasi 2022**
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.526.169.783,00	109.863.998.262,00	(5.662.171.521,00)	104.771.836.581,00
2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	107.478.371.769,00	105.489.950.442,00	(1.988.421.327,00)	65.416.389.333,00
Jumlah	**223.004.541.552,00**	**215.353.948.704,00**	**(7.650.592.848,00)**	**170.188.225.914,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.353.948.704,00 atau 96,57% dari anggaran sebesar Rp223.004.541.552,00 berasal dari Pemda DIY.

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,54% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun ini lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan kebijakan dari Pemda DIY terkait bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp109.863.998.262,00 adalah sebagai berikut :

Tabel I.23

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.945.860.526,00	33.450.621.698,00	(495.238.828,00)
b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.664.139.198,00	13.991.730.969,00	(672.408.229,00)
c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.957.851.100,00	34.091.417.943,00	2.133.566.843,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	70.808.965,00	70.524.395,00	(284.570,00)
e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	34.887.509.994,00	28.259.703.257,00	(6.627.806.737,00)
Jumlah	**115.526.169.783,00**	**109.863.998.262,00**	**(5.662.171.521,00)**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp105.489.950.442,00 adalah sebagai berikut :

Tabel I.24

Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2023

Bantuan Keuangan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
a. Dana Keistimewaan	98.833.371.769,00	96.867.927.666,00	(1.965.444.103,00)
b. Padat Karya Infrastruktur	8.300.000.000,00	8.277.022.776,00	(22.977.224,00)
c. Jambanisasi	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00
Jumlah	**107.478.371.769,00**	**105.512.927.666,00**	**105.489.950.442,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

b.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.25

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
a. Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**0,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,19% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022.

Atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Hibah sebesar Rp8.000.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
1) Hibah Air Limbah Setempat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2) Hibah Air Minum Pedesaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3) Hibah Air Minum Perkotaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
Jumlah	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**0,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2023, terdapat sejumlah 42 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan pengguna anggaran. Komposisi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.26

Realisasi Belanja Tahun 2023

Belanja Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Operasi	1.365.770.193.154,00	1.290.489.016.328,73	(75.281.176.825,27)	1.215.304.344.269,25
Belanja Modal	251.726.654.910,00	219.397.654.552,00	(32.329.000.358,00)	146.013.665.289,02
Belanja Tidak Terduga	14.434.580.258,00	1.092.325.768,00	(13.342.254.490,00)	3.047.005.849,00
Belanja Transfer	187.065.542.581,00	183.786.789.969,00	(3.278.752.612,00)	166.837.491.825,00
Jumlah	**1.818.996.970.903,00**	**1.694.765.786.617,73**	**(124.231.184.285,27)**	**1.531.202.507.232,27**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Anggaran belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.818.996.970.903,00 dan realisasinya sebesar Rp1.694.765.786.617,73 atau besarnya capaian 93,17%. Hal ini menunjukkan kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2022, pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah terealisasi Rp1.531.202.507.232,27 dari target APBD yang sebesar Rp1.669.930.685.519,17 atau sebesar 91,69%.

Realisasi belanja di bawah anggaran sebesar Rp124.231.184.285,27 atau 6,83% antara lain disebabkan :

a. Adanya akun belanja yang direalisasikan sesuai kebutuhan;
b. Efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program.

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel I.27

Belanja Operasi Tahun 2023

Belanja Operasi:	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Pegawai	716.533.414.673,00	678.456.114.751,00	(38.077.299.922,00)	672.476.780.974,00
Belanja Barang dan Jasa	520.850.760.957,00	488.475.759.797,73	(32.375.001.159,27)	445.206.662.652,25
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1.962.404.000,00	1.556.758.500,00	(405.645.500,00)	548.800.000,00

Belanja Hibah	104.760.713.524,00	102.941.294.780,00	(1.819.418.744,00)	80.132.735.643,00
Belanja Bantuan Sosial	21.662.900.000,00	19.059.088.500,00	(2.603.811.500,00)	16.939.365.000,00
Jumlah	**1.365.770.193.154,00**	**1.290.489.016.328,73**	**(75.281.176.825,27)**	**1.215.304.344.269,25**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Rp1.290.489.016.328,73 atau 94,49% dari anggaran sebesar Rp1.365.770.193.154,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp678.456.114.751,00 mengalami kenaikan 0,89% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp672.476.780.974,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp488.479.999.972,73 mengalami kenaikan 9,72% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp445.206.662.652,25.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.556.758.500,00 atau 79,33% dari anggaran sebesar Rp1.962.404.000,00.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp102.941.294.780,00 mengalami kenaikan sebesar 28,46% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp80.132.735.643,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp19.059.088.500,00 mengalami kenaikan sebesar 12,51% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp16.939.365.000,00.

2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Belanja Aset Tetap Lainnya. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel I.28

Belanja Modal Tahun 2023

Belanja Modal :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Tanah	6.161.259.000,00	2.136.746.385,00	(4.024.512.615,00)	14.353.324.616,00
Belanja Peralatan dan Mesin	81.993.338.317,00	78.671.552.586,00	(3.321.785.731,00)	36.976.972.359,00
Belanja Gedung dan Bangunan	63.770.719.406,00	52.912.285.113,00	(10.858.434.293,00)	34.094.683.751,54
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.132.171.470,00	81.049.816.657,00	(14.082.354.813,00)	57.532.991.571,48
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.417.466.717,00	4.375.553.811,00	(41.912.906,00)	3.055.692.991,00
Belanja Aset Lainnya	251.700.000,00	251.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**251.726.654.910,00**	**219.397.654.552,00**	**(32.329.000.358,00)**	**146.013.665.289,02**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.397.654.552,00 atau 87,16% dari anggaran sebesar Rp251.726.654.910,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp219.397.654.552,00 mengalami kenaikan 50,26% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp146.013.665.289,02.

2.3 Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah Rp1.092.325.768,00 atau 7,57% dari anggaran sebesar Rp14.434.580.258,00. Adapun rincian realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.29

Belanja Tak Terduga Tahun 2023

No	Belanja Tak Terduga		2023
1)	Pengembalian kesalahan pembayaran Pajak BPHTB	Rp	32.255.765,00
2)	Bantuan Sosial Kecelakaan Kerja bagi Penderes Kelapa	Rp	25.000.000,00
3)	Bantuan Perawatan Jenaz ah Terlantar	Rp	7.500.000,00

4)	Belanja Tanggap Darurat Bencana (Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan) Kabupaten Kulon Progo	Rp	1.027.570.003,00
Jumlah		**Rp**	**1.092.325.768,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah Rp183.786.789.969,00 atau 98,25% dari anggaran sebesar Rp187.065.542.581,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel I.30

Belanja Transfer Tahun 2023

Transfer :	**Anggaran 2023**	**Realisasi 2023**	**Lebih/(Kurang)**
	Rp	**Rp**	**Rp**
1. Transfer Bagi Hasil	13.568.633.381,00	10.289.880.769,00	(3.278.752.612,00)
2. Transfer Bantuan Keuangan	173.496.909.200,00	173.496.909.200,00	0,00
Jumlah	**187.065.542.581,00**	**183.786.789.969,00**	**(3.278.752.612,00)**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah Rp183.786.789.969,00 mengalami kenaikan 10,16% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp166.837.491.825,00.

2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Transfer bagi hasil sebesar Rp10.289.880.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

			2023	**2022**
a.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp	9.158.211.473,00	10.718.751.889,00
b.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
-	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp	1.131.669.296,00	1.059.999.036,00
Jumlah		**Rp**	**10.289.880.769,00**	**11.778.750.925,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa terealisasi 75,84% dari anggaran karena disesuaikan dengan pencapaian pendapatan pajak dan retribusi daerah pada periode pencairan.

2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan sebesar Rp173.496.909.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		
- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	173.496.909.200,00	155.058.740.900,00
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
Jumlah	**173.496.909.200,00**	**155.058.740.900,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, (LRA Unaudited 2023)

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa untuk TA 2023 penggunaannya adalah untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Atas Belanja Bantuan Keuangan - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Dana Desa Tahun 2023 dari APBN Tahun 2023 disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 mengatur tentang Penyaluran, Penggunaan, Dan Sanksi Atas Pengelolaan Dana Desa.

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.31

Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Pembiayaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
1. Penerimaan Pembiayaan	165.274.234.829,00	165.114.099.031,22	(160.135.797,78)	216.356.832.129,17
2. Pengeluaran Pembiayaan	45.873.192.403,00	45.873.192.403,00	0,00	50.116.372.343,00
Pembiayaan Netto	**119.401.042.426,00**	**119.240.906.628,22**	**(160.135.797,78)**	**166.240.459.786,17**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo (LRA Unaudited 2023)

Realisasi pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2023 adalah Rp119.242.741.803,22 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp119.401.042.426,00.

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.32

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023

Penerimaan Pembiayaan:	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.274.234.829,00	165.114.099.031,22	(160.135.797,78)	216.356.832.129,17
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	**165.274.234.829,00**	**165.114.099.031,22**	**(160.135.797,78)**	**216.356.832.129,17**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, (LRA Unaudited 2023)

1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.33

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023

Pengeluaran Pembiayaan :		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp
a.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	45.873.192.403,00	45.873.192.403,00	0,00	50.116.372.343,00
b.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		**45.873.192.403,00**	**45.873.192.403,00**	**0,00**	**50.116.372.343,00**

Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, (LRA Unaudited 2023)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel T-C 29 berikut:

Tabel T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2023

KABUPATEN KULON PROGO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	BKAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**94**		**23**	**23**	**100**	**23**	**46**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84		21	21	100	21	42	**100**	BKAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**960**					**14**	**28**	**100**	BKAD
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280		69	69	100	85	154	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		1	1	100	1	2	**100**	BKAD
	Pelaksanaan Penatausanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20		12	4	100	4	8	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56		12	12	100	14	26	**100**	BKAD
											BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**7**					**2**	**2**	**100**	BKAD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12		3	3	100	2	5	**100**	BKAD
	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi *dan penilaian kinerja pegawai*	3					1	1	**100**	BKAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**					**2**	**2**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24		12	12	100	6	18	**100**	BKAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48		12	12	100	12	24	**100**	BKAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penambahan aset**	**287**								BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	287		73	94	128	0	94	**#DIV/0!**	BKAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**96**					**24**	**24**	**100**	BKAD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48		12	12	100	12	12	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144		36	12	33,33	12	24	**100**	BKAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12**					**3**	**3**	**100**	BKAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156		39	36	92,31	39	75	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	428		107	30	28,04	107	137	**100**	BKAD
											BKAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan pengelolaan anggaran**	**100**					**100**	**100**	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah**	**100**					**4**	**4**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	16		4	4	100	4	8	**100**	BKAD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	340		85	85	100	85	170	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	48		12	12	100	12	24	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8		2	2	100	1	3	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan	**95,68**					**95,17**	**95,17**	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan**	**20**					**5**	**5**	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	448		112	16	14,28	110	124,28	**100**	BKAD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13.840		3460	12	0,34	12	24	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	504		126	126	100	79	205	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penatausaan Pembiayaan Daerah	Penyaluran belanja bantuan keuangan daerah dan penyertaan modal	-		-	-		-	-	-	BKAD
											BKAD
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	**100**					**100**	**100**	**100**	BKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan**	**16**					**4**	**4**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	672		168	168	100	168	336	**100**	BKAD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68		17	17	100	17	34	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2.016		504	504	100	504	108	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Laporan yang terselesaikan**	**48**					**12**	**12**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis	48		12	12	100	12	24	**100**	BKAD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
										#DIV/0!	BKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**400**					**100**	**100**	**100**	BKAD
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah**	**20**					**5**	**5**	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12		3	3	100	3	6	**100**	BKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24		6	6	100	6	12	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16		4	4	100	4	8	**100**	BKAD
											BKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase penerimaan pajak daerah**	**100**					**75,02**	**75,02**	**100**	BKAD
		Persentase capaian Pendapatan Daerah	**86,22**					**100**	**100**	**100**	BKAD
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah**	**40**					**10**	**10**	**100**	BKAD
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Analisis dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16		4	4	100	4	8	**100**	BKAD
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	32		8	8	100	8	16	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.412.508		353.127	353.127	100	12	353.139	**100**	BKAD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48		29	29	100	29	58	**100**	BKAD
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	848		212	212	100	212	424	**100**	BKAD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8		2	2	100	2	4	**100**	BKAD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2		1	2	200	2	4	**100**	BKAD

Berdasarkan data realisasi renja SKPD sampai dengan triwulan IV diatas, target kinerja program kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
2. Dinamika ketentuan perundangan tentang perencanaan penganggaran daerah dan aplikasi SIPD berakibat pada ketidapastian tahapan dalam penyusunan APBD

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Optimalisasi ASN yang ada;
2. Koordinasi intensif dengan seluruh OPD dan membangun komunikasi dengan pihak lain dalam penyusunan perencanaan penganggaran sehingga APBD ditetapkan tepat waktu.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun berdasarkan hasil dari proses perencanaan yang telah disepakati bersama.

Sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintahan yaitu urusan keuangan. Pada tahun 2023 BKAD Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan 4 program dan 44 sub kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Untuk indikator kinerja utama Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 97,70 %.

Adapun capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKAD

KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***
A	Indikator Kinerja Kunci (IKK):											
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		%	84,25	84,5	84,75	85	84,25	84,5	84,5	84,75	
	Indikator Kinerja SKPD											
	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset		%	94,97	95,17	95,43	95,68	97,7	95,17	95,17	95,43	
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.695.973.944.128,01 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp1.699.595.928.477,00. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,83% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

Anggaran belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.818.996.970.903,00 dan realisasinya sebesar Rp1.694.765.786.617,73 atau besarnya capaian 93,17%. Hal ini menunjukkan kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2022, pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Daerah terealisasi Rp1.531.202.507.232,27 dari target APBD yang sebesar Rp1.669.930.685.519,17 atau sebesar 91,69%.

Realisasi belanja di bawah anggaran sebesar Rp124.231.184.285,27 atau 6,83% antara lain disebabkan :

a. Adanya akun belanja yang direalisasikan sesuai kebutuhan;
b. Efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program.

Realisasi pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2023 adalah Rp119.242.741.803,22 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp119.401.042.426,00.

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat kinerja Pelayanan

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di BKAD selain OPD juga melaksanakan fungsi selaku SKPKD. Selaku SKPKD struktur anggarannya terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan. Bagian pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, bagian belanja terdiri dari operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, bagian pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan BKAD selaku OPD terbagi dalam pendapatan dan belanja, pendapatan terdiri dari PAD sedangkan belanja terbagi dalam balanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 1

Pengukuran Kinerja Utama BKAD Kulon Progo

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan asset	%	94,97	97,70
2	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD :

1. Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
2. Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah;
3. Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis;
4. Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran *(mandatory spending)*, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.
5. Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal.
6. Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.
7. Belum optimalnya pendapatan daerah.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPD)

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah " Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa".

Dikaitkan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD terkait erat dengan pencapaian misi ke 3, yaitu " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tentram".

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2023-2026 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tercapainya peningkatan pendapatan daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;
3. Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
4. Dinamika perubahan peraturan dari pusat yang sangat cepat.

Peluang :

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual;
3. Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.
4. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku.
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan;
6. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legeslatif.

7. Formulasi Isu-isu penting dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah :
   1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
   2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;
   3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKAD Kabupaten Kulon Progo. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKAD. Penjabaran dari rancangan rencana kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RKPD BKAD TAHUN 2025

KABUPATEN KULON PROGO

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Lingkup BKAD	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**26.860.119.100,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Lingkup BKAD	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**26.860.119.100,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikantepat waktu**	**23**	**53.051.600,00**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikantepat waktu**	**23**	**53.051.600,00**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	42.327.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	2 Dok	42.327.700,00	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dok	10.723.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	21 Dok	10.723.900,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14**	**26.211.200.571,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14**	**26.211.200.571,00**	
	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	26.061.821.371,00	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Kab. Kulon Progo	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	68 orang	26.061.821.371,00	
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	94.768.200,00	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	12 Dokumen	94.768.200,00	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.996.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kulon Progo	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	12 Dokumen	17.996.200,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	36.614.800,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	12 Laporan	36.614.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2**	**14.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**2**	**14.000.000,00**	
	1 Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Lingkup BKAD	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	2.000.000,00	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Lingkup BKAD	Persentase realisasi monitoring dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	2.000.000,00	
	2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Lingkup BKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	12.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Lingkup BKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	12.000.000,00	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	**70.061.800,00**	**Administrasi umum Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2**	**70.061.800,00**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup BKAD	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	44.735.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup BKAD	Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	44.735.700,00	
	2	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lingkup BKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.326.100,00	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lingkup BKAD	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	12 laporan	25.326.100,00	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		Lingkup BKAD	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**2**	**152.476.929,00**	**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah**	Lingkup BKAD	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**2**	**152.476.929,00**	
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	152.476.929,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kulon Progo	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	152.476.929,00	
	2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	0,00	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	0,00	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan		**Kab. Kulon**	**Jumlah jasa pelayanan umum kantor**	**3**	**359.328.200,00**	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan**		**Jumlah jasa pelayanan umum**	**3**	**359.328.200,00**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah	**Progo**				**Pemerintah Daerah**		**kantor**			
	1 Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannnya	39 unit	238.078.400,00	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kulon Progo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	39 unit	238.078.400,00	
	2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 unit	15.000.000,00	
	3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	107	106.249.800,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	107	106.249.800,00	
II	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan pengelolaan anggaran, Cakupan pengelolaan perbendaharaan, Cakupan penerapan akuntansi dan pelaporan**	**100** **95,17** **100**	**194.243.162.015,00**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Cakupan pengelolaan anggaran, Cakupan pengelolaan perbendaharaan, Cakupan penerapan**	**100** **95,17** **100**	**194.243.162.015,00**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								akuntansi dan pelaporan			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah**	**4**	**551.267.700,00**	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah**	**4**	**551.267.700,00**	
	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 dok	108.053.400,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan anggaran	4 dok	108.053.400,00	
	2 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	85 dok	62.366.300,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan anggaran	85 dok	62.366.300,00	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 dok	271.926.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan anggaran	12 dok	271.926.000,00	
	4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dok	108.922.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan anggaran	2 dok	108.922.000,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan**	**5**	**361.959.800,00**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan**	**5**	**361.959.800,00**	
	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	110 dokumen	107.304.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan perbendaharaan	110 dokumen	107.304.600,00	
										0,00	
	2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3,460 dokumen	20.577.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan perbendaharaan	3,460 dokumen	20.577.000,00	
	3 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kulon Progo	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 dokumen	13.985.200	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan perbendaharaan	2 dokumen	13.985.200,00	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	42 orang	220.093.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan perbendaharaan	42 orang	220.093.000,00	
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah		**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan**	**4**	**187.243.600,00**	**Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah**		**Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan**	**4**	**187.243.600,00**	
	1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	168 dokumen	35.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Kulon Progo	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	168 dokumen	35.000.000,00	
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 dokumen	30.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kulon Progo	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	17 dokumen	30.000.000,00	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	504 dokumen	58.176.200,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	504 dokumen	58.176.200,00	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	**Kab. Kulon Progo**	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 laporan	64.067.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	2 laporan	64.067.400,00	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah Laporan yang terselesaikan**	**12 Laporan**	**193.142.690.915,00**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kab. Kulon Progo	**Jumlah Laporan yang terselesaikan**	**12 Laporan**	**193.142.690.915,00**	
	1 Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	174.973.244.000,00	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan pengelolaan keuangan daerah	12 laporan	174.973.244.000,00	
	2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kulon Progo	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 dokumen	4.800.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan pengelolaan keuangan daerah	2 dokumen	4.800.000.000,00	
	3 Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota	2 laporan	13.369.446.915,00	Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan pengelolaan keuangan daerah	2 laporan	13.369.446.915,00	
III	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**277.044.200,00**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**277.044.200,00**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**5**	**277.044.200,00**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**5**	**277.044.200,00**	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Kulon Progo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	106.635.100,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	106.635.100,00	
	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	12.032.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	12.032.000,00	
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	48.191.900,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	48.191.900,00	
	4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	38.185.500,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	6 dokumen	38.185.500,00	
	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	71.999.700,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	71.999.700,00	
IV	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Kab. Kulon Progo**	**Persentase capaian Pendapatan Daerah, Persentase penerimaan**	**100**	**5.268.754.500,00**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase capaian Pendapatan Daerah,**	**100**	**5.268.754.500,00**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kulon Progo	**pajak daerah**	**75,02**				**Persentase penerimaan pajak daerah**	**75,02**		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah dokumen pendapatan daerah**	**10**	**5.268.754.500,00**	***Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah***		**Jumlah dokumen pendapatan daerah**	**10**	**5.268.754.500,00**	
	1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	66.406.100,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	2 dokumen	66.406.100,00	
	2 Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	80.888.100,00	Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	4 dokumen	80.888.100,00	
	3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 laporan	2.282.527.600,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	8 laporan	2.282.527.600,00	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	1.985.713.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	12 laporan	1.985.713.000,00	
	5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	29 layanan	365.791.600,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	29 layanan	365.791.600,00	
	6	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	316.781.700,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	12 dokumen	316.781.700,00	
	7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 dokumen	68.616.600,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	2 dokumen	68.616.600,00	

No	RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	74.706.600,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	2 laporan	74.706.600,00	
	9	Elektronifikasi Transasi Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	27.323.200,00	Elektronifikasi Transasi Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	1 Laporan	27.323.200,00	
		Jumlah				226.649.079.815,00					226.649.079.815,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka memenuhi kaidah *bottom up planning* maka perlu memperhatikan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain. Memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten tidak terdapat usulan pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat hasil musrenbang kapanewon maupun pokok pikiran DPRD terhadap program/kegiatan sesuai fungsi BKAD.

Namun demikian berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan terdapat beberapa masukan yang perlu ditelaah dalam penyusunan perencanaan sebagai berikut :

1) Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPATDA, e-SPTPD, SISMIOP, dan e-SPPT serta e-Layanan PBB) masih belum sempurna sehingga data yang disajikan belum sepenuhnya valid. Dalam hal pengolahan data pajak daerah terutama PBB P2 belum sepenuhnya bisa dilakukan *by system* sehingga beberapa tahapan penetapan harus dilaksanakan secara manual dan membutuhkan waktu yang relative lama. Dengan demikian penetapan PBB P2 belum dapat dilaksanakan pada awal Bulan Januari.
2) Dengan diberlakukannya regulasi baru baik UU, PP, maupun Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan pemutakhiran data berupa sawah dan pekarangan untuk masing-masing objek pajak. Hal ini mengingat sesuai dengan regulasi tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk lahan yang berupa sawah berbeda dnegan NJOP lahan yang berupa pekarangan. Di mana NJOP lahan berupa sawah prosentasenya lebih rendah.
3) Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
4) Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah;
5) Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis;

6) Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran *(mandatory spending)*, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.
7) Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal.
8) Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.
9) Belum optimalnya pendapatan daerah, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah diantaranya dengan memberikan reward untuk wajib pajak baik pembayaran pajak tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan pajak.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dengan mempertimbangkan capian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan mempergunakan pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan adanya pembagian peran dan tanggung jawab

sehingga terlaksana mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

" Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah"

RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen RPD 2023-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
					Realisasi	Target	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)		A	A	A	A	A	A	AA
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,802	81,802	84,00	84,25	84,5	84,75	85,00
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset	%	94,13	94,13	94,94	94,97	95,17	95,43	95,68
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase Pencapaian program pada masing-masing secretariat perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (Tahun 2023)	Target Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Anggaran	%	100	100	BKAD
		Cakupan Pengelolaan Perbendaharaan	%	94,97	95,43	
		Cakupan Penerapan akuntansi dan pelaporan	%	100	100	
2	Program Pengelolaan Barang Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Daerah	%	100	100	BKAD
3	Program Pengeloaan Pendapatan Daerah	Presentase penerimaan pajak daerah	%	100	100	BKAD
		Presentase capaian Pendapatan Daerah	%	73,01	78,49	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	BKAD

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja BKAD tahun 2025 mencakup 4 program terdiri dari 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan:
  a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
    b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    c. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    b. Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:

a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan gedung lainnya
c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan daerah
   - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah
     - Sub Kegiatan:
       a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
       b. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
       c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD
       d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
   - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
     - Sub Kegiatan :
       a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
       b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertbitan anggaran kas dan SPD
       c. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan uang daerah sebagai optimalisasi kas
       d. Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
     - Sub Kegiatan :
       a. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan LO dan beban

b. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran
c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah daerah
d. Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penunjang urusan Pengelolaan Keuangan daerah
  - Sub Kegiatan :
    a. Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
    b. Pengelolaan dana darurat dan mendesak
    c. Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota

3. Program Pengelolaan barang Milik Daerah
   - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
     - Sub Kegiatan :
       a. Penyusunan Standar Harga
       b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah
       c. Penatausahaan Barang Milik daerah
       d. Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerahbarang milik daerah
       e. Penyusunan laporan Barang Milik daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan daerah
   - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
     - Sub Kegiatan :
       a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
       b. Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
       c. Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah

d. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
f. Penagihan Pajak Daerah
g. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah
h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retrebusi daerah
i. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di BKAD Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (misi ke3) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman dan tenteram".

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 BKAD Kabupaten Kulon Progo secara detail dapat dilihat pada lampiran berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
05.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**					**27.126.150.488,00**	**28.481.758.012,40**		BKAD	
5.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***							**53.051.600,00**	**55.704.180,00**		BKAD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	42.327.700,00	44.444.085,00		BKAD	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	10.723.900,00	11.260.095,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**26.211.200.571**	**27.521.760.600**			
5.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	100%	26.061.821.371	27.364.912.439,55		BKAD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	100%	94.768.200,00	99.506.610,00		BKAD	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	100%	17.996.200	18.896.010,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Persentase jumlah layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam 1 tahun x100%	100%	36.614.800,00	38.445.540,00		BKAD	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**14.000.000,00**	**14.000.000,00**			
5.02.01.2.05.09	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.000.000,00	2.100.000,00		BKAD	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat	100%	12.000.000,00	12.600.000,00		BKAD	
5.02.01.2.06	**Administrasi umum Perangkat Daerah**						100%	**70.061.800,00**	**73.564.890,00**			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Presentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	44.735.700,00	46.972.485,00		BKAD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	25.326.100,00	26.592.405,00		BKAD	
5.02.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah**		100%					**418.508.317,00**	**439.433.732,85**			
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	152.476.929,00	160.100.775,45		BKAD	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	266.031.388,00	279.332.957,40		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**							**359.328.200,00**	**377.294.610,00**			
5.02.01.2.09.02	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannnya	39 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	238.078.400,00	249.982.320,00		BKAD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.000.000,00	15.750.000,00		BKAD	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	107 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	106.249.800,00	111.562.290,00		BKAD	
05.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Pengelolaan keuangan daerah**	**99,90%**					**194.243.162.015,00**	**203.955.320.115,75**		**BKAD**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
05.02.02.2.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***							**551.267.700,00**	**578.831.085,00**		**BKAD**	
05.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Cakupan pengelolaan anggaran	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 dok	Capaian pengelolaan anggaran	100%	108.053.400,00	113.456.070,00		BKAD	
05.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Cakupan pengelolaan anggaran	100%	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	85 dok	Capaian pengelolaan anggaran	100%	62.366.300,00	65.484.615,00		BKAD	
05.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Cakupan pengelolaan anggaran	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 dok	Capaian pengelolaan anggaran	100%	271.926.000,00	285.522.300,00	Sedang berjalan	BKAD	
05.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Cakupan pengelolaan anggaran	100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dok	Capaian pengelolaan anggaran	100%	108.922.000,00	114.368.100,00		BKAD	
05.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**361.959.800,00**	**380.057.790,00**		BKAD	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan pengelolaan perbendaharaan	94,97%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	110 dokumen	Capaian pengelolaan perbendaharaan	100%	107.304.600,00	112.669.830,00	Sedang berjalan	BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan pengelolaan anggaran	94,97%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 dokumen	Capaian pengelolaan perbendaharaan	100%	20.577.000,00	21.605.850,00		BKAD	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Cakupan pengelolaan perbendaharaan	94,97%	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 dokumen	Capaian pengelolaan perbendaharaan	100%	13.985.200,00	14.684.460,00		BKAD	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan perbendaharaan	94,97%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	42 orang	Capaian pengelolaan perbendaharaan	100%	220.093.000,00	231.097.650,00		BKAD	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD RI)
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah**						100%	**187.243.600,00**	**196.605.780,00**		BKAD	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Cakupan pengelolaan akuntansi dan pelaporan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	168 dokumen	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100%	35.000.000,00	36.750.000,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Cakupan pengelolaan akuntansi dan pelaporan	100%	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 dokumen	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100%	30.000.000,00	31.500.000,00		BKAD	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan pengelolaan akuntansi dan pelaporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	504 dokumen	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100%	58.176.200,00	61.085.010,00		BKAD	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan akuntansi dan pelaporan	100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 laporan	Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100%	64.067.400,00	67.270.770,00	Sedang berjalan	BKAD	
05.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**193.142.690.915,00**	**202.799.825.460,75**	Sedang berjalan	BKAD	
05.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan	100%	174.973.244.000,00	183.721.906.200,00	Sedang berjalan	BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
						pengelolaan keuangan daerah						
05.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 dokumen	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan pengelolaan keuangan daerah	100%	4.800.000.000,00	5.040.000.000,00		BKAD	
05.02.02.2.04.010	Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota			Jumlah Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota	2 laporan	Dukungan sebesar 99 % terhadap cakupan pengelolaan keuangan daerah	100%	13.369.446.915,00	14.037.919.260,75	Sedang berjalan	BKAD	
05.02.04	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**277.044.200,00**	**290.896.410,00**		BKAD	
05.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**277.044.200,00**	**290.896.410,00**		BKAD	
05.02.03.2.01.	Penyusunan Standar Harga	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	106.635.100,00	111.966.855,00		BKAD	
05.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	12.032.000,00	12.633.600,00		BKAD	
05.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	48.191.900,00	50.601.495,00		BKAD	
05.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan Barang Milik	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	6 dokumen	Capaian pengelolaan Barang Milik	100%	38.185.500,00	40.094.775,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
		Daerah		Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Daerah						
05.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	Capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	71.999.700,00	75.599.685,00		BKAD	
05.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Cakupan pengelolaan pendapatan daerah	73,01% 100%					**5.268.754.500,00**	**5.579.442.225,00**		BKAD	
05.02.04.1.01	***Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah***							**5.268.754.500,00**	**5.579.442.225,00**			
05.02.04.1.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	66.406.100,00	69.726.405,00		BKAD	
05.02.04.1.01.02	Analisis dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	80.888.100,00	84.932.505,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
05.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	2.282.527.600,00	2.396.653.980,00		BKAD	
05.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	353.127 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	1.985.713.000,00	2.084.998.650,00		BKAD	
05.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	29 layanan	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	365.791.600,00	384.081.180,00		BKAD	
05.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	212 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	361.781.700,00	379.870.785,00		BKAD	
05.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 dokumen	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	68.616.600,00	72.047.430,00		BKAD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	SKPD	Alasan
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target 2025	Tolok Ukur	Target					
05.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah Persentase penerimaan pajak daerah	73,01% 100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	74.706.600,00	78.441.930,00		BKAD	
05.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	73,01% 100%	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap cakupan pengelolaan pendapatan daerah	100%	27.323.200,00	28.689.360,00		BKAD	
	Jumlah							**226.960.111.203,00**	**238.307.416.763,15**			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis ke-2, periode renstra 2023-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BKAD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini mengalami penurunan pendapatan maupun belanja dikarenakan adanya gugatan terhadap penetapan pajak daerah yakni PBB P2 dari Angkasa Pura sehingga mempengaruhi Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja 2025.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan dan karyawati BKAD Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala BKAD

Kabupaten Kulon Progo

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM

NIP. 197004061999031003

RENCANA KERJA (RENJA)

BKPP TAHUN 2025

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Kulon Progo

Jl.. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo 55611

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Renja BKPP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Renja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 memuat usulan program kegiatan tahun 2025, yang merupakan penjabaran target program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program kegiatan tersebut disusun sebagai arahan dan panduan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Renja BKPP Tahun 2025 menjadi pedoman untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta kerjasamanya sehingga Renja BKPP Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini, sehingga kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi pedoman bagi segenap aparatur dalam lingkup BKPP dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja program BKPP.

Wates, 2 Agustus 2024

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN KULON PROGO,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19730512 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPP KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN III **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BKPP 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **39**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemda DIY 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPP 32

3.3. Program dan Kegiatan BKPP 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **44**

BAB V PENUTUP **63**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Kulon ProgoTahun 2023 6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 8
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Program BKPP 8
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2024 9
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Program BKPP Tahun 2024 10
Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 11
Tabel 2.7 Usulan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 20
Tabel 2.8 Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2023 21
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPP Kabupaten Kulon Progo 24
Tabel 2.10 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 32
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 40
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran BKPP Tahun 2025 40
Tabel 4.1 Pemetaan Indikator Kinerja Dan Target Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulon Progo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Prioritas Renja BKPP Tahun 2025 diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Program Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan sasaran pelaksanaan tahun 2025.

Sistematika Penyusunan Renja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rankhir juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 - 2025);
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005 – 2025);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan KepegawaianPendidikan Dan Pelatihan;
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2023-2026;

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja BKPP Tahun 2025 adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah daerah, DPRD serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBD Pemda DIY;
3. Menjabarkan tentang kondisi umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo serta capaian kinerja di bidang yang menjadi ketugasan Badan Kepegawaian Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun yang berjalan sebagai tolak ukur tercapainya visi dan misi Kepala Daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan tahun yang berkenaan dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BKPP melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program kepegawaian Daerah. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPP Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Kulon ProgoTahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1 Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan Kabupaten/Kota
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6 Pengadaan Barang	11 Pengadaan Sarana dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	Program Kepegawaian Daerah	9 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	17 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			18 Pengelolaan Data Kepegawaian
			19 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		10 Mutasi dan Promosi ASN	20 Pengelolaan Mutasi ASN
			21 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			22 Pengelolaan Promosi ASN
		11 Pengembangan Kompetensi ASN	23 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			24 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			25 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
			26 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
		12 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			28 Pembinaan Disiplin ASN

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023

Sasaran OPD	IKU OPD	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya kualitas aparatur	Capaian peningkatan kualitas aparatur	58,90	63,67
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100,00	100,00

Sumber: Dokumen RPD 2023-2026

Realisasi kinerja BKPP Tahun Anggaran 2023 berhasil melampau target, hal ini dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Aparatur (PKA) berupa Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat teknis melebihi target. Pada tahun 2023, kegiatan Pengembangan Kompetensi berupa Diklat fungsional masih banyak dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting* sehingga banyak diikuti oleh ASN. Adanya dukungan Sistem Informasi Diklat (SIMDIKLAT) memudahkan dalam merekapitulasi usulan-usulan kegiatan diklat ASN. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN juga menjadi bagian dari penilaian kinerja individu yang harus dipenuhi oleh ASN yaitu minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

Berlandaskan pada Dokumen Renstra BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2026, Capaian indikator kinerja program BKPP terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagaimana dituangkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Program BKPP
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1	Capaian Pengembangan Aparatur	44,90	64,38	Tercapainya indikator ini karena banyak ASN yang mengikuti kegiatan

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				Pengembangan Kompetensi, baik secara daring maupun luring, serta adanya kewajiban pemenuhan kegiatan pengembangan kompetensi.
2	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	81,46	79,47	Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan ketersediaan Pegawai masih jauh dari kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan. Jumlah ASN yang direkrut lebih sedikit dari pada jumlah ASN yang pensiun.
3	Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,97	99,41	Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan banyaknya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada ASN

Jumlah anggaran BKPP Tahun Anggaran 2023 termasuk belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 104.989.900.996,- dan Jumlah realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 104.253.999.672, Sehingga persentase capaian realisasi anggaran BKPP tahun anggaran 2023 adalah 99,30 persen.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 masih sama dengan tahun anggaran 2023. Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program BKPP Tahun Anggaran 2024 tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan Kinerja	Target Kerja Murni
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100
2	Capaian peningkatan Profesionalitas ASN	%	59,04

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Program BKPP Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024
1	Porgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100
2	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan Aparatur	%	45,10
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	%	82,81
		Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	%	99,98

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tercantum pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	01			**SEKRETARIAT DAERAH**									
4	01	04		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	*01*	*04*	*5.02*	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	*Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan*	***210***							
4	01	04	5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	210		2	1	50	2	3	37,50
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**03**			**KEPEGAWAIAN**									
5	03	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100		100	100	100	100	100	100
5	*03*	*01*	*2.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*	*23*		*23*	*23*	*100*	*23*	*46*	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Kinerja disampaikan tepat waktu								
5	03	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		2	2	100	2	4	50
5	03	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21		21	21	100	21	42	50
5	*03*	*01*	*2.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	*14*		*14*	*14*	*100*	*14*	*14*	*50*
5	03	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48		45	45	100	48	48	50
5	03	01	2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1	2	50
5	03	01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14		14	14	100	14	28	50
5	*03*	*01*	*2.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2*		*1*	*1*	*100*	*1*	*2*	*50*
5	03	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6		4	4	100	4	8	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	*03*	*01*	*2.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	*2*		*2*	*2*	*100*	*2*	*4*	*50*
5	03	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1	2	50
5	03	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		12	12	100	12	12	50
5	*03*	*01*	*2.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	*24*		*24*	*24*	*100*	*24*	*24*	100
5	*03*	*01*	*2.08.0002*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
5	*03*	*01*	*2.08.0004*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	12	100	12	12	100
5	*03*	*01*	*2.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3*		*3*	*3*	*100*	*3*	*3*	100
5	*03*	*01*	*2.09.0002*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14		14	14	100	15	15	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	*03*	*01*	*2.09.0009*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	1	100	1	1	100
5	*03*	*01*	*2.09.0010*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16		16	16	100	16	16	100
5	**03**	**02**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,41**		**44,90**	**64,38**	**143,39**	**44,90**	**44,90**	**98,87**
					Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	**85,44**		**81,46**	**79,47**	**97,55**	**81,46**	**81,46**	**95,34**
					Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	**99,98**		**99,98**	**99,41**	**99,44**	**99,97**	**99,97**	**99,98**
5	*03*	*02*	*2.01*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*3*		*3*	*3*	*100*	*3*	*3*	50
5	03	02	2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2		2	2	100	1	1	50
5	03	02	2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1		1	1	100	1	1	50
5	03	02	2.01.00	Evaluasi Data, Informasi dan	Jumlah Laporan Hasil	1		1	1	100	2	2	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			12	Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
5	*03*	*02*	*2.02*	*Mutasi dan Promosi ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat*	*3*		*3*	*3*	*100*	*3*	*3*	*50*
5	03	02	2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300		230	230	100	230	230	50
5	03	02	2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700		700	993	141	700	700	50
5	03	02	2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	26					5	5	50
5	*03*	*02*	*2.03*	*Pengembangan Kompetensi ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	*4*		*4*	*4*	*100*	*4*	*8*	*50*
5	03	02	2.03.00 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70		70	70	100	70	70	50
5	03	02	2.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80		80	80	100	65	65	50
5	03	02	2.03.00 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3		3	3	100	3	6	50
5	03	02	2.03.00	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional	100		100	100	100	100	100	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			13	ASN	yang Dibina								
5	*03*	*02*	*2.04*	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*2*		*2*	*2*	*100*	*2*	*4*	*50*
5	03	02	2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27		27	27	100	27	27	50
5	03	02	2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5		5	11	220	5	5	50

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BKPP

Program dan kegiatan utama pada BKPP yang mendukung visi, misi, dan program RPJMD terhadap tugas pokok dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut:

I. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengelolaan Mutasi ASN

Redistribusi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum tahun 2023 sejumlah 184 orang dari target 230 orang. Capaian redistribusi ini mencakup pemindahan PNS di internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan juga mutasi PNS masuk dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Target redistribusi PNS tidak tercapai karena tergantung pada jumlah usulan mutasi masuk dari luar Daerah.

b. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

Guna lebih meningkatkan pendayagunaan aparatur dan pembinaan karier yang lebih baik, maka kepada setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diberikan kenaikan pangkat secara tepat waktu. Realisasi kenaikan pangkat PNS tahun 2023 adalah 993 orang dan realisasi jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 129 orang. Target kenaikan pangkat tahun 2023 sebanyak 700 orang, sehingga realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Kelebihan target tersebut antara lain karena banyaknya usulan kenaikan pangka Golongan IV JFT Guru yang memenuhi syarat di tahun 2023.

Jumlah kenaikan pangkat PNS dimungkinkan akan mengalami peningkatan karena adanya kebijakan baru terkait periodenisasi proses kenaikan pangkat. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodenisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Periodenisasi Kenaikan Pangkat PNS, telah ditetapkan bahwa mulai tahun 2024 periodenisasi kenaikan pangkat diubah menjadi 6 (enam) periode dalam satu tahun, yaitu tanggal 1 bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember.

c. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Pengalihan status PNS dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional untuk sebagian unit kerja sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Realisasi pengalihan status Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional tercapai sebanyak 373 orang dari target sejumlah 100 orang.

d. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

BKPP Kabupaten Kulon Progo tengah menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I. Ujian Dinas Tingkat I merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh seorang PNS yang saat ini tengah menduduki Golongan Ruang II/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke Golongan Ruang III/a. Mereka yang dapat mengikuti ujian dinas, minimal telah menduduki Golongan Ruang II/d selama 2 tahun (per 01 Oktober 2023). Ujian dinas secara rutin dilaksanakan oleh BKPP setiap tahun sekali, dan untuk tahun ini diikuti oleh 70 orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. PNS yang lulus ujian dinas sebanyak 64 orang.

BKPP bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, terkait aplikasi ujian secara CBT (*Computer Based Test*) yang digunakan. Selain itu Ujian Dinas juga terselenggara atas fasilitasi dari UPT Balai Latihan Kerja (UPT BLK), terkait sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian.

e. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan ini melaksanakan workshop penyesuaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional dan penjelasan periodenisasi kenaikan pangkat tahun 2024. Workshop menghadirkan narasumber Tri Wiharjanti, SIP, Analis Kepegawaian Muda pada Kantor Regional I BKN Yogykarta. Pasca terbitnya Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional, dimana angka kredit diperoleh dari konversi predikat kinerja ditegaskan bahwa masih ada PAK dan tidak ada lagi DUPAK, karena yang dianggap mengetahui kinerja JF adalah atasannya bukan tim penilai angka kredit. Maka hasil kerja yang sudah ditargetkan dari awal tahun akan terlihat melalui predikat kinerja yang diperoleh.

f. **Pelaksanaan Pengadaan**

Pada akhir Juni 2022 usulan formasi untuk PPPK Usulan formasi 2022. terdiri dari 205 formasi guru. 150 formasi tenaga kesehatan dan 40 formasi non guru non tenaga kesehatan telah disampaikan ke Kementerian PAN RB. Kemudian disetujui jumlah formasi pengadaan PPPK formasi Guru sebanyak 205, PPPK Tenaga Kesehatan 150, dan Formasi PPPK Tenaga teknis sebanyak 36 formasi. Proses pengadaan dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga serangkaian proses pengadaan PPPK tahun anggaran 2022 masih berlanjut hingga tahun 2023. Sebanyak 126 PPPK Tenaga Kesehatan telah resmi menerima Surat Keputusan Bupati Kulon Progo pada tanggal 2 Mei 2023.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya mengusulkan pengadaan PPPK. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki kendala dan keterbatasan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengamanatkan bahwa pengadaan ASN tahun 2023 hanya dilakukan untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 362/C/2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023. Usulan PPPK yang diajukan oleh BKPP tahun 2023 dan usulan yang disetujui oleh Menpan RB tercantum pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Usulan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah Formasi yang diusulkan (formasi)	Jumlah Formasi yang disetujui (formasi)
1	PPPK Guru	247	247
2	PPPK Tenaga Kesehatan	52	52
3	PPPK Tenaga Teknis	87	82
Jumlah		**386**	**381**

Pendaftaran Seleksi ASN Penyelenggaraan pengadaan PPPK tahun 2023 belum dapat diselesaikan di tahun 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2023.

g. Pengelolaan Promosi ASN

Realisasi pelaksanaan pelantikan PNS dalam jabatan struktural telah dilaksanakan sebanyak 6 (lima) kali dari target sebanyak 4 (empat) kali. Promosi dan mutasi jabatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberikan arah bagi pengembangan karier aparatur yang dinamis dan terarah. Jumlah pelantikan melebihi target karena adanya JPT yang mengalami kekosongan pejabat sehingga harus segera dilakukan seleksi terbuka maupun seleksi mutasi dan dilaksanakan pelantikan.

h. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur. Tahun 2023, telah terbit izin belajar sebanyak 84. Peserta tugas belajar biaya non APBD sebanyak 3 (tiga) Orang dari target sebanyak 15 orang. Rendahnya capaian pengiriman tugas belajar karena menyesuaikan dengan usulan dari PNS. Tugas belajar yang dibiaya dari non APBD menyesuaikan dengan adanya pengumuman penerimaan beasiswa dari Kementerian/Lembaga lainnya. Pengelolaan peserta Program Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan terealisasi sejumlah 10 orang.

i. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Sub Kegiatan ini melaksanakan berbagai jenis pelaksanaan Diklat, yaitu dijlat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Diklat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak eksternal antara lain Bandiklat DIY, PPSDM, Universitas dan lembaga pelaksana diklat lainnya. Adapun jumlah pelaksanaan diklat tahun 2023 tercantum pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2023

No	Jenis DIklat	Realiasi
1	Diklat Kepemimpinan	88 Orang
2	Diklat Fungsional	12 Orang
3	Diklat Teknis	577 Orang

j. Pembinaan Disiplin Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS sebagaiman telah diganti menjadi peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan Disiplin Pegawai. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati/larangan dilanggar oleh PNS. Penegakan disiplin PNS berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS. Tahun 2023, telah terbit sebanyak 11 (sebelas) Keputusan Hukuman Disiplin PNS, dengan rincian 5 (lima) Hukuman Disiplin ringan, 2 (dua) Hukuman Disiplin Sedang, dan 4 (empat) Hukuman Disiplin Berat.

BKPP telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan sosialisasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Jumlah PNS wajib lapor LHKPN sebanyak 93 orang, telah mengisi formulir LHKPN secara *online*. Sehingga, tingkat kepatuhan aparatur

wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terealisasi 100 persen.

k. Pengelolaan Data Kepegawaian

Sub Kegiatan melaksanakan beberapa ketugasan antara lain pelaksanaan uji kesehatan CPNS/PNS, penyelenggaraan KORPRI, penganugerahan Piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Piagam dan medali penghargaan SLKS sudah terbit dan telah diambil di Kantor Kemendagri pada tanggal 22 Juni 2023 sebanyak ± 205 piagam dan medali yang merupakan usulan Januari Tahun 2022. Sedangkan untuk rencana penyerahan akan diagendakan pada Triwulan III/IV. Pada bulan Juli ini terbit kembali Surat Keputusan pemberian Satya Lancana Karya Satya sebanyak 105 piagam dan medali yang merupakan usulan Mei 2022. Sampai dengan Triwulan II telah terbit dan telah disampaikan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebanyak 188 surat keputusan.

Uji Kesehatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) orang PNS struktural dalam rangka seleksi jabatan administrator pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Uji Kesehatan PNS sakit telah terealisasi sebanyak 5 (lima orang). Kegiatan Pembekalan PNS Calon Purna telah dilaksanakan pada Triwulan II (Mei 2023) sebanyak 3 (tiga) gelombang untuk PNS calon purna 2024 sebanyak 358 orang.

l. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Sub Kegiatan ini adalah melakukan percepatan penginputan usulan PNS yang akan pensiun periode Januari - Maret 2023 di aplikasi SAPK BKN. Percepatan dilakukan karena aplikasi SAPK akan digantikan oleh aplikasi SIASN BKN. Melakukan update data pensiun di SIMASNEG dan mengganti kode TPP-nya.

Dalam rangka validasi dan update data ASN telah dibuat struktur kode jabatan baru di Simasneg dari 301 menjadi 401 sebanyak 42 OPD berikut kode unit kerja, satuan kerja dan jabatan kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 182/C/2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada perangkat Daerah.

Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Simasneg telah dilaksanakan ujicoba presensi digital (PRISCILA) untuk ASN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan 21 Puskesmas Kab Kulon Progo. Uji coba ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas server presensi. Dari hasil analisis dan evaluasi diperlukan pengusulan permintaan server baru khusus kepegawaian.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewan Kabupaten/Kota

BKPP menyelenggarakan Diklat Keistimewan bagi Pejabat Administrator (Eselon III) sebanyak 30 orang pada tahun 2023. Penyelenggaraan diklat ini bersumber dari Dana Keitimewaan DIY dan telah dilaksanakan pada bulan November 2023.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, tercantum pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPP Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2023 (thnn-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN	-	-	58,90	59,04	59,11	64,30	-	59,11	59,24	Perhitungan Capaian peningkatan Profesional ASN didapatkan dari kontribusi jumlah ASN yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Jumlah ASN yang berkinerja baik, dan Jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin. Persentase capaian kinerja tercapai 109%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Capaian indikator Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN tinggi karena tingginya minat pada kegiatan pengembangan kompetensi ASN

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, antara lain :

a. Keterbatasan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengadaan CASN hanya untuk formasi PPPK tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jabatan yang dapat diisi PPPK hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, sehingga untuk formasi jabatan lain masih belum memenuhi. Jumlah ASN yang pensiun tidak dapat diimbangi oleh jumlah ASN yang direkrut. Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan dan peraturan dari Kemendagri dan Kemenpan RB terkait pengadaan CASN.

b. Penyelesaian Pegawai Non ASN

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa penataan tenaga Non ASN diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Penjelasan pasal 66 penataan tersebut berupa verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Informasi teknis penataan tenaga Non ASN masih menunggu Peraturan Pemerintah Manajemen ASN.

Berkaitan dengan tenaga non ASN ini saat ini, beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah :

1. OPD tidak memberhentikan tenaga non ASN eksisting,
2. Pendanaan untuk tenaga non ASN tetap dianggarkan, pendapatan non ASN tidak boleh turun dari penerimaan tahun sebelumnya.
3. OPD tidak boleh mengangkat non ASN baru, khusus untuk Tenaga Juru Kemudi (sopir), tenaga kebersihan dan keamanan lebih tepat melalui *outsourcing* oleh masing-masing OPD sesuai kebutuhan dan disesuaikan anggarannya.

Padap prinsipnya pemerintah daerah mengikuti kebijakan dan penataan dari Pemerintah pusat, dengan tetap memberikan peluang bagi pegawai Non ASN, dengan mendorong untuk mengikuti Seleksi CASN.

Terkait Penataan dan Penyelesaian Tenaga Honorer dari jumlah Tenaga Honorer 3.560 orang telah diangkat menjadi PPPK sebanyak 110 orang (Nakes), 175 orang (Guru) dan 18 orang (Teknis). Dampak adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022 adalah adanya 9 orang Non ASN Kulon Progo akan diangkat menjadi PPPK Teknis TMT 1 November 2023.

c. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Penataan personil Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang harus selalu dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun aturan turunannya. Pada aspek pembinaan karier dilakukan dengan membangun kelompok talent dalam upaya mendapatkan pemangku jabatan yang sesuai kualifikasi maupun kompetensinya, sedangkan untuk peningkatan kompetensi maka perangkat daerah diberi kesempatan mengusulkan diklat maupun pelatihan yang memang betul-betul dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Pemerintah kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan manajemen ASN dengan sistem merit dan pada tahun 2023 dalam penilaian sistem merit oleh KASN mendapatkan predikat "Baik" dengan nilai 314.

d. Pengukuran Kompetensi bagi ASN

Kapasitas Salah satu indikator indeks profesionalitas ASN adalah dimensi kualifikasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi. Perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian

tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapakan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan.

Pengukuran kompetensi bagi setiap ASN merupakan kunci pokok dalam pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam kerangka pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintah. BKPP mempunyai 3 (tiga) orang asesor aparatur SDM yang dapat melakukan pengukuran kompetensi bagi pelaksana. Disamping itu setiap tahun terdapat anggaran untuk pengukuran kompetensi ke Balai PKP BKD DIY. Hasil pengukuran kompetensi kemudian dimasukkan dalam aplikasi E-MT yang selanjutnya akan dilengkapi dengan penilaian kompetensi teknis dari Tim Penilai Kinerja sehingga akan diperoleh data kelompok talen yang akan menduduki jabatan target atau jabatan kosong.

e. Penyelesaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan

Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat permasalahan antara lain: ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional (JF), belum ada petunjuk teknis khususnya bagi Jabatan Fungsional baru, belum tersedia Tim Penilai Angka Kredit (PAK) di pusat bagi beberapa JF, dan masih terdapat JF yang belum terdapat ketentuan tunjangan fungsionalnya.

f. Pengembangan sistem tambahan penghasilan pegawai

Sebagai aparatur yang dituntut bekerja dengan profesional dan selalu meningkat kualitas pelayanan dan kualitas *problem solving*, aparatur pemerintah WAJIB didukung dengan kualitas sistem penggajian dan tambahan penghasilan pegawai yang semakin baik dan kompetitif dalam dunia kerja. Beberapa aplikasi pendukung telah diintegrasikan dengan E-TPP, sehingga dapat mendorong ASN bekerja lebih efektif, tertib, dan mengkat kinerjanya.

g. Peningkatan Disiplin ASN

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) penegakan disiplin diharapkan dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Dalam

rangka memberikan panduan dalam penegakkan disiplin ASN, Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Bupati ini telah iinformasikan dan disosialisasikan kepada ASN. Jumlah hukuman disiplin ASN masih melebihi batas minimal penjatuhan hukuman disiplin ASN.

Adapun peluang dan yang dihadapi diantaranya :

Peluang :

a. Dukungan dari pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo;
b. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo yang cukup berkualitas dan didukung kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM. BKPP mempunyai 3 (tiga) orang asesor aparatur SDM yang dapat melakukan pengukuran kompetensi bagi pelaksana.
c. Adanya dukungan pendanaan dari Dana Keistimewaan;
d. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mendukung pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur di daerah;
e. Perkembangan sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan prima.

Tantangan :

a. Tuntutan publik terhadap manajemen PNS yang lebih baik dan transparan mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun.
b. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS.
c. Perkembangan kebijakan pemerintah khususnya di bidang manajemen aparatur yang perlu respon dan tindak lanjut segera.

Berdasarkan permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan tersebut, Isu-isu peting yang direkomendasikan dan perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, antara lain:

a. Melaksanakan Seleksi Penerimaan CASN

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki ASN sebanyak 6.132 orang Per 31 Desember 2023, yang terdiri dari 5.155 PNS dan 977 PPPK. Jumlah ASN yang ada masih jauh dari kebutuhan pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai yang signifikan. Kebutuhan pegawai jauh di atas angka tersebut yaitu 9.591 orang sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, beban pekerjaan aparatur juga semakin meningkat dan laju pensiun yang tidak diimbangi dengan pengangkatan CPNS. Sehingga membutuhkan tambahan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitasnya. Tahun 2024 diusulkan pengadaan CASN sebanyak 295 Formasi dan telah disetujui sejumlah tersebut oleh Kementerian PANRB.

b. Pengelolaan Data Kepegawaian

Data dan informasi kepegawaian merupakan bahan pokok dalam melakukan desain kebijakan kepegawaian. Oleh karena itu, pembenahan atau pengembangan fitur-fitur baru maupun proses integrasi data dengan aplikasi kementerian pusat maupun aplikasi lokal dalam manajemen data dan informasi kepegawaian yang diwujudkan dalam Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASNEG) sangat diperlukan.

c. Pembinaan Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai merupakan kunci pokok agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara optimal. Sebagai OPD pembina pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selalu berupaya meningkatkan pembinaan terhadap disiplin aparatur. Sosialisasi PP Nomor 94 tahun 2021 perlu terus dilakukan agar tercipta sumber daya aparatur yang professional dan berdisiplin. Tahun 2024 merupakan tahun politis karena akan dimulai pemilihan Kepala Daerah, untuk menjaga netralitas ASN telah ditetapkan Edaran Bupati Nomor 800/1380 tanggal 4 Juli 2024

tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Edaran tersebut mengamanatkan pelaksanaan Ikrar Netralitas ASN dan Non ASN secara bersama serta penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap pegawai ASN dan Non ASN selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024.

d. Pengembangan SDM (*Human Capital Development Plan*/HCDP)

Peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan oleh aparatur, terutama pejabat struktural. Oleh karena itu, dalam proses pemetaan atau penjaringan calon pejabat struktural perlu melalui mekanisme akademis agar mendapatkan hasil yang lebih sesuai antara minat dan penempatan. Beragai kegiatan pengembangan kompetensi melalui kegiatan diklat juga perlu didorong, dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Diklat (SIDIK) telah memudahkan dalam proses pengusulan kebutuhan diklat dan memudahkan dalam proses inventarisasi dan dokumentasi data pelaksanaan diklat yang telah diikuti oleh ASN.

Kebutuhan diklat yang menjadi prioritas pada tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga pengelola keuangan dan Aset/Barang Daerah.
2. Peningkatan kinerja aparatur sebagai petugas lapangan.
3. Peningkatan kualitas, efektifitas, dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta kualitas hasil pekerjaan aparatur pemerintah daerah.
5. Peningkatan kompetensi dan kualias kepemimpinan pejabat structural di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan kompetensi pertugas pelaksana/staf yang bekerja tidak optimal

e. Penataan Aparatur ASN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Oleh karena itu tugas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas untuk segera melakukan penataan dan penempatan aparatur.

2.4 Reviu terhadap RKPD

Pada prinsipnya hubungan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah berbanding lurus. Hal ini disebabkan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam program dan kegiatan mengacu pada Renstra OPD.

Pada tahapan proses, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selalu melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah. Proses tersebut untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara Renstra dengan pelaksanaan program kegiatan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	BKPP				**104.605.510.000**					**143.272.722.110**	
1	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Kulon Progo**			**248.570.000**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	Kab. Kulon Progo			**462.698.000**	
	SEKRETARIAT DAERAH	**Kab. Kulon Progo**			**248.570.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**	**Kab. Kulon Progo**			**462.698.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100%**	**248.570.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100%**	**462.698.000**	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan*	100%	*248.570.000*	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan*	2 Laporan	*462.698.000*	
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	60 Orang	248.570.000	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	2 Laporan	462.698.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Kab. Kulon Progo**			**104.356.940.000**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Kulon Progo**			**142.810.024.110**	
	KEPEGAWAIAN	**Kab. Kulon Progo**			**104.356.940.000**	**KEPEGAWAIAN**	**Kab. Kulon Progo**			**142.810.024.110**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**99.051.130.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**138.690.496.010**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu*	23 Dok	*26.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu*	23 Dok	*24.968.500*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	15.684.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dok	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	9.284.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	14 Laporan	*98.287.130.000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	14 Dokumen	*138.225.100.166*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	98.207.130.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	138.159.902.566	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	56.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	8.647.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	2 Dok	*15.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*1 Dok*	*6.000.000*	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	4 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelatihan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	*2 Dok*	*91.000.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	*2 Dok*	*107.153.500*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	16.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.212.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.941.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Penambahan Aset*	*58 Unit*	*320.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Penambahan Aset*	*2 Unit*	*7.504.000*	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	58 Unit	320.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	7.504.000	Kebijakan Tahun 2025 belanja pengadaan Sarana Prasarana terbatas pada kemampuan keuangan daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	*24 Laporan*	*175.000.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	*24 Laporan*	*190.550.994*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.24.962	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120.336.032	Kenaikan standar upah bagi Tenaga Non ASN, dan kenaikan pembayaran premi BPJS
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Laporan*	*133.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Laporan*	*129.218.850*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	94.037.550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	22.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	19.581.300	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,23 %**	**5.305.810.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,23 %**	**4.119.528.100**	
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	**84,07 %**				**Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur**	**84,07 %**		
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	**99,98 %**				**Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur**	**99,98 %**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*3 Dok*	*1.200.000.000*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*3 Dok*	*969.361.000*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2 Dok	825.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2 Dok	755.682.900	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	275.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	120.422.500	Pengurangan anggaran karena tidak ada Uji Kesehatan CPNS pada tahun 2024.
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	100.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	93.255.600	
	Mutasi dan Promosi ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat*	*3 Dok*	*655.000.000*	*Mutasi dan Promosi ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat*	*3 Dok*	*548.809.500*	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	230 Orang	75.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	230 Dok	48.637.400	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dok	80.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dok	53.150.100	
	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dok	500.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dok	447.022.000	Proses pengelolaan promosi jabatan selama jabatan Bupati dijabat oleh Penjabat Bupati, melalui proses yang lebih panjang, sehingga mengurangi intensitas kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Kompetensi ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	*4 Dok*	*3.275.810.000*	*Pengembangan Kompetensi ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	*4 Dok*	*2.484.717.100*	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	16.379.200	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	30.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	139.436.600	Keluaran yang dicantumkan adalah peserta yang mengikuti Diklat PPG, sedangkan keluaran untuk jumlah peserta yang mengikuti Tugas Belajar tidak dimasukkan mengingat jumlahnya tergantung pada peminat
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dok	3.153.810.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dok	2.287.043.700	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	110 Orang	52.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	41.857.600	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*2 Dok*	*175.000.000*	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*2 Dok*	*116.640.500*	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dok	25.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27 Dok	15.683.700	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	150.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	100.956.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada intinya merupakan hasil usulan Perangkat Daerah yang secara tidak langsung merupakan perwujudan pemenuhan kepentingan publik khususnya Aparatur Sipil Negara karena tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mempertimbangkan kebutuhan ASN, meliputi pengembangan kompetensi pegawai, mutasi dan promosi pegawai, kesejahteraan serta kebutuhan pengadaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemda DIY

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, menyebutkan bahwa Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi sebagaimana yang menjadi ketugasan Kemenpan RB adalah pembinaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 (empat) pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi. Empat pilar visi Indonesia 2045 yaitu: 1) Pembangunan Manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3) Pemerataan Pembangunan, dan 4) Pemantapan ketahanan nasional dan Tata kelola pemerintahan. Perwujudan pilar pertama sesuai dengan semangat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur Negara.

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY), sebagai administrator kepegawaian di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan memberikan layanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi pegawai baik dari institusi pemerintah maupun dari personal PNS. Tuntutan akan kecepatan, keakuratan serta transparansi informasi menjadi hal yang harus diutamakan.

Penajaman kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Kulon Progo antara lain melalui penyempurnaan berbagai regulasi dan kebijakan daerah, menyangkut urusan kepegawaian, pengembangan

sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis SAPK serta SIMASNEG (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara), Penegakan disiplin pegawai dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian lainnya sesuai tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPP

Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam perubahan Rencana Strategis Tahun 2023– 2026 tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	Nilai	A
	2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BKP)	Opini BPK	WTP
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75

Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam perubahan Rencana Strategis tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran BKPP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kerja
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah	100 %
2	Meningkatnya kualitas aparatur	Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN	59,11 %

3.3. Program dan Kegiatan BKPP

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo mengampu 3 (Tiga) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

III. Program Kepegawaian Daerah

8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

   Sub Kegiatan:

   a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
   b. Pengelolaan Data Kepegawaian
   c. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

9. Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN

   Sub Kegiatan:

   a. Pengelolaan Mutasi ASN
   b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   c. Pengelolaan Promosi ASN

10. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

    Sub Kegiatan:

    a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
    b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
    d. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

11. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

    Sub Kegiatan:

    a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    b. Pembinaan Disiplin ASN

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 sebagai perangkat urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta penyandingan Keluaran sub kegiatan pada BKPP sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 dengan keluaran riil yang dilaksanakan oleh BKPP pada tahun anggaran 2025 tercantum pada Tabel 4.1.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BKPP tahun 2025, masih banyak yang belum terakomodir dalam rencana penganggaran. Dalam rangka melakukan transformasi sebagaimana mandat Presiden tentang Reformasi Birokrasi, terdapat 3 (tiga) hal penting yang perlu diperhatikan yaitu Pengembangan kompetensi pegawai, perubahan struktur organisasi dan transformasi sistem kerja yang didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta proses bisnis yang terintegrasi melalui satu data SIASN, dan pengembangan SIMASNEG.

Tabel 4.1
Pemetaan Indikator Kinerja Dan Target Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**143.272.722.110,00**							**108.254.660.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**462.698.000,00**							**248.570.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**462.698.000,00**							**248.570.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan***	**-**			**100 %**	**462.698.000,00**						**-**	**248.570.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah peserta pelatihan internalisasi keistimewaan*	-			60 Orang	462.698.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	462.698.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**142.810.024.110,00**							**108.006.090.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**142.810.024.110,00**							**108.006.090.000,00**	
1,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**138.690.496.010,00**						**-**	**102.514.740.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	24.968.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.684.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	9.284.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Dokumen	138.225.100.166,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	101.863.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	138.159.902.566,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		101.777.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	56.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	8.647.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			1 Dokumen	6.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	107.153.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	97.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	17.212.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.941.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pem	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												erintahan				
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			6 Unit	7.504.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.504.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	190.550.994,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.214.962,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120.336.032,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pem	-		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												erintahan				
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	129.218.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	94.037.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	19.581.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Cakupan Pengembangan Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur***	**-**			**45,23 % 84,07 % 99,98 %**	**4.119.528.100,00**						**-**	**5.491.350.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			3 Dokumen	969.361.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	755.682.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	120.422.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	93.255.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat*	-			3 Dokumen	548.809.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	660.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				230 Dokumen	48.637.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	53.150.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	447.022.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	-			4 Dokumen	2.484.717.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.399.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	16.379.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya	-		43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Manusia				
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				24 Orang	139.436.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	2.287.043.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.266.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	41.857.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			2 Dokumen	116.640.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya	-	-	197.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Manusia				
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				27 Dokumen	15.683.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	100.956.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	J U M L A H							**143.272.722.110,00**							**108.254.660.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun sebagai dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rancangan Akhir Rencana Kerja BKPP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah menjabarkan secara rinci hal-hal yang akan dicapai untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja telah menuangkan usulan Program Kegiatan tahun 2025. Terdiri dari penjabaran target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program kegiatan tersebut disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPP, sekaligus untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang tersebut dapat diakomodir oleh pengambil kebijakan maupun pihak terkait lainnya, agar BKPP mampu bekerja secara efektif dan efisien terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas pada tahun 2025.

Wates, 2 Agustus 2024

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN KULON PROGO,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19730512 199803 1 008

Rencana Kerja 2025

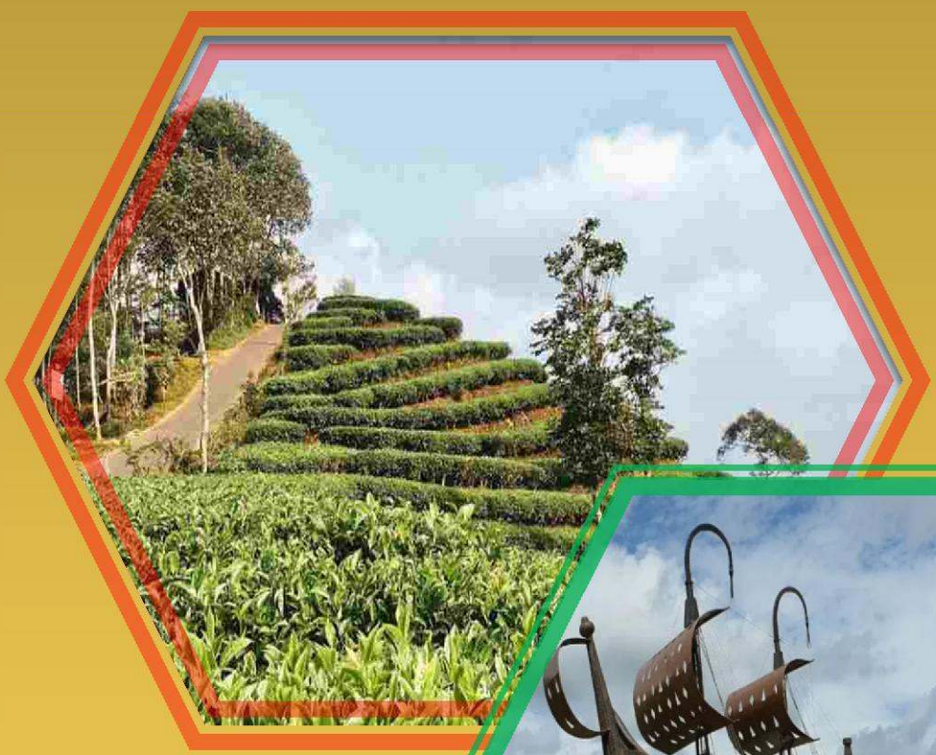

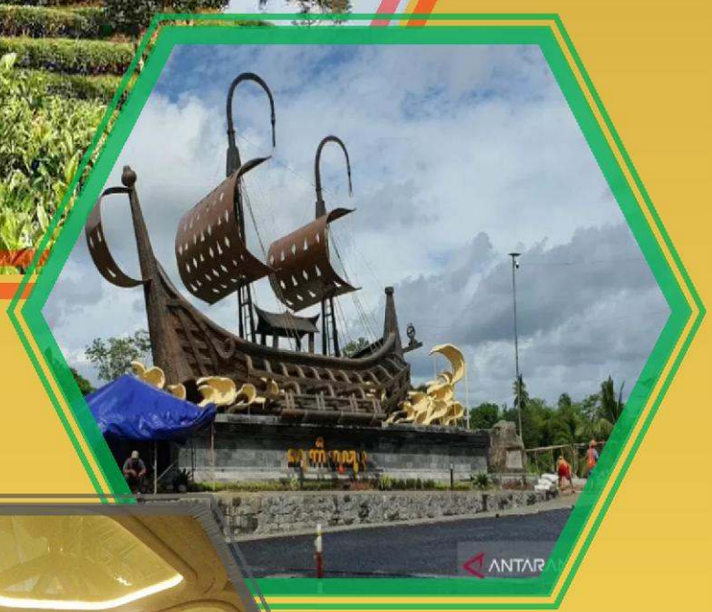

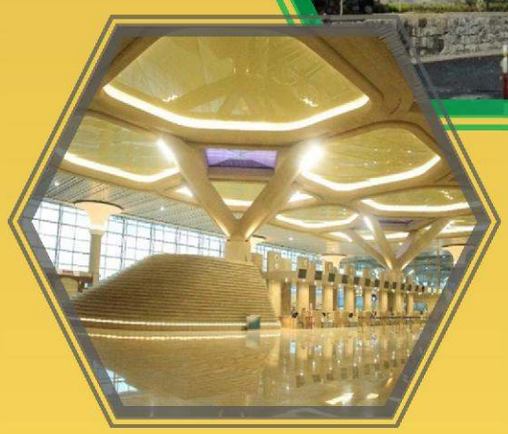

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Jl. Sugiman, Gg. Bispa,Wates Kulon Progo Telp/Fax (0274) 773159

email : inspektorat@kulonprogokab.go.id,website : www.inspektorat.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat disusun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan kegiatan, sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran derah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Kami berharap semoga Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini dapat memberikan arah dan pedoman kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Wates, 2 Agustus 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH

ARIF PRASTOWO, S.Sos, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19700514 199603 1 004

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
	2.3	Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	14
	2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		22
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	22
	3.3	Program dan Kegiatan	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		30
BAB V	PENUTUP		37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah , perumusan dan penetapan renja SKPD.

Renja Inspektorat Daerah Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, dan Renstra Inspektorat Daerah Kulon Progo, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RPD Tahun 2023-2026. Keterkaitan renja dengan dokumen-dokumen lain yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Renja dengan dokumen lain

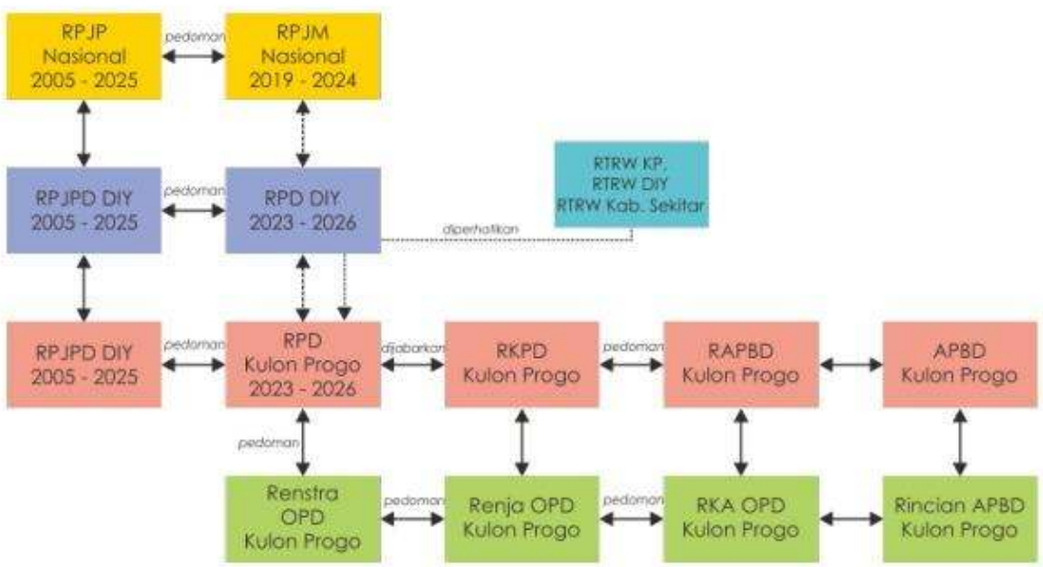

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

k. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);

n. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13);

o. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor : 88 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ;

p. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026;

q. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

r. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Rencana Kerja OPD ini bertujuan untuk :

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
c. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelengg araan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 20 Sub kegiatan. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan sumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 5.984.442.717,00.

Untuk capaian realisasi keuangan dari anggaran sebesar Rp Rp 5.984.442.717,00, pada tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp 5.852.262.447,00 sehingga capaian keuangannya sebesar 97,79 %.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun sebelumnya, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	0
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	94 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	100	23 dokumen	0 dokumen	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100	21 Dokumen	0 Dokumen	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**152 laporan**	**38 laporan**	**38 laporan**	**38 laporan**	100	**38 laporan**	**0 laporan**	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	0 bulan	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	0 Bulan	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Dokumen	0 Dokumen	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**24 dokumen**	**5 dokumen**	**5 dokumen**	**5 dokumen**	100	**5 dokumen**	**0 dokumen**	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 semester	2 semester	2 semester	2 semester	100	2 semester	6 semester	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	3 orang	9 orang	100,00
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**68 dokumen**	**17 dokumen**	**17 dokumen**	**17 dokumen**	100	**17 dokumen**	**0 dokumen**	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	15 paket	100
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48 dokumen**	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	30 laporan	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan aset**	**77 unit**	**0 unit**	**15 unit**	**15 unit**	**100**	**41 unit**	**56 unit**	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 unit	0 unit	15 unit	15 unit	100	41 unit	56 unit	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**96** laporan	**24 laporan**	**24 laporan**	**24 laporan**	100	**24 laporan**	**60 laporan**	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	30 laporan	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	30 laporan	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**12 laporan**	**3 laporan**	**3 laporan**	**3 laporan**	100	**3 laporan**	**0 laporan**	
6.01.01.2.09.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	19 unit	19 unit	19 unit	100	19 unit	0 unit	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	**12 unit**	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	8 unit	66,7
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**712 unit**	178 unit	178 unit	178 unit	100	178 unit	406 unit	57,0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**99,43**	**86.67 %**	**86.93 %**	**94,54%**	**108,7**	**89.19 %**	**98,61 %**	99,2%
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan pengawasan internal**	**1.803 laporan**	**424 laporan**	**424 laporan**	**424 laporan**	**100**	**424 laporan**	**1.239 laporan**	**68,0**
6.01.01.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168 laporan	42 laporan	42 laporan	42 laporan	100	42 laporan	126 laporan	75
6.01.01.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.223 laporan	295 laporan	295 laporan	295 laporan	100	295 laporan	885 laporan	72,4
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	412 laporan	87 laporan	87 laporan	87 laporan	100	87 laporan	213 laporan	51,7
6.01.01.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriiksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	14 laporan	70,0
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah laporanpengawasan dengan tujuantertentu**	**47 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**100**	**15 laporan**	**38 laporan**	**80,90**
6.01.01.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100	15 laporan	38 laporan	80,90
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**100%**	**100,00%**	**86,90%**	**100%**	**115,07%**	**90,48%**	**14,29%**	**14,29%**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah laporan pendampingan dan asistensi**	**532 laporan**	**133 lsporsn**	**133 laporan**	**133 laporan**	**100**	**133 laporan**	**399 laporan**	75
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	168 laporan	42 laporan	42 laporan	42 laporan	100	42 laporan	126 laporan	75
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	15 laporan	75
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi danVerifikasi Penegakan Integritas	344 laporan	86 laporan	86 laporan	86 laporan	100	86 laporan	258 laporan	75

Secara umum capaian fisik dan keuangan sudah sesuai target, akan tetapi ada beberapa kendala pada pelaksanaan kegiatan karena disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Beberapa kegiatan tidak bisa diprediksi pelaksanaannya karena sifat insidentil, antara lain pemeriksaan tujuan tertentu, khusus/kasus, pemeliharaan sarana prasarana kantor, dan lain-lain.
2. Beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena melibatkan pihak eksternal, antara lain reviu perencanaan dan penganggaran, reviu DAK Fisik.

Dari data tersebut realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 sebesar 97,79%.

Dengan capaian indikator kinerja utama rata-rata diatas sebesar 98 % dengan kriteria sangat tinggi, dan realisasi keuangan sebesar 97,79%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah sudah didukung dengan efisiensi anggaran yang ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi capaian tahun 2024, sampai dengan triwulan II 2024
2	Persentase peningkatan hasil pengawasan	-	-	86.92	89,70	93,65	99,43	96,39	44,29	93,65	99,43	
3	Peningkatan kapabilitas APIP	-	-	3.00	3,10	3,20	3,30	3,15	3,15	3,20	3,30	
4	Indeks Maturitas SPIP	-	-	2.9	3	3,10	3,20	3,15	3,15	3,10	3,20	

Dari tabel diatas, capaian kinerja selama tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah, dari target 100%, realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan kriteria **sangat tinggi**. Realisasi tercapai hasil capaian semua indikator program telah melebihi target yang ditetapkan.

b. Capaian indikator Persentase peningkatan hasil pengawasan pada tahun 2023 adalah **96,73**, melebihi dari target **86,92**%. Prosentase capaian adalah 111,27% dengan kriteria **sangat tinggi**

   Komponen capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu dari 171 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 143 rekomendasi. Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu diharapkan menjadi indikator tingkat kepatuhan dan komitmen obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi temuan pemeriksaan dan kesadaran dalam perbaikan tata kelola pemerintahan juga semakin tinggi.

   Komponen penilaian jumlah review yang dilaksanakan tepat waktu dari target 345 telah dilaksanakan sejumlah 345. Demikian juga untuk komponen Jumlah OPD dan Desa yang diperiksa dari target 129 dapat tercapai sesuai target sejumlah 129.

   Dengan adanya beberapa kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan di luar PKPT, karena adanya regulasi yang terbit di pertengahan tahun berjalan, sehingga menambah kuantitas kegiatan pengawasan, secara umum target dapat tercapai dengan beberapa penyesuaian dan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya. Capaian juga tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang solid di lingkungan APIP untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan.

   Indikator Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP minimal A, dari target yang ditetapkan sejumlah 42 perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan, semua perangkat daerah sudah mencapai nilai A. Dengan capaian ini diharapkan menjadi tolok ukur tingkat implementasi SAKIP yang punya peran strategis dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan.

   Indikator nilai Maturitas SPIP Hasil Validasi BPK/*Self Assesment* level 3, dari hasil evaluasi oleh APIP, semua OPD sudah mencapai nilai A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi telah melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian semakin tinggi nilai maturitas SPIP diharapkan menunjukkan kualitas pengendalian intern juga semakin baik.

c. Indikator Capaian peningkatan kapabilitas APIP, dari target 3,0, realisasi indikator ini adalah 3,15 sehingga prosentase capaian sebesar 105,0% dengan kriteria **sangat tinggi.**

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang dikeluarkan BPKP dengan nomor : PE.09.03/LHP-444/PW12/6/2023 tanggal 30 November 2023, penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi karakteristik kapabilitas APIP level 3 *(delivered)*. Dari hasil penilaian kapabilitas APIP menunjukkan bahwa komponen dukungan pengawasan (*enabler*) dari 5 elemen yang nilai, 1 elemen yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja telah berada pada level 4, sedangan 4 elemen lainnya masih berada level 3. Pada komponen aktifitas pengawasan *(delivery)* dan kualitas pengawasan *(result)* yang terdiri dari elemen peran dan layanan sudah berada pada level 3.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP nomor : PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, APIP dengan capaian kapabilitas pada level 3, memiliki karakteristik:

1). APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah *(assurance activities*);
2). APIP mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3). APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Karakteristik ini selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk :

1). Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
2). Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
3). Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
4). APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5). Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas; serta

6). Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

d. Capaian indeks maturitas SPIP dari target 2,9, realisasi indikator adalah 3,15. Prosentase capaian indikator sebesar 108,62% dengan kriteria **sangat tinggi**.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dikeluarkan BPKP, nomor : PE.09.03/LHP-573/PW12/3/2023 tanggal 28 Desember 2023, hasil evaluasi menyimpulkan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi karakteristik pada *Level 3 (Terdefinisi)*.

Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Beberapa hasil evaluasi yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1). Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi.

2). Belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi). Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dapengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

3). Pada komponen penetapan tujuan masih dijumpai sasaran yang kurang tepat dan kurang dapat mengungkit capaian sasaran diatasnya.

4). Pada komponen struktur dan proses, belum seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi dan kebijakan, implementasi, hasil serta efektifitas tindak lanjut secara berkala, konsisten, dan terdokumentasi untuk menangani residual risk sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja. RTP atas risiko operasional perangkat daerah telah diimplementasikan namun atas RTP yang dirumuskan belum efektif menurunkan level risiko, karena belum sepenuhnya mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

a. Permasalahan dan hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan, terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1). Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan belum sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diamanatkan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan besaran paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Akan tetapi karena kendala keterbatasan anggaran, ketentuan tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan hambatan tersendiri, karena tujuan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dimana kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

2). Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai.

Jumlah kendaraan roda empat yang ada saat ini hanya 4 unit, dengan kondisi, kendaraan yang layak operasional hanya 2 unit. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk satu kali penugasan terdapat 8 tim pemeriksaan, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit.

3). Bangunan gedung perkantoran yang sudah tidak memadai. Dengan jumlah ASN yang terus bertambah seiring pemenuhan SDM APIP, kapasitas gedung perkantoran Inspektorat Kabupaten Kulon Progo sudah tidak memadai lagi. Kendala lain, tidak ada ruangan khusus untuk penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen penting sehingga keberadaan arsip dan dokumen tersebut rawan untuk hilang ataupun rusak.

3). Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 32 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah.

Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 80 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 32 orang sehingga masih kurang 48 orang. Permasalahan ini untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia. Di samping itu jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa menyesuaikan dengan skala prioritas dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko.

4). Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan serta teknologi informasi.

5). Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang belum dapat selesai 100 %. Permasalahan ini tentunya perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal.

6). Diterapkannya aplikasi Siswaskeudes dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa/Kalurahan belum didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Belum adanya regulasi dan panduan yang jelas serta kesiapan sarana prasarana pendukungnya sehingga pengawasan belum dapat berjalan lebih efektif.

b. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah, tentunya akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap tujuan dan sasaran pemerintah daerah yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1). Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh APIP, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting.

2). APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan auditi untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi auditi.

3). Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih

dibandingkan audity untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui probity audit.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari beberapa permasalahan, tantangan dan peluang tersebut, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1). Belum adanya dukungan pendanaan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan sesuai regulasi yang ada.
2). Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3). Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja dan kesiapan sarana prasarana pendukung.
4). Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
5). Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian dan analisa terhadap kebutuhan Inspektorat Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Inspekorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Inspektorat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**5.110.547.356,49**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Inspektorat Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**9.310.385.847**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**25 dokumen**	**75.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**25 dokumen**	**52.892.500**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	38.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15.181.500	Pengurangan honor THL
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	37.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	37.711.000	Tambahan akibat standarisasi harga barang/jasa
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**38 laporan**	**3.984.137.356,49**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**38 Laporan**	**8.667.861.15**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.923.137.356,49	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.596.643.355	Tambahan TPP
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	57.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	66.600.000	Tambahan standarisasi
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	4.617.800	Tambahan belanja makan minum rapat
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**6 dokumen**	**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**4 dokumen**	**45.235.000**	
a	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	2 dokumen	20.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	0 laporan	**0**	Penilaian angka kredit memakai SKP

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pendiidkan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	30.000.000	Pendiidkan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	45.235.000	Pemenuhan diklat APIP
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**17 dokumen**	**95.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**17 dokumen**	**97.040.800**	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	23.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	21.023.800	Penyesuaian SSH
b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	72.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	76.017.000	Tambahan belanja perjalanan dinas
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Inspektorat Daerah	Jumlah penambahan aset	**2 unit**	**512.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Inspektorat Daerah	Jumlah penambahan aset	**7 unit**	**48.650.900**	
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (laptop : 10 unit dan PC : 3 unit, scanner : 3 unit, meja kerja :10 unit, kursi kerja :15 unit)	2 unit	512.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (laptop : 10 unit dan PC : 3 unit, scanner : 3 unit, meja kerja :10 unit, kursi kerja :15 unit)	7 unit	48.650.900	Penyesuaian pagu anggaran
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	**24 laporan**	**184.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	**24 laporan**	204.010.592	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	62.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.686.832	Penyesuaian tarif listrik dan air
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	122.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	122.323.760	Penyesuaian Standaraisasi barang/jasa
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**3 laporan**	**210.410.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**3 laporan**	501.388.200	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	169.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	159.901.800	Rasionalisasi belanja makan minum rapat
b	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	25.410.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	34.793.100	Tambahan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	178 unit	16.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	178 unit	306.693.300	Tambahan kebutuhan
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Inspektorat Daerah**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**93.38 %**	**976.912.247**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Inspektorat Daerah**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**93.38 %**	**168.110.900**	
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah laporan pengawasan internal**	100%	**811.419.967**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah laporan pengawasan internal**	**429 laporan**	**145.192.600**	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	42 laporan	166.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	42 laporan	15.979.800	Pengurangan honorarium
b	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	295 laporan	248.369.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	295 laporan	41.268.000	Pengurangan honorarium
c	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	87 laporan	318.420.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	87 laporan	19.422.700	Pengurangan honorarium
d	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriiksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 dokumen	78.630.967	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriiksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 dokumen	68.522.100	Pengurangan honorarium
2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**14 laporan**	**165.492.280**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**14 laporan**	**22.918.300**	
a	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 laporan	165.492.280	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 laporan	22.918.300	Pengurangan honorarium
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Inspektorat Daerah	**Persentase Peningkatan Pendampingan dan Asistensi**	**94,05**	**272.975.820**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Inspektorat Daerah	**Persentase Peningkatan Pendampingan dan Asistensi**	**94,05%**	**116.958.600**	
1	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	**133 laporan**	272.975.820	**Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	**133 laporan**	116.958.600	
a	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 laporan	58.276.520	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42 laporan	5.646.300	Pengurangan honorarium

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	((3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan	156.606.060	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan	85.998.600	Pengurangan honorarium
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	86 laporan	58.093.240	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	86 laporan	25.313.700	Rasionalisasi belanja perjalanan dinas
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	SEKRETARIAT DAERAH					**SEKRETARIAT DAERAH**					
	PRROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Inspektorat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**0**	**0**	**PRROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Inspektorat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**0**	**0**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**0**	**0**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Inspektorat Daerah	**Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**0**	**0**	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	**0**	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	**0**	0	Tidak mengusulkan anggaran

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan, maka secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan yang secara langsung didasarkan dari usulan masyarakat. Akan tetapi sebagai perangkat daerah, Inspektorat terlibat dalam dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang RKPD Kabupaten.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang secara spesifik ditujukan kepada Inspektorat Daerah selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap peningkatan pelaksanaan pengawasan yang sudah termuat dalam program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

OPD : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

“Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif”.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk

merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
c. Perluasan akses dan kesempatan

Tema Pembangunan tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah ***"Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"*** yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni: 1). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; 2). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari; 7). Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri; dan 8). Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

Adapun untuk Tema indikatif pembangunan DIY tahun 2025 yang bersumber dari RKPD DIY tahun 2025 adalah:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan OPD Inspektorat Daerah adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.**

Adapun Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah yang ditetapkan adalah : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dan Meningkatnya Kapabilitas APIP dan SPIP.

Nilai-nilai Organisasi yang dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Integritas

   Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap,

bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan *(trust)* atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesionalisme

   Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

3. Obyektif

   Fungsi pengawasan timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang atau diragukan.

4. Independen

   Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut untuk mempertahankan independesinya. Aparat pengawasan tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.

5. Perbaikan terus-menerus

   Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

6. Kapabilitas

   Dalam rangka mengantisipasi perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang cepat dan dinamis diperlukan aparat pengawas yang memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga aparat pengawasan akan terpacu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil, untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral, etika untuk berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi.

7. Komitmen

   Diperlukan adanya komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Ini berarti masing-masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, dengan cara mengedepankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar unsur organisasi untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Tanggung jawab ditingkat pimpinan merupakan hal yang sangat

penting dan krusial bagi organisasi untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase peningkatan hasil pengawasan	93,65
		Meningkatnya Kapabilitas APIP dan SPIP	Peningkatan kapabilitas APIP	3,2
			Indeks Maturitas SPIP	3,1

3.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2023–2026, pada bab sebelumnya, maka selanjutnya disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Daerah tahun 2025 melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentae Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	Kabupaten Kulon Progo	**0**	**0**	Dana Keistimewaan		95,83%	140.640.000
4.01.04.206.	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Dukungan sebesar 4,16% terhadap capaian program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan**	Kabupaten Kulon Progo	0	0	Dana Keistimewaan		18 laporan	140.640.000
4.01.04.206.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Kabupaten Kulon Progo	0	0	Dana Keistimewaan		18 laporan	140.640.000
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**9.595.455.347**				**5.932.728.381,24**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kulon Progo	**100%**	**9.310.385.847**	APBD		**100%**	**4.773.838.381,24**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	Kabupaten Kulon Progo	25 dokumen	**52.892.500**	APBD		23 dokumen	**73.850.000**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	4 dokumen	15.181.500	APBD		2 dokumen	35.000.000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	21 dokumen	37.711.000	APBD		21 dokumen	38.850.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Kulon Progo	**38 laporan**	**8.667.861.15**	APBD		**38 laporan**	**4.021.437.381,24**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	8.596.643.355	APBD		12 bulan	3.957.437.381,24
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kulon Progo	12 dokumen	66.600.000	APBD		12 dokumen	60.000.000
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kulon Progo	14 laporan	4.617.800	APBD		14 dokumen	4.000.000
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**Kabupaten Kulon Progo**	**6 dokumen**	**45.235.000**	**APBD**		**7 dokumen**	**55.000.000**
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kulon Progo	2 dokumen	**0**	APBD		2 dokumen	20.000.000
6.01.01.2.05.09	Pendiidkan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Kulon Progo	15 orang	45.235.000	APBD		5 orang	35.000.000
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**Kabupaten Kulon Progo**	**17 dokumen**	**97.040.800**	**APBD**		**17 dokumen**	**97.000.000**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Kulon Progo	5 paket	21.023.800	APBD		5 paket	24.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kulon Progo	12 laporan	76.017.000	APBD		12 laporan	73.000.000
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah penambahan aset	**Kabupaten Kulon Progo**	**7 unit**	**48.650.900**	**APBD**		**50 unit**	**120.000.000**
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Kulon Progo	7 unit	48.650.900	APBD		50 unit	120.000.000
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**Kabupaten Kulon Progo**	**24 laporan**	204.010.592	**APBD**		**24 laporan**	**188.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Kulon Progo	12 laporan	81.686.832	APBD		12 laporan	63.000.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Kulon Progo	12 laporan	122.323.760	APBD		12 laporan	125.000.000
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kabupaten Kulon Progo**	**3 laporan**	501.388.200	**APBD**		**3 laporan**	**218.551.000,00**
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Kulon Progo	19 unit	159.901.800	APBD		19 unit	173.000.000,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kabupaten Kulon Progo	3 unit	34.793.100	APBD		3 unit	27.951.000,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Kulon Progo	178 unit	306.693.300	APBD		178 unit	**218.551.000,00**
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**93,38 %**	**168.110.900**	**APBD**		**99,05%**	**806.930.000**
6.01.01.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan pengawasan internal**	Kabupaten Kulon Progo	429 laporan	145.192.600	APBD		**449 laporan**	**739.147.880**
6.01.01.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Kulon Progo	42 laporan	15.979.800	APBD		42 laporan	150.416.593
6.01.01.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Kulon Progo	295 laporan	41.268.000	APBD		295 laporan	225.809.677
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Kulon Progo	87 laporan	19.422.700	APBD		87 laporan	281.467.513
6.01.01.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriiksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Kulon Progo	5 dokumen	68.522.100	APBD		5 dokumen	81.380.181

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasandengan Tujuan Tertentu	**Kabupaten Kulon Progo**	14 laporan	22.918.300	**APBD**		**16 laporan**	**67.782.120**
6.01.01.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Kulon Progo	14 laporan	22.918.300	APBD		16 laporan	67.782.120
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Kabupaten Kulon Progo**	94,05 **%**	116.958.600	**APBD**		**100%**	**211.320.000**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	**Kabupaten Kulon Progo**	133 laporan	116.958.600	**APBD**		133 laporan	**211.320.000**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kulon Progo	42 perangkat daerah	5.646.300	APBD		42 perangkat daerah	24.090.480
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Kulon Progo	5 kegiatan	85.998.600	APBD		5 laporan	162.082.440
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Kulon Progo	86 perangkat daerah	25.313.700	APBD		86 laporan	24.935.760

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2023–2026, pada bab sebelumnya, maka selanjutnya disusun langkah-langkah Rencana Kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan dan sub kegatan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Akan tetapi Rencana Kerja dan pendanaan ini akan bisa berubah sesuai dengan analisa dan perhitungan kebutuhan dan akan dilakukan dalam tahapan perencanaan selanjutnya. Hal ini terutama dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan dalam penguatan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan besaran paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Rincian Rencana Kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Pagu Anggaran : Rp 9.902.148.647

Sumber dana : APBD Kabupaten

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**9.902.148.647,00**							**5.634.660.600,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.595.455.347,00**							**5.606.709.600,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.595.455.347,00**							**5.606.709.600,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	-			**100 %**	**9.310.385.847,00**						-	**4.589.587.356,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	52.892.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	73.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15.181.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	37.711.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		38.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			38 laporan	8.667.861.155,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	3.984.137.356,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	8.596.643.355,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		3.923.137.356,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	66.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		57.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.617.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			6 dokumen	45.235.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	45.235.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah*	-			6 dokumen	97.040.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	21.023.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	76.017.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			22 unit	48.650.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	48.650.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	204.010.592,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	193.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.686.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	122.323.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	194.694.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	190.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	159.901.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		173.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				178 Unit	34.793.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		17.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan***	-			**93,38 %**	**168.110.900,00**						-	**806.856.084,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah laporan pengawasan internal*	-			429 laporan	145.192.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo	-	739.073.964,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	15.979.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		150.416.593,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				295 Laporan	41.268.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		225.809.677,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				87 Laporan	19.422.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		281.467.513,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	68.522.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		81.380.181,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasandengan Tujuan Tertentu*	-			14 laporan	22.918.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan dengan tujuan tertentu	-	67.782.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	22.918.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan dengan tujuan tertentu		67.782.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi***	**-**			**94,05 %**	**116.958.600,00**						**-**	**210.266.160,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah laporan pendampingan dan asistensi*	-			133 laporan	116.958.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	-	210.266.160,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 perangkat daerah	5.646.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		24.090.480,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	85.998.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		162.082.440,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				86 perangkat daerah	25.313.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		24.093.240,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**306.693.300,00**							**27.951.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**306.693.300,00**							**27.951.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	-			**100 %**	**306.693.300,00**						-	**27.951.000,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			6 dokumen	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	306.693.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.951.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	306.693.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		27.951.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2025, telah disusun berdasarkan proses dan mekanisme yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan dalam renja ini, telah disusun dengan berpedoman pada kebutuhan-kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya memang dimungkinkan adanya ketentuan atau regulasi yang mengharuskan adanya penambahan maupun pengurangan kegiatan pengawasan yang belum tercantum dalam rencana kerja ini. Untuk itu, apabila pada tahun berjalan ternyata diperlukan perubahan, maka akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja.

Kendala utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah keterbatasan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga implementasi peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Kami berharap agar Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sehingga penetapan anggaran program dan kegiatan benar-benar menggambarkan anggaran yang berbasis kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Wates, 2 Agustus 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ARIF PRASTOWO, S.Sos, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19700514 199603 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)
KAPANEWON TEMON
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON TEMON
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon 15

2.3 Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 17

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

3.3 Program dan Kegiatan..... 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 36

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2023 ……..……	5
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2023	5
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo	7
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo …….	16
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo ……	21
Tabel 2.6	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ……..	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……..……...	31
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2025 …...……..……...	32
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Temon Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ……..…….	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2025 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2025 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Temon beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Rancangan Akhir Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Temon Tahun Anggaran 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Rancangan Akhir Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Temon, 2 Agustus 2024

PANEWU TEMON

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2025 didasarkan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Kapanewon Temon 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2025 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentei Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Temon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Temon Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Temon didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	90,861
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	97,37	98,51

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Temon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persenase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11	92,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Temon sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Temon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
2	22				**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**									
2	22	08			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	100%					100%	100%	50%
2	22	08	5.07		***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	4 Laporan	-	1	1	100%	1 Laporan	2 Laporan	50%
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4 Laporan	-	1	1	100%	1 Laporan	2 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4	**01**				**Sekretariat Daerah**									
4	**01**	**04**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	100%					100%	100%	50%
4	**01**	**04**	**5.06**		***Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan***	**Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	8 Dokumen	-	2	2	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	50%
4	**01**	**04**	**5.06**	**01**	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8 Dokumen	-	2	2	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	50%
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%					100%	100%	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	94 Dokumen		23	23	100%	23 Dokumen	46 Dokumen	48,9%
7	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	2	2	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
7	**01**	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 Laporan	-	21	21	100%	21 Laporan	42 Laporan	50%
7	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	56 Laporan	-	14	14	100%	14 Laporan	28 Laporan	50%
7	**01**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	-	19	19	100%	20 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	49%
7	**01**	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	12	12	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	50%
7	**01**	**01**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Laporan	-	14	14	100%	14 Laporan	28 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Jumlah Dokumen Adminisrasi Umum**	8 Dokumen	-	2	2	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	50%
7	**01**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	-	4	4	100%	4 Paket	8 Paket	50%
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	-	12	12	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	13 Unit	-	4	4	100%	3 Unit	7 Unit	53,8%
7	**01**	**01**	**2.07**	**11**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	-	4	4	100%	3 Unit	7 Unit	53,8%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	48 Laporan	-	12	12	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	12	12	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	-	12	12	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
7	01	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	12 Laporan	-	3	3	100%	3 Laporan	6 Laporan	50%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	-	9	9	100%	9 Unit	18 Unit	50%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	-	2	2	100%	2 Unit	4 Unit	57%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92 Unit	-	23	23	100%	23 Unit	46 Unit	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%					100%	100%	50%
7	01	02	2.01		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	Dukungan sebesar 84,34% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	24 Dokumen	-	6	**6**	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	50%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28 Laporan	-	7	7	100%	7 Laporan	14 Laporan	50%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 Dokumen	-	6	6	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	50%
7	01	02	2.04		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Dukungan sebesar 15,66% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	48 Dokumen	-	12	12	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	50%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	-	12	12	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	50%
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%				100%	100%	100%	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**03**	**2.01**		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32 Laporan	-	8	**8**	100%	8 Laporan	16 Laporan	50%
7	**01**	**03**	**2.01**	**03**	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32 Laporan	-	8	8	100%	8 Laporan	16 Laporan	50%
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%					97,37%	94,74%	94,74%
7	**01**	**05**	**2.01**		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16 Laporan	-	4	4	100%	4 Laporan	8 Laporan	50%
7	**01**	**05**	**2.01**	**02**	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800 Orang	-	200	200	100%	200 Orang	400 Orang	50%
7	**01**	**05**	**2.01**	**05**	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16 Laporan	-	4	4	100%	4 Laporan	8 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%					100%	100%	54,5%
7	**01**	**06**	**2.01**		***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22 Laporan	-	4	4	100%	8 Laporan	12 Laporan	54,5%
7	**01**	**06**	**2.01**	**17**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22 Laporan	-	4	4	100%	8 Laporan	12 Laporan	54,5%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Temon

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Temon merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Temon dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Temon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Temon disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel : 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2022 (transisi)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,26	84,25	84,50	84,75	85,00	90,861	84,50	84,75	
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				94,12	97,37	98,25	99,12	100	98,51	98,25	99,12	

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan

Kapanewon Temon sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Temon masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor *platform* dasar pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

a. Permasalahan

1. Pembangunan hotel, kantor dan fasilitas bandara lainnya di lingkungan bandar udara YIA yang tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah dan warga masyarakat untuk menangkap peluang yang ada.
2. Kalurahan sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur kalurahan dan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum maksimal, menuntut keterlibatan dan dukungan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kapanewon maupun kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
5. Jumlah aparatur kapanewon yang belum sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan, menuntut optimalisasi aparatur yang ada.

b. Hambatan

1. Formasi pegawai yang ada lebih kecil dari Bezetting yang ditentukan, hal tersebut berdampak pada ketugasan pegawai.
2. Kemampuan sebagian besar pegawai terhadap komputer dan teknologi informasi kurang sehingga menghambat pelaksanaan tugas, tetapi wewenang peningkatan kualitas aparatur dalam bentuk diklat ada pada Badan Kepegawaian Daerah.
3. Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon Temon pertahun tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pendopo, rumah dinas dan gedung pertemuan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor lainnya.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 adalah :

1. Pembangunan fasilitas lainnya di sekitar bandara YIA (Yogyakarta International Airport)
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Posisi strategis sebagai pintu Kulon Progo barat belum optimal sebagai sebuah peluang.
5. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah Temon.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :

a. Tantangan

Kapanewon Temon adalah Kapanewon perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Kulon Progo cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang.

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Temon cukup besar bila dikembangkan, seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.

2) Industri kerajinan batik.

3) Potensi pariwisata terutama kawasan pantai.

4) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat.

5) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;

2) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;

3) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;

4) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;

5) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat;

6) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja di kantor pemerintah maupun pelayanan publik lainnya;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Temon agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Temon. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut.

Tabel : 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Temon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				**100.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**100.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Gelar budaya Jogja	Kap. Temon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Gelar budaya Jogja	Kap. Temon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				**62.244.100**	**Sekretariat Daerah**				**30.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**62.244.100**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**30.000.000**	
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	***62.244.100***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	***30.000.000***	
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kap. Temon	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	2 Dokumen	62.244.100	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	30.000.000	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan				**1.903.102.761**	**Kecamatan**				**1.871.148.469**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.737.907.971**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.730.106.269**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***25 Dokumen***	***10.625.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***25 Dokumen***	***10.620.400***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.005.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.596.700	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	4.620.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	3.023.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.385.714.106***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.406.828.583***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.339.935.406	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.370.655.183	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.697.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32.250.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	5.081.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	14 Laporan	3.923.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***52.800.200***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***32.247.900***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Temon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.942.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Temon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.707.900	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.857.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.540.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Penambahan Aset***	***4 Unit***	***27.716.600***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Penambahan Aset***	***4 Unit***	***3.500.000***	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	27.716.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***136.843.000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***114.728.954***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.035.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.556.930	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.807.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.172.024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***124.209.300***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***162.180.432***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Temon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	97.093.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Temon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.074.500	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	12.934.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	96.757.832	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	14.181.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	14.348.100	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**51.913.999**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**43.152.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***42.326.499***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***34.851.400***	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Temon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	17.977.800	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Temon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	17.070.200	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	24.348.699	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	17.781.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***9.587.500***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***8.300.000***	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9.587.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.300.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**29.962.501**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**26.691.300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	***29.962.501***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	***26.691.300***	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	29.962.501	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	26.691.300	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**	**62.390.007**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**	**52.015.700**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***62.390.007***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***52.015.700***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	17.469.200	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	16.113.700	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	44.920.807	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	35.902.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**20.928.283**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**19.183.200**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	***20.928.283***	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	***19.183.200***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Temon	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	20.928.283	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Temon	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	19.183.200	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.065.346.861**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.001.148.469**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Temon diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2025 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4) Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor - sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Temon pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah **"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel"**. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12

Sumber: Renstra Kapanewon Temon 2023-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Temon Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Gelar budaya Jogja	Kap. Temon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**30.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	***30.000.000***	
	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	30.000.000	
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.730.106.269**	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***25 Dokumen***	***10.620.400***	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.596.700	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Temon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	3.023.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.406.828.583***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.370.655.183	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32.250.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.923.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***32.247.900***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Temon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.707.900	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.540.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Penambahan Aset***	***4 Unit***	***3.500.000***	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***114.728.954***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.556.930	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kap. Temon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	83.172.024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***162.180.432***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Temon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.074.500	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	96.757.832	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Temon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	14.348.100	
IV	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**43.152.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***34.851.400***	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Temon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	17.070.200	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	17.781.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***8.300.600***	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Temon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.300.600	
V	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**26.691.300**	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Kalurahan					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	***26.691.300***	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	26.691.300	
VI	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**	**52.015.700**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***52.015.700***	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Temon	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	16.113.700	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Temon	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	35.902.000	
VII	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**19.183.200**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	***19.183.200***	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Temon	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	19.183.200	
Jumlah Pagu Dana Kegiatan					**2.001.148.469**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
   b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:**
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja.

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan, dengan sub kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 serta pendanaan Kapanewon Temon dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON TEMON KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON TEMON						**2.001.148.469,00**							**2.131.713.726,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.830.106.269,00**							**1.898.498.321,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.830.106.269,00**							**1.898.498.321,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	-			**100 %**	**1.730.106.269,00**						-	**1.798.498.321,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	10.620.400,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	12.010.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.596.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		6.467.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.023.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		5.543.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	1.408.828.583,00			-	-	-	-	1.418.615.721,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	1.370.655.183,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.369.141.521,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.930.900,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.923.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.543.300,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	32.247.900,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	60.791.800,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.707.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		25.984.300,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		34.807.500,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			2 Unit	3.500.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	114.728.954,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	141.869.200,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.556.930,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		35.403.400,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.172.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		106.465.800,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	162.180.432,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	132.875.600,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.074.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		101.578.900,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	96.757.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		13.858.300,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	14.348.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		17.438.400,00	KAPANEWON TEMON
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	-			**100 %**	**100.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon	-	100.000.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		100.000.000,00	KAPANEWON TEMON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**62.244.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**62.244.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	-			**100 %**	**30.000.000,00**						-	**62.244.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	-			3 Dokumen	30.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon	-	62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**141.042.200,00**							**170.971.304,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**141.042.200,00**							**170.971.304,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	-			**100 %**	**43.152.000,00**						-	**53.729.322,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			13 Dokumen	34.851.400,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	43.804.322,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	17.070.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		18.573.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	17.781.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		25.231.322,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	8.300.600,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	9.925.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.300.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		9.925.000,00	KAPANEWON TEMON
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	-			**100 %**	**26.691.300,00**						-	**31.010.227,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			8 Laporan	26.691.300,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	26.691.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	-			**97,37 %**	**52.015.700,00**						-	**64.571.654,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyeloriggaraan Urusan Pemorintahan Umum*	-			4 Laporan	52.015.700,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	64.571.654,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	16.113.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		18.080.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	35.902.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		46.491.654,00	KAPANEWON TEMON
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa***	-			**100 %**	**19.183.200,00**						-	**21.660.101,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 Laporan	19.183.200,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	19.183.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
	JUMLAH							**2.001.148.469,00**							**2.131.713.725,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Temon dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Temon. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Temon ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Temon serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Temon, 2 Agustus 2024

PANEWU TEMON

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KAPANEWON WATES

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2025 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2025 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Wates beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Wates Tahun Anggaran 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, 2 Agustus 2024
Panewu Wates

KAPANEWON WATES

SETIAWANTRI WIDADA, S.Sos.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197106031991011004

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates 19
2.3 Isu-isu Penting/Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 21
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD..... 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 29
3.3 Program dan Kegiatan..... 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2025 didasarkan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Renstra Kapanewon Wates 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wates Tahun 2025 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-2040 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5--1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Meteri dalam Negeri Nomor 050-5898 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
15. Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra 2023-2026
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Wates tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Wates Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Wates Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Wates didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Wates
Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masimg-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.75	87.25
	Persentase peningkatan Penyelengaraan Pemerintah Kapanewon	97.37	99,12

Sedangkan Untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Wates
Tahun 2023

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Realisasai (%)
1	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	**100.00**
2	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.00	**100.00**
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	**100.00**
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kapanewon	100,00	**100.00**
5	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	**100.00**
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11	92.11
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	**100.00**

Realisasi anggaran per Program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran Kapanewon Wates Tahun 2023

No.	Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023
1	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**350,000,000**	**347,006,260**
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**35,000,000**	**34.417.472**
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2,475,484,399**	**2.363.207.520**
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**45,953,600**	**45.639.381**
5	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**1,032,107,100**	**1.031.119.732**
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**663,665,600**	**663.388.720**
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**25,000,000**	**24.525.682**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel Berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD Tahun 2023
Kabupaten Kulon Progo

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
2	2	2	8				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	400			**100**	**350.00**	100	347.01	99.15	100	100	100	447.01	
							Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	20	300												
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		300			5	250.00	5	250	100.00				250.00	
2	2	2	8	5	7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4	100			1	100.00								

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
2	2	2	8	5	7	6	Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	100			1	100.00	1	97.01	97.01	1	100	1	197.01	
4	1						Urusan Sekretariat Daerah		100	238.74			100	35.00			0					
4	1	4					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	238.74			**100**	**35.00**	2	34.42	98.34	100	40.00	100	74.42	
4	1	4	5	6			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100	238.74			**100**	**35.00**	2	34.42	98.34	3	40.00	3	74.42	
								Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
4	1	4	5	6	1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238.74			2	35.00	2	34.42	98.34	3	40.00	3	74.42	
7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10626,32			**100**	**2,475.48**	**100**	**2,363.21**	95.46	**100**	**2,414.99**	100	4,778.20	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									100%					
7	1	1	2	8	2		Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	48	338			13	83.46	13	82.83	99.25	12	65.31		148.14	
7	1	1	2	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656.15			12	139.51	12	139.51	100.00	12	139.51		279.02	
7	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
7	1	1	2	2	1	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,736	8183.66			12	1,879.97	12	1,771.84	94.25	13	1,995.77		3,767.61	
7	1	1	2	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211.6			12	64.90	12	64.45	99.31	12	64.87		129.32	
7	1	1	2	2	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	56	17.60			14	4.00	14	4.00	100.00	2	3.92		7.92	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
7	1	1	2	6	9	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*														
7	1	1	2	6	2	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70.00			4	15.28	4	15.20	99.46	5	14.00		29.20	
7	1	1	2	6	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152.08			12	36.77	12	36.70	99.82	12	33.47		70.17	
7	1	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*														
7	1	1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30.00			2	5.28	2	5.27	99.91	2	5.17		10.44	
7	1	1	2	1	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16.68			21	4.00	4	21.00	525.00	21	3.92		24.92	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*														
7	1	1	2	7	1 0	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87	*534.46*			20	137.71	20	136.97	99.46				136.97	
7	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*														
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	247.80			14	59.02	14	57.02	96.60	14	58.97		115.99	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55.00			2	20.60	2	20.59	99.97				20.59	
7	1	1	2	9	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	244	115.30			61	24.99	61	24.83	99.37	41	30.08		54.91	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**176.16**			**100**	**45.95**	**61.57**	**45.57**	99.17				45.57	
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*														
7	1	2	2	1	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	44.31			4	10.64	4	10.56	99.25	4	10.43		20.99	
7	1	2	2	1	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	97.92			8	27.18	8	27.01	99.39	7	29.70		56.71	
7	1	2	2	4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*														
7	1	2	2	4	1	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*48*	*33.93*			12	8.14	12	8.07	99.17	12	3.97		12.04	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	3					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					**100**	**1,032.11**	**100**	**1,031.12**	99.90				1,031.12	
7	1	3	2	2	3		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*														
7	1	3	2	2	3	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	36	151.06			10	35.91	10	35.60	99.14	10	35.23		70.83	
7	1	3	2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*														
7	1	3	2	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2,797.97			17	676.07	17	675.70	99.95	17	904.23		1,579.93	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	3	2	2	3	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	1,267.55			11	281.30	11	281.20	99.96	11	368.93		650.13	
7	1	3	2	2	4	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160.01			12	38.82	12	38.63	99.50	12	38.61		77.24	
7	1	5					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100.**	**2,820.36**			**92**	**663.67**	**100**	**663.39**	99.96				663.39	
7	1	5	2	1	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*														
7	1	5	2	1	1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	2,261	2,564.32			324	600.39	324	600.14	99.96	405	602.11		1,202.25	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
							1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	1	5	2	1	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540	117.38			70	27.63	70	27.63	99.98	70	31.42		59.05	
7	1	5	2	1	5	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11	138.66			6	35.64	6	35.61	99.90	6	54.92		90.53	
7	1	6					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.**	**72.82**			**100**	**25.00**	**100**	**24.53**	98.12	7	24.50		49.03	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Tingkat Realisasi %	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2		3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
										K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	6	2	1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*														
7	1	6	2	1	17	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*32.00*	*72.82*			11	25.00	11	24.53	98.12	7	24.50		49.03	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Wates dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Wates meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Wates disajikan pada tabel Tabel 2.5 berikut :

Tabel : 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Wates
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi		Catatan Analisis
						2022 (transisi)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Rata-rata Persentase pencapaian Program masing-masimg sekretariat perangkat Daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100,00	100,00	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				81,07	84,25	84,50	84,75	85,00	87.25	84,50	84,75	
3	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	%				94,12	97,37	98,25	99,12	100,00	99.12	99,12	99,12	

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
b. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
c. Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
d. Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa;
e. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan;
f. Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal.

2.3.2. Dampak terhadap Capaian tujuan dan Sasaran Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Wates secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan dan sasaran Daerah diantaranya sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.
b. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari sektor pendidikan dan kesehatan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- Tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin baik dan transparan.
- Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS.

- Perkembangan berbagai kebijakan pemerintah yang perlu segera respon dan tindak lanjut.

b. Peluang

- Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Penambangan pasir besi, pembangunan / operasional Yogyakarta International Airport, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat.

2.3.4. Formulasi terhadap Isu – isu penting

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Wates, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kebijakan penyerahan sebagaian kewenangan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang berlebih besar yaitu tercapainya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kulon Progo.
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh sungguh memperhatikan company/coorperate sosial resposibility (CSR) maka kapanewon harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Pelayanan prima Kapanewon sebagai OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggaakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel dan memiliki legalitas hukum,

di samping itu tentunya dengan tepat mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggarakan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan.

d. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kompetensi yang berkualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Kapanewon, Desa/Kalurahan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Wates. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut.

Tabel : 2.6

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kapanewon Wates**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**25,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Wates**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100,000,000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**25,000,000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**100,000,000**	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	25,000,000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**62,244,100**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**85,000,000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**62,244,100**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**85,000,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	62,244,100	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	85,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2,725,181,252**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2,508,023,603**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**12,200,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**13,033,700**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,914,800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4,200,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4,118,900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**2,113,801,002**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**2,079,747,855**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Org/bln	2,055,251,002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Org/bln	2,024,535,355	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	51,115,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4,550,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4,097,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**55,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**49,942,200**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,777,200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33,165,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**21 Unit**	**145,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**21 Unit**	**21,645,200**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	145,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	21,645,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**266,029,638**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**214,669,986**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64,999,946	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176,029,638	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149,670,040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**132,650,612**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**128,984,662**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	64,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	60,334,550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi	2 Unit	38,150,612	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi	2 Unit	38,150,612	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	30,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	30,499,500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Wates	**Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**44,566,733**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Wates	**Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**39,520,700**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Dokumen**	**35,994,050**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Dokumen**	**35,183,000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	11,209,150	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7,725,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	24,784,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	27,458,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**8,572,683**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**4,337,700**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,572,683	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,337,700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**1,107,431,788**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	1,410,143,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**9 Laporan**	**38,217,200**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**9 Laporan**	**31,249,700**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	38,217,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	31,249,700	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,069,214,588**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,378,893,300**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	707,856,200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	901,860,900	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	320,876,870	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	439,859,900	
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	40,481,518	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	37,172,500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1064 orang**	**713,719,349**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1064 orang**	**626,877,600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	444 Orang	648,744,899	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	405 Orang	565,168,300	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	135 Orang	29,895,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	31,418,700	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	35,079,450	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	30,290,600	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**18,423,805**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**21,768,000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**9 Laporan**	**18,423,805**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**9 Laporan**	**21,768,000**	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	18,423,805	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	21,768,000	
JUMLAH PAGU					**4,696,567,027**	**JUMLAH PAGU**				**4,791,332,903.00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Wates diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2025 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.7
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang di susun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional Setiap Tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintahtahun 2025 (RKP) yakni :Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusuf dan Berkelanjutan". Adapun prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 Meliputi:

a. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
b. Mementapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru.
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang BerKwalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Serta Mengembangkan Agromaritim Indutri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis Sumber daya alam untuk Meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri.
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemeraataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
g. Memperkuat Informasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Wates pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah "Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel	AKIP	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase peningkatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100
		IKM	84,5%	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84, 75%
		Opini BPK	WTP		Persentase peningkatan Penyelengaraan Pemerintah Kapanewon	99,12

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Wates Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kapanewon Wates**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**25,000,000**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**25,000,000**
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	25,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**62,244,100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**62,244,100**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	62,244,100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2,687,030,640**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**23 Dokumen**	**12,200,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4,200,000

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**2,113,801,002**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Org/bln	2,055,251,002
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4,550,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**57,500,000**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**46 Unit**	**145,000,000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	145,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**266,029,638**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176,029,638
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**94,500,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	64,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	30,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Wates	**Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**44,566,733**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Dokumen**	**35,994,050**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	11,209,150
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	24,784,900
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**8,572,683**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,572,683

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**1,107,231,788**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**9 Laporan**	**38,217,200**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	38,217,200
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,069,014,588**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	707,856,200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	320,676,870
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	40,481,518
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**713,519,149**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1064 orang**	**713,519,149**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	444 Orang	648,744,699
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	135 Orang	29,695,000
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	35,079,450
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**18,423,805**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**9 Laporan**	**18,423,805**
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	18,423,805
JUMLAH PAGU					**4,735,016,215**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan :

1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, meliputi sub kegiatan :
   a. Gelar Budaya Jogja

II. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan :**

1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan, meliputi sub kegiatan :
   a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

III. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan:
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   c. Evaluasi Kelurahan

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

a. serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
c. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

VII. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 serta pendanaan Kapanewon Wates dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Wates Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Instansi : Kapanewon Wates
Jumlah Pagu : Rp. 4.544.436.136,-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kapanewon Wates						4.544.436.163,00							4.868.217.499,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							100.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						0,00							100.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	0,00						-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya yogyakarta	-			1 Laporan	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates	-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		100.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.993.000,00							51.500.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						17.993.000,00							51.500.000,00	
2	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.993.000,00						-	16.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminitrasi umum perangkat daerah	-			2 Dokumen	17.993.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	16.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	17.993.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.500.000,00	KAPANEWON WATES
3	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	0,00						-	35.000.000,00	
	4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun	-			3 Dokumen	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	35.000.000,00	
	4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.462.778.163,00							4.644.717.499,00	
	7	01				KECAMATAN						4.462.778.163,00							4.644.717.499,00	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.429.895.395,00						-	2.665.560.354,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	-			25 Laporan	14.169.500,00			-	-	Kapanewon Wates	-	14.825.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.669.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		10.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang di sampaikan tepet waktu	-			14 Dokumen	2.093.921.155,00			-	-	Kapanewon Wates	-	2.147.145.441,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				434 Orang/bulan	2.024.535.355,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		2.087.595.441,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	64.885.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		55.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		4.550.000,00	KAPANEWON WATES

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan asset	-			21 unit	18.718.600,00			-	-	Kapanewon Wates	-	119.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.718.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		119.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	-			12 Laporan	214.670.040,00			-	-	Kapanewon Wates	-	289.589.913,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		96.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149.670.040,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		193.589.913,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			3 Laporan	88.416.100,00			-	-	Kapanewon Wates	-	95.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	56.416.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		65.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	32.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES
5	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	41.422.168,00						-	76.806.750,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	-			9 dokumen	35.360.200,00			-	-	Kapanewon Wates	-	37.252.950,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	7.824.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		11.601.150,00	KAPANEWON WATES
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	27.535.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		25.651.800,00	KAPANEWON WATES
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan	-			12 dokumen	6.061.968,00			-	-	Kapanewon Wates	-	39.553.800,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.061.968,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		39.553.800,00	KAPANEWON WATES

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.342.976.500,00						-	1.144.812.942,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan evektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	-			9 Laporan	32.648.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	38.217.200,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	32.648.900,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		38.217.200,00	KAPANEWON WATES
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			17 Lembaga	1.310.327.600,00			-	-	Kapanewon Wates	-	1.106.595.742,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga Kemasyarakatan	904.229.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		732.808.525,00	KAPANEWON WATES
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	368.925.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		331.890.389,00	KAPANEWON WATES
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	37.172.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		41.896.828,00	KAPANEWON WATES
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	626.339.900,00						-	738.469.406,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-			1064 orang	626.339.900,00			-	-	Kapanewon Wates	-	738.469.406,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				444 Orang	566.305.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		671.429.928,00	KAPANEWON WATES
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				135 Orang	31.419.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		30.733.528,00	KAPANEWON WATES
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	28.615.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		36.305.950,00	KAPANEWON WATES
8	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	22.144.200,00						-	19.068.047,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	-			9 Laporan	22.144.200,00			-	-	Kapanewon Wates	-	19.068.047,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	22.144.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		19.068.047,00	KAPANEWON WATES
	X					NON URUSAN						63.665.000,00							72.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						63.665.000,00							72.000.000,00	
9	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	63.665.000,00						-	72.000.000,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminitrasi umum perangkat daerah	-			2 Dokumen	33.165.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	39.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33.165.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		39.000.000,00	KAPANEWON WATES
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			3 Laporan	30.500.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	30.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	KAPANEWON WATES
										J U M L A H		**4.544.436.163,00**							**4.868.217.499,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wates Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Wates dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Wates. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Wates ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasarani Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya tujuan dan Sasaran pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Wates serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Wates, 2 Agustus 2024

Panewu Wates

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON WATES

SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197106031991011004

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PANJATAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon Panjatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Kapanewon Panjatan merupakan Perencanaan Tahunan dari Perubahan Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja.

Panjatan, 2 Agustus 2024

PANEWU PANJATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON PANJATAN KULON PROGO

SUMARNA, SIP

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196704121991031016

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PANJATAN TAHUN 2025 ii
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) Kabupaten Kulon Progo 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan 24
a. Lingkungan Internal 24
b. Lingkungan Eksternal 25
2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 27
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan: 27
2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah 27
2.3.3. Tantangan dan Peluang 28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 45
3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 46
3.3. Program dan Kegiatan 47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50
BAB IV P E N U T U P 63
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2023 7
Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2023 8
Tabel 2. 3 Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2023 9
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) 12
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan 26
Tabel 2. 6 Review terhadap RKPD Tahun 2025 33
Tabel 2. 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2024 44

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 46

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Rancangan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas

antara dokumen perencanaan, penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan :

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan , penyusunan , penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan , dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra PD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kapanewon Panjatan 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Perubahan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi

RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat dilihat dalam gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah dibawah ini.

Gambar 1 1
Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD

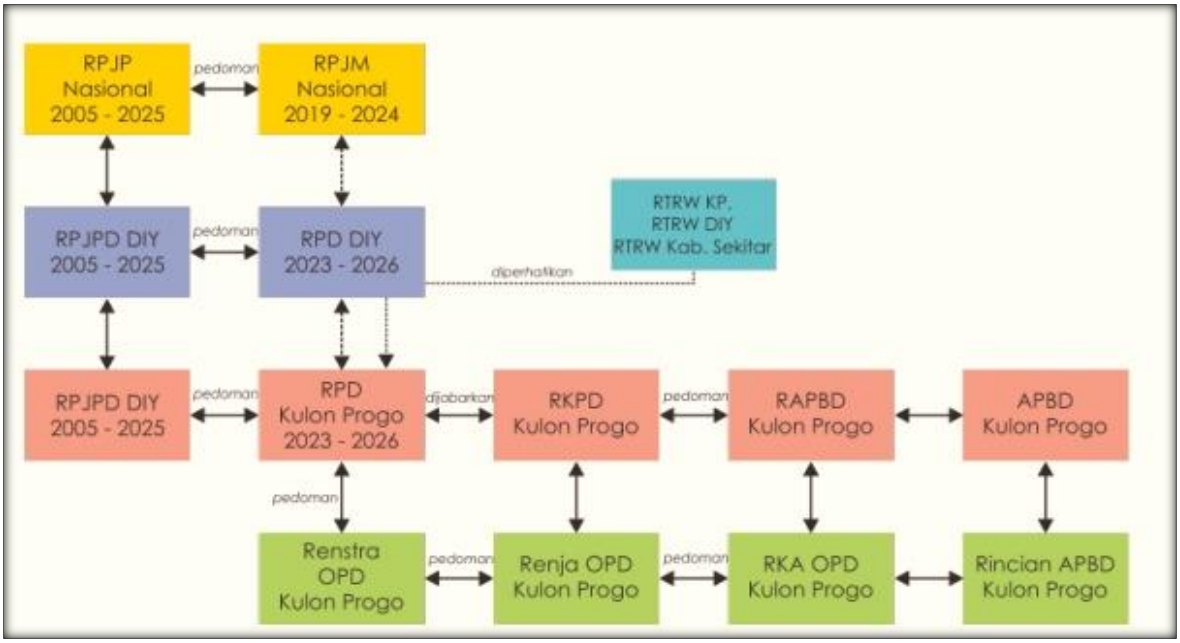

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2025 yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nonor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah
i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;

o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
r. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan - kegiatan strategis di wilayah Kapanewon Panjatan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil - hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Panjatan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 `Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kapanewon Panjatan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dan dengan melihat sasaran yang ditetapkan. Pencapaian sasaran secara rinci adalah :

1. Sasaran : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat mencapai 100 %.
2. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dengan target 84,25 mendapat nilai 85,137 sehingga dapat mencapai 101,18 %. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan "**baik"**.
3. Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dapat mencapai 100 %, dari target yang ditetapkan sebesar 97,37.

Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100 %	100 %
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	85,137
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	97,37	97,37

Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100 %	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatDesa Dan Kelurahan	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PeningkatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11	92,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan	100 %	100 %
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100 %	100 %

Capaian kinerja Kapanewon Panjatan Tahun 2023 mencapai 100 % dengan rata rata deviasi keuangan sebesar 0,00 %, tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.038.834.732,00 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.755.564.988,00 dengan capaian sebesar 98,55 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan di luar kegiatan Penyediaan Gaji ASN dibawah ini :

Tabel 2. 3 Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi			%	Sisa Angaran
				Pegawai	Modal	Total		
			%	Barang & Jasa				
A	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**100.000.000**	**100**	**99.909.776**	**0**	**99.909.776**	**99,91**	90.224
1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	**100**	99.909.776		99.909.776	99,91	90.224
B	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**35.000.000**	**100**	**34.806.986**	**0**	34.806.986	99,45	193.014
1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	35.000.000	**100**	34.806.986	0	34.806.986	99,45	193.014
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**1.714.477.932**	**100**	**1.572.672.272**	**54.125.000**	**1.626.797.272**	**94,89**	**87.680.660**
C	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.139.300**	**100**	**6.058.000**	**0**	6.058.000	98,68	81.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.233.500	**100**	3.179.000	0	3.179.000	98,31	54.500
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.905.800	**100**	2.879.000	0	2.879.000	99,08	26.800
D	**Administrasi Keungan Perangkat Daerah**	**1.396.654.970**	**100**	**1.312.599.327**	**0**	1.312.599.327	93,98	84.055.643
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.354.123.770	**100**	1.271.428.647		1.271.428.647	93,89	82.695.123
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.781.200	**100**	37.424.000	0	37.424.000	96,50	1.357.200
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.750.000	**100**	3.746.680	0	3.746.680	99,91	3.320
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.317.600**	**100**	**33.103.293**	**0**	**33.103.293**	99,36	214.307
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.287.600	**100**	9.086.253	0	9.086.253	97,83	201.347
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.030.000	**100**	24.017.040	0	24.017.040	99,95	12.960
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	54.741.100	100	0	54.125.000	54.125.000	99	616.100
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.741.100	**100**	0	54.125.000	54.125.000	98,87	616.100
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.626.112**	**100**	**135.757.802**	**0**	**135.757.802**	98,64	**1.868.310**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.016.960	**100**	24.167.003		24.167.003	92,89	1.849.957
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.609.152	**100**	111.590.799		111.590.799	99,98	18.353
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**85.998.850**	**100**	**85.153.850**	**0**	85.153.850	99,02	845.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.452.750	**100**	67.667.150	0	67.667.150	98,85	785.600
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.176.800	**100**	4.134.000		4.134.000	98,98	42.800
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.369.300	**100**	13.352.700		13.352.700	99,88	16.600
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**48.081.800**		**47.868.326**		**47.868.326**	99,56	**213.474**
I	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**40.062.000**	**100**	**39.915.366**	**0**	**39.915.366**	99,63	146.634
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	16.710.000	**100**	16.629.250	0	16.629.250	99,52	80.750
2	Peningkatan Efektiivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	23.352.000	**100**	23.286.116	0	23.286.116	99,72	65.884
J	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**8.019.800**	**100**	**7.952.960**	**0**	7.952.960	99,17	66.840
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	8.019.800	**100**	**7.952.960**	0	7.952.960	99,17	66.840
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**43.027.500**	**100**	**42.988.844**	**0**	**42.988.844**	**99,91**	**38.656**
K	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**43.027.500**	**100**	**42.988.844**	**0**	42.988.844	99,91	38.656
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.027.500	**100**	42.988.844	0	42.988.844	99,91	38.656
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**73.567.500**	**100**	**73.403.936**	**0**	**73.403.936**	**99,78**	**163.564**
L	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**73.567.500**	**100**	**73.403.936**	**0**	**73.403.936**	99,78	**163.564**

1	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.231.000	**100**	23.212.534	0	23.212.534	99,92	18.466
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.336.500	**100**	50.191.402	0	50.191.402	99,71	145.098
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**24.680.000**	**100**	**24.584.616**	**0**	**24.584.616**	**99,61**	**95.384**
M	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**24.680.000**	**100**	**24.584.616**	**0**	24.584.616	99,61	95.384
1	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	24.680.000	**100**	24.584.616	0	24.584.616	99,61	95.384
	JUMLAH	2.038.834.732		1.896.234.756	54.125.000	1.950.359.756	95,66	88.474.976

Laporan Keuangan Kapanewon Panjatan Tahun 2023 per 31 Desember 2023

Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Panjatan dari semua program/kegiatan/Sub Kegiatan mencapai 95,66 %, terdapat deviasi sebesar 4,34 % atau sebesar Rp. 88.474.976,00

a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang “Tidak Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
      Kegiatan : Administrasi Keungan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan deviasi sebesar Rp. 82.695.123 pencapaian serapan keuangan sebesar 93,89 % dikarenakan adanya ASN yang memasuki usia pensiun dan belum terisi kembali
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dari target anggaran Rp. 38.781.200,- capaian realisasi Rp. 37.424.000,-, 96,50 % terdapat deviasi sebesar Rp. 1.357.200,- dikarenakan :
        - PPTK Pelayanan Umum memasuki pension dan tidak terisi selama 4 bulan Rp. 225.000 x 4 = Rp. 900.000,00;
        - PPTK Perencanaan dan Keuangan mengikuti diklat selama 3 bulan = Rp. 225.000,00 x 3 = Rp. 450.000,00;
        - Selisih harga pasar sebesar Rp. 7.200,00

b. Selanjutnya semua program/kegiatan/sub kegiatan yang lain dapat mencapai kondisi “Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, jika terdapat deviasi di capaian realisasi serapan keuangan, dikarenakan adanya selisih harga pasar untuk

belanja ATK dengan harga di DPA, namun untuk realisasi kinerja fisik tidak ada kendala.

c. Kondisi dari masalah pada point a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang “Tidak Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan diatas, tidak terlalu berpengaruh / berimplikasi terhadap pencapaian realisasi fisik, dikarenakan ASN yang menjabat sebagai PPTK, untuk sementara didelegasikan kepada PPTK lain.
d. Solusi yang diambil berkaitan dengan kondisi diatas adalah dengan mendelegasikan tugas dan tanggungjawab kepada PPTK lain, sampai jabatan yang kosong terisi kembali.

Untuk memberikan gambaran capaian target kinerja hasil / keluaran tahun lalu, yaitu tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1), kami sajikan dalam tabel perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi capaian keluaran (output) dan hasil (outcomes). Untuk data tahun 2023 disusun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, sedangkan data tahun 2024 disusun berdasarkan Pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.4 berikut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.038.834.732 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.755.564.988 dengan capaian sebesar 98,55 %.

Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Panjatan menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja *input, output*, dan *outcome*. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan *benefit* dan *impact*. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	0		100	%	100	%	1,00	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	*96,00*	Laporan	0		*24,00*	Laporan	24	Laporan	1,00	24	Laporan	48	Laporan	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	0		12	Laporan	12	Laporan	1,00	12	Laporan	24	Laporan	50%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	0		12	Laporan	12	Laporan	1,00	12	Laporan	24	Laporan	50%
7.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	*56*	Laporan	0		*14*	Laporan	14	Laporan	14,00	*14*	Laporan	28	Laporan	50%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.120	orang / bulan	-		280	orang / bulan	280	orang / bulan	1,00	280	orang / bulan	560	orang / bulan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	0		12	Dokumen	12	Dokumen	1,00	12	Dokumen	24	Dokumen	50%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	Laporan	0		12	Laporan	12	Laporan	1,00	12	Laporan	24	Laporan	43%
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*		Dokumen	0			Dokumen		Dokumen			Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	0		6	Paket	6	Paket	1,00	6	Paket	12	Paket	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	0		12	Laporan	12	Laporan	1,00	12	Laporan	24	Laporan	50%
7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	*94*	Dokumen	0		*23,00*	Dokumen	23	Dokumen	1,00	*23,00*	Dokumen	46	Dokumen	49%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*10*	Dokumen	0		2	Dokumen	2	Dokumen	1,00	2	Dokumen	4	Dokumen	40%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	Laporan	0		21	Laporan	21	Laporan	1,00	21	Laporan	42	Laporan	50%
7.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*	*16,00*	*Unit*	0		*4,00*	*Unit*		*Unit*			*Unit*	0	*Unit*	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*18,00*	Unit	0		4	Unit	4	Unit	1,00	4	Unit	4	Unit	22%
7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	*168*	Laporan	-		*42*	Laporan	*42*	Laporan		*42*	Laporan	84	Laporan	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	Unit	0		11	Unit	11	Unit	1,00	11	Unit	22	Unit	50%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	24	Unit	0		6	Unit	6	Unit	1,00	6	Unit	12	Unit	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Unit	0		25	Unit	25	Unit	1,00	25	Unit	50	Unit	50%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%	0		100,00	%	110,9	%	1,11	100	%	210,9	%	211%
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*	*100,00*	%	0		*100,00*	%	100	%	1,00	100	%	200	%	200%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	Laporan	0		12	Laporan	12	Laporan	1,00	12	Laporan	24	Laporan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	Dokumen	0		6	Dokumen	6	Dokumen	1,00	6	Dokumen	12	Dokumen	50%
7.01.02.2.04	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*	*100*	%	0		*100*	%	*100*	%	1,00	*100*	%	200	%	200%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	Dokumen	0		12	Dokumen	12	Dokumen	1,00	12	Dokumen	24	Dokumen	50%
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	-		100	%	100	%	1	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	Laporan	0		6	Laporan	6	Laporan	1,00	6	Laporan	12	Laporan	50%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	Laporan	0		6	Laporan	6	Laporan	1,00	6	Laporan	12	Laporan	50%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	%	0		100,00	%	100	%	1,00	100	%	200	%	200%
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan*	24	Laporan	0		6	Laporan	6	Laporan	1,00	6	Laporan	12	Laporan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	Laporan	0		6	Laporan	6	Laporan	1,00	6	Laporan	12	Laporan	50%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	384	%	0		92,11	%	92,11	%	1,00	92	%	184,2	%	48%
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	384	%	0		92,11	%	92,11	%	1,00	92	%	184,2	%	48%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	368	Orang	0		128	Orang	128	Orang	1,00	128	Orang	256	Orang	70%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	Laporan	0		4	Laporan	4	Laporan	1,00	4	Laporan	8	Laporan	50%
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	%	0		100,00	%	100	%	1,00	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	8	Dokumen	0		3	Dokumen	3	Dokumen	1,00	3	Dokumen	6	Dokumen	75%
4.01.04.5.06	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	8	Dokumen	0		3	Dokumen	3	Dokumen	1,00	3	Dokumen	6	Dokumen	75%
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi'	8	Dokumen	0		3	Dokumen	3	Dokumen	1,00	3	Dokumen	6	Dokumen	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	%	-		100	%	100	%	1	100	%	200	%	200%
2.22.08.5.07	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	*12*	Laporan	0		*1*	Laporan	1	Laporan	1,00	*1*	Laporan	2	Laporan	17%
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	12	Laporan	0		1	Laporan	1	Laporan	1,00	1	Laporan	2	Laporan	17%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Panjatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi.

Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:

a. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   1. Visi dan misi organisasi yang jelas
   2. Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
   3. Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
   4. Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
   5. Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
   6. Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya

strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. SPM Kapanewon Panjatan belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan dasar Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
4. Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
5. Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Panewu belum dilaksanakan secara optimal.
7. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
3. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon
5. Tempat Wisata alam di Kapanewon Panjatan sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang

masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya.

Ancaman:

1. Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
2. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Panjatan disajikan pada tabel Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo berikut.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun ~~2025~~	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*11*						*12*		*13*
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)			A	A	A	AA	A	A	A	AA	
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			84,25	84,50	84,75	85,00	85,137	Na	84.75	85.00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100	100	100	na	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,50	84,75	85,00	85,137	na	84,75	85.00	
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon			97,37	98,25	99,12	100	97,37	na	99,12	100	

2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan, ditentukan isu - isu penting yang dapat menimbulkan permasalahan yang secara tidak langsung menjadi penghambat dalam pencapaian program yaitu sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan:

1. Potensi banjir
2. Pembangunan JJLS
3. Rawan bencana tsunami
4. Rawan bencana kekeringan
5. Gempa bumi
6. Kondisi air bersih yang buruk
7. Dampak pandemi covid 19 dan penanganannya
8. Kerusakan jalan aspal di sejumlah ruas jalan
9. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan antar desa
10. Banyaknya rumah tidak layak huni
11. Bencana angin kencang
12. Pembangunan bandara dan fasilitas pendukung
13. Tanah warga yang belum bersertifikat
14. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal
15. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan
16. Pengangguran / kenakalan remaja
17. Angka buta huruf
18. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan
19. Permasalahan kesehatan masyarakat

2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang ada seperti :

1. Bencana banjir, resiko bencana tsunami, gempa bumi, bencana angin kencang, pengangguran dan kenakalan remaja, akan memunculkan kekawatiran masyarakat dalam beraktifitas, sehingga menurunkan produktifitas masyarakat, dalam segala bidang.

2. Pembangunan JJLS akan sedikit merubah pola budaya masyarakat dalam mata pencaharian.

3. Kondisi air bersih yang buruk, dampak pandemic Covid 19, kerusakan jalan aspal, banyaknya rumah tidak layak huni, keringan di musim kemarau di lahan persawahan, angka buta huruf, kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan, dan permasalahan kesehatan masyarakat serta merta akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam beraktifitas, sehingga produktifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan akan terbatas.

Kondisi tersebut dapat dipastikan akan menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

2.3.3.1. Tantangan

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kapanewon Panjatan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kapanewon Panjatan pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
    1. Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan
    2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
    3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik

tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK

2. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2024 mencapai 98,25 %
4. Penurunan Stunting

   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Panjatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panewu Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kapanewon Panjatan, sedangkan 11 Kalurahan juga menerbitkan Surat Keputusan Lurah perihal yang sama. Hal ini semakin menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi prioritas yang ditangani secara kolaboratif dan tersinergi dari semua pihak yang terkait, dari penganggaran, intervensi program kegiatan, maupun evaluasi dan pelaporannya. Untuk itu, fasilitasi koordinasi penurunan stunting kapanewon menjadi salah satu prioritas penganggaran 2023-2026.

5. Smart *City* dan *Smart Village*

   Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/ Kota pada Gerakan 100 *Smart City* Indonesia. Sebagai implikasinya, disusun Master Plan Smart City 2017-2027 yang dituangkan pada Perarturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017. Tindak lanjut atas peraturan tersebut,

dilakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK sampai dengan Kalurahan. Selain itu, penyediaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan bertahap. Meskipun demikian, implementasi di tingkat Kalurahan masih jauh dari harapan. Untuk itu, fasilitasi dan monitoring terhadap hal ini perlu mendapatkan prioritas perhatian dan pendanaan. Ha ini senada dengan Program *Smart Village* dari Kementrian Desa yang di Kapanewon Panjatan terdapat 4 (empat) Kalurahan, yaitu : Krembangan, Garongan, Bojong, dan Pleret.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

   Pada era keterbukaan informasi ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian masyarakat secara luas. Penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Publikasi, penyajian dan pelayanan informasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi prioritas untuk alokasi anggaran dari aspek penyediaan dan pelayanan informasi, maupun pembinaan pada pemerintah kalurahan.

7. Peningkatan Literasi Digital

   Seiring dengan perkembangan TIK serta implementasi *smart city* dan *smart village,* aspek kecakapan pemanfaatan teknologi informasi atau literasi digital perlu ditingkatkan agar fasilitas TIK yang tersedia digunakan dengan bijak dan meminimakan penyalahgunaan. Hal ini perlu diperhatikan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun bimbingan dan pembinaan dari segenap pihak yg berkompeten.

Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon Panjatan yang menjadi tantangan dan peluang dalam melaksanakan ketugasannya, antara lain :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan

strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah;

b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di dukung dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR),* maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Inovasi pelayanan**,** Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, perlu dilaksanakan berbagai inovasi pelayanan secara cepat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan.

d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

e) Adanya Bandara Internasional YIA, perlu di dukung dengan kesiapan masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam bidang usaha dalam rangka memanfaatkan peluang yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar bandara, dengan pengembangan daerah wisata dan factor pendukung wisata lainnya.

2.3.3.2. Peluang

Peluang yang dimiliki Kapanewon Panjatan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2024 adalah bahwa Kapanewon Panjatan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kapanewon Panjatan berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kapanewon Panjatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut.

Nama SKPD : Kapanewon Panjatan

Tabel 2. 6 Review terhadap RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.581.329.802	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					2.039.702.578	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					140.000.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					131.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	SEKRETARIAT DAERAH						**SEKRETARIAT DAERAH**						

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	40.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	31.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	40.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	31.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN						**UNSUR KEWILAYAHAN**						
	KECAMATAN					**2.441.329.802**	**KECAMATAN**					**1.908.702.578**	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**2.234.334.302**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**1.739.061.178**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	**14.322.100**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	**10.241.300**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2022 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2021	2 dokumen	8.984.200		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2022 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2021	2 dokumen	7.750.200	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP	21 Dokumen	5.337.900		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP	21 Dokumen	2.491.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	273 Tahun	1.440.045.670	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	273 Tahun	1.435.910.036	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Panjatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester	14 Dokumen	8.906.300		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Panjatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester	14 Dokumen	2.865.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. panjatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.388.023.770		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. panjatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	**1.401.117.436**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Panjatan	Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	43.115.600		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Panjatan	Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	31.927.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	54.059.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.155.900	
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Panjatan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	30.600.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Panjatan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	26.800.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.459.600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.355.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yan	5 unit	362.096.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yan	5 unit	20.398.900	
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 unit	362.096.200		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 unit	20.398.900	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.032	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.023.392	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	55.264.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	31.287.408	
5		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor	12 Laporan	119.736.032		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor	12 Laporan	119.735.984	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	188.810.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	86.331.650	
6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.957.700		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	69.765.250	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	43.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	32.853.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	16.566.400	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan %**	**100%**	**50.345.500**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan %**	**100%**	**42.562.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**11 Laporan**	**39.462.000**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**11 Laporan**	**35.348.200**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	17.085.000		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	14.514.800	
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	22.377.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	20.833.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Laporan	10.883.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Laporan	7.214.300	
2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Laporan	10.883.500		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Laporan	7.214.300	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**43.027.500**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**39.509.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**7 Laporan**	**43.027.500**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**7 Laporan**	**39.509.500**	
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**6 Laporan**	**43.027.500**		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**6 Laporan**	**39.509.500**	
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**92,10%**	**80.672.500**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**92,10%**	**65.362.200**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kap. Panjatan	**Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan**	**115 Orang**	**80.672.500**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kap. Panjatan	**Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan**	**115 Orang**	**65.362.200**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
				dan Ketahanan Nasional						**dan Ketahanan Nasional**			
1		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	128 Orang	26.587.000		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	128 Orang	20.081.300	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	54.085.500		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	45.280.900	
V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**32.950.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Kap. Panjatan**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**22.207.200**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**11 Laporan**	**32.950.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**11 Laporan**	**22.207.200**	
1		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	**32.950.000**		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	**22.207.200**	
		II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.581.329.802**		**II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.039.702.578**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kapanewon Panjatan pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan ;
4. Pembinaan Pengelolaan BUMDes.
5. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon.

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Kapanewon Panjatan terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD, kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir

pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Panjatan Tahun 2024 dengan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon & Pagu Indikatif Sektoral.

Program dan Kegiatan hasil Musrenbang dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini :

Tabel 2. 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Volume	Kebutuhan Anggaran
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Panjatan pada periode Perubahan Renstra Tahun 2023 - 2026 adalah

"***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel***"

Dengan sasaran

1. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1. berikut ini : .

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran	Realisasi Capaian		Proyeksi (%) Tahun 2024	Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	A	A	A	A	
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75	87.811	85,137	84,75	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100	100	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75	87.811	85,137	84,75	
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12	94,12	97,37	98,25	

kompilasi metadata program dokumen rencana pembangunan daerah 2023-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Renstra Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo, program - program yang akan dilaksanakan Kapanewon Panjatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kegiatan - sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan :

1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, meliputi sub kegiatan :
    1. Gelar Budaya Jogja

II. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan :

2) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan, meliputi sub kegiatan :

2. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

3) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   10. Pengadaan Sarana dan Prasarana;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

9) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   16. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

17. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan:

18. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

11) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan:

19. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

12) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

20. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
21. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

VII. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

13) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

22. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024 serta pendanaan indikatif Kapanewon Panjatan dapat dilihat dalam tabel 4.1 di Bab IV berikut.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kapanewon Panjatan seperti tercantum dalam ketetapan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025. Sesuai Perbub Kulon Progo nomor 85 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, menegaskan bahwa salah satu tugas Kapanewon adalah melaksanakan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon . Pada tahun 2025 Kapanewon Panjatan mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon .

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Instansi : Kapanewon Panjatan
Jumlah Pagu : Rp. 2.039.702.578

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kap. Panjatan						2.039.702.578							2.850.814.897	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000							100.000.000	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000							100.000.000	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %			100 %	100.000.000						-	100.000.000	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %			100 %	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kap. Panjatan	-	100.000.000	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12 Laporan			1 Laporan	100.000.000	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kap. Panjatan		100.000.000	Kap. Panjatan
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.000.000							71.000.000	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						31.000.000							71.000.000	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 %			-	31.000.000						-	71.000.000	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-			-3 Dokumen	31.000.000			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	31.000.000	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	31.000.000	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.000.000	Kap. Panjatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	-			3 Dokumen	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kap. Panjatan	-	40.000.000	
	4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				3 Dokumen	-	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kap. Panjatan		40.000.000	Kap. Panjatan
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.908.702.578							2.679.814.897	
	7	01				KECAMATAN						1.908.702.578							2.679.814.897	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	1.739.061.178						-	2.452.119.847	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	-			23 Dokumen	10.241.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan	-	15.754.310	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.750.200	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		9.882.620	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.491.100	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		5.871.690	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	-			14 Laporan	1.435.910.036			-	-	-	-	1.584.050.237	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1.401.117.436	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.526.826.147	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				12 Dokumen	31.927.600	Kab. Kulon Progo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.427.160	Kap. Panjatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Pelaksanaan Tugas ASN						Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.865.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.796.930	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	-			2 Dokumen	35.155.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan	-	59.465.560	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.355.900	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		25.805.560	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.800.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		33.660.000	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	-			5 Unit	20.398.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan	-	398.305.820	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.398.900	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		398.305.820	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	-			24 Laporan	151.023.392			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan	-	192.500.035	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.287.408	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		60.790.400	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119.735.984	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kap. Panjatan		131.709.635	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			15 Unit	86.331.650			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan	-	202.043.885	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	69.765.250	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		118.605.585	Kap. Panjatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	-	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		47.300.000	Kap. Panjatan
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	16.566.400	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		36.138.300	Kap. Panjatan
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-			100 %	42.562.500						-	55.380.050	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			18 Dokumen	35.348.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan	-	43.408.200	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	14.514.800	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		18.793.500	Kap. Panjatan
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	20.833.400	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		24.614.700	Kap. Panjatan
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			12 Dokumen	7.214.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kap. Panjatan	-	11.971.850	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.214.300	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kap. Panjatan		11.971.850	Kap. Panjatan
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-			100 %	39.509.500						-	47.330.250	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			7 Laporan	39.509.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan	-	47.330.250	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	39.509.500	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		47.330.250	Kap. Panjatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
6	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			97,37 %	65.362.200						-	88.739.750	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			5 Laporan	65.362.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan	-	88.739.750,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				76 Orang	20.081.300	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		29.245.700,00	Kap. Panjatan
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	45.280.900	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		59.494.050,00	Kap. Panjatan
7	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	22.207.200						-	36.245.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-			6 Laporan	22.207.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan	-	36.245.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	22.207.200	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kap. Panjatan		36.245.000,00	Kap. Panjatan
										J U M L A H		2.039.702.578							**2.850.814.897,20**	

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kapanewon Panjatan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Panjatan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target, tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Kapanewon Panjatan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Kapanewon Panjatan 2023–2026
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Kapanewon Panjatan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Kapanewon Panjatan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Jawatan – jawatan dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Kapanewon Panjatan, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Kapanewon Panjatan pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kapanewon Panjatan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Perubahan Renstra Kapanewon Panjatan 2023 – 2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Kapanewon Panjatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh

target indikator kinerja yang tertuang dalam RPD maupun RKPD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Kapanewon Panjatan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Panjatan.

Panjatan,2 Agustus 2024

PANEWU PANJATAN

J U M A R N A , SIP

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196704121991031016

LAMPIRAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Suroloyo, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD): Kapanewon Panjatan

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 25 Juli 2024

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : Ibnu Mo'az NIP : 19911207 202011008 Jabatan : JFT Perancang Tanda Tangan :	1. Nama : Setiya Irawan, A.Md. NIP : 197709272698031003 Jabatan : Ka. Sub Bag Renkeu Tanda Tangan .....

Mengetahui,

Koordinator

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.

19760317201001 1 006

SARAN dan REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Suroloyo
PD : Kapanewon Panjatan

1. Daftar isi agar disesuaikan/disinkronkan dengan sistematika penulisan
2. Bab I
   a) Landasan hukum agar ditambahkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025
   b) Sub bab Sistematika Penulisan agar disinkronkan dengan daftar isi
3. Bab II
   a) Sub bab 2.2 agar dihapus, sehingga menyesuaikan format lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yakni hanya menjadi 5 sub bab
   b) Pada tabel 2.5 agar disesuaikan dengan format lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Realisasi hanya tahun 2023, sedangkan tahun 2024 termasuk pada proyeksi.
   c) Pada Sub Bab 2.3, agar disesuaikan susunan/format substansinya
4. Bab III
   a) Pada Sub Bab 3.2 agar direvisi sasaran berikut indikatornya
   b) Pada Sub Bab 3.3 tentang Program dan Kegiatan untuk nomenklatur sub kegiatan bersumber dari Dais agar direvisi/disesuaikan

LAPORAN HASIL REVIU ATAS RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

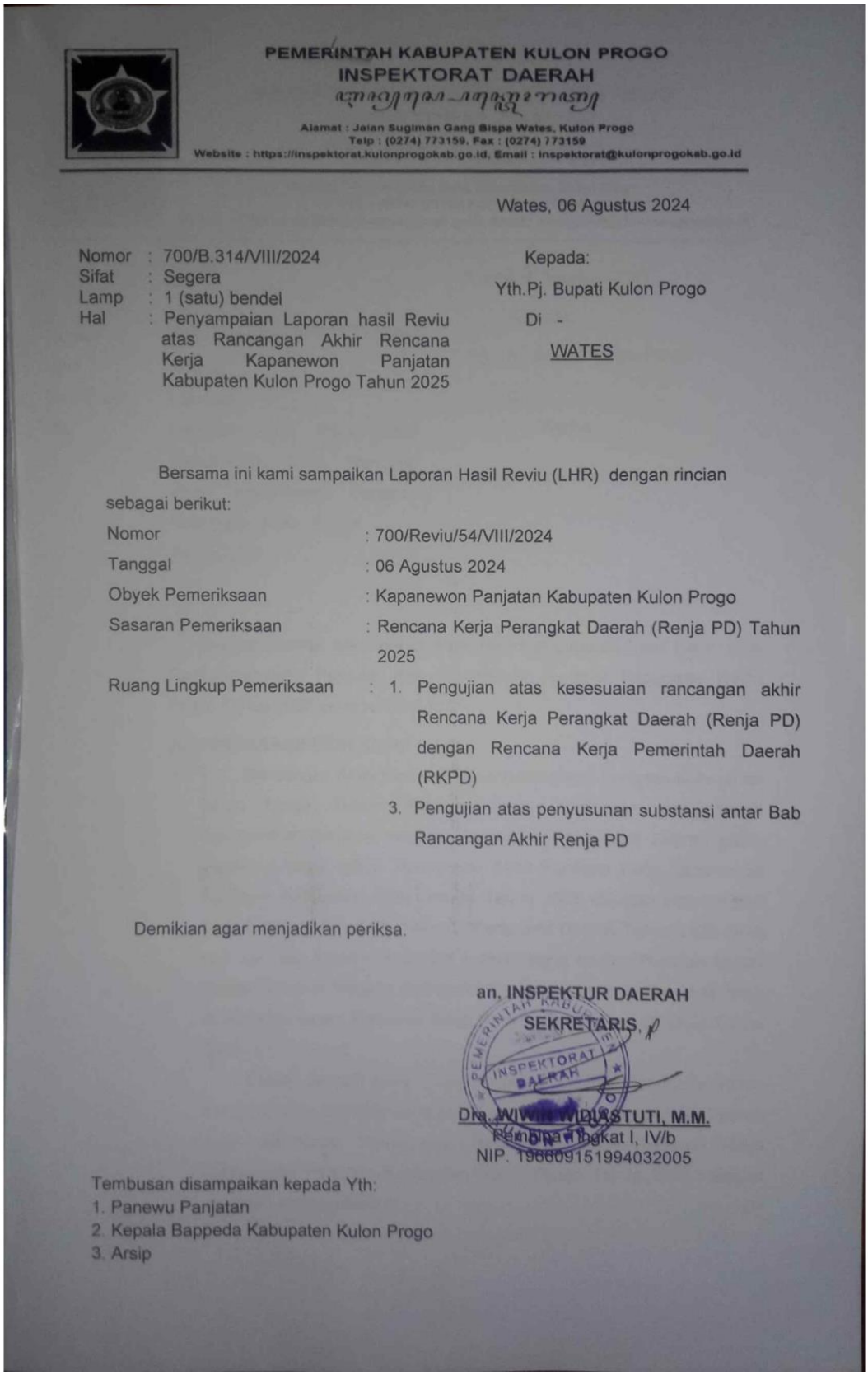

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Sugiman Gang Bispa Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773159, Fax : (0274) 773159
Website : https://inspektorat.kulonprogokab.go.id, Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

Wates, 06 Agustus 2024

Nomor : 700/B.314/VIII/2024
Sifat : Segera
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Penyampaian Laporan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Kepada:
Yth.Pj. Bupati Kulon Progo
Di -
WATES

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	: 700/Reviu/54/VIII/2024
Tanggal	: 06 Agustus 2024
Obyek Pemeriksaan	: Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
Sasaran Pemeriksaan	: Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025
Ruang Lingkup Pemeriksaan	: 1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
	3. Pengujian atas penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Renja PD

Demikian agar menjadikan periksa.

an. INSPEKTUR DAERAH
SEKRETARIS,

Dra. WIWIN WIDIASTUTI, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196809151994032005

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Panewu Panjatan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Sugiman Gang Bispa Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773159, Fax : (0274) 773159
Website : https://inspektorat.kulonprogokab.go.id, Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

Wates, 6 Agustus 2024

Nomor : 700/ Reviu /SA/VIII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Kepada:
Yth. Pj. Bupati Kulon Progo
Di
Wates

Dengan hormat, bersama ini kami haturkan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagai berikut:

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Isu-isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700/0752 tanggal 29 Juli 2024, Tim Inspektorat Daerah telah melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, dengan simpulan sebagai berikut:

1

1. **Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.**

   Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai

   Tanggapan Objek Reviu :

   Sepakat.

2. **Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja** Kapanewon Panjatan **Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.**

   a. Rumusan tujuan perangkat daerah dalam Bab III rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 **tidak sesuai** dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

      Tanggapan Objek Reviu :

      Sepakat dan akan ditindaklanjuti.

   b. Nama program, indikator program, target program dan pagu dana program rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 **sesuai** dengan RKPD 2025.

      Tanggapan Objek Reviu :

      Sepakat.

3. **Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rencana Kerja** Kapanewon Panjatan **Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.**

   Pada saat dilaksanakan reviu terhadap Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dijumpai hal-hal sebagai berikut:

   a. Telah ditetapkan Keputusan Panewu Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun Anggaran 2025.

   b. Substansi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2025.

d. Telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan rekomendasi hasil verifikasi telah ditindaklanjuti .

Tanggapan Objek Reviu :

Sepakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
4. Surat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050/1505 tanggal 23 Juli 2024 tentang Permohonan Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
5. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700/0752 tanggal 29 Juli 2024.

C. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

D. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Lingkup Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
2. Pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
3. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

E. TANGGUNG JAWAB DAN STANDAR REVIU

Tanggung jawab Tim Reviu terbatas pada simpulan hasil reviu berdasarkan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Tim Reviu memperoleh dokumen dan melakukan reviu secara objektif dengan mempertimbangkan referensi, kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Kebenaran dan keabsahan data, informasi dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan simpulan reviu menjadi tanggung jawab Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Reviu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

F. METODOLOGI REVIU

1. Metodologi Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 meliputi langkah-langkah kerja reviu mulai dari penyusunan program reviu, pembentukan tim reviu, menyiapkan instrumen reviu, penelaahan informasi dan dokumen, menelusuri, menganalisis, membandingkan, evaluasi dan melakukan wawancara dengan objek reviu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700/0752 tanggal 29 Juli 2024 pada tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024.

   Susunan Tim Reviu sebagai berikut:

Penanggung Jawab/ Pengendali Mutu	:	Arif Prastowo,S.Sos, M.Si./Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
Penunjang Menejerial	:	Dra. Wiwin Widistuti, M.M.
Pembantu Penanggung Jawab	:	Drs. Agus Wiyono Raharjo
Pengendali Teknis	:	M. Zunan Budiharto, SE.,M.M.
Ketua Tim	:	Intan Susilowati, S.E, M.M.
Anggota	:	Heri Nurcahyo, S.E.
	:	K. Wiwien Indaryati, S.E.
	:	Gravity Mahardika Yudha, A,Md.

G. GAMBARAN UMUM

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan sebagai dasar untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

H. URAIAN HASIL REVIU

1. **Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja** Kapanewon Panjatan **Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.**

   Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai antara lain sebagai berikut :

No	Dokumen	Catatan Reviu	
		Ada	Tidak
1	Perkada Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang RKPD Tahun 2025	v	
2	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;	v	
3	Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disepakati antara Tim Verifikator dan OPD	v	
4	SK Tim Penyusun	v	

2. **Pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja** Kapanewon Panjatan **Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.**

   a. Rumusan tujuan perangkat daerah dalam Bab III rancangan akhir Renja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 **tidak sesuai** dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan pada Renja 2025	Sasaran pada RKPD 2025	Keterangan
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Tidak Sesuai

b. Nama program, indikator program, target program dan pagu dana program rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 **sesuai** dengan RKPD 2025 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Renja 2025				RKPD 2025				Keterangan
	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000,00	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000,00	Sesuai
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	–	31.000.000,00	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	–	–	31.000.000,00	Sesuai
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100%	1.739.061.178,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100%	1.739.061.178,00	Sesuai
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	42.562.500,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	42.562.500,00	Sesuai
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	39.509.500,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	39.509.500,00	Sesuai
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum	97,37%	65.362.200,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum	97,37%	65.362.200,00	Sesuai
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa	100% d	22.207.200,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa	100%	22.207.200,00	Sesuai

3. **Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.**

Pada saat dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dijumpai hal-hal sebagai berikut:

a. Telah ditetapkan Panewu Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2024 tanggai 02 Januari 2024 tentang

7

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun Anggaran 2025.

b. Substansi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD 2025.
d. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil musrenbang yang dicantumkan dalam RKPD 2025 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
e. Indikator dan target sesuai dengan tupoksi Program, kegiatan dan Subkegiatan mendukung pencapaian sasaran sesuai dengan tupoksi Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.
f. Penginputan program, kegiatan dan sukegiatan dengan menggunakan **sipd.ri.**
g. Telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan rekomendasi hasil verifikasi telah ditindaklanjuti.

I. APRESIASI

Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan pejabat/ pegawai Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung terlaksananya kegiatan atas Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Catatan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR DAERAH

ARIF PRASTOWO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Panewu Panjatan Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
3. Arsip.

9

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Sugiman Gang Bispa Wates. Kulon Progo
Telp : (0274) 773159. Fax : (0274) 773159
Website : https://inspektorat.kulonprogokab.go.id. Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700/0752 tanggal 29 Juli 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, dan bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. **Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.**
   Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai antara lain sebagai berikut :

No	Dokumen	Catatan Reviu	
		Ada	Tidak
1	Perkada Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang RKPD Tahun 2025	v	
2	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;	v	
3	Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disepakati antara Tim Verifikator dan OPD	v	
4	SK Tim Penyusunan	v	

Tanggapan Objek Reviu :
Sepakat

2. **Pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.**

a. Rumusan tujuan perangkat daerah dalam Bab III Rancangan Akhir Renja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 **tidak sesuai** dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tujuan pada Renja 2025	Sasaran pada RKPD 2025	Keterangan
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Tidak Sesuai

Saran:

Tujuan pada Renja Tahun 2025 agar disesuaikan dengan sasaran pada RKPD Tahun 2025.

Tanggapan Objek Reviu :

Sepakat, akan segera kami koreksi, agar sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025

b. Nama program, indikator program, target program dan pagu dana program Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kulon Progo Tahun 2025 **sesuai** dengan RKPD 2025 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Renja 2025				RKPD 2025				Keterangan
	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000,00	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000,00	Sesuai
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	–	31.000.000,00	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	–	–	31.000.000,00	Sesuai
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100%	1.739.061.178,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100%	1.739.061.178,00	Sesuai
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	42.562.500,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	42.562.500,00	Sesuai

NO	Renja 2025				RKPD 2025				Keterangan
	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	Nama Program	Indikator Program	Target Program	Pagu Program (Rp)	
	Publik				Publik				
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	39.509.500,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	39.509.500,00	Sesuai
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum	97,37%	65.362.200,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum	97,37%	65.362.200,00	Sesuai
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa	100% d	22.207.200,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinsan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa	100% d	22.207.200,00	Sesuai

Tanggapan Objek Reviu :

Sepakat

3. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Pada saat dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Panewu Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah Kapanewon Panjatan Tahun Anggaran 2025.
2. Substansi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD 2025.
4. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil musrenbang yang dicantumkan dalam RKPD 2025 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.
5. Indikator dan target sesuai dengan tupoksi Program, kegiatan dan Subkegiatan mendukung pencapaian sasaran sesuai dengan tupoksi Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.
6. Penginputan program, kegiatan dan sukegiatan dengan menggunakan **sipd.ri.**

7. Telah dilaksanakan verifikasi oleh tim verifikasi terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan Berita Acara hasil verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran hari Rabu tanggal 25 Juli 2024, dan rekomendasi hasil verifikasi telah ditindaklanjuti.

Tanggapan Obyek Reviu :

Sepakat

Wates, Agustus 2024

Panewu Kapanewon Panjatan	Pengendali Teknis	Ketua Tim
Jumarna, S.I.P. NIP. 19670412 199103 1 016	Muhammad Zunan, B., SE., M.Si. NIP. 19670919 199703 1 003	Intan Susilowati, SE., MM. NIP.19720204 200604 2 004

RENCANA KERJA(RENJA) KAPANEWON GALUR TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON GALUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Galur Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Galur. Dalam rangka itu, Kapanewon Galur menyusun Rencana KerjaTahun 2025 dengan mengacu pada Renstra Kapanewon Galur Tahun 2023-2026 dan perpedoman pada RKPD Kab. Kulon Progo Tahun 2025 yang ingin mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram, memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantap, profesionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai.

Pada tahun 2025 Kapanewon Galur siap melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya kegiatan yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja OPD Kapanewon Galur tahun 2025 , kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Galur, 2 Agustus 2024
PANEWU GALUR

Drs. SUNARYA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19690128 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud danTujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Rankir Renja Perangkat Daerah 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 42

BAB V PENUTUP 48

Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Galur Tahun 2023.....	9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*	10
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Galur.....	19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo	27
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2024	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja	37
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2025	38
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kapanewon Galur Tahun 2025	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerjasebagai pedoman kerja selama periode satu tahun. Fungsinya adalah untuk mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana KerjaPerangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Galur

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor; 13 Tahun 2021 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor; 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Kapanewon dan Kelurahan;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 274/C/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

15. Peraturan Bupati No 25 Tahun 2024 Tentang RKPD tahun 2025
16. Peraturan Bupati No 20 tahun 2022 Tentang Rencana Strategis PD tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional;
2. Menjadi Pedoman dan Dasar dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) APBD tahun 2025;
3. Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengn tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD
4. Menyediakan Informasi bagi Pemenuhan laporan Evaluasi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur tahun 2025 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi . Organisasi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasoinal dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kapanewon. Tercapai-tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi maasukan (input), keluaran *(output),* hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja masing-masing jenis indikator yang sudah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan mememanfaatkan data kinerja. Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Galur menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan

kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja *input, output* dan *outcome*. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan *benefit* dan *impact*. Sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai APBD. Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran.

Adapun evaluasi pengukuran pelaksanaan rencana kerja dan capaian kinerja sampai tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur
Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%)	100%	100%
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	84,25	86,108
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25%		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	97,37%	97,37%

Tabel.2.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Galur Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persetase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Peerintahan Umum	92,11%	92,11%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%
Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 %	100%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 1.832.861.627,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 1.765.812.335,00

evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3

TABEL. 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Galur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7						**KECAMATAN**									
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1**
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**94**		**23**	**23**	**100%**	**23**	**46**	**0,49**

7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	0	2	2	100%	2	4	0,4
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	0	21	21	100%	21	42	0,5
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**56**		**14**	**14**	**100%**	**14**	**28**	**0,50**
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148	0	280	280	100%	**380**	660	0,57
7	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	0	12	12	100%	12	24	0,5
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	0	14	14	100%	14	28	0,50
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**8**		**16**	**16**	**100%**	**16**	**32**	**4,00**
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	0	4	4	100%	4	8	0,50
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	0	12	12	100%	12	24	0,5

7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Asset**	**71**		**10**	**10**	**100%**	**0**	**10**	**0,14**
7	01	01	2	07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	71	0	10	10	100%	0	10	0,14
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**96**		**24**	**24**	**100%**	**24**	**48**	**0,5**
7	01	01	2	08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	0	12	12	100%	12	24	0,5
7	01	01	2	08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	0	12	12	100%	12	24	0,5
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)**	**12**		**40**	**40**	**100%**	**41**	**81**	**6,75**
7	01	01	2	09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35		8	8	100%	8	16	0,46
7	01	01	2	09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29		2	2	100%	2	4	0,14

7	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	168	0	30	30	100%	31	61	0,36
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan**	**100**		**100**	**100**	**100%**	**100**		
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**32**		**15**	**15**	**100%**	**15**		
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28	0	7	7	100%	7	14	0,50
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	0	8	8	100%	8	16	0,5
7	**01**	**02**	**2**	**04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**48**		**12**	**12**	**100%**	**12**	**24**	**0,5**

7	0 1	0 2	2	0 4	000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	0	12	12	100%	12	24	0,5
7	**0 1**	**0 3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**		**100**	**100**	**100%**	**100**	**200**	**2**
7	**0 1**	**0 3**	**2**	**0 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**28**		**7**	**7**	**100%**	**7**	**14**	**0,5**
7	0 1	0 3	2	0 1	000 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	0	7	7	100%	7	14	0,5
7	**0 1**	**0 5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**		**92,11**	**92,11**	**100%**	**94,74**	**186,85**	**1,87**
7	**0 1**	**0 5**	**2**	**0 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**24**		**6**	**6**	**100%**	**6**	**12**	**0,50**
7	0 1	0 5	2	0 1	000 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	630	0	150	150	100%	160	310	0,49

7	01	05	2	01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	0	6	6	100%	6	12	0,50
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**		**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**1**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**24**		**6**	**6**	**100%**	**6**	**12**	**0,50**
7	01	06	2	01	0001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	0	6	6	100%	6	12	0,50
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2	**22**	**08**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**		**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**1**

2	**2 2**	**0 8**	**5**	**0 7**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**4**		**1**	**1**	**100%**	**1**	**2**	**0,5**
2	2 2	0 8	5	0 7	000 6	**Gelar Budaya Jogja**	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	0	1	1	100%	1	2	0,5
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4						**SEKRETARIAT DAERAH**									
4	**0 1**	**0 4**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**		**100**	**100**	**100%**	**100**	**200**	**2**
4	**0 1**	**0 4**	**5**	**0 6**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun (Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**8**		**2**	**2**	**100%**	**2**	**4**	**0,5**

4	01	04	5	06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	0	2	2	100%	2	4	0,5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain diperlukan :

1. Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu ketelitian, baik sasaran, pembiayaan, waktu pelaksanaan dengan mengikuti aliran kas yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun keuangan.
2. Pengguna anggaran diperlukan kebijakan, ketelitian dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan pengguna anggaran perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian target anggaran, sehingga dapat dipacu pelaksanaan anggaran sesuai dengan target, sasasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4. Diperlukan ketepatan dalam mengatur waktu, personil dan pengaggaran pada saat volume kegiatan meningkat, agar kesemuanya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel. 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	18	*14*	*19*	*20*
1	Rata-rata presentase pencapaiandi setiap perangkat daerah				100	100	100	100	91,67	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,25	84,50	84,75	85	86,108	84,75	85	
3	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon				97,37%	98,25%	99.12%	100	97,37%	99.12%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Galur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Potensi banjir di pemukiman jika tanggul Sungai Progo akibat penambangan yang tak terkendalikan.
b. Padatnya arus lalu lintas karena akses jalan menuju Bandara YIA dan menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui Kapanewon Galur/ Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
c. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kapanewon Galur disebabkan adanya truk penambang pasir yang muatannya melebihi tonase.
d. Terganggunya arus lalu lintas karena banyaknya depo pasir yang tidak terkendali.
e. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa Kalurahan yang juga memperlancar pengangkutan hasil-hasil pertanian.
f. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengguna jalan tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan jalan perlu pelebaran.
g. Akan dibangun Jalur Jalan Lintas Selatan yang secara kerkesinambungan.
h. Rencana Proyek Pembangunan Bandara Udara yang menuntut pula dibangunnya insfrastruktur yang lain.
i. Rawan bencana tsunami karena mempunyai wilayah pantai.
j. Rawan bencana gempa bumi.
k. Bencana angin dan pohon tumbang akibat angin dan hujan deras yang sering terjadi.
l. Kondisi air sumur yang berwarna akibat penambangan pasir.
m. Masih adanya rumah tidak layak huni .
n. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemerintah PTSL untuk tanah masyarakat yang belum bersertifikat
o. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal dikarenakan dukungan perlatan yang masih minim bagi nelayan.
p. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan.
q. Pengangguran/ kenakalan remaja yang masih sering terjadi .
r. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan.

s. Permasalahan Kesehatan Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemangku kepentingan.

Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon antara lain :

a. Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kulon Progo.
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Coorperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga adanya peluang usaha bagi para pengusaha dengan memanfaatkan Jalur Jalan Lintas Selatan.
c. Pelayanan Prima, Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan mengembalikan kepercayaan masyarakat masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

d. Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebagai faktor penting yang meliputi perijinan dan non perijinan, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaatan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

e. Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Pelabuhan Tanjung Adikarto yang merupakan Pelabuhan perikanan yang terus diupayakan pembangunannya , pembangunan bandara yang menuntut pembangunan lain yang berkaitan, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jumlah SDM dan keahlian yang dimiliki pegawai yang ada di tingkat Kapanewon, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja Kapanewon.

b. Kualitas aparatur pemerintah Kapanewon yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendidikannya formal, maupun pendidikan informal, seperti:diklat/kursus/bimbingan teknis lainnya yang mendukung kelancaran dan profesi pekerjaan.

c. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : kebutuhan pendukung ruang pelayanan yang berstandar, ruang lakstasi bagi pengguna layanan yang baru menyusui, kendaraan dinas dinas yang masih kurang.

3. Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

a. Partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Dunia Usaha di Kapanewon Galur tidak lepas dari usaha serta peran Pemerintah Kapanewon guna peningkatan penyelenggaraan pembangunan terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah

guna menumbuhkan desa /kalurahan yang berkaitan erat dengan jalannya roda perekonomian, sehingga misi Kepala Daerah dalm menciptakan sistem perekonomian yang berbasis masyarakat terlaksana di Kapanewon Galur.

b. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya terlihat jelas di pelayanan yang diberikan Pemerintah Kapanewon Galur kepada masyarakat sebagai pengguna layanan yakni Kapanewon sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, ini tak lepas dari karakter Sumber Daya Manusia yang dimiliki petugas, Sumber Daya Manusia yang mempunyai prestasi untuk mengembangkan dirinya dimulai di lingkup Pelayanan Kapanewon, dengan tetap mengedepankan prinsip mandiri, berkarakter dan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya pemerintah.
c. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkwalitas, terlihat jelas di wilayah selatan yakni pengembangan infrastruktur Jalan Jalur Lintas Selatan menuju ke arah pengembangan maritim dan menuju ke arah bandara yang melibatkan kepemilikan tanah warga yang terkena proyek pembangunan, dipandang sebagai upaya untuk mewujdukan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam pengembangan potensi wilayah.

4. Tantangan dan Peluang

Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Kapanewon Galur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Kalurahan sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntuk kualitas pamong kalurahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

b. Penyelanggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan yang berkualitas.
c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-goverment) menuntut kemampuan aparatur pemerintah Kapanewon maupun Kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
d. Kapanewon Galur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah demi terciptanya daerah yang aman, tentram dan terus maju.
e. Brand promosi investasi Kulon Progo sebagai "The Jevel of Java", menuntut terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai, dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.
f. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melalui Kapanewon Galur, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.
g. Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan Pemerintah Daerah , peluang tersebut antara lain :

a. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
b. Kapanewon Galur dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
c. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan untuk 7 (Tujuh) Kalurahan di Kapanewon Galur.
d. Kapanewon Galur telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Alam, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang memadai.
e. Di Kapanewon Galur terdapat lembaga perbankan/ keuangan seperti

: Bank BRI, Bank BPD DIY, Bank Pasar Kulon Progo, BPR Nusamba, BPR Shinta Putra, BUKP Propinsi DIY, LKM Binangun, BMT, koperasi dan paguyuban simpan pinjam di masyarakat.

f. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat baik berupa rekomendasi maupun perijinan.
g. Di Kapanewon Galur telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
h. Wilayah Kapanewon Galur dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
i. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Trisik pasca abrasi akan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil potensi laut secara maksimal.
j. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
k. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PATEN.
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)
c. Implementasi dan evaluasi Siskeudes dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
d. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan Kalurahan..
e. Kerentanan wilayah terhadap bencana banjir dan Tsunami , antisipasi bencana.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kapanewon Galur . Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel.2.5.

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon GALUR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**1.852.542.671**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**1.634.426.769**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23 dokumen	***8.000.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			23 dokumen	***12.149.100***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.855.100	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	3.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	3.294.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				***1.612.177.459***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***1.386.527.315***	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Galur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.576.002.459	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Galur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.350.377.815	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Galur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	4.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Galur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	32.309.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	32.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.840.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				***41.250.000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***35.621.700***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Galur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.850.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Galur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.201.700	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.420.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***10.560.000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***10.549.400***	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31 Unit	10.560.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	10.549.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**24 Laporan**	***95.177.695***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**24 Laporan**	***92.767.904***	

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.899.912	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.277.695	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.867.992	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**3 laporan**	***85.377.517***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**3 laporan**	***96.811.350***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Galur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	68.317.517	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Galur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	68.317.950	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.960.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.055.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	12.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	12.438.400	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan**	100%	**33.120.090**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan**	100%	**30.255.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				***25.290.000***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***				***23.590.500***	

1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Galur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 laporan	8.423.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Galur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	6.835.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	16.867.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	16.755.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*		***7.830.090***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*		***6.665.000***	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.830.090	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	6.665.000	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**20.661.744**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**20.352.200**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				***20.661.744***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***				***20.352.200***	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20.661.744	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20.352.200	
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**54.101.549**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**56.912.100**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah				***54.101.549***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***				***56.912.100***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Galur	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 orang	18.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Galur	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 orang	21.434.600	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	35.601.549	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	35.477.500	
V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**17.876.007**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**14.705.200**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				***17.876.007***	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***				***14.705.200***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Galur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	17.876.007	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Galur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	14.705.200	

VI	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**62.244.100**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**62.244.100**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan				***62.244.100***	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		*Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun (Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*		***62.244.100***	
1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang ddampingi	2 Dokumen	*62.244.100*	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Galur	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun*	4 Dokumen	62.244.100	
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan**		100.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan**		100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakart*		**100.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakart*		**100.000.000**	

	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap Galur	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 laporan	100.000.000	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.140.546.161**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**1.918.895.869**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Kapanewon Galur pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan urasan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah di arahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelyanan public yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kaluahan;
4. Pembinaan pengelolaan BUMDes
5. Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon.

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksakana, kapanewon Galur terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan hasil analis kebutuhan OPD, kemusian di selaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kapanewon dan Kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Galur Tahun 2024 dengan pagu indikatif wilayah kapanewon dan pagu indikatif sektoral. Program dan kegiatan hasil musrenbang dapat di lihat pada tablel 2.6 berikut :

Tabel. 2.6

Program dan kegiatan hasil musrenbang Tahun 2024

NO.	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Volume	Kebutuhan Anggaran
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0

BAB III
TUJUAN DAN PERAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni " Akselerasi Petumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi :

b. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
c. Memantabkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
d. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
e. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
f. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
g. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
i. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Galur Tahun 2025 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Rencana Strategis Kapanewon Galur Tahun 2023-2026.

Adapun Perumusan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Kapanewon Galur Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2025
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP	A
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900-1.5.15.-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Galur Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**1.634.426.769**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23 dokumen	***12.149.100***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.855.100,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	3.294.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				***1.386.527.315***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Galur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.350.377.815	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32.309.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.840.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				***35.621.700***	

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Galur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.201.700	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.420.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***10.549.400***	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	10.549.400,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***92.767.904***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.899.912,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.867.992	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				***96.811.350***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Galur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	68.317.950	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.055.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	12.438.400	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan**	100%	**30.255.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				***23.590.500***	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Galur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	6.835.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	16.755.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				***6.665.000***	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	6.665.000	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**20.352.200**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				***20.352.200***	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20.352.200	
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**56.912.100**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah				***56.912.100***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Galur	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 orang	21.434.600	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	35.477.500	
V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**14.705.200**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				***14.705.200***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Galur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	14.705.200	
VI	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**62.244.100**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				***62.244.100***	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Galur	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 Dokumen	62.244.100	
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan**		***100.000.000***	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				***100.000.000***	

	Gelar Budaya Jogja	Kap Galur	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**1.918.895.869**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**
   1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
      a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan.

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** meliputi Kegiatan : Adat Seni , Tradisi dan Lembaga Budaya dengan sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 serta pendanaan Kapanewon Galur dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KAPANEWON GALUR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GALUR						1.918.895.869,00							2.238.568.504,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	

1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	-			**100 %**	**100.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur	-	100.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pem	Lingkup Kapanewon Galur		100.000.000,00	KAPANEWON GALUR

												erinta han				
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.244.100,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.244.100,00**							**68.469.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	-			**100 %**	**62.244.100,00**						-	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi*	-			2 dokumen	62.244.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.469.100,00	KAPANEWON GALUR
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Galur dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Galur. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Galur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlihat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja..

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dan rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kapanewon Galur dalam menyusun Rencana Kerja 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2025.

Galur, 2 Agustus 2024

KAPANEWU GALUR

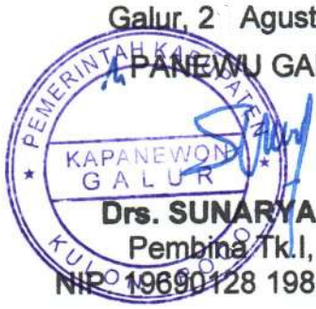

Drs. SUNARYA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 19690128 198903 1 002

DOKUMEN RENCANA KERJA KAPANEWON LENDAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah 9

2.3 Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 11

2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD……. 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 21

3.3 Program dan Kegiatan…….. 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…… 26

BAB V PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2023……	5
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2023	5
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo ……...	5
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo ……...…….	10
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo …….……..……	14
Tabel 2.6	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ……..…….	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……..…….…….……...	22
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2025 …...……..…….……...	23
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 …….…….…….	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Pogo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2025 ini juga disusun dengan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran Kapanewon Lendah beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator program/kegatan. Rencana. Rancangan Kerja (Renja) ini sebagai acuan untuk penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Lendah Tahun Anggaran 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih, semoga dokumen ini dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Lendah 2 Agustus 2024

Panewu Lendah

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON LENDAH KULON PROGO

SUTRISNA,S.Sos

Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19690316 199603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuhan dan sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kapanewon Lendah 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2025 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.01.15.5-51317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025;

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKATDAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untukmenangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Lendah Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Lendah didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	90,943
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	97,37	97,37

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indicator utama indeks kepuasan masyarakat melebihi target, dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memuaskan.

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Lendah sampai denganTahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan	100	100

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11	92,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Pada table diatas, indicator kinerja mencapai target yang ditetapkan, karena masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Lendah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
2.3

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Lendah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah :Kapanewon Lendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar									
1	01			Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
1	01	01		Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan									
1	01	01	01	Kegiatan Adat,Seni,tradisi dan Lembaga Budaya									
1	01	01	02	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	400.000.000	0	100.000.000,00	100.000.000	100%	100.000.000	200.000.000	50%
1				Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
1	01			Bidang Urusan Sekretariat Daerah									
1	01	01		Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
1	01	01	01	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan									
1	01	01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	238.740.600	0	51.441.600	35.000.000	68%	56.685.800	75.000.000	16,75%
1				Urusan Kewilayahan									
1	01			Bidang Urusan Kecamatan									
1	01	01		Program Penunjang Urusan									

				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1	01	01	01	Kegiatan Perencanaan,Pnganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	01	01	01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	24.500.000	11.550.000	5.000.000	3.100.000	62%	6.000.000	7.600.000	31%
1	01	01	01.02	Sub Kegiatan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	18.976.000	3.160.000	3.476.000	740.000	21,28%	4.500.000	4.380.000	23,08%
1	01	01	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	01	01	02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	5.778.490.685	1.440.267.973	1.410.301.231,62	654.400.000	46,4%	1.435.932.581,55	1.980.319.569	34,27%
1	01	01	02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Plaksanaan Tugas ASN	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	168.145.000	34.850.000	36.450.000	19.000.000	52,12%	40.095.000	58.252.000	34,64%
1	01	01	02.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	20.108.000	3.280.000	3.608.000	1.670.000	46,28%	5.000.000	5.318.000	26,44%
1	01	01	02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	87.824.800	23.400.000	19.000.000	12.270.000	13,97%	20.949.800	28.731.200	32,71%
1	01	01	02.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	126.075.000	23.400.000	26.000.000	12.020.000	9,53%	29.400.000	35.420.000	28,09%
1	01	01	02.06	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	138.360.300	118.975.936	26.300.000	11.250.000	8,13%	33.869.800	44793850	32,27%
1	01	01	02.07	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	445.891.982	118.975.936	106.190.000	59.920.000	13,44%	111.002.1041	171.529.152	38,46%
1	01	02		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	01	02	01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	392.880.000	108.595.400	85.190.000	41.760.000	10,63%	93.720.000	114.142.300	29,05%
1	01	02	01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan	59.670.000	108.595.400	12.700.000	7.640.000	12,80%	13.942.500	19.196.600	32,17%

				Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota								
1	01	03		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
1	01	03	01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahaan di Tingkat Kecamatan									
1	01	03	01.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prsentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	67.220.000	16.225.000	16.250.000	8.370.000	12,46%	16.782.000	23.157.500	34,4%
1	01	03	01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Prsentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	118.640.000	23.000.000	25.650.000	17.200.000	14,50%	28.039.000	41.441.500	34,93%
1	01	03	01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Prsentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	40.730.000	7.500.000	10.000.000	5.210.000	12,78%	9,347.477	14.310.000	35,08%
1	01	04		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan									
1	01	04	01.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
1	01	04	01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalrahan	112.890.000	26.566.600	27.500.000	16.110.000	14,27%	24.168.255	41.635.000	36,88%
1	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
1	01	05	01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
1	01	05	01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan mum	101.080.000	21.575.000	23.000.000	4.620.000	4,57%	23.500.000	25.550.000	25,28%
1	01	05	01.02	Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peartura Perundang-undangan	Prosentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan mum	146.770.000	33.040.000	37.500.000	19.000.000	12,94%	34.775.777	87.825.000	59,83%
1	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa									
1	01	06	01	Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
1	01	06	01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampngan Desa di Wilayahnya	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.522.000	17.100.000	18.810.000	9.120.000	13,31%	16.109.800	35017.106	51,10%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Lendah merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Lendah dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Lendah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Lendah disajikan pada Tabel 2.4 Berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2022 (transisi)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,26	84,25	84,5	84,75	85	90,943	84,50	84,75	
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				94,12	97,37	98,25	99,12	100	97,37	98,25	99,12	

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

231. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait pelayanan

Kapanewon Lendah sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Lendah masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor *platform* dasar pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.
4. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.

232. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah :

1. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
2. Keterbatasan ruangan kerja yang dimiliki Kapanewon Lendah sehingga sulit melakukan penataaan baik penggunaan ruangan maupun tempat penyimpanan arsip (perlu ada pembangunan gedung baru);
3. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
4. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
5. Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat serta perubahannomenklatur Kapanewon menjadi kapanewon;
6. Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan;
7. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Lendah secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi dari sektor pendidikan dan kesehatan.

233. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah :

a. Tantangan

Kapanewon Lendah adalah Kapanewon perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Kulon Progo cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang.

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Lendah cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
2) Sentra industri kerajinan batik.
3) Sebagai penyangga kawasan industri.
4) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.
5) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

234. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Lendah, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur;
7) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Lendah maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Lendah agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Lendah. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut.

Tabel : 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPDTahun

2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama PD : Kapanewon Lendah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					CatatanPenting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				**100.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**100.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan GelarBudaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***		***Jumlah Laporan GelarBudaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Lendah	Jumlah Laporan GelarBudaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	

II	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				45.000.000	
	Sekretariat Daerah				**62.244.100**	**Sekretariat Daerah**				45.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**62.244.100**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	**62.244.100**	***Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan Keistimewaan***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	45.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	**62.244.100**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	45.000.000	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan				**2.043.457.993,93**	**Kecamatan**				**1.889.750.067**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.881.080.798,93**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.728.263.965**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja***	***25 Dokumen***	***11.500.000***	***Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan EvaluasiKinerja Disampaikan TepatWaktu***	***25 Dokumen***	***9.155.700***	

	Perangkat Daerah		***Disampaikan TepatWaktu***			***Kinerja Perangkat Daerah***					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.500.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.515.700	
2	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	3.640.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan TepatWaktu***	***14 Laporan***	***1.499.872.345,93***	***Administrasi KeuanganPerangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	1.446.307.365	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.450.322.345,93	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.403.407.365	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.050.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	39.252.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.648.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***57.150.000***	***Administrasi UmumPerangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	**41.661.200**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.461.200	

2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah PenambahanAset***	***4 Unit***	***30.000.000***	***Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Penambahan Aset***	***4 Unit***	**3.667.000**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.667.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***148.116.453***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	**145.153.002**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhandana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.756.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,543,850	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.359.553	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111,609,152	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***134.442.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	**82.319.700**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Lendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	105.092.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Lendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	63,816,600	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	14.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5,446,500	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	15.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	13,056,600	

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**57.324.784**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**48.129.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***46.942.600***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	**39.029.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Pening
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	16.977.800	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	14,787,500	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	29.964.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	24,241,500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***10.382.184***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	**9.100.000**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	10.382.184	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9.100.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**25.007.173**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**25.525.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan***	***8 Laporan***	***25.707.585***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan***	***8 Laporan***	**25.525.000**	

			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					***Masyarakat di Wilayah Kecamatan***			
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	26.007.585	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	25.525.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**	**62.709.680**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**	***60.735.000***	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***62.709.680***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***60.735.000***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	25.900.800	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional	100 orang	20,930,000	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	36.809.050	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	39,805,000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**17.335.563**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**27.097.100**	

	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**17.335.563**	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**27.097.100**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	**17.335.563**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	27.097.100	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.043.457.993,93**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**1.889.750.067**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Lendah diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2025 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Lendah pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah **“Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel”**. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja 2025	Sasaran	IndikatorSasaran	Target Kinerja 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiapperangkat daerah	100
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	84,75
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12

Sumber: Renstra Kapanewon Lendah 2023-2026

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Lendah Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**45.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			***3 Dokumen***	45.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	45.000.000	
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.721.948.197**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***25 Dokumen***	11,313,400	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8,387,700	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	2,925,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	**1,436,977,365**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1,403,407,365	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30,577,700	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2,992,300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	**40,030,200**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,940,200	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25,090,000	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Penambahan Aset***	***5 Unit***	3,667,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3,667,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	**153,279,232**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,543,200	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119,736,032	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**79,606,700**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Lendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	61,111,900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5,442,100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	13,052,700	
IV	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	**42686900**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	14,620,100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	28,066,800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	8,975,600	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,975,600	
V	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	25,433,600	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	25,433,600	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	25,433,600	
VI	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37%**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	**60,592,200**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	20,859,600	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	39,732,600	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	26,909,300	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	26,909,300	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	26,909,300	
Jumlah Pagu Dana Kegiatan					**2,034,471,497**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakanyang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:**

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
   b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:**

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar BudayaJogja.

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**

Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan, dengan subkegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun2025 serta pendanaan Kapanewon Lendah dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Instansi : Kapanewon Lendah

Jumlah Pagu : Rp. **2.037.249.897,00**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON LENDAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON LENDAH						**2.037.249.897,00**							**2.323.143.926,67**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			-	-	Kapanewon dan kalurahan	-	100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kapanewon dan kalurahan		100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			-	-	Kapanewon dan kalurahan	-	68.469.100,00	KAPANEWON LENDAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kapanewon dan kalurahan		68.469.100,00	KAPANEWON LENDAH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.889.202.197,00**							**2.148.674.826,67**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.889.202.197,00**							**2.148.674.826,67**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.723.738.997,00**						**-**	**1.940.858.215,67**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	8.678.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.678.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	1.437.219.365,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon	-	1.535.484.526,67	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/bulan	1.403.407.365,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		1.481.934.526,67	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	30.701.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		47.550.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.110.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATANI SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REAUSASI CAPAIAN RENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70101206	Administrasi Umum Perengkat Oaerah	*Jumlah Dokllmen Admin;strasi Umum*				2 Dokumen	41288200,00			rvleningkatkan Sumber *Daya* tv1anusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingl<alan 4. Opumalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		65800 000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Palret Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Pakel	16.198200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan. Semua Kel/Oesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	rvleningkatkan Sumber Daya tvlanusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkalan 4. Opurnalisasiitata Kelola Pamerinlahan	Kapanewon dan kalurahan		28.125.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01 01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPO														
			Jumlah Laporan Penye/enggaraan Rapa/ Kooniinasi dfJn K011s(1lt8si SKPD				12 Laporan	25 090 000,00	Kab. Kubn Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Oesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon dan kalurahan		37 675 000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Mili< Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Sarana dtm PrasarnM Gedung Kantor atau Bengunan Lainnya*				4 Uni	3.667.000,00					Kapanewon dan kalurahan		35.000.000,00	KAPANEWON LENOAH
	701012070010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarena dan Prasarana Gedur,g Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dised,-akan				5Un!	3.667.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua KeliOesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon dan kalurahan		35,000.000,00	KAPANEWDNLENDAH
	7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penun_jang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan J0s:a Penunjang yang Dised,-Bkan*				24 Laporan	153.279.232,00					Kapanewon		153.556.689,00	KAPANEWDN LENDAH
	7.01 01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ai"dan Listrik														
			Jumlafl Laporan Penyed;aan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Ustrik yang Dised,-akan				12 Laporan	33 543200,00	Kab Kulon Progo, Semua Kecamatan, SemuaKelJOesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon		38 320 000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporon Penyed;aan Jasa Pelayanan Urrum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119736.032,00	Kab. Kubn Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Oesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningka1kan Sumber *Daya* fvlanusia Yang Berkualitas oan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai lingl<alan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Menusia	Kapane1NOn		115 236 689,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	79.606.700,00			-	-	Kapanewon	-	144.017.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	61.111.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		110.142.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.442.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	13.052.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		18.875.000,00	KAPANEWON LENDAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**52.106.100,00**						**-**	**59.329.311,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			7 Laporan	43.006.100,00			-	-	Kapanewon dan kalurahan	-	48.588.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	14.787.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon dan kalurahan		17.573.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	28.218.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon dan kalurahan		31.015.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	9.100.000,00			-	-	Kapanewon dan kalurahan	-	10.741.311,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	9.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon dan kalurahan		10.741.311,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN I PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAOPD TAHUN 2023	PRAKJRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Prosentttse Penir,gkatan Pemberdayaan Masyarakat* Desa *dan Kelurahan*				**100%**	**25.525.000,00**							**26.915.589,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des.a	*Jumfah Laporan Peningkalan Ef&krifit.es KegiBlBn Pemberdayaan Masyarakat di Wiayah Kecamalan*				8 Laporan	25.525.000,00					Kapenewon dan kalurahen		26.915.589,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efek.tifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di VVllayah Kecamatan														
			Jumlah Lapomn Peningkatan Efel<DvilBS Kegiaran Pemberdayaan Masyarakat di Wllayah Kecamatan				8 Leporan	25.525.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon dan kalumhan		26.915.589.00	KAPANEWON LENDAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Presentase *Peningk* atan *Penyelenaoaraan Urusan Pemerintahan Umum*				**94,74** %	**60.735.000,00**							**103.629.960,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemelintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*JumfahUpoum PenyeJenggaman urussn Pemerintahan Utnum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				4 Leporan	60.735.000,00					Kapanewon den kalurahan		103.629.960.00	KAPANEWON LENDAH
	701052010002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			JumfBh Dmng yang Mengikut1Fasilil'asi. KoorrHnasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsult.asi) WawaS8n Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	20 930 000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel,Oesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon den kalurahan		64 902 680.00	**KAPANEWON** LENDAH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perunctang-Undangan														
			Jum/ah UJ(X)mn Konflik yang Ditangani Sesuai Ketenluan Peraturan Perundang-Undangan				4 Leporan	39.805.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel,Oesa	**PENDAPATAN** ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon den kalurahan		38.727.280.00	KAPANEWON LENDAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN** PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Presentase Peningkatan Pembineen dan Pengawas■n Pemerintahan Des•*				100 •10	**27.097.100,00**							**17.941.751,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemetintahan Dasa	*Jumfah I.Bpoan Hasil KoorrJinasi Pendampmgan Desa di Wilayahnya*				8 Leporan	27 097.100,00					Ke panewon den kalurahan		17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendarrpingan Oesa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil KoorrHnasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	27.097.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamalan, semua Kel/Oesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kapanewon dan kalurahan		17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
	X	**NON URUSAN**						**3.047.700,00**							**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.047.700,00**							**6.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**3.047.700,00**						**-**	**6.000.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	3.047.700,00			-	-	Kapanewon	-	6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.047.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon		6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	J U M L A H							**2.037.249.897,00**							**2.323.143.926,67**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2025 ini merupakan rencana tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Lendah dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan memaksimalkan segenap aspirasi *stakeholders* (pihak terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Lendah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Lendah ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Rancangan Rancangan Kerja kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Lendah dan *stakeholders* yang ada.

Lendah, 2 Agustus 2024

Panewu Lendah

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON LENDAH

SUTRISNA,S.Sos

Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19690316 199603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

43

RENCANA KERJA (RENJA)

KAPANEWON SENTOLO

TAHUN 2025

KAPANEWON SENTOLO

Jalan Jogja Wates Km 18 Salamrejo Sentolo Telpon (0274)6472118

Kode Pos 55664

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2025 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo di wilayah Kapanewon Sentolo.

Kapanewon Sentolo menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka melayani dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai.

Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2025 ini kami susun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sentolo, 2 Agustus 2024

PANEWU SENTOLO,

RADEN SIGIT PURNOMO, SIP.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 19681202 199103 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul …….. i

Kata Pengantar …… ii

Daftar isi …….. iii

BAB I PENDAHULUAN ……... 1

1.1. Latar Belakang ……... 1

1.2. Landasan Hukum …… 2

1.3. Maksud dan tujuan ……..... 3

1.4. Sistematika Penulisan ……..…….. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU …… 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu…… 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo …… 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.. …… 19

2.4. Review Terhadap RKPD ……. …… 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….. 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …….. 31

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ……. 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …… 31

3.4. Program dan Kegiatan ……..... 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH….. 34

BAB V PENUTUP … ……. 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana kerja, dimana Rencana Kerja dimaksud merupakan bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja Organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan, sehingga diharapkan kedepan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencana teknis operasional yang memuat, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kulon Progo mengintruksikan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Kepala OPD menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra & Evaluasi Kinerja PD serta Isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi;
3. Organisasi Perangkat Daerah atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah membahas Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam Forum SKPD/Gabungan OPD selanjutnya disusun menjadi Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kapanewon Sentolo 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang setrategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan APBD Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan

Pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2025 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyusunan RKPD 2025.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah

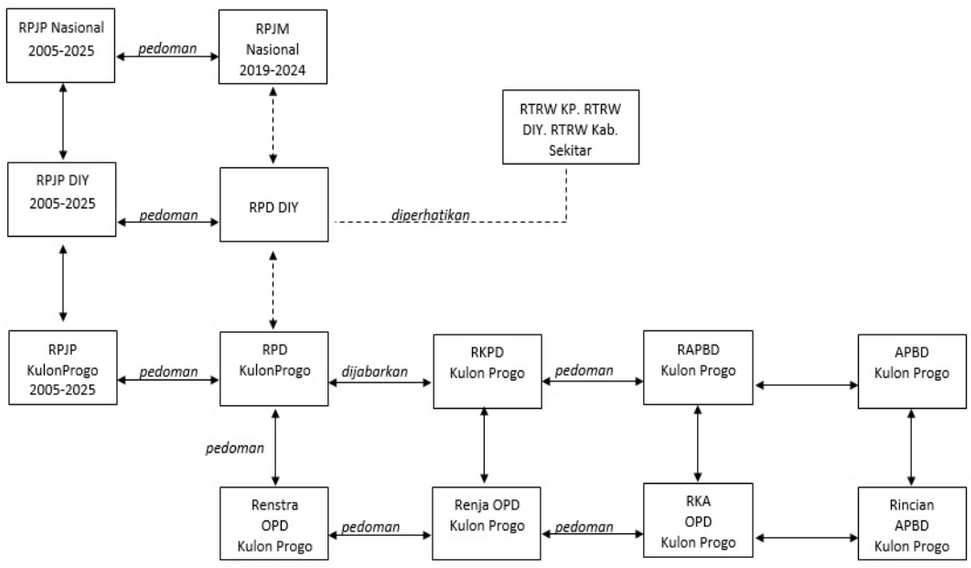

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005- ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274 C Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324 C Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Kapanewon Sentolo Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Perubahan Renstra Kapanewon Sentolo untuk jangka waktu satu tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Sentolo;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Panewu berikutnya.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V . PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Sentolo Tahun 2022 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Sentolo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2023

(data pada triwulan III tahun 2023)

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	81.85
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	97,37	97,37

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Sentolo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Sentolo Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	84,25	81,85
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	97,37	97,37

Dalam tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Sentolo melaksanakan 5 (Lima) Program , dirinci 12 (dua belas) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp2.038.302.844,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp1.816.747.016,00 dengan capaian sebesar 89,13%

Hambatan dan kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan dalam pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusuan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi 99,65 %, tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan harga DPA:
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi 99,75%, tidak ada hambatan
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, realisasi 99,95 %.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD, realisasi 99,61 %, tidak ada kendala,
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi 99,32 %, tidak ada kendala.
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi 99,67 %, tidak ada kendala,
7. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi 99,08 %, realisasi anggaran untuk listrik, telepon, service, penggantian suku cadang dan pajak disesuaikan kebutuhan dan lainnya merupakan selisih harga penawaran dengan harga DPA.
8. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dearah dan Instansi Vertikal terkait realisasi 99,62%, tidak ada kendala.
9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, realisasi 99,63 %, tidak ada kendala.
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, realisasi 99,73 %, tidak ada kendala.
11. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan, realisasi 99,57%, tidak ada kendala.
12. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, realisasi 97,96 %, tidak ada kendala,
13. Penanganan Konflik Sosial, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, realisasi 99,82 %, tidak ada kendala .
14. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya, realisasi 99, 47 %, tidak ada kendala.

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2022 Kapanewon Sentolo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.803.380.561**					372.066.087	372.066.087	4,77
	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**50.489.450**					6.986.620	6.986.620	13,84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.946.750					4.238.980	4.238.980	0,14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.542.700					2.747.640	2.747.640	0,14
	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**6.392.087.581**					288.977.855	288.977.855	4,52
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji danTunjangan ASN	6.198.534.781					276.896.805	276.896.805	4,47
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	173.129.050					10.655.100	10.655.100	6,15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.423.750					1.425.950	1.425.950	6,98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen adminstrasi Umum**	**201.306.700**					10.694.740	10.694.740	0,05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.742.800					6.864.840	6.864.840	0,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.563.900					3.829.900	3.829.900	5,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penambahan Aset**	**169,077,000**					21.611.700	21.611.700	12,78
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	207.262.940					21.611.700	21.611.700	10,43
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang**	**334.259.255**					18.248.372	18.248.372	5,46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	96.789.385					5.327.228	5.327.228	5,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		danListrik yang disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang disediakan	237.469.870					12.921.144	12.921.144	5,44
	PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**617.974.635**					25.546.800	25.546.800	4,13
	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	228.427.400							
	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	57.278.550					5.841.700	5.841.700	10,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerijinannya	332.268.685					19.705.100	19.705.100	5,93
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTA*HAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Kecamatan**	**223.398.115**					15.051.800	15.051.800	6,74
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**169.950.992**					11.427.960	11.427.960	6,72

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	59.793.730					3.963.720	3.963.720	6,63
	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.157.262					7.464.240	7.464.240	6,78
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**53.447.123**					3.623.840	3.623.840	6,78
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang dilaksanakan	53.447.123					3.623.840	3.623.840	6,78
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**81.769.766**					9.259.600	9.259.600	11,32
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**81.769.766**					9.259.600	9.259.600	11,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.769.766					9.259.600	9.259.600	11,32
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**265.707.474**					14.079.300	14.079.300	5,30
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**265.707.474**					14.079.300	14.079.300	5,30
	Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasankebangsaan dan Ketahanan Nasional	89.324.441					2.334.200	2.334.200	2,61
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	176.383.033					11.745.100	11.745.100	6,66
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**114.005.528**					4.916.940	4.916.940	4,31
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		114.005.528					4.916.940	4.916.940	4,31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Desa									
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan HasilKoordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya	114.005.528					4.916.940	4.916.940	4,31
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaandan ketatalaksanaan**	**238,740,600**					1.123.200	1.123.200	0,47
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		**238,740,600**					1.123.200	1.123.200	0,47
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan diKapanewon /Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah DokumenHasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	238,740,600					1.123.200	1.123.200	0,47
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan**	**400,000,000**					26.244.800	26.244.800	6,56
	Adat, Seni, Tradisi,dan Lembaga Budaya		**400,000,000**					26.244.800	26.244.800	6,56
	Pembinaan Kelembagaan Adat	Jumlah Laporan Pembinaan	400,000,000					26.244.800	26.244.800	6,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-1) (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Tradisi	Kelembagaan Adatdan Tradisi								

Realisasi fisk dan keuangan tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Sentolo melaksanakan 5 (lima) Program , dirinci 12 (dua belas) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar 2.017.201.154,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp1.823.085.581,00 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4

Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Fisik	Keuangan		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
A	**Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.848.473.254,-**	**1.655.074.713,-**	**89,53**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah	100	11.280.000,-	10.993.610,-	97,46
a	PenyusuanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	100	6.880.000,-	6.717.150,-	97,63
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	4.400.000,-	4.276.110,-	97,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.453.629.980,-	1.268.677.149,-	87,18
a	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	100	1.409.606.610,-	1.224.532.839,-	86,87
b	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	100	40.868.500,-	39.680.100,-	97,09
c	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	100	4.600.000,-	4.464.210,-	97,05
3	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	100	42.385.700,-	42.168.272,-	99,48
a	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	100	14.965.700,-	14.776.312,-	98,73
b	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	100	27.420.000,-	27.391.960,-	99,9
4	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	100	114.025.000,-	109.891.262,-	96,37
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	100	114.025.000,-	109.891.262,-	96,37
5	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	100	77.970.144,-	77.493.970,-	99,38
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	22.165.568,-	21.689.394,-	97,85

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Fisik	Keuangan		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	55.804.576,-	55.804.576,-	100
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	100	147.737.300,-	145.850.800,-	98,72
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	100	74.305.000,-	72.445.700,-	97,5
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	100	57.518.600,-	57.518.600,-	100
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	100	15.913.700,-	15.886.500,-	99,83
B	**Program PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik**	100	**48.173.700,-**	**47.882.858,-**	**99,39**
1	KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	37.551.000,-	37.324.118,-	99,39
a	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatanPemerintahan denganPerangkatdearah dan InstansiVertikalterkait	100	12.576.200,-	12.525.420,-	99,6
b	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	24.974.800,-	24.798.698,-	99,29
2	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang dilimpahkankepada Camat	100	10.622.700,-	10.558.740,-	99,4
a	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganPelayananPerizinanNon Usaha	100	10.622.700,-	10.558.740,-	99,4
C	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	**23.157.200,-**	**23.043.320,-**	**99,51**
1	KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa	100	23.157.200,-	23.043.320,-	99,51
a	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	23.157.200,-	23.043.320,-	99,51
D	**Program PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum**	100	**69.114.100,-**	**28.876.230,-**	**99,65**

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Fisik	Keuangan		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasanKepala Daerah	100	69.114.100,-	28.876.230,-	99,65
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	21.986.900,-	21.882.210,-	99,52
b	PenangananKonflikSosial, sesuaiketentuanPeraturanPerundang-undangan	100	47.127.200,-	46.994.020,-	99,72
E	**Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa**	100	**28.282.900,-**	**28.208.460,-**	**99,74**
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintah Desa	100	28.282.900,-	28.208.460,-	99,74
a	KoordinasiPendampingan Desa diwilayahnya	100	28.282.900,-	28.208.460,-	99,74

Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Sentolo menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan/program kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dii dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja *input, output*, dan *outcome*. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan *benefit* dan *impact*. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Evaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Sentolo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
b. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
d. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Sentolo meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi.Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:

a. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   1. Visi dan misi organisasi yang jelas

2. Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Panewu
4. Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. SPM Kapanewon Sentolo belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan dasar Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
4. Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
5. Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum dilaksanakan secara optimal.
7. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitaspemerintahan
3. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan danpenanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon
5. Kapanewon Sentolo merupakan daerah potensi tambang, antara lain tambang andesit, mangaan, emas, dan lain sebagainya, agar pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan untuk

kedepannya dikelola masyarakat melalui pertambangan rakyat dan pemerintah memfasilitasi melalui kegiatan pendampingan.

6. Tempat Wisata alam di Sentolo sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya.

Ancaman:

1. Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
2. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sentolo disajikan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*20*
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,26	84,25	84,50	84,75	78,17	81,850	84,50	84,75	
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			94,12	97,37	98,25	99,12	96,12	97,37	98,25	99,12	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, secara garis besar Kapanewon mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD :

1. Permasalahan dan hambatan
   a. Kekurangan tenaga / karyawan yang belum terisi sampai saat ini;
   b. Kurangnya pemahaman petugas OPD yang ditempatkan di Kapanewon dan perangkat desa tentang wewenang apa saja yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu. Hal ini berdampak pada kurangnya informasi/kendali Kapanewon terhadap kegiatan yang ada di wilayah yang disebabkan sebagian kelompok masyarakat berhubungan langsung dengan OPD tingkat kabupaten/propinsi atau sebaliknya tanpa koordinasi dengan Panewu.
   c. Kurang optimalnya kinerja pemerintah desa yang disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM aparatur desa dan minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP).
   d. Petugas pelayanan kependudukan dan catatan sipil kantornya menjadi satu dengan kantor Kapanewon tetapi tidak ada pejabat dinas yang membawahinya langsung di Kapanewon. Hal tersebut menyebabkan wewenang Panewu untuk mengkondisikan pelayanan tersebut minim karena secara kepegawaian petugas tersebut tidak bertanggung jawab kepada salah satu pejabat eselon di Kapanewon, tetapi untuk permasalahan pelayanan kependudukan dan catatan sipil masyarakat selalu komplain kepada Panewu.
2. Tantangan dan Peluang
   a. Tantangan :
      - Tingkat kemiskinan penduduk Kapanewon Sentolo yang masih tinggi menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja
      - Kalurahan sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur Kalurahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
      - Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
      - Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), menuntut kemampuan aparatur pemerintah Kapanewon maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
      - Kapanewon Sentolo berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.
   b. Peluang
      - Adanya pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Panewu
      - Ditetapkannya kawasan Kapanewon Sentolo sebagai kawasan industri dan perdagangan

- Kapanewon Sentolo dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan jaringan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
- Kapanewon Sentolo berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan untuk 8 (delapan) Kalurahan di wilayah Kapanewon Sentolo.
- Di Kapanewon Sentolo terdapat lembaga perbankan/ keuangan seperti : Bank BRI, Bank BPD DIY, Bank Pasar Kulon Progo, BPR Nusamba, BUKP Propinsi DIY, LKM Binangun, BMT, koperasi dan paguyuban simpan pinjam di masyarakat.
- Kapanewon Sentolo berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
- Di Kapanewon Sentolo telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Di samping itu terdapat lahan pertanian /perkebunan/ perikanan cukup luas dan subur
- Terdapat jalan jalur negara melalui Sentolo yang memungkinkan untuk dikembangkan kawasan perdagangan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 adalah :

1. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
2. Kapanewon Sentolo sebagai kawasan industri dan perdagangan
3. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
4. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur
5. Posisi strategis yang dilalui oleh jalur jalan negara dan sebagai pintu gerbang Kulon Progo dari timur
6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian dan industri kerajinan agel/serat alam .
7. Rencana Pembangunan tol Yogyakarta-YIA Kulon Progo yang melewati sebagian wilayah Kapanewon Sentolo.
8. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD yang memuat

a) kerangka ekonomi daerah
b) program prioritas pembangunan daerah dan
c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kapanewon Sentolo berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kapanewon Sentolo.

Untuk lebih jelasnya mengenai review RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				**100.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**100.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
	Sekretariat Daerah				**56.585.800**	**Sekretariat Daerah**				**35.000.000**	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**56.585.800**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**35.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	**56.585.800**	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***			***2 Dokumen***	**35.000.000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	**56.585.800**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	**35.000.000**	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan				**1.897.709.336**	**Kecamatan**				**1.897.709.336**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.951.561.168**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.951.561.168**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***23 Dokumen***	**12,803,375**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***23 Dokumen***	**7.535.000**	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.804.875	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.580.000	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	4.998.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	2.955.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	**1.609.668.087**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	**1.487.605.110**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Sentolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 orang/bln	1.560.660.837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Sentolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 org/bulan	1.443.506.610	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.788.950	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.868.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.218.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.230.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	**52.749.600**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	**40.596.100**	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.733.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.976.100	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	17.016.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 paket	25.620.000	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap. Sentolo	**Jumlah penambahan Aset**	***10 Unit***	**63.578.240**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Penambahan Aset***	***10 Unit***	**0**	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah unit Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	63.578.240	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kap. Sentolo**	**Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang**	***24 Laporan***	**85.533.760**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	**78.412.893**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Sentolo	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang disediakan	12 Laporan	24.729.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.608.317	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang disediakan	12 Laporan	60.803.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.804.576	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**127.228.106**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**127.264.491**	
1	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	30.209.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Sentolo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	77.126.400	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	43 Unit	12.705.280	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	34.090.191	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Sentolo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	10 Unit	84.313.226	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	16.047.900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTA*HAN DAN PELAYANAN PUBLIK*		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**55.866.223**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**45.014.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**42.351.450**	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		**36.558.800**	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	Kap. Sentolo	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	8 Laporan	14.976.300	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	11.583.500	
2	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	27.375.150	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	24.975.300	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**13.514.773**	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***		**8.455.700**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang dilaksanakan	1 Dokumen	13.514.773	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	8.455.700	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**20.448.552**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**23.577.900**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			***7 Laporan***	**20.448.552**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***7 Laporan***	**23.577.900**	
1	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20.448.552	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	23.577.900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**66.446.799**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**106.394.300**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**66.446.799**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***		**106.394.300**	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Sentolo	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 orang	22.319.599	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Sentolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 orang	24.106.100	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	44,127,200	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Sentolo		5 Laporan	82.288.200	
	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**28.509.901**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**28.100.900**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.509.901	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***		28.100.900	
1	Koordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya	Kap. Sentolo	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya	6 Laporan	28.509.901	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	28.100.900	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.279.418.443**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.079.501.194**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Di Kabupaten Kulon Progo, hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten hingga tingkat Propinsi.

Musrenbang Kapanewon adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kapanewon. Musrenbang tingkat Kapanewon ini dihadiri oleh *Stakeholders* yang ada di Kapanewon.Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)*Kapanewon adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kapanewon serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat.

Tujuan diadakannya musrenbang tingkat Kapanewon yaitu untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kalurahan/Kelurahan, usulan OPD tingkat Kapanewon,ormas tingkat Kapanewon yang akan menjadi proritas pembangunan di wilayah Kapanewon yang dituangkan dalam RKP, membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas; dan menyepakati tim delegasi Kapanewon yang akan mewakili dalam forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara *bottom up* sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari dusun dan kalurahan telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat.Kapanewon Sentolo telah melaksanakan musrenbang kapanewon pada tanggal 25 Februari 2022 di Pendopo Kapanewon Sentolo. Seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan usulan dari tingkat kalurahan dan instansi tingkat kapanewon diundang untuk menentukan prioritas usulan program dan kegiatan.

Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kapanewon telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD . Hasil musrenbang sudah dilaporkan tersendiri ke Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan kapanewon selama ini belum pernah ada.

Tabel 2.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PENGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan Nasional. Tahun 2024 ini diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi Nasional setelah selama lebih dari 2 tahun Pembangunan Nasional terhambat karena adanya pandemic Covid 19. Selain pemulihan ekonomi, transpformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi structural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2023. Untuk mendukung upaya tersebut, Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 diarahkan pada program-program pembangunan yang dirinci dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sentolo Tahun 2023 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sentolo tahun 2023-2026.

Berikut penjabaran tujuan dalam sasaran dan indicator sasaran serta target kinerja sasaran pada tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kapanewon Sentolo Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)		A
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)		WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		84,75
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75
			Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	99,12

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program dan kegiatan Kapanewon Sentolo yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Table. 3.2
Program dan Kegiatan Kapanewon Sentolo
Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
2.	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1. Penyusuan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
		Aministrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dearah dan Instansi Vertikal terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Penanganan Konflik Sosial, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kapanewon Sentolo seperti tercantum dalam ketetapan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024.

Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 85 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, menegaskan bahwa salah satu tugas Kapanewon adalah melaksanakan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon . Pada tahun 2023 Kapanewon Sentolo mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon .

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kapanewon Sentolo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Sentolo Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Instansi : Kapanewon Sentolo

Jumlah Pagu : **Rp1.865.328.400,00**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON SENTOLO KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON SENTOLO						**1.865.328.400,00**							**2.391.136.512,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.714.100.900,00**							**2.214.415.412,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.714.100.900,00**							**2.214.415.412,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.547.177.100,00**						**-**	**2.035.089.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	2.559.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	5.277.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.559.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		5.277.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 laporan	1.249.105.108,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	1.705.000.682,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1.212.395.208,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		1.652.945.732,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	33.940.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		46.537.600,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.769.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		5.517.350,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	38.170.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	55.772.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		17.991.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.490.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		37.781.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan aset*	-			0 unit	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	89.147.892,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	90.434.760,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.279.876,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		26.146.920,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.868.016,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		64.287.840,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	168.194.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	162.892.218,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	73.298.600,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		90.343.498,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	78.897.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		57.196.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	15.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.352.320,00	KAPANEWON SENTOLO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**44.185.000,00**						**-**	**58.493.560,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			16 Dokumen	36.092.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	44.093.560,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	11.373.800,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.761.310,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	24.719.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		28.332.250,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	8.092.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.092.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**23.420.400,00**						**-**	**21.410.229,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			7 laporan	23.420.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	23.420.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**71.572.200,00**						**-**	**69.571.627,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			6 laporan	71.572.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	69.571.627,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	23.829.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		23.136.840,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	47.743.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		46.434.787,00	KAPANEWON SENTOLO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**27.746.200,00**						**-**	**29.850.696,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 laporan	27.746.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	29.850.696,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	27.746.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		29.850.696,00	KAPANEWON SENTOLO
	X	**NON URUSAN**						**6.227.500,00**							**8.252.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.227.500,00**							**8.252.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**6.227.500,00**						**-**	**8.252.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	6.227.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.252.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.227.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.252.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	J U M L A H							**1.865.328.400,00**							**2.391.136.512,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kapanewon Sentolo.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Sentolo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target , tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2025 telah kami susun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Sentolo.

Sentolo, 2 Agustus 2024

PANEWU SENTOLO,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SENTOLO

RADEN SIGIT PURNOMO, SIP.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 19681202 199103 1 003

PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH

RENCANA KERJA

2025

KAPANEWON PENGASIH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen dalam jangka waktu satu tahun mendatang, yaitu tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja periode satu tahun ke depan. Demikian pula, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 78 ayat (1) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD mencakup penelaahan Renja Perangkat Daerah dan Pasal 126 ayat (1) dan (2) di mana Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Kerangka sistematika Renja ini disusun mencakup: pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta penutup.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Rencana Kerja ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, terima kasih.

Pengasih, 2 Agustus 2024

PANEWU PENGASIH

TRIYANTO RAHARJO, S.Sos., M.Si
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19680311 199803 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 2
I.3. Maksud dan Tujuan 3
I.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **5**
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17
II.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 19
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **27**
III.1. Telaah Terhadap kebijakan Nasional 27
III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
III.3 Program dan Kegiatan 28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **30**
BAB V P E N U T U P **40**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2023 5
Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Pengasih Tahun 2023 6
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Opd Dan Pencapaian Renstra Opd S/D Triwulan Iv Thn 2023 Kabupaten Kulon Progo 7
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.....16
Tabel 2. 5 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo.....20
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……28
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....28
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Pengasih Tahun 2025 Dan Prakiraan maju Tahun 2026 ……..32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Kapanewon Pengasih Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Renja Kapanewon Pengasih dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kapanewon Pengasih yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

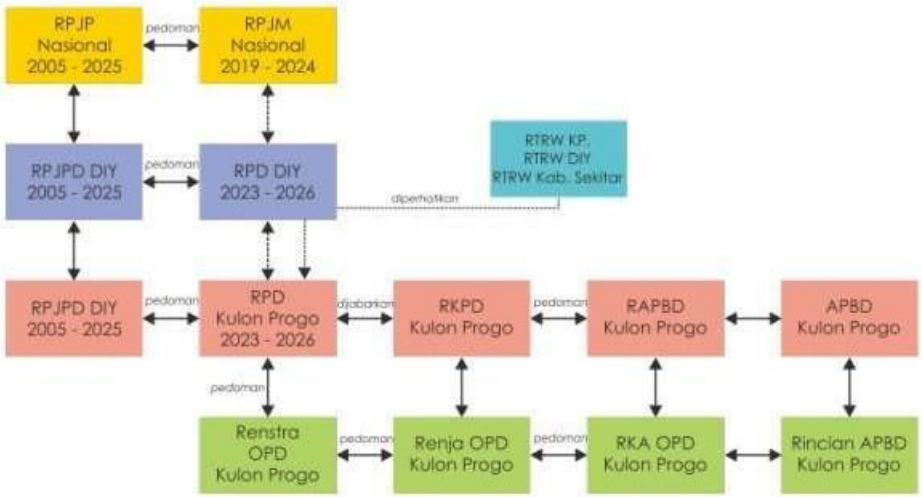

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang terakhir dirubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu
18. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Pengasih Tahun 2025 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Pengasih Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Pengasih didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2. 1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah	100	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25%	92,186%
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	97,37	97,37%

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Pengasih Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Pengasih Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11	92,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100

Secara keseluruhan ddapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dank egiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 telah berjalan sesuai dengan target kinerja/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon 100% telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai rencana. Pada Tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Pengasih melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci dalm 13 (tiga belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp 1.875.503.759,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.785.759.065,00 dengan capian sebesar 95,21%. Penjabaran anggaran dan realisasinya dapat dilihat di table berikut

Tabel 2.3

Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100%	99.804.164,00	99,80%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100%	99.804.164,00	99,80%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	100%	99.804.164,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	100%	34.290.626,00	97,97%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	100%	34.290.626,00	97,97%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	100%	34.290.626,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.770.059,00	100%	1.511.239.602,00	94,54%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.974.600,00	100%	9.806.652,00	98,32%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.924.700,00	100%	6.782.162,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.049.900,00	100%	3.024.490,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.317.807.209,00	100%	1.235.175.000,00	93,73%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.275.843.009,00	100%	1.194.018.466,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.544.400,00	100%	37.801.864,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.419.800,00	100%	3.354.670,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.393.800,00	100%	44.294.339,00	99,78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.243.800,00	100%	14.144.537,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.150.000,00	100%	30.149.802,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.731.100,00	100%	25.095.000,00	93,88%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.731.100,00	100%	25.095.000,00	

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.537.350,00	100%	106.934.881,00	97,62%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.230.486,00	100%	22.628.018,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.306.864,00	100%	84.306.863,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.326.000,00	100%	89.933.730,00	99,57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.490.100,00	100%	78.103.600,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.835.900,00	100%	11.830.130,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.740.100,00	100%	36.381.850,00	99,02%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.490.100,00	100%	26.235.190,00	99,04%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.694.700,00	100%	10.549.702,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.795.400,00	100%	15.685.488,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.250.000,00	100%	10.146.660,00	98,99%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.250.000,00	100%	10.146.660,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.312.600,00	100%	21.300.912,00	99,95%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.312.600,00	100%	21.300.912,00	99,95%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.312.600,00	100%	21.300.912,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.831.200,00	100%	56.156.380,00	98,81%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.831.200,00	100%	56.156.380,00	98,81%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	11.024.400,00	100%	10.991.160,00	

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
	Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.806.800,00	100%	45.165.220,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.849.800,00	100%	26.585.531,00	99,02%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.849.800,00	100%	26.585.531,00	99,02%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26.849.800,00	100%	26.585.531,00	

Dari Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan yang dilaksanakan semua memnuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan tetapi tidak 100% serapan anggarannya, disebabkan harga satuan tidak sesuai dengan harga pasar dan menggunakan sistem Mbizmarket.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Pengasih sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Opd S/D Triwulan IV Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1**	**100**	**200**	**2**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	*24*					24		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*14*					14		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	*20*	0	12	12	**1**	20	**32**	**2**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan barang	14	0	12	12	**1**	14	**26**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	0	14	14	**1**	14	**28**	**2**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	*2*					2		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3	0	5	6	**1**	3	**9**	**3**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	*23*					23		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	0	2	2	**1**	2	**4**	**2**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21	0	21	21	**1**	21	**42**	**2**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	*8*					*8*		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	0	2	2	**1**	8	**10**	**1**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	*3*					3		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	0	10	10	**1**	10	**20**	**2**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	0	0	**0**	5	**5**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	0	9	9	**1**	8	**17**	**2**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**0**	**100**	**107.30**	**1.07**	**100**	**207**	**2**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	*13*					13		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	9	0	7	7	**1**	9	**16**	**2**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efejtifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	0	5	5	**1**	13	**18**	**1**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	*12*					12		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	6					6	**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6	0	6	6	**1**	6	**12**	**2**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**			**100**	**100**	**1**	**0**	**100**	**0**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	11					11	**11**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdataan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11	0	9	9	**1**	11	**20**	**2**
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**0**	**92.11**	**92.11**	**1**	**0**	**0**	**0**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	*30*					30	**30**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130	0	75	75	**1**	130	**205**	**2**
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	30	0	7	7	**1**	30	**37**	**1**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**		**100**	**100**	**1**	**100**	**0**	**0**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi			0	0			**0**	**0**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		*2*					*2*	**2**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*2*	0	1	1	**1**	2	**3**	**2**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100**		**100**	**66.67**	**0.67**	**100**	**167**	**0**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*1*					*1*	**1**	
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	0	1	1	1	1	2	2

Pengasih, Agustus 2024
PANEWU PENGASIH

TRIYANTO RAHARJO, S.Sos.,MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19680311 199803 1005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan atau Kalurahan

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Pengasih merupakan bagian keberhasilan pencapaian pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Pengasih dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Kalurahan. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Pengasih dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain diperlukan :

1. Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu ketelitian, baik sasaran, pembiayaan, waktu pelaksanaan dengan mengikuti aliran kas yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun keuangan.
2. Pengguna anggaran diperlukan kebijakan, ketelitian dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara pelaksana teknis kegiatan dengan pengguna anggaran perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian target anggaran, sehingga dapat dipacu pelaksanaan anggaran sesuai dengan target, sasasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4. Diperlukan ketepatan dalam mengatur waktu, personil dan pengaggaran pada saat volume kegiatan meningkat, agar kesemuanya dapat mencapai target yang ditentukan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih
Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi (%)			Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)			A	A	A	A	A	A	A	A	
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			84,25	84,50	84,75	85	92,186	84,75	84,75	85	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,50	84,75	85	92,186	84,50	84,75	85	
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon			97,37	98,25	99,12	100	97,37	98,25	99,12	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Pengasih adalah sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo sehingga sulit untuk dihubungi.
b. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Pengasih
c. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal
d. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh satlinmas
e. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa.
f. Belum optimalnya rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi.
g. Masih perlunya tindakan antisipasi terhadap kerentanan wilayah adanya potensi bencana alam tanah longsor.
h. Kurang validnya data potensi desa dan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan
i. Potensi penyalahgunaan wewenang di desa
j. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting proses perencanaan pembangunan partisipatif.
k. Kewenangan yang diberikan kepada kecamatan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
l. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, sehingga perlu ditampung dan diperhatikan.
m. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat
n. Kualitas aparatur pemerintah Kapanewon yang masih perlu ditingkatkan. Baik dari segi pendidikannya, maupun diklat/kursus/bimteknya. Hal ini disebabkan antara lain karena kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat sangat kecil kemungkinannya
o. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat karena banyak sudah rusak, diantaranya adalah laptop, personal computer, printer, scanner, mesin antrian pelayanan umum.

2. Dampak terhadap capaian tujuan dan sasaran daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Pengasih secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
b. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi dari sektor pendidikan dan kesehatan

3. Tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD

a. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yangharus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Pengasih yaitu :

1) Tingkat kemiskinan penduduk Kapanewon Pengasih masih tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan Masyarakat, perlindungan Kesehatan, social, Pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
2) Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kulaitas perangkat daerah dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan Pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat.
3) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencaaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Pengasih cukup besar bila dikembangkan, dengan hamparan daerah yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
2) Terdapat banyak desa budaya, desa rintisan budaya dan juga desa budaya
3) Posisi strategis di Tengah Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan 7 kapanewon, yaitu Wates, Sentolo. Nanggulan. Kokap, Panjatan, Temon, Lendah.
4) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

4. Formulasi Penentuan isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pengasih, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

a. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi
b. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
c. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
d. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon dan kalurahan;
e. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
f. Kurang ketersediaan sarana dan prasarana kantor

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pengasih maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

a. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan
b. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai.
c. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Pengasih agar berhasil guna dan berdaya guna.
d. Implementasi dan evaluasi Siskeudes dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
e. Rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi (Pedukuhan Kamal, Desa Karangsari, Perkemahan Lemah Abang di Margosari, Wisata Alam Susur Sungai Serang di Sendangsari.
f. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan desa.
g. Kerentanan wilayah terhadap bencana tanah longsor dan antisipasi bencana.

5. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana kerja Pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokuemn perencanaan pemerintah daerah dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
b. Program prioritas Pembangunan daerah
c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Pengasih. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut

Tabel 2. 5
Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Pengasih

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan					**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**					
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	100%	110.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	100%	100.000.000	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
	Sekretariat Daerah					**Sekretariat Daerah**					
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan					**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**					
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**					
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang*	100%	*62.244.100*	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang*	100%	*62.244.100*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disusun					*Disusun*			
	Unsur Kewilayahan					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan					**Kecamatan**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100%	*6.925.000*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	100%	*8.241.176*	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%	*4.000.000*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%	*1.834.900*	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	*1.379.654.048*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100%	*1.237.972.943*	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	100%	*38.000.000*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	100%	*35.850.000*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/*	100%	*4.000.000*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/*	100%	*2.518.600*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Semesteran SKPD					*Semesteran SKPD*			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100%	*15.500.000*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100%	9.552.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100%	*30.150.000 12*	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100%	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100%	*32.000.000*	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100%	*0*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	100%	*20.964.039*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	100%	24.927.781	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	100%	*80.057.830*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	100%	89.802.024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	100%	*86.105.898*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	100%	71.942.850	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	100%	*52.000.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya*	Kap. Pengasih	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	100%	*0*	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	100%	*14.000.000*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	100%	11.773.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	100%	*19.706.579*	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	100%	*11.591.300*	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di*	100%	*24.700.000*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di*	100%	*20.707.300*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Kecamatan					*Tingkat Kecamatan*			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	100%	*14.000.000*	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	100%	7.878.100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	100%	*29.463.984*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	100%	20.574.600	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Pengasih	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	100%	*17.840.424*	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Pengasih	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	100%	16.709.000	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai*	100%	*53.337.342*	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai*	100%	41.103.400	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					*Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	100%	*36.667.490*	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	100%	*23.068.800*	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelayanan terbaik sesuai standar mutu sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, OPD Kapanewon Pengasih telah melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung diantaranya adalah penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musrenbang tingkat Kecamatan ini menampung aspirasi yang diusulkan masyarakat, seperti para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, usulan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Usulan-usulan tersebut kemudian ditampung, dievaluasi dan diakomodir sehingga tersusun suatu program usulan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kapanewon, seperti yang telah dilimpahkan oleh Bupati. Usulan program tersebut diarahkan pada:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
3. Penguatan reformasi Birokrasi
4. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri.
5. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
7. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
8. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait yaitu telah diakomodir melalui Musrenbang Kapanewon dan disampaikan Musrenbang tingkat Kabupaten.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD dan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2023-2026 adalah **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"**. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja 2025	Realisasi Capaian 2023	Proyeksi Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	A	A	A
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)	WTP	WTP	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,25	92,186
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Rata-rata persentase pencapaian program masing-masing perangkat daerah	100	100	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	84,25	92,186
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12	97,37	97,37

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Perubahan Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.5.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pengasih Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	**2**	**3**	**4**
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	Gelar Budaya Jogja
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	*Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan*	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	*Perencanaan, Penganggaran an Evaluasi Kinerja Perangkat daerah*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedian Gaji dan Tunjangan Pelaksanaan Tugas ASN
			Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
4	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik	*Koordinasi Penyelengaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan KegiatanPemeri ntahan dengan Prangkat Daerah dan Instansi vertical Terkait
			Peningkatan Efelktifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	*Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
g. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

I. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:**
   Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, meliputi sub kegiatan: Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi.

II. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**
   Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, meliputi sub kegiatan: Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
2. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

VII. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelas mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 serta pendanaan Kapanewon Pengasih dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON PENGASIH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON PENGASIH						**1.828.291.874,00**							**2.150.525.074,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.244.100,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.244.100,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**62.244.100,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan*	-			2 dokumen	62.244.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4.01.04.5.01.0006	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				2 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	62.244.100,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.666.047.774,00**							**2.040.525.074,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.666.047.774,00**							**2.040.525.074,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota***	**-**			**100 %**	**1.524.415.274,00**						**-**	**1.825.017.673,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	10.076.076,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.241.176,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	1.834.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 dokumen	1.276.341.543,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	1.421.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.237.972.943,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		1.379.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		38.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.518.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		4.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 dokumen	39.552.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	31.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.552.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		31.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			6 unit	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			12 Laporan	114.729.805,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	116.521.869,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.927.781,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		20.964.039,00	KAPANEWON PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		15.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.802.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		80.057.830,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			9 unit	83.715.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	214.416.756,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	71.942.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		86.416.756,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		114.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	11.773.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**40.176.700,00**						**-**	**64.247.237,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			8 Laporan	32.298.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih	-	50.247.237,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	11.591.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		22.397.237,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	20.707.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		27.850.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 dokumen	7.878.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.878.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**20.574.600,00**						**-**	**32.410.382,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			8 Laporan	20.574.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih	-	32.410.382,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.574.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		32.410.382,00	KAPANEWON PENGASIH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 %**	**57.812.400,00**						**-**	**78.295.543,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			75 orang	57.812.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	78.295.543,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75 Orang	16.709.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		20.848.681,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	41.103.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		57.446.862,00	KAPANEWON PENGASIH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**23.068.800,00**						**-**	**40.554.239,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 laporan	23.068.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	40.554.239,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	23.068.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se-Kapanewon Pengasih		40.554.239,00	KAPANEWON PENGASIH
	J U M L A H							**1.828.291.874,00**							**2.150.525.074,00**	

BAB V
P E N U T U P

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kapanewon Pengasih sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kapanewon Pengasih merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya pegawai, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui Perubahan RKPD tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kapanewon Pengasih dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun kedepan. Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Kapanewon Pengasih pada tahun 2025 menetapkan 7 program, 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Demikian rencana kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Kapanewon Pengasih tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Pengasih, 2 Agustus 2024

PANEWU PENGASIH

TRIYANTO RAHARJO, S.Sos., M.Si
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19680311 199803 1005

RENCANA KERJA
KAPANEWON KOKAP

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KOKAP

Ngaseman, Hargorejo, Kokap

Email : kokap@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap 16
2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 18
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 21
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 36
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37
3.3. Program dan Kegiatan 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ... 42
4.1 Program dan Kegiatan 42
BAB V P E N U T U P 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 ...5
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2025..... 6
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo 8
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo..... 17
Tabel 2.5 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo 22
Tabel 2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... 35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025 38
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Kokap Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 50

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kokap beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Kokap Tahun Anggaran 2025.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Rancangan Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kokap, 2 A g u s t u s 2024

PANEWU KOKAP,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON KOKAP

YULIANTA NUGRAHA, S.I.P,M.Si

NIP.19740720 199503 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu,partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kapanewon Kokap 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kokap Tahun 2025 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.1317Tahun 2023 tentang Verikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon danKalurahan;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kapanewon Kokap Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Derah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kokap Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Kokap didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	83,964
	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	97,37

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kokap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2023

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Presentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon	%	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Presentase Peningkatan Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	%	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	92,11
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100
Program Penyelenngaraan Keistimewaan Yogyakartaa Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kabudayaan	%	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Kokap sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Kokap

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	

							Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar																	
							Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan																	
							Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	
2	2	2	8	5	7			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	**100**	%	
2	22	08		5	07	0006			Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	even	0	0	1	Even	1	Even	100	1	even	1	even	100 %
							Unsur Pendukung Urusan Pemerintah																	
							Sekretariat Daerah																	
4	01	04					**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Pesesntase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	100	**100**	**%**	300	%	300 %

4	01	04	5'06				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	300		300 %
							Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100	%	100	%	100	%	100	%		100	%	300		300 %
4	01	04	5'06	6	0001	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	Laporan			3	Laporan	3	Laporan	1	2	Laporan	5	Laporan	250 %
7							Unsur Kewilayahan																	
7	01						Kecamatan																	
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	01	2	01			Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi kinerja prangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	Dokumen	6		300 %

2	23	02	3	02	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	1	6	Laporan	16		76 %
2	22	01	2	02			Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	1	3	Laporan	9		75 %
2	23	02	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	268	0rang	67	0rang	67	0rang	67	0rang	1	67	0rang	201		75 %
2	23	02	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	1	12	Dokumen	36		75 %
#	02	2	02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	1	17	Laporan	49		75 %
							Administrasi Perangkat Daerah		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	16	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	4	Laporan	12		75 %
2	22	01	2	06			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36		75 %

2	**2 2**	**0 1**	**2**	**0 7**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	1	**1 0 0**	**%**	**3 0 0**		**300 %**
2	2 2	0 1	2	0 7	0 0 1 0		Pengadaan sarana dan prasaranaGedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3 8	unit	9	unit	9	unit	9	unit	1	9	unit	2 7		71 %
2	**2 2**	**0 1**	**2**	**0 8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	1	**1 0 0**	**%**	**3 0 0**		**300 %**
2	2 2	0 1	2	0 8	0 0 0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik yang di sediakan	4 8	Lap ora n	1 2	Lap ora n	1 2	Lap ora n	1 2	Lap ora n	1	1 2	Lap ora n	3 6		75 %
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 8	Lap ora n	1 2	lapo ran	1 2	lapo ran	1 2	Lap ora n	1	1 2	lapo ran	3 6		75 %
2	**2 2**	**0 1**	**2**	**0 9**			**Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	**1 0 0**	**%**	1	**1 0 0**	**%**	**3 0 0**		**300 %**

2	22	01	2	09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau laporan yang di pelihara dandi bayarkan pajak dan perijinannya	36	unit	9	unit	9	unit	9	unit	1	10	unit	28		78 %
7	01	01	2	09	0010		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	01	2	09	0010		Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prsaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prsaranana Geduung Kantor atau Bangunan Lainnya	92	unit	23	unit	23	unit	23	unit	1	23	unit	69		75 %
7	01	02					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	02	2	01			***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	02	2	01	0001		*Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal*	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	lapo ran	10	lapo ran	10	lapo ran	10	lapo ran	1	10	lapo ran	30		75 %

7	01	02	2	01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	lapo ran	22	lapo ran	22	lapo ran	22	lapo ran	1	22	lapo ran	66		75 %
7	01	02	2	04			***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	02	2	04	0002		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	lapo ran	12	lapo ran	12	lapo ran	12	lapo ran	1	12	lapo ran	36		75 %
7	01	03					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	03	2	01			*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	03	2	01			Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	11	lapo ran	11	lapo ran	11	lapo ran	11	lapo ran	1	11	lapo ran	33		300 %
7	01	05					**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %

7	01	05	2	01			***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	05	2	01	0001		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	orang	200	orang	200	orang	200	orang	1	200	orang	600		75 %
7	01	05	2	01			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	1	4	laporan	12		75 %
7	01	06					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	06	2	01			***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300 %
7	01	06	2	01	0017		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	Laporan	5	laporan	5	laporan	5	laporan	1	7	laporan	17		77 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu jugamenyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kokap merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kokap dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Kokap dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Kokap disajikanpada Tabel 2.4 berikut.

Tabel : 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2022 (transisi)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,26	84,25	84,50	84,75	85,00	81,113	84,50	84,75	
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				94,12	97,37	98,25	99,12	100	97,37	98,25	99,12	

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.1.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan

Kapanewon Kokap sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Kokap masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor platform dasar pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.
4. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.

2.1.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

1. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
2. Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon yang mana pada tahun ini ada 2 (orang) karyawan yang purna tugas;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
4. Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi denganpengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan;
5. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Kokap secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi dari sektor pendidikan dan kesehatan.

2.1.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :

a. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Kokap dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah :

a) Kalurahan sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
b) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
c) Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat misikin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel;
d) Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.

b. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Kokap, yaitu :

a) Kepanewon Kokap berwenang melaksanakan proses, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan organisasinya;
b) Kapanewon Kokap memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c) Potensi Kapanewon Kokap cukup besar bila dikembangkan seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan, dan peternakan;
d) Kapanewon Kokap memiliki banyak tempat wisata dansentra bisnis kuliner yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat;

2.1.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Kokap agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Kokap. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut.

Tabel : 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Kokap

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				100.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				100.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan	Kap.	Jumlah Laporan Gelar	1	100.000.00	Pembinaan	Kap.	Jumlah Laporan Gelar	1	100.000.0	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kokap	Budaya Yogyakarta	Laporan	0	Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kokap	Budaya Yogyakarta	Laporan	00	
II	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah				40.000.000	Sekretariat Daerah				40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	40.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	40.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokum***	***40.000.000***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***			***2 Dokum***	***40.000.000***	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				en					*en*		
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	49.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	40.000.000	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan				**2.178.605.109**	**Kecamatan**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.019.176.809**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.173.725.798**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat***	***24***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja***	***24***		

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		***Waktu***	***Dokumen***	***15.000.000***	***Perangkat Daerah***		***Disampaikan Tepat Waktu***	***Dokumen***	***11.000.000***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.567.119.393***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.719.802.032***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.679.509.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.679.509.032	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.000.000	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	7.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***42.754.852***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***43.754.650***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.962.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.962.150	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.792.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.792.500	
	Pengadaan					***Pengadaan***					

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Penambahan Aset***	***5 Unit***	***150.000.000***	***Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Penambahan Aset***	***5 Unit***	***150.000.000***	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***131.138.766***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***132.138.766***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.673.650	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.673.650	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	100.465.116	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	100.465.116	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***182.904.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***187.904.000***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	62.904.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	63..904.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	60.000.000	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i					i			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	65..000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**66.773.800**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**67.773.800**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***54.905.800***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***54.905.800***	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi			

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	19.516.400	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	20.515.400	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	23.132.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	24.132.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***12.257.400***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***13.257.400***	
1	Pelaksanaan Urusan	Kap.	Jumlah Dokumen Non	12	***12.257.400***	Pelaksanaan Urusan	Kap.	Jumlah Dokumen Non	12	*13.257.40*	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kokap	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kokap	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	*0*	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**24.400.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**25.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***1 Laporan***	**24.400.000**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***1 Laporan***	**25.000.000**	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.400.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	
	Program					**Program**					

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**25.813.500**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**26.813.500**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***3 Laporan***	***25.813.500***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***3 Laporan***	**26.813.500**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Koka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Koka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		p		3 Laporan	22.800.000		p		3 Laporan	23.800.000	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	48.613.500	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kokap		1 Laporan	48.613.500	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**17.709.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**18.700.000**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**17.709.000**	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**18.700.00**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	5 Laporan	**17.709.000**	Koordinasi Pendampingan Desa di	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	5 Laporan	**18.700.00**	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wilayahnya		Wilayahnya			Wilayahnya		Wilayahnya			
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.293.873.109**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.537.013.098**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Kokap diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2025 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi**:**

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
c. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
d. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan IndustriKreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi MelaluiPeran Aktif Koperasi
e. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
f. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
g. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
i. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

4) Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor - sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Kokap pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah **"Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel"**. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja 2024	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2024
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	99,12

Sumber: Renstra Kapanewon Kokap 2023-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kokap Tahun 2025 adalah seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	45.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			2 Dokumen	45.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	45.000.000	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.723.909.032	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu	24 Dokumen	11.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	11.104.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	3.621.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	14 Laporan	1.723.909.032	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.238.869.731	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32,131,600	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.598.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum	2 Dokumen	28.792.500	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.266.094	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.700.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penambahan Aset		80.486.800	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	45.087.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				110.079.941	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.923.543	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	87.394.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.496.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	63.820.000	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.454,700	
IV	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	46.406.600	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	39.043.900	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	13,807.400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	17.520.696	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.362.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.362.000	
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	22.412.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		22.412.000	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		22.412.000	

VI	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		75.514.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		75.514.600	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		17.590.700	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	32.131.900	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12.660.500	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah LaporanHasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	12.660.500	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kokap	Jumlah LaporanHasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	12.660.500	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				1,822,456,672	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan:
Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan:

Gelar Budaya Jogja.

G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:

Perencanaandan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan,dengan sub kegiatan: Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 serta pendanaan Kapanewon Kokap dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Kokap Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON KOKAP KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON KOKAP						**1.822.456.672,00**							**2.499.681.932,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.552.855.774,00**							**2.104.441.532,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.552.855.774,00**							**2.104.441.532,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	-			**100 Persen**	**1.452.855.774,00**						-	**2.004.441.532,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			21 laporan	14.725.400,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.104.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.621.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	1.274.599.331,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.723.909.032,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/bulan	1.238.869.731,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.679.509.032,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.131.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.598.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	26.700.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	28.792.500,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		28.792.500,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibutuhkan*	-			1 unit	45.087.100,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	45.087.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	-			12 Laporan	27.923.543,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	31.540.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.923.543,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		31.540.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan DInas Operasional atau laporan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*	-			9 Unit	63.820.400,00			-	-	-	-	85.200.000,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	63.820.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.200.000,00	KAPANEWON KOKAP
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KAPANEWON KOKAP
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**45.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**224.600.898,00**							**350.240.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**224.600.898,00**							**350.240.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota***	**-**			**100 %**	**101.114.802,00**						**-**	**183.192.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	6.266.094,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.266.094,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	-			12 Laporan	87.394.008,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87.394.008,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dlnas Operasional atau laporan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*	-			9 Unit	7.454.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	62.492.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				2 0	7.454.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.492.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KAPANEWON KOKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**-**			**100 %**	**38.690.696,00**						**-**	**55.648.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait*	-			6 laporan	31.328.096,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	42.648.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	13.807.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		19.516.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	17.520.696,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.132.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*jumlah laporan pelaksanaan non perijinan pada urusan pemerintahan*	-			12 laporan	7.362.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.362.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**22.412.300,00**						**-**	**25.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah laporan penigkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	-			11 laporan	22.412.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	22.412.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**49.722.600,00**						**-**	**68.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah orang yang mengikuuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi)*	-			200 orang	49.722.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	17.590.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	32.131.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**12.660.500,00**						**-**	**18.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	-			5 laporan	12.660.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	12.660.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	JUMLAH							**1.822.456.672,00**							**2.499.681.932,00**	

BAB V
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kokap Tahun2025 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Kokap dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Kokap. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Kokap ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Kokap serta stakeholder yang bersangkutan.

Kokap, 2 Agustus 2024

Panewu

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON KOKAP KULON PROGO

YULIANTA NUGRAHA, S.IP, M.Si.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19740720 199503 1 004

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Litbangdal, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD): Kapanewon Kokap

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 26 Juli 2024

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : Ibnu Mahrup NIP : 19811207 201001 1008 Jabatan : PFT Perencana Tanda Tangan :	1. Nama : Sulistyowati NIP : 19810187 200701 2 011 Jabatan : Kasubbag Tanda Tangan .....

Mengetahui,

Koordinator

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.

19760317201001 1 006

SARAN dan REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Jumat, 26 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Bidang Litbangdal
PD : Kapanewon Kokap

1. Daftar isi agar disesuaikan/disinkronkan dengan sistematika penulisan
2. Bab I
   a) Landasan hukum agar ditambahkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025
   b) Pada landasan hukum juga perlu menambahkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317
   c) Sub bab Sistematika Penulisan agar disinkronkan dengan daftar isi
3. Bab II
   a) Judul Sub bab 2.1, agar ditambahkan Capaian Renstra Perangkat Daerah
   b) Tabel 2.1, dan tabel 2.2., agar direvisi baik indikatornya, target indikator, dan realisasi tahun 2023. Tabel 2.2 juga perlu ditambahkan sub kegiatan Dais.
   c) Tabel 2.3., formatnya agar direvisi sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017
   d) Pada tabel 2.4, kolom tahun 2023 agar dimasukkan pada bagian realisasi, bukan proyeksi.
   e) Judul pada Sub Bab 2.4, agar direvisi menjadi Reviu terhadap Rancangan Awa RKPD tahun 2025
   f) Judul tabel 2.5, agar direvisi menjadi Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
4. Bab III
   a) Pada tabel 3.1, target kinerja sasaran kinerja OPD agar direvisi sesuai dengan metadata pada RPD Kabupaten dan Perubahan Renstra.
5. Bab IV
   a) Sub bab 4.1 agar dihapus. Tidak ada sub bab pada bab IV
   b) Tabel program dan kegiatan agar diletakkan pada bab ini bukan pada lampiran

REVIU IRDA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KAPANEWON GIRIMULYO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perkenan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Kapanewon Girimulyo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup. Renja yang telah disusun akan menjadi alat kontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun dan sebagai pedoman penyusunan penganggaran tahunan/RKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Kapanewon Girimulyo. Semoga dokumen Renja yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Girimulyo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Girimulyo, 02 Agustus 2024

PANEWU GIRIMULYO

ENDAH WULANDARI,S.STP.,.M.M

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 19770101 199703 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika penulisan 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girimulyo 29
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31
2.4 Review Terhadap RKPD 32
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 40
3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 40
3.3. Program dan Kegiatan 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 45
BAB V PENUTUP 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2023 11

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo..... 12

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 30

Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo..... 33

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025..... 39

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 41

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 41

Tabel 4.1 Rencana kerja dan Pendanaan..... 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Salah satu dokumen perencanaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan/RKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten. Proses penyusunan Renja disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut.

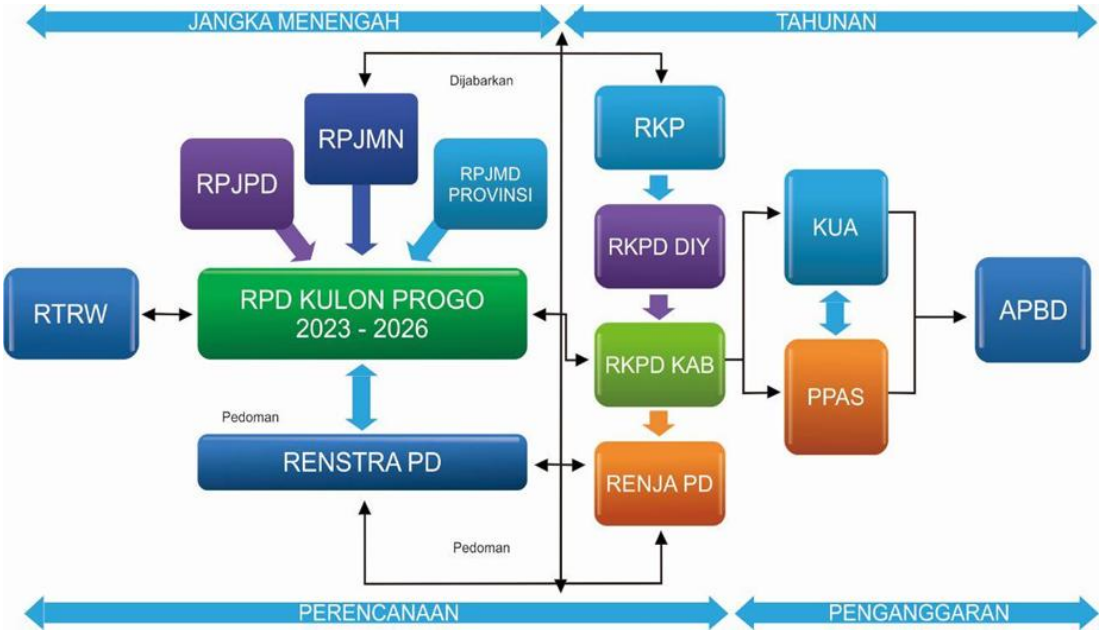

Gambar 1. 1. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saling terkait dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut, maka dikarenakan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Selanjutnya, mengacu dari RPD tersebut OPD menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai acuan dalam penyusunan renja OPD. Sementara RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun mengacu dari RPJMD, dan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber sah lainnya, yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita yang ingin diwujudkan. Untuk itu pemerintah harus bisa merespon atau menindaklanjuti tuntutan

masyarakat yang menginginkan pelayanan yang memuaskan terlebih yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Renja disusun berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan dan diselaraskan dengan plafon anggaran yang tersedia, dengan harapan usulan tersebut dapat diakomodir dengan anggaran sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategis dan program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan daerah. Selain itu, merupakan acuan bagi proses penganggaran tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kapanewon Girimulyo tahun 2025;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan indikator kinerja dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Girimulyo Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

a. Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

   Tidak ada

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   9. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   10. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   11. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   12. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   13. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

c. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Tidak ada

Pengukuran kinerja Kapanewon Girimulyo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	99,12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75	90,632
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah	100	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Girimulyo sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Girimulyo

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1						2								3	3	4			5			6			7			8 = (7/6)	9			10 = (5+7+9)			11 = (10/4)
2						Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar						100	%	100.000.000							100	%	97.206.962	97,21	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	22 %
2	2	2				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						100	%	100.000.000							100	%	97.206.962	97,21	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	0,22

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
2	2	2	8			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	%	100.000.000				100	%	10000000	100	%	97.206.962	97,21	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	0,22
2	2	2	8	5	7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1	Laporan	100.000.000				1	Laporan	10000000	1	Laporan	97.206.962	97,21	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	0,22
														Pembinaan Kelembagaan adat,seidan tradisi	Pembinaan Pembinaan Kelembagaan adat,seidan tradisi																					
2	2	2	8	5	7			Gelar Budaya Yogya				Gelar Budaya Yogya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	100.000.000				1	Laporan	10000000	1	Laporan	97.206.962	97,21	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	0,22
4	1					Urusan Sekretariat Daerah				Urusan Sekretariat Daerah						100	%	40.000.000				100	%	40.000.000	100	%	33,947.378	96,99	100	%	40.000.000	100	%	40.000.000	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
4	1	4				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan				Persentase Peningkatan	Persentase Peningkatan	100	%	40.000.000				100	%	40.000.000	100	%	33.947.378	96,99	2	Laporan	40.000.000	100	%	40.000.000	0,15
														Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan																				
4	1	4	5	6			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	2	Dokumen	40.000.000				2	Dokumen	40.000.000	2	dokumen	33.947.378	96,99	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	40.000.000	0,15
														Penerapan Keistimewaan dikapanewon/kemantren dan kaluraha n/kelurah	Penerapan Keistimewaan dikapanewon/kemantren dan kaluraha n/kelurah																				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
															an yang didampingi	an yang didampingi																				
4	1	4	5	6	1			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	Dokumen	40.000.000				2	dokumen	40.000.000	2	dokumen	33.947.378	96,99	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	40.000.000	0,15
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Peningkatan	Persentase Peningkatan	100	%	1.564.635.743				100	%	1.574.714.657	100	%	1.507.488.777	95,73	100	%	1.820.685.382	100	%	1.820.685.382	1
															Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
															Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
7	1	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan				Perencanaan, Penganggaran, dan				jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampai	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampai	21	dokumen	15.418.600				21	dokumen	9.024.000	21	dokumen	8.931.570	98,98	12	bulan	9.024.000	12	bulan	9.024.000	0,31

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			kan tepat waktu	kan tepat waktu																				
7	1	1	2	1	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	11.391.500				2	dokumen	5.695.800	2	dokumen	5.667.950	99,51	2	Dokumen	5.695.800	2	Dokumen	5.695.800	0,2
7	1	1	2	1	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	40.27.100				21	dokumen	3.328.200	21	dokumen	3.263.620	98,06	21	Dokumen	3.328.200	21	Dokumen	3.328.200	0,26
7	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100	%	1.305.287.906				14	Laporan	1.339.149.804	14	Laporan	1.274.080.152	95,14	14	Laporan	1.339.149.804	14	Laporan	1.339.149.804	0,28
7	1	1	2	2	2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	32,250,000				12	bulan	39000000	12	bulan	38.258.042	98,10	12	bulan	39.000.000	12	bulan	39.000.000	0,28

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	1	2	2	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308	Orang/bulan	1.268.820.506				308	Orang/bulan	1.296.664.004	308	Orang/bulan	1.232.356.570	95,04	308	Orang/bulan	1.296.664.004	280	Orang/bulan	1.296.664.004	0,26
7	1	1	2	2	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	4.217.400				14	Laporan	3.485.800	14	Laporan	3.465.540	99,42	14	kali	3.485.800	14	kali	3.485.800	0,25
7	1	1	2	6	9		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum	5	Dokumen	45.068.039				6	dokumen	38.765.800	6	dokumen	38.304.374	98,81	6	Dokumen	38.765.800	6	Dokumen	38.765.800	0,26

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	1	2	6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	Laporan	32.670.000				12	bulan	27.900.000	12	bulan	27.821.290	99,72	12	bulan	27.900.000	12	bulan	27.900.000	0,25
								Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
7	1	1	2	8	3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	12.396.039				5	Paket	10.865.800	5	Paket	10.483.084	96,48	5	Paket	10.865.800	5	Paket	10.865.800	0,28
7	1	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penambahan Aset	Jumlah Penambahan Aset	11	Unit	121,072,215											0	Unit	-	0	Unit	-	-

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	1	2	7	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Penambahan Aset	Jumlah Penambahan Aset	11	Unit	19.000.000												0	Unit	-	0	Unit	-	0,29
7	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	12	Laporan	102.161.198				12	Laporan	109.206.553	12	Laporan	107.780.207	98,69	12	Laporan	109.206.553	12	Laporan	109.206.553	0,26
7	1	1	2	8	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	22,500,000				12	Laporan	25.499.689	12	Laporan	24.073.343	94,41	12	Laporan	25.499.689	12	Laporan	25.499.689	0,06
7	1	1	2	8	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana	12	Laporan	79.661.198											12	Laporan	83.706.864	12	Laporan	83.543.424	1,22

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
														n Umum Kantor yang Disediakan	n Umum Kantor yang Disediakan																				
7	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	12	Bulan	77.700.000				12	bulan	83.706.864	12	bulan	83.706.864,	100,71	12	Bulan	83.706.864	12	Bulan	83.706.864	0,2
7	1	1	2	9	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	67.700.000				12	unit	66.668.600	12	unit	99,96	99,76	12	Unit	66.668.600	12	Unit	66.668.600	0,25

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	1	2	9	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0				12	unit	4.307.700	12	unit	4.162.200	96,62	12	Unit	4.307.700	12	Unit	4.307.700	0,28
7	1	1	2	9	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10	Unit	10.000.000											25	Unit	13.369.300	25	Unit	13.369.300	0,24
														Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi																				
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Cakupan Peningkatan	Cakupan Peningkatan	100	%	36.694.950				100	%	36.196.300	100	%	35.853.221	99,05	100	%	36.196.300	100	%	36.196.300	0,29
														Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Kecamatan																				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Laporan	28.554.048				12	Laporan	28.221.100	12	Laporan	28.053.277	99,41	1	Laporan	28.221.100	1	Laporan	28.221.100	0,3
7	1	2	2	1	2			Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan				Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	14.140.902				5	laporan	14.060.900	5	Laporan	13.991.071	99,50	5	Laporan	18.560.900	5	Laporan	18.560.900	0,28
														Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas																				
														Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan																				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	2	2	1	1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	Laporan	14.413.146				12	Laporan	14.060.900	12	Laporan	13.991.071		12	Laporan	14.060.900	12	Laporan	14.060.900	0,32
7	1	2	2	4				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Non Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	100	%	8.140.902				100	%	7.925.200	100	%	7.799.944	98,42	100	%	7.975.200	100	%	7.975.200	0,24
														Usaha yang Dilaksanakan	Usaha yang Dilaksanakan																				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
															Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	2	2	4	1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	12	Dokumen	8.140.902				100	%	7.925.200	100	%	7.799.944	98,42	12	Dokumen	7.975.200	12	Dokumen	7.975.200	0,24
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keluraha n	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keluraha n	100	%	25.040.769												100	%	23.022.300	100	%	23.022.300	0,45
7	1	3	2	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah Laporan Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	6	Laporan	25.040.769												7	Laporan	23.022.300	7	Laporan	23.022.300	0,45
														Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan																					

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
															Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
7	1	3	2	1	3			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	6	Laporan	25040.769				7	Laporan	21.022.300	7	Laporan	20.841.356	99,14	7	Laporan	23.022.300	7	Laporan	23.022.300	0,45
														Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan																					
7	1	5				ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	66.163.900				100	%	46.812.200	100	%	46.518.084	99,37	100	%	38.845.200	100	%	38.845.200	0,24
7	1	5	2	1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala			Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12	Laporan	66.163.900				5	Laporan	46.812.200	5	Laporan	46.518.084	99,37	5	Laporan	38.845.200	5	Laporan	38.845.200	0,32

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
							Daerah				Daerah																									
															Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum																				
7	1	5	2	1	2			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	Orang	30 863. 900				37	orang	13.54 5.500	37	orang	13.51 3.250	99, 76	37	Orang	38.84 5.200	37	Orang	38.84 5.200	0,23
7	1	5	2	1	5			Penanganan Konflik				Penanganan Konflik			Jumlah Laporan Konflik yang	Jumlah Laporan Konflik yang	4	Laporan	35. 300. 000				4	Lapo ran	33.2 66.70 0	4	Lap oran	33.00 4.834	99 ,21	4	Laporan	66.32 2.000	4	Laporan	66.32 2.000	0,39
								Sosial Sesuai Ketentuan				Sosial Sesuai Ketentuan			Ditangani Sesuai Ketentuan	Ditangani Sesuai Ketentuan																				
								Peraturan Perundang-Undanga				Peraturan Perundang-Undanga			Peraturan Perundang-	Peraturan Perundang-																				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
								n				n		Undangan	Undangan																				
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	17.725.000				100	%	15.725.000	100	%	15.555.613	98,92	100	%	15.725.000	100	%	15.725.000	0,31
7	1	6	2	1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	5	Laporan	17.725.000				5	Laporan	15.725.000	5	Laporan	15.555.613	98,92	5	Laporan	15.725.000	5	Laporan	15.725.000	0,31
														Pendampingan Desa di wilayahnya	Pendampingan Desa di wilayahnya																				
7	1	6	2	1	17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	5	Laporan	17.725.000				5	Laporan	15.725.000	5	Laporan	15.555.613	98,92	5	Laporan	15.725.000	5	Laporan	15.725.000	0,31

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
																	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
															Pendampingan Desa di wilayahnya	Pendampingan Desa di wilayahnya																				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Girimulyo merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Girimulyo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Girimulyo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Girimulyo disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel: 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Girimulyo

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	*2*	*4*	*5*								
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,50	84,75	85,00	90.632	84.50	84,75	
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			97,37	98,25	99,12	100	100	98.25	99,12	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kapanewon yang belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan.
2. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan belum berjalan dengan optimal;
3. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
4. Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat;
5. Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD dikarenakan penyusutan anggaran;
6. Wilayah Girimulyo yang berupa dataran tinggi dan pegunungan sering terjadi longsor;
7. Wilayah Girimulyo yang banyak pepohonan sehingga rawan kebakaran hutan;
8. Peningkatan angka penderita stunting;
9. Wilayah Girimulyo yang merupakan wilayah yang rawan akan kekeringan di musim kemarau menjadikan girimulyo kekurangan air bersih.
10. Berada di wilayah perbatasan provinsi dan harus berkoordinasi antar wilayah jika terjadi permasalahan.

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :

a. Tantangan

Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah.

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Girimulyo cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
2) Adanya komitmen Bupati untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan sarana prasarana wilayah dan
3) Sebagai penyangga kawasan budaya wisata;
4) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

2.3.3. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
7) Munculnya wabah malaria dan leptospirosis
8) Peningkatan kasus stunting.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Girimulyo agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Girimulyo. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4 berikut.

Tabel : 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Girimulyo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**100.000.000**	
1	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	62.244.100	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	30.032.400	
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	62.244.100	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	30.032.400	

II I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.564.635.743**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.317.648.206**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**25**	**15.418.600**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**25**	**13.056.300**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	11.391.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	9.201.300	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	4,027,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.855.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**320**	**1.305.287.906**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**320**	**1.304.591.906**	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1,268,820,506.	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1,268,820,506.	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	32,250,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	32,250,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	4,217,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	3.521.400	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**17**	**45,068,039**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**17**	**40.871.800**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	12,398,039	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	11.811.800	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	32,670,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	29.060.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			19.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			18.988.300	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		19.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		18.988.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			**102,143,424**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			**108.823.524**	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	79,643,424	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	83.171.988	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	22,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	25.651.536	

	Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Girimulyo**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**78,700,000**	**Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**67.862.100**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	67.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	67.862.100	
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo		-	0	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo		-	0	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	11,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	9.998.800	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Peningkatan pelayanan Kecamatan**	**100**	**36,694,950**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan**	**100**	**31.906.400**	
	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Girimulyo**		**10**	**28,554,048**	**Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Girimulyo**		**10**	**31.906.400**	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	10	14,140,902	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girimulyo	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	17.613.300	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14,413,146	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14.293.100	
	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Girimulyo**		**5**	**8,140,902**	**Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Girimulyo**		**5**	**7.772.900**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	8,140,902	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	7.772.900	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**25.040.769**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**24.825.400**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Girimulyo**			**25.040.769**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Girimulyo**			**24.825.400**	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	25.040.769	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	24.825.400	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Girimulyo	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9737	**66.163.900**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Girimulyo	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9474	**62.716.500**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			**66.163.900**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			**62.716.500**	
1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	30,863,900	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	27.573.700	
2	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	35.300.000	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesua.i Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	35.142.800	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**17.725.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**16.197.500**	
		Kapanewon Girimulyo			**17.725.000**		**Kapanewon Girimulyo**			**16.197.500**	
		Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	17.725.000		Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	16.197.500	
Jumlah					1.710.260.362	Jumlah				1.837.663.630.	

2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Girimulyo diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2025 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi :

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila,Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Girimulyo pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah "Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1:

=

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2025
					Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)		A
			2.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		WTP
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	%	99,12
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,75
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Kapanewon Girimulyo tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			TARGET	RP		
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**100.000.000**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000	Kapanewon Girimulyo	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaann Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	**30.032.400**	**Kapanewon Girimulyo**	

=

	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	30.032.400	Kapanewon Girimulyo	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.317.648.206**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**13.056.300**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	9.201.300	Kapanewon Girimulyo	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.855.000	Kapanewon Girimulyo	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.304.591.906**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1.268.820.506	Kapanewon Girimulyo	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	32,250,000	Kapanewon Girimulyo	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	3.521.400	Kapanewon Girimulyo	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**40.871.800**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	11.811.800	Kapanewon Girimulyo	
2	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	9.060.000	Kapanewon Girimulyo	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**18.988.300**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		**18.988.300**	Kapanewon Girimulyo	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**108.823.524**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	83.171.988	Kapanewon Girimulyo	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	25.651.536	Kapanewon Girimulyo	
	Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**67.862.100**	**Kapanewon Girimulyo**	

=

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	67.862.100	Kapanewon Girimulyo	
2	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	0,00	Kapanewon Girimulyo	
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	9.998.800	Kapanewon Girimulyo	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan**	**100**	**31.906.400**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**31.906.400**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Instansi Vertikal Terkait	10	17.613.300	Kapanewon Girimulyo	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14.293.100	Kapanewon Girimulyo	
	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			**7.772.900**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	7.772.900	Kapanewon Girimulyo	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**24.825.400**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**24.825.400**		
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	**24.825.400**	Kapanewon Girimulyo	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**9737**	**62.716.500**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah			**62.716.500**	**Kapanewon Girimulyo**	

=

1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	27.573.700	Kapanewon Girimulyo	
2	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	35.142.800	Kapanewon Girimulyo	
VII	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**16.197.500**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**16.197.500**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	16.197.500	Kapanewon Girimulyo	
			Jumlah	1.837.663.630		

=

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Kapanewon Girimulyo tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2025, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2025. Pagu indikatif tahun 2025 termasuk dana keistimewaan yaitu sebesar Rp1.837.663.630,- Sementara Rencana Kerja tahun 2025 terdiri dari 7 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Girmulyo maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut:

=

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAPANEWON GIRIMULYO KAB. KULON PROGO

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						1.837.663.630,00							0	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						376.403.724,00							0	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						376.403.724,00							0	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah*	-			100%	276.403.724,00						-	0	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KABUPATEN/ KOTA	***Daerah Kabupaten/Kota***													
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	13.056.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.201.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									sa		mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.855.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan*	-			26 Laporan	35.791.200,00			Memperkuat Ketahanan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah								Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.541.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			17 Laporan	40.871.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan					
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.811.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				12 Laporan	29.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			24 Laporan	108.823.524,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.651.536,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.171.988,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekono	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											mi Dan Pelayanan Dasar					
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Laporan	77.860.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				12 Unit	67.862.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kel/Desa		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	9.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	***Presentase Peningkatan Penyelenggar***	**-**			**100%**	**100.000.000,00**						**-**	**0**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	***aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***													
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah				1	100.000.00	Kab.	PENDAP	Revolu	Pengu	Kapane		0	KAPANE

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				Laporan	0,00	Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	ATAN ASLI DAERAH (PAD)	si Mental dan Pembangunan Kebudayaan	atan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	won Girimulyo			WON GIRIMULYO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**49.020.700,00**							**0**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**49.020.700,00**							**0**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	***Presentase Peningkatan Penunjang***	**-**			**100%**	**18.988.300,00**						**-**	**0**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	***Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***													
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			1 Paket	18.988.300,00			Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan				1 Unit	18.988.300,00	Kab. Kulon	PENDAPATAN	Memperkuat	Penguatan	Kapanewon		0	KAPANEWON

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Girimulyo			GIRIMULYO
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Presentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyaktarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana***	**-**			**100%**	**30.032.400,00**						**-**	**0**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			an													
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun*	-			3 Dokumen	30.032.400,00			Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan				3 Dokumen	30.032.400,00	Kab. Kulon Progo, Girimul	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastrukt ur	Menciptakan lingkungan	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi						yo, Semua Kel/Desa	(PAD)	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	hidup yang lebih baik, aman dan tentera m 5. Peningka tan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.412.239.206,00**							**0**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.412.239.206,00**							**0**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**			**100%**	**1.268.820.506,00**						**-**	**0**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KOTA	***Kabupaten/Kota***													
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			26 Laporan	1.268.820.506,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/ bulan	1.268.820.506,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha	-	-		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											n Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**100%**	**39.679.300,00**						**-**	**0**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			2 Laporan	31.906.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkea	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dilan					
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	17.613.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	14.293.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									sa		mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-			14 laporan	7.772.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhuk	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									atan, Semua Kel/Desa		hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Pemberdayaan Masyarakaat Desa dan Keluarahan***	**-**			**100%**	**24.825.400,00**						**-**	**0**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*	-			6 laporan	24.825.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	24.825.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100%**	**62.716.500,00**						**-**	**0**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			4 Laporan	62.716.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	-	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pelayanan Publik					
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	27.573.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan				4 Laporan	35.142.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	-	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perundang-Undangan						Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik					
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Peningkatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100%**	**16.197.500,00**						**-**	**0**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	*Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			37 Orang	16.197.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi	Kapanewon Girimulyo	-	0	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									Publik	Tata Kelola Pemerintahan				
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	16.197.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pem	Kapanewon Girimulyo		0	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												erintahan				
	J U M L A H							**1.837.663.630,00**							**0**	

=

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Girimulyo dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Girimulyo. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Girimulyo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian IKU tahun 2023 seluruhnya memenuhi target. Namun, masih diperlukannya optimalisasi kinerja kapanewon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur, tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai, dan perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Girimulyo agar berhasil guna dan berdaya guna.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Girimulyo serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Girimulyo, 02 Agustus 2024

PANEWU GIRIMULYO

ENDAH WULANDARI,S.STP.,.M.M

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 19770101 199703 2 003

=

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON NANGGULAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Nanggulan. Dalam rangka itu, Pemerintah Kapanewon Nanggulan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mengacu kepada Perubahan Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kapanewon Nanggulan siap melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya visi misi yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian ringkasan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kapanewon Nanggulan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Nanggulan, 2 Agustus 2024

PANEWU

Ir. ST HARYOTO MMA

NIP. 196709101996031004

DAFTAR ISI

Sampul …..... i

Pengantar …..... Ii

Daftar isi…..... Iii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

1.1 Latar Belakang ……. 1

1.2 Landasan Hukum …….....…..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ……. 6

1.4 Sistematika Penulisan …….. 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU…….. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…… 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat……. 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…. 20

2.4. Review Terhadap RKPD…… 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….. 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…….. 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …….. 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat … … … … … … … … … … . . 33

3.3 Program dan Kegiatan…… 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……. 36

BAB V PENUTUP…….. 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan OPD untuk periode 1 tahun. Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja), dimana Renja dimaksud merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Sehingga diharapkan kedepan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kapanewon Nanggulan 2023 - 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD

Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra PD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

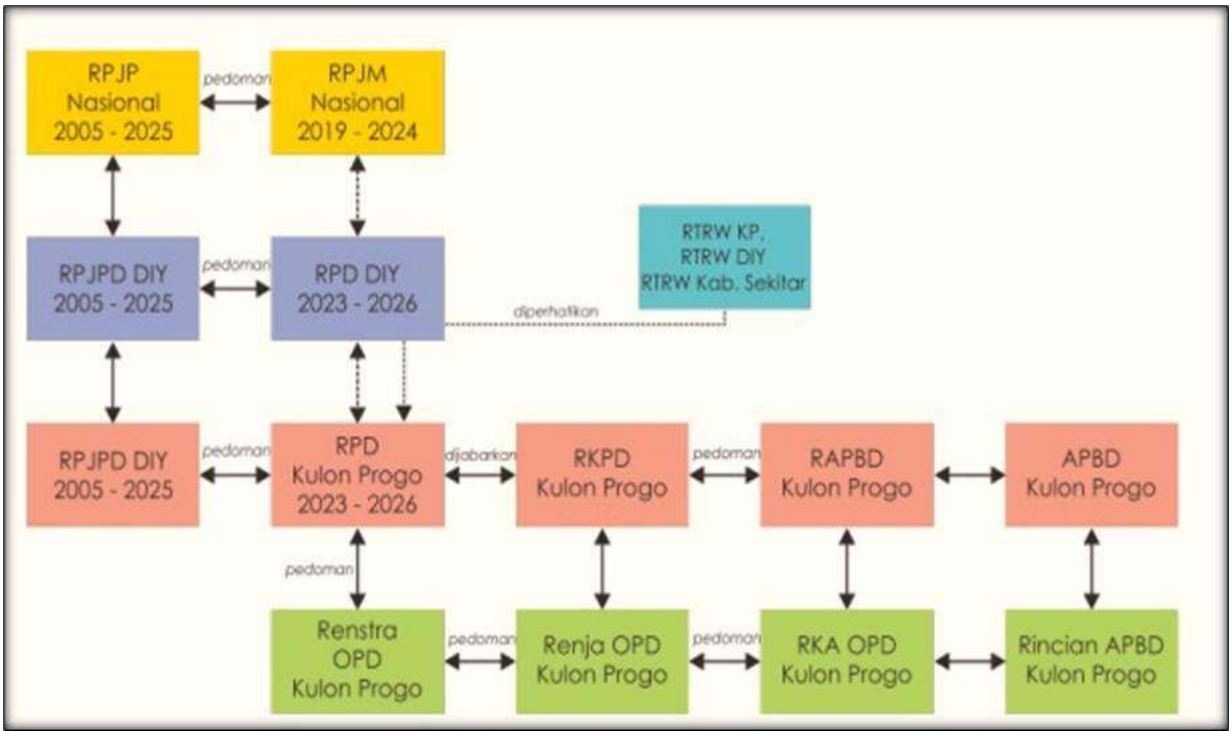

Gambar 1.1.

Bagan Alur

Hubungan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan akhir Renja OPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1371 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Kapanewon dan Kalurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam melaksanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kapanewon Nanggulan periode 2023 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Nanggulan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja OPD Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
2.4. Review Terhadap RKPD
. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2023 bahwa kondisi urusan yang dilaksanakan di SKPD Tingkat Kapanewon adalah 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terbagi dalam 7 (lima) program kerja serta terbagi menjadi 23 kegiatan.

Adapun Program yang dilaksanakan di Tingkat Kapanewon ada 7 (tujuh adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian
			Tahun 2023	Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	86.35
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	97,37	97,37

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Nanggulan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,12	92,12
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	100%	100%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Program Penylenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	100%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100%	100%

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2023 telah berjalan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon 100 % telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai dengan rencana. Pada tahun anggaran 2023 OPD Kapanewon Nanggulan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.019.239.635,00 Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.696.826.093,00** dengan capaian sebesar 94.8%. Hal ini diakibatkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Rp. 1.789.903.075,00**	**100**	**Rp. 1.696.826.093,00**	94.8%
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp. 10.000.000,00**	**100**	**Rp. 9.987.400,00**	99,87%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.000.000,00	100	Rp. 5.994.960,00	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000,00	100	Rp. 3.992.440,00	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp. 1.497.758.806,00**	**100**	**Rp. 1.407.038.694,00**	93,79%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.458.258.906,00	100	Rp. 1.367.770.094,00	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 35.499.900,00	100	Rp. 35.274.900,00	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 4.000.000,00	100	Rp. 3.993.700,00	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp. 12.000.000,00**	**100**	**Rp. 12.000.000,00**	100%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 12.000.000,00	100	Rp. 12.000.000,00	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp. 33.921.000,00**	**100**	**Rp. 33.859.224,00**	99,81%
4.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 13.131.000,00	100	Rp. 13.131.000,00	
4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 20.790.000,00	100	Rp. 20.728.224,00	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp. 24.437.700,00**	**100**	**Rp. 24.092.575,00**	98,58%
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 24.437.700,00	100	Rp. 24.092.575,00	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp. 106.806.669,00	100	Rp. 106.190.800,00	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 23.099.805,00	100	Rp. 22.483.937,00	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 83.706.864,00	100	Rp. 83.706.864,00	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp. 104.978.900,00**	**100**	**Rp. 103.657.400,00**	98,74%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 46.988.600,00	100	Rp. 46.484.100,00	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.45.991.000,00	100	Rp. 45.174.000,00	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 11.999.300,00	100	Rp. 11.999.300,00	

II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Rp. 41.500.000,00**	**100**	**Rp. 41.176.054,00**	99,34%
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Rp. 41.500.000,00**	**100**	**Rp. 41.176.054,00**	99,21%
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 18.000.000,00	100	Rp. 17.715.355,00	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 23.500.000,00	100	Rp. 23460.704,00	
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Rp. 10.500.000,00**	**100**	**Rp. 10.380.990,00**	99,86%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Rp. 10.500.000,00	100	Rp. 10.380.990,00	
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Rp. 24.000.000,00**	**100**	**Rp. 23.950.608,00**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Rp. 24.000.000,00**	**100**	**Rp. 23.950.608,00**	
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 24.000.000,00	100	Rp. 23.950.608,00	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Rp. 52.000.000,00**	**100**	**Rp. 51.239.610,00**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Rp. 52.000.000,00**	**100**	**Rp. 51.239.610,00**	
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp. 9.500.000,00	100	Rp. 9.347.370,00	
1.2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 42.500.000,00	100	Rp. 41.892.240,00	
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Rp. 21.000.000,00**	**100**	**Rp.20.950.964,00**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rp. 21.000.000,00**	**100**	**Rp.20.950.964,00**	
1.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 21.000.000,00	100	Rp.20.950.964,00	
VI.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**	**Rp 35,000,000.00**	**100**	**Rp. 34.863.226.00**	

	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
1	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Rp 35,000,000.00**	**100**	**Rp. 34.863.226.00**	
1.1	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Rp 35,000,000.00	100	Rp. 34.863.226.00	
VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Rp 100.000.000.00**	**100**	**Rp. 99.995.120,00**	
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Rp 100.000.000.00**	**100**	**Rp. 99.995.120,00**	
1.1	Gelar Budaya Jogja	Rp 100.000.000.00	100	Rp. 99.995.120,00	

Dari Program / kegiatan / sub kegiatan yang dlaksanakan semua memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang telah direncanakan tetapi tidak 100% disebabkan harga satuan harga tidak sesuai harga pasar dan menggunakan system Mbismarket.

Tabel 2.4

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN TENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023 (TAHUN BERJALAN)
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1**	**100**	**200**	**2**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**0**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	*280*	0	280	280	**1**	280	**560**	**2**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan barang	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	0	4	14	**4**	14	**28**	**2**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*							**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12	0	6	6	**1**	6	**12**	**1**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		*0*					**0**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	0	2	2	**1**	2	**4**	**2**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21	0	21	21	**1**	21	**42**	**2**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*							**0**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	3	3	**1**	5	**8**	**2**

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*							**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	0	11	11	**1**	11	**22**	**2**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	0	6	6	**1**	6	**12**	**2**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	0	25	25	**1**	25	**50**	**2**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*							**0**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0			**0**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1**	**100**	**200**	**2**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-							**0**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efejtifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	0	6	6	**1**	6	**12**	**2**

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-							**0**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	0	12	12	**1**	12	**24**	**2**
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-							**0**	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6	0	6	6	**1**	6	**12**	**2**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-							**0**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdataan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	0	6	6	**1**	6	**12**	**2**
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-							**0**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	96	0	88	88	**1**	91	**179**	**2**
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	4	0	4	4	**1**	4	**8**	**2**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**0**	
	Penyelenggaraan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi			0	0			**0**	**0**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan								**0**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*2*	0	2	2	**1**	2	**4**	**2**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								**0**	
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3	0	3	3	**1**	3	**6**	**2**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Nanggulan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Nanggulan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi.

Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Nanggulan meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:

a. Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
4. Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan

kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. SPM Kapanewon Nanggulan belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan dasar Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
4. Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
5. Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Panewu belum dilaksanakan secara optimal.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
3. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon
5. Tempat Wisata Kuliner di Kapanewon Nanggulan sangat potensial dan

banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya.

Ancaman:

1. Geografis Kapanewon Nanggulan ada yang pegunungan mengakibatkan sarana dan prasarana wilayah yang kurang memadai,
2. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah miskin.

Untuk kinerja pelayanan, Kapanewon Nanggulan selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap OPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu kalurahan baru kemudian kapanewon dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	SPM IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (%) Tahun		Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)			A	A	A	A	A	A	A	A	
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			84,25	84,50	84,75	83,27	87,91	na	84.25	83,27	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100	100	100	na	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,50	84,75	87,811	87.91	na	84,25	84,75	
			Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			97,37	98,25	99,12	94,12	97,37	na	97,37	99,12	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu belum ada ketegasan bagaimana sistem atau petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaannya di tingkat kapanewon.

   Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu meliputi:

   a. Perizinan, nonperizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dam penyelenggaraan;
   b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
   c. Tugas pembantuan;dan
   d. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Masih belum tersusunnya perpaduan dan integritas perencanaan pembangunan dari masyarakat di tingkat Pedukuhan, Kalurahan dan Kapanewon. Sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Walaupun UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sudah diberlakukan, namun Musrenbang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan.
4. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya sistem

pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan, dan kesadaran aparatur pemerintah yang kurang terhadap arti pentingnya kearsipan.
7. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
8. Belum tersosialisasikannya fungsi-fungsi kearsipan, perpustakaan, dan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum kepada seluruh pegawai Kapanewon dan pemerintah Kalurahan. Sehingga diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh aparat dapat memahami dan memanfaatkan sistem tersebut dengan baik.

9. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat.
10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berhimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya.
11. Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan mereka ini.
12. Adanya perbedaan tentang kesetaraan gender yang ditandai dengan masih adanya sikap dan pandangan bahwa derajat/kedudukan laki-laki berada di atas perempuan. Wanita masih dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak perlu diberdayakan. Sehingga wanita tidak mempunyai hak-hak seperti halnya yang dimiliki oleh pria yang berarti masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.
13. Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di Pedukuhan dan di tingkat kalurahan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada sifatnya masih insidentil, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun.
14. Makin maraknya peredaran NAPZA (Narkotika dan Antibiotik dan Zat Adiktif, Mihol), pergaulan bebas dan penyakit masyarakat lainnya. Yang peredarannya cepat sekali mempengaruhi para generasi muda. Karena kelompok umur inilah yang paling rentan untuk dipengaruhi dan mencoba

hal-hal yang baru yang ingin diketahuinya.

2.3.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di tingkat kapanewon secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja kapanewon.

b. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.

c. Kualitas aparatur pemerintah Kapanewon yang masih perlu ditingkatkan. Baik dari segi pendidikannya, maupun diklat/kursus/bimteknya. Hal ini disebabkan antara lain karena kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat sangat kecil kemungkinannya.

d. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah:
   - ❖ Laptop masih kurang 2 unit;
   - ❖ Kendaraan dinas (roda dua) kurang 2 unit;
   - ❖ Kursi rapat kurang 40 unit.
   - ❖ Scaner kurang 1 unit

e. Sudah banyak bagian bangunan kantor yang rusak seperti:
   - ❖ Rumah dinas Panewu yang kurang layak karena sejak di bangun tahun 1978 belum pernah di renovasi ;
   - ❖ Pendopo Kapanewon yang kurang layak mohon untuk direnovasi.
   - ❖ Pembangunan parkir kurang 2 unit
   - ❖ Dinding kayu/joglo yang belum direnovasi.

f. Sarana dan prasarana pengamanan kantor belum memadai. Contohnya adalah:
   - ❖ sebagian jendela yang ada di Kantor Panewu Nanggulan belum diteralis ;

2.3.3 *Tantangan dan Peluang*

2.3.3.1 Tantangan

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Nanggulan
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Nanggulan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK
5. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2024 mencapai 98,25 %

2.3.3.1. Peluang

Peluang yang dimiliki Kapanewon Nanggulan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2024 adalah bahwa Kapanewon Nanggulan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan

2.3.4. Formulasi Isu Isu penting

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renja 2023 ini:

Penurunan Stunting:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Nanggulan sering digunakan baik seminar/workshoppenurunan stunting yang diselenggarakan oleh Kemendagri hal ini semakin menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi prioritas yang ditangani secara kolaboratif dan tersinergi dari semua pihak yang terkait, dari penganggaran, intervensi program kegiatan, maupun evaluasi dan pelaporannya. Untuk itu, fasilitasi koordinasi penurunan stunting kapanewon menjadi salah satu prioritas penganggaran 2023-2026.

Bahaya Leptospirosis:

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis akut disebabkan oleh bakteri *Leptospira* dengan spektrum penyakit yang luas dan dapat menyebabkan kematian. Leptospirosis penyakit zoonosis menyerang hewan dan manusia pada hewan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit. Leptospirosis bertahan lama dapat ginjal tikus sehingga bakteri akan dikeluarkan banyak melalui urine tikus. Leptospirosis pada hewan dapat bertahan berbulan-bulan dan pada manusia bertahan selama 60 hari. Manusia merupakan induk semang terakhir, sehingga penularannya antar manusia jarang terjadi. Tahun 2024 Kapanewon Nangulan ada yang terpapar sebanyak 4 orang dengan 3 sudah positif dan 1 masih dalam pemeriksaan (Suspek). Kapanewon Nanggulan sudah masuk kategori kejadian luar biasa. Dinas kesehatan dengan jajarannya gencar melakukan sosialisasi untuk pencegahan. Diharapkan dengan seringnya sosialisasi warga yang kena Leptospirosis dapat berkurang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi acuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah kapanewon Nanggulan. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada table.

TABEL.2.3.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO KAPNEWON NANGGULAN

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					
	Gelar Budaya Jogja	**Kap. Nanggulan**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**100%**	**100.000**	**Gelar Budaya Jogja**	**Kap. Nanggulan**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**100%**	**100.000.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**					
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**					
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	**Kap. Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**35.000**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	**Kap. Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**40.000.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**12.995**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**6.855.400**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**4.840**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**5.158.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	1.691.194	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	1.476.098.769	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Nanggulan	persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	42.713	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	41.906.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	4.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	3.914.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	33.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	14.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	16.781.400	Estimasi kenaikan harga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	22.470	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	30.990.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	330.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	48.810.100	Belanja Komputer, LCD,Printer,Laptop, Kursi rapat, ruang laktasi
	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%		Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.000.000	Kendaraan yang ada sudah rusak biaya pemeliharaan mahal.

								Kabupaten /Kota			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	28.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	29.099.805	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Nanggulan	Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase	100%	96.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Nanggulan	Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase	100%	83.706.864	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	52.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	88.441.500	Belanja BBM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	5.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	196.597.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	16.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	25.784.800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	21.477	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	19.134.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	28.332	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	25.877.600	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11.307	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12.250.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	100%	24.562	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	100%	19.533.900	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Nanggulan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	28.030	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Nanggulan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	25.735.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Nanggulan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	11.295	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Nanggulan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	20.830.000	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Nanggulan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	47.299	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Nanggulan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	42.663.000	

Dari hasil penyandingan rumusan program dan kegiatan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 terhadap Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023 tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Nanggulan diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah :

1. Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan dan dirangkum dalam dokumen usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
2. Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Usulan program tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas secara tersendiri dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Kapanewon Naggulan Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Nanggulan Tahun 2023-2026.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Nanggulan, tujuan dan sasaran kerja Kapanewon NanggulanTahun 2025 sebagai berikut;

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat	Realisasi Capaian		Proyek si (%) Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	A	A	A	A	
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	83,27	84.25	84.25	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	87,811	87.912	84,25	
			Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	94,12	97,37	97,37	

3.3. Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan Tindakan Tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada renstra dan Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 900.1.5.15-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi KIsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 adalah seperti pada table ….dan kegiatan kapanewon Naggulan yang dilaksanakan sebagai
berikut:

Tabel 3.3.1
Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program penyelenggaraan keiustimewaaan yogyakarta urusan kebudayaan	Adat, seni,tradisi,dan lembaga budaya	Gelar Budaya Jogya
2	Program penyelenggaraan keiustimewaaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kapanewon Nanggulan seperti tercantum dalam ketetapan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, menegaskan bahwa salah satu tugas Kapanewon adalah melaksanakan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Pada tahun 2025 Kapanewon Nanggulan mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON NANGGULANKAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kapanewon Nanggulan						2.086.592.488,00							256.336.400,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.846.821.038,00							104.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.846.821.038,00							104.000.000,00	
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	-			100 %	1.746.821.038,00						-	4.000.000,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	-			4 Dokumen	12.686.499,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	4.000.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.896.499,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.790.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	-			- Dokumen	1.575.324.049,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.537.152.749,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.156.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.014.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			5 Paket	33.443.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.303.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	-			undefined undefined	109.798.390,00			-	-	-	-	0,00	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.996.366,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.802.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			1 Unit	15.568.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3.499.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	12.068.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
2	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-			1 Laporan	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		100.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						48.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						48.000.000,00							0,00	
3	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	48.000.000,00						-	0,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	48.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				4 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						138.085.300,00							152.336.400,00	
	7	01				KECAMATAN						138.085.300,00							152.336.400,00	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.471.900,00						-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.471.900,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.471.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
5	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-			100% undefined	46.843.800,00						-	28.464.700,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	38.178.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	-	28.464.700,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	14.838.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	23.340.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100% undefined	8.664.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.664.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-			100% undefined	21.895.000,00						-	28.464.700,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			undefined Laporan	21.895.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	28.464.700,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	21.895.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum	-			100% undefined	49.479.800,00						-	69.920.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			undefined Laporan	49.479.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	69.920.000,00	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				91 Orang	10.076.600,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		22.920.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	39.403.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		47.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
8	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa	-			100% undefined	17.394.800,00						-	21.487.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-			undefined Laporan	17.394.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	21.487.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	17.394.800,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		21.487.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	X					NON URUSAN						53.686.150,00							0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						53.686.150,00							0,00	
9	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			1 Unit	53.686.150,00						-	0,00	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	-			1 Unit	53.686.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	-	-	-	0,00	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	53.686.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
											J U M L A H	**2.086.592.488,00**							**256.336.400,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja adalah salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dengan waktu yang sangat terbatas, Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan ini jauh dari sempurna, sehingga ke depan diperlukan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, agar rancangan awal rencana kerja dapat tersusun dengan tepat waktu serta berkualitas.

Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Nanggulan, 2 Agustus 2024

PANEWU NANGGULAN

Ir. ST. HARYOTO, MMA.

NIP. 19670910 199603 1004

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2025

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Suroloyo, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: pengampu Bappeda selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD): Kapanewon Nanggulan

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 25 Juli 2024

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : Ibu ma'mi NIP : 19811207 20100110008 Jabatan : JPT Rencana Tanda Tangan :.....	1. Nama : Paulus Yatno NIP : 19730310 199703 1007 Jabatan : Sub Keg Perencanaan & Keuangan Tanda Tangan .....

Mengetahui,

Koordinator

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

RESTU DEWANDARU, S.E., M.M.

19760317201001 1 006

SARAN dan REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Suroloyo
PD : Kapanewon Nanggulan

1. Daftar isi agar disesuaikan/disinkronkan dengan sistematika penulisan
2. Bab I
   a) Landasan hukum agar ditambahkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025
   b) Sub bab Sistematika Penulisan agar disinkronkan dengan daftar isi
3. Bab II
   a) Realisasi IKM tahun 2023 agar disesuaikan angkanya dengan hasil hitungan IKM yang dirilis Bagian Organisasi
   b) Tabel 2.4 agar disesuaikan menjadi tahun 2023
   c) Pada tabel 2.5 agar disesuaikan dengan format lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Realisasi hanya tahun 2023, sedangkan tahun 2024 termasuk pada proyeksi.
4. Bab III
   a) Pada Sub Bab 3.2 agar direvisi sasaran berikut indikatornya
   b) Pada Sub Bab 3.3 tentang Program dan Kegiatan untuk nomenklatur sub kegiatan bersumber dari Dais agar direvisi/disesuaikan

RENCANA KERJA
KAPANEWON SAMIGALUH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SAMIGALUH

Jl. Pangaji - Plono Km. 4,5 Jetis, Gerbosari, Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan kewajiban kami selaku Kepala OPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu Tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun substansi Rencana Kerja OPD adalah Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Tentu saja masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2025 ini. Kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan perencanaan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi OPD, lembaga pengambil keputusan anggaran serta masyarakat pada umumnya.

Samigaluh, 2 Agustus 2024

PANEWU SAMIGALUH

SURYANTORO, S.IP., M.Si.

Pembina TK I; IV/b

NIP. 197003261998031007

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iiii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…… 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 14

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 25

3,3 Program dan Kegiatan……..... 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2023 ……	5
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun 2023...	6
Tabel 2.3	Realisasi fisik dan keuangan	7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah …..……..	11
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan…….	13
Tabel 2,6	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	16
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan…..	24
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ……...	27
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Samigaluh Tahun 2025 ……..	31

DAFTAR GAMBAR

Ganbar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya …….. 1

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, sehingga Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen RKPD 2025 menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Senada dengan RKPD 2025 yang sesuai dengan Perbup RPD 2023-2026, maka Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026.

Renja Kapanewon Samigaluh adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2025.

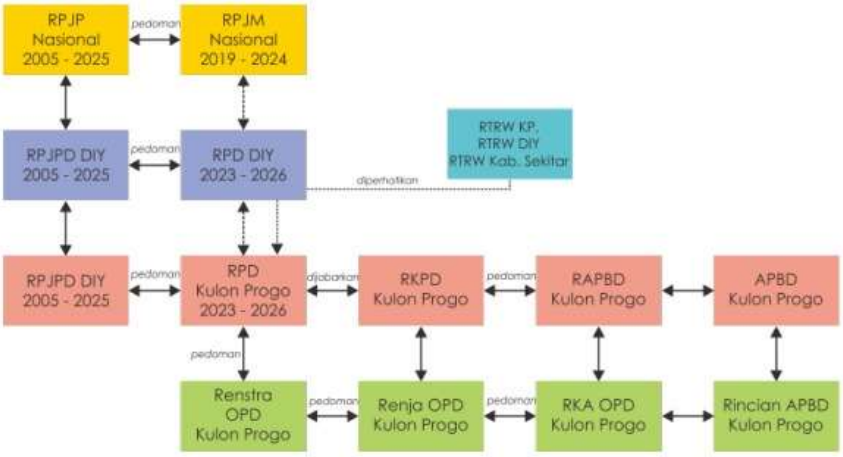

Gambar 1.1
Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan Akhir, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan

Akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi, pelaksanaan, Rencana pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**;**
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
o. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
p. Keputusan Bupati Kulon progo 274/C/2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kapanewon Samigaluh untuk satu Tahun mendatang. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan AKhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian Urusan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Samigaluh Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Samigaluh didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah:

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,25	84,71	100,54
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persentase Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Kapanewon	%	97,37	97,37	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan target, capaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun ini sudah berhasil terlaksana di atas target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang ditargetkan 84,25%, berdasarkan nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo mendapat nilai 84,71% atau terealisasi sebesar 100,54% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk
capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dari target 97,37% mencapai 97,37%, atau terealisasi sebesar 100%.

Sedangkan Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah tahun 2023 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	92,11%	92,11%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	100%
7	Program Penyelenggaraab Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100%

Adapun realisasi fisik dan keuangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Tabel realisasi fisik dan keuangan

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET		REALISASI	
1	3	4	7		12	
			100,00	**1.672,08**	Fisik	Keuangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**1.719,11**	**100,00**	**1.683,95**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peninjang*				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan	12	18,77	12	18,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	55,80	12	55,80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	1.298,60	12	1.270,31
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	39,63	12	39,63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	14	4,00	14	3,95
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	13,70	1	13,69
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	27,62	12	27,56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	7,00	2	6,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21	3,96	21	3,94
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlahpenambahanaset*				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunn lainnya yang di sediakan	50	109,09	50	103,52
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	72,42	7	72,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	2	47,26	2	46,81
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	38	21,28	38	21,24
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**47,99**	**103,49**	**47,94**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	10	19,97	10	19,96
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	7	19,80	7	19,76
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di lakukan	12	8,22	12	8,22

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**30,48**	**100,00**	**30,45**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	5	30,48	5	30,45
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**32,42**	**100,00**	**32,37**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10	32,42	10	32,37
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**92,11**	**60,40**	**92,11**	**60,38**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	22,24	60	22,24
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5	38,16	5	38,15
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**35,00**	**100,00**	**35,00**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	2	35,00	2	35,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,70**

	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya jogja	1	100,00	1	98,70

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja fisik perangkat daerah tahun ini dapat terlaksana sesuai target yang telah ditentukan. Capaian kinerja keuangan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak memenuhi target karena adanya selisih anggaran dengan harga pasar. Dari selisih realisasi anggaran tersebut di kembalikan ke kas daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Samigaluh sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kapanewon Samigaluh

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
2	22	08	07		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*									
2	22	08	07	08	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4		1	1	100	1	1	25
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									
4	01	04	5		*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*									
4	01	04	5	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8		2	2	100	2	*2*	18
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	01				**Administrasi Pemerintahan (Kapanewon)**									
7	01	01			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
7	01	01	2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11		2	2	100	2	2	25
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84		21	21	100	21	21	25
7	01	01	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*									

7	01	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN	48	-	12	12	100	12	12	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48		12	12	100	12	12	25
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	56		14	14	100	14	14	25
7	01	01	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*									**24**
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	48					12	12	24
7	01	01	2.08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan	4		1	1	100	1	1	25
7	01	01	2.08		*Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48		12	12	100	12	12	25
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48		12	12	100	12	12	25
7	01	01	2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24		**8**	**8**	**100**	8	8	**25**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11		**2**	**2**	**100**	2	2	**25**

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	48		12	12	100	12	12	25
7	01	01	2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah*									
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	129		9	9	100	9	9	25
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**									
7	01	02	2.01		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*									**25**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perancanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	40		10	10	100	10	10	25
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon	28		7	7	100	7	7	25
7	01	02	2.04		*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*									
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	48		12	12	100	12	12	25
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
7	01	03	2.01		*Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa*									**25**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kePanewuan	40		10	10	100	10	10	25
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**									
7	01	05	2.01		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*									
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi	240		60	60	100	60	60	25

					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	koordinasi dan pembinaan(Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20		5	5	100	5	5	20
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
7	01	06	2.01		*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*									**20**
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna	25		5	5	100	5	5	20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu melaksanakan tugas dan urusan seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi Kapanewon Samigaluh dibentuk berdasarkan Perda No.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan yang tertuang dalam pasal 6 tersebut di jelaskan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain meyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintah meliputi :

a. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Koordinasi pemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum;
g. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
h. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kapanewon;
j. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan dibidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan;
k. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah di tetapkan oleh Kapanewon Samigaluh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penilaianini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun untuk pencapaian kinerja Kapanewon sampai dengan saat ini dan juga proyeksi capaian untuk Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,50	84,75	85,00	85,137	84,50	84,75	85,00	
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon			97,37	98,25	99,12	100	97,37	98,25	99,12	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan sejak Tahun awal RPJMD telah menunjukkan keberhasilan.

Secara umum hambatan dalam pencapaian kinerja maupun serapan anggaran yang dialami dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon Samigaluh mengalami kekurangan pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tidak meratanya kemampuan serta pengetahuan pegawai dari segi jumlah personil maupun kompetensinya;
2. Plafonisasi pagu anggaran pada OPD Kapanewon menyebabkan harus memilih dan memilah program dan kegiatan yang penting dan *urgent,* sehingga yang terjadi aldalah program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Kulon Progo merupakan kegiatan yang sifatnya rutin;
3. Wilayah Kapanewon Samigaluh sebagian besar merupakan perbukitan yang rawan terhadap bencana tanah longsor.

Adanya beberapa kendala dan hambatan tersebut menyebabkan permasalahan tersendiri bagi OPD, maka pelaksanaan prioritas bagi program dan kegiatan yang penting dan urgent adalah suatu yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat di wujudkan.

Program dan kegiatan serta berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh Kapanewon Samigaluh telah berdampak secara signifikan terhadap masyarakat. Program dan kegiatan tersebut turut mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian SPM di beberapa bidang, serta pencapaian MDGs *(Millenium Development Goals*) diantaranya penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perluasan akses pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tantangan untuk peningkatan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan informasi dan daya kritis dari masyarakat sehingga mereka menginginkan pelayanan yang prima dari Kapanewon Samigaluh;
2. Ketersediaan dan keakuratan data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif apabila melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di Kapanewon Samigaluh;
2. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi.
3. Meningkatnya kedisiplinan dan juga kinerja dari pegawai yang ada di Kapanewon Samigaluh.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi pokok Kapanewon. Isu-isu strategis berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 yang dihadapi oleh Kapanewon Samigaluh antara lain:

1. Berbagai sektor terutama dalam sektor ekonomi sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta pelayanan infrastruktur yang memadai, sehingga akan mempermudah pelaku usaha. Contoh dalam hal ini adalah kebutuhan akan penataan pasar tradisional yang lebih luas, teratur, dan nyaman;
2. Perlunya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kapanewon Samigaluh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Masih perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur maupun menggerakkan perekonomian masyarakat;
4. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
5. Diperlukan antisipasi dini terhadap bencana alam di wilayah yang berpotensi bencana;
6. Perlunya peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kapanewon samigalu. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancanagan Akhir RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6:

Tabel 2.6

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO

Rancangan Akhir RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Program (%)**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Program (%)**	**Pagu Indikatif (Rp)**
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya					**Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**				
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100	100.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**				
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				

	Penyusunan Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon	100	35.000.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon	100	28.492.000
II	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	100	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	100	9.281.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	2.870.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN	100	1.374.725.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN	100	1.411.499.396
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	39.632.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	32.828.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem e steran SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	100	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem e steran SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	100	4.117.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Peralatan an Perlengkapan Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan	100	13.697.000	Penyediaan Peralatan an Perlengkapan Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan	100	11.061.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	27.615.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	27.920.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	19.770.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	19.770.800

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	55.804.576	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	59.868.016
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	Penyediaan jasa,pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	105.422.800	Penyediaan jasa,pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	94.076.919
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	112.120.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	10.770.500
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	16.282.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	14.002.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang disediakan	100	225.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang disediakan	100	200.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	19.932.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	13.038.200
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	27.001.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	26.846.900

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	100	8.220.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	100	5.310.800
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KePanewuan	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah KePanewuan	100	32.792.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KePanewuan	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah KePanewuan	100	27.330.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			97,37		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			97,37	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Samigaluh	Jumlah orang yang mengikutifasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	97,37	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Samigaluh	Jumlah orang yang mengikutifasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	97,37	25.066.800
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	97,37	47.530.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	97,37	38.428.600
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna	100	30.309.600	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Samigaluh	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna	100	24.955.300

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkap pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan. Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten hingga tingkat Provinsi.

Musrenbang Kapanewon adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kapanewon. Musrenbang tingkat Kapanewon ini dihadiri oleh *Stakeholders* yang ada di Kapanewon. Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)* Kapanewon adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kapanewon serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat.

Tujuan diadakannya musrenbang tingkat Kapanewon yaitu untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kalurahan/Kelurahan, usulan OPD tingkat Kapanewon, ormas tingkat Kapanewon yang akan menjadi proritas pembangunan di wilayah Kapanewon yang dituangkan dalam RKP, membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas; dan menyepakati tim delegasi Kapanewon yang akan mewakili dalam forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara *bottom up* sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang

(musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari pedukuhan dan kalurahan telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kapanewon. Seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan usulan dari tingkat kalurahan dan instansi tingkat kapanewon diundang untuk menentukan prioritas usulan program dan kegiatan.

Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kapanewon telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Tabel 2. 7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Daerah Kulon Progo, maka Kapanewon Samigaluh memiliki tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan yang akan dicapai bersama. Tujuan merupakan sesuatu hal/keadaan yang akan deicapai dari kegiatan yang perlu dilakukan oleh panewu selaku pimpinan

instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan media yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kapanewon Samigaluh yang dikaitkan dengan target kinerja pada rumusan renstra Tahun 2023-2026. Sasaran Kapanewon Samigaluh yaitu:

1. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

Target kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk melakukan evaluasi dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan target kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Target kinerja Kapanewon Samigaluh ini merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja kapanewon pada akhir periode karena dapat segera dilakukan perbandingan antara target dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Kapanewon Samigaluh telah menentukan target kinerja sasaran tujuan dan OPD yang juga merupakan Indikator Kinerja Kapanewon..Makna dari tujuan dan sasaran tersebut adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD Kapanewon Samigaluh memegang prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun material, dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Utama tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsiv dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
			Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	99,12

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentusesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendageri) Nomor 900.1.5.15-1317-tahun 2023 tentang hasil verifikasi Validasi dan inventarisasi klasifikasidan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon samigaluh tahun 2025 adalah berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Deesa dan Kelurahan

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a) Koordinasi Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   b) Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
   a) Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan kalurahan/Kelurahan

g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   a) Gelar Budaya Jogja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka di tahun 2025 Kapanewon Samigaluh mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 Program yang terdiri atas 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KAPANEWON SAMIGALUH TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kapanewon Samigaluh						2.187.534.231,00							2.624.254.179,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	100.000.000,00	
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.926.558.431,00							2.308.097.779,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.926.558.431,00							2.308.097.779,00	
2	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	1.898.066.431,00						-	2.273.097.779,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja di Sampaiakn Tepat waktu	-			25 dokumen	12.152.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	10.000.000,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.281.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		7.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.870.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		3.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Sampaikan Tepat Waktu	-			14 Laporan	1.448.444.396,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	1.418.358.000,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.411.499.396,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		1.374.725.400,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.828.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		39.632.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.117.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		4.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	-			2 dokumen	38.981.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kapanewon Samigaluh	-	41.312.000,00	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.061.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kapanewon Samigaluh		13.697.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		27.615.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	-			1 unit	200.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	225.000.000,00	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	-			24 Laporan	79.638.816,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	76.575.376,00		
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.770.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		19.770.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.868.016,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		56.804.576,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			3 Laporan	118.849.419,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	501.852.403,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	94.076.919,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		106.422.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.770.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		379.147.603,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.002.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		16.282.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
3	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-			100 %	28.492.000,00						-	35.000.000,00		

	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-			3 dokumen	28.492.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	35.000.000,00			
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	28.492.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						160.975.800,00							216.156.400,00			
	7	01				KECAMATAN						160.975.800,00							216.156.400,00			
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	-			100 %	45.195.100,00						-	55.154.600,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jummlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon	-			12 Laporan	39.885.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	46.933.800,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	13.038.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		19.932.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	26.846.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		27.001.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH		
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Paneu	-			12 dokumen	5.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.220.800,00			
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.220.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH		
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-			100 %	27.330.000,00						-	32.792.200,00			

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			6 Laporan	27.330.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	32.792.200,00		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	27.330.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		32.792.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
6	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			97,37 %	63.495.400,00						-	97.900.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			6 Laporan	63.495.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	97.900.000,00		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	25.066.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		50.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	38.428.600,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		47.900.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
7	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	24.955.300,00						-	30.309.600,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			5 Laporan	24.955.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	30.309.600,00		
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	24.955.300,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		30.309.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
											JUMLAH	**2.187.534.231,00**							**2.624.254.179,00**		

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja OPD Kapanewon Samigaluh Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renstra OPD Kapanewon Samigaluh periode 2023-2026 dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Rencana Kerja ini memuat dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 oleh OPD Kapanewon Samigaluh dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Dari hasil penyajian pada bab-bab sebelumnya mulai dari pendahuluan, gambaran umum, sampai pada penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi, analisis potensi, hambatan dan permasalahan, serta kondisi yang diharapkan di masa mendatang bahwa pada dasarnya Rencana Kerja merupakan sebuah instrumen perencanaan yang didasarkan pada data yang valid dan akurat yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan. Dengan telah selesainya perumusan Rencana Kerja ini, berarti pemerintah Kapanewon Samigaluh telah memiliki pedoman yang mengatur arah perkembangan organisasi untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang dengan mengutamakan dukungan dan partisipasi seluruh pihak termasuk masyakarat dalam rangka mewujudkan *good governance.*

Untuk mencapai keberhasilan tersebut pemerintah Kapanewon Samigaluh tidak dapat bekerja sendiri, namun harus menjalin kerjasama dengan pemerintah kalurahan dan instansi pemerintah tingkat kapanewon lainnya serta OPD tingkat kabupaten.

Rencana Kerja ini harus dikembangkan menjadi sarana yang efektif oleh pemerintah Kapanewon Samigaluh untuk menentukan jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya renja ini akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan tolok ukur Rencana Kerja tersebut, maka seluruh aktivitas dari instansi harus dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pengukuran tersebut tidak semata-mata difokuskan kepada *input* (masukan) dari kegiatan instansi tersebut, namun lebih ditekankan kepada *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) dari kegiatan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyakarat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun ini selanjutnya harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh aktor organisasi yaitu aparatur pemerintah Kapanewon Samigaluh, pimpinan daerah dan *stakeholders* yang lain agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja ini.

Samigaluh, 2 Agustus 2024

PANEWU SAMIGALUH

SURYANTORO, S.IP., M.Si.

Pembina Tk I; IV/b

NIP 197003261998031007

RENCANA KERJA

KAPANEWON KALIBAWANG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun periode tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pertanggungjawaban APBD.

Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan pembangunan berikut kerangka pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan. Kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan perencanaan di tahun mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahapan selanjutnya.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 ini bermanfaat bagi Kapanewon Kalibawang, dinas/ instansi pengambil kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah serta masyarakat pada umumnya.

Kalibawang, 2 Agustus 2024

Panewu,

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON KALIBAWANG

RISDIYANTO NGROHO, S.STP., M.Eng.
NIP. 19770628199612100[illegible]

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daera..... 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD... 15

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 28

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....….. 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja PD……. 29

3.3. Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…… 35

BAB V PENUTUP ……..... 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pertanggungjawaban APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kapanewon Kalibawang sebagai salah satu Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, serta berpedoman pada Perubahan Renstra Strategis Perangkat Daerah 2023-2026. Disamping itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo pada rumusan program dan kegiatan tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan dokumen Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan,

yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Kalibawang.

1.2 . Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra PD/ Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara vertikal ke atas dengan RKPD Kabupaten, Provinsi, Kementerian dan Lembaga, serta ke bawah dengan RKP kalurahan.
2. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara horisontal dengan Pemerintah Daerah/ organisasi lain.
3. Untuk mewujudkan keterpaduan antar program dan kegiatan.
4. Untuk mewujudkan pedoman dan dasar hukum, pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Untuk mewujudkan tolok ukur keberhasilan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditinjau dari segi perencanaan.
7. Untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta menjawab

pertanyaan apa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

8. Untuk mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah, serta pembaharuan kebijakan program, kegiatan, dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
1.2.Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analiasis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4.Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Penelahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2023 melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja Kapanewon Kalibawang didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci sebagaimana dalam **Tabel II.1** berikut ini:

Tabel II.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25	90,952
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	97,37	97,37

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kalibawang pada tahun 2023 sebagaimana dalam **Tabel II.2** berikut ini:

Tabel II.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kalibawang

Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92,11 %	92,11 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	100 %

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel II.3** berikut :

Tabel II.3

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Kalibawang

1	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatatan Tahun (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1316 orang/bulan	322/orang bulan	322/orang bulan	322/orang bulan	100	280 /orang bulan	924 orang/ bulan	45,74

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelasksanaan tugas ASN	48 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	28 Laporan	50
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	5 dokumen	55,56
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dok	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	42 dokumen	50
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penambahan Aset	9 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	3 unit	33,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	32 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	8 unit	16 unit	50

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	20 dokumen	40 dokumen	20
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	114 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	27 Laporan	54 Laporan	47,37
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Disedakan	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	50
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Penngkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Lapiran Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	50
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Perentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100	12 laporan	23 laporan	48,94
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440 orang	110 orang	110 orang	110 orang	100	110 orang	220 orang	50
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	100	23 laporan	46 laporan	50
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan									
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	50
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan									
	Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya									
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	50

a) Program yang dilaksanakan mendasar pada Perubahan Renstra 2023-2026 Kapanewon Kalibawang menjadi 7 Program terbagi dalam 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhinya kinerja hasil/keluaran dari berbagai program dan kegiatan tersebut atas, antara lain : adanya komitmen bersama seluruh pimpinan dan staf (aparatur) Kapanewon Kalibawang untuk mencapai target kinerja secara optimal, mantapnya koordinasi, pengendalian, sinkronisasi dan simplifikasi dengan berbagai unit kerja/ Perangkat Daerah lain, forkompimkap, pemerintah kalurahan, lembaga-lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun warga masyarakat pada umumnya.

c) Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama perubahan rencana strategis Kapanewon Kalibawang diimplementasikan dan berdasarkan penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa rencana kerja tahun 2023 dapat direalisasikan dengan optimal. Namun harus diakui bahwa kegiatan yang terdanai dalam APBD Kabupaten Kulon Progo masih terbatas yang belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon yang cenderung semakin bertambah.

d) Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Dengan mengetahui faktor penyebab dan implikasinya terhadap capaian tersebut, maka tindakan yang harus diambil guna penyempurnaan perencanaan dan penganggaran ke depan adalah :

1. Dinamika tugas pokok dan fungsi kapanewon, kebijakan pemerintah daerah, maupun perubahan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan serta dijadikan landasan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan merujuk pada Perubahan Renstra 2023-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Dalam penyusunan kerangka pendanaan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi kerja Perangkat Daerah atau dengan kata lain anggaran harus berbasis kinerja. Disisi lain harus diperkuat sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga dapat dipastikan bahwa

pengelolaan anggaran Perangkat Daerah dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

3. Aspek sumberdaya manusia aparatur harus diperkuat dengan melaksanakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan disiplin serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan / atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon, Kapanewon juga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/ atau kelurahan.
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendasar pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, Panewu mendapat pendelegasian sebagian kewenangan berbagai aspek kewenangan meliputi:

a. 1. Perizinan
   2. Non Perizinan
   3. Koordinasi
   4. Pembinaan
   5. Pengawasan
   6. Fasilitasi
   7. Penetapan
   8. Penyelenggaraan
b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ Kelurahan
c. Tugas Pembantuan
d. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kalibawang merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kalibawang dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo.

Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi kapanewon dan kalurahan.

Penyajian tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan disajikan pada **Tabel II.4** berikut.

Tabel II.4

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON KALIBAWANG

KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-	Proyeksi Capaian pada Tahun ke-		
				2022 (transisi)	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81,26	84,25	84,50	84,75	85,00	90,952	84,50	84,75	85,00
2	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			94,12	97,37	98,07	99,12	100,00	97,37	98,25	99,12	100,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, Panewu juga melaksanakan fungsi umum pemerintahan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tantangan permasalahan yang terjadi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

a. Ketersediaan ASN belum sesuai analis jabatan dan analis beban kerja
b. Kualitas dan kuantitas sarana kerja yang belum memadai.
c. Kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.
d. Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon Kalibawang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pendopo, rumah dinas dan gedung pertemuan, sehingga kerusakan yang ada tidak bisa tertangani.
e. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.
f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan belum berjalan dengan optimal
g. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi, maka membawa dampak dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Dalam ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon tentunya juga akan terkendala jika kondisi aparatur penyelenggara pemerintahan masih kurang optimal dari segi kualitas dan kompetensi maupun kuantitasnya, serta kurang memadainya sarana prasarana kerja.

Sesuai dengan perkembangan kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Kapanewon yang perlu diperhatikan ke depan adalah adanya kecenderungan semakin bertambahnya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari bupati kepada panewu serta penetapan kapanewon sebagai basis pelayanan publik.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dianalisis secara garis besar terdapat sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada saat ini

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kekuatan :
   a. Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam berbagai aspek pelayanan publik;
   b. Kewenangan yang luas yang tercermin dalam tugas pokok dan fungsi organisasi;
   c. Komitmen yang kuat antar aparatur untuk mencapai tujuan bersama;
   d. Iklim/suasana kerja yang cukup kondusif untuk pengembangan kualitas aparatur dan budaya kerja yang mendukung.
2. Kelemahan :
   a. Kurang memadainya sarana prasarana pendukung kelancaran kerja dan pelayanan.
   b. Kinerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
   c. Kualitas dan kompetensi pegawai yang masih kurang.
3. Peluang :
   a. Potensi aparatur yang masih dapat dikembangkan.
   b. Perkembangan sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan prima.
   c. Potensi Kapanewon Kalibawang cukup besar, seperti hamparan tanah pertanian/sawah yang luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
   d. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kabupaten Kulon Progo bagian utara, yang mana pada saat ini telah dibangun Gerbang Samudera Raksa, untuk selanjutnya dikembangkan sebagai satu obyek pariwisata dan pentas kebudayaan.
4. Tantangan :
   a. Tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin tinggi dan transparan.
   b. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan semakin berkurangnya jumlah ASN.
   c. Perkembangan berbagai kebijakan pemerintah yang perlu segera respon dan tindak lanjut.

Berdasarkan kajian tentang isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut diatas, maka perlu diberikan catatan dan rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas aparatur.
2. Tuntutan untuk merespon berbagai perkembangan terkait dengan dinamika

pelayanan publik dalam rangka mewujudkan *good public governance*, terutama keterbukaan informasi publik.

3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja untuk memberikan pelayanan publik yang unggul.
4. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban
5. Potensi Kapanewon Kalibawang cukup besar, seperti hamparan tanah pertanian/sawah yang luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo dari utara
7. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban

2.4. Reviu terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Kalibawang. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat **Tabel II.5** berikut :

Tabel II.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya				**100.000.000**	***Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya***				**100.000.000**	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	SEKRETARIAT DAERAH					**SEKRETARIAT DAERAH**					
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**26.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**26.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				***26.000.000***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***				***26.000.000***	
	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan	3 dokumen	26.000.000	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan	3 dokumen	26.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**1.714.195.924**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan**		**1.710.304.324**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				***15.925.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***15.925.000***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 dokumen	11.925.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 dokumen	11.925.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.409.549.954**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**1.409.549.954**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280 orang / bulan	1.371.874.254	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280 orang / bulan	1.371.874.254	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	33.675.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	33.675.700	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 laporan	4.000. 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	14 laporan	4.000. 000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**39.821.600**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**35.920.800**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	17.721.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	14.020.800	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kalibawang	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	21.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kalibawang	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	21.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**61.471.836**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				**61.471.836**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 paket	61.471.836	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 paket	61.471.836	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**82.315.867**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				**82.315.867**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kap.	Jumlah Laporan Penyediaan	12	26.867.851	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kap.	Jumlah Laporan	12 laporan	26.867.851	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sumber Daya Air dan Listrik	Kalibawang	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		Sumber Daya Air dan Listrik	Kaliba wang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	55.448.016	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kaliba wang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	55.448.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**105.120.867**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**105.120.867**	
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kalibawang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	80.384.367	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kaliba wang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	80.384.367	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	7.394.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kaliba wang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	7.394.800	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kap. Kalibawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	21 unit	17.341.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kap. Kaliba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	21 unit	17.341.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya	wang	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			
IV	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**		**39.865.500**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**		**39.511.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**31.059.100**	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***				**30.705.100**	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	11.679.100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	11.528.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Dokumen	19.380.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Dokumen	19.176.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**8.806.400**	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***				**8.806.400**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	8.806.400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	8.806.400	
V	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**27.509.500**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**27.509.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**27.509.500**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***				**27.509.500**	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	27.700.300	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	27.509.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**64.590.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**64.500.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah				***64.590.000***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***				***64.500.800***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kalibawang	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 orang	33.781.900	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kalibawang	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 orang	33.781.900	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	30.808.100	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	30.718.900	
VII	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**25.465.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**25.465.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				***25.465.000***	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***				***25.465.000***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	25.465.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	25.465.000	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**1.997.625.924**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**1.993.921.124**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan (masyarakat) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mulai tahap musyarawah pembangunan pedukuhan, dilanjutkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) tingkat Desa, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses pelaksanaannya mengedepankan pada perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur / lembaga dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.

Selanjutnya telah dihasilkan kesepakatan usulan program/kegiatan hasil musrenbang desa untuk dibawa musrenbang tingkat Kapanewon dan wakil delegasi peserta Musrenbang Tingkat Kapanewon.

Secara substantif usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seluruhnya masih dalam ruang lingkup atau ranah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kalibawang. Sehingga usulan tersebut layak untuk dilanjutkan pada tahap Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat hasil Musrenbang Kapanewon Kalibawang Tahun 2024 sebagaimana **Tabel II.6** berikut :

Tabel II.6
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tujuan Kapanewon Kalibawang sesuai dengan sasaran RKPD Tahun 2025 adalah **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"**

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan kapanewon kalibawang sekaligus mendasar pada sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang tahun 2025 adalah sebagaimana **Tabel III.1** berikut :

TABEL III.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KAPANEWON KALIBAWANG
TAHUN 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	A
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75
			Persentse peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99,12

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kapanewon Kalibawang merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebagai mana **Tabel III.2** berikut:

Tabel III.2

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 Mengacu Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo

No	Urusan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100 %**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**100.000.000**	
	Gelar Budaya Jogja	Kap.Kalibawang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**223.357.534**	RKA SKPD-Sistem SIPD-RI masuk pada kelompok Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, seharusnya pada kelompok urusan Kewilayahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2 Laporan (4 Paket,12 Laporan)**	**35.920.800**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap.Kalibawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.020.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap.Kalibawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	21.900.000	

			dan Konsultasi SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**82.315.867**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.867.851	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	55.448.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan (30 Unit)**	**105.120.867**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Kali bawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	80.384.367	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.394.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	17.341.700	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100 %**	**26.000.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**3 Dokumen**	**26.000.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap.Kali bawang	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	26.000.000	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.486.946.790**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**2 Dokumen, 21 Laporan**	**15.925.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.925.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu**	**280 Orang/Bulan,12 Dokumen, 14 Laporan**	**1.409.549.954**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap.Kali bawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	280 Orang/bulan	1.371.874.254	
			Tunjangan ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	33.675.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan yang Disediakan**	**3 Unit**	**61.471.836**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	61.471.836	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan**	**100 %**	**39.511.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5 Laporan, 6 Dokumen**	**30.705.100**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	5 Laporan	11.528.300	

	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	19.176.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**8.806.8400**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.806.400	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100 %**	**27.509.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**8 Laporan**	**27.509.500**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	27.509.500	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97,37 %**	**64.500.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**35 Orang, 6 Laporan**	**64.500.800**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap.Kali bawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	33.781.900	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	6 Laporan	30.718.900	

			Perundang-Undangan			
VII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**25.465.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**7 Laporan**	**25.465.000,00**	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	25.465.000,00	
					1.993.291.124	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, maka selanjutnya disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Rencana Kerja Tahun 2025 dari Anggaran APBD Murni dan Dais adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program sebanyak 7 jenis
2) Jumlah kegiatan sebanyak 13 jenis
3) Jumlah sub kegiatan sebanyak 22 jenis
4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sejumlah Rp. 1.993.291.124,-, terdiri dari :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.371.874.254,-
   -Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal sebesar Rp. 495.416.870,-
   -TU/ Dais Kelembagaan dan Kebudayaan sebesar Rp. 126.000.000,-

Rincian Program dan Kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel IV** berikut ini :

Tabel IV

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kapanewon Kalibawang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kapanewon Kalibawang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluar - an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1.993.291.124**					**2.094.143.448**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.710.304.324**					**1.771.783.439**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15.925.000**					**11.000.000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	23 Dokumen	11.925.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	21 Laporan	23 Dokumen	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.409.549.954**					**1.455.545.695**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	280 Orang/bulan	14 Laporan	1.371.874.254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.411.119.995

1.

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	14 Laporan	33.675.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.425.700
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	14 Laporan	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**35.920.800**					**40.526.600**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	2 Laporan	14.020.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.626.600
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	21.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.900.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**61.471.836**					**68.433.397**
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan yang Disediakan	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket, 5 Unit	1 Laporan	61.471.836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	68.433.397

1.

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**82.315.867**					**86.764.280**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	24 Laporan	26.867.851	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.959.704
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	24 Laporan	55.448.016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.804.576
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**105.120.867**					**109.513.467**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	3 Laporan	80.384.367	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	80.384.367
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	3 Laporan	7.394.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.787.400
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	21 Unit	3 Laporan	17.341.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	17.341.700
' 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**39.511.500**					**40.741.909**
7.07.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**30.705.100**					**31.059.100**

1.

7 01 02 2 01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan	11.528.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27 Laporan	11.679.100
7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	19.176.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	19.380.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8.806.400**					**9.682.809**
7 01 02 2 04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8.806.800	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	8.806.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9.682.809

1.

7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**27.509.500**		**24.900.300**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27.509.500**					24.900.300
7 01 03 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	24.900.300	27.509.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.900.300
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**64.500.800**		**91.252.800**
7 01 05 2 01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**64.500.800**					**91.252.800**
7 01 05 2 01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	97,37 %	35 Orang	35 Orang	33.781.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	33.491.300
7 01 05 2 01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	97,37%	6 Laporan	6 Laporan	30.718.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	57.761.500

1.

7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**25.465.000**					**25.465.000**
7 01 2 01 06	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**25.465.000**					**25.465.000**
7 01 06 2 01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	25.465.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	25.465.000
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2.22.08.05	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**26.000.000**					**40.000.000**
4.01.04.5.06	**4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								26.000.000					**40.000.000**
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	26.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000
									1.993.291.124					**2.094.143.448**

1.

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pengambilan kebijakan untuk tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini tidak lepas dari peran serta dan tanggung jawab seluruh ASN Kapanewon Kalibawang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Kalibawang, 2 Agustus 2024

Panewu,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG

RISDIYANTO NUGROHO, S.STP., M.Eng.
NIP. 197706281996121001

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sugiman, Watulunyu , Margosari, Pengasih

Telp. (0274) 773837

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen dalam jangka waktu satu tahun mendatang, yaitu tahun 2025 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja untuk dokumen perencanaan satu tahun.

Kerangka sistematika Renja ini disusun mencakup pendahuluan, hasil evaluasi renja perangkat daerah triwualn II tahun 2024, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya. Semoga renja tahun 2025 ini nantinya dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Wates, 2 Agustus 2024
Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUDI HARTONO, S.Si., M.Si.
NIP. 19690318199603 1003

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Sampul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II 2024	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan II 2024 Dan Capaian Renstra	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan fungsi OPD	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	28
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	28
	3.3 Program Dan Kegiatan	30
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V	PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Capaian Realisasi Program/Kegiatan Triwulan IITahun 2024	7
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025	17
Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan tahun 2024	27
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran	28
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan	31
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun . Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah terdiri atas enam tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat daerah menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Berikut digambarkan keterkaitan antar dokumen perencanaannya.

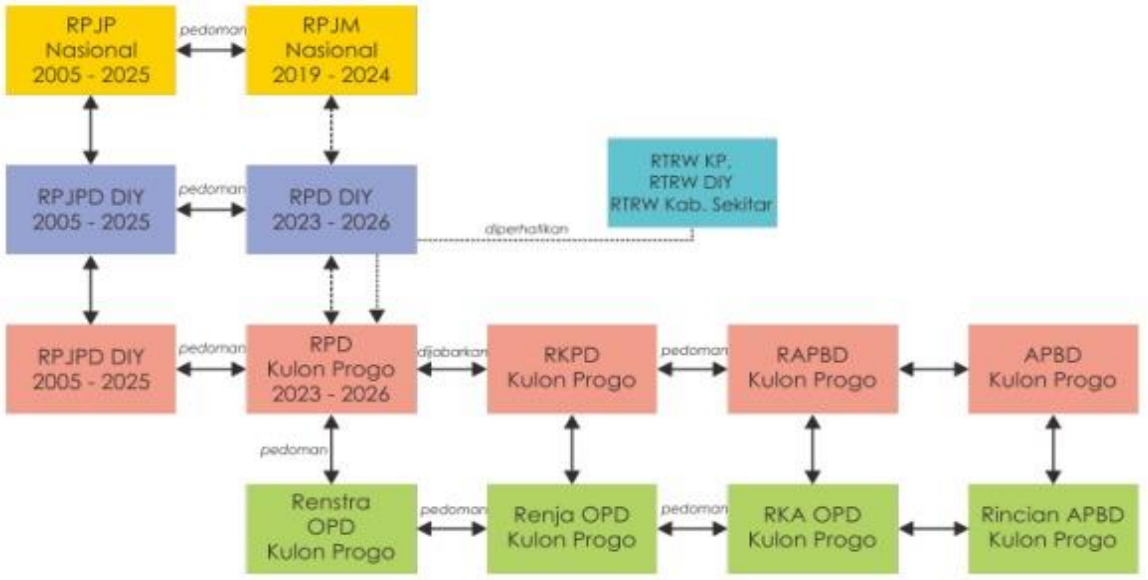

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standard Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata caraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang DaerahTahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2014 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 103).
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026.
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ini disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi terhadap berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

B. Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan

langkah langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada setiap tahun yang dibiayai dengan APBD
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
5. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap RKPD/ Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan II Tahun 2024 Dan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 melaksanakan 6 program , 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN KINERJA S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2024

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2023			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2024	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					**Unsur pemerintahan umum**									
8	**01**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**		**17.523,66**							
8	**01**	**01**			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Persentase peningk penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**7.076,50**					**1.912,95**	7.767,40	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**Jml dokumen perencanaan PD**	*28,25*							
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jml dokumen perencanaan PD	17,00					6,3	4,82	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml laporan Evaluasi kinerja PD	11,25					3,7	2,26	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan PD**	**Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan PD**	*605.307,09*					*1.629,12*	7.638,79	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	605.137,84					1.579	7.616,29	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Jml dok hasil penyediaan adm pelaks tugas ASN	*162,00*					45,9	22,50	
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jml lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koordinasi penysnan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	7,25					3,95	0	
8	**0**	**0**	**2.06**		**Administrasi Umum PD**	**Terselenggaranya koordinasi**	*105,19*					*44,44*	13,46	

	1	**1**				**perangkat daerah**								
8	01	01	2.06	0002	Penyediaaan peralatan dan perlengk ktr	Jml paket peralatan dan perlengk katr yg disediakan	45,39					15,5	6,83	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jm laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	59,80					28,94	6,63	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		5,32					0	0	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaad Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5,32					0	0	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Terselenggaranya kelancaran penunjang urusan umum PD**	*297,84*					*109,79*	52,67	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jml laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	140,79					47,06	16,99	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	157,05					62,73	35,68	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	*317,30*					*119,57*	55,4	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional	Jml kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabtan yg dipelihara dan dibyrkan pjk nya	221,41					85,11	40,05	
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya	Jml sarana dan prasarana gd ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	86,95					34,46	15,35	
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	8,94					0		
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**1.399,36**					**2.372,28**	**395,55**	
8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan masyarakat	686,73					2.372,28	395,55	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jml org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideolodi, wawasan kebangsaan, bela negara,	686,73					2.372,28	395,55	

					Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	karakter bgsa, pembauran kebangsaaan, Bhinneka TunggalIka dan sejarah kebangsaan								
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**3.687,13**					**142,51**	27.333,15	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya peningkatan pendidikan politik masyarakat daerah	*3.687,13*					**142,51**	27.333,15	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jml org yg mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.687,13					*142,51*	27.333,15	
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase peningkatan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**163,44**					142,51	61,97	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkt pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	*40,06*					*142,51*	61,97	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jml dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	40,06					142,51	61,97	

					Asing di Daerah	Asing di Daerah								
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.390,12**					**355,26**	**103,77**	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						*177,63*	103,77	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml org yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah						177,63	103,77	
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase peningkatan kewadanaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**2.807,11**					**3.426,18**	**3.184,44**	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pengananan Konflik Sosial	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	*2.807,11*					*3.426,18*	3.184,44	
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	875,00					199,17	91,18	
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	875,00					3.089,78	3033,61	

					Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	528,56					137,23	59,65	

2.2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum melaksanakan pelayanan umum pada pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan atau yang diingkat dengan Ormas. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada akhir tahun 2023 terdapat 145 Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kulon progo.

Dalam rangka tertib administrasi dan sahnya suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas), Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo memberikan pelayanan kepada Ormas yang akan mengajukan persyaratan guna mendapatkan Surat Ketetapan Terdaftar dari Kemendagri.

Terhadap Ormas yang mengajukan permohonan, Badan Kesbangpol memverifikasi berkas ajuan, cek di lapangan serta membuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan administrasi (ULA) di Jakarta.

Disamping pelayanan permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas, Badan Kesbangpol juga memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun instansi terkait yang membutuhkan data/informasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025 n+1	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Jumlah ormas yang dilaksanakan monitoring	--	--	64	70	70	80	119	70	65	75	
2.	Jumlah ormas yang tercatat	--	--	119	129	139	145	119	141	145	139	
3.	Jumlah konflik yang terselesaikan	--	--	10	15	20	20	16	6	15	20	
4.	Jumlah potensi konflik yang ada	--	--	10	15	20	20	16	6	15	20	

2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan budaya, beragam suku, agama, ras serta golongan. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah untuk negara Indonesia karena kaya akan keragaman. Namun, tidak menutup kemungkinan juga apabila keragaman tersebut menjadi masalah bagi Indonesia. Keragaman tersebut memungkinkan munculnya sifat etnosentrisme, dimana masyarakat Indonesia akan merasa bahwa golongannya lebih hebat daripada golongan yang lain, sehingga terjadilah intoleransi.

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis.Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerahyang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah,namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Di samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan menjadi faktor diterminan bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam;
2. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;

3. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
4. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme, radikalisme serta kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
5. Masih banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
6. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
7. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
9. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
10. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis
11. Munculnya potensi konflik akibat suhu politik meningkat di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik pada menjelang, saat dan paska pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Melemahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro terhadap kebijakan pemerintah Daerah.
3. Potensi penyebaran faham-faham radikalisme yang menjadi akar timbulnya terorisme.
4. Fanatik yang berlebihan pada satu paham

Peluang Pengembangan :

1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentinganmelalui forum komunikasidiskusi politik
3. Keberagaman dan kebhinekaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dibuat berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.Review terhadap Rancangan Renja tahun 2025 terhadap Ranwal RKPD Kabupaten Kulon Progo, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Ranwal RKPD
Tahun 2025

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	KP	**Persentase peningaktan penunjang urusan pemerintahan Kab/Kota**	100%	**1.771.635.439**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	KP	**Persentase peningaktan penunjang urusan pemerintahan Kab/Kota**	100%	**1.771.635.439**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jml dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu		**17.329.500**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	KP	Jml dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	23 dok	**17.329.500**	
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jml dokumen perencanaan perangkat daerah	2 lap	13.289.400	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jml dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	13.289.400	
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jml laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 lap	4.040.100	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jml laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 lap	4.040.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KP	Jml laporan keuangan yg disampaikan tepat waktu		**1.440.014.274**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	KP	Jml laporan keuangan yg disampaikan tepat waktu		**1.440.014.274**	
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	1.398.562.274	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	19 org	1.398.562.274	
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jml dokumen hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas ASN	12 dok	37.500.000	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jml dokumen hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas ASN	12 dok	37.500.000	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	KP	Jml laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 Lap	3.952.000	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	KP	Jml laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 lap	3.952.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KP	Jml dokumen adm umum		**47.054.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	KP	Jml dokumen adm umum		**47.054.500**	
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jml laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	31.604.000	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jml laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	31.604.000	
	• Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KP	Jml paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	15.450.500	• Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KP	Jml paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	15.450.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KP	**Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**135.392.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KP	**Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**135.392.000**	
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jml kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	9 unit	108.668.700	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jml kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	7 unit	108.668.700	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaranan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KP	Jml sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	25	26.723.300	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KP	Jml sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	unit	26.723.300	
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jml gedung ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	2 unit	8.942.000	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jml gedung ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	0 unit	8.942.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP		100%	**0**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	KP		100 %	**0**	
	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jml unit sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan	2 unit	0	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jml unit sarana dan prasarana gedung ktr atau bangunan	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP			**32.996.100**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	KP			**32.996.100**	
	• Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KP	Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	• Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KP	Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	
	• Pengadaan Mebel	KP	Jml paket mebel yang disediakan	0	0	• Pengadaan Mebel	KP	Tersedianya mebel	0 unit	0	
	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KP	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	32.996.100	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KP	Tersedianya peralatan dan mein lainnya	0	32.996.100	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KP			**98.849.065**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KP			**114.691.034**	
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Jml laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12 Lap	31.547.073	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lsp	47.036.058	
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KP	Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	12 lap	67.301.992	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KP	Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	12 lap	67.654.976	
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	KP	Persentase peningkt penguatan ideologi Pancasila dan akrakter kebangsaan	80 %	**1.269.972.236**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	KP	Persentase peningkt penguatan ideologi Pancasila dan akrakter kebangsaan	80 %	**1.259.043.564**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KP		80 %	**1.269.972.236**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	KP		80 %	**1.259.043.564**	
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	KP	Jml org yg mengikuti kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	500 org	1.269.972.236	• Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	KP	Jml org yg melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	150 org	1.259.043.564	
3	**Program Pembinaan dan Pengembagan Ketahanan Ekonomi,**	KP	**Persentase peningkt pembinaan dan pengembangan**	23,86 %	**134.934.700**	**Program Pembinaan dan Pengembagan Ketahanan Ekonomi,**	KP	**Persentase peningkt Pembinaan dan Pengembagan**	23,86 %	**134.934.700**	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	Sosial dan Budaya		**ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**			**Sosial dan Budaya**		**Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	KP			**134.934.700**	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	KP			**134.934.700**	
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	KP	Jml org yg mengikuti kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	0 org	134.934.700	• Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	KP	Terlaksananaya kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	0 org	134.934.700	
4	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	KP	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	80 %	**1.095.521.496**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	KP	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	80 %	**1.095.521.496**	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	KP		100 %	**1.095.521.496**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	KP		100 %	**1.095.521.496**	
	• Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	1.095.521.49**6**	• Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	370 org	1.095.521.496	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
5	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	KP	**Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	57,55	**146.507.200**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	KP	**Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	57,55	**146.507.200**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KP		57,55 %	**146.507.200**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	KP		57,55 %	**146.507.200**	
	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di DaerahUmum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KP	Jml laporan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di DaerahUmum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 lap	146.507.200	• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di DaerahUmum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KP	Jml laporan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di DaerahUmum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 lap	146.507.2000	
6	**Progr Peningk Kewaspadaan Nas Dan Peningk Kualitas dan Fasilitasi Pengangan Konflik Sosial**	KP	**Persentase Peningk Kewaspadaan Nas Dan Peningk Kualitas dan Fasilt Pengangan Konflik Sosial**	100%	**461.314.200**	**Prog Peningk Kewaspadaan Nas Dan Peningk Kualitas dan Fasilitasi Pengangan Konflik Sosial**	KP	**Persentase Peningk Kewaspadaan Nas Dan Peningk Kualitas dan Fasilt Pengangan Konflik Sosial**	100 %	**461.314.200**	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Soial	KP		100%	**461.314.200**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Soial**	KP		100 %	**461.314.200**	
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360	240.366.200	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 org		

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130	103.445.400	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml org yg mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130 org	103.445.400	
	• Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml lap hsl monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6	117.502.600	• Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	KP	Jml lap hsl monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		117.502.600	

No.	Rancangan Ranwal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Cattn Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.879.885.271**					**4.879.885.271**	
	• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Jml dokumen hasil pelaksanaan forum forkopimda kab/kota	12	125.995.000	• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Jml dokumen hasil pelaksanaan forum forkopimda kab/kota	6 dok	119.730.000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Dengan melihat kondisi di masyarakat, dengan masih belum optimalnya pendidikan karakter masyarakat, dipandang perlu adanya penguatan nilai -nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan di Kabupaten Kulon Progo. Karena pendidikan karakter masyarakat dirasa menjadi hal yang super prioritas. Oleh karena itu terdapat beberapa pokok pikiran anggota DPRD menggagas perlunya peningkatan pendidikan karakter melalui sosialisasi penguatan ideologi Pancasla, wawasan kebangsaan, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**KP**	**Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**13.999.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			13.999.000	
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jml org yg mengikuti kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	13.999.000	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KP	**Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**363.974.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			**363.974.000**	
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	KP	Jml org yg mengikuti kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	363.974.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, selaras dengan prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, prioritas pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
b. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Sasaran

a. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
b. Meningkatnya penyelesaian konflik sosial

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target tersajipada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Periode Renstra 2023 -2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata persentase pencapaian program pada masing – masing sekretariat perangkat	100 %

					daerah	
2.	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang konduif.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	100 %	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase penanganan konflik terhadap konflik yang ada	81,03 %

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.879.885.271,- sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegtn	Indikator program/kegiatan/sub kegtn	Rencana Tahun 2025				Cattn Penting	Perkiraan Maju Rencana 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
8					**Unsur pemerintahan umum**								
8	**01**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**				**4.879.885.211**				**4.065.459.434**
8	**01**	**01**			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Persentase peningk penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**		**100%**	**1.771.635.439**	**PAD**			**1.777.758.273.000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**Jml dokumen perencanaan PD**	Kab KP	**25 dok**	**17.329.500**	**PAD**			**7.500.000**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jml dokumen perencanaan PD	Kab KP	4 dok	13.289.400	**PAD**			4.500.000
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml laporan Evaluasi kinerja PD	Kab KP	21 Lap	4040100	**PAD**			3.000.000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan PD**	**Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan PD**	Kab KP	**100%**	**1.440.014.274**	**PAD**			**1.561.044.273.000**
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab KP	18/Bln	1.398.562.274	**PAD**			1.518.744.273.000
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Jml dok hasil penyediaan adm pelaks tugas ASN	Kab KP	12 Dok	37.500.000	**PAD**			40.500.000
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jml lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koordinasi penysnan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab KP	14 Laporan	3.952.000	**PAD**			1.800.000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum PD**	**Terselenggaranya koordinasi perangkat daerah**	Kab KP	**100%**	**47.054.500**	**PAD**			**28.500.000**
8	01	01	2.06	0002	Penyediaaan peralatan dan perlengk ktr	Jml paket peralatan dan perlengk katr yg disediakan	Kab KP	4 Paket	15.450.500	**PAD**			12.250.000
8	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jm laporan penyelenggaraan	Kab	12	31604000	**PAD**			16.250.000

	1	1	6	9	SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	KP	Laporan					
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**32.996.100**	**PAD**			
8	01	01	2.07	0006	Pengadaad Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab KP	3 unit	32.996.100	**PAD**			**000**
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Terselenggaranya kelancaran penunjang urusan umum PD**	Kab KP	**100%**	**98849065%**	**PAD**			**89.686.446**
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jml laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kab KP	12 Laporan	31.547.073	**PAD**			37.536.446
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	Kab KP	12 Laporan	67301992	**PAD**			52.150.000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	Kab KP	**100%**	**135.392.000**	**PAD**			**92.000.000**
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jml kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabtan yg dipelihara dan dibyrkan pjk nya	Kab KP	7 Unit	108.668.700	**PAD**			67.900.000
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya	Jml sarana dan prasarana gd ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Kab KP	25 Unit	26.723.300	**PAD**			24.100.000
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	Kab KP	**80%**	**1.269.972.236**	**PAD**			**179.758.715**
8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan masyarakat	Kab KP	100%	1.269.972.236	**PAD**			179.758.715
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jml org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideolodi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bgsa, pembauran kebangsaaan, Bhinneka Tunggallka dan sejarah kebangsaan	Kab KP	528 org	1.269.972.236	**PAD**			179.758.715
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	Kab KP	**80%**	**1.095.521.496**	**PAD**			**965.900.000**

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya peningkatan pendidikan politik masyarakat daerah	Kab KP	100%	1.095.521.496	**PAD**			965.900.000
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jml org yg mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab KP	370 Org	1.095.521.496	**PAD**			965.900.000
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	Kab KP	**57,55%**	**146.507.200**	**PAD**			**10.520.000**
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkt pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kab KP	100%	146.507.200	**PAD**			10.520.000
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab KP	2 dok	146.507.200	**PAD**			10.520.000
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kab KP	**23,86 %**	**134.934.700**	**PAD**			**465.850.000**
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kab KP	100%	134.934.700	**PAD**			465.850.000
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml org yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan	Kab KP	107 org	134.934.700	**PAD**			465.850.000

						narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah								
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase peningkatan kewadanaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	Kab KP	**100%**	**461.314.200**	**PAD**			**592.500.000**
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pengananan Konflik Sosial	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab KP	100%	461.314.200	**PAD**			592.500.000
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab KP	20 Org	240.366.200	**PAD**			225.000.000
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab KP	130 Org	103.445.400	**PAD**			225.000.000
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab KP	6 Dok	117.502.600	**PAD**			142.500.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasar atas sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sub kegiatan yang ada didasarak atas nomenklatur yang telah diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.879.885.271,00							4.065.459.434,81	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.879.885.271,00							4.065.459.434,81	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.879.885.271,00							4.065.459.434,81	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	1.771.635.439,00						-	1.850.930.719,81	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	-			25 Dokumen	17.329.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.289.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.040.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan perangkat daerah*	-			100 %	1.440.014.274,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.561.044.273,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.398.562.274,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.518.744.273,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		40.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.952.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	47.054.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	28.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.450.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		12.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.604.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		16.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	32.996.100,00			-	-	-	-	72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32.996.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	98.849.065,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	89.686.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.547.073,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		37.536.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67.301.992,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		52.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	135.392.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	108.668.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		67.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	26.723.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		24.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan***	**-**			**80 %**	**1.269.972.236,00**						**-**	**179.758.715,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan*	-			100 %	1.269.972.236,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	179.758.715,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				528 Orang	1.269.972.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kesatuan Bangsa dan Politik		179.758.715,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik***	-			**80 %**	**1.095.521.496,00**						-	**965.900.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	-			100 %	1.095.521.496,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	965.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				370 Orang	1.095.521.496,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		965.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	-			**57,55 %**	**146.507.200,00**						-	**10.520.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	-			100 %	146.507.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	146.507.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya***	-			**18,`8 %**	**134.934.700,00**						-	**465.850.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	-			100 %	134.934.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	465.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				107 Orang	134.934.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		465.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial***	-			**100 %**	**461.314.200,00**						-	**592.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			100 %	461.314.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	592.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	240.366.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				130 Orang	103.445.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	117.502.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		142.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							**4.879.885.271,00**							**4.065.459.434,81**	

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai program dan sasaran pembangunan daerah.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya Rancangan rencana Kerja ini digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur Renja, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak hanya pada input, namun pada keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program .

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

Wates, 2 Agustus 2024

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUDI HARTONO, S.Si., M.Si.
NIP. 196903181996031003

RENJA 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092
Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id

TAHUN 2024

D A F T A R I S I

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates	9
	2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates	10
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	14
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	14
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
	4.1 Program dan Kegiatan	15
BAB IV	PENUTUP	19

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Anggaran	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja RSUD Wates	7
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian RENSTRA	8
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates	9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Wates	10
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RSUD Wates	14
Tabel 4.1	Rencana Penganggaran RSUD Wates	17
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Wates Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024 Sumber Dana APBD Kabupaten	19

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,mengamanatkan perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025, RSUD Wates menyusun Renja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026.

Dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026 , Rancangan Akhir RKPD 2025, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya yaitu RAPBD.

RSUD Wates merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tahun 2009, sehingga dokumen perencanaannya telah menyesuaikan dengan peraturan perundangan sebagai BLUD.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 202 adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perumah Sakitan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Standar KegiatanUsaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ResikoSektor Kesehatan;
14. Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Bupati Nomor: 65 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
22. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 546 tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wates.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya di RSUD Wates.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tahunan;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. menjadi acuan pengukuran capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD Wates;

1.4 Sistematika Penulisan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD WATES.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates;
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates;
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

- 4.1. Rencana Kerja;
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP.

B A B I I
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menerangkan bahwa RSUD dengan BLUD menggunakan satu program dengan satu kegiatan, sejak tahun 2014 RSUD Wates sudah menerapkan satu program dan satu kegiatan. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan di RSUD Wates mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2023 RSUD Wates melaksanakan 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan, adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**	**170.526.234.028**	**165.170.860.482**	**94,68%**
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.			
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	37.652.029.000	35.761.390.000	94,98%
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.			
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.	132.874.205.028	129.409.470.482	97,39%

Dari tabel di atas capaian kinerja keuangan RSUD Wates tahun 2023 untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 94,68% , capaian kinerja keuangan ini sangat melebihi target yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 Capaian indikator kinerja RSUD Wates tahun 2023:

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2025
1	Cakupan Kinerja BLUD	%	79	78.45	81,1

Pada tahun 2023 terdapat perubahan indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yaitu Indikator Capaian Kinerja Program RSUD Wates yang semula adalah Capaian Kinerja Mutu dan Manfaat, berubah menjadi Cakupan Kinerja BLUD, perubahan indikator ini mengacu pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 dan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.

Pada tahun 2023 ini capaian Indikator Cakupan Kinerja BLUD teralisasi sebesar 78.45% dari target sebesar 79%, hal ini disebabkan adanya ketidaktercapaian target pada beberapa komponen indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan capaian INM masih terdapat indikasi yang belum mencapai target diantaranya indicator waktu tanggap SC Emergensi, hal ini terjadi karena tim cito tidak berada di tempat atau tempat tinggal yang jauh dari RSUD Wates, Solusi yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait manajemen waktu kesiapan dokter operator serta tim cito, dan melakukan umpan balik terhadap SDM yang terkendala dalam proses pelaksanaan SC Emergensi. Rincian Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Cakupan Kinerja BLUD

N0	INDIKATOR	TARGET (~~%~~) 2023	CAPAIAN (%) 2023
A	**Indikator Kinerja Keuangan**		
1	Rentabilitas/Return on asset	4%	-1,33
2	Likuiditas/Current Ratio	150%	138,56
3	Solvabilitas/Debt to asset ratio	35%	7,8
4	Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran	104%	98,08
B	**Indikator Kinerja Pelayanan**		
5	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (>=80%)	82%	100
6	Kepatuhan identifikasi pasien (100%)	100%	92,38
7	Kepatuhan Kebersihan Tangan (>=85%)	86%	94,02
8	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)	100%	99,46
9	Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS (>= 80%)	81%	96,02
10	Kepatuhan terhadap clinical pathway (>=80%)	81%	93,75
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)	100%	97,88
12	Kepatuhan waktu visite dokter (>=80%)	82%	94,9
13	Kepuasan pasien(>76.61%)	78%	84,04
14	Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%)	100%	100
15	Penundaan operasi elektif (<5%)	5%	0,75
16	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (>80%)	80%	47
17	Waktu tunggu rawat jalan (>=80%)	81%	90,41
	Jumlah A+B	**1349**	**1333,72**
	Rata-Rata	**79%**	**78,45%**

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
	URUSAN WAJIB									
	BIDANG URUSAN KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	80%	82%	94,68%*	100%	83%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Wates	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.									
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.									
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Tahun 2023 s/d 2026.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Wates terdiri dari capaian kinerja berdasar pada indikator kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Selanjutnya tabel 2.5. menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Wates tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasionall	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%		82 %	83 %	84 %	85 %	82%**	0%	84 %	85 %	.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates.

i. Tingkat Kinerja RSUD Wates.

Kinerja RSUD Wates Tahun 2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 82% dari target sebesar 82%, angka capaian merupakan angka sementara, dikarenakan masih dalam proses penghitungan.

ii. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi RSUD Wates.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Wates terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelayanan, antara lain;

1) Sarana prasarana alat kesehatan kurang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2) Akses jalan di sekitar RSUD Wates belum dapat dilalui oleh transportasi umum dari berbagai arah
3) Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan;
4) Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar;
5) Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan;
6) Kebijakan rujukan berjenjang;
7) Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat;
8) Sebagian penduduk Kulon Progo yang belum berpenjaminan;
9) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal;
10) Belum optimalnya Kerjasama yang dibangun antara RSUD Wates dengan institusi Pendidikan
11) Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates
12) Belum efektifnya kegiatan/ program sosialisasi/ promosi layanan RSUD Wates kepada masyarakat luas

Visi RSUD Wates adalah "***Rumah Sakit Rujukan Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pelayanan Berstandar Internasional***". Sedangkan Misi RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah "***Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pendidikan yang Profesional berbasis Kearifan Lokal untuk Kepuasan Pelanggan***".

Dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi RSUD menetapkan motto dan slogan untuk menjadi motivator kerja. Adapun motto di RSUD Wates adalah “Mengutamakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan” , sedangkan slogannya adalah “Ikhlas Sepenuh Hati” . Iklas sepenuh hati dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *I = Iman*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu menjadikan Iman sebagai landasan utama dalam bekerja.
- *K = Konsisten*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu Konsisten dalam memberikan kinerja terbaik sesuai dengan kompetensi masing – masing.
- *H = Handal,* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib menguasai bidang kerja masing – masing dan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dirinya untuk selalu dapat Diandalkan.
- *L = Loyal*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates, memiliki janjidan komitmen terhadap kesetiaan, kejujuran, serta loyal dan menjunjung tinggi institusi.
- *A = Akurat* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu mengikuti prosedur dalam bekerja, menghindari kesalahan baik data maupuntindakan serta selalu menyajikan data dengan lengkap dan tepat.
- *S = Sigap* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan baik internal

  maupun eksternal dengan sigap, cepat dan disiplin serta menyenangkanbagi pelanggan.
- IKHLAS sebagaiman telah dijabarkan di atas dilaksanakan dengan sepenuhhari.

3. Formulasi Isu-isu Penting.

Beberapa isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain:

1. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologikedokteran dan kesehatan;
2. Rumah Sakit Unggulan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional;
3. Pengembangan layanan RSUD Wates;
4. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
5. Sebagai RSUD dengan 8 layanan prioritas nasional dari Kementerian Kesehatan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

RSUD Wates sampai saat ini belum menerima usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, pergururuan tinggi yang disampaikan secara tertulis. Adapun beberapa usulan berdasarkan hasil konsultasi publik/gathering forum OPD bidang kesehatan dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)* dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan untuk perkembangan pelayanan di RSUD Wates yang kemudian ditindaklanjuti melalui program/kegiatan yang sudah direncanakan.

B A B I I I
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan tujuan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur, selain itu dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kecamatan Temon secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan lalulintas, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun internasional sehingga diperlukan sarana prasarana kesehatan unggulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka pengembangan RSUD Wates selama kurun waktu 3 tahun kedepan Tahun 2023-2026, selain dana APBD ditingkat Kabupaten sangat diperlukan dukungan pendanaan baik dari APBD Provinsi maupun APBN, oleh karena itu dalam proses perencanaannya RSUD Wates selalu mengacu pada kebujakan-kebijakan serta prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates tahun 2025 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wates yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD disesuaikan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Wates, kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program dan penyusunan target tahun 2025 harus realistis sehingga capaian kinerja dapat optimal. Berikut tabel tujuan dan sasaran RSUD Wates Tahun 2025.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kinerja BLUD	80%

B A B I V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.
   1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
      Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mendukung pencapai visi dan misi kepala daerah khususnya misi kesatu yaitu “mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya”.
   2) Pencapaian Standar Nasional terkait dengan Indikator Nasional Mutu (INM);
      Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mencapai standar nasional terkait Indikator Nasional Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan Bidang Kesehatan Pasal 32.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
   1) Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
      Tahun 2025 RSUD Wates menerapkan 1 program dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
   2) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi RSUD Wates untuk pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya;
   3) Total Kebutuhan Dana.
      Kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates pada tahun 2025 dipenuhi dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Total anggaran RSUD Wates yang dananya bersumber non BLUD adalah dana untuk membayarkan gaji dan tunjangan bagi PNS, dan diharapkan adanya dana dari APBD DIY, dan Dana APBD Kabupaten Kulon Progo, serta Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat,

sedangkan lainnya bersumber dari dana BLUD RSUD Wates. Target pendapatan BLUD pada Tahun 2023 pada RENSTRA RSUD Wates Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 80.000.000.000, kemudian dirubah pada APBD Tahun 2023 Target ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000.000, dan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 126.926.351.158.

Pada Tahun berjalan Tahun 2024, target pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp. 119.000.000.000, pada Perubahan Renja 2024 pendapatan BLUD diprediksi mengalami peningkatan menjadi Rp. 132.000.000.000,-

Pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 asumsi pendapatan BLUD RSUD Wates di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 88.000.000.000,- namun demikian mendasar pada perubahan target dan realisasi pada tahun 2023 maka asumsi pendapatan BLUD diproyeksikan sebesar Rp. 132.500.000.000,- sehingga rencana belanja seharusnya juga sebesar dana pendapatan yaitu Rp. 132.500.000.000,- rencana anggaran RSUD Wates sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
RENCANA ANGGARAN RSUD WATES TAHUN 2025

No	Uraian		Anggaran Tahun 2025 (Rp.)
1	**Asumsi Pendapatan**		
	A	**Pendapatan dari BLUD ***	**132.500.000.000.00**
		1.Jasa Layanan Kesehatan RSUD	130.713.897.125,00
		2.Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.786.102.875,00
	B	**Hibah**	**0**
	C	**Pendapatan APBD**	**28.942.771.120,00**
		1. Gaji PNS dan Tunjangannya	28.942.771.120,00
		2. Pendampingan DAK	0
		3. Pelayanan Covid-19	0
	D	**Pendapatan APBD DIY**	**0**
		1.Dana BKK	0
	E	**Pendapatan APBN**	**0**
		1.DAK	0
Jumlah Pendapatan (1)			***161.442.771.120.00***
2	**Belanja**		
	Belanja Tidak Langsung		**28.942.771.120,00**
	1	Belanja Gaji PNS dan Tunjangan	28.942.771.120,00
	2	Pembayaran Angsuran dan Bunga Bank	*0*
	Belanja Langsung		**132.500.000.000.00**
	1	Belanja Pegawai BLUD	12.924.205.028,00
	2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.725.794.972,00
	3	Belanja Modal	9.850.000.000
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000
		- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.850.000.000
Jumlah Belanja (2)			***161.442.771.120.00***
Defisit (3) = (1-2)			***0***
3	**Pembiayaan**		
	1. Penerimaan Pinjaman		0
	2. Pembayaran Pokok Pinjaman		0
	3. Pembayaran Bunga Pinjaman		0
	4. Proyeksi Silpa		32.891.085.705.46
Jumlah Pembiayaan (3)			***0***
Surplus/Defisit = (1-(2+3))			**0**

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD/Renstra OPD tahun (2023-2026), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

   Program dan kegiatan RSUD Wates tahun 2025 disesuaikan dengan Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

d. Tabel Rumusan Rencana Program, dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

   Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tabel 4.2., tabel 4.3. dan tabel 4.4.

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD WATES
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

SKPD : RSUD WATES

Sumber Dana : APBD Kabupaten

No	Urusan Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator 2025 (Rp.)	Prakiraan Maju 2026 (Rp.)	Ketrangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Jenis Kegiatan	OPD
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Urusan Kesehatan													
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.													
	Kegaitan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten	Indek Kepuasan Masyarakat	84%	Terlaksananya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 bulan	Dukungan 79% terhadap Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates	100%	132.500.000.000	91.000.000.000		RSUD Wates
Jumlah											**132.500.000.000**	**91.000.000.000**		

B A B V
P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Provinsi DIY, APBD Kabupaten, BLUD RSUD Wates, dan APBN. Beberapa hal perlu diperhatikan adalah :

1. Catatan Penting.

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran adalah bahwa RSUD Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan dan ketersediaan dananya tidak seperti OPD pada umumnya di lingkungan pemerintah kabupaten. RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penyusunan Program/Kegitan/Subkegiatan mengacu pada Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   Tahun 2025 RSUD Wates menggunakan satu program, satu kegiatan, dan satu sub kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

   Kaidah pelaksanaan anggaran RSUD Wates akan menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai sumber pendanaannya.

3. Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana tindak lanjut terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates adalah dengan mengoptimalkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat khususnya rujukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kepuasan pelanggan RSUD Wates.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2025 yang telah disusun sebagai pedoman untuk mencapai dan melaksanakan visi, misi, serta tujuan dari RSUD Wates yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bekerja sama, baik masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta dukungan dari seluruh civitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 2 AGUSTUS 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates

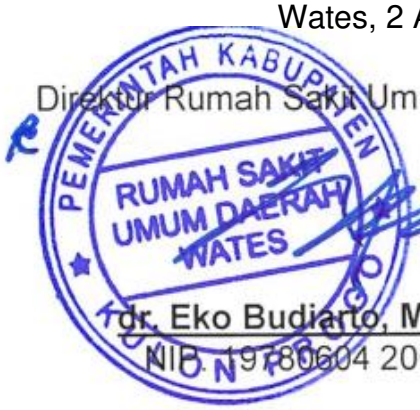

dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An

NIP. 19780604 200312 1 003

RENJA RSUD WATES 2025

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id